

DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)**

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

**RKPD
2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

2022





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023





**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
- d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023
- e. BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. BAB VII Penutup

(2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Kampar tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan :

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal

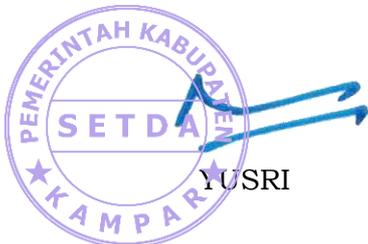
Pj. BUPATI KAMPAR,



Dr. H. KAMSOL, MM

Diundangkan Di Bangkinang
Pada Tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 26



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar 2023 dapat diselesaikan.

Akhir kata semoga dokumen RKPD ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar 2023. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bangkinang, Juli 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



MARDI MARDIANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19850305 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.0 Sejarah Kabupaten Kampar.....	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-2
2.1.2 Demografi.....	II-30
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-36
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-37
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-62
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-76
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-78
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-118
2.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-149
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-161
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-166

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-166
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II-169
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-173
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia.....	II-174
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-179
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-185
2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-185
2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-192
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi EKonomi Tahun 2018-2023.....	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-11
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-24
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-27
3.2.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-28
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-30
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-38
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-7
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	V-1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	V-1
5.2 Program Prioritas Menurut Urusan.....	V-9
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI-1
BAB VII Penutup.....	VII-1
7.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2 Kaidah-kaidah Pendanaan.....	VII-2
Lampiran 1.....	L-1

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	II-2
2.2	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	II-4
2.3	Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-5
2.4	Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-8
2.5	Suhu dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-9
2.6	Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-10
2.7	Curah dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-11
2.8	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-14
2.9	Jenis dan Tingkat Rawan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-15
2.10	Bahaya dan Kapasitas Rawan Bencana di Kabupaten Kampar.....	II-20
2.11	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-29
2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-30
2.13	Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-31
2.14	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-32
2.15	Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-33
2.16	Perkembangan Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-35
2.17	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah).....	II-39

2.18	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%).....	II-40
2.19	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah).....	II-42
2.20	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%).....	II-43
2.21	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dengan Migas Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%).....	II-46
2.22	Perkembangan Inflasi Sektoral Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%).....	II-49
2.23	PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-51
2.24	Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021.....	II-53
2.25	Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-55
2.26	Penduduk Miskin Per Kecamatan Berdasarkan Basis Data Terpadu (BNBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-61
2.27	Perkembangan IPM dan Indikatornya di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-63
2.28	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-65
2.29	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-65
2.30	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021...	II-66
2.31	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-67
2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-67
2.33	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-68
2.34	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-69
2.35	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-70
2.36	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-71
2.37	Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-71

2.38	Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-72
2.39	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-73
2.40	Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-73
2.41	Perkembangan Skor PPH Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-74
2.42	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-74
2.43	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-75
2.44	Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-76
2.45	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-76
2.46	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-77
2.47	Perkembangan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-77
2.48	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-78
2.49	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-79
2.50	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-80
2.51	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-81
2.52	Angka Putus Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-81
2.53	Angka Kelulusan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-82
2.54	Angka Melanjutkan Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-83
2.55	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-83
2.56	Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-84
2.57	Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-85

2.58	Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-86
2.59	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-87
2.60	Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-88
2.61	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-88
2.62	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-89
2.63	Rasio Posyandu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-90
2.64	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-91
2.65	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-91
2.66	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-92
2.67	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-93
2.68	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-93
2.69	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-94
2.70	Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-94
2.71	Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang, Stunting dan Balita Kurus Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-96
2.72	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-97
2.73	Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-97
2.74	Jenis Penyakit yang dilaporkan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-98
2.75	Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-99
2.76	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-100
2.77	Panjang Jalan Provinsi Riau Menurut Kondisi di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-101

2.78	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-101
2.79	Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-102
2.80	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-102
2.81	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-103
2.82	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-103
2.83	Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak (Fasilitas Pengelolaan Air Limbah) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-104
2.84	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-105
2.85	Perkembangan Pembangunan Irigasi Teknis di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-105
2.86	Perkembangan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-106
2.87	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak (AML) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-107
2.88	Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.....	II-108
2.89	Perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-108
2.90	Perkembangan Rasio Bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-109
2.91	Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-111
2.92	Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-111
2.93	Luas Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-112
2.94	Persentase Permukiman Kumuh di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-112
2.95	Perkembangan Persentase Permukiman yang Tertata di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-113
2.96	Perkembangan Lingkungan Sehat dan Dukungan PSU di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-113

2.97	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-115
2.98	Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-116
2.99	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Tertangani Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-117
2.100	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-117
2.101	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-118
2.102	Perkembangan Realisasi Perlindungan dan Keselamatan Pekerja di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-119
2.103	Perkembangan Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-121
2.104	Kesetaraan Gender Siswa SD dan SMP di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-122
2.105	Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-123
2.106	Perkembangan Realisasi Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Beras di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-125
2.107	Perkembangan Realisasi Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-125
2.108	Perkembangan Realisasi Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-127
2.109	Perkembangan Realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-128
2.110	Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-128
2.111	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-129
2.112	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-130
2.113	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-130
2.114	Perkembangan Realisasi Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-131

2.115	Perkembangan Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-131
2.116	Perkembangan Realisasi Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Sudah Ber KTP di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-132
2.117	Perkembangan Realisasi Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-133
2.118	Perkembangan Realisasi LSM Aktif di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-134
2.119	Perkembangan Lembaga Pedesaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-135
2.120	Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-136
2.121	Perkembangan Realisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-138
2.122	Perkembangan Realisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-139
2.123	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-142
2.124	Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-143
2.125	Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-144
2.126	Perkembangan Organisasi Pemuda di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-145
2.127	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-145
2.128	Perkembangan Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-146
2.129	Perkembangan Perangkat Daerah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-147
2.130	Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021....	II-148
2.131	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-148
2.132	Perkembangan Kearsipan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-149
2.133	Produksi Perikanan Menurut Jenis Pengelolaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-149
2.134	Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021..	II-150
2.135	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-150
2.136	Perkembangan Konsumsi Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-151

2.137	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-152
2.138	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-153
2.139	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-153
2.140	Perkembangan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-154
2.141	Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-154
2.142	Perkembangan Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-155
2.143	Produktivitas Padi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-155
2.144	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-156
2.145	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-157
2.146	Populasi Ternak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-158
2.147	Perkembangan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Petani Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-159
2.148	Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-159
2.149	Perkembangan Volume dan Nilai Perdagangan Lokal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-160
2.150	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-160
2.151	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-161
2.152	Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-162
2.153	Perkembangan Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-163
2.154	Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-163
2.155	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-164
2.156	Perkembangan Indikator Pengawasan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-164

2.157	Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-165
2.158	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-165
2.159	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-167
2.160	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-168
2.161	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-168
2.162	Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-169
2.163	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-170
2.164	Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-171
2.165	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-171
2.166	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-172
2.167	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-172
2.168	Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-173
2.169	Angka Kriminalitas Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-173
2.170	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-174
2.171	Perkembangan Realisasi Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-175
2.172	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-176
2.173	Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	II-180
2.174	Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Menurut Kecamatan Kabupaten kampar Tahun 2022.....	II-182

2.175	Evaluasi Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	II-183
2.176	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar.....	II-401
2.177	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-404
2.178	Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-406
2.179	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-409
2.180	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-410
2.181	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Aspek Daya Saing Daerah.....	II-411
3.1	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah).....	III-2
3.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Persen).....	III-3
3.3	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah).....	III-4
3.4	Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2023 (Persen).....	III-5
3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2018-2023 (Persen).....	III-6
3.6	Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023.....	III-8
3.7	Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah).....	III-10
3.8	Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 (Orang).....	III-10
3.9	Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023.....	III-11
3.10	Pengeluaran Perkapita Penduduk Provinsi Riau Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2023.....	III-12
3.11	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-28

3.12	Realisasi, Target dan Proyeksi APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023.....	III-30
3.13	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-34
3.14	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023.....	III-35
3.15	Realisasi, Target dan Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Menurut Perangkat Daerah Tahun 2020-2023 (Rupiah).....	III-39
3.16	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-40
3.17	Realisasi, Target, & Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023.....	III-41
4.1	Visi dan Misi Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau.....	IV-1
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kampar, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJM Nasional.....	IV-3
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau.....	IV-7
4.4	Penyesuaian Terhadap Misi, Prioritas, dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	IV-19
4.5	Hubungan Permasalahan, Isu Strategis, Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	IV-22
4.6	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	IV-35
5.1	Perkiraan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	V-1
5.2	Pagu Anggaran Pembiayaan Menurut Urusan dan OPD Tahun 2023.....	V-2
5.3	Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	V-3
5.4	Rencana Program Prioritas Menurut Urusan Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	V-9
6.1	Indikator dan Terget Kinerja Utama Kabupaten Kampar 2023.....	VI-1
6.2	Indikator dan Terget Kinerja Daerah Kabupaten Kampar 2023.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar.....	I-3
1.2 Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran.....	I-8
2.1 Peta Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-3
2.2 Peta Geologi Kabupaten Kampar.....	II-6
2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Kampar.....	II-8
2.4 Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Bulanan dan Tahunan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-10
2.5 Rata-Rata Curah dan Hari Hujan Bulanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-12
2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar.....	II-13
2.7 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kampar.....	II-16
2.8 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar.....	II-17
2.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kampar.....	II-18
2.10 Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kampar.....	II-18
2.11 Peta Rawan Bencana Evidemi di Kabupaten Kampar.....	II-19
2.12 Peta Rawan Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Kampar.....	II-20
2.13 Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-23
2.14 Perkebunan Karet Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-24
2.15 Perkebunan Kakao Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-25
2.16 Potensi Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-26
2.17 Potensi Peternakan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-26
2.18 Potensi Pertanian Pangan Padi Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-27

2.19	Potensi Hutan Tanaman Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-28
2.20	Piramida Penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021.....	II-36
2.21	Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-38
2.22	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2011-2021.....	II-44
2.23	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-47
2.24	Perkembangan Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021.....	II-48
2.25	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-51
2.26	Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-52
2.27	Posisi Relatif Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-53
2.28	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kampar terhadap Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-56
2.29	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kampar terhadap Indek P0 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-57
2.30	Posisi Relatif Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indek P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-58
2.31	Posisi Relatif Indek Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indek P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-59
2.32	Posisi Relatif Garis Kemiskinan (P3) Kabupaten Kampar terhadap Indek P3 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-60
2.33	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-61
2.34	Perkembangan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-64
2.35	Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	II-181

2.36	Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	II-183
3.1	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen).....	III-8
4.1	Hubungan Prioritas Dengan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023.....	IV-21
4.2	Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023.....	IV-32
4.3	Skema Hubungan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-33
4.4	Kondisi Tahun Berjalan Pengaruh Pandemi Covid-19 Tahun 2020.....	IV-34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu bagian penting dalam siklus perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya. Penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pikir pencapaian sasaran perencanaan pembangunan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dan mendorong terjadinya pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sebagai proses penentuan skala prioritas, menjadi sangat penting dilaksanakan secara efektif agar pengalokasian sumberdaya yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan dapat secara cermat dialokasikan pada program/kegiatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 berpedoman pada RPD tahun 2023-2026, Rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2023, RKP dan Program Strategis asional serta pedoman penyusunan RKPD. Selain itu RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 juga didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP bertujuan untuk menyampaikan rancangan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023, yang selanjutnya menerima saran dan masukan guna penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023. Selanjutnya Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RKPD juga diupayakan untuk diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi yang mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

- 1. Pendekatan teknokratis** (strategis dan berbasis kinerja); Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD/PD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

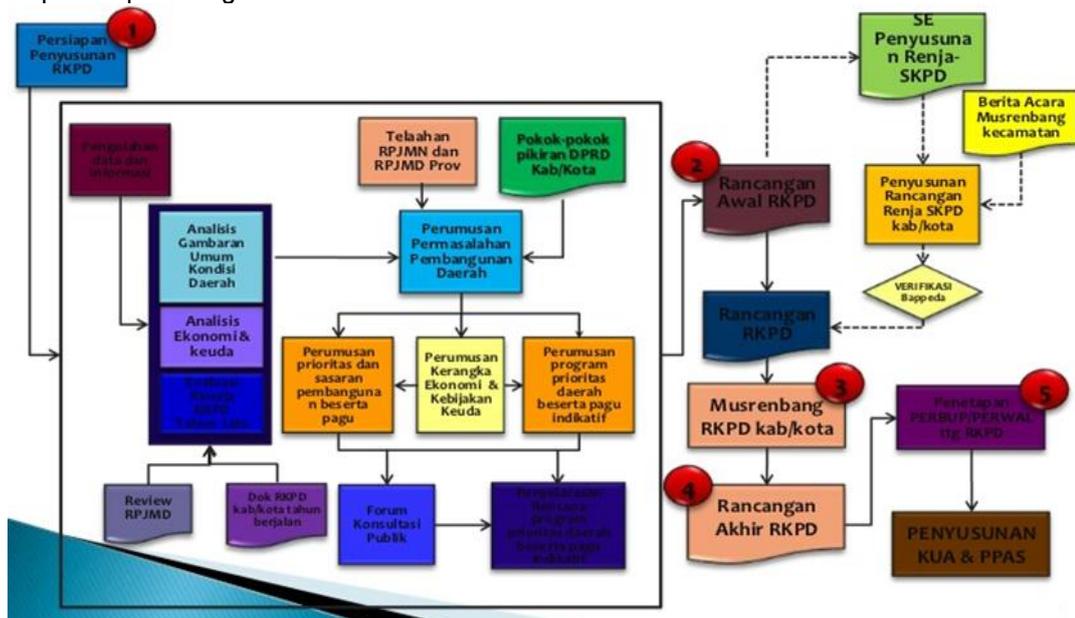
2. **Pendekatan demokratis dan partisipatif**; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
3. **Pendekatan Politis**; Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 dan arahan umum RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Kepala SKPD/PD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023; b) Keterlibatan aktif DPRD termasuk sinergitas hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
4. **Pendekatan Top Down**; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD/PD Provinsi Riau, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPD maupun RPJPD Kabupaten Kampar; c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
5. **Pendekatan Bottom Up**; Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Kampar; b) Memperhatikan hasil Forum Konsultasi Publik dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil FKP dengan SKPD/PD.

Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2023-2026). Selain itu Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 bersifat sangat strategis karena dalam prosesnya telah memasuki tahapan ke-4 dalam pembangunan jangka panjang daerah. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD tahap ke-4 tahun 2020-2024 ini ditujukan untuk ***“Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya dan agamis melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang dilandasi keunggulan komparatif perekonomian daerah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas”***. Penyusunan RKPD tahun 2023 ini menjadi *moment* yang sangat penting untuk mengakumulasi seluruh penilaian capaian kinerja pembangunan daerah tahunan dan sebagai tolok ukur dari keberhasilan RPJMD Tahun

2017-2022 yaitu dengan memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama dalam proses mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 juga disusun berdasarkan pada inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Substansi Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 merupakan acuan bagi SKPD/PD dalam menyusun Renja SKPD/PD disamping sebagai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD/PD. Selanjutnya RKPD tahun 2023 merupakan acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2023. Cakupan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 pada semua bidang pembangunan merupakan dokumen yang efektif sebagai indikator kemajuan proses *learning by doing* penerapan nilai-nilai positif pembangunan, seperti akuntabilitas, kedisiplinan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kualitas jajaran birokrasi diharapkan semakin baik dalam melaksanakan kebijakan melalui keharusan penyusunan rencana kerja pada lembaganya masing-masing.

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen Rancangan Akhir RKPD ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dalam jangka waktu satu tahun. Gambaran tahapan kegiatan penyusunan Rancangan Akhir RKPD disampaikan pada bagan alir berikut.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
19. Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kampar Nomor 20 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
 26. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2022).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

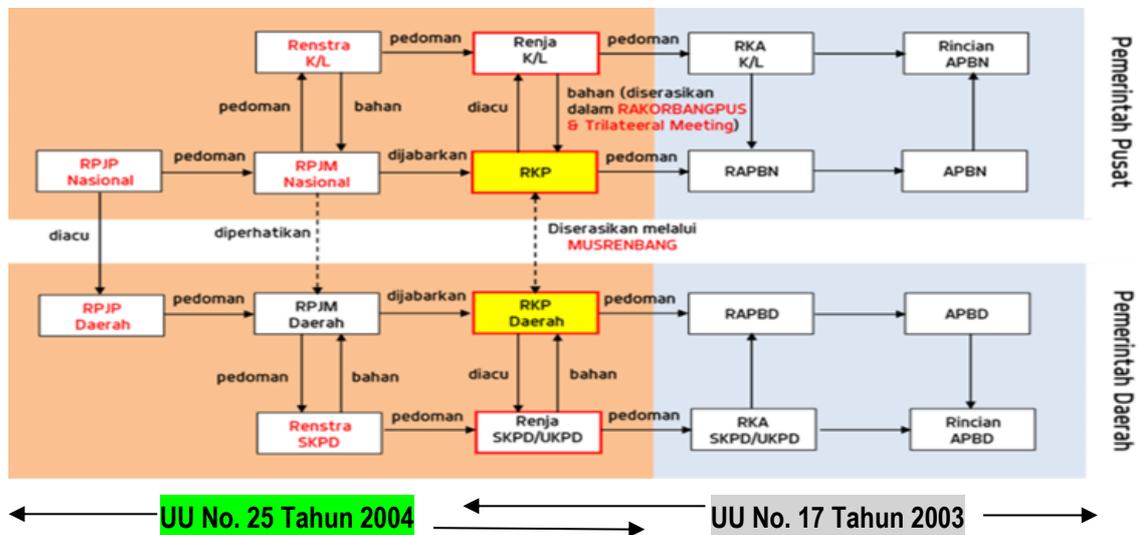
Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kampar dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah:

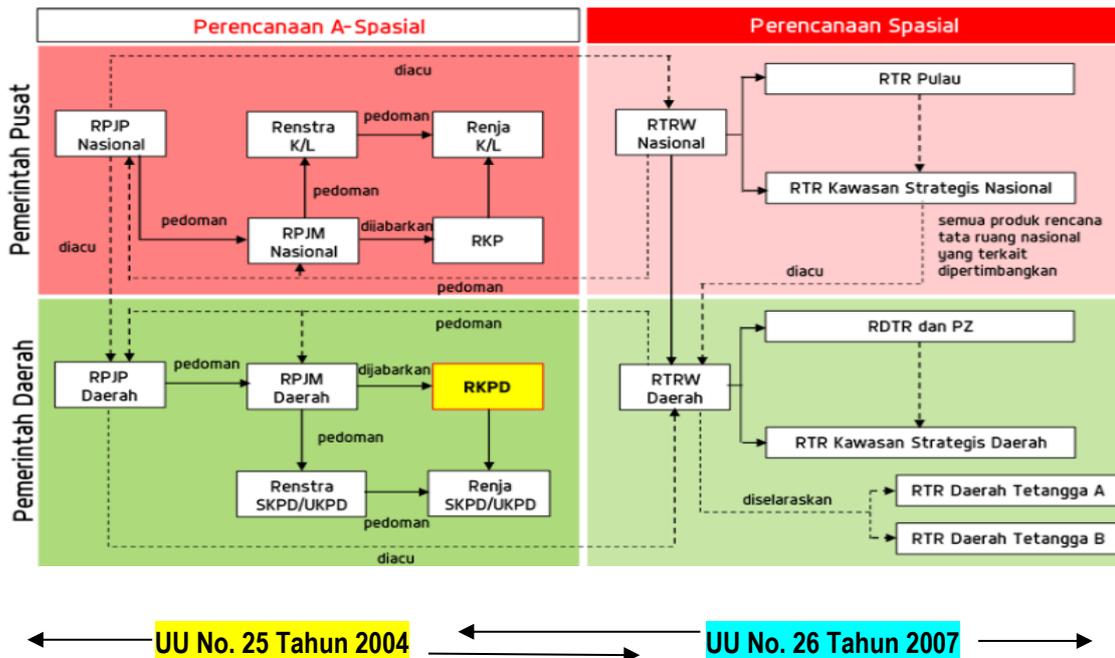
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga tidak bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama namun dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau.
2. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terutama terletak pada visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang, dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat makro sektoral sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.
3. RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD Tahun 2005-2025, dengan mempertimbangkan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD akan diawali oleh Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai salah satu bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, dan disempurnakan menjadi RKPD. Selanjutnya RPKD akan mengacu pada RPD Kabupaten Kampar dan merupakan cikal bakal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Kampar setiap tahunnya.
4. Keberadaan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2023. RPD dan Renstra PD adalah dokumen

perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional (RKP) dan Provinsi Riau (RKPD) menjadi pedoman bagi RKPD Kabupaten. Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

5. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kampar tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026. Kemudian setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Kampar, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kampar Tahun 2023.

Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. Juga terhadap RKPD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tetap mengacu pada RKPD Provinsi Riau dan RKP Nasional. Secara garis besar hubungan antara Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut.





Gambar 1.2
Sistematika Alur Perencanaan Dan Penganggaran

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan arahan umum RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2016 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023;
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan;
5. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2023 mendatang;
2. Menyediakan pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2023, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJP Kabupaten Kampar Tahun 2005 – 2025 dan RPD Kabupaten Kampar, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;

4. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2023;
5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;
6. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
7. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD/PD Kabupaten Kampar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD/PD);
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan;
10. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

1.5. Sistematika Penulisan RKPD

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- Bab 1: Pendahuluan;** Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD
- Bab 2: Gambaran Umum Kondisi Daerah;** yang memuat tentang kondisi umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan.
- Bab 3: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;** Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
- Bab 4: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- Bab 5: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023 berdasarkan urusan.
- Bab 6: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- Bab 7: Penutup;** Berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pendanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.0 Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No.: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No:02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain:

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
2. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruhan wilayah Kabupaten Kampar.
4. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli
6. 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinc Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan

Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar Tahun maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan, hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2022, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar.

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap rawan bencana dan kondisi demografi.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.289,28 km² atau 1.128.928 hektar. Kecamatan Tapung merupakan wilayah terluas yaitu 1.365,97 km² atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan wilayah tersempit dengan luas yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,68% dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021

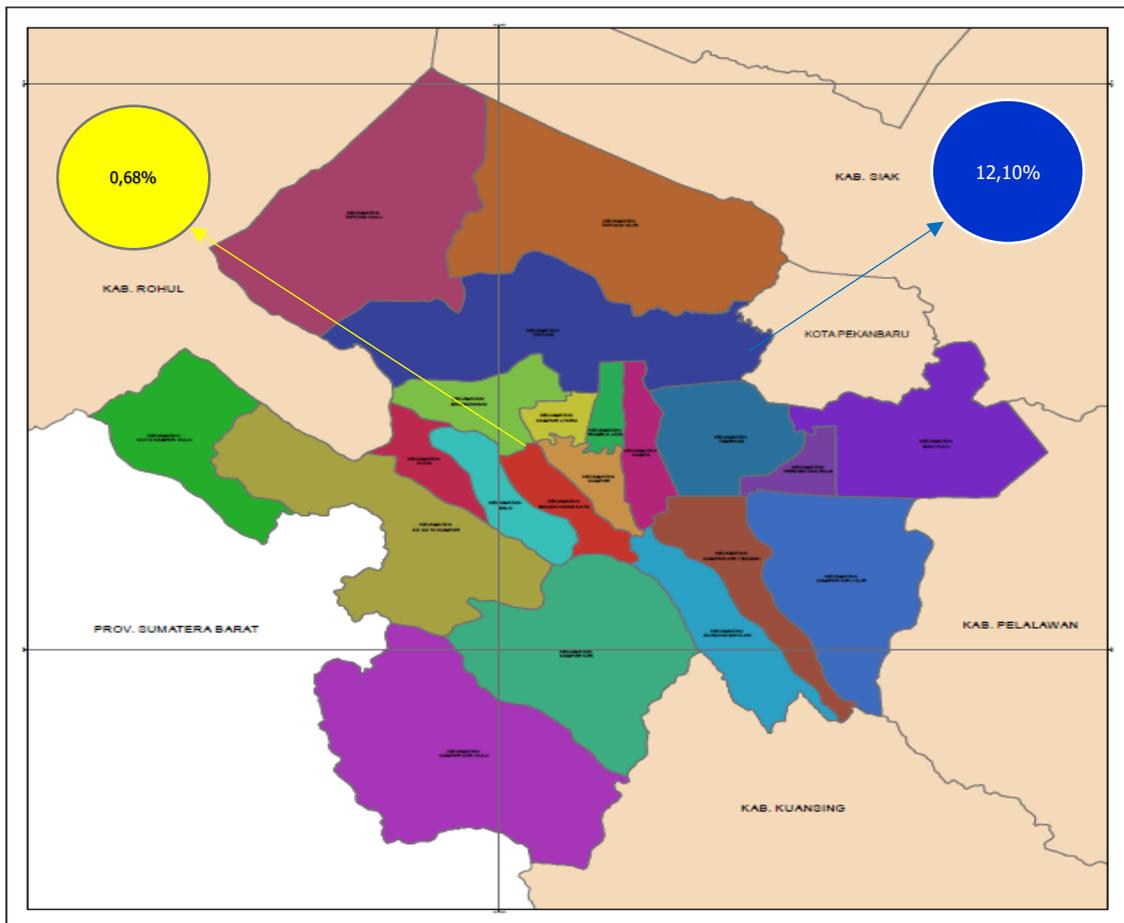
No	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Km ²	Ha	(%)
1	Kampar Kiri	915,33	91.533	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	130.125	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	75.974	6,73
4	Gunung Sahilan	597,97	59.797	5,30
5	Kampar Kiri Tengah	330,59	33.059	2,93
6	XIII Koto Kampar	732,40	73.240	6,49
7	Koto Kampar Hulu	674,00	67.400	5,97
8	Kuok	151,41	15.141	1,34
9	Salo	207,83	20.783	1,84
10	Tapung	1.365,97	136.597	12,10
11	Tapung Hulu	1.169,15	116.915	10,36

No	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Km ²	Ha	(%)
12	Tapung Hilir	1.013,56	101.356	8,98
13	Bangkinang Kota	177,18	17.718	1,57
14	Bangkinang	253,50	25.350	2,25
15	Kampar	136,28	13.628	1,21
16	Kampar Timur	173,08	17.308	1,53
17	Rumbio Jaya	76,92	7.692	0,68
18	Kampar Utara	79,84	7.984	0,71
19	Tambang	371,94	37.194	3,29
20	Siak Hulu	689,80	68.980	6,11
21	Perhentian Raja	111,54	11.154	0,99
Kabupaten Kampar		11.289,28	1.128.928	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 Kecamatan sebagaimana yang terdapat pada Gambar 2.1 dan memiliki 250 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Tapung yaitu sebanyak 25 desa atau 10% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah kecamatan Bangkinang Kota yaitu sebanyak 4 desa atau 1,60% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar. Jumlah desa/kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan			Distribusi (%)
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kampar Kiri	1	20	20	8,00
2	Kampar Kiri Hulu	0	24	24	9,60
3	Kampar Kiri Hilir	1	8	8	3,20
4	Gunung Sahilan	0	11	11	4,40
5	Kampar Kiri Tengah	0	9	9	3,60
6	XIII Koto Kampar	1	13	13	5,20
7	Koto Kampar Hulu	0	6	6	2,40
8	Kuok	0	9	9	3,60
9	Salo	0	6	6	2,40
10	Tapung	0	25	25	10,00
11	Tapung Hulu	0	14	14	5,60
12	Tapung Hilir	0	16	16	6,40
13	Bangkinang Kota	2	4	4	1,60
14	Bangkinang	2	9	9	3,60
15	Kampar	1	18	18	7,20
16	Kampar Timur	0	9	9	3,60
17	Rumbio Jaya	0	7	7	2,80
18	Kampar Utara	0	8	8	3,20
19	Tambang	0	17	17	6,80
20	Siak Hulu	0	12	12	4,80
21	Perhentian Raja	0	5	5	2,00
Kabupaten Kampar		8	250	250	100

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

1) Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01⁰⁰40" Lintang Utara dan 00²⁷00" Lintang Selatan dan antara 100²⁸30" - 101¹⁴30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0⁰. Latitude, Latitude memberikan posisi utara/selatan suatu lokasi dalam referensi dari khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis horizontal yang ditarik di sekitar tengah Bumi yang jaraknya sama dengan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Garis khatulistiwa memiliki garis lintang 0 derajat. Bujur, Bujur memberikan posisi timur/barat dari suatu lokasi. Bujur umumnya diukur dalam derajat dari Prime Meridian.

2) Topografi

Topografi merupakan bentuk rupa permukaan tanah (bumi) dengan mengacu pada kondisi tinggi-rendahnya permukaan tanah tersebut, sehingga secara khusus bisa dikatakan bahwa topografi meletakkan fondasi yang mendasari lanskap. Sebagai contoh, topografi mengacu pada gunung, arti lembah, makna sungai atau kawah di permukaan. Bentuklahan, Bentuklahan yang dipelajari dalam topografi dapat mencakup apa saja yang secara fisik berdampak pada area.

Contohnya termasuk gunung, bukit, lembah, danau, lautan, sungai, kota, bendungan, dan jalan. Ketinggian tempat, gunung dan benda lainnya dicatat sebagai bagian dari topografi dengan mengacu pada permukaan laut (permukaan laut).

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 26-100-meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan dengan ketinggian tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Kampar Hiri Hulu dengan ketinggian 100 mdpl dan kecamatan dengan ketinggian tempat terendah terdapat di Kecamatan Tambang dengan ketinggian 26 mdpl. Ketinggian tempat dapat diukur dengan altimeter. Altimeter dapat memeriksa ketinggian, ketinggian atau koordinat lokalisasi. Manfaat mengetahui ketinggian tempat digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan udara, pengaruh terhadap pertumbuhan dan vegetasi tanaman.

Sedangkan tingkat kemiringan wilayah adalah berkisar antara 0-40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Tabel 2.3
Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian Tempat (mdpl)	Jarak Ibukota (km)	Waktu Tempuh (jam)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	51,00	110,00	1,83
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	100,00	140,00	2,33
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	51,00	85,00	1,42
4	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	51,00	98,00	1,63
5	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	51,00	83,00	1,38
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	85,00	50,00	0,83
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	92,00	65,00	1,08
8	Kuok	Kuok	44,00	10,00	0,17
9	Salo	Salo	40,00	6,00	0,10
10	Tapung	Petapahan	51,00	30,00	0,50
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	50,00	80,00	1,33
12	Tapung Hilir	Kota Garo	48,00	75,00	1,25
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	40,00	0,00	0,00
14	Bangkinang	Muara Uwai	40,00	3,00	0,05
15	Kampar	Air tiris	38,00	10,00	0,17
16	Kampar Timur	Kampar	38,00	25,00	0,42
17	Rumbio Jaya	Teratak	38,00	25,00	0,42
18	Kampar Utara	Sawah	38,00	15,00	0,25
19	Tambang	Sungai Pinang	26,00	34,00	0,57
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	35,00	65,00	1,08
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	35,00	86,00	1,43
Kabupaten Kampar		Bangkinang	40,00	0,00	0,00

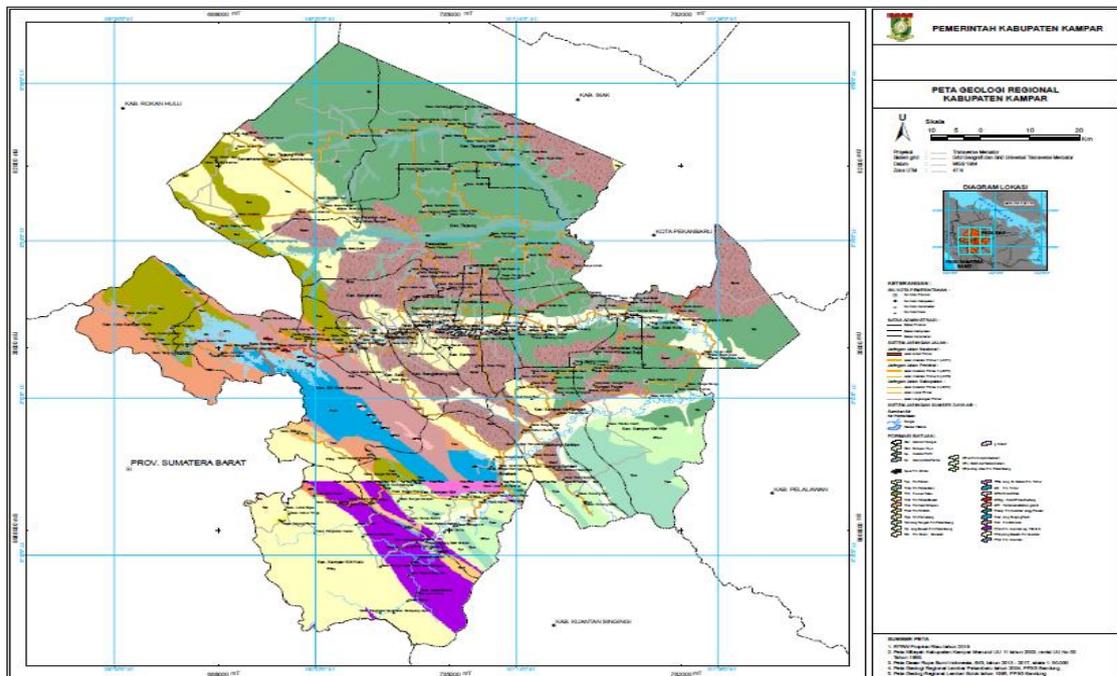
Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Jarak ibu kota kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jarak sejauh 140 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,33 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam. Sedangkan Jarak ibu kota kecamatan terdekat dari ibu kota

Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Bangkinang dengan jarak sejauh 3 km dan dapat ditempuh dalam waktu 0,05 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam, lihat pada Tabel 2.3 di atas.

3) Geologi

Geologi dan geomorfologi Kabupaten Kampar pada umumnya tersusun dari endapan gunung api yang berasal dari gunung api kuarter tua dan gunung api kuarter muda (peta geologi lembar Pekanbaru dan Sri Indrapura, Tanjung Pinang). Proses pelapukan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, temperatur dan kelembaban udara. Jenis geologi yang ada sebagian besar adalah aluvium muda dan patahan (sesar) masih berjalan. Aluvium muda ini merupakan formasi geologi yang terbesar di Kabupaten Kampar dan penyebarannya hampir ada pada seluruh Kecamatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkanis di daerah Sumatra Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Kabupaten Kampar umumnya datar, kecuali sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Kampar

Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Berdasarkan Peta Satuan Lahan dan Tanah lembar Solok (0815) dan Pekanbaru (0816) (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1990), fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup *Kubah Gambut*, *Aluvial*, *Dataran*, *Dataran Tuf Masam*, *Perbukitan*, dan *Pegunungan*.

Grup Kubah Gambut, satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 – 20

meter di atas permukaan laut.

Grup *Alluvial*, satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan *koluviasi*. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan *aluvial*, *koluvial*, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut.

Dataran *Tuf Masam*, merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf *volkanik* masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu kedalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup Dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi Dataran dan Perbukitan. Ketinggian tempat 40-250 meter di atas permukaan laut.

Dataran, daerah yang tidak termasuk grup Dataran *Tuf Masam* karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup Dataran.

Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.

Perbukitan, terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50 -300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan *plutonik* masam.

4) Hidrologi

Hidrologi mempelajari air dalam segala bentuknya pada, dalam atau diatas permukaan tanah termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri. Air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. air mengalir diatas permukaan tanah namun air juga mengalir di dalam tanah. di dalam lingkungan alam, proses, perubahan ujud, gerakan aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di udara) mengikuti suatu siklus keseimbangan yang dikenal dengan siklus hidrologi (Kodatie, 2010). Siklus Hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer kebumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi.

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Tapung) dimanfaatkan untuk jalur perhubungan antar desa. Memiliki dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya:

- 1) Sungai Kampar Tahun mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah Kabupaten Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Tahun Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Sungai Kampar dengan panjang ± 413,5 kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter.
- 2) Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke Sungai Siak. Sungai Siak bagian hulu mempunyai panjang ± 90 kilometer dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter. Berikut Tabel 2.4 Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar.
- 3)

Tabel 2.4
Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar Tahun 2021

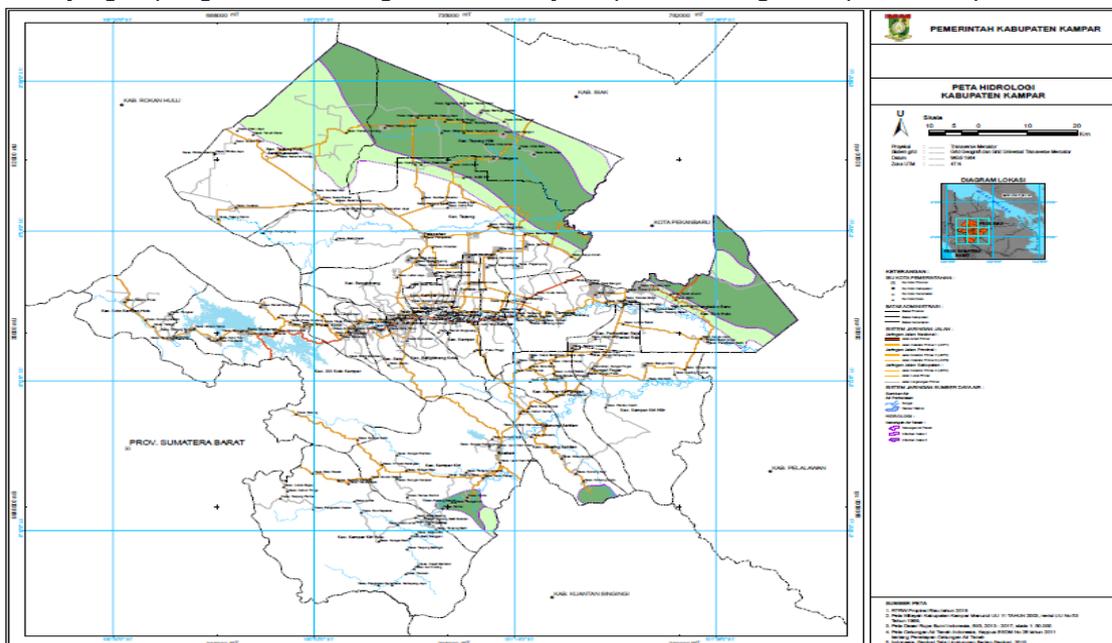
No	Nama Pos Duga Air	Induk Sungai	Data Geografi		Luas Daerah Pengaliran (km ²)
			Lintang	Bujur	
1.	BT. Kampar - D. Bengkuang	BT. Kampar	0°21'00" LU	101°14'00" BT	4.000,00
2.	BT. Kampar-Lipat kain	BT. Rokan	0°00'57" LU	101°11'53" BT	3.431,00
3.	BT KPR Kanan-Mr. Takus	BT. Kampar	0°17'34" LU	101°38'31" BT	1.675,00
4.	BT. Lipai-KB. Durian	BT. Kampar	0°07'50" LU	101°13'55" BT	556,90

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Sungai Kampar merupakan salah satu sungai besar di Pulau Sumatera. Secara administrasi, Sungai Kampar berada di dua provinsi, bagian hulu sungai Kampar terletak di Kabupaten Lima Puluh Koto, Pasaman dan Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan bagian tengah wilayah sungai hingga muara terletak di Provinsi Riau. Sungai Kampar memiliki dua anak sungai, yaitu sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri, bertemu di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Sungai ini memiliki panjang ± 580 km dengan luas daerah aliran sungai (DAS) ± 24.586 km² (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

DAS Kampar telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang alirannya. DAS Kampar tidak saja berarti dalam dimensi fisik, tetapi juga menjadi media interaksi sosial budaya, maka tidak heran jika Asnan (2019) menyebutkan bahwa keberadaan sungai ini sebagai salah satu faktor sejarah pulau Sumatera.

Keragaman komponen ekosistem dan keragaman interaksi yang ada di dalamnya menyebabkan pengelolaan DAS Kampar harus melibatkan banyak pihak. Proses ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebagaimana dinyatakan oleh Lee, et al (2018) bahwa para pihak yang berbeda dapat mempunyai perspektif yang berbeda akan fungsi DAS dan memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan ekologi. Berikut disajikan peta Hidrologi Kabupaten Kampar.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Kampar

Kondisi hidrologi Kabupaten Kampar diperlukan adanya upaya menjaga kewujudkan agar terhindar dari pencemaran, banjir, erosi, abrasi, kekeruhan, dan pendangkalan. Menjaga faktor penyebab kerusakan hidrologi di daerah Kabupaten Kampar dengan konsep pembangunan berkelanjutan terutama pada sector ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam hayati misalnya penggunaan pelet dari keramba jaring apung (KJA), limbah kelapa sawit, dan pembukaan lahan.

5) Klimatologi

Iklim terdiri dari beberapa unsur antara lain: suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tekanan udara, angin, dan lama penyinaran matahari. Berikut ini dijelaskan masing-masing dari unsur-unsur iklim tersebut.

Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyonom (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Kondisi suhu, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.4 berikut.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

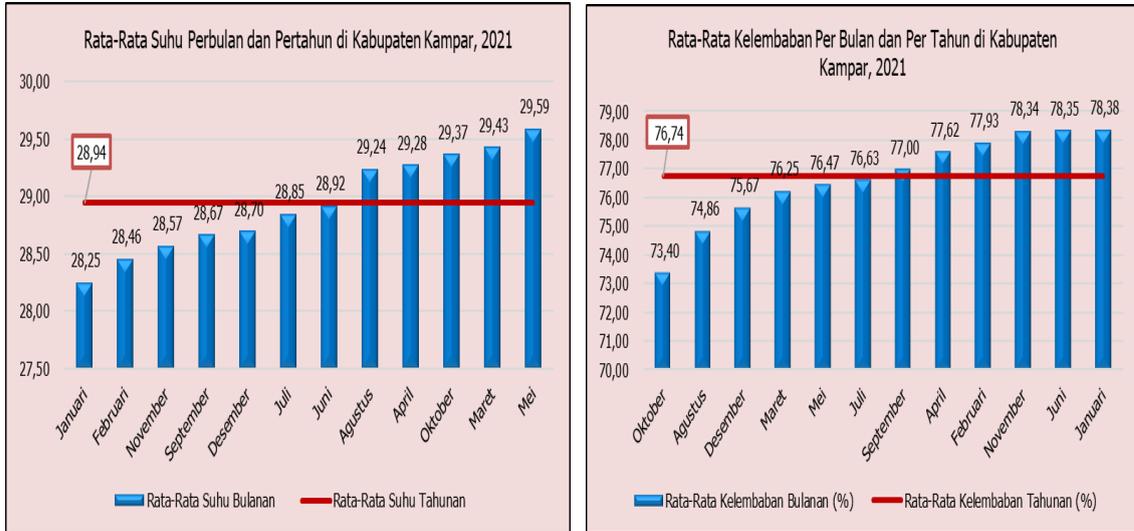
Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	22,20	28,25	33,60	57,00	78,38	99,00
Februari	21,70	28,46	38,00	51,00	77,93	98,00
Maret	22,30	29,43	35,10	54,00	76,25	99,00
April	22,20	29,28	35,20	54,00	77,62	99,00
Mei	22,40	29,59	35,80	51,00	76,47	98,00
Juni	21,40	28,92	33,80	58,00	78,35	100,00
Juli	21,40	28,85	34,00	48,00	76,63	98,00
Agustus	22,00	29,24	36,20	48,00	74,86	98,00
September	22,40	28,67	34,00	54,00	77,00	98,00
Oktober	22,20	29,37	34,20	43,00	73,40	99,00
November	22,40	28,57	33,60	55,00	78,34	98,00
Desember	20,00	28,70	34,00	54,00	75,67	98,00
Rata-Rata	21,88	28,94	34,79	52,25	76,74	98,50

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Suhu udara sangat berperan dalam penguapan air dan juga kemampuan menahan air di udara serta proses kimia di udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi tingkat penguapan air, semakin tinggi uap air yang ditahan di udara dan semakin cepat reaksi kimia. Wilayah Kabupaten Kampar termasuk dalam iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 28,94°C, sedangkan suhu rata-rata minimum berkisar 21,88°C dengan suhu terendah terjadi pada bulan Desember yaitu 20,00°C. Sedangkan suhu rata-rata maksimum adalah setinggi 34,79°C dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 38,00°C.

Kelembaban udara merupakan jumlah kandungan uap air yang terdapat di dalam udara. Kabupaten Kampar berada pada kondisi kelembaban nisbi, rata-rata 76,74% dengan kelembaban rata-rata minimum 43,00% dan terjadi pada bulan Oktober. Kelembaban udara merupakan salah satu keadaan udara yang banyak diperhatikan oleh manusia. Hal ini karena kelembaban udara sendiri dapat mempengaruhi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia, antara lain: salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman, menjaga kestabilan kesehatan tubuh,

menjaga suhu Bumi agar tidak terlalu panas, dan menjaga keawetan dan kualitas barang-barang tertentu. Kelembaban tertinggi yaitu 100,00% dan terjadi bulan Juni. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4
Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Bulanan dan Tahunan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi dikarenakan daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung 5,6 air sebanyak satu liter.

Tabel 2.6
Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari/bulan)	Penyinaran (%)
Januari	154,10	15,00	46,35
Februari	108,20	13,00	46,20
Maret	129,60	12,00	62,05
April	280,90	17,00	61,59
Mei	168,10	11,00	64,65
Juni	189,90	11,00	60,89
Juli	251,60	11,00	69,47
Agustus	223,30	10,00	73,21
September	257,60	19,00	44,69
Oktober	266,70	14,00	51,21
November	308,50	24,00	44,11
Desember	138,30	15,00	52,46
Jumlah	2.476,80	172,00	676,88
Rata-Rata	206,40	14,33	56,41

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kampar pada tahun 2021, rata-rata curah hujan sebanyak 206,40 mm per bulan mulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi di bulan November sebanyak 308,50 mm dan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 108,20 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 24 hari dan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus hanya 10 hari dengan rata-rata sebesar 14,33 hari dari bulan Januari hingga Desember 2021.

Intensitas curah hujan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Untuk wilayah yang tergolong luas, jarang terjadi hujan lebat (intensitas tinggi). Biasanya yang turun adalah hujan intensitas rendah dan kurun waktu lama. Hujan dengan intensitas tinggi akan turun di daerah atau wilayah yang sempit dengan waktu tidak lama. Curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Fungsi air hujan yang paling utama adalah menjaga siklus air, selain itu ada berbagai manfaat curah hujan tinggi bagi kehidupan manusia. Curah hujan yang tinggi membuat para petani jadi lebih hemat, cepat, dan mudah mengairi sawah dan lahan pertanian dalam arti luas yang diusahakannya. Curah hujan tertinggi menurut kecamatan terjadi di Kecamatan Kuok sebanyak 310,25 mm/bulan dan terendah terdapat di kecamatan Tapung Hilir sebanyak 141,25 mm/bulan. Selanjutnya berikut ini disajikan data curah dan hari hujan menurut kecamatan tahun 2021.

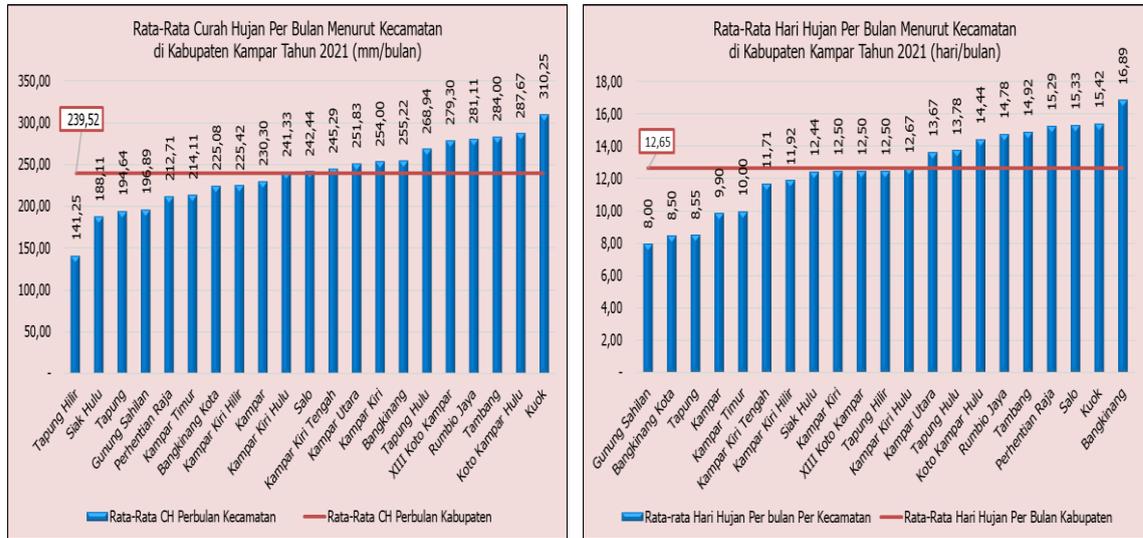
Tabel 2.7
Curah dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Rata-Rata Curah Hujan/Bulan	Rata-Rata Hari Hujan/Bulan
1	Kampar Kiri	254,00	12,50
2	Kampar Kiri Hulu	241,33	12,67
3	Kampar Kiri Hilir	225,42	11,92
4	Gunung Sahilan	196,89	8,00
5	Kampar Kiri Tengah	245,29	11,71
6	XIII Koto Kampar	279,30	12,50
7	Koto Kampar Hulu	287,67	14,44
8	Kuok	310,25	15,42
9	Salo	242,44	15,33
10	Tapung	194,64	8,55
11	Tapung Hulu	268,94	13,78
12	Tapung Hilir	141,25	12,50
13	Bangkinang Kota	225,08	8,50
14	Bangkinang	255,22	16,89
15	Kampar	230,30	9,90
16	Kampar Timur	214,11	10,00
17	Rumbio Jaya	281,11	14,78
18	Kampar Utara	251,83	13,67
19	Tambang	284,00	14,92
20	Siak Hulu	188,11	12,44
21	Perhentian Raja	212,71	15,29
Kampar		239,52	12,65

Sumber: BMKG Kabupaten Kampar Tahun 2022

Selanjutnya rata-rata jumlah hari hujan Kabupaten sebanyak 12,65 hari/bulan dan hari hujan tertinggi menurut kecamatan terjadi di Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 310,25 mm/bulan dan terendah terdapat di kecamatan Tapung Hilir sebanyak 141,25 mm/bulan Data curah hujan

dan hari hujan menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.5.



Gambar 2.5
Rata-Rata Curah dan Hari Hujan Bulanan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Lama Penyinaran Matahari (LPM) merupakan salah satu indikator yang penting di dalam klimatologi. Sinar matahari akan menggerakkan reaksi-reaksi fotokimia di atmosfer (misalnya reaksi pembentukan ozon), menghasilkan uap air yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya hujan, menjaga agar suhu atmosfer tetap hangat, dan lain sebagainya. Matahari merupakan sumber kehidupan di bumi ini, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi yang memiliki rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Ilmuwan dunia kemudian bersepakat untuk mengelompokkannya menjadi beberapa pita gelombang, di antaranya adalah pita gelombang ultraviolet, infra merah, dan cahaya tampak.

Cahaya tampak ($\lambda = 340 - 7600 \text{ nm}$) tersusun atas banyak pita warna yang berbeda-beda dari merah hingga ke ungu. Gradasi warna dari merah ke ungu dipengaruhi oleh perbedaan panjang gelombangnya. Radiasi matahari pada tiga pita gelombang tersebut dikenal sebagai radiasi global matahari, dan merupakan radiasi yang langsung datang ke permukaan bumi (*direct*) maupun radiasi yang berasal dari hamburan atmosfer (*diffuse*). Di Kabupaten Kampar penyinaran tertinggi terjadi pada bulan 73,21% dan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 46,20% dengan penyinaran rata-rata 56,41%.

2.1.1.3 Peruntukan Penggunaan Lahan

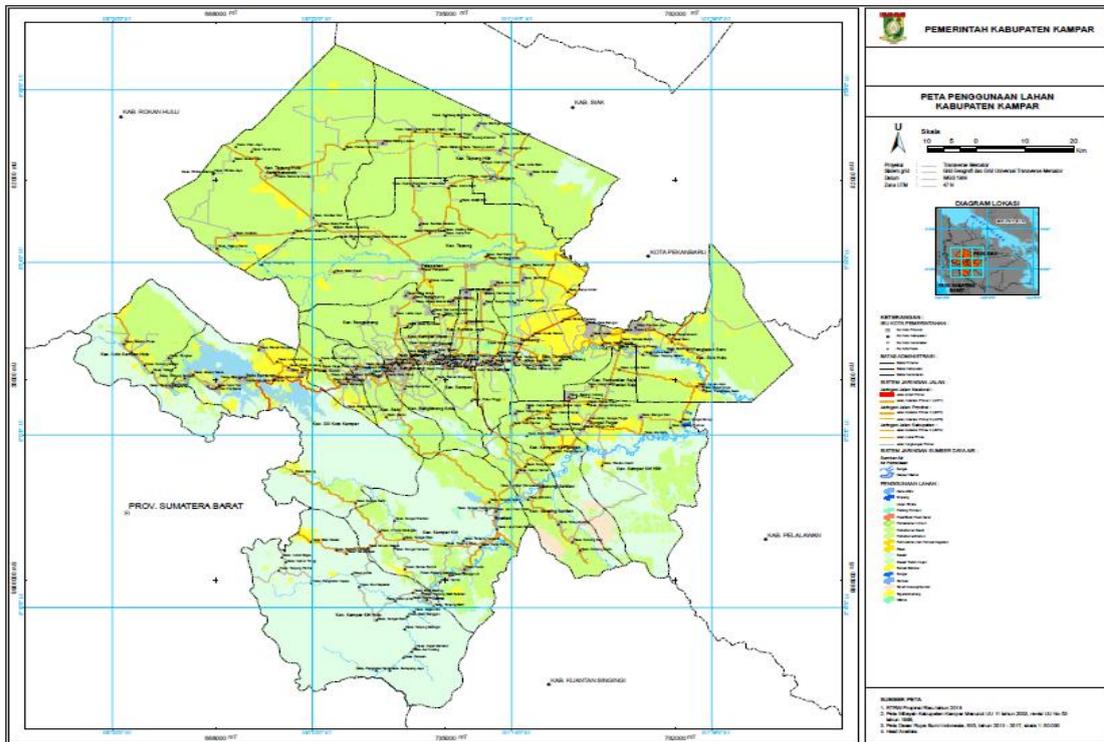
Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Sesuai dengan pendapat Arsyad dalam Setyowati (2016), penggunaan lahan (*land use*) dapat diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual.

Secara umum peruntukan penggunaan lahan menurut kawasan dibagi dua bagian utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. kawasan lindung meliputi kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi. Sementara kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan industri dan Kawasan

pemukiman.

Berdasarkan hasil interpertasi penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terdiri dari peruntukan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya masing-masing seluas 123.053 hektar atau 11,86% dan Kawasan budidaya seluas 914.063 hektar atau 88,14% dari luas wilayah Kabupaten Kampar seluas 1.128.928 hektar. Penggunaan kawasan yang paling dominan dari peruntukan kawasan budidaya pada sektor pertanian adalah kawasan perkebunan seluas 384.097 hektar atau 91,97%. Kawasan perkebunan tersebut merupakan milik perorangan dan selebihnya adalah lahan negara atau tanah negara yang dikuasakan kepada badan hukum.

Lahan rakyat masyarakat pada umumnya berupa hutan rakyat, perkebunan yang terdiri kebun sawit, kelapa, karet dan kakao. Lahan negara berupa kawasan hutan dan kawasan konservasi. Lahan badan usaha berupa lahan perkebunan sawit dan hutan produksi. Berikut disajikan peta penggunaan lahan di Kabupaten Kampar tahun 2021.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar

Sementara itu kawasan hutan produksi tetap seluas 162.290 hektar atau 38,59%. Sedangkan untuk proporsi kawasan permukiman hanya 69.966 hektar atau sebesar 7,65% yang terdiri kawasan pemukiman perkotaan seluas 23.392 hektar atau 2,56% dan kawasan pemukiman perdesaan seluas 46.574 hektar atau 5,10%. Rincian peruntukan penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan Kawasan budidaya (Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Industri Dan Kawasan Perumahan). Rincian peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Peruntukan Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung		123.053	11,86
A.1 Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan		4.382	3,56
1	Kawasan Hutan Lindung	4.231	96,55
2	Kawasan Bergambut	151	3,45
A.2 Kawasan Perlindungan Setempat		10.220	8,31
1	Sempadan danau atau waduk	1.083	10,60
2	Sempadan Sungai	9.137	89,40
A.3 Kawasan Konservasi		108.451	88,13
1	Suaka Alam	100.018	92,22
2	Badan Air	8.433	7,78
B. Kawasan Peruntukan Budidaya		914.063	88,14
1	Kawasan Hutan Produksi	420.603	46,01
a.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	117.809	28,01
b.	Kawasan hutan Produksi Tetap	162.290	38,59
c.	Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	139.375	33,14
d.	Kawasan Hutan Rakyat	1.129	0,27
2	Kawasan Pertanian	417.644	45,69
a.	Kawasan Tanaman Pangan	6.302	1,51
b.	Kawasan Tanaman Hortikultura	27.245	6,52
c.	Kawasan KP2B		-
d.	Kawasan Perkebunan	384.097	91,97
3	Kawasan Perikanan		-
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
a.	Kawasan Pertambangan MIGAS		-
5	Kawasan Industri	5.850	0,64
6	Kawasan Pemukiman	69.966	7,65
a.	Kawasan Pemukiman Perkotaan	23.392	2,56
b.	Kawasan Pemukiman Perdesaan	46.574	5,10
Total		1.037.116	100,00
C. Outline		91.812	8,85
1	Pengembalian ke Fungsi Lindung	91.812	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2022

Peruntukan penggunaan lahan tersebut yang telah ditetapkan pada dokumen RTRW 2019-2039 diharapkan dapat menjadi acuan ketaatan dalam pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Komponen analisis risiko bencana terdiri dari analisis ancaman/rawan bencana (*hazard*), analisis kerentanan bencana (*vulnerability*) dan analisis kapasitas bencana (*capacity*). Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, hasil analisis ini diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Risiko bencana di Kabupaten Kampar dikelompokkan menjadi risiko bencana akibat kejadian alam, risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Risiko bencana tentunya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus ditanggung sebagai biaya sosial

(*social costs*) serta rusaknya hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kampar menjadi penting untuk dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36, agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Kapasitas atau kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bahaya bencana. Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan kuesioner HFA untuk masing-masing Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kampar.

Analisis dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Jenis risiko bencana yang terdapat di Kabupaten Kampar antara lain Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor/Gerakan Tanah, Kekeringan, Epidemik dan Wabah Penyakit, Konflik Sosial. Jenis risiko bencana tersebut termasuk dalam kategori risiko tinggi. Jenis dan tingkat risiko bencana yang terdapat di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jenis dan Tingkat Rawan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Tanah Longsor/Gerakan Tanah	Tinggi
4	Kekeringan	Tinggi
5	Epidemik dan Wabah Penyakit	Tinggi
6	Konflik Sosial	Tinggi

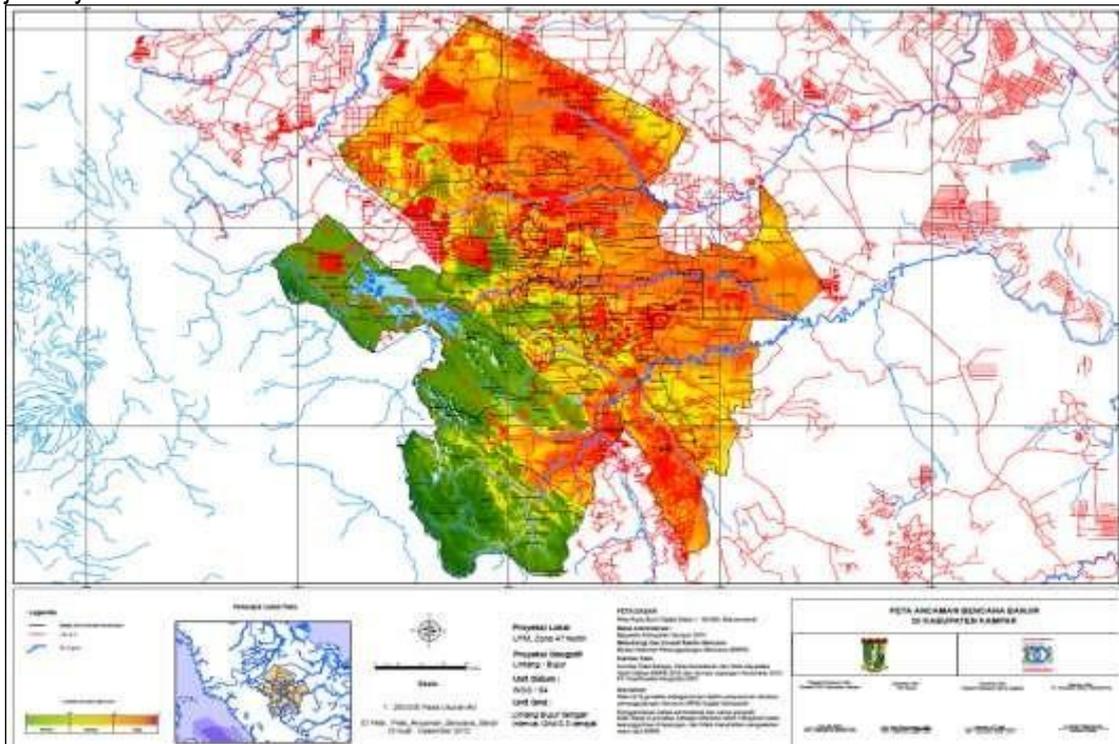
Sumber: BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) Rawan Bencana Banjir

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kampar salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya air. Dalam konstelasi wilayah, sumberdaya air dapat dikelola dengan konsep penatagunaan lahan yang berkelanjutan dengan pendekatan kewilayahan, sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan lingkungan baik di hulu maupun di hilir. Banjir yang terjadi bermula karena curah hujan yang tinggi dan tidak terserap langsung ke dalam tanah serta tidak terjadi penampungan air dalam situ/embung. Kemiringan tanah yang tidak memiliki tanaman tidak memiliki kekuatan menahan air. Pada kondisi seperti ini, terjadi potensi banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerentanan dan gangguan kehidupan kegiatan masyarakat.

Konsep pengelolaan sumber daya air, mengamanatkan pengelolaan potensi cadangan dan pemanfaatan air tanah secara regional/kewilayahan antara hulu dan hilir untuk mengatur kapasitas penyimpanan, pencadangan dan pemanfaatan air. Untuk 20 tahun ke depan, Kabupaten Kampar sangat memerlukan upaya untuk mempertahankan tanaman penyerap air dan hutan, membangun situ/embung, membangun konstruksi perkuatan tebing dan membangun saluran kanal banjir. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan habit/kebiasaan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Kampar mayoritas adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Luas kawasan rawan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kampar adalah 75.451,06 Ha yang tersebar diseluruh

wilayah kecamatan. Berikut disajikan peta rawan bencana banjir di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.7.

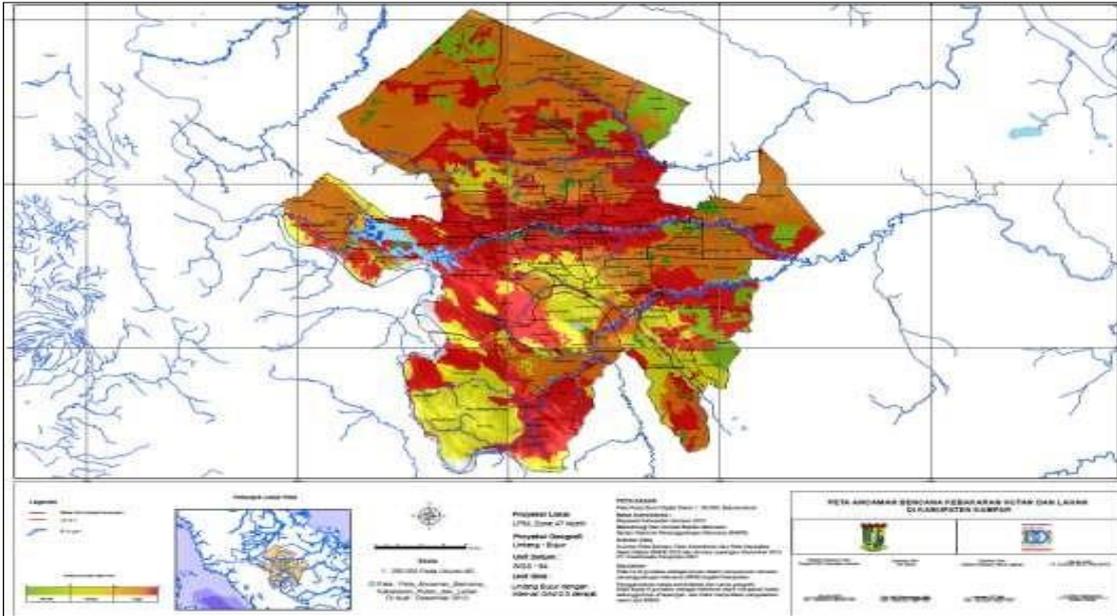


Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kampar

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang sedikit untuk rawan bencana. Namun di wilayah ini klasifikasi untuk rawan bencana alam sedikit yaitu seluas 516.289,5 ha, dan Klasifikasi Bencana Alam Tinggi seluas 39.428,7 Ha. Pada bulan Desember Tahun 2021 terjadi bencana banjir di Kabupaten Kampar yang melanda 7 Kecamatan dan 66 Desa yang merendam ribuan rumah dan ribuan hektar lahan pertanian masyarakat serta merendam puluhan sekolah.

2) Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakara hutan, kebakaran vegetasi, kebakaran rumput, atau kebakaran semak adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi dapat juga memusnahkan rumah-rumah atau sumber daya pertanian (*id.wikipedia, 2010*). Kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan besar, baik harta benda maupun kehidupan manusia, tetapi kebakaran tersebut juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kawasan hutan belantara. Beberapa spesies tanaman menggantungkan pada dampak dari kebakaran untuk tumbuh dan reproduksi, namun sebagian besar kebakaran hutan mempunyai dampak negatif terhadap ekologi. Berikut disajikan peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.8.



Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar

Wilayah Kabupaten Kampar memiliki kawasan yang sering dilanda Kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana, ancaman bencana Kebakaran hutan dan lahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas Indeks Ancaman. Untuk mendapatkan Kelas Indeks Kebakaran Hutan Dan Lahan merujuk kepada komponen dari jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah sehingga menghasilkan skor bahaya. Kelas Indeks Rendah Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung dari jenis hutan, iklim penghujan dan jenis tanah non organik/non gambut. Kelas Indeks Sedang Ancaman Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan dihitung dari jenis lahan perkebunan, iklim penghujan - kemarau dan jenis tanah semi organik. Sedangkan kelas Indeks Tinggi Ancaman Bencana Kebakaran hutan dan lahan dari jenis padang rumput kering dan belukar, lahan pertanian.

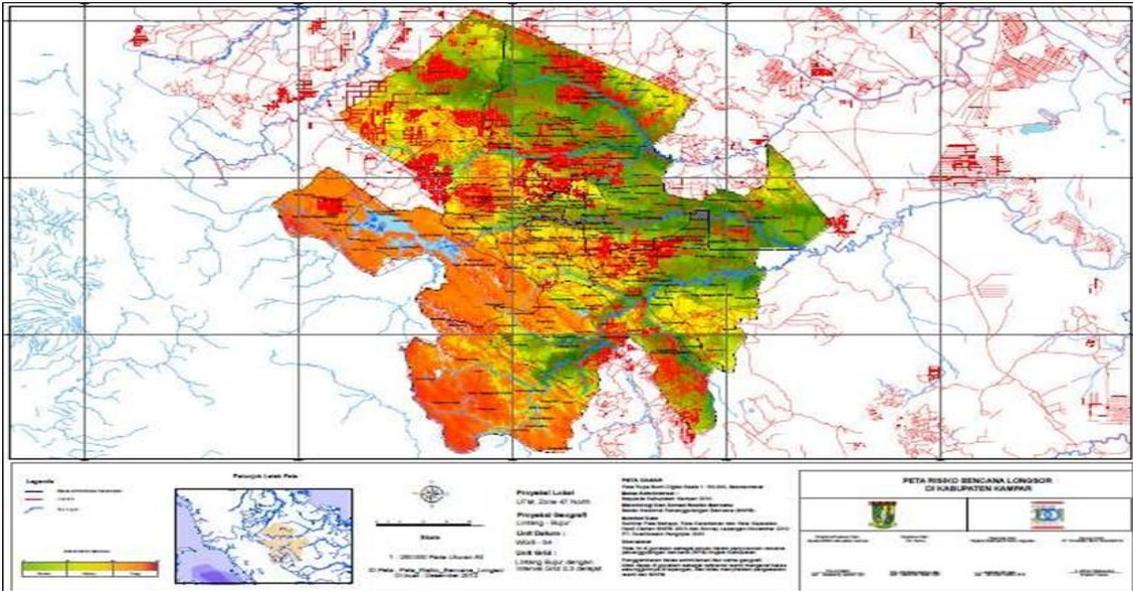
3) Rawan Bencana Tanah Longsor

Rawan bencana Tanah Longsor atau Gerakan Tanah Faktor penyebab terjadinya tanah longsor atau gerakan tanah diperkirakan karena: (1) curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat kejadian gerakan tanah; (2) Kemiringan lereng yang terjal, menyebabkan material mudah bergerak; (3) Adanya bidang lemah berupa kontak batuan yang bersifat sarang dengan batuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir. Kurangnya vegetasi dengan akar yang kuat dan dalam yang berfungsi sebagai pengikat tanah. Rekomendasi teknis penanggulangan:

- a) Pembuatan sengkedan pada tebing jalur jalan dengan kemiringan < 30° dan ketinggian lereng < 2 meter.
- b) Perbaikan drainase untuk memperlancar aliran air permukaan.
- c) Melakukan penanaman pohon besar dengan akar yang kuat dan dalam untuk meningkatkan daya ikat tanah.
- d) Memberikan peringatan kepada pengguna jalan dengan cara memasang rambu-rambu rawan longsor.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Kampar pernah terjadi bencana tanah longsor 3 kali yaitu: (1) Desa Tanjung Rambutan; (2) Pulau Gadang; dan (3) Desa Tanjung Alai. Berikut disajikan peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya

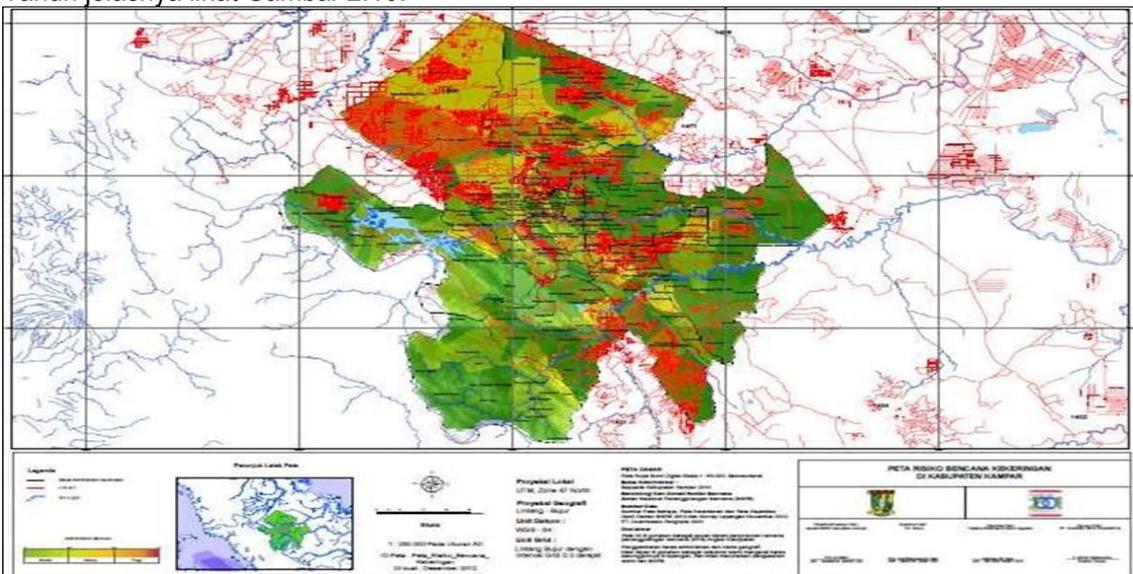
lihat Gambar 2.9.



Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kampar

4) Rawan Kekeringan

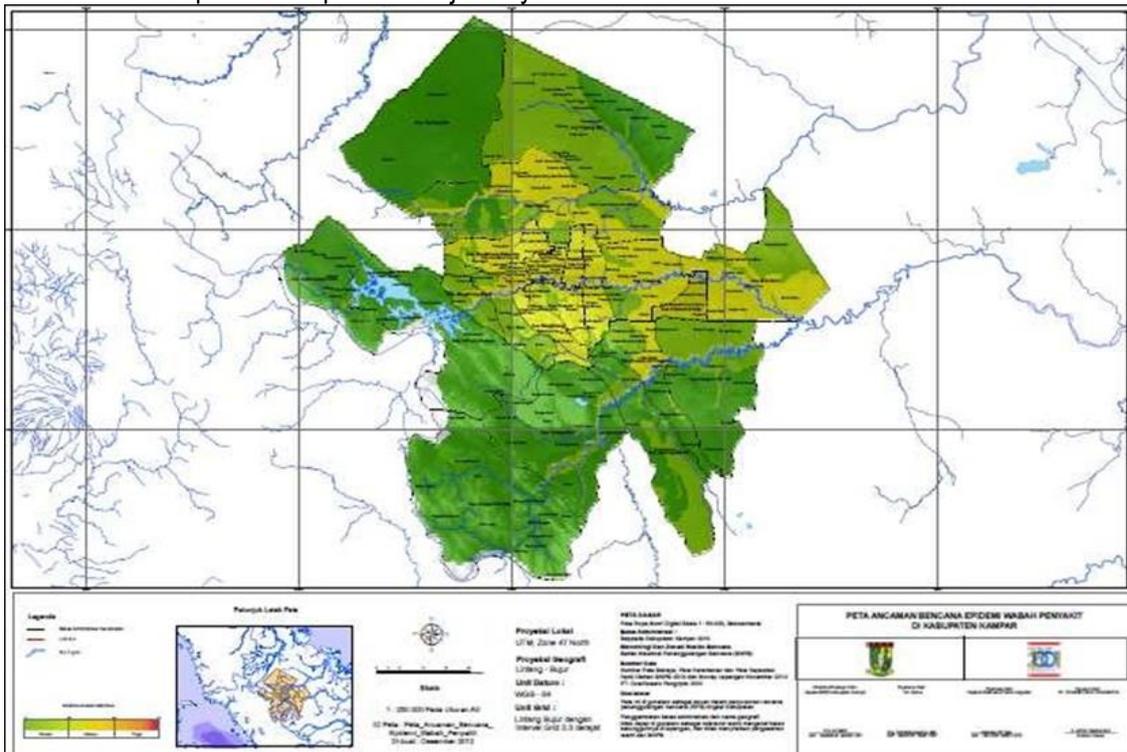
Beberapa tahun lalu sejumlah desa di Kecamatan Tapung dan kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar mengalami kekeringan. Bencana Kekeringan yang melanda beberapa desa di wilayah Kabupaten Kampar pada bulan maret hingga juni lalu menjadi perhatian Pemda Kabupaten Kampar. Masyarakat di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung yang sempat mengalami rawan pangan. Kkepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan pangan akibat kekeringan yang sempat melanda beberapa desa di Kabupaten Kampar dengan bantuan pangan. Berikut disajikan peta rawan bencana kekeringan di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.10.



Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kampar

5) Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

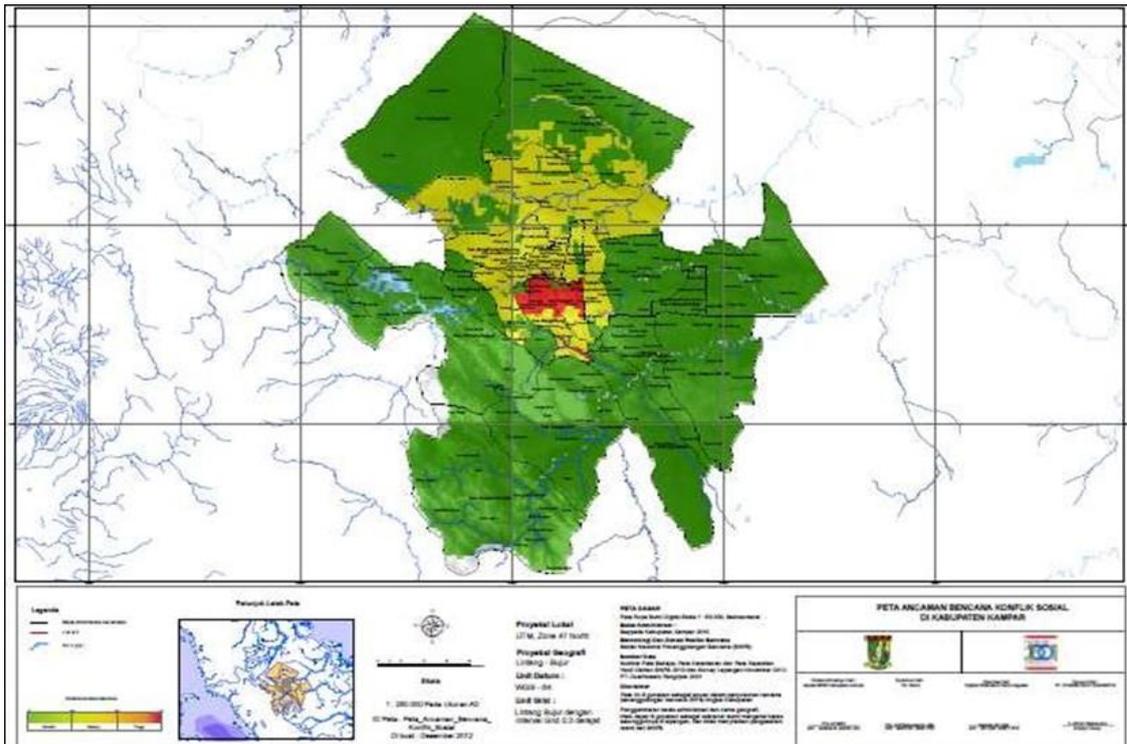
Dilihat dari 10 penyakit terbanyak diderita oleh penduduk yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Kampar adalah infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas dan kolitis infeksi. Terdapat sepuluh macam penyakit yang terbanyak di Kabupaten Kampar yaitu: (1) infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas; (2) *arthiritis rheumatoid*; (3) Sebab luas lainnya; (4) Diare dan gastroenteritis penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi); (5) Hipertensi esensial (primer); (6) infeksi kulit dan jaringan sub kutan; (7) Dermatitis eksim; (8) Gastritis dan Duodenitis; (9) penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas; (10) Penyakit infeksi usus lainnya. Berikut disajikan peta rawan bencana Evidemi di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.11.



Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Evidemi di Kabupaten Kampar

6) Rawan Bencana Konflik Sosial

Bedasarkan observasi dan wawancara di lapangan faktor utama penyebab konflik sosial adalah akibat masalah lahan antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan lahan baik untuk pemukiman atau lahan pertanian juga tinggi, sementara lahan semakin terbatas karena sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Secara keseluruhan ancaman bencana konflik sosial secara umum di Keb. Kampar tergolong rendah, kecuali di Kecamatan Tapung, Bangkinang Sebrang, Kampar Utara dan Rumbio Jaya tergolong sedang, sedangkan di Kecamatan Kampar dan Bangkinang tergolong tinggi. Berikut disajikan peta rawan bencana konflik social di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.12.



Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Kampar

Hasil analisis kajian rawan bencana yang berdasarkan pada enam dari delapan risiko bencana yang meliputi risiko bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, maka jenis risiko bencana di Kabupaten Kampar yang tergolong tinggi adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi dan angin puting beliung.

Namun demikian tidak semua kecamatan dan desa risiko bencananya tinggi. Wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi risiko bencana tergolong tinggi menurut jenis risiko bencana disajikan secara rinci rawan bencana menurut jenis bencana per kecamatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Bahaya dan Kapasitas Rawan Bencana di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Rawan dan Kapasitas Menurut Jenis Bencana					
		Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Kekeringan	Evidemi dan Penyakit	Konflik Sosial
1	Kampar Kiri	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Kampar Kiri Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3	Kampar Kiri Hilir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Gunung Sahilan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kampar Kiri Tengah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6	XIII Koto Kampar	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
7	Koto Kampar Hulu	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Kuok	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Salo	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
10	Tapung	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
11	Tapung Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
12	Tapung Hilir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
13	Bangkinang Kota	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

No	Kecamatan	Rawan dan Kapasitas Menurut Jenis Bencana					
		Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Kekeringan	Evidemi dan Penyakit	Konflik Sosial
14	Bangkinang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
15	Kampar	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
16	Kampar Timur	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
17	Rumbio Jaya	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
18	Kampar Utara	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
19	Tambang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
20	Siak Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
21	Perhentian Raja	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kampar		Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) 2.1.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai kewenangan terdapat beberapa wilayah untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya dengan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Kampar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dan hal ini disebut sebagai kawasan strategis Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisa peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Kampar terdiri atas:

1) Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang

Pada tahun 1979 PLN (Perusahaan Listrik Negara) merencanakan pembangunan DAM skala kecil di Tanjung Pauh dalam rangka memanfaatkan Sungai Kampar Kanan. Agar manfaat keberadaan waduk lebih besar dibangunlah PLTA Koto Panjang dalam skala yang lebih besar. PLTA Koto Panjang dibangun atas kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia. PLTA Koto Panjang menjadi penyedia sumber energi listrik di provinsi Riau dan Sumbar.

Penyediaan energi listrik di Kabupaten Kampar masuk ke dalam sistem Interkoneksi B, Wilayah Selatan. Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau melalui jalur Sawah Lunto/Kiliran Jao-Taluk Kampar Tahun untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Selatan mencakup: Kabupaten Kampar Tahun Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan.

2) Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan hutan tersebar di Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan KamparKiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan luas kurang lebih 53.593 Ha. memegang peranan kunci sebagai pengendali hidrologis wilayah dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air DAS Kampar. Sebagaimana telah diketahui bahwa daerah perbatasan Riau dan Sumbar merupakan daerah rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Perubahan ekosistem daerah tersebut akan langsung berdampak terhadap semakin besarnya peluang terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.

Kawasan lindung gambut seluas kurang lebih 151 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan GunungSahilan, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Siak Hulu.

3) Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai; dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai berada di seluruh Kecamatan dengan luaskurang lebih 9.137 Ha. Kawasan sekitar danau atau waduk, berada di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kampar Kiri, denganluas kurang lebih 1.083 Ha.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, Kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam; dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam cagar alam Bukit Bungkok, seluas kurang lebih 13.856 Ha yang tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kuok; dan suaka margasatwa Bukit Rimbang Baling, seluas kurang lebih 86.162 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Kawasan pelestarian alam yang terdapat di taman hutan raya Sultan Syarif Qasim II, seluas kurang lebih 4.231 Ha, terdapat di Kecamatan Tapung Hulu; dan taman wisata alam Buluh Cina, seluas kurang lebih 973 Ha, terdapat di Kecamatan Siak Hulu.

Kawasan Cagar Budaya terdiri dari Candi Muara Takus di Kecamatan XIII Koto Kampar; Masjid Jamik di Kecamatan Kampar; Istana Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan; Situs Makam Raja Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan; Situs Makam Panglima Khatib di Kecamatan Kampar; Situs Makam Syech Burhanuddin di Kecamatan Kampar Kiri; Situs Makam Syech Abdul Gani di Kecamatan XIII Koto Kampar; Rumah Bendang di Kecamatan Kampar; Desa Wisata Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok; Komplek Kesultanan Kampa di Kecamatan Kampa; masjid Qubro di Kecamatan Kampa; makam Datuk Tabano di Kecamatan Bangkinang; lubang kolom di Kecamatan Kuok; dan lokomotif Gerbong Kereta api di Kecamatan Kampar Kiri.

4) Kawasan Pertanian (Kawasan Agropolitan, Kawasan Agrowisata dan kawasan Agrotechpark)

Pengembangan kawasan agrowisata harus dilakukan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, perhotelan, biro perjalanan, industri, kesenian dan kebudayaan dan sebagainya dalam bingkai kewilayahan dan keterpaduan pengelolaan kawasan. Agrowisata dapat merupakan pengembangan dari sektor lain yang diharapkan mampu menunjang pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, misalnya pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan agropolitan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perkebunan, pengembangan kawasan agrowisata pada tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan peternakan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perikanan darat dan lain sebagainya.

Perencanaan pengembangan kawasan agrowisata harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu Pengembangan kawasan agrowisata harus mempertimbangkan penataan dan pengelolaan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya setempat, Pengembangan fasilitas dan layanan wisata yang mampu memberikan kenyamanan pengunjung sekaligus memberikan benefit bagi masyarakat setempat serta pengembangan kawasan agrowisata harus mampu melindungi sumber daya dan kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan sejarah setempat. Pengembangan kawasan agrowisata ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar semata, tetapi harus dalam koridor melindungi dan melestarikan aset-aset yang menjadi komoditas utama pengembangan kawasan. Penggalan terhadap nilai-nilai, lokasi, kegiatan, atraksi wisata yang unik ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kawasan agrowisata secara berkelanjutan.

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kampar antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Sebagian sektor ini merupakan penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Kampar menjanjikan banyak peluang pengembangan dimasa depan. Dengan dukungan letak geografis yang strategis, yaitu relatif tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota Provinsi dan terletak pada daerah

perbatasan 3 (tiga) provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat dan Jambi serta ditunjang tersedianya infrastruktur yang memadai. Selain hal tersebut dengan dukungan kebijakan pemerintah yang positif, maka daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era globalisasi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

a) Sub Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kampar yang menopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan seperti, kelapa sawit, kelapa, karet dan kakao, dan aneka tanaman lain. Komoditas Kelapa Sawit kelapa merupakan primadona di subsektor ini.

Peruntukan lahan untuk usaha perkebunan pada RTRW Kabupaten Kampar seluas 384.097 hektar. Pada tahun 2021 dari peruntukan lahan tersebut sudah dimanfaatkan seluas 318.411 hektar dengan komoditas tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa, tanaman karet dan tanaman kakao dan komoditas lainnya.

Luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan komoditas kelapa sawit seluas 226.169 hektar dan sudah menghasilkan produksi TBS sebanyak 2.868.627 ton tahun 2021. Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) merupakan salah satu komoditas perkebunan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Kelapa sawit juga merupakan sumber minyak nabati yang sangat penting. Permintaan kelapa sawit yang meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dan perluasan areal pertanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar. Berikut disajikan gambar potensi perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.13
Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2021

Selain tanaman kelapa sawit, komoditas karet juga sangat berperan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan untuk tanaman karet

pada tahun 2021 seluas 90.234 hektar dan telah menghasilkan produksi karet sebanyak 76.245 ton. Peranan perkebunan karet terhadap perekonomian Kabupaten Kampar juga dapat dilihat dari kontribusi komoditas karet terhadap PDRB sektor pertanian pada subsektor perkebunan di Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar hendaknya lebih memperhatikan dan mengembangkan perkebunan karet yang merupakan sumber keragaman hayati yang bermanfaat sebagai pelestarian lingkungan, yang juga merupakan salah satu komoditas unggulan yang berperan dalam meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja, meningkatkan jumlah produksi karet dan memberikan kontribusi terhadap subsektor perkebunan. Berikut disajikan gambar potensi pengembangan perkebunan tanaman karet di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.14
Perkebunan Karet Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kelapa merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat Kabupaten Kampar. Selanjutnya pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa seluas 1.674 hektar dengan produksi sebanyak 454 ton kopra pada tahun 2021. Manfaat tanaman kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Demikian besar manfaat tanaman kelapa sehingga ada yang menamainya sebagai “pohon kehidupan.

Selanjutnya luas tanaman kakao yang dikembangkan sesuai dengan arahan dalam peruntukan lahan dalam RTRW adalah seluas 335 hektar dengan total produksi 44 ton dalam bentuk produksi berupa biji kering. Menurut Safitri (2015) beberapa factor pembatas yang menentukan kecocokan budidaya tanaman kakao ini disuatu lahan adalah suhu, curah hujan, temperature dan lainnya. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan lahan, menurut (Tjahyana, 2015) bahwa pengembangan komoditas kakao akan jadi lebih ekonomis jika dijadikan tanaman sela. Berikut disajikan gambar potensi perkebunan Kakao di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.15
Perkebunan Kakao Kabupaten Kampar Tahun 2021

b) Sub Sektor Perikanan

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar dan beragam. Berdasarkan RTRW tahun 2019-2039 kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu. Perikanan dikembangkan melalui pengembangan kegiatan perikanan budidaya air tawar dengan pendekatan minapolitan dan pengolahan. Selama ini budidaya ikan dalam kolam hanya dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga.

Usaha perikanan merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Hal ini karena proses pemeliharaan, pemasaran relatif tidak begitu sulit dan tidak memerlukan lahan yang luas, kemudian konsumsi ikan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat sehingga usaha perikanan ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya inovasi maka di Kabupaten Kampar proses pengolahan ikan sudah mulai dikembangkan melalui kelompok tani perikanan.

**Gambar 2.16****Potensi Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2021****c) Sub Sektor Peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi peternakan. Sektor peternakan tidak hanya meningkatkan populasi dan produksi ternak Jenis hewan ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga meningkatkan pendapatan peternak. Jenis ternak yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Kampar adalah sapi, kerbau, kambing, itik, dan lainnya. Yang menjadi unggulan disektor ini salah satunya adalah Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA). Hal ini ditunjang oleh luas perkebunan sawit di Kabupaten Kampar yaitu 226.169 hektar. Kotoran ternak dapat dipergunakan sebagai sumber pupuk organik. Populasi ternak ruminansia tahun 2021 sebanyak 42.881 ekor yang terdiri dari 28.461 ekor sapi dan 14.420 ekor kerbau serta kambing sebanyak 21.069 ekor (Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar).

**Gambar 2.17**

Potensi Peternakan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Upaya Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan populasi dan produksi ternak adalah dengan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan meningkatkan angka kelahiran ternak melalui inseminasi buatan (kawin suntik), intensifikasi kawin alam, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak dan lain-lain serta Gerakan Penyerentakan Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB).

d) Sub Sektor Tanaman Pangan

Sektor Tanaman Pangan merupakan potensi Sumber Daya Alam yang terbarukan (*renewable resources*). Adapun hasil dari sektor ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kecukupan gizi masyarakat sehingga dapat mengetahui tingkat Ketahanan Pangan suatu Daerah. Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap beberapa komoditas Pertanian khususnya tanaman pangan beberapa program telah dilaksanakan dan terjadi peningkatan produksi yang menguntungkan petani, namun secara keseluruhan peningkatan produksi tersebut belum terpenuhinya ketersediaan terhadap komoditas tertentu seperti padi atau beras.

Kawasan tanaman Pangan seluas kurang lebih 6.302 Ha yang tersebar di Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya.

Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 27.245 Ha, tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar. Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap beberapa komoditas Pertanian khususnya tanaman pangan beberapa program telah dilaksanakan dan terjadi peningkatan produksi yang menguntungkan petani, namun secara keseluruhan peningkatan produksi tersebut belum terpenuhinya ketersediaan terhadap komoditas. Untuk tanaman Palawija yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain seperti komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Capaian produksi pada bidang tanaman pangan khususnya padi tahun 2021 dengan luas panen tanam padi sawah adalah 3.437,20 ha dengan produksi sebanyak 11.845 Ton dengan produktifitas rata-rata sebanyak 3,446 ton/ha.



Gambar 2.18

Potensi Pertanian Pangan Padi Kabupaten Kampar Tahun 2021

e) Sektor Lahan dan Hutan

Pemanfaatan lahan dan hutan secara tradisional telah sejak lama diusahakan oleh masyarakat. Pemanfaatan lahan dan hutan secara tradisional umumnya berupa eksploitasi dari alam dan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada beberapa dekade terakhir, selain mengharapkan produksi alami, pemanfaatannya mengarah kepada pembudidayaan dan diusahakan dalam skala besar. Seperti di daerah tropis lainnya, hutan di Kabupaten Kampar memiliki nilai ekonomis, sosial, lingkungan dan budaya bagi daerah dan masyarakat setempat. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan, maka kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Kampar seluas HPT 117.511 Ha, HP 163.116 Ha, dan HPK 139.376 Ha. Berikut disajikan Gambar Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.19

Potensi Hutan Tanaman Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Namun seringkali pemanfaatan hutan dan lahan untuk berbagai kepentingan tersebut di atas menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana menyebabkan erosi, banjir rusaknya ekosistem hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati dan meninggalkan lahan kritis.

5) Kawasan Pertambangan dan Penggalian

a) Sektor Sumber Daya Mineral

Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung. Pengelolaan potensi

pertambangan dengan pendekatan pertambangan ramah lingkungan (green minning) di Kabupaten Kampar

Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung.

b) Sektor Energi

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebar di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir. Kawasan pembangkit tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar.

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Dalam rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa wilayah ini sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan juga sebagai ikon daerah, terutama pariwisata alam dan pariwisata budaya.

Pada sektor Pariwisata, Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang sangat besar. Potensi wisata tersebut berupakeragaman budaya ataupun keindahan alam, potensi wisata ini sangat prospektif untuk dikembangkan adalah jenis obyek wisata alam dan wisata budaya dengan atraksi-atraksi budaya lainnya yang dapat dikembangkan.

Kawasan pariwisata terdiri atas kawasan pengembangan pariwisata perkotaan. Kawasan Pengembangan Pariwisata Perkotaan tersebar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir dan Tapung Hulu.

Kawasan pengembangan pariwisata alam buatan tersebar di Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampa, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Kawasan pengembangan pariwisata pusaka dan alam tersebar di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Gunung Sahilan, Kecamatan Kuok, Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Secara umum potensi pengembangan sector perekonomian di Kabupaten Kampar secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Sub Sektor	Komoditas
1	Tanaman Pangan	Padi
2	Perkebunan	Karet, Kelapa Sawit dan Kakao
3	Kehutanan	Hutan Tanaman Industri
4	Peternakan	Siska (Sapi Kelapa Sawit)
5	Perikanan	Perairan Umum
6	Pertambangan	Emas/Tanah Emas Aluvial dan Barubara
7	Energi	Kelistrikan (PLTA)
8	Pariwisata	Alam, Event dan Sejarah

Sumber: Berbagai Dokumen Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi. Berikut data perkembangan jumlah dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kampar Kiri	28.056	29.946	29.941	33.470	33.720	4,81
2	Kampar Kiri Hulu	10.154	10.905	10.722	10.998	11.090	2,28
3	Kampar Kiri Hilir	10.992	11.910	11.889	13.346	13.429	5,26
4	Gunung Sahilan	22.302	19.155	18.753	20.335	20.502	-1,74
5	Kampar Kiri Tengah	28.328	26.997	26.558	27.904	28.137	-0,11
6	XIII Koto Kampar	22.147	23.119	22.980	23.847	23.985	2,03
7	Koto Kampar Hulu	20.513	19.978	19.311	20.367	20.503	0,05
8	Kuok	22.925	24.273	24.365	25.415	25.568	2,79
9	Salo	24.156	24.908	25.071	26.162	26.372	2,23
10	Tapung	84.046	88.031	90.049	98.422	99.291	4,30
11	Tapung Hulu	83.165	75.869	77.432	80.661	81.175	-0,48
12	Tapung Hilir	53.157	54.972	55.261	57.509	57.996	2,21
13	Bangkinang Kota	34.378	36.477	36.505	37.855	38.182	2,69
14	Bangkinang	33.251	32.968	32.853	34.441	34.732	1,12
15	Kampar	45.575	49.169	48.704	51.637	52.058	3,44
16	Kampar Timur	23.960	22.765	22.491	23.890	24.057	0,18
17	Rumbio Jaya	17.031	17.690	17.505	18.367	18.536	2,17
18	Kampar Utara	18.181	18.025	17.617	18.780	18.953	1,10
19	Tambang	63.370	65.884	68.974	79.277	79.892	6,09
20	Siak Hulu	76.654	77.937	79.635	88.187	88.775	3,81
21	Perhentian Raja	19.708	17.978	18.013	19.429	19.613	0,06
Kabupaten Kampar		742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 naik dari 742.049 jiwa tahun 2017 menjadi 816.566 jiwa pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak 74.517 jiwa atau 9,13% selama periode tersebut. Sementara pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 sebesar 2,46% per tahun.

Sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi per kecamatan terdapat di Kecamatan Tambang sebesar 6,09% per tahun dan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Gunung Sahilan sebesar -1,74% per tahun. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi peningkatan angka kelahiran atau tingkat fertilitas dan migrasi penduduk dari wilayah lain dan luar provinsi Riau.

2.1.2.2 Perkembangan Sebaran Penduduk

Perkembangan sebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Sebaran penduduk yang tidak merata akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Daerah-daerah yang

padat penduduk terjadi eksploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam.

Persebaran penduduk yang tidak merata, di antaranya disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Wilayah yang beriklim terlalu dingin atau panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Pada umumnya banyak masyarakat yang memilih tempat tinggal di daerah datar, sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang baik. Sumber air yang berlimpah dan tidak tercemar oleh limbah pabrik atau lainnya. Namun demikian kondisi tersebut menyebabkan persebaran tidak merata dan akan menyebabkan munculnya permukiman liar, pencemaran sungai karena dijadikan tempat pembuangan sampah, baik dari masyarakat maupun pabrik industri. Selain itu persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya pencemaran udara karena banyaknya kendaraan dan pabrik serta muncul berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas.

Secara umum persebaran penduduk selama Tahun 2021 mengalami sebaran yang tidak merata berkisar antara 1,36% hingga 12,16%. Sebaran paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 11.090 jiwa dan sebaran paling banyak terdapat di Kecamatan Tambang dengan jumlah penduduk sebanyak 79.892 jiwa. Sebaran yang tidak merata tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut cukup rendah dan atau tinggi serta perpindahan penduduk ke wilayah lainnya. Sementara delapan kecamatan lainnya memiliki pertumbuhan persebaran penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata 4,70%, jelasnya disajikan pada Tabel 2.13 terkait sebaran penduduk menurut kecamatan tahun 2017-2021.

Tabel 2.13
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun					Distribusi (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kampar Kiri	28.056	29.946	29.941	33.470	33.720	4,13
2	Kampar Kiri Hulu	10.154	10.905	10.722	10.998	11.090	1,36
3	Kampar Kiri Hilir	10.992	11.910	11.889	13.346	13.429	1,64
4	Gunung Sahilan	22.302	19.155	18.753	20.335	20.502	2,51
5	Kampar Kiri Tengah	28.328	26.997	26.558	27.904	28.137	3,45
6	XIII Koto Kampar	22.147	23.119	22.980	23.847	23.985	2,94
7	Koto Kampar Hulu	20.513	19.978	19.311	20.367	20.503	2,51
8	Kuok	22.925	24.273	24.365	25.415	25.568	3,13
9	Salo	24.156	24.908	25.071	26.162	26.372	3,23
10	Tapung	84.046	88.031	90.049	98.422	99.291	12,16
11	Tapung Hulu	83.165	75.869	77.432	80.661	81.175	9,94
12	Tapung Hilir	53.157	54.972	55.261	57.509	57.996	7,10
13	Bangkinang Kota	34.378	36.477	36.505	37.855	38.182	4,68
14	Bangkinang	33.251	32.968	32.853	34.441	34.732	4,25
15	Kampar	45.575	49.169	48.704	51.637	52.058	6,38
16	Kampar Timur	23.960	22.765	22.491	23.890	24.057	2,95
17	Rumbio Jaya	17.031	17.690	17.505	18.367	18.536	2,27
18	Kampar Utara	18.181	18.025	17.617	18.780	18.953	2,32
19	Tambang	63.370	65.884	68.974	79.277	79.892	9,78
20	Siak Hulu	76.654	77.937	79.635	88.187	88.775	10,87
21	Perhentian Raja	19.708	17.978	18.013	19.429	19.613	2,40
Kabupaten Kampar		742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

2.1.2.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan dari kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan.

Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Data kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Jiwa/km ²
1	Kampar Kiri	33.720	915,33	36,84
2	Kampar Kiri Hulu	11.090	1.301,25	8,52
3	Kampar Kiri Hilir	13.429	759,74	17,68
4	Gunung Sahilan	20.502	597,97	34,29
5	Kampar Kiri Tengah	28.137	330,59	85,11
6	XIII Koto Kampar	23.985	732,40	32,75
7	Koto Kampar Hulu	20.503	674,00	30,42
8	Kuok	25.568	151,41	168,87
9	Salo	26.372	207,83	126,89
10	Tapung	99.291	1.365,97	72,69
11	Tapung Hulu	81.175	1.169,15	69,43
12	Tapung Hilir	57.996	1.013,56	57,22
13	Bangkinang Kota	38.182	177,18	215,50
14	Bangkinang	34.732	253,50	137,01
15	Kampar	52.058	136,28	381,99
16	Kampar Timur	24.057	173,08	138,99
17	Rumbio Jaya	18.536	76,92	240,98
18	Kampar Utara	18.953	79,84	237,39
19	Tambang	79.892	371,94	214,80
20	Siak Hulu	88.775	689,80	128,70
21	Perhentian Raja	19.613	111,54	175,84
Kabupaten Kampar		857.752	11.289,28	72,33

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Berdasarkan Tabel 2.14, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar sebanyak 72,33 atau 72 jiwa/km² dengan wilayah kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kampar sebanyak 382 jiwa/km² dan paling sedikit adalah kecamatan Kampar Kiri Hulu sebanyak 8 jiwa/km². Perbedaan kepadatan penduduk dapat menimbulkan permasalahan kependudukan antara lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar dan sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan. Informasi kepadatan penduduk wilayah ini perlukan untuk mengetahui gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan). Sementara wilayah kecamatan yang kurang padat menunjukkan lambatnya percepatan pemerataan pembangunan antara wilayah.

2.1.2.4 Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Perkembangan sex rasio Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan sebesar -1,99%. Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 382.756 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 359.293 jiwa dengan sex ratio sebesar 106,53. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sex rasio. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 417.094 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 399.472 jiwa dengan sex ratio sebesar 104. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki. Penurunan sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat angka kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya.

Sementara itu jika dilihat angka sex rasio per kecamatan tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang memiliki angka sex rasio tertinggi yaitu kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan angka sebanyak 107, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex rasio paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampar Utara sebanyak 101. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex rasio penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah		Sex Ratio
		Laki-Laki		Perempuan		(Jiwa)	(%)	
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)			
1	Kampar Kiri	17.322	2,12	16.398	2,01	33.720	4,13	105,63
2	Kampar Kiri Hulu	5.738	0,7	5.352	0,66	11.090	1,36	107,21
3	Kampar Kiri Hilir	6.916	0,85	6.513	0,8	13.429	1,64	106,19
4	Gunung Sahilan	10.538	1,29	9.964	1,22	20.502	2,51	105,76
5	Kampar Kiri Tengah	14.444	1,77	13.693	1,68	28.137	3,45	105,48
6	XIII Koto Kampar	12.261	1,5	11.724	1,44	23.985	2,94	104,58
7	Koto Kampar Hulu	10.502	1,29	10.001	1,22	20.503	2,51	105,01
8	Kuok	12.979	1,59	12.589	1,54	25.568	3,13	103,10
9	Salo	13.472	1,65	12.900	1,58	26.372	3,23	104,43
10	Tapung	51.101	6,26	48.190	5,9	99.291	12,16	106,04
11	Tapung Hulu	41.866	5,13	39.309	4,81	81.175	9,94	106,50
12	Tapung Hilir	29.821	3,65	28.175	3,45	57.996	7,1	105,84
13	Bangkinang Kota	19.103	2,34	19.079	2,34	38.182	4,68	100,13
14	Bangkinang	17.610	2,16	17.122	2,1	34.732	4,25	102,85
15	Kampar	26.327	3,22	25.731	3,15	52.058	6,38	102,32
16	Kampar Timur	12.185	1,49	11.872	1,45	24.057	2,95	102,64
17	Rumbio Jaya	9.427	1,15	9.109	1,12	18.536	2,27	103,49
18	Kampar Utara	9.567	1,17	9.386	1,15	18.953	2,32	101,93
19	Tambang	40.478	4,96	39.414	4,83	79.892	9,78	102,70
20	Siak Hulu	45.320	5,55	43.455	5,32	88.775	10,87	104,29
21	Perhentian Raja	10.117	1,24	9.496	1,16	19.613	2,4	106,54
Kabupaten Kampar		417.094	51,08	399.472	48,92	816.566	100	104,41

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.1.2.5 Perkembangan Struktur Usia Penduduk

Perkembangan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06% per tahun dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 usia penduduk produktif

berjumlah 529.396 jiwa kemudian bertambah menjadi 571.089 jiwa pada tahun 2021. Banyak usia produktif tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas luasnya bagi penduduk usia produktif dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka dan menurunkan angka kemiskinan.

Pada periode yang sama usia non produktif yang belum produktif (usia 0-14 tahun) tumbuh sebesar 0,88% per tahun atau bertambah dari 203.543 jiwa pada tahun 2017 menjadi 231.725 jiwa pada tahun 2021. Penduduk usia muda (belum produktif) yaitu kelompok usia antara 5-9 Tahun dengan komposisi terbanyak pada tahun 2017 kemudian berubah menjadi kelompok umur 10-14 tahun pada tahun 2021. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda sebagai asset daerah sejak dini baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan maupun pendidikan sehingga diharapkan nantinya generasi muda Kabupaten Kampar mempunyai daya saing yang tinggi sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi persaingan globalisasi dalam dunia kerja, salah satunya saat ini telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berarti telah dibukanya gerbang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dimana salah satu point terpentingnya yaitu telah dibebaskanya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Namun usia tidak produktif (usia 65->75 tahun) tumbuh sebesar 9,45% per tahun selama tahun 2017-2021 atau bertambah dari 17.768 jiwa pada tahun 2017 menjadi 27.172 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan pertambahan penduduk usia tua (tidak produktif) tersebut dimana kelompok usia dengan komposisi terbanyak berada pada penduduk berusia 65-69 tahun sebesar 48,73% tahun 2017 dan meningkat menjadi 49,39% tahun 2021. Jelasnya lihat Tabel 2.16 di bawah.

Tabel 2.16
Perkembangan Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	0-4	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97
2	5-9	78.464	74.128	76.575	82.958	83.600	1,72
3	10-14	77.923	72.984	76.501	83.715	84.362	2,17
4	15-19	69.209	71.600	57.527	60.887	61.358	-2,40
5	20-24	68.150	69.047	66.317	71.623	72.177	1,53
6	25-29	66.973	63.768	64.993	69.863	70.403	1,35
7	30-34	67.553	64.714	65.187	65.979	66.489	-0,37
8	35-39	66.042	64.755	66.308	69.196	69.731	1,39
9	40-44	55.799	55.556	58.601	62.136	62.617	2,96
10	45-49	49.196	49.366	50.615	54.132	54.551	2,65
11	50-54	35.656	38.777	41.175	43.820	44.159	5,53
12	55-59	26.803	28.578	30.412	33.006	33.261	5,59
13	60-64	15.357	18.997	20.203	22.747	22.923	10,85
14	65-69	8.658	10.880	12.157	13.317	13.420	11,93
15	70-74	4.449	5.800	5.962	6.511	6.561	10,78
16	75+	4.661	7.436	6.891	7.136	7.191	14,13
17	Jumlah Penduduk <15 tahun	203.543	199.682	208.281	229.947	231.725	3,40
18	Jumlah Penduduk 15 thn Keatas	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
19	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	529.396	536.038	533.495	566.706	571.089	1,94
20	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
21	Jumlah Penduduk <15 tahun	27,43	26,66	27,60	28,38	28,38	0,88
22	Persen Kelompok Usia 0-4 dari <15 tahun	23,17	26,33	26,51	27,52	27,52	4,53
23	Persen Kelompok Usia 5-9 dari < 15 tahun	38,55	37,12	36,77	36,08	36,08	-1,63
24	Persen Kelompok Usia 10-14 dari < 15 tahun	38,28	36,55	36,73	36,41	36,41	-1,23
25	Jumlah Penduduk Usia 65->75 tahun	17.768	24.116	25.010	26.963	27.172	12,00

Sumber: Disduk Capil Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dan Olahan Tahun 2022

Oleh karena itu perlu disiapkan pelayanan khusus bagi penduduk usia tua baik pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta membangun sarana sosial lainnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara para orang tua yang sudah sepuh serta yang paling penting perhatian anak terhadap kesehatan orang mereka. Pertambahan usia tidak produktif ini juga disebabkan oleh adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat sehingga menambah angka usia harapan hidup masyarakat.

2.1.2.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Disisi lain rasio ketergantungan penduduk (*defendency ratio*) yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif yang terdiri dari usia belum produktif (0-14 Tahun) dan usia tidak produktif lagi yaitu usia >65 Tahun).



Gambar 2.20
Piramida Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2021

Komposisi umur penduduk Kabupaten Kampar dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada Gambar 2.20. Model piramida penduduk Kabupaten Kampar mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: (1)

aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita indeks gini, pemerataan pendapatan, indeks ketimpangan Williamson, angka penduduk miskin.

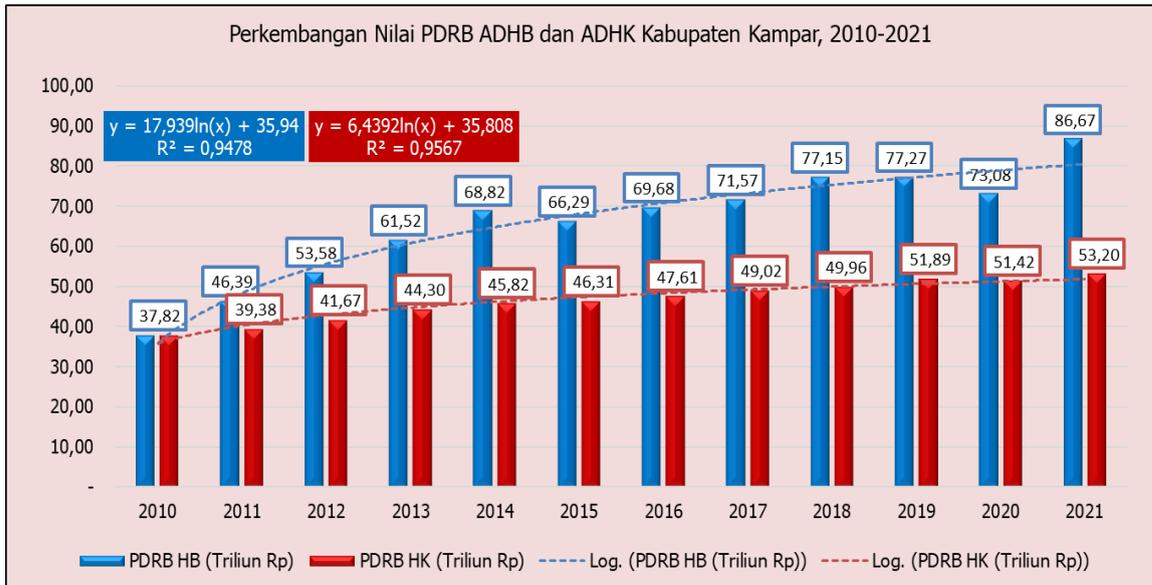
2.2.1.1 Perkembangan PDRB

PDRB sektor ekonomi menunjukkan kemampuan faktor-faktor produksi pada suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu, selanjutnya barang dan jasa akhir tersebut digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi dan ekspor-impor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Kampar dalam satu tahun, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 lapangan usaha (sektor ekonomi) yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14)

Perkembangan Nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap 17 sektor ekonomi tersebut pada selama periode 2010-2021 tumbuh sebesar 8,57% per tahun atau naik dari Rp. 37,82 triliun tahun 2010 naik menjadi Rp. 86,67 triliun tahun 2021. Sedangkan nilai PDRB harga konstan 17 sektor ekonomi tersebut selama periode 2010-2021 tumbuh sebesar 3,94% per tahun dengan nilai Rp. 37,82 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 53,19 triliun tahun 2021. Berdasarkan Gambar 2.21 nilai PDRB ADHB terjadi dua kali penurunan nilai yaitu pada tahun 2015 (Rp. 66,29 triliun) dan tahun 2020 (Rp. 73,08 triliun). Sementara nilai PDRB ADHK hanya turun pada tahun 2020 (Rp. 51,42 triliun). Perkembangan nilai PDRB ADHB dan ADHK selama tahun 2010-2021 jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.21

Perkembangan nilai PDRB menurut sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.17. Nilai PDRB sektor ekonomi tertinggi atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2010-2021 terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan naik dari Rp. 11,35 triliun tahun 2010 naik menjadi Rp. 28,52 tahun 2021 atau tumbuh sebesar 8,80% per tahun. Sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar harga berlaku selama periode tersebut adalah jasa perusahaan dari Rp. 1,2 milyar tahun 2010 hanya naik menjadi Rp. 2,45 milyar tahun 2021.



Gambar 2.21
Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2021

Namun sektor ekonomi dengan pertumbuhan nilai PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 14,65% per tahun atau naik dari Rp. 13,65 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 55,53 milyar pada tahun 2021. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan nilai PDRB terendah atas dasar harga berlaku adalah jasa perusahaan hanya sebesar 5,27% atau hanya naik dari Rp. 1,20 milyar pada tahun 2010 kemudian hanya naik menjadi Rp. 2,45 milyar pada tahun 2021.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi selama periode 2010-2021 pada PDRB atas dasar harga berlaku adalah pertambangan dan penggalian sebesar 38,66% per tahun, namun kontribusinya menurun dari 32,47% tahun 2010 menjadi 26,52% tahun 2021, atau dengan penurunan pertumbuhan kontribusi sebesar -1,00% pertahun. Penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi barang dan jasa pada usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas dan harga komoditas tersebut selama rentang waktu 2016-2021.

Sementara itu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terendah atas dasar harga berlaku selama tahun 2010-2021 adalah sektor jasa perusahaan dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,0032% per tahun, dan kontribusinya juga mengalami penurunan dari 0,0032% tahun 2010 turun menjadi 0,0028% tahun 2021 dengan rata-rata penurunan kontribusi sebesar -0,61% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan seperti kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa priklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan selama rentang waktu 2010-2021. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusinya menurut sektor ekonomi di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan 2.18 berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)											Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.355,38	12.049,95	12.888,94	13.636,65	15.347,66	16.483,57	18.200,03	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	8,80
B	Pertambangan dan Penggalian	12.281,94	18.698,54	22.889,08	28.026,21	31.556,99	25.993,64	25.737,54	24.678,05	28.297,52	25.027,29	17.914,02	22.983,91	8,18
C	Industri Pengolahan	9.246,06	10.104,96	11.269,94	12.524,99	13.519,61	14.565,37	15.572,00	16.474,47	17.000,87	18.155,69	18.951,56	22.053,03	8,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	17,24	20,76	16,31	20,84	28,33	34,42	40,84	44,16	47,81	52,80	55,53	14,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	2,89	3,06	3,08	3,19	3,55	3,63	3,87	3,91	4,01	4,05	4,26	4,24
F	Konstruksi	2.025,44	2.311,71	2.910,00	3.371,88	3.837,04	4.305,28	4.795,22	5.091,36	5.439,62	5.907,26	5.734,65	6.183,68	10,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.079,49	1.215,96	1.397,27	1.547,85	1.921,93	2.067,90	2.277,15	2.433,99	2.605,67	2.871,41	2.548,58	2.960,36	9,93
H	Transportasi dan Pergudangan	114,63	120,37	131,41	142,29	156,83	183,86	202,87	218,38	237,61	262,55	255,69	277,10	8,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,30	34,89	39,94	43,22	47,05	52,19	58,92	62,24	65,70	70,89	60,57	68,82	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	166,77	175,11	194,38	209,93	226,22	246,01	253,60	272,57	287,47	311,15	336,51	361,25	7,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,09	175,29	188,63	221,94	257,66	260,47	283,09	298,83	322,67	328,94	340,28	376,53	7,73
L	Real Estate	348,89	387,33	439,94	475,33	539,26	594,53	645,80	675,30	708,73	761,45	779,21	812,03	8,04
M,N	Jasa Perusahaan	1,20	1,28	1,49	1,68	1,98	2,16	2,37	2,51	2,67	2,97	2,43	2,45	7,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,10	714,10	798,65	847,07	870,97	907,46	961,78	1.030,10	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.115,60	5,27
P	Jasa Pendidikan	192,27	214,38	224,06	236,78	261,17	299,40	330,23	356,47	385,86	425,17	447,55	465,74	8,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,86	63,01	70,27	78,13	91,50	115,99	124,71	129,92	135,77	157,02	182,09	204,83	12,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	95,41	105,68	115,20	132,18	157,01	175,46	192,90	212,29	236,32	264,37	212,15	223,07	8,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.822,02	46.392,70	53.584,01	61.515,51	68.816,91	66.285,16	69.676,25	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	8,57

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022

Tabel 2.18
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun											Rata-rata Kontribusi 2010-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi (%)/Tahun	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	25,97	24,05	22,17	22,30	24,87	26,12	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	25,70	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	32,47	40,30	42,72	45,56	45,86	39,21	36,94	34,48	36,68	32,39	24,51	26,52	38,66	-1,00
C	Industri Pengolahan	24,45	21,78	21,03	20,36	19,65	21,97	22,35	23,02	22,04	23,50	25,93	25,44	22,01	0,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04	6,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,99
F	Konstruksi	5,36	4,98	5,43	5,48	5,58	6,50	6,88	7,11	7,05	7,65	7,85	7,13	6,20	2,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,85	2,62	2,61	2,52	2,79	3,12	3,27	3,40	3,38	3,72	3,49	3,42	3,03	1,86
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,26	0,25	0,23	0,23	0,28	0,29	0,31	0,31	0,34	0,35	0,32	0,28	0,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	-0,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,44	0,38	0,36	0,34	0,33	0,37	0,36	0,38	0,37	0,40	0,46	0,42	0,37	-0,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,38	0,35	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,42	0,43	0,47	0,43	0,40	0,02
L	Real Estate	0,92	0,83	0,82	0,77	0,78	0,90	0,93	0,94	0,92	0,99	1,07	0,94	0,88	0,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,54	1,49	1,38	1,27	1,37	1,38	1,44	1,41	1,50	1,52	1,29	1,45	-2,21
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,46	0,42	0,38	0,38	0,45	0,47	0,50	0,50	0,55	0,61	0,54	0,46	0,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,17	0,18	0,18	0,18	0,20	0,25	0,24	0,16	4,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,25	0,23	0,21	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,31	0,34	0,29	0,26	0,26	0,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	0,81											

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa pertumbuhan nilai PDRB harga konstan selama periode 2010-2021 sebesar 3,94% per tahun dengan nilai PDRB sebesar Rp. 37,82 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 53,19 triliun. Selama periode yang sama sektor ekonomi dengan nilai PDRB tertinggi atas dasar harga konstan adalah sektor pertanian dengan nilai Rp. 11,35 triliun pada tahun 2010 kemudian naik menjadi Rp. 18,16 triliun tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,38% per tahun. Sedangkan sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar harga konstan adalah sektor jasa perusahaan hanya Rp. 1,20 milyar tahun 2010 kemudian naik menjadi Rp. 1,61 milyar tahun 2021 atau dengan pertumbuhan sebesar 3,04% per tahun.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi pada PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2010-2021 adalah pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 30,09% per tahun, dengan kontribusi naik dari 30,027% tahun 2010 menjadi 34,15% tahun 2021 dengan pertumbuhan kontribusi sebesar 1,21% pertahun. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor pertanian baik sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya, kehutanan dan perikanan komoditas tersebut selama rentang waktu 2016-2021.

Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi terendah atas dasar harga konstan selama tahun 2010-2021 adalah jasa perusahaan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,0032% per tahun, dan kontribusinya turun dari 0,0032% tahun 2010 turun menjadi 0,0028% tahun 2021 dengan penurunan kontribusi sebesar -0,20% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan seperti kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa iklan dan jasa persewaan mesin dan peralatan selama rentang waktu 2016-2021. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusinya menurut sector ekonomi di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.19 dan 2.20 berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kampar 2010-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)											Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.355,38	11.602,69	12.004,56	12.380,41	12.984,99	13.031,87	13.672,51	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	4,38
B	Pertambangan dan Penggalian	12.281,94	12.756,58	13.221,18	13.819,94	13.880,14	13.921,70	13.820,70	13.083,38	12.362,26	11.628,28	10.889,94	10.566,70	-1,28
C	Industri Pengolahan	9.246,06	9.741,79	10.693,18	11.966,08	12.476,39	12.668,78	13.205,27	14.151,23	14.668,08	16.051,38	15.900,07	16.568,64	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	14,43	15,06	15,70	18,99	20,68	23,27	24,39	26,01	26,89	29,18	30,70	7,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	2,79	2,81	2,81	2,84	2,90	2,88	2,96	2,96	2,97	2,99	3,14	1,36
F	Konstruksi	2.025,44	2.209,95	2.482,75	2.670,88	2.857,49	3.004,10	3.126,37	3.236,10	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.527,06	5,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.079,49	1.142,08	1.217,06	1.318,28	1.390,11	1.399,61	1.453,32	1.536,74	1.631,83	1.716,90	1.466,20	1.690,37	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	114,63	117,23	121,73	125,24	128,87	139,48	147,15	155,44	162,60	170,63	156,80	165,80	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,13	33,33	34,51	35,48	36,32	37,73	39,33	40,94	42,64	45,45	38,04	42,80	2,87
J	Informasi dan Komunikasi	166,77	172,11	182,71	190,97	197,51	202,26	206,36	210,45	214,85	227,22	245,93	262,93	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,09	174,08	182,48	203,66	221,80	213,96	221,56	228,16	238,84	239,42	248,66	261,12	4,15
L	Real Estate	348,89	359,26	397,55	412,43	431,26	450,36	456,80	470,37	487,88	514,51	524,58	540,93	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	1,20	1,25	1,36	1,46	1,61	1,66	1,71	1,78	1,87	1,99	1,59	1,61	3,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,10	687,97	734,51	756,66	766,09	781,54	781,99	806,55	830,10	870,31	810,96	806,24	2,19
P	Jasa Pendidikan	192,27	199,72	204,52	208,85	215,57	220,12	226,42	238,78	252,82	272,27	280,36	289,77	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,86	61,22	65,34	69,81	75,14	82,16	83,10	85,59	87,62	97,35	110,36	122,84	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	95,41	101,82	107,23	118,94	131,36	135,15	141,46	152,43	166,71	182,20	142,70	148,88	4,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.822,02	39.378,31	41.668,55	44.297,58	45.816,47	46.314,07	47.610,21	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	3,94

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

Tabel 2.20
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun												Rata-Rata Kontribusi 2010-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi (%) / Tahun
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	29,46	28,81	27,95	28,34	28,14	28,72	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	30,09	1,21
B	Pertambangan dan Penggalian	32,47	32,39	31,73	31,20	30,30	30,06	29,03	26,69	24,74	22,41	21,18	19,86	27,67	-4,32
C	Industri Pengolahan	24,45	24,74	25,66	27,01	27,23	27,35	27,74	28,87	29,36	30,93	30,92	31,15	27,95	2,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	4,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-1,72
F	Konstruksi	5,36	5,61	5,96	6,03	6,24	6,49	6,57	6,60	6,70	6,79	6,63	6,63	6,30	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,85	2,90	2,92	2,98	3,03	3,02	3,05	3,13	3,27	3,31	2,85	3,18	3,04	1,14
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,30	0,31	0,30	0,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	-0,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44	0,48	0,49	0,44	1,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,44	0,44	0,46	0,48	0,46	0,47	0,47	0,48	0,46	0,48	0,49	0,46	0,96
L	Real Estate	0,92	0,91	0,95	0,93	0,94	0,97	0,96	0,96	0,98	0,99	1,02	1,02	0,96	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,0032	0,0032	0,0033	0,0033	0,0035	0,0036	0,0036	0,0036	0,0037	0,0038	0,0031	0,0030	0,0034	-0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,75	1,76	1,71	1,67	1,69	1,64	1,65	1,66	1,68	1,58	1,52	1,67	-0,96
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,51	0,49	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,51	0,52	0,55	0,54	0,50	0,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,18	3,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,25	0,26	0,26	0,27	0,29	0,29	0,30	0,31	0,33	0,35	0,28	0,28	0,29	1,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	0,75												

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB HK)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dengan migas selama 2011-2021 rata-rata sebesar 3,17% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada Tahun 2013 yaitu sebesar 6,31% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -0,90%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar sejak Tahun 2011-2021 sudah mampu melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau kecuali pada tahun 2018 yang hanya mencapai 1,91% sementara pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sebesar 2,35%. Berikut Gambar 2.22 disajikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar selama tahun 2011-2021.



Gambar 2.22
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas
Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2011-2021

Sementara itu pertumbuhan ekonomi sektoral selama periode 2011-2021 menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari 17 sektor ekonomi selama periode tersebut yaitu sebesar 10,09%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,15% per tahun dan terendah terjadi pada tahun 2016 hanya 1,14%. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terendah bahkan mengalami kontraksi selama periode 2011-2021 adalah sektor pertambangan dan penggalan yaitu sebesar -1,28% per tahun. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,35%. Namun penurunan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan (industri migas) di wilayah ini tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena proses produksi barang dan jasa sector ini rata-rata dilaksanakan oleh perusahaan, tetapi mempengaruhi aktifitas ekonomi lainnya dan penerimaan daerah sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi kondisi ekonomi terutama pendapatan masyarakat dan juga berdampak pada penurunan dana DBH pemerintah daerah. Oleh karena itu tentu dapat

dirasakan dampak negative oleh masyarakat dan pemerintah di daerah walaupun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi lokal, seperti yang terjadi pada kegiatan yang padat modal seperti tambang minyak.

Sementara sektor pertanian yang banyak digeluti masyarakat sebagai lapangan kerja utama hanya mengalami rata-rata pertumbuhan selama periode 2011-2021 tersebut sebesar 4,38% per tahun. Selama periode tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2017 sebesar 6,76%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar serta kegiatan jasa pertanian. Sektor pertanian meliputi beberapa sub sektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya, kehutanan dan perikanan akibat adanya peningkatan investasi beberapa tahun sebelumnya sehingga berakibat pada peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian pada tahun 2017.

Namun pertumbuhan ekonomi terendah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kampar selama 2011-2021 terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 0,36% disebabkan terjadinya penurunan volume produksi barang dan jasa pada sektor tersebut. Sementara komoditas tersebut mendominasi lapangan usaha dan kerja masyarakat di wilayah ini. Penurunan produksi tersebut akibat terjadinya penurunan harga komoditas yang dihasilkan di wilayah tersebut yaitu kelapa sawit dan karet sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengelola usahanya secara maksimal. Selain itu rendahnya harga komoditas kelapa sawit dan karet berdampak pada menurunnya gairah masyarakat yang bergerak dalam sektor tersebut untuk meningkatkan produksinya sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terutama pada masyarakat adalah melalui peningkatan kapasitas investasi, invensi dan inovasi serta penerapan teknologi dengan manajemen terbaik atau *good agricultural practices*.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan melalui penyediaan, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor ekonomi yang lain sebagai pemanfaat terhadap hasil sektor pertanian seperti sektor industri. Sektor industri yang tangguh dapat menyerap komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat secara umum untuk diolah di dalam di wilayah ini agar menjadi produk industri yang dihasilkan secara relatif tidak berkorelasi secara langsung dengan harga pasar internasional sebagai komoditas utama.

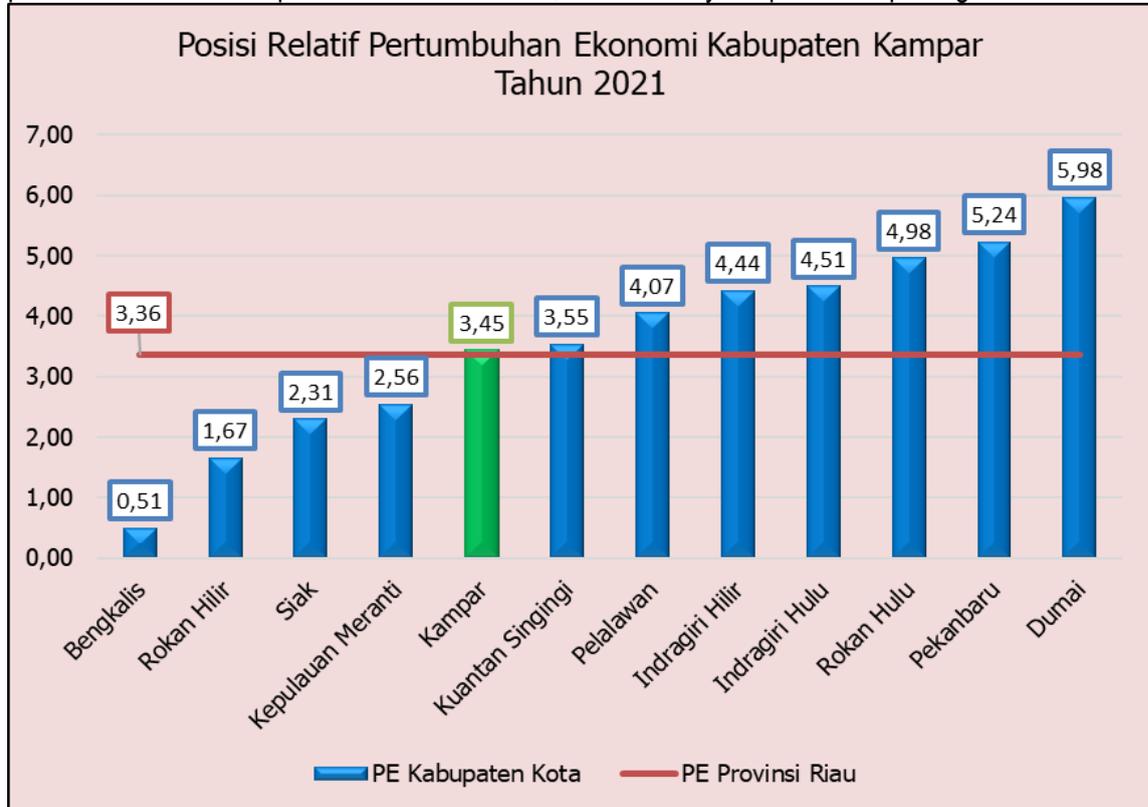
Selain itu secara makro ekonomi upaya lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong pengambil kebijakan pada sektor moneter melalui penurunan biaya modal atau tingkat bunga bank. Penurunan tingkat bunga bank akan memotivasi masyarakat untuk melakukan pinjaman modal baik untuk belanja modal (investasi) maupun belanja konsumsi dan selain itu melalui peningkatan gaji pekerja yang pertumbuhannya melebihi tingkat inflasi. Hal ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga belanja konsumsi RT terhadap barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi sektoral selama periode tahun 2011-2021 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dengan Migas Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%)

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	3,46	3,13	4,88	0,36	4,92	6,76	5,73	5,73	5,19	5,83	4,38
B	Pertambangan dan Penggalian	3,86	3,64	4,53	0,44	0,30	-0,73	-5,33	-5,51	-5,94	-6,35	-2,97	-1,28
C	Industri Pengolahan	5,36	9,77	11,90	4,26	1,54	4,23	7,16	3,65	9,43	-0,94	4,20	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,71	4,37	4,25	20,96	8,90	12,52	4,81	6,64	3,38	8,52	5,21	7,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	0,72	0,00	1,07	2,11	-0,69	2,78	0,00	0,34	0,67	5,02	1,36
F	Konstruksi	9,11	12,34	7,58	6,99	5,13	4,07	3,51	3,46	5,21	-3,29	3,53	5,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,80	6,57	8,32	5,45	0,68	3,84	5,74	6,19	5,21	-14,60	15,29	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	2,27	3,84	2,88	2,90	8,23	5,50	5,63	4,61	4,94	-8,11	5,74	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,73	3,54	2,81	2,37	3,88	4,24	4,09	4,15	6,59	-16,30	12,51	2,87
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	6,16	4,52	3,42	2,40	2,03	1,98	2,09	5,76	8,23	6,91	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	4,83	11,61	8,91	-3,53	3,55	2,98	4,68	0,24	3,86	5,01	4,15
L	Real Estate	2,97	10,66	3,74	4,57	4,43	1,43	2,97	3,72	5,46	1,96	3,12	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	4,17	8,80	7,35	10,27	3,11	3,01	4,09	5,06	6,42	-20,10	1,26	3,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	6,76	3,02	1,25	2,02	0,06	3,14	2,92	4,84	-6,82	-0,58	2,19
P	Jasa Pendidikan	3,87	2,40	2,12	3,22	2,11	2,86	5,46	5,88	7,69	2,97	3,36	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,81	6,73	6,84	7,64	9,34	1,14	3,00	2,37	11,10	13,36	11,31	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,72	5,31	10,92	10,44	2,89	4,67	7,75	9,37	9,29	-21,68	4,33	4,55
PDRB Dengan Migas		4,11	5,82	6,31	3,43	1,09	2,80	2,97	1,91	3,86	-0,90	3,45	3,17

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

Sementara itu jika diamati posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 terendah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,45% dan hanya ada Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Rokan Hilir, dan Bengkalis yang pertumbuhannya lebih rendah dari Kabupaten Kampar, namun pertumbuhan ekonomi kabupaten Kampar berada lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sebesar 3,36%. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.23
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021

2.2.1.3 Pertumbuhan Laju Inflasi

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama 1 Tahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun.



Gambar 2.24
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021

Perkembangan inflasi Kabupaten Kampar dengan migas selama tahun 2011-2021 menunjukkan dalam kategori inflasi ringan karena rata-rata inflasinya sebesar 4,79% per tahun dan mengalami penurunan dari 17,81% pada tahun 2011 menjadi -4,56% pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali menjadi 14,64% tahun 2021. Perkembangan inflasi di Kabupaten Kampar tahun 2011-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.24 di atas.

Sementara itu perkembangan inflasi sektor ekonomi menunjukkan bahwa selama sebelas tahun sektor ekonomi yang mengalami rata-rata inflasi tertinggi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 9,19% sementara sektor yang mengalami rata-rata inflasi terendah adalah sektor industri pengolahan hanya sebesar 2,71%.

Namun jika dilihat inflasi tahunan menunjukkan bahwa rendahnya inflasi pada tahun 2020 merupakan dinamika kebijakan PPKM serta produksi bahan pangan di daerah pemasok memengaruhi inflasi. Selanjutnya peningkatan inflasi tahun 2021 akibat permintaan seiring dengan kebijakan pelonggaran PPKM ditambah dengan ketidakstabilan pasokan komoditas pangan disinyalir menjadi penyebab tingginya tekanan harga komoditas pada hampir seluruh kelompok komoditas. Komoditas bahan pangan seperti cabai merah, ayam hidup, dan daging ayam ras memiliki andil besar dalam mendorong tekanan inflasi.

Berbagai perkembangan tersebut, ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan mampu tumbuh positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sehingga dapat menurun angka inflasi kembali. Kondisi tersebut mendorong peningkatan permintaan komoditas utama yang berakibat peningkatan supply di Kabupaten Kampar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan tingkat inflasi. Disisi lain potensi peningkatan inflasi juga dapat terjadi akibat permintaan yang meningkat jika tidak dibarengi dengan peningkatan supply, sementara tingginya harga komoditas ekspor mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang juga dapat mendorong peningkatan inflasi. Selain itu, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi produktif diperkirakan turut meningkatkan inflasi. Jika dilihat dari 17 sektor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua sektor ekonomi masuk dalam kategori inflasi ringan karena dibawah 10% per tahun. Jelasnya perkembangan inflasi sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Inflasi Sektoral Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2011–2021 (%)

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,85	3,38	2,59	7,31	7,01	5,24	0,82	-2,05	0,26	6,71	11,63	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	46,58	18,11	17,14	12,11	-17,88	-0,26	1,29	21,36	-5,97	-23,57	32,23	9,19
C	Industri Pengolahan	3,73	1,61	-0,69	3,53	6,10	2,57	-1,28	-0,44	-2,41	5,38	11,67	2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,47	15,38	-24,64	5,64	24,83	7,97	13,20	1,39	4,72	1,77	-0,04	6,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,58	5,13	0,65	2,48	8,98	2,96	3,73	1,03	2,21	0,32	0,16	2,84
F	Konstruksi	4,60	12,05	7,71	6,36	6,73	7,02	2,58	3,27	3,22	0,38	4,15	5,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,47	7,83	2,27	17,75	6,86	6,05	1,09	0,82	4,74	3,93	0,75	5,32
H	Transportasi dan Pergudangan	2,68	5,14	5,24	7,11	8,32	4,59	1,90	4,01	5,30	5,98	2,49	4,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	10,56	5,25	6,34	6,78	8,30	1,48	1,35	1,23	2,09	0,98	4,41
J	Informasi dan Komunikasi	1,74	4,56	3,33	4,19	6,19	1,04	5,39	3,31	2,34	-0,08	0,41	2,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	2,66	5,42	6,60	4,79	4,96	2,51	3,15	1,70	-0,40	5,37	3,40
L	Real Estate	7,81	2,64	4,15	8,50	5,57	7,09	1,55	1,18	1,88	0,37	1,06	3,80
M,N	Jasa Perusahaan	2,40	6,99	5,03	6,88	5,81	6,51	1,74	1,25	4,53	2,40	-0,43	3,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	4,75	2,96	1,56	2,13	5,92	3,84	2,75	1,64	2,87	0,84	3,01
P	Jasa Pendidikan	7,34	2,06	3,49	6,86	12,27	7,23	2,36	2,23	2,32	2,23	0,68	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,92	4,49	4,07	8,81	15,93	6,30	1,15	2,08	4,09	2,30	1,06	4,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,79	3,51	3,44	7,55	8,62	5,04	2,13	1,78	2,36	2,46	0,78	3,77
PDRB Dengan Migas		17,81	9,15	7,99	8,16	-4,71	2,25	-0,24	5,78	-3,58	-4,56	14,64	4,79

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

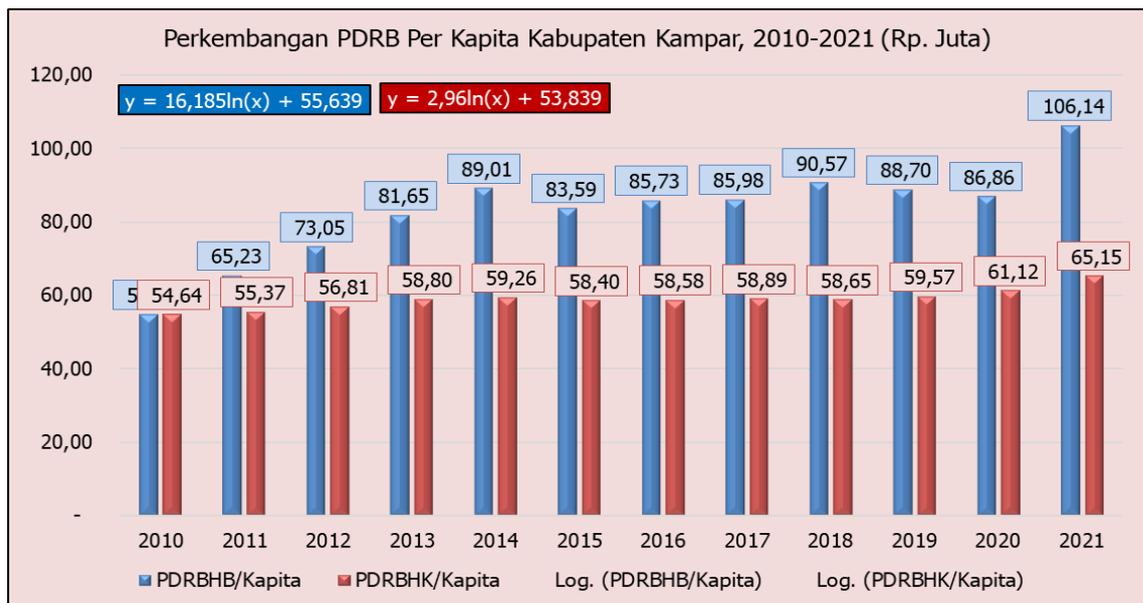
Walaupun inflasi dalam kategori rendah namun inflasi yang terjadi juga disebabkan oleh harga komoditas-komoditas bahan pangan akibat faktor fundamental, yaitu masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar daerah. Komoditas-komoditas dimaksud antara lain: (i) beras pera/bederai, (ii) telur ayam ras, (iii) daging ayam ras, (iv) cabai merah, (v) bawang merah, (vi) daging sapi, dan (vii) bawang putih. Upaya untuk menekan angka inflasi maka struktur produksi dan distribusi serta pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kampar kedepan.

2.2.1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat peningkatan produksi barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.25, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 54,64 Juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 106,14 juta per kapita pada tahun 2021 atau naik dengan pertumbuhan 6,57% per tahun. Demikian halnya dengan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 54,64 juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 65,15 juta per kapita pada tahun 2021 atau dengan pertumbuhan 1,63% per tahun.



Gambar 2.25
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Berdasarkan Tabel 2.23 pertumbuhan pendapatan per kapita atas harga dasar ber laku tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 22,205%, dan atas dasar harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,59%. Kontraksi pertumbuhan PDRB ADHB per kapita terjadi pada tahun 2015, 2019 dan 2020. Hal ini terjadi karena musibah asap yang berekspanjangan pada tahun 2015, dan Covid 19 tahun 2019-2020 sehingga menyebabkan terjadinya gangguan aktifitas proses produksi barang dan jasa dan mengakibatkan turunnya produksi barang dan jasa. Tetapi terhadap PDRB ADHK kontraksi pertumbuhan terjadi hanya pada tahun 2015 dan 2018. Berikut Tabel 2.23 menyajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kampar selama tahun 2010-2021.

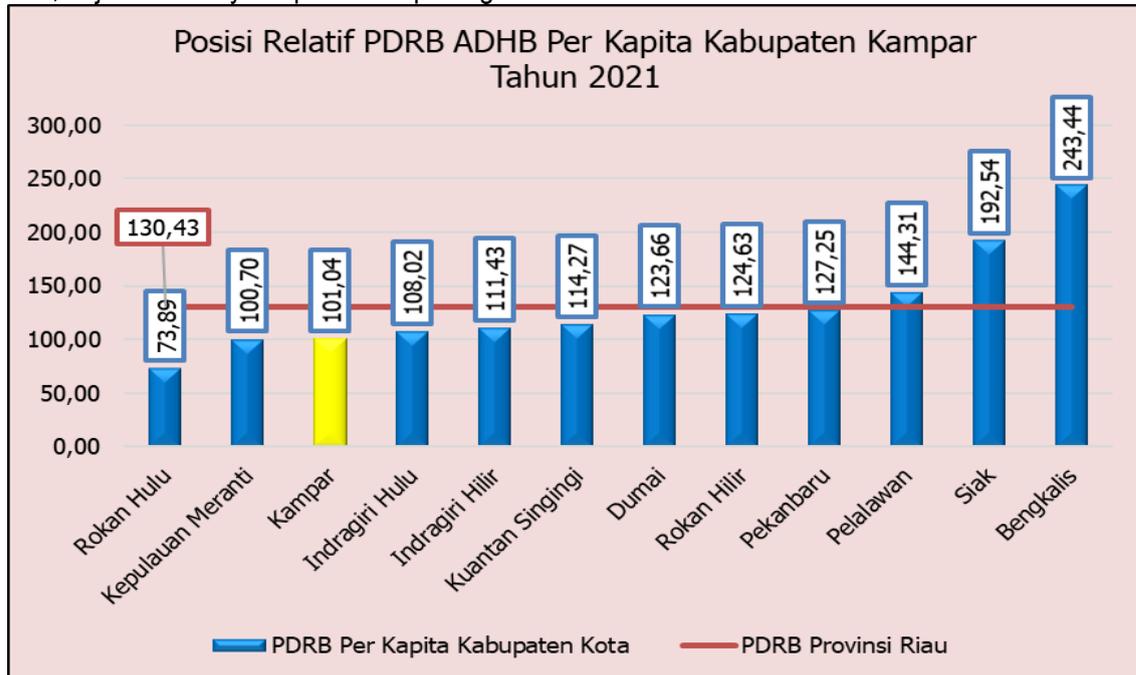
Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Tahun	ADHB Dengan Migas (Rp. Juta)	ADHK Dengan Migas (Rp. Juta)	ADHB Perkapita (Rp. Juta)	Pertumbuhan /Tahun (%)	ADHK Perkapita (Rp. Juta)	Pertumbuhan /Tahun (%)
2010	37.822	37.822	54,64	0,00	54,64	0,00
2011	46.393	39.378	65,23	19,37	55,37	1,33
2012	53.584	41.669	73,05	11,99	56,81	2,60
2013	61.516	44.298	81,65	11,77	58,80	3,51
2014	68.817	45.816	89,01	9,01	59,26	0,78
2015	66.285	46.314	83,59	-6,09	58,40	-1,44
2016	69.676	47.610	85,73	2,57	58,58	0,31
2017	71.571	49.022	85,98	0,29	58,89	0,53
2018	77.153	49.959	90,57	5,34	58,65	-0,42
2019	77.267	51.889	88,70	-2,07	59,57	1,56
2020	73.076	51.420	86,86	-2,08	61,12	2,61
2021	86.670	53.196	106,14	22,20	65,15	6,59

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2010-2022, Olahan Tim Tahun 2022

Sementara itu jika diamati posisi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 10 terendah dengan PDRB ADHB Perkapita senilai Rp. 101,04 juta dan hanya ada Kabupaten yaitu Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hulu yang nilai pendapatan per kapitanya yang lebih rendah dan berada

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB ADHB per kapita Provinsi Riau senilai Rp. 130,42 juta. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.26
Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

2.2.1.5 Perkembangan Indeks Gini

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Lebih lanjut Todaro (2020) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan *sangat tidak merata* jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan *ketidakmerataan sedang* jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49 dan kurang 0,30 maka pada kategori ketimpangan rendah.

Selama periode 2018-2021, angka indeks gini Kabupaten Kampar berkisar antara 0,293-0,281 dengan trend berfluktuatif menurun (terjadi perbaikan) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.24 dan Gambar 2.27. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan antara penduduk di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata selama 2018-2021. Pergerakan kategori relatif merata ini perlu menjadi perhatian untuk dipertahankan bahkan dapat diturunkan dengan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau ke depan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut masih perlu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut. Selama periode 2018-2021 terjadi

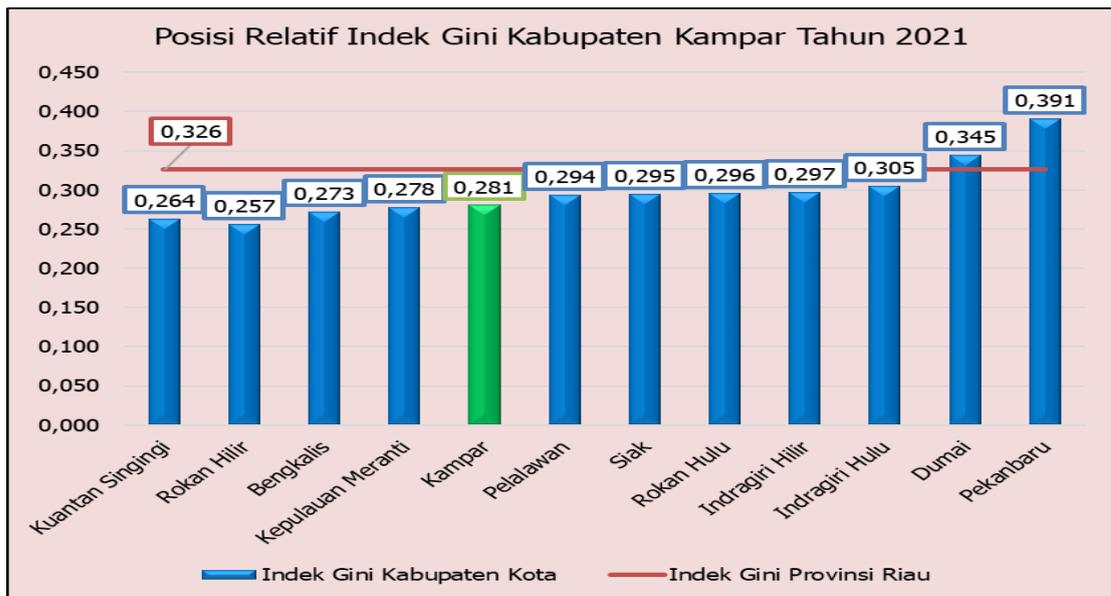
perbaikan pemerataan dengan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 1,26% per tahun untuk Kabupaten Kampar dan 0,09% per tahun untuk Provinsi Riau.

Tabel 2.24
Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021

Wilayah	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%) / Tahun
	2018	2019	2020	2021	
Indek Gini Kabupaten Kampar	0,293	0,300	0,306	0,281	-1,26
Indek Gini Provinsi Riau	0,327	0,334	0,329	0,326	-0,09

Sumber: BPS Provinsi Riau, BRS 2022

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 0,281 dan 0,326 sudah termasuk kategori relatif merata. Namun jika dilihat indeks gini rasio antara perkotaan dan pedesaan maka tingkat pemerataan pendapatan penduduk kota dan desa di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau pada tahun 2021 menunjukkan kondisi yang berbeda dimana IGR perkotaan lebih tinggi sedangkan pedesaan kategori relatif merata. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (*self services development*).



Gambar 2.27
Posisi Relatif Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

IGR Kabupaten Kampar pada tahun 2021 masih lebih baik dibandingkan indeks gini Indonesia (0,381) meski berada dalam kelompok yang berbeda yaitu ketidakmerataan sedang dan merata. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Kota di provinsi Riau, pencapaian indeks gini Kabupaten Kampar berada pada posisi terbaik kelima di Provinsi Riau lebih rendah dibanding Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Jelasnya lihat Gambar 2.27 di atas.

2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional

Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

1. Memperoleh < 12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi
2. Memperoleh 12 – 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang
3. Memperoleh 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

2.2.1.7 Indek Ketimpangan Williamson (Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per Kabupaten dan kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Jika indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata, sehingga dapat dikelompokkan pada: a) Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$; b) Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; dan c) Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$.

Indeks Williamson Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 0,44. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,48. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah masih belum merata. Selama periode 2011-2021 dapat dilihat pemerataan pembangunan terus mengalami perbaikan. Hal ini juga dapat diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Riau.

2.2.1.8 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan dengan kata lain Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Ada beberapa tinjauan kategori kemiskinan terutama terkait dengan:

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- c. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergođa dengan keadaan tetangga.
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

1) Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar selama periode 2010-2021 berkurang sebesar -0,22% per tahun. Perkembangan indikator kemiskinan Kabupaten Kampar seperti yang disajikan pada Tabel 2.25 di bawah ini:

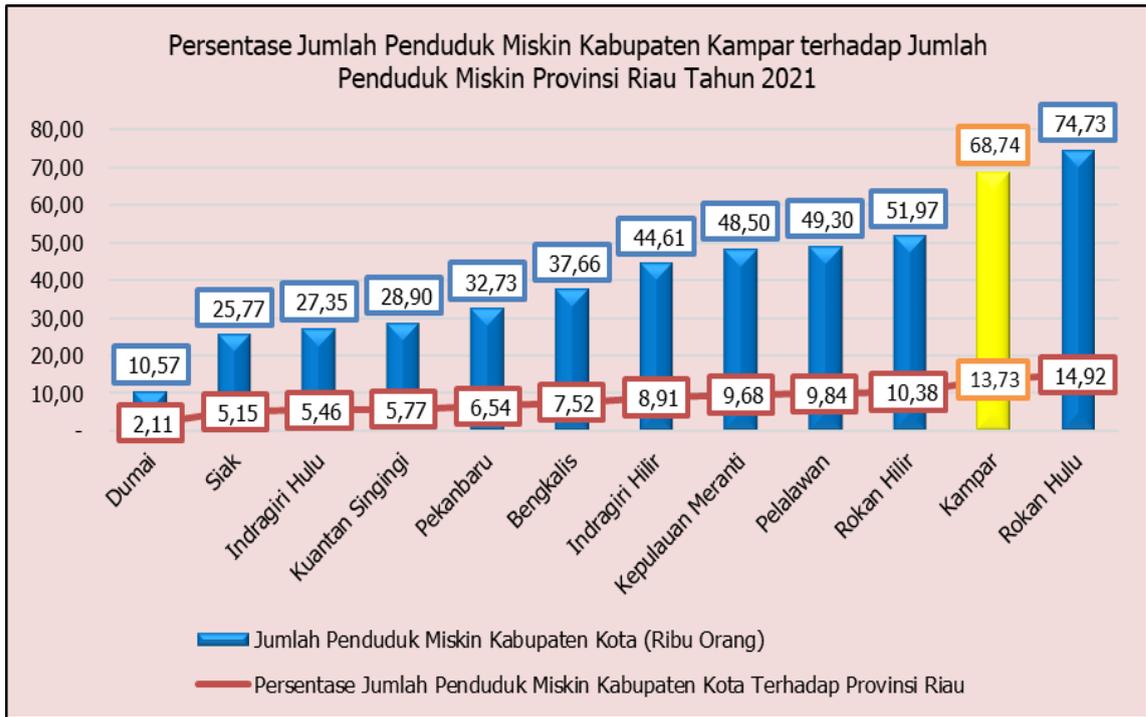
Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Tahun	Indikator Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indek Kedalaman Kemiskinan	Indek Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan Rp/ Kapita/ Bulan
2010	72,30	10,47	1,37	0,29	279.606
2011	61,20	8,52	1,38	0,36	308.446
2012	61,75	8,36	0,97	0,21	320.907
2013	68,58	9,04	0,86	0,15	336.681
2014	67,61	8,68	1,22	0,30	348.373
2015	72,22	9,17	1,41	0,32	360.324
2016	67,68	8,38	1,24	0,29	375.716
2017	66,33	8,02	1,01	0,20	398.138
2018	69,32	8,18	1,10	0,21	419.306
2019	66,81	7,71	0,93	0,18	434.601
2020	65,30	7,38	0,77	0,13	460.991
2021	68,74	7,82	0,99	0,21	477.603

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2011-2022

Jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 72,30 ribu jiwa kemudian berkurang menjadi 68,74 ribu jiwa tahun 2021 atau berkurang sebanyak 3.560 jiwa. Rendahnya kemampuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kecepatan dalam strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara relatif berpacu dengan penambahan jumlah penduduk yang tumbuh sebesar 1,07% per tahun selama tahun 2017-2021.

Sementara itu jika diamati posisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 2 paling banyak dengan jumlah penduduk miskin 68.740 jiwa. Jika dilihat kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Riau sebanyak 500.830 jiwa adalah 13,37%. Posisi relatif jumlah dan kontribusi penduduk miskin Kabupaten Kampar terhadap penduduk miskin Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.28.

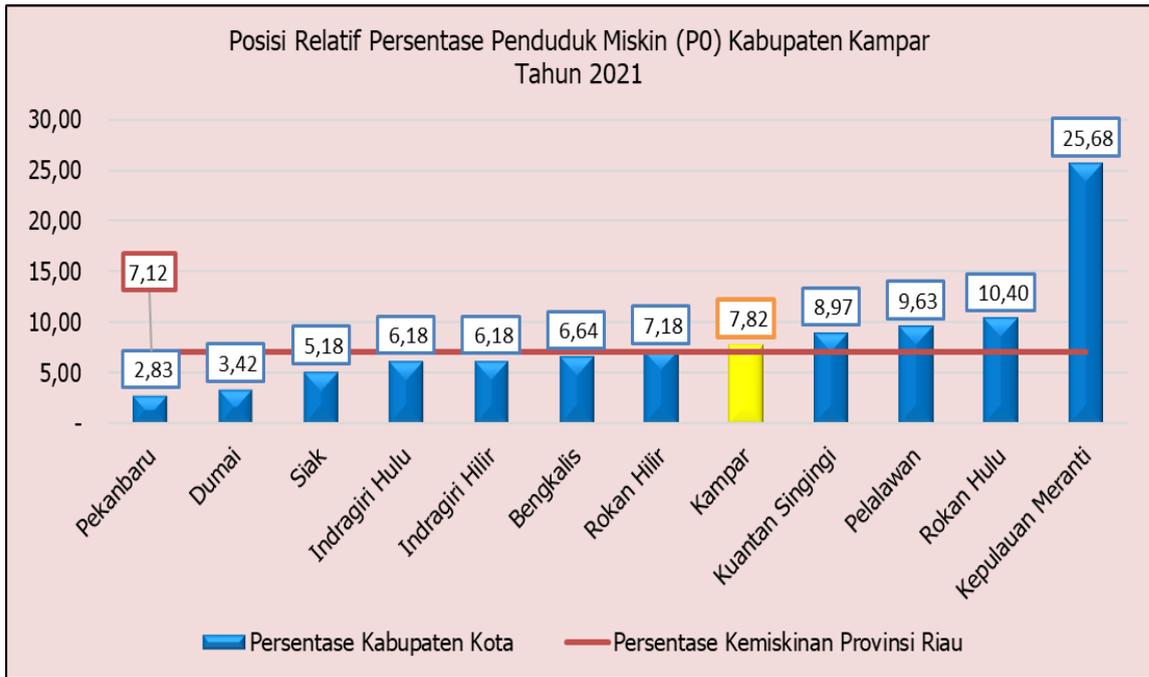


Gambar 2.28

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kampar terhadap Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

2) Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin-P0)

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin sebesar 10,47%, menurun menjadi 7,82% pada tahun 2021. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2010–2021 sebesar -2,34% per tahun. Namun demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi Riau yang hanya sebesar 7,12% tahun 2021. Artinya jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena penambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin memerlukan rencana yang tepat dan akurat terutama terkait dengan data kependudukan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.



Gambar 2.29

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P0 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

Sementara itu jika diamati posisi relatif persentase jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan indeks P0 sebesar 7,82% artinya terdapat 7,82% penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan di atas garis kemiskinan atau proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Kampar lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. Posisi relatif jumlah persentase penduduk miskin Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.29.

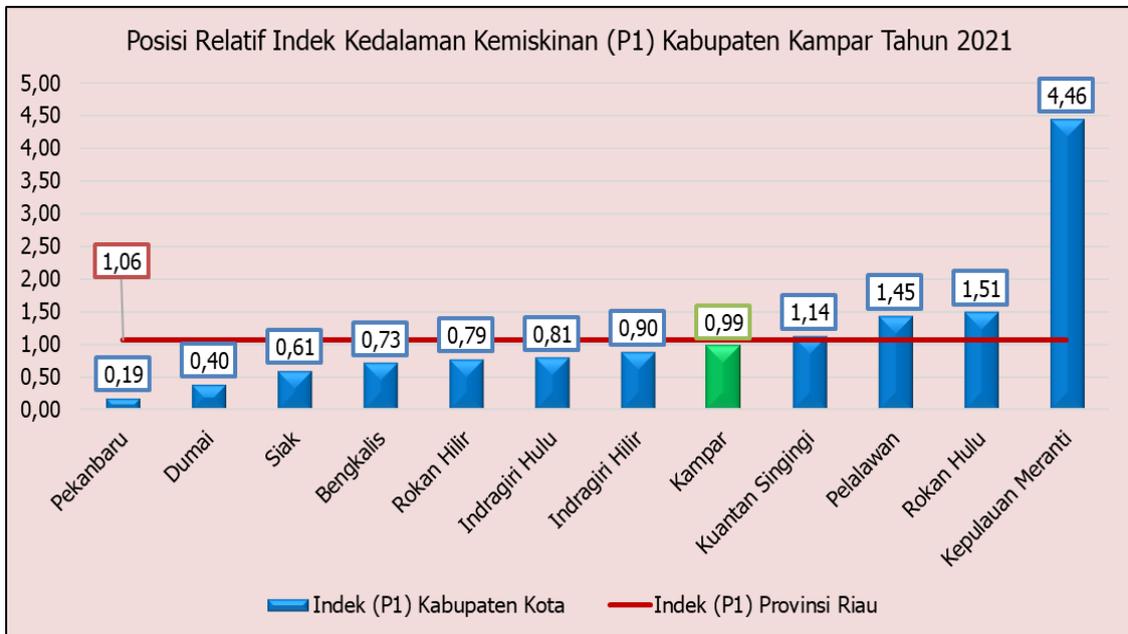
3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selanjutnya jika diamati Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil P1 maka semakin besar potensi dapat dikeluarkannya dana untuk pengentasan kemiskinan, pencapaian target, sasaran, dan jalannya program bantuan.

Perkembangan P1 di Kabupaten Kampar selama periode 2010-2021 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,79 per tahun. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menurun sebesar 79,00%. Jika dilihat indeks P1 pada tahun 2010 sebesar 1,375 kemudian menurun menjadi 0,99 pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 0,38. Oleh karena itu upaya untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin harus terus dilakukan yang didasari dengan pendataan secara detail profil penduduk miskin yang bersangkutan. Perkembangan indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Sementara itu jika diamati posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan indeks P1

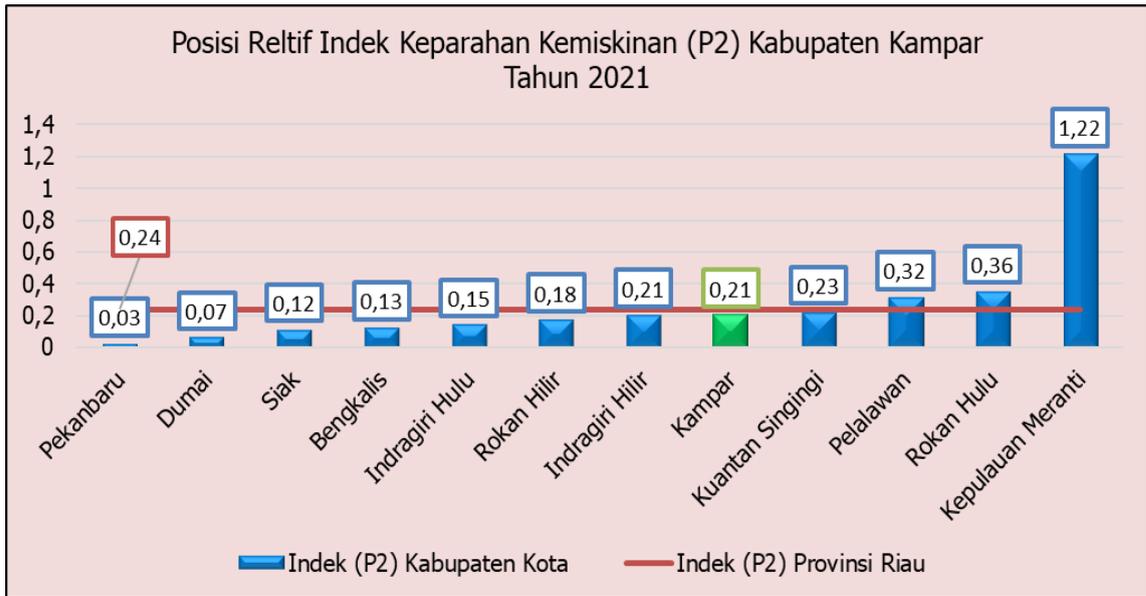
sebesar 0,99 artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kampar lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti dan bahkan Provinsi Riau. Posisi relatif jumlah indek kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Gambar 2.30
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin atau semakin timpang pengeluaran penduduk miskin. Perkembangan P2 di Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi selama periode 2010-2021. Secara relatif kondisi P2 mengalami perkembangan yang signifikan karena nilai indek P2 tahun 2010 sebesar 0,29 keumudian berkurang menjadi 0,21 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kampar memiliki ketimpangan yang lebih sempit dari pada provinsi Riau dengan nilai indek P2 sebesar 0,24. Perkembangan indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.25



Gambar 2.31

Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

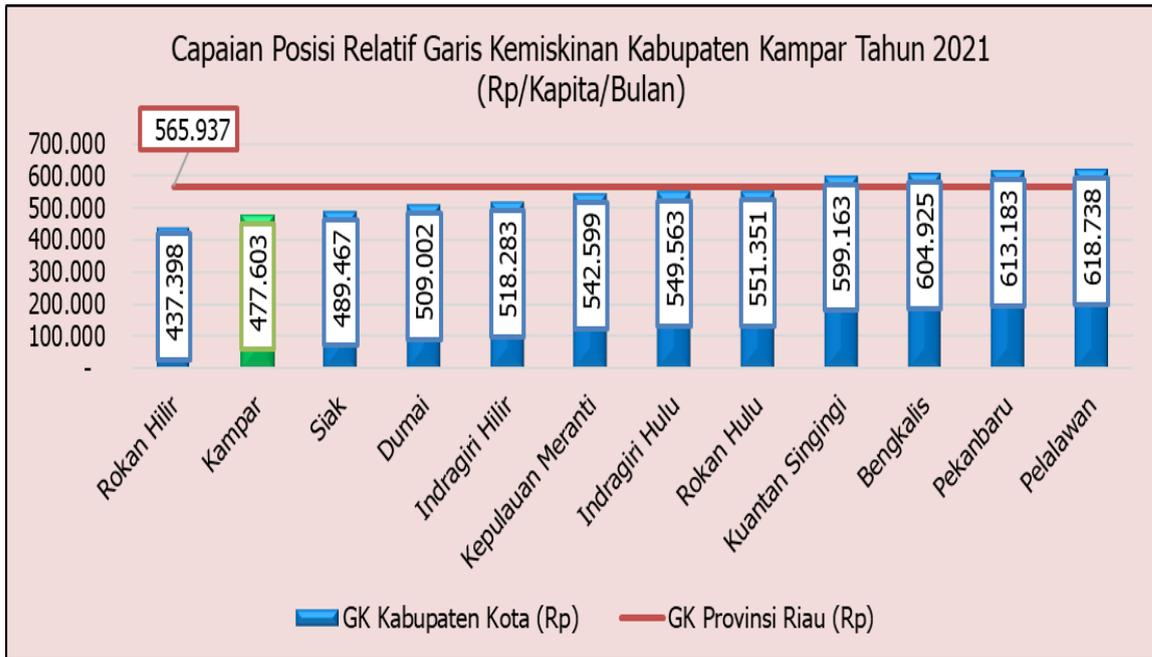
Sementara itu jika diamati posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan indeks P1 sebesar 0,21 artinya penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kampar lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti dan bahkan Provinsi Riau. Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.31.

5) Garis Kemiskinan (Poverty Line)

Sementara itu perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kampar memiliki kecenderungan yang sama. GK adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah dan digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, seperti program peningkatan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Perkembangan GK Kabupaten Kampar mengalami pertumbuhan 5,00%, dimana GK pada tahun 2010 senilai Rp. 279.606 /Kapita/Bulan kemudian meningkat menjadi Rp. 477.603/Kapita/Bulan atau naik senilai Rp. 197.997 /Kapita/Bulan selama tahun 2010-2021. Namun pada tahun 2021, GK Kabupaten Kampar Rp.477.603/kapita/bulan masih lebih rendah dibandingkan dengan GK provinsi Riau yaitu senilai Rp. 565.937/kapita/bulan. Artinya kebutuhan minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup per bulan di Kabupaten Kampar lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau. Namun apabila penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan individu penduduk sebanyak itu maka penduduk tersebut masuk kategori miskin.

Sementara itu posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 2 terendah dengan indeks GK senilai Rp.477.603/kapita/bulan. GK Kabupaten Kampar hanya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan GK Kabupaten Rokan Hilir. Posisi relatif GK Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Gambar 2.32
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (P3) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P3 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

6) Penduduk Miskin Kecamatan

Selanjutnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan distribusi menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.26. Berdasarkan basis data terpadu sebagaimana yang dikelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbasis *By Name By Address (BNBA)* Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tingginya tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin dapat disebabkan oleh belum terkendalikannya tingkat inflasi terhadap komoditas untuk nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Komoditas untuk kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara komoditas Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan terdiri dari 51 jenis komoditas untuk perkotaan dan 47 jenis komoditas untuk perdesaan

Selanjutnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan distribusi menurut kecamatan. Garis kemiskinan Kabupaten Kampar terendah kedua di Provinsi Riau tahun 2021 hanya mencapai Rp.477.603/kapita/bulan. Artinya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut maka diperlukan adanya program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat agar seluruh pendapatan kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan individu yang terdapat dalam keluarga tersebut. Berikut kondisi kemiskinan berdasarkan kecamatan tahun 2021.

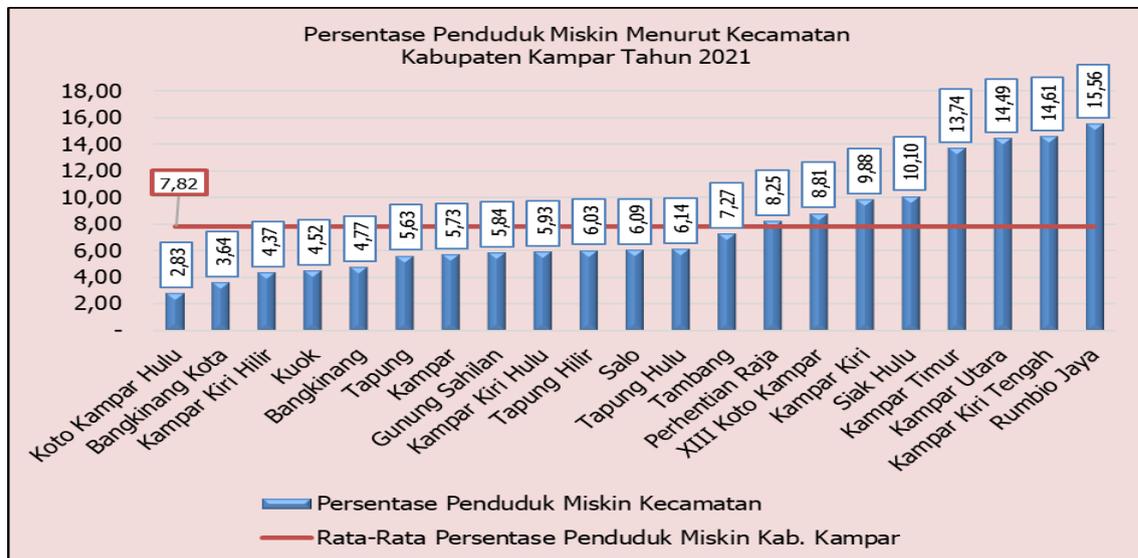
Berdasarkan data pada Tabel 2.26 dan Gambar 2.33 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbanyak menurut kecamatan terdapat di Kecamatan Rumbio Jaya sebesar 15,56% dan paling sedikit di kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 2,83%. Hal tersebut juga memperlihatkan terdapat delapan kecamatan yang tingkat penduduk miskinnya di atas rata-rata Kabupaten tahun 2021. Oleh karena wilayah-wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan dan diperlukan kebijakan dan program yang memiliki sasaran yang tepat sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin wilayah tersebut. Program dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan

mengembangkan segala potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut terutama yang dikelola oleh penduduk miskin sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang dapat melebihi angka garis kemiskinan di setiap kecamatan.

Tabel 2.26
Penduduk Miskin Per Kecamatan Berdasarkan Basis Data Terpadu (BNBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Distribusi Penduduk Miskin (%)
1	Kampar Kiri	6.225	9,88	6,00
2	Kampar Kiri Hulu	3.735	5,93	3,60
3	Kampar Kiri Hilir	2.753	4,37	2,66
4	Gunung Sahilan	3.684	5,84	3,55
5	Kampar Kiri Tengah	9.207	14,61	8,88
6	XIII Koto Kampar	5.556	8,81	5,36
7	Koto Kampar Hulu	1.782	2,83	1,72
8	Kuok	2.847	4,52	2,75
9	Salo	3.836	6,09	3,70
10	Tapung	3.547	5,63	3,42
11	Tapung Hulu	3.872	6,14	3,73
12	Tapung Hilir	3.801	6,03	3,67
13	Bangkinang Kota	2.294	3,64	2,21
14	Bangkinang	3.006	4,77	2,90
15	Kampar	3.611	5,73	3,48
16	Kampar Timur	8.658	13,74	8,35
17	Rumbio Jaya	9.808	15,56	9,46
18	Kampar Utara	9.134	14,49	8,81
19	Tambang	4.584	7,27	4,42
20	Siak Hulu	6.369	10,10	6,14
21	Perhentian Raja	5.198	8,25	5,01
Kabupaten Kampar		68.740	7,82	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan Data Olahan Tim Tahun 2022

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator IPM (Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Rill Per Kapita), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Bekerja, Indek kepuasan Masyarakat, PAD terhadap total

pendapatan, Skor PPH dan Opini BPK dan Kontribusi sektor pertanian, Pertambangan dan penggalan, Industri Pengolahan dan perdagangan dalam struktur perekonomian daerah.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat menurut perkembangan IPM. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity/PPP*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Shinegi, 2013)

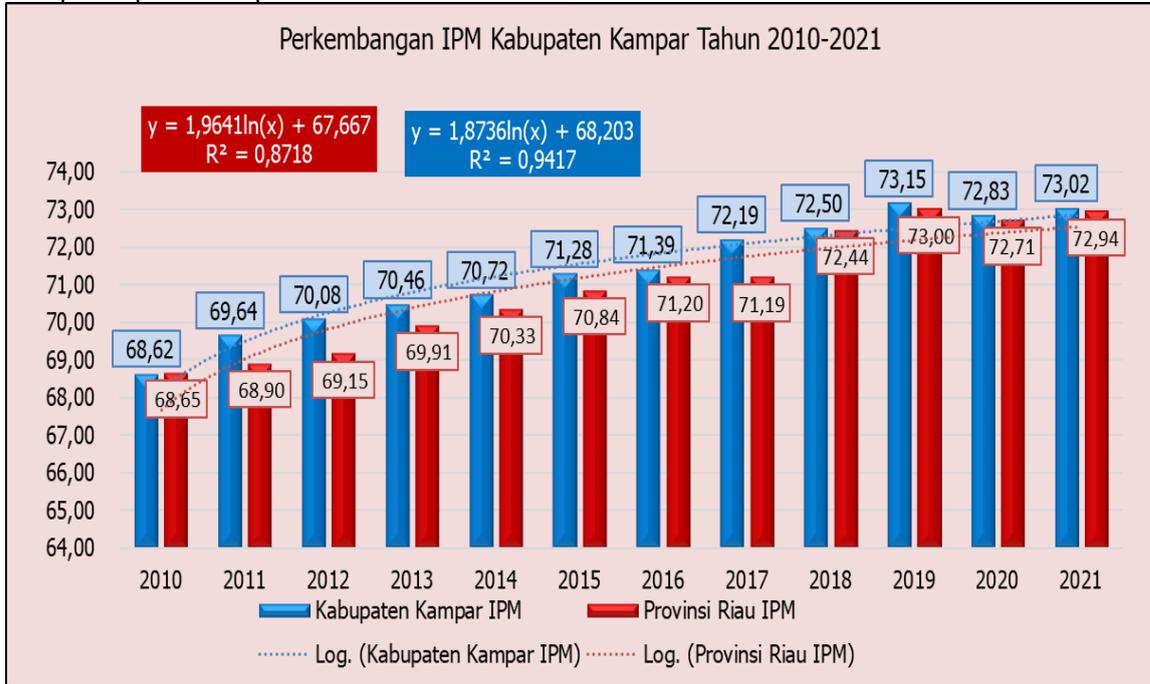
IPM Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dari tahun 2010-2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,57% per tahun. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Kampar sebesar 68,62 (kategori Sedang) kemudian meningkat menjadi 73,02 (Kategori Tinggi) pada tahun 2021 atau naik sebesar 5,71 Point. Jika IPM Kabupaten Kampar pada tahun 2021 dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional maka IPM Kabupaten Kampar (73,02) lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau (72,94) dan IPM Nasional (72,30). Perkembangan IPM dan Indikator pembentuknya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan IPM dan Indikatornya di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Indikator IPM	Satuan	Tahun												Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02	0,57
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58	69,65	69,72	69,77	69,80	70,00	70,08	70,16	70,35	70,64	70,76	70,83	0,16
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,65	11,93	12,22	12,51	12,72	12,86	12,87	13,20	13,21	13,45	13,46	13,55	1,39
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,56	8,59	8,62	8,62	8,84	8,85	9,09	9,10	9,25	9,26	9,27	1,27
Pengeluaran Per Kapita	(Rp. Juta/kapita)	10.433	10.513	10.593	10.624	10.651	10.710	10.765	10.912	11.128	11.232	10.796	10.858	0,37
Pertumbuhan IPM	Indek		1,49	0,63	0,54	0,37	0,79	0,15	1,12	0,43	0,90	(0,44)	0,26	0,57
Pertumbuhan AHH	Tahun		0,10	0,10	0,07	0,04	0,29	0,11	0,11	0,27	0,41	0,17	0,10	0,16
Pertumbuhan HLS	Tahun		2,40	2,43	2,37	1,68	1,10	0,08	2,56	0,08	1,82	0,07	0,67	1,39
Pertumbuhan RLS	Tahun		5,94	0,35	0,35	-	2,55	0,11	2,71	0,11	1,65	0,11	0,11	1,27
Pertumbuhan PPP	(Rp. Juta/kapita)		0,77	0,76	0,29	0,25	0,55	0,51	1,37	1,98	0,93	(3,88)	0,57	0,37

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2022

Trend perkembangan IPM Kabupaten Kampar dari tahun 2010-2021 menunjukkan kecepatan yang lebih baik dengan koefisien regresi sebesar 1,873% dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau dengan koefisien regresi sebesar 1,9641. Tren perkembangan IPM Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut.



Gambar 2.34
Perkembangan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan agar pengembangan sumber daya manusia terus membaik. Hasil kajian yang dilakukan oleh Yale University (2019), pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu masalah besar bangsa ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjadikan masyarakat berkualitas harus melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat harus berpendidikan tinggi agar dapat memainkan peran dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas masih terbatas. Masyarakat harus memiliki kemampuan literasi, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara (Wiedarti, 2015), agar mereka dapat berperan lebih jauh dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi diatas adalah AMH. AMH di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 2,15% atau naik dari 537.106 jiwa tahun 2017 bertambah menjadi 581.215 jiwa tahun 2021. Walaupun secara nominal bertambah namun secara relatif berkurang dari 99,74% tahun 2017 menjadi 99,38% tahun 2021. AMH melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan

dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Jika diamati dari Tabel 2.28 masih terdapat masyarakat Kabupaten Kampar yang belum melek huruf. Hal tersebut dapat dilihat angka melek huruf dari tahun 2017-2021 hanya tumbuh AMH Kabupaten Kampar lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu sebesar 98,93% atau persentase penduduk Provinsi Riau buta huruf sebesar 1,07% pada tahun 2021. Angka melek huruf di Kabupaten Kampar selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Angka ini target akhirnya adalah 100% di Kabupaten Kampar sehingga Kabupaten ini bebas buta huruf. Walaupun dalam pengukuran IPM angka melek huruf sudah menggunakan angka harapan lama sekolah, namun kondisi ini dapat digunakan untuk melihat kondisi perkembangan pengetahuan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk Melek Huruf	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	72,57	73,34	72,40	71,62	71,62	-0,32
4	Persentase Melek Huruf	99,74	98,78	98,91	99,49	99,38	-0,09
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	537.106	542.573	540.393	577.393	581.215	2,03
6	Persentase Buta Huruf	0,24	0,41	0,83	0,32	0,62	51,39
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	1.400	6.701	5.955	2.960	3.626	84,92

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2017-2022

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,94% per tahun. Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kampar dari tahun 2017 yaitu sebesar 9,09 tahun meningkat menjadi 9,27 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,18 tahun. RLS Kabupaten Kampar tahun 2021 sudah lebih tinggi dari RLS Provinsi Riau sebesar 9,19 tahun dan lebih tinggi dari RLS Nasional 8,54 tahun.

Jika dilihat angka tersebut RLS Kabupaten Kampar sudah mencapai standart wajib belajar 9 Tahun, oleh karena itu upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun harus menjadi prioritas pembangunan dibidang sumber daya manusia kedepannya, karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan Pemrov Riau. Perkembangan RLS Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	9,09	9,10	9,25	9,26	9,27	0,94
Provinsi Riau	Tahun	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	1,36

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 penduduk Kabupaten Kampar baru 9,27 tahun menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal

rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun jika Pendidikan berjalan sesuai harapan bangsa. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas

2.2.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,04% per tahun. Pencapaian angka HLS Kabupaten Kampar dari tahun 2017 yaitu sebesar 13,20 tahun meningkat menjadi 13,55 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,35 tahun. Pada tahun 2021 angka HLS Kabupaten Kampar lebih tinggi dari HLS Provinsi Riau sebesar 13,28 tahun dan HLS Nasional 13,08 tahun.

Jika dilihat angka tersebut HLS Kabupaten Kampar telah menggambarkan pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh income per kapita RT dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang memprioritaskan pendidikan sejak lama terutama pendidikan agama.

Oleh karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi penting pendidikan tinggi dan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah serta peningkatan martabat daerah melalui peningkatan daya saing daerah dengan peningkatan kapasitas SDM. Perkembangan HLS Kabupaten Kampar 2017-2021, lihat Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	13,20	13,21	13,45	13,46	13,55	1,04
Provinsi Riau	Tahun	13,03	13,11	13,14	13,20	13,28	0,65

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2022

2.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup yang diharapkan sejak sejak saat Lahir sebagai rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya.

Perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Kampar selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.31. Selama periode tersebut, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kampar terus meningkat dari 70,16 tahun 2017 bertambah menjadi 70,83 tahun 2021 atau bertambah sebanyak 0,67 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21% per tahun.

Pada Tahun 2021, pencapaian AHH di Kabupaten Kampar masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Riau sebesar 71,67 tahun dan nasional sebesar 73,50 tahun. Artinya kebijakan terhadap program peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar harus menjadi prioritas mengingat masih dibawah AHH Provinsi Riau dan Nasional.

Salah satu diantara program dan kegiatan adalah perlunya peningkatan konsumsi kalori pangan yang saat ini (tahun 2021) baru mencapai 2.062,09 kilokalori sementara standart kebutuhan yang harus dipenuhi sebanyak 2.100 kilokalori per hari. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar. Perkembangan AHH Kabupaten Kampar 2017-2021, lihat Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	70,16	70,35	70,64	70,76	70,83	0,21
Provinsi Riau	Tahun	70,99	71,19	71,48	71,60	71,67	0,20

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2022

2.2.2.6 Pengeluaran Ril Perkapita (PPP)

Pengeluaran ril per kapita penduduk Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2021 dengan pertumbuhan 0,37% per tahun atau meningkat dari Rp10.433 juta pada tahun 2010 menjadi Rp10.858 juta pada tahun 2021. Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kampar karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita rill.

Peningkatan pengeluaran per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Kampar.

2.2.2.7 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 2,12% per tahun dengan pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar 3,12% dengan angka partisipasi angkatan kerja tumbuh sebesar 0,98% per tahun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017-2021 jumlah angkatan kerja cenderung mengalami kenaikan seperti Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,78	67,87	67,20	66,96	67,29	0,98

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau Tahun 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan partisipasi Angkatan kerja. Hal ini

mengindikasikan penawaran jumlah penduduk usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64) tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

2.2.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lapangan usaha atau sektor perekonomian.

Upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada Industri padat karya dan industri padat modal. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja.

Peningkatan produktivitas yang bergerak cepat, efisien, penggunaan teknologi tersedia dan dikuasai oleh tenaga kerja pada industri padat karya. Perkembangan TPAK selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan 0,83% per tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja lebih tinggi yaitu sebesar 3,12% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja 1,76% per tahun. Berdasarkan Tabel 2.33 menunjukkan bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,90% atau naik dari 61,16% pada tahun 2017 menjadi 63,06% pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka penyerapan tenaga. Perkembangan TPAK selama periode 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Persentase TPAK	%	61,16	63,38	60,78	63,78	63,06	0,83

Sumber: Disdukcapil dan BPS Provinsi Riau Tahun 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Tingkat partisipasi angkatan kerja juga sangat dipengaruhi tingkat pendidikan yang tertinggi pada tahun 2021. Faktor tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.2.2.9 Rasio Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,70% per tahun atau naik dari

328.159 orang pada tahun 2017 menjadi 376.764 orang pada tahun 2021 dengan persentase penduduk bekerja naik sebesar 3,99% per tahun.

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan. Berikut disajikan data Tabel 2.34 mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.34
Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Jumlah Bekerja	Orang	328.159	353.428	345.195	364.698	376.764	3,58
5	Persentase Penduduk Bekerja	%	63,02	67,30	66,21	65,90	67,56	1,81

Sumber: Disdukcapil dan BPS Provinsi Riau Tahun 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Rasio penduduk yang bekerja menurut jam kerjanya paling lama bekerja antara 15-24 dan 35-44 jam dalam seminggu, tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja menurut jam hanya tumbuh sebesar 3,58%.

2.2.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kampar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5,93% pada tahun 2017 turun menjadi 4,27% pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar 6,54% per tahun atau jumlah penganggur terbuka berkurang dari sebanyak 3.882 orang atau dari 20.687 orang tahun 2017 berkurang menjadi 16.805 orang tahun 2021, jelasnya lihat Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Jumlah Menganggur	Orang	20.687	20.316	20.744	23.899	16.805	-3,54
5	TPT	%	5,93	5,45	5,65	6,15	4,27	-6,54

Sumber: Disdukcapil dan BPS Provinsi Riau Tahun 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri agar lebih mandiri.

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kabupaten Kampar bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

Jika dilihat tingkat pengangguran berdasarkan golongan umur mwnunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar pada usia 20-24 dan 15-19 tahun, pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2017. Tingkat pengangguran tersebut sudah berada pada angka yang relatif rendah, hal ini terjadi karena ketersediaan lahan usaha terutama lapangan usaha yang bekerja secara mandiri di Kabupaten Kampar. Namun demikian kedepan agar Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka dengan peningkatan jumlah usaha yang padat karya.

2.2.2.11 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan penurunan peningkatan selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 218,10 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 230,04 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,74% per tahun atau mengalami peningkatan senilai Rp. 11,94 juta selama lima tahun. Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menurut harga berlaku tidak terlepas dari terjadinya peningkatan harga dari produksi barang dan jasa selama periode 2017-2021

Namun sebaliknya laju pertumbuhan PDRB harga konstan per tenaga kerja mengalami penurunan dari Rp. 149,38 juta tahun 2017 kemudian turun menjadi Rp. 141,19 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar -1,27% per tahun atau berkurang senilai Rp. 8,19 juta. Artinya penurunan laju pertumbuhan PDRB harga konstan per tenaga kerja menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan nilai PDRB harga konstan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih tinggi dengan pertumbuhan sebesar 3,58% per tahun sementara laju pertumbuhan nilai PDRB harga konstan hanya 2,08%.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah produksi barang dan jasa agar laju Laju Pertumbuhan produksi barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan produktifitas tenaga kerja pada laju PDRB harga konstan dengan penduduk yang bekerja. Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 lihat Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB HB Kabupaten Kampar	RP. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,31	86.670,33	5,28
2	PDRB HK Kabupaten Kampar	RP. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	328.159	353.428	345.195	364.698	376.764	3,58
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	218,10	218,30	223,84	200,37	230,04	1,74
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	149,38	141,36	150,32	140,99	141,19	-1,27

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2.2.2.12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga yang diharapkan adalah keluarga sejahtera, dimana keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan.

Untuk menaikkan tahapan Keluarga Sejahtera dari Pra Sejahtera ke Sejahtera I dan Ke Sejahtera II dibutuhkan intervensi Pemerintah Daerah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kepala Keluarga ini agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan II di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, lihat tabel berikut.

Tabel 2.37
Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pra Sejahtera	KK	na	na	31.952	31.952	14.959	na
2	Sejahtera I	KK	na	na	76.267	76.267	na	na
3	Sejahtera II	KK	na	na	55.312	55.312	na	na
4	Jumlah	KK	203.176	212.959	187.702	210.333	218.328	1,07

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2.2.2.13 Index Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survey kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM Kabupaten Kampar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	80,65	86,78	7,60
	Kategori	-	-	-	Baik	Baik	Baik

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan data dari tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa index kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2021 dengan memperoleh nilai 86,78 dengan kategori Baik dan naik dari 80,65 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam kategori baik.

2.2.2.14 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

PAD meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 dapat rasio

yang terkait dengan kemandirian fiskal terutama yang berhubungan dengan PAD terhadap total pendapatan mengalami penurunan sebesar -1,64% per tahun selama periode 2017-2021.

Berdasarkan hasil persentase pendapatan asli daerah yang di konversikan kepada jumlah pendapatan daerah dari tahun 2017 sebesar 14,25% kemudian turun menjadi 11,38% pada tahun 2021. Namun secara umum rasio tersebut mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dengan rasio tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2017 sebesar 14,25%. Berikut disajikan perkembangan Rasio PAD terhadap pendataan Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.39
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Total Pendapatan	Rp. Milyar	2.220,57	2.327,55	2.740,39	2.364,68	2.437,86	2,98
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp. Milyar	316,43	229,38	262,88	246,05	277,42	-1,64
3	Rasio PAD/Pendapatan	%	14,25	9,86	9,59	10,41	11,38	-3,92

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022*

2.2.2.15 Opini BPK

Opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Pemerintah daerah setiap tahun menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) berdasarkan data tahun 2017-2021 pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan prestasi yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Berikut disajikan perkembangan Opini BPK Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.40
Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.2.2.16 Pangan (PPH dan Rawan Pangan)

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan data 2017-2021 dapat dilihat bahwa rata-rata skor PPH Kabupaten Kampar terjadinya perbaikan dari tahun 2017 yang hanya 83,69 dan kemudian meningkat menjadi 89,86 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,82% atau naik sebanyak 6,17 point. Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kabupaten Kampar yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui peningkatan ketersediaan,

peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berikut disajikan skor PPH Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.41
Perkembangan Skor PPH Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Skor PPH	83,69	87,77*	88,87	91,09*	89,86	1,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

2.2.2.17 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertanian menjadi sektor tertinggi ketiga dari tiga sektor utama yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertanian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,06% atau naik dari 27,39% pada tahun 2017 menjadi 32,91% pada tahun 2021 atau naik sebesar 5,54%.

Sementara perkembangan pertumbuhan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh positif sebesar 3,50% atau naik dari 29,78% pada tahun 2017 menjadi 34,15% tahun 2021 atau naik sebesar 4,37%. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi regional tetap penting dan strategis karena kontribusinya yang sangat tinggi, sehingga telah merubah struktur ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalan menjadi sektor pertanian yang dominan tahun 2021.

Namun upaya peningkatan kontribusi sector pertanian harus terus dilakukan dengan penerapan berbagai jenis teknologi secara optimal, peningkatan ketersediaan SDM pertanian berkualitas yang bisa berperan sebagai transformator agar memacu minat investor untuk mengembangkan sector yang lebih terintegrasi dan modern melalui penerapan *Good Agricultural Practices*. Berikut disajikan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.42
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Pertanian	Rp. Milyar	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	9,99
4	PDRB ADHK Sektor Pertanian	Rp. Milyar	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	5,62
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian	%	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	5,06
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian	%	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	3,50

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2017-2022

2.2.2.18 Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor tertinggi kedua dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan negative sebesar -5,36% atau turun dari 34,48% pada tahun 2017 menjadi 26,52% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh negative sebesar -7,11% atau turun dari 26,69% pada tahun 2017 menjadi 19,86% tahun 2021.

Selain tumbuh negatif, peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam pertumbuhan ekonomi regional juga telah berpengaruh terhadap kontribusi secara keseluruhan dalam struktur ekonomi. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin menurun dimana sehingga semakin berkurang peranannya terhadap dana bagi hasil tambah untuk sumber pendapatan daerah dari dana transfer daerah. Selain itu struktur sektor ini berubah dari posisi pertama tahun 2017 ke posisi kedua tahun 2021.

**Tabel 2.43
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	24.678,05	28.297,52	25.027,29	17.914,02	22.983,91	0,75
4	PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	13.083,38	12.362,26	11.628,28	10.889,94	10.566,70	-5,19
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	34,48	36,68	32,39	24,51	26,52	-5,36
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	26,69	24,74	22,41	21,18	19,86	-7,11

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2017-2022

2.2.2.19 Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Menguat dan melemahnya posisi ekonomi akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa termasuk sector perdagangan. Perdagangan menjadi sector tertinggi pertama dari sector jasa yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Perdagangan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,28% atau naik dari 3,40% pada tahun 2017 menjadi 3,42% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Perdagangan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 0,78% atau naik dari 3,13% pada tahun 2017 menjadi 3,18% tahun 2021 atau naik sebesar 0,04%.

Dalam konteks itu, tantangan terbesar perekonomian Kabupaten Kampar ke depan adalah perdagangan dan investasi. Pelemahan ekonomi ke negara-negara tujuan ekspor akan memperburuk kondisi ekonomi Kabupaten Kampar. Namun demikian satu hal yang disyukuri adalah bahwa wilayah ini merupakan produsen hasil non migas terutama dari hasil pertanian perkebunan dan kehutanan dan sektor perdagangan hasil olahan produk perikanan budidaya.

Tabel 2.44
Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Rp. Miliar	2.433,99	2.605,67	2.871,41	2.548,58	2.960,36	5,54
4	PDRB ADHK Sektor Perdagangan	Rp. Miliar	1.536,74	1.631,83	1.716,90	1.466,20	1.690,37	3,02
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	3,40	3,38	3,72	3,49	3,42	0,28
6	Kontribusi PDRB ADHK SektorPerdagangan	%	3,13	3,27	3,31	2,85	3,18	0,78

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2017-2022

2.2.2.20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Industri pengolahan menjadi sector tertinggi pertama dari tiga sector yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Industri pengolahan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,71% atau naik dari 23,02% pada tahun 2017 menjadi 25,44% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Industri pengolahan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 1,94% atau naik dari 28,87% pada tahun 2017 menjadi 31,15% tahun 2021. Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah sangat besar terutama berdasarkan harga konstan melebihi 25% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sector industri. Peningkatan produksi barang dan jasa juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Selain tumbuh positif, peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi regional juga semakin penting dan strategis. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat dimana sektor industri pengolahan menjadi semakin penting karena turut berperan pada terkendalinya peningkatan nilai tambah terhadap komoditas utama terutama dari sub sektor perkebunan dan kehutanan serta sektor perikanan.

Tabel 2.45
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	16.474,47	17.000,87	18.155,69	18.951,56	22.053,03	7,68
4	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	14.151,23	14.668,08	16.051,38	15.900,07	16.568,64	4,09
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	%	23,02	22,04	23,50	25,93	25,44	2,71
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	%	28,87	29,36	30,93	30,92	31,15	1,94

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2017-2022

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

2.2.3.1 Perkembangan Seni Budaya

Perkembangan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari 45 grup tahun 2017 bertambah menjadi 80 grup tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 9,17% per tahun. Sementara itu jumlah Gedung Kesenian juga merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kampar tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2017-2021 sebanyak 1 gedung.

Jumlah gedung tidak berkembang seiring banyaknya jumlah grup kesenian dan dapat diartikan sebagai tidak adanya usaha dalam menyediakan sarana untuk mengekspresikan kesenian yang dikembangkan di Kabupaten Kampar. Jika membandingkan dengan jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Kampar dengan gedung kesenian yang ada terlihat belum ideal sehingga kurang mendukung perkembangan seni dan budaya Kampar. Kedepan agar ada program Pemerintah Daerah membangun gedung kesenian dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.46
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah grup kesenian 10.00 per penduduk.	Unit	45	54	63	73	80	9,17
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	Unit	0	0	0	1	1	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Capaian grup kesenian untuk mendukung kesenian di Kabupaten Kampar di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga bersama Dewan Kesenian Kabupaten Kampar (DKKS) yang membina seluruh kecamatan. Grup kesenian yang paling menonjol adalah kesenian tradisional karena sarana dan prasarana tidak sesulit peralatan kesenian modern, sedangkan pola pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan promosi dan mengadakan serta mengikuti even kesenian berupa penampilan karya-karya seni baik tari maupun musik serta seni rupa.

2.2.3.2 Perkembangan Olah Raga

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Kampar meningkat dari 70 klub olahraga menjadi 135 klub olahraga dengan pertumbuhan sebesar 18,87% per tahun yang tersebar disetiap Kecamatan di Kabupaten Kampar. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat warga terhadap kegiatan olahraga. Berikut disajikan perkembangan capaian bidang olahraga Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.47
Perkembangan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	Unit	70	85	120	120	135	18,78
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	Unit	2	1	2	1	1	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif dan merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar. Sejak tahun 2017-2021 terdapat 2 gedung olahraga di Kabupaten Kampar tahun 2017 kemudian berkurang hanya menjadi 1 gedung olahraga tahun 2021. Minimnya jumlah gedung olahraga ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kampar untuk dilakukan penambahan agar dapat menunjang peningkatan prestasi olahraga dan perbaikan kondisi kebugaran dan kesehatan masyarakat terutama generasi muda Kabupaten Kampar. Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah, pembangunan sarana dan prasarana olahraga mesti dilakukan, berupa pembangunan gedung olahraga dan pembinaan klub olahraga yang ada wilayah ini terutama di setiap Kecamatan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar daerah Kabupaten Kampar, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan Kabupaten dalam menangani bidang pendidikan yaitu pada jenjang pendidikan dini dan dasar menengah pertama (PAUD, TK, SD/MI dan SMP/MTs). Berikut diuraikan kinerja indikator Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perhitungan indikator anak usia dini diperoleh dari jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun yang menjadi peserta PAUD. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Berdasarkan Tabel 2.48 jumlah siswa PAUD/TK di Kabupaten Kampar mengalami penurunan setiap tahun selama periode 2017-2021. Berikut gambaran perkembangan indikator pendidikan usia dini di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.48

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Peserta PAUD/TK	Siswa	15.761	12.359	12.949	11.986	12.535	-4,92
2	Jumlah Lembaga PAUD/TK	Unit	779	351	361	350	354	-13,50
3	Jumlah Tenaga Pendidikan PAUD/TK	Orang	2.422	1.373	1.442	1.469	1.443	-9,55
4	Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun	Orang	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sejak tahun 2017 tercatat jumlah peserta PAUD/TK sebanyak 15.761 siswa, namun tahun 2021 berkurang menjadi sebanyak 12.535 siswa, dengan pertumbuhan sebesar -4,92% per tahun. Penurunan tersebut dibarengi penurunan jumlah lembaga PAUD/Tk dengan pertumbuhan sebesar -13,50% demikian halnya dengan jumlah tenaga kependidikan di lembaga PAUD/TK yang mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -9,55% per tahun. Akan tetapi terjadinya sebaliknya jumlah penduduk usia 0-4 tahun meningkat secara drastis dengan pertumbuhan 7,97% per tahun selama periode 2017-2021. Oleh karena itu diperlukan upaya penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan untuk anak usia dini agar dapat menampung pertumbuhan jumlah anak usia dini di Kabupaten Kampar kedepan.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, perhitungan APK memperhitungkan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Nilai APK dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu daerah dan tingkat pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs terhadap pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, APK PAUD tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 48,07% pada tahun 2017 meningkat menjadi 117,98% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sejak usia dini, namun disisi lain hal juga dapat menunjukkan masih rendahnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat untuk mendorong partisipasi penduduk untuk memasukkan anaknya ke pendidikan PAUD sesuai dengan usia dini ke sekolah serta kondisi juga dapat disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sekolah PAUD khususnya di pedesaan karena jumlah terbatas pada wilayah tertentu.

APK SD/MI tahun 2017-2021 meningkat dari 94,70% pada tahun 2017 menjadi 102,18% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,24% per tahun. Peningkatan nilai APK tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat terhadap akses pendidikan, namun demikian dari aspek manajemen pendidikan masih menghadapi masalah terkait kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap orang tua murid untuk meningkatkan kesadaran penduduk untuk berpartisipasi memasukkan anaknya ke jenjang Pendidikan SD/MI sesuai umur sekolah SD/MI. Disisi lain tingginya APK juga disebabkan belum akuratnya data kependudukan sehingga berpengaruh pada belum optimalnya manajemen pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan SD/MI. Berikut gambaran perkembangan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	APK PAUD	%	48,07	52,17	72,71	73,80	117,98	27,32
2	APK SD/MI	%	94,70	102,20	114,10	111,98	102,18	2,24
3	APK SMP/MTs	%	98,19	100,89	100,10	98,34	100,30	0,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

APK SMP/MTS juga mengalami peningkatan sebesar 0,55% per tahun selama tahun 2017-2021 atau naik dari 98,19% pada tahun 2017 menjadi 100,30% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi penduduk untuk bersekolah di Kabupaten Kampar selain dari jumlah penduduk usia wajib sekolah SMP di Kabupaten Kampar. Namun data tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa rendahnya APK dari jenjang Pendidikan SD/MI dapat

disebabkan oleh adanya lulusan SD/MI yang tidak atau menunda melanjutkan pendidikan di wilayah tersebut atau juga karena putus sekolah.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut (usia sekolah). Nilai APM dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, APM setiap jenjang pendidikan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Nilai APM SD/MI meningkat dari 97,27% pada tahun 2017 menjadi 97,80% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,14% per tahun. APM dijelaskan bahwa penghitungan angka APM SD/MI adalah membandingkan jumlah peserta didik tingkat SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia sekolah (untuk SD/MI usia 7-12 tahun) pada suatu wilayah.

Sedangkan APM SMP/MTS meningkat dari 84,03% pada tahun 2017 menjadi 84,64% pada tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Kampar yang bersekolah di luar usia sekolah dan masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SMP. APM SMP/MTs masih tergolong rendah berada di bawah 90%, namun sudah diatas target daerah. Angka ini masih dapat ditingkatkan dengan memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung untuk meningkatkan APM SMP/MTs/Paket B. Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajar Dikdas di Kabupaten Kampar terutama lebih banyak terjadi pada tingkat SMP/setara, sedangkan untuk akses menuju SMP/setara pada umumnya relatif perlu mendapat perhatian. Berikut data nilai APM pendidikan dasar di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,27	97,60	97,47	98,26	97,80	0,14
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,03	83,74	84,99	84,49	84,64	0,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

4) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin banyak jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain itu APS tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan baik pada SD/MI/Paket A maupun SMP/MTs/Paket B. APS SD/MI/Paket A semula sebesar 86,31% pada tahun 2017 naik menjadi 100,98% pada tahun 2021. Demikian dengan APS SMP/MTs/Paket B, semula 65,83% pada tahun 2017 naik menjadi 91,79% pada tahun 2021 atau dengan pertumbuhan sebesar 9,26% per tahun. Berikut data APS Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Per 1000 Penduduk	86,31	110,36	103,61	106,46	100,98	4,84
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Per 000 Penduduk	65,83	70,97	89,65	97,52	91,79	9,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

5) Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Partisipasi Sekolah (APST) merupakan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berdasarkan data angka putus sekolah Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa APTS tingkat SD/MI meningkat dari 0,05% tahun 2017 menjadi 0,44% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 1.838,19% per tahun.

Sedangkan APTS SMP/MTS meningkat dari 0,10% pada tahun 2017 menjadi 1,26% pada tahun 2021 atau naik sebesar 711,24% per tahun. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya APTS tersebut (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orang tua, (3) fasilitas pembelajaran, (4) minat anak untuk sekolah, (5) budaya dan (6) faktor lokasi sekolah. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan karena memiliki *nilai variance explained* tertinggi yaitu sebesar 39,95%, artinya bahwa perhatian orang tua mampu menjelaskan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di suatu wilayah. Faktor lokasi sekolah merupakan faktor yang memiliki *variance explained* terendah yaitu sebesar 17,014%. Berikut data Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,00	0,30	0,42	0,44	1.838,19
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,04	1,20	1,25	1,26	711,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

6) Angka Kelulusan (AK)

Angka Kelulusan (AK) merupakan persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir.

Berdasarkan data angka kelulusan sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, menunjukkan AK tahun 2017 untuk tingkat SD/MI mampu ditingkatkan kembali di 100,00% tahun 2021 sebagaimana tahun 2017, karena tahun 2018-2020 kurang dari 100,00%, sehingga terjadi rata-rata peningkatan sebesar 0,005% per tahun. Sementara AK jenjang Pendidikan SMP/MTs secara optimal baru tercapai tahun 2021 sebesar 100,00%, karena dimana tahun 2017-2020 masih kurang dari 100,00%. Berikut data angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Angka Kelulusan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	99,65	98,27	99,69	100,00	0,005
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,45	99,37	98,29	99,37	100,00	0,141

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Angka kelulusan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis seperti tempat tinggal yang meliputi jarak rumah ke sekolah, sarana jalan, dan sarana alat transportasi, maupun sosial ekonomi yang meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua.

Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan kualitas pembelajaran (yang didukung oleh sarana dan prasarana, kualifikasi guru, proses pembelajaran) di setiap jenjang Pendidikan baik SD/MI dan SMP/MTs.

7) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, AM tingkat dari SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari 97,96% pada tahun 2017 menjadi 103,62% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,87% per tahun. Pada saat orang-orang berlomba untuk mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi baik dari tingkat dasar maupun sampai kejenjang yang lebih tinggi. Namun dari data tersebut menunjukkan tahun 2017-2021 bahwa masih terdapat lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, letak geografis yang kurang mendukung, lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya.

Sedangkan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat dari 59,52% pada tahun 2017 menjadi 110,43% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 17,72%. Peningkatan AM untuk tamatan SMP/MTs ke jenjang Pendidikan menengah atas baik SMA/SMK/dan MA sangat signifikan hal ini didukung oleh kesadaran orang tua dan adanya dukungan pendanaan bagi siswa miskin oleh pemerintah provinsi Riau sejak tahun 2021, selain itu menunjukkan bahwa terdapat tamatan SD dan SMP yang tidak melanjutkan langsung tetapi melanjutkan tahun berikutnya atau adanya sejumlah siswa yang berasal dari wilayah lainnya yang melanjutkan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021. Berikut data Angka Melanjutakn Sekolah Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Angka Melanjutkan Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,96	106,71	94,61	106,71	103,62	1,87
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	59,52	73,64	68,61	90,98	110,43	17,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

8) Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik

Fasilitas pendidikan, khususnya bangunan sekolah merupakan sarana utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah, jika bangunan sekolah dalam kondisi layak, aman dan nyaman membuat siswa akan belajar dengan baik, sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan akan semakin baik dari tahun ke tahun.

Sarana sangat penting bagi kegiatan proses belajar mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Kriteria minimum sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta kelengkapan lainnya yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Sedangkan prasarana secara tidak langsung akan menunjang jalannya proses pendidikan. Adapun kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Berikut data jumlah bangunan SD dan SMP dan kondisi baik dan jumlah sekolah per satuan penduduk di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Bangunan Sekolah SD	Unit	487	491	500	502	512	1,26
2	Jumlah Bangunan Sekolah SMP	Unit	129	129	135	134	137	1,54
3	Persen Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	57,80	56,66	55,14	55,05	55,03	-1,21
4	Persen Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	64,65	76,50	72,21	67,45	63,94	-5,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan data bangunan sekolah dalam kondisi bangunan baik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah sekolah dengan kondisi bangunan baik. Tingkat SD turun dari 57,80% tahun 2017 turun menjadi 55,03% tahun 2021 atau turun dengan pertumbuhan sebesar -1,21% per tahun. Bangunan SMP yang dalam kondisi baik juga berkurang sebesar -5,80% per tahun dari 64,65% tahun 2017 menjadi 63,94% tahun 2021.

Sedangkan Bangunan sekolah SD yang rusak berat mengalami peningkatan sebesar 12,58% per tahun atau 7,77% tahun 2017 bertambah menjadi 11,46% tahun 2021. Demikian halnya dengan bangunan SMP yang mengalami peningkatan jumlah yang rusak berat sebesar 54,81% per tahun atau bertambah dari 7,35% tahun 2017 menjadi 18,11% tahun 2021. Kondisi

ruang kelas yang rusak baik sedang maupun berat akan mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya karena secara psikologis anak tidak nyaman belajar pada bangunan yang rusak.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI menurun dari sebanyak 200 penduduk usia sekolah SD/MI untuk 1 sekolah tahun 2017 menjadi 192 penduduk pada untuk 1 sekolah tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -1,02% per tahun. Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kapasitas sekolah dasar, hal tersebut dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan sekolah atau sebaliknya yaitu penurunan jumlah angka partisipasi sesuai sekolah dengan umur sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 400 penduduk untuk 1 sekolah menjadi 275 penduduk untuk 1 sekolah pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -8,37% per tahun. Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kapasitas sekolah menengah, hal tersebut dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan sekolah atau sebaliknya yaitu penurunan jumlah angka partisipasi sesuai sekolah dengan umur sekolah. Berikut data Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
A	Rasio SD/MI	Indek						
1	Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)	Jiwa	na	na	na	na	na	na
2	Jumlah sekolah SD	Unit	487	491	500	502	512	1,26
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap usia sekolah		200	198	196	194	192	-1,02
B	Rasio SMP/MTs	Indek						
1	Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 Tahun)	Jiwa	na	na	na	na	na	na
2	Jumlah sekolah SMP	Unit	129	129	135	134	137	1,54
3	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap usia sekolah		400	300	299	280	275	-8,37

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota pasal 2 ayat (2) huruf a poin 1-2:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/mts tidak melebihi 36 orang.

3. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

10) Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota pasal 2 ayat (2) huruf a point 5-6.

Rasio antara jumlah murid terhadap jumlah guru tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 16 murid per guru pada tahun 2017 berkurang menjadi 15 murid per guru pada tahun 2021 atau pertumbuhan sebesar -1,56% per tahun. Kondisi ini masih dibawah rasio SPM yaitu sebanyak 32 murid untuk 1 guru. Penurunan rasio guru terhadap murid ini disebabkan oleh kecepatan penurunan pertumbuhan jumlah murid sebesar -0,27% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan guru yang lebih cepat guru sebesar 1,45% per tahun dan lebih cepat dibandingkan dengan percepatan penurunan pertumbuhan jumlah murid.

Kondisi yang relatif sama terjadi pada SMP/MTs, dimana rasio antara murid terhadap guru pada tahun 2017 yaitu sebanyak 11 murid per guru dan mengalami peningkatan rasio menjadi 12 murid per guru pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,83% murid per guru. Kondisi ini terjadi karena persentase penambahan jumlah guru lebih kecil hanya sebesar 1,52% per tahun dibandingkan persentase penambahan jumlah murid 2,11% per tahun.

Kondisi ini masih baik karena belum melebihi SPM dimana rasio standar sebanyak 36 Murid untuk 1 guru. Berdasarkan pada Tabel 2.57 menunjukkan bahwa secara umum untuk setiap jenjang pendidikan dimana rasio guru terhadap murid masih memenuhi SPM sebagaimana yang di atur dalam Permendiknas RI No.15 Tahun 2010 tentang indikator SPM, bahwa tersedia satu orang guru untuk 32 peserta didik SD/MI dan bagi SMP/MTs tersedia guru setiap 36 siswa.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar harus memperhatikan indikator SPM untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun untuk meningkatkan kualitas lulusan maka diperlukan peningkatan kompetensi guru dan kualitas proses belajar dan mengajar SD/MI dan SMP/MTs. Berikut data Rasio guru dan murid Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
A								
SD/MI								
1	Jumlah Guru	Orang	6.329	6.300	6.579	6.995	6.681	1,45
2	Jumlah Murid	Siswa	101.927	101.912	104.414	103.033	100.767	-0,27
3	Rasio guru/murid	Siswa/Guru	16,10	16,18	15,87	14,73	15,08	-1,56
B								
1	Jumlah Guru	Orang	2.546	2.449	2.637	2.736	2.694	1,52
2	Jumlah Murid	Siswa	28.660	30.696	31.696	31.367	31.095	2,11
	Rasio guru/murid	Siswa/Guru	11,26	12,53	12,02	11,46	11,54	0,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

11) Guru Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah mensyaratkan kualifikasi akademik minimal pendidikan guru pada masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota: Setiap SD/MI tersedia 2 orang guru kualifikasi akademik S1-D4 dan 2 orang yang telah memiliki sertifikat pendidik. Setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut persyaratan minimal ini wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan untuk menjamin kualitas pendidikan.

Persentase guru SD/MI yang berkualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 sebesar 70,22% dan meningkat menjadi 91,40% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,00% per tahun. Sedangkan persentase guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 sebesar 89,70% kemudian meningkat menjadi 96,00% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,72% per tahun. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 52,94% dan menurun menjadi 40,14% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -5,92% per tahun.

Sedangkan persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 55,87% kemudian menurun menjadi 38,67% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan -8,31% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi guru. Penurunan persentase jumlah guru yang bersertifikasi untuk jenjang Pendidikan SD demikian halnya jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih cepat dalam rangka peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi. Jumlah guru dengan kualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58
Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	SD/MI							
	Jumlah sekolah	Unit	487	491	500	502	512	1,26
	Jumlah guru	Orang	6.329	6.300	6.579	6.995	6.681	1,45
	Jumlah guru S1-D4	Orang	4.444	4.848	4.890	5.844	6.106	8,49
	Persentase Guru Kualifikasi S1-D4	%	70,22	76,95	74,32	83,55	91,40	7,00
	Jumlah guru bersertifikat	Orang	3.351	2.577	2.962	3.085	2.682	-4,27
	Persentase Guru bersertifikasi	%	52,94	40,90	45,02	44,10	40,14	-5,92
2	SMP/MTs							
	Jumlah sekolah	Unit	129	129	135	134	137	1,54
	Jumlah guru	Orang	2.546	2.449	2.637	2.736	2.694	1,52
	Jumlah guru S1-D4	Orang	2.284	2.248	2.429	2.594	2.586	3,24
	Persentase Guru Kualifikasi S1-D4	%	89,70	91,80	92,10	94,80	96,00	1,72
	Jumlah guru bersertifikat	Orang	1.422	1.085	1.234	1.182	1.042	-6,52
	Persentase Guru Bersertifikasi	%	55,87	44,30	46,80	43,20	38,67	-8,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan dan kebijakan terkait kesehatan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan di Kabupaten Kampar mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat.

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Oleh karena itu kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

Dampak positif pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Kampar dari Tahun ke Tahun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai program atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian belum semua indikator pembangunan kesehatan mencapai target yang diinginkan. Gambaran situasi AKB di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59
Angka Kematian Bayi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	16.476	17.148	17.478	16.612	15.966	-0,71
2	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	82	62	34	46	495	235,46
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	AKB	4,98	3,62	1,95	2,77	31,00	247,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

AKB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017, AKB sebesar 83/1.000 kelahiran hidup kemudian berkurang menjadi 31/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,94%. Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat ditangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penanganan penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan menyusui.

2) Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri sebenarnya memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya: kurangnya gizi; sanitasi yang tidak sehat; penyakit menular; kecelakaan; dan lain-lain.

Kurangnya gizi yang terjadi pada balita dapat disebabkan oleh kemiskinan orang tua. Mengingat pentingnya peranan gizi terhadap tumbuh kembang balita itu sendiri, orang tua dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi banyak diantara para orang tua yang masih belum mengenal dengan betul seperti apa gizi yang seharusnya diberikan kepada anak mereka. Balita yang kurang gizi akan mengalami keterbelakangan serta gangguan-gangguan fisik serta psikologisnya. Hal tersebut dapat dilihat pada segi postur dan berat badan pada balita. Balita yang mengalami kurang gizi akan terlihat kurus dan memiliki berat badan yang kurang normal.

Balita yang bermasalah pada gizinya akan mengalami keterlambatan penaikkan berat badan selama 3 bulan terakhir. Ukuran tinggi badan serta lingkaran badan pada balita akan menjadi indikator pelengkap dari status balita kurang gizi. Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (0-4 tahun) yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKBA merepresentasikan resiko terjadi kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKBA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Dari Tabel 2.60 dapat dilihat AKBA di Kabupaten Kampar terjadi penurunan dari 83/1.000 KLH tahun 2017 menjadi 32/1.000 KLH tahun 2021, dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,98% per tahun.

Penyebab langsung kematian balita sebenarnya relatif dapat ditangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan balita yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan menyusui. Berikut disajikan AKBA di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.60
Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Balita	Orang	87.082	87.365	80.875	82.250	58.700	-8,51
2	Jumlah Kematian Balita	Orang	435	0	6	7	511	1779,17
3	AKBA/1.000 kelahiran	Orang	5,00	0,00	0,07	0,09	8,71	2510,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

3) Angka Kematian Neo-Natal per 1000 Kelahiran

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0-28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0-7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Keberhasilan Kabupaten Kampar mengurangi Angka Kematian Neonatal karena adanya program alarm persalinan. Berikut data Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Kampar dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	

1	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Orang	77,00	36,00	33,00	46,00	25,00	-16,69
2	Angka Relatif Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	7,70	3,60	3,30	4,60	2,50	-16,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

AKN Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021 mengalami perkembangan fluktuatif sejak tahun 2017 sebanyak 7,70% per 1.000 kelahiran kemudian berkurang menjadi 2,50% bayi per 1.000 kelahiran pada pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,69% per tahun. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menghindari kematian neo-natal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

4) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Goal 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berikut data Angka Kematian Ibu dalam Tabel 2.62

Tabel 2.62
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	16.476	17.148	17.108	16.612	15.966	-0,74
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	198	189	188	183	112	-11,64
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	12,00	11,00	11,00	11,00	7,00	-11,17

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kampar Tahun 2022

Di Kabupaten Kampar jumlah AKI terjadi penurunan dari 12 orang per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 menjadi 7 orang per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -11,17% per tahun. Kondisi ini menunjukkan perbaikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dengan pengobatan terhadap berbagai faktor yang memungkinkan dapat mengakibatkan kematian ibu seperti perdarahan/*hypertensi* sistem peredaran darah, infeksi gangguan metabolisme dan lain-lain.

Tindakan yang telah dilakukan meliputi Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan Tindakan antara lain: Seksio sesaria, Histerektomi, Reparasi Ruptura Uteri, Cedera Kandung/saluran Kemih, Perawatan Intensif Ibu dan Neonatal dan Transfusi Darah.

5) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKB, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKB;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit.A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (*Golden Period*).

Jumlah posyandu dari tahun 2017-2021 mengalami pengurangan sebesar -0,02% per tahun. Sementara jumlah balita mengalami hal yang sama dengan pertumbuhan sebesar -7,56% per tahun. Kondisi ini telah menyebabkan penurunan rasio pelayanan posyandu di dengan peningkatan cakupan pelayanan dari 1:125 pada tahun 2017 menjadi 1:88 pada tahun 2021. Walaupun demikian namun rasio tersebut masih melebihi dari standard yang ada yaitu 1:50 atau 1 posyandu dengan 50 balita. Dengan demikian mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan posyandu sejak tahun 2017-2021. Berikut disajikan data rasio posyandu per satuan balita pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Rasio Posyandu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Posyandu	Unit	669	648	647	658	668	-0,02
2	Jumlah Balita	Orang	87.082	87.365	80.875	82.250	58.700	-7,56

3	Rasio posyandu per satuan balita	Indek	125,00	125,00	125,00	125,00	87,87	-7,43
---	----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Hal ini terjadi karena kemampuan penyediaan fasilitas posyandu yang terbatas walaupun jumlah balita berkurang setiap tahunnya. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk bersama memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio posyandu dapat dihitung dengan membagi jumlah posyandu dengan jumlah balita dikali 1.000.

6) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan pelayanan tingkat dasar yang merupakan rujukan antara sebelum dibawah kerumah Sakit Daerah, oleh karena itu pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu mendekati tempat tinggal masyarakat di suatu daerah, di Kabupaten Kampar sejak tahun 2017-2021 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu mengalami peningkatan, dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar, dari sejumlah puskesmas yang ada terdapat beberapa puskesmas yang merupakan puskesmas rawat inap yang menjadi rujukan antara.

Dari jumlah puskesmas yang ada, maka rasio pelayanan puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar stabil sejak tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan -11,28 per tahun. Sementara itu rasio poliklinik naik dari 0,014 pada tahun 2017 menjadi 0,006 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 12,99%. Sedangkan rasio pustu naik dari 0,004 pada tahun 2017 menjadi 0,006 tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -3,25% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2017-2021 menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan kesehatan, namun demikian harus dibarengi dengan kualitas pelayanan dengan sistem IT untuk memastikan pasien datang sesuai dengan keberadaan tenaga kesehatan sehingga memudahkan dalam mobilisasi pasien dari rumah ke pusat kesehatan dan sebaliknya.

Tabel 2.64
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Puskesmas	Unit	40	31	31	22	25	-9,47
2	Jumlah Poliklinik	Unit	31	53	48	53	48	15,63
3	Jumlah Pustu	Unit	184	187	181	179	177	-0,95
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	Indek	0,054	0,041	0,041	0,027	0,031	-11,28
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	Indek	0,004	0,007	0,006	0,007	0,006	12,99
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	Indek	0,025	0,025	0,024	0,022	0,022	-3,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

7) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun sejak tahun 2017-2021 terjadi penambahan jumlah penduduk dengan pertumbuhan 1,02% per tahun.

Tabel 2.65
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	6,00	4,00	4,00	3,00	4,00	-6,25
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Indek (1.000)	0,008	0,005	0,005	0,004	0,005	-8,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Pertambahan penduduk menyebabkan angka ketersediaan rumah sakit terhadap cakupan pelayanan Kesehatan terhadap penduduk semakin bertambah per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 sebesar 0,007 menurun pada menjadi 0,005 tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -1,01%. Menurut WHO rasio ideal rumah sakit adalah setiap 1 tempat tidur dirumah sakit menampung 1.000 penduduk. Berikut rasio ketersediaan rumah sakit per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.65.

8) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk, selain itu distribusi dokter tidak merata dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar hanya terkonsentrasi di Ibu Kota Kabupaten selain itu kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Berikut rasio dokter per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.66

Tabel 2.66
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Dokter	Orang	102	102	102	106	173	16,78
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Dokter per satuan penduduk	Indek (1.000)	0,14	0,14	0,14	0,13	0,21	14,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Rasio dokter per satuan jumlah penduduk Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.66. Dari tahun 2017 jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar sebanyak 102 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 173 orang sehingga rasio dokter persatuan penduduk sedikit mengalami peningkatan dari 0,14 artinya terdapat 1,4 dokter per 10.000 penduduk pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 0,21 atau terdapat 2,1 dokter per 10.000 penduduk tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 14,27% per tahun artinya pada tahun 2021 masih kekurangan dokter sebanyak 154 orang.

9) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi dan spesialis memberikan pelayanan kepada penduduk. Ketersediaan jumlah tenaga medis perjumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 adalah 1,85 sedangkan pada tahun 2021 rasio tenaga medis perjumlah penduduk adalah 1,79 dengan pertumbuhan sebesar 0,92% per tahun. Artinya terjadinya perbaikan rasio tenaga medis hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang harus dilayani oleh tenaga medis sebanyak 606 orang sementara tahun 2021 berkurang menjadi 560

orang. Rasio ini sudah sangat baik karena secara ideal 1:2.500 atau setiap seorang tenaga medis hanya melayani 2.500 orang. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis harus terus dilakukan sehingga mencapai kondisi pelanar prima. Berikut rasio tenaga medis per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tenaga Medis	Orang	1.374	1.347	1.345	1.887	1.460	3,89
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Indek (1.000)	1,85	1,80	1,78	2,33	1,79	0,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

10) Cakupan Komplikasi Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani daerah Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 27,31% orang tahun 2017 dan meningkat menjadi 90,00% orang tahun 2021 dengan pertumbuhan 43,90% per tahun, jelasnya lihat pada Tabel 2.68 berikut.

Motivasi dengan kinerja bidan desa serta terdapat pengaruh yang signifikan antara motif berprestasi dengan kinerja bidan desa dalam menangani komplikasi kebidanan. Beberapa hasil kajian menunjukkan kategori pengetahuan bidan desa adalah baik (86,84%), kategori sikap bidan desa adalah baik (94,74%), kategori pembelajaran bidan desa adalah cukup baik (52,63%), kategori motivasi bidan desa adalah sedang (57,89%) serta kategori motif berprestasi bidan desa adalah sedang (52,63%).

Tabel 2.68
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	27,31	36,40	36,30	37,70	90,00	43,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Untuk meningkatkan motivasi bidan dengan cara memberikan penghargaan (reward) bagi bidan yang memiliki kinerja bagus, baik penghargaan berupa materi maupun peningkatan karir dan peningkatan pengetahuan sesuai dengan prestasi yang dicapai serta melakukan pembinaan secara terus menerus bagi bidan yang memiliki kinerja kurang baik. Selain itu mengadakan pelatihan, seminar, simposium dan magang di bagian kebidanan secara bergilir bagi bidan desa untuk meningkatkan ketrampilan guna menunjang pelaksanaan tugas bidan.

11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Target UCI Target UCI merupakan tujuan antara (*intermediate goal*) yang berarti cakupan imunisasi untuk BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B harus mencapai 80% baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten bahkan di setiap desa. Cakupan desa/kelurahan UCI selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar -13,86% per

tahun, turun dari 193 pada tahun 2017 menjadi 96,00 pada tahun 2021 atau terjadinya penurunan cakupan pelayanan sebesar -13,86%. Capaian pelaksanaan UCI di Kabupaten Kampar masih dibawah target nasional sebesar 80%. Berikut data perkembangan data UCI Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tujuan pelaksanaan UCI adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit terutama BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif.

Tabel 2.69
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Desa/ Kelurahan	193,00	212,00	178,00	104,00	96,00	-13,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

12) Prevalensi Balita Gizi Kurang, Stunting dan Kurus

Fenomena gizi kurang dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang kurang jika merujuk pada fakta keterbatasan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Menurut Depkes RI (2008), Gizi kurang adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat pada anak, berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor.

Gizi kurang atau kwashiorkor merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Keadaan gizi yang kurang akan menurunkan daya tahan anak sehingga anak mudah sakit hingga berakibat pada kematian. Kondisi gizi kurang kebanyakan disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat atau orang tua yang kurang mampu dan pengetahuan orangtua akan nutrisi yang diperlukan tubuh anak yang kurang dipahami oleh orang tua. Berikut disajikan data Tabel 2.70 mengenai perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Balita	Orang	87.082	87.365	80.875	82.250	58.700	- 7,56
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	Orang	0,00	0,00	2.336	2.576	2.413	1,97
3	Persentase Balita Gizi Kurang	%	0,00	0,00	2,62	4,00	3,20	16,27
4	Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Perkembangan jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,27% dengan persentase gizi kurang dari jumlah balita sebesar 0,00% dari jumlah balita 87.082 balita tahun 2017 bertambah menjadi 3,20% dari jumlah balita sebanyak 58.700 balita tahun 2021. Dalam rangka mengatasi gizi kurang atau kwashiorkor dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi. Pemberian nutrisi tersebut

harus dilakukan secara bertahap dan seimbang yang cukup kebutuhan karbohidrat, lemak dan proteinnya. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bersifat preventif dan kuratif harus senantiasa dilakukan baik terhadap balita gizi kurang, demikian halnya dengan stunting dan balita kurus.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah balita gizi kurang yang banyak terdapat di Kecamatan tapung yaitu 969 balita dari 6.309 balita atau sebesar 15,36%. Secara relatif balita gizi kurang yang paling tinggi diatas 10% terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 27,13%, Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar 16,91%, Kecamatan Tapung sebesar 15,36%, Kecamatan Perhentian Raja sebesar 12,24% dari jumlah balita yang terdapat diwilayah tersebut. Sementara kecamatan dengan persentase balita gizi kurang dari 1% adalah Kecamatan Rumbio sebesar 0,71%, Kecamatan Salo sebesar 0,42%, Kecamatan Bangkinang Kota sebesar 0,51%. Kondisi balita harus mendapatkan prioritas penanganan karena kekurangan gizi pada balita dapat menyebabkan kematian hal ini dikarenakan balita lebih rentan terinfeksi penyakit. Penyakit infeksi yang diderita balita dapat mempengaruhi nafsu makan balita sehingga kebutuhan gizi dan makanan dalam tubuh balita tidak terpenuhi akibatnya balita dapat mengalami penurunan berat badan.

Sementara terkait dengan balita stunting dapat dilihat bahwa jumlah balita stunting yang banyak terdapat di Kecamatan tapung yaitu 1.275 balita dari 6.309 balita atau sebesar 20,21%. Secara relatif balita stunting yang paling tinggi di atas 10% terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar 26,04%, Kecamatan Tapung sebesar 20,21%, Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 17,62%, Perhentian Raja sebesar 12,74% dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebesar 11,95%, dari jumlah balita yang terdapat diwilayah tersebut. Sementara kecamatan dengan persentase balita stunting kurang dari 1% adalah Kecamatan Salo sebesar 0,48% dan Kecamatan Kuok sebesar 0,70%.

Kondisi balita stunting harus mendapatkan prioritas penanganan karena masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan. Maka program upaya penanganan yang harus dilakukan antara lain: 1. Penuhi nutrisi selama kehamilan, ibu hamil harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat, dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. 2. Penuhi Nutrisi Si Kecil dengan Optimal dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi. Nutrisi penting dan esensial untuk si Kecil adalah vitamin (A, B kompleks, C, D, E, dan K), mineral (kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, sodium, kalium, dan klorida), protein, lemak sehat, karbohidrat, dan cairan. Setelah itu, orang tua disarankan memberi si Kecil susu bernutrisi yang sesuai dengan usianya. Manfaat susu untuk menjaga sistem imun, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, memproduksi energi, menutrisi otak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. 3. Mempraktikkan Kebersihan yang Benar karena stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu, orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat, misalnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. 4. Mengatasi Anak yang Susah Makan mengakibatkan gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan karena alergi atau intoleransi makanan, refluks, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Berikut Tabel 2.71 disajikan perkembangan jumlah balita gizi kurang, balita pendek (stunting) dan balita kurus menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.71
Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang, Stunting dan Balita Kurus Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita			Persentase Balita		
				Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus	Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus
1	Bangkinang Kota	Bangkinang	1.385	7	101	16	0,51	7,29	1,16
2	Kampar	Air Tiris	3.163	55	179	148	1,74	5,66	4,68
3	Tambang	Tambang	6.554	256	152	194	3,91	2,32	2,96
4	XIII Koto Kampar	Batu Besurat, Gunung Bungsu dan Pulau Gadang	1.770	299	461	165	16,91	26,04	9,32
5	Kuok	Kuok	1.428	58	10	48	4,06	0,70	3,36
6	Siak Hulu	Pandau Jaya, Kubang Jaya dan Pangkalan Baru	6.931	360	409	264	5,19	5,89	3,82
7	Kampar Kiri	Lipat Kain	2.373	120	222	92	5,06	9,36	3,88
8	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	929	4	111	123	0,43	11,95	13,24
9	Kampar Kiri Hulu	Gema dan Batu Sasak	781	212	138	71	27,13	17,62	9,11
10	Tapung	Petapahan, Pantai Cermin dan Tapung	6.309	969	1275	754	15,36	20,21	11,95
11	Tapung Hilir	Kota Garo dan Tanah Tinggi	4.043	94	131	116	2,31	3,24	2,88
12	Tapung Hulu	Suka Ramai dan Sinama Nenek	3.492	152	38	528	4,37	1,08	15,12
13	Salo	Salo	1.684	7	8	3	0,42	0,48	0,18
14	Rumbio Jaya	Rumbio	1.267	9	74	18	0,71	5,84	1,42
15	Bangkinang	Laboy Jaya	1.904	48	111	16	2,52	5,83	0,84
16	Perhentian Raja	Pantai Raja	1.389	170	177	32	12,24	12,74	2,30
17	Kampa	Kampa	1.844	44	52	49	2,39	2,82	2,66
18	Kampar Utara	Sawah	1.106	29	49	35	2,62	4,43	3,16
19	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	1.755	71	121	69	4,05	6,89	3,93
20	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan dan Gunung Sari	1.261	121	151	108	9,59	11,98	8,58
21	Koto Kampar Hulu	Siberuang	1.171	28	47	30	2,39	4,01	2,56
Kabupaten			52.539	1690	2321	1653	3,22	4,42	3,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Secara umum jumlah balita kurus yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tapung hulu sebesar 15,12%, Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebesar 13,24% dan Kecamatan Tapung sebesar 11,95% dan yang paling sedikit hanya terdapat di Kecamatan Bangkinang kurang dari 1% yaitu 0,84% dan Kecamatan Salo sebesar 0,18%. Oleh karena itu diperlukan program pemberian nutrisi dengan 1). Mengatur jadwal makan merupakan cara pertama yang harus dilakukan untuk menaikkan berat badan anak secara sehat. Jika anak makan secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka asupan nutrisi pun akan terpenuhi dengan baik, 2). Menambah porsi makan anak jika anak mampu untuk menghabiskan makanannya lebih dari satu porsi. Akan lebih baik juga jika anak makan ditambah dengan susu dan buah-buahan sebagai pendamping makan, 3). Berikan anak jus buah dan susu yang rendah lemak. Jus dan susu ini dapat diberikan kepada anak ketika anak merasa haus, berikan dengan diselingi dengan air putih biasa, 4). Berikan makanan yang mengandung kalori tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti panduan dan melihat isi kandungan gizi dan nutrisi dalam kemasan makanan. Hal ini dapat membuat berat badan anak berkembang lebih cepat, 5). Berikan makanan yang memiliki kadar lemak sehat seperti kacang-kacangan, olahan kacang seperti selai kacang, alpukat serta minyak zaitun. Selain untuk menambah berat badan, makanan ini juga cukup baik untuk mencegah terjadinya peradangan.

13) Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Dimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Imunisasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sejak bayi baru lahir untuk menjaga kesehatannya. Kemudian demi memperpanjang “masa berlaku” perlindungannya, beberapa jenis vaksin utama harus diulangi sesuai dengan jadwal dan jarak yang telah ditentukan. Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 bulan.

Campak atau measles adalah penyakit infeksi yang amat menular. Apabila satu orang penderita campak berada dalam satu ruangan dengan sepuluh orang lain yang belum pernah sakit / belum pernah di imunisasi campak, maka di perkirakan sepuluh orang tersebut akan terinfeksi. Penyebabnya adalah Paramyxovirus. Campak bisa menyerang anak-anak hingga orang dewasa, tapi kelompok usia anak lebih rentan menderita komplikasi, seperti infeksi telinga, diare, dan pneumonia, bahkan kematian.

Imunisasi anak penting untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi. Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak di Kabupaten Kampar sebesar 49,90% tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 78,80% tahun 2021 dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 27,17% per tahun, lihat Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	%	84,49	na	49,90	73,20	78,80	27,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

14) Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Penyakit Polio yang disebabkan oleh virus polio ini termasuk kedalam penyakit yang dapat dihilangkan atau dihentikan peredarannya dengan memberikan imunisasi polio. Upaya yang dilakukan Negara Indonesia untuk terbebas dari penyakit polio adalah Program Eradikasi Polio (ERAPO). Kegiatan yang termasuk kedalam program tersebut diantaranya imunisasi polio yang diberikan secara rutin, pelaksanaan imunisasi masal yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan pelaksanaan surveilans AFP. Pelaksanaan Surveilans AFP dilakukan untuk mencari adanya peredaran Virus Polio Liar (VPL). Hal tersebut dilaksanakan untuk pencapaian program eradikasi polio untuk menghentikan kasus polio. Selain itu surveilans AFP dilaksanakan untuk mendokumentasikan tidak adanya peredaran VPL atau VDPV dalam mempertahankan status Indonesia bebas polio (Gurnadi, Hartono. 2016).

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. b) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Non Polio AFP rate di Kabupaten Kampar tertangani sebesar 100% dari tahun 2017-2021, lihat Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73
Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

15) Jenis Penyakit Yang Dilaporkan

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) biasanya disebabkan oleh masuknya kuman bakteri, yang ditandai oleh gejala klinis batuk, demam tinggi

dan disertai adanya napas cepat ataupun tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam Pneumonia adalah pembunuh utama pada balita di dunia, data WHO angka kematian pneumonia pada balita berada pada peringkat pertama. Faktor resiko terjadinya pneumonia pada balita antara lain: kurangnya pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, dan polusi udara di indoor, Bayi Baru Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak. Perkembangan penyakit Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak. Perkembangan penyakit Pneumonia di Kabupaten Kampar terus mengalami penurunan kecuali TBC.

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Beban Tuberkulosis makin besar dengan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Perkembangan jumlah yang meninggal karena penyakit TBC terus mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2020 meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 88,89% per tahun.

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria betina. Penyakit malaria adalah jenis penyakit serius dan berbahaya yang disebabkan oleh infeksi parasit jenis *Plasmodium*. Perkembangan jenis penyakit di Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.74
Jenis Penyakit yang dilaporkan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Orang	0,00	0,00	23,00	15,00	11,00	-30,72
2	Cakupan penanganan penemuan dan penderita penyakit TBC BTA	Orang	650,00	452,00	372,00	428,00	600,00	27,62
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	0,62	0,68	0,45	0,88	0,62	33,01
4	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00	0,00	0,00	9,00	25,00	88,89
5	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Orang	1071,00	1079,00	1005,00	938,00	940,00	-3,23
6	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Orang	0,00	0,00	0,00	999,00	889,00	-5,51
7	Cakupan penanganan penemuan dan penderita penyakit DBD	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Penderita diare yang ditangani	Orang	0,00	0,00	12,49	11,98	8,59	-16,20
9	Angka kejadian Malaria	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tingkat kematian akibat malaria	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	13,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sekelompok gejala penyakit kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Program pengendalian HIV bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten dan penguatan surveilans PD3I. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Kecendrungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktifitas fisik dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

16) Cakupan Layanan Kesehatan

Cakupan efektif pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana terdapat 4 esensi Jaminan Kesehatan Semesta yang terdiri dari penguatan sistem kesehatan, menjamin pelayanan yang terjangkau, meningkatkan akses terhadap pelayanan yang bermutu dan Membangun Kapasitas. Cakupan Efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas. Definisi mutu mempertimbangkan beberapa aspek dimensi mutu yang perlu diperhatikan, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Dalam pengukuran cakupan efektif perlu dipahami perbedaan antara konsep "layanan cakupan" dan "layanan cakupan yang efektif" contohnya seberapa banyak individu yang mengakses puskesmas untuk pelayanan hipertensi. Sedangkan dalam cakupan efektif perlu diketahui berapa individu yang membutuhkan pelayanan hipertensi menurut usia dan jumlah pasien hipertensi dengan tekanan darah yang terkontrol.

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga Kesehatan. Ada beberapa cakupan layanan yang mengalami penurunan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 selama periode tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 0,57% atau naik dari 90,96% menjadi 92,00% pada tahun 2021. Jelasnya cakupan layanan Kesehatan Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 lihat Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kasus	0,00	0,00	828,00	910,00	1475,00	36,00
2	Cakupan kunjungan bayi	%	96,10	99,70	95,20	99,80	97,90	0,54
3	Cakupan puskesmas	Unit	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	3,08
4	Cakupan pembantu puskesmas	Pustu	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	90,60	94,40	88,10	84,80	92,00	0,57
6	Cakupan pelayanan nifas	%	77,30	95,80	91,10	90,10	96,80	6,34
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	4,04	16,20	18,90	7,80	5,30	56,72
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	66,40	66,80	67,66	89,20	94,40	9,89
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang baru	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang ditaklukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

17) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu. Kematian saat bersalin dan satu minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan 0,00% atau turun dari 90,60% pada tahun 2017 menjadi 90,10% pada tahun 2021. Penurunan angka terjadi disebabkan menurunnya ketersediaan jumlah ibu yang ditolong tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Tabel 2.76

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,60	95,20	87,20	90,10	90,10	0,00

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022*

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Bidang pekerjaan umum merupakan Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar yang terdiri dari pelayanan di sub urusan sumber urusan jalan, daya air, sub sub urusan keciptakaryaan, serta sub urusan jasa konstruksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1) Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sedangkan Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar sepanjang 2.073,10 km dengan kondisi baik hanya 58,63% atau 1.216 km. Namun demikian sebagian jalan tidak tersedia data kondisi jalan tersebut. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
- Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdapat di Kabupaten Kampar sepanjang 398,96 kilometer, dengan status kondisi baik mengalami penurunan selama tahun 2017-2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -3,58% atau berkurang dari 297,03 km tahun 2017 menjadi sepanjang 255,78 km pada tahun 2021.

Sementara proporsi jalan dalam kondisi baik tahun tahun 2021 sebesar 64,11%, kondisi rusak sedang dengan proporsi 20,25%, kondisi rusak ringan dengan proporsi 15,21% dan kondisi rusak berat dengan proporsi 0,43%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan upaya semaksimal mungkin dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan mengingat masih terdapat kondisi jalan rusak sedang, ringan dan berat sepanjang 143,18 km dan kondisi ini akan meningkatkan biaya logistic selain memperlambat pergerakan barang dan orang.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan proporsi jalan yang dalam kondisi baik selama tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi cukup baik walaupun mengalami penurunan dari 74,45% tahun 2017 menjadi 64,11% tahun 2021. Perkembangan proporsi jalan menurut kondisinya dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Panjang Jalan Provinsi Riau Menurut Kondisi di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Kondisi	Satuan	Tahun					Proporsi (2019)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Baik	Km	297,03	293,56	290,09	286,62	255,78	-3,58
Sedang	Km	15,92	31,62	49,37	57,12	80,79	52,97
Rusak Ringan	Km	33,91	36,78	44,39	48,84	60,69	15,86
Rusak Berat	Km	52,11	37,00	15,11	6,38	1,70	-54,82
Panjang Jalan	Km	398,96	398,96	398,96	398,96	398,96	0,00
Rasio Jalan Baik	%	74,45	73,58	72,71	71,84	64,11	-3,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Tahun 2022

Sedangkan jika proporsi jalan dilihat dari aspek jenis permukaan, maka proporsi dengan jenis permukaan aspal sebesar 75,59% atau sepanjang 301,56 km, proporsi jalan dengan jenis permukaan beton sebesar 11,12% atau sepanjang 44,38 km dan proporsi Panjang jalan dengan jenis permukaan krikil/base dan tanah sebesar 13,29% atau sepanjang 53,01 km. Perkembangan proporsi jalan menurut jenis permukaannya dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Jenis Permukaan	Satuan	Tahun					Proporsi (2021)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Beton	Km	na	na	na	na	44,38	11,12
Aspal Hotmix	Km	na	na	na	na	301,56	75,59
Krikil dan Tanah	Km	na	na	na	na	53,01	13,29
Jumlah	Km	398,96	398,96	398,96	398,96	398,96	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan jenis permukaan tersebut dapat dilihat bahwa proporsi dengan jenis permukaan tanah masih merupakan proporsi terbesar dan terpanjang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya semaksimal mungkin untuk membangun dan memelihara jalan tersebut dalam mengurangi biaya logistic dalam transportasi barang dan jasa (orang) terutama hasil-hasil pertanian juga dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani.

Secara lengkap hal tersebut kondisi panjang jalan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79

Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kondisi	Satuan	Tahun					Proporsi (2019)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Baik	Km	1.101,29	1.159,27	1.170,60	1.199,55	1.215,55	2,51
2	Rusak Ringan	Km	822,86	778,29	810,21	796,46	780,05	-1,27
3	Rusak Berat	Km	148,95	135,55	92,30	77,10	77,50	-14,21
4	Panjang Jalan	Km	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	0,00
5	Rasio Jalan Baik	%	53,12	55,92	56,47	57,86	58,63	2,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sedangkan Panjang jalan yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan Kabupaten Kampar sepanjang 2.073,10 km. Proporsi Panjang jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,51% per tahun. Sementara kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan pertumbuhan masing-masing -1,27% dan -14,21% per tahun. Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,51% per tahun.

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan jalan Kabupaten dengan jumlah penduduk. Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang Jalan	Km	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	0,00
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Penduduk/Jalan	Jiwa/km	357,94	361,27	364,01	390,86	393,89	2,46
4	Rasio Jalan /Penduduk	Km/Jiwa	0,0028	0,0028	0,0027	0,0026	0,0025	-2,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas jalan oleh penduduk disuatu wilayah maka dilakukan perhitungan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Nilai rasio ini diartikan sebanyak panjang jalan yang terdapat dalam 1 km yang dapat digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas jalan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.80, menunjukkan bahwa setiap 1 km jalan di Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021 dimanfaatkan oleh 356 orang/km kemudian bertambah menjadi 393 orang/km. Tahun 2021 rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk 0,0025 angka ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Kampar perlu terus diupayakan. Peningkatan angka rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat aksebilitas penduduk untuk pemanfaatan jalan semakin meningkat. Oleh karena itu upaya pembangunan, dan

pemeliharaan jalan harus terus ditingkatkan dalam rangka menjamin aksesibilitas penduduk dapat terpenuhi dalam rangka memobilisasi barang, jasa dan orang.

c. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 tahun 2021 adalah mengalami peningkatan dari 4,45% tahun 2017 menjadi 5,23% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,77% per tahun. Kondisi ini masih jauh dari harapan. Perkembangan Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui
Kendaraan Roda 4 Kabupaten Kampar 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	4,45	5,57	5,48	5,08	5,23	4,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Oleh karena diperlukan peningkatan proporsi pembangunan infrastruktur jalan pada kawasan permukiman menjadi prioritas setiap tahunnya, sehingga persentase jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan roda empat semakin tinggi dan jalannya semakin panjang. Konsep pengembangan jaringan jalan pada dasarnya peningkatan dan perbaikan jalan sehingga jalan tersebut dapat di akses dengan mudah oleh kendaraan dalam transportasi barang, orang dan kendaraan pemadam kebakaran.

d. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan > 40 km/jam sebesar 55,01% pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 67,86% dengan persentase penurunan pertumbuhan sebesar -4,84% per tahun. Upaya peningkatan kondisi jalan baik harus terus dilakukan dalam rangka mempercepat dan memperlancar pergerakan barang dan jasa di wilayah ini mengingat wilayah merupakan wilayah dengan basis industry HTI, Perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet sehingga memerlukan kondisi jalan yang baik dalam rangka mengurangi biaya logistik.

Tabel 2.82
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Kabupaten Kampar 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Km	1.602,45	1.606,50	1.612,80	1.617,80	1.623,84	0,33
2	Panjang Jalan Kabupaten	Km	2.361,52	2.391,57	2.415,87	2.442,47	2.460,10	1,03
3	Persentase	%	67,86	67,17	66,76	66,24	55,01	-4,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan merupakan aspek kesehatan masyarakat yang terkait dengan cara hidup, bahan kimia, dan tekanan yang ada di sekeliling manusia yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraannya

termasuk orang lain di sekelilingnya yang berperan dalam menentukan kualitas kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan yang berguna harus ditingkatkan dan diperbanyak, sedangkan yang merugikan harus diperbaiki atau dihilangkan.

Menurut Blum, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dengan beberapa faktor lain, yaitu sumber daya alam, keseimbangan ekologi, kesehatan mental, sistem budaya, dan populasi sebagai satu kesatuan. Lingkungan dan perilaku mempunyai pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biologik dan sosio-kultural. Faktor perilaku antara lain higiene perseorangan (*personal hygiene*).

Sub sektor Sanitasi meliputi penanganan persampahan, air limbah dan drainase. Pembangunan drainase Kabupaten Kampar selain merupakan bagian dari sub sektor sanitasi juga sebagai sarana dan prasarana penanggulangan banjir/ genangan kawasan perkotaan.

Pada tahun 2017 rasio jumlah RT yang telah memiliki tempat buang air besar sendiri sebanyak 0,37% kemudian bertambah 0,55% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 10,38%. Jika dilihat pada pertumbuhan jumlah RT di Kabupaten Kampar sebesar 0,76% per tahun atau naik dari 166.477 RT pada tahun 2017 menjadi 171.550 RT pada tahun 2021. Berikut data Tabel 2.83 mengenai perkembangan rasio pertambahan perumahan bersanitasi layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.83
Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak (Fasilitas Pengelolaan Air Limbah) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Jumlah RT Mendapat Akses Air Limbah	RT	615	701	722	791	937	11,25
3	Akses Air Limbah	%	0,37	0,41	0,42	0,47	0,55	10,38

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang Pertanian, Industri, Rumah Tangga, Rekreasi, Aktivitas Lingkungan dan Irigasi.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani harus dilakukan dengan melalui adanya irigasi yang baik.

Faktor umur bangunan irigasi juga berpengaruh terhadap kondisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi yang baik. Kalau kita lihat jaringan irigasi di Kabupaten Kampar yang tersebar di beberapa Kecamatan kondisinya belum baik mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk melakukan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan beras yang terus mengalami penurunan akibat produksi padi berkurang selama lima tahun terakhir.

Oleh karena itu perlu melihat kondisi irigasi beberapa tahun sebelumnya dalam menyusun perencanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna

penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Berikut Tabel 2.84 disajikan data kondisi irigasi di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.84
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Infrastruktur	Satuan	Kondisi Irigasi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Utama	%	17	25	25	33
2	Jaringan Primer	%	82	9	5	4
3	Jaringan Sekunder	%	74	15	7	4
4	Jaringan Irigasi	%	80	10	5	5
	Rata-rata	%	63,25	14,75	10,5	11,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 2.85
Perkembangan Pembangunan Irigasi Teknis di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jaringan Irigasi	Satuan	Panjang Jaringan					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jaringan primer	M	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	0,00
2	Jaringan Sekunder	M	51.135	51.135	51.135	51.135	51.265	0,06
3	Jaringan Tersier	M	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	0,00
4	Luas lahan budidaya	Ha	6.546	5.507	4.468	4.807	4.542	-8,17
5	Rasio	%	1,257	1,494	1,841	1,711	1,814	0,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.85, menunjukkan selama periode tahun 2017-2021 panjang ketersediaan bangunan jaringan irigasi primer tidak mengalami perubahan dari 4.236 meter pada tahun 2017 menjadi 4.236 meter pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,00% per tahun. Sedangkan panjang jaringan irigasi sekunder yang sudah terbangun sepanjang 51.135 meter pada tahun 2017 dan bertambah menjadi 51.265 meter pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,06% per tahun. Rasio ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas persawahan lahan budidaya tumbuh sebesar 0,04% per tahun atau 1,25% tahun 2017 meningkat menjadi 1,81% pada tahun 2021.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Salah satu infrastruktur sumber daya air dalam mencapai ketahanan pangan untuk mencapai ketersediaan air di lahan basah/sawah ialah layanan penyediaan air irigasi, penyediaan layanan irigasi di Kabupaten Kampar dibangun melalui dana APBD Kabupaten Kampar, APBD Provinsi Riau dan juga dana APBN. berikut disampaikan tabel daerah irigasi/raja Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.

h. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan langkah-langkah komprehensif secara bertahap dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih rumah tangga terutama air minum bersih selama periode 2017-2021.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyediaan air minum bersih di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun masih terdapat sekitar 30,00% RT yang belum dapat menikmati penggunaan air minum bersih selama tahun 2017-2021. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah RT yang dapat mengakses air minum bersih sebesar 67,08% atau 111.673 RT tahun 2017 meningkat menjadi 73,85% atau 126.690 RT tahun 2021 dengan pertumbuhan 2,49% per tahun. Berikut Tabel 2.86 menjelaskan mengenai capaian perkembangan penyediaan air minum bersih di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.86

Perkembangan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Bersih	RT	111.673	118.678	115.366	120.697	126.690	3,27
3	Air Minum Bersih	%	67,08	69,66	67,51	71,73	73,85	2,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Penyediaan air minum bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum bersih merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum bersih dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum bersih menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan tingkat kesehatan dan ekonomi masyarakat.

i. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah

tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.87
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak (AML) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Rumah Tangga Mendapat Akses AML	RT	51.758	56.238	57.743	51.086	155.098	50,85
3	Air Minum Layak	%	31,09	33,01	33,79	30,36	90,41	49,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Pemanfaatan air bersih yang berasal dari penyediaan ledeng (perpipaan) yang bersumber dari air sungai hanya tersedia di beberapa wilayah kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang menggunakannya sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan sumber air bersih yang berasal dari sungai, sumur dangkal dan sumur dalam menjadi dominan. Sementara itu akses air minum layak dapat dilihat pada Tabel 2.87 terlihat bahwa penduduk yang memiliki akses air minum layak dengan rata-rata pertumbuhan Kabupaten mencapai 49,05% selama tahun 2017-2021 atau naik dari 31,09% tahun 2017 menjadi 90,41% tahun 2021, namun tahun 2021 termasuk data air minum bersih. Selain membersihkan badan, air bersih juga bermanfaat untuk membersihkan bahan makanan dan untuk masak. Bahan makanan yang bersih dapat menunjang kesehatan tubuh.

2) Penataan Ruang

Konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah.

Pengaturan penataan ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui antara lain: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan; Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah memperuntukkan penggunaan ruang sebagai yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Indikator penataan ruang terdiri beberapa item di antaranya Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dan rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan, ruang publik yang berubah peruntukannya. Berikut disajikan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.

Tabel 2.88
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

No	Rencana Peruntukan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A.	Kawasan Lindung	123.053	11,86
A.1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	4.382	3,56
1	Kawasan Hutan Lindung	4.231	96,55
2	Kawasan Bergambut	151	3,45
A.2	Kawasan Perlindungan Setempat	10.220	8,31
1	Sempadan Danau dan Waduk	1.083	10,60
2	Sempadan Sungai	9.137	89,40
A.3	Kawasan Konservasi	108.451	88,13
1	Suaka Alam	100.018	92,22
2	Badan Air	8.433	7,78
B.	Kawasan Peruntukan Budidaya	914.063	88,14
1	Kawasan Hutan Produksi	420.603	46,01
a.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	117.809	28,01
b.	Kawasan hutan Produksi Tetap	162.290	38,59
c.	Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	139.375	33,14
d.	Hutan Rakyat	1.129	0,27
2	Kawasan Pertanian	417.644	45,69
a.	Kawasan Tanaman Pangan	6.302	1,51
a.	Kawasan Hortikultura	27.245	6,52
c.	Kawasan KP2B	-	-
d.	Kawasan Perkebunan	384.097	91,97
3	Kawasan Perikanan	-	-
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	-	-
a.	Kawasan Pertambangan MIGAS	-	-
5	Kawasan Industri	5.850	0,64
6	Kawasan Pemukiman	69.966	7,65
a.	Kawasan Pemukiman Perkotaan	23.392	33,43
b.	Kawasan Pemukiman Perdesaan	46.574	66,57
Total		1.037.116	100,00
C. Outline		91.812	8,85
1	Pengembalian ke Fungsi Lindung	91.812	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau per satuan luas dan luasan RTH publik wilayah masuk dalam kategori rencana peruntukan pada Tabel 2.89 point B. Kawasan Budidaya bagian kawasan pemukiman dengan peruntukkan penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman seluas 914.063 hektar. Sedangkan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun *private* telah memiliki total luas lebih dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Di Kabupaten Kampar penetapan ruang terbuka hijau belum tertata secara administrasi baik dalam sistem tata ruang.

Tabel 2.89

Perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Bangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	ha	130.528	130.528	130.528	130.528	130.528	0,00
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	ha	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300	0,00
3	Luas Wilayah	%	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	0,00
4	Rasio Ruang terbuka hijau (1:2)	Indek	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	0,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus meningkatkan nilai estetika kota.

b. Rasio Bangunan Ber IMB

Dalam pemanfaatan ruang untuk Kawasan pemukiman terutama untuk bangunan perumahan dan bangunan lainnya memerlukan beberapa persyaratan terkait pendirian bangunan diantaranya IMB. IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Rasio bangunan ber IMB, adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Kabupaten Kampar.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Perkembangan rasio bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dilihat jumlah bangunan ber IMB sebanyak 11.023 unit (5,52%) tahun 2017 meningkat menjadi 41.353 unit atau (18,94%) pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 41,61% per tahun. Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat karena pertumbuhan pengurusan IMB lebih besar dari pertumbuhan jumlah bangunan, jelasnaya lihat Tabel 2.90

Tabel 2.90
Perkembangan Rasio Bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Bangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	Unit	11.023	24.273	31.692	37.015	41.353	44,82
2	Jumlah Bangunan	Unit	199.793	204.461	209.089	213.744	218.392	2,25
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	Indek	5,52	11,87	15,16	17,32	18,94	41,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih rendah kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB padahal dengan adanya IMB masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat antara lain; bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang dimiliki bangun agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan, meningkatkan nilai jual rumah, syarat transaksi jual beli dan sewa menyewa rumah, jaminan kredit bank, peningkatan status tanah, Informasi peruntukan dan rencana jalan.

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW berkaitan dengan penerbitan IMB, penerbitan IMB harus berdasarkan zona kawasan sesuai RTRW, dimana zona tersebut adalah:

1. Kawasan perdagangan dan jasa, diperuntukkan bagi bangunan perdagangan dan jasa seperti ruko dan pasar;
2. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, sedang atau tinggi diperuntukkan bagi bangunan perumahan maupun rumah-rumah tinggal pribadi;
3. Kawasan pemerintahan, diperuntukkan bagi bangunan pemerintahan dan perkantoran;
4. Kawasan daerah hijau, diperuntukkan bagi daerah hijau dan tidak diizinkan untuk diterbitkan IMB untuk bangunan;
5. Kawasan areal penggunaan lainnya, kawasan cadangan dan bisa diperuntukkan bagi seluruh bangunan.

Sebelum penertiban IMB harus dilakukan pengecekan izin lokasi terhadap RTRW sehingga izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan RTRW yang telah disahkan.

2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang 23 tahun 2014 kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan yaitu a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b). Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c). Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d). Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Sedangkan kewenangan Kabupaten Kota terhadap urusan perumahan dan Kawasan permukiman bidang kawasan permukiman antara lain: Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Terkait dengan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh yaitu Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota dan Penyelenggaraan PSU perumahan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan urusan perumahan dan kawasan permukiman menurut permendagri nomor 86 tahun 2017 dapat diukur dengan 9 (sembilan) indikator dan secara umum diuraikan sebagai berikut.

1) Perumahan Rakyat

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan rumah akan meningkatkan kualitas kehidupan, bermartabat akan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kualitas rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang dapat didiami oleh kepala rumah tangga bersama keluarganya. Oleh karena itu upaya pemenuhan rumah yang layak huni harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar. Rasio rumah layak huni sebagaimana pada Tabel 2.91 sama pada tahun 2017-2021. Tahun 2017 sebesar 0,06 kemudian

meningkat menjadi 0,16 tahun 2021. Perkembangan Pembangunan Rumah Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.91
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Perumahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Unit	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	444	904	1.013	1.854	1.275	41,86
3	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,06	0,12	0,13	0,23	0,16	37,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2022

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan sesuai tata ruang dan perizinan. Kualitas lingkungan yang masih rendah juga seringkali belum mendapat cukup perhatian dari penghuni itu sendiri. Penghuni seringkali hanya berpikir mengenai unit rumah yang mereka miliki padahal kualitas lingkungan dan juga prasarana sarana utilitas memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup mereka.

Hal tersebut diukur dengan membagi Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu. Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali dengan 100%. Berikut disajikan perkembangan cakupan rasio ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 70,47% per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.92
Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Rumah Layak Huni	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kerja Kurun Waktu Tertentu	Unit	80	300	500	429	282	73,30
2	Jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu	Unit	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio	Indek	0,010	0,036	0,059	0,049	0,033	70,47

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2022

2) Kawasan Permukiman

Kondisi permukiman berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah kesejahteraan penduduk maka semakin rendah pula kondisi permukiman yang mereka diami (Maslow, 1943). Rendahnya kualitas permukiman dikarenakan penduduk miskin tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kurangnya kemampuan dalam memelihara serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang mereka diami.

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Sebuah permukiman yang layak huni haruslah memiliki fasilitas lengkap juga sesuai kebutuhan masyarakatnya. Fasilitas yang harus dipenuhi antara lain bangunan tempat tinggal yang ramah lingkungan dan sesuai standar nasional. Sedangkan permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya

prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Perkembangan luas pemukiman layak huni meningkat sebesar 41,86% per tahun atau naik dari 0,01 (1,00%) pada tahun 2017 menjadi 0,042 (4,20%) pada 2021 dengan jumlah wilayah pemukiman seluas 32.628,37 hektar sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Luas Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Pemukiman Layak Huni	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Pemukiman Layak Huni	Ha	46.176	94.016	105.352	192.816	132.600	41,86
2	Jumlah Wilayah Pemukiman	Ha	31.680,15	31.680,15	31.680,15	31.680,15	31.680,15	0,00
3	Rasio	Indek	0,01	0,03	0,033	0,061	0,042	41,86

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2022

b. Persentase Pemukiman Kumuh

Indikator kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi kawasan pemukiman yang antara lain kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Perkembangan persentase pemukiman kumuh di Kabupaten Kampar tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.94
Persentase Pemukiman Kumuh di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Bangkinang Kota	177,18	43,70	24,66
2	Kampar Kiri	915,33	24,54	2,68
3	Siak Hulu	689,8	80,48	11,67
4	Tambang	371,94	39,62	10,65
5	Kampar	136,28	70,19	51,50
6	Kampa	173,08	26,31	15,20
Kabupaten Kampar		2.463,61	284,84	116,37

Sumber: Sebaran Kawasan Kumuh Kab. Kampar berdasarkan SK Bupati Kampar No. 663-664/XI/2020

Berdasarkan Tabel 2.94 memperlihatkan bahwa jumlah pemukiman kumuh di Kabupaten Kampar seluas 284,84 hektar dengan proporsasi terluas terdapat kecamatan Siak Hulu seluas 80,84 hektar dengan proporsi sebesar 11,67% dari luas Kawasan pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya tersesia seluas 207,68 hektar atau berkurang sebanyak 77,16 hektar atau berkurang sebesar 27,09%. Jumlah Kawasan kumuh di Kabupaten Kampar sebanyak 2.463,61 unit berkurang sejak tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar 0,09% per tahun.

c. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata merupakan luasan pemukiman yang tertata dibandingkan dengan luasan pemukiman seluruhnya. Persentase pemukiman tertata mengalami perkembangan sejak tahun 2017-2021 yaitu hanya 0,08 atau 8,00% tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 0,22 atau 22,00% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 41,86% per tahun. Berikut persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.95
Perkembangan Persentase Permukiman yang Tertata
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Permukiman Tertata	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Permukiman yang tertata pada waktu tertentu	Unit	444	904	1.013	1.854	1.275	41,86
2	Luas Permukiman yang seluruhnya pada waktu tertentu	Unit	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	0
3	Rasio	Indek	0,08	0,16	0,18	0,33	0,22	41,86

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2022

Pembangunan permukiman masih perlu adanya program penanganan yang serius terkait penataan permukiman melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap sarana hunian maupun prasarana infrastruktur permukiman sehingga dapat mendukung perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

d. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lingkungan yang sehat dan aman tentunya perlu didukung dengan PSU, selama periode 2017-2021, rasio ketersediaan PSU meningkat pada angka 17,00% tahun 2021, sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 16,00% dengan pertumbuhan PSU sebesar 22,41% per tahun. Berikut disajikan perkembangan PSU di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.96
Perkembangan Lingkungan Sehat dan Dukungan PSU
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	PSU	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Lingkungan	Unit	22	30	33	58	65	22,41
2	Kebutuhan PSU	Unit	374	374	374	374	374	0,00
3	Rasio Ketersediaan PSU	%	6	8	9	16	17	22,41

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- d. Penanggulangan bencana Kabupaten;
- e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
- f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Investigasi kejadian kebakaran;

h. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dalam menjalankan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tahun 2021, melakukan sebuah pendataan ulang untuk Petugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar, pendataan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi dan sebagai dasar dari penerbitan SK (Surat Keputusan) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan tentunya dari SK penetapan nama-nama yang tercantum didalam SK tersebut untuk dapat menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan monitoring pengawasan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat Desa, pengamanan Pilkada maupun koordinasi dalam hal yang berhubungan dengan tupoksi Linmas.

Secara umum Kabupaten Kampar relatif kondusif, meskipun demikian sebagai daerah yang membuka diri untuk masuknya orang dari berbagai suku dan etnis dapat hidup secara berdampingan dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, serta letak secara geografis Kabupaten Kampar yang strategis menuju Provinsi Sumatra Barat sangat memungkinkan terjadinya kasus kriminal dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada, serta aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai bentuk perkembangan dalam melaksanakan sistem demokrasi, berikut penyajian data pelanggaran urusan kantrantibumas.

Selain itu penambahan penduduk dan mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang ada, adanya optimalisasi monitoring dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga akan berpengaruh terhadap data pelanggaran, namun hasil akhir dari setiap kegiatan adalah mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif, maka untuk memperjelas penjelasan di atas. Untuk melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melimpahkan wewenang melalui organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Untuk melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah berupaya dalam menyelesaikan pelanggaran Perda, pelanggaran K3 dan jumlah petugas patroli didalam menjalankan tugas penertiban di wilayah Kabupaten Kampar. Namun demikian cakupan pelayanan Linmas mengalami penurunan dari 2.795 orang pada tahun 2017 menjadi hanya 1.471 orang pada tahun 2021 atau berkurang sebesar -12% per tahun. Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 menunjukkan terjadinya penurunan sebesar -12,00% per tahun, jelasnya lihat Tabel 2.97 berikut.

2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana kebakaran. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selama tahun 2017-2021 cakupan layanan bencana kebakaran dilaksanakan di 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar. Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021

menunjukkan terjadinya penanganan 100% karena dapat dilakukan di semua wilayah kecamatan, jelasnya lihat Tabel 2.97.

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam dapat diselesaikan sebesar 100%. Namun demikian jumlah pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 24,58% per tahun atau naik dari 49 kali tahun 2017 menjadi 114 kali tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Kampar. Perkembangan penanganan ketertiban, ketentraman, keindahan tahun 2017-2021 tercantum pada Tabel 2.97 berikut.

4) Persentase Penegakan PERDA

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda). Penegakan Peraturan Daerah selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 100,00% per tahun. Realisasi penegakan Perda meningkat dari 100,00% tahun 2017 menjadi 100,00% tahun 2021. Pertimbangan Perda penyakit masyarakat masih menjadi perhatian khusus pada tahun 2021. Berikut data capaian kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021.

Tabel 2.97
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kampar 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	2.795	2.795	2.795	2.795	1.471	-12,00
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota	Kecamatan	21	21	21	21	21	0,00
3	Jumlah Aparat Pamong Praja	orang	456	464	465	461	385	-3,84
4	Jumlah Patroli Petugas satpol PP dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24 jam	Kali	504	528	528	528	672	8,01
5	Jumlah Pelanggaran K3	Kali	49	67	94	94	114	24,58
6	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	Kali	49	67	94	94	114	24,58
7	Jumlah Perda	Buah	5	9	9	6	9	24,17
8	Jumlah Pelanggaran Perda	Buah	82	120	131	91	399	90,86
9	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.1.6 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial

Pelaksanaan penyelenggaraan untuk mendukung penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah

upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial memerlukan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang biasa dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membangun kesejahteraan sosial, melalui Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Kampar melakukannya penggalian potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), berbagai macam upaya yang dilakukan serta kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar.

Sedangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar -5,43% per tahun. Pertumbuhan PSKS tersebut hanya ditunjang oleh penambahan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tagana dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,90% dan 7,14% pertahun. Jumlah PSKS pada tahun 2017 terdapat 499 orang dan kemudian berkurang menjadi 383 orang PSKS pada tahun 2021. Dari data PMKS dan PSKS tersebut pada Tabel 2.97 diuraikan indicator kinerja penanganan PMKS oleh PSKS yang terdapat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021. Jumlah PSKS secara aktif berperan dalam penanganan PMKS di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021, lihat Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98
Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenis PSKS	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	55,00	55,00	56,00	57,00	57,00	0,90
3	Tagana	Orang	56,00	56,00	56,00	56,00	72,00	7,14
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Unit	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	-1,00
5	Karang Taruna (KT)	Unit	143,00	144,00	146,00	147,00	148,00	0,86
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Keluarga Pioner	Orang	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Unit	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	139,00	-	-	-	-	-25,00
10	Penyuluh Sosial	Orang	-	-	-	-	-	0,00
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
12	Dunia Usaha	Unit	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah		N/O	499,00	362,00	365,00	367,00	383,00	5,43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) Persentase PSKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Di Kabupaten Kampar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 26 Kategori yang ada hanya 18 Kategori yang termasuk dalam data PSKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, pnyandang disabilitas, tuna susila,

gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Adapun saat ini kategori yang memperoleh bantuan sosial yaitu keluarga fakir miskin yang berjumlah sebanyak 10.599 KK atau 100%.

2) Persentase PSKS yang Tertangani

Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Tabel 2.99
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Tertangani
Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah	Jumlah Yang Tertangani	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	Orang	1	1	100,00
2	Anak Terlantar	Orang	10	10	100,00
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Orang	65	65	100,00
4	Anak Dengan Kedistabilan	Orang	100	85	85,00
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	7	7	100,00
6	Lanjut Usia Terlantar	Orang	300	227	76,00
7	Penyandang Disabilitas	Orang	100	87	87,00
8	Korban Bencana Alam	KK	25	25	100,00
9	Keluarga Fakir Miskin	KK	17.185	17.185	100,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022

Dari 9 indikator, masih terdapat tiga indicator yang belum tertangani 100% yaitu Anak Dengan Kedistabilan hanya mencapai 85,00%, Lanjut Usia Terlantar tercapai 76,00% dan Penyandang Disabilitas tertangani 87,00% pada tahun 2021. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Berikut data PMKS yang dapat tertangani tahun 2021.

3) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap Darurat

Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang dilalui oleh Sungai Kampar. Kondisi ini juga berdampak negatif yaitu kerawanan terhadap bencana banjir. Daerah-daerah yang berada di tepi aliran sungai ini berpotensi terkena banjir terutama saat musim penghujan dimana debit air di sungai meningkat. Kawasan tersebut berpotensi terkena bencana banjir musiman karena morfologinya yang relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggarkan untuk siaga tanggap darurat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Berdasar tabel 2.100 menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 banjir hanya terjadi pada tahun 2017, 2019 dan 2021 dan pada tahun 2021 jumlah RT yang terkena banjir hanya 25 KK . Secara relatif seluruh RT yang terkena bencana banjir tertangani secara baik sebesar 100,00%. Berikut tabel yang menunjukkan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2017-2021.

Tabel 2.100
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Satuan	Tahun
----	--------	-------

	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial		2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan/ Tahun (%)
1	Jumlah keluarga Terkena Banjir	KK	1.489	-	2.432	-	25	1.128,5
2	Persentase Bantuan Bencana Banjir	%	100	0	100	0	100	1.128,5

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022

4) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Orang yang mengalami Penyandang Fisik dan Mental sekaligus atau cacat ganda adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Orang-orang ini perlu mendapatkan Jaminan Sosial dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Tabel 2.101

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Asistensi Sosial Penderita Disabilitas	Orang	9	13	67	58	58	6,00
2	Asistensi Lanjut Usia Tidak Potensial	Orang	59	63	227	0	0	4,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022

Seseorang yang dikatakan Lanjut Usia (Lansia) Tidak Potensial, jika ia telah berusia 65 Tahun keatas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Tabel di atas menunjukkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia potensial tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tahun 2017-2021.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan Urusan Pemerintahan Wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudajaan dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan dan Perpustakaan.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bagian tenaga kerja dimana kewenangan Kabupaten terkait antara lain:

- 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja antara lain: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta, Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja, Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.
- 2) Penempatan tenaga kerja yang terdiri dari pelayanan antar kerja di Kabupaten, Penerbitan izin LPTKS dalam Kabupaten, Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten,

Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten, Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Kabupaten.

- 3) Hubungan industrial tenaga kerja yang meliputi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Kabupaten, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten.

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat.

Pencari merupakan kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Indikator ketenagakerjaan terkait dengan Perlindungan dan Keselamatan Pekerja dapat dilihat pada Tabel 2.102 dan penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 2.102

Perkembangan Realisasi Perlindungan dan Keselamatan Pekerja di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	46,00	102,00	55,00	71,00	44,00	16,68
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5,00	7,00	5,00	27,00	12,00	98,97
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	491	248	98	381	112	-27,05
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	0,00	0,00	0,00	200	324	62,00
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0,00	10	52	0,00	14,00	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	20	21	16	16	0,00	-29,70
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	0,00	0,00	150	40	300	144,17
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	1.041	1.007	532	249	245	-26,31

Sumber: BPS, Sakernas diolah Pusdatinaker dan Tim Tahun 2022

1) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa perusahaan pada tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang berfluktuatif, namun naik dari 46 kasus tahun 2017 menjadi 44 kasus tahun 2021, sedikit menurun dibandingkan 2020 sebanyak 71 kasus. Hal ini menandakan hubungan perusahaan dengan masyarakat tempatan kurang baik, perlu peran pemerintah daerah mendorong hubungan baik

antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

2) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pertumbuhan pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sebesar -27,05% per tahun atau berkurang dari 491 orang pada tahun 2017 menjadi 113 orang pada tahun 2021. Penurunan jumlah pencari yang ditempatkan antara lain karena keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya Pendidikan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara keahlian yang dibutuhkan dengan lapangan kerja yang tersedia, keengganan pekerja untuk bekerja keluar daerah dimana perusahaan beroperasi. Kondisi ini dapat memicu menurunnya daya serap tenaga kerja sehingga berakibat pada peningkatan angka pengangguran terbuka.

Sementara itu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK turun dari 0,00 tahun 2017 menjadi 324 tahun 2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar 62,00% per tahun.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Rasio lulusan S3 yang tinggi yang terlatih akan dapat melakukan riset secara mandiri. Riset adalah sebuah aktivitas yang mengeksplorasi intelektualitas manusia untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Riset dilakukan menurut prinsip dan kaidah ilmiah universal seperti berpikir secara runtut dan argumentatif, menjunjung tinggi obyektivitas dan kejujuran ilmiah, serta rendah hati dalam mengakui karya-karya orang lain yang berpengaruh atau terkait dengan risetnya.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan tujuan dari SDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau GAP pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. IPG diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan.

Berikut disajikan data pada Tabel 2.103 mengenai perkembangan realisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar 2017-2021. Dari delapan indikator yang disajikan menunjukkan bahwa realisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya tiga indikator yang mengalami penurunan kinerja yaitu indeks pemberdayaan gender yang mengalami pertumbuhan negatif -2,97% per tahun, Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

(PNS) dengan pertumbuhan -1,24% per tahun dan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD dengan pertumbuhan -10,71% per tahun selama 2017-2021.

Tabel 2.103

Perkembangan Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	Orang	5.347	5.176	5.155	4.983	5.081	-1,24
2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	56,72	57,43	58,86	59,48	63,24	2,78
3	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	15,56	15,56	15,56	8,89	8,89	-10,71
4	Proporsi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	0,00	0,00	0,00	54,77	61,41	12,12
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	28,63	31,41	33,54	34,76	35,43	5,51
6	Jumlah perempuan di lembaga swasta	%	106,70	107,80	108,90	119,09	120,19	3,08
7	Persentase Siswa SD Perempuan terhadap total siswa SD	%	-	-	-	-	44,16	-
8	Persentase Siswa SMP Perempuan terhadap total siswa SMP	%	-	-	-	-	48,71	-
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,22	89,29	89,83	89,52	89,79	0,16
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60,80	61,18	54,41	54,95	53,62	-2,97

Sumber: DP3AKB dan BPS Provinsi Riau dan Pusat Tahun 2022

Sedangkan persentase siswa SD perempuan sebesar 44,16% (48.141 orang) dan siswa SD laki-laki sebesar 55,84% (60.775 orang) dari jumlah siswa SD sebanyak 108.916 orang di Kabupaten Kampar tahun 2021. Sementara menurut Kecamatan menunjukkan bahwa persentase siswa SD perempuan terbanyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sebesar 45,80% dan paling sedikit di Kecamatan Kuok hanya sebesar 42,46%. Secara umum persentase keterlibatan kaum perempuan pada pendidikan untuk jenjang Pendidikan SD hanya mencapai 79,08%. Masih rendahnya rasio kesetaraan gender pada jenjang Pendidikan SD diduga karena terdapat ramai anak perempuan yang tidak bersekolah di SD melainkan bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau pondok pesantren sebanyak 15,26% yang tidak terdata di dinas Pendidikan Kabupaten Kampar karena jika dilihat dari sex rasio antara laki-laki dan perempuan pada anak umur sekolah SD sebesar 94,34%. Kondisi inilah yang menyebabkan rendahnya rasio siswa SD perempuan dibandingkan siswa SD laki-laki di Kabupaten Kampar. Persentase siswa SD dan SMP perempuan dari jumlah siswa SD (Laki-laki dan Perempuan) menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104

Kesetaraan Gender Siswa SD dan SMP di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Kesetaraan Gender Siswa SD				
		Jumlah Siswa Laki-Laki	Jumlah Siswa Perempuan	Jumlah Siswa	Persentase Siswa Laki-Laki	Persentase Siswa Perempuan
1	Bangkinang	2.218	1.714	3.932	56,41	43,59
2	Bangkinang Kota	3.250	2.586	5.836	55,69	44,31
3	Gunung Sahilan	1.678	1.386	3.064	54,77	45,23
4	Kampa	1.682	1.314	2.996	56,14	43,86
5	Kampar	2.910	2.294	5.204	55,92	44,08
6	Kampar Kiri	2.603	2.015	4.618	56,37	43,63
7	Kampar Kiri Hilir	1.236	1.014	2.250	54,93	45,07
8	Kampar Kiri Hulu	836	624	1.460	57,26	42,74
9	Kampar Kiri Tengah	1.666	1.408	3.074	54,20	45,80
10	Kampar Utara	1.026	864	1.890	54,29	45,71
11	Koto Kampar Hulu	1.548	1.231	2.779	55,70	44,30
12	Kuok	1.683	1.242	2.925	57,54	42,46
13	Perhentian Raja	1.316	1.047	2.363	55,69	44,31
14	Rumbio Jaya	1.171	926	2.097	55,84	44,16
15	Salo	1.661	1.303	2.964	56,04	43,96
16	Siak Hulu	7.614	6.047	13.661	55,74	44,26
17	Tambang	7.476	5.996	13.472	55,49	44,51
18	Tapung	7.104	5.729	12.833	55,36	44,64
19	Tapung Hilir	4.239	3.287	7.526	56,32	43,68
20	Tapung Hulu	6.276	4.916	11.192	56,08	43,92
21	XIII Koto Kampar	1.582	1.198	2.780	56,91	43,09
Kabupaten Kampar		60.775	48.141	108.916	55,84	44,16
No	Kecamatan	Kesetaraan Gender Siswa SMP				
		Jumlah Siswa Laki-Laki	Jumlah Siswa Perempuan	Jumlah Siswa	Persentase Siswa Laki-Laki	Persentase Siswa Perempuan
1	Bangkinang	569	582	1.151	49,44	50,56
2	Bangkinang Kota	1.290	1.282	2.572	50,16	49,84
3	Gunung Sahilan	454	421	875	51,89	48,11
4	Kampa	196	192	388	50,52	49,48
5	Kampar	558	518	1.076	51,86	48,14
6	Kampar Kiri	372	322	694	53,60	46,40
7	Kampar Kiri Hilir	423	368	791	53,48	46,52
8	Kampar Kiri Hulu	141	152	293	48,12	51,88
9	Kampar Kiri Tengah	517	524	1.041	49,66	50,34
10	Kampar Utara	65	66	131	49,62	50,38
11	Koto Kampar Hulu	390	354	744	52,42	47,58
12	Kuok	389	328	717	54,25	45,75
13	Perhentian Raja	529	517	1.046	50,57	49,43
14	Rumbio Jaya	356	308	664	53,61	46,39
15	Salo	317	284	601	52,75	47,25
16	Siak Hulu	2.693	2.498	5.191	51,88	48,12
17	Tambang	1.794	1.997	3.791	47,32	52,68
18	Tapung	2.075	1.921	3.996	51,93	48,07
19	Tapung Hilir	883	818	1.701	51,91	48,09
20	Tapung Hulu	1.693	1.584	3.277	51,66	48,34
21	XIII Koto Kampar	252	247	499	50,50	49,50
Kabupaten Kampar		15.956	15.283	31.239	51,29	48,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sedangkan persentase siswa SMP perempuan sebesar 48,71% (15.283 orang) dan siswa SMP laki-laki sebesar 51,29% (15.956 orang) dari jumlah siswa SMP sebanyak 31.239 orang di Kabupaten Kampar tahun 2021. Sementara itu persentase siswa SMP perempuan menurut kecamatan jenjang Pendidikan SMP dimana persentase siswa perempuan paling banyak terdapat di Kecamatan Tambang sebesar 52,68% dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Rumbio Jaya sebesar 46,39%. Secara umum persentase keterlibatan kaum perempuan pada pendidikan untuk jenjang Pendidikan SMP sudah mencapai 94,96%. Rasio kesetaraan gender pada jenjang Pendidikan SMP secara relatif sudah sangat baik karena sudah hampir menyamai sex ratio penduduk untuk kelompok umur 13-15 tahun Kabupaten Kampar tahun 2021.

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Perbedaan capaian dalam ekonomi menjadi penyebab utama ketimpangan gender di Kabupaten Kampar. Salah satu sebab dari hal adalah kurangnya peran perempuan dalam pasar tenaga kerja. Pembebanan peran domestik mengakibatkan secara umum perempuan menjadi kurang produktif secara finansial. Sedangkan lima indikator lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan, jelasnya lihat Tabel 2.103.

Dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan program unggulan 3-ends. Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan, masih adanya praktek perdagangan manusia juga kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program 3-ends ini adalah (1) Akhiri kekerasan perempuan dan anak, (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program unggulan Kementerian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Sementara itu berdasarkan Tabel 2.104 adanya peningkatan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak. Enam indikator semua mengalami peningkatan, walaupun semua kasus yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Namun demikian upaya pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berhasil dengan baik hal dapat dilihat dari jumlah kasus yang terus meningkat dengan pertumbuhan 47,13% per tahun. Demikian halnya kasus KDRT mengalami peningkatan dari 9 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 11 kasus tahun 2021, walaupun tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya 1 kasus. Kasus kejahatan seksual mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 37,54% per tahun dengan jumlah kasus terbanyak terjadi tahun 2021 sebanyak 46 kasus berbanding 20 kasus tahun 2017. Demikian halnya dengan kasus penganiayaan juga meningkat dengan pertumbuhan sebesar 36,67% atau dari 3 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 9 kasus tahun 2021. Paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya sedikit.

Tabel 2.105
Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	49	47	40	35	112	47,13
2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti	Kasus	49	47	40	35	112	47,13
3	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	9	6	5	1	11	217,50
5	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual	Kasus	20	17	25	19	46	37,54
6	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	3	5	4	6	9	36,67

Sumber: DP3AKB Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kemen PPPA telah menyusun proses bisnis layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan dan anak. Setidaknya terdapat enam layanan standar dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yakni pelayanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah terutama pihak yang wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan tidak terbatas pada penanganan pada kasus yang terjadi tetapi harus ada program penanganan yang

bersifat preventif terutama terkait dengan bidang Pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pemerintahan dan tata Kelola kelembagaan, ekonomi dan sosial dan budaya masyarakat agar enam indikator tersebut mengalami perbaikan kinerja kedepan.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

Pangan merupakan hak azasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945, yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No 18/2012 tentang pangan. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga Ketahanan Pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap pangan akan semakin meningkat.

1) Ketersediaan Pangan Utama

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia termasuk penduduk Kabupaten Kampar. Beras memberikan kontribusi terbesar terhadap pemenuhan konsumsi kalori. Pengadaan beras dalam negeri dilakukan sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. Pengadaan beras dalam negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam negeri sehingga produsen beras masih tetap bersemangat untuk memproduksi beras untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan beras.

Berbagai kajian menyebutkan bahwa multiplier effect dari kegiatan pengadaan beras diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja pada tanaman pangan khususnya beras.

Perkembangan produksi beras di Kabupaten Kampar menunjukkan tren penurunan dengan pertumbuhan -8,61% selama tahun 2017-2021. Penurunan produksi beras tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi padi yang mengalami penurunan sebesar -8,59% per tahun akibat berkurangnya luas tanam dan panen masing-masing -6,76% dan -10,46% per tahun. Penurunan produksi padi ini berakibat pada penurunan produksi beras dari 26.676,08 ton tahun 2017 menjadi 18.306,22 ton tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -8,61% per tahun.

Upaya peningkatan produksi beras dalam rangka meningkatkan rasio ketersediaan beras dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kampar harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian ke depan melalui program peningkatan produktifitas, peningkatan intensitas penggunaan lahan, jaminan ketersediaan lahan pertanian pangan padi berkelanjutan serta praktek pertanian terbaik (*Good Agricultural Practices*).

Tabel 2.106 menunjukkan bahwa penurunan rasio ketersediaan beras ini akan sulit menjamin ketahanan pangan dari aspek ketersediaan beras melalui produksi. Oleh itu perlu upaya yang maksimal untuk menjaga ketahanan pangan di Wilayah ini melalui program lainnya diantaranya diversifikasi pangan. Disisi lain terjadinya peningkatan konsumsi beras akibat peningkatan pertambahan jumlah penduduk, sehingga kebutuhan beras meningkat dengan pertumbuhan 2,20% per tahun dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 98,10 kg/kapita/tahun. Kondisi ini berakibat pada penurunan kemampuan penyediaan beras dari aspek produksi beras daerah sehingga rasio ketersediaan beras menurun dari 33,46% tahun 2017 menjadi 21,37% tahun 2021 atau dengan penurunan pertumbuhan sebesar -9,64% per tahun. Berikut data ketersediaan terhadap kebutuhan pangan dan rasio ketersediaan dan kebutuhan beras di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.106
Perkembangan Realisasi Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Beras di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Tanam	Hektar	7.351,00	9.159,00	8.003,00	6.644,00	5.181,00	-6,76
2	Luas Panen	Hektar	8.331,00	8.656,00	7.195,00	7.088,00	5.147,00	-10,46
3	Produksi	Ton	42.236,18	42.017,48	37.245,45	36.823,04	28.965,54	-8,59
4	Produktivitas	Kw/Ha	5,07	4,85	5,18	5,20	5,63	2,78
5	Produksi Beras	Ton	26.676,08	26.555,05	25.778,14	23.272,16	18.306,22	-8,61
6	Konsumsi beras	Ton	79.726,07	83.565,21	73.654,26	82.534,67	85.671,91	2,20
7	Defisit	Ton	53.049,99	57.010,16	47.876,12	59.262,51	67.365,69	7,22
8	Rasio Ketersediaan	%	33,46	31,78	35,00	28,20	21,37	-9,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022

2) Ketersediaan Energi dan Protein

Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau *Recommended Dietary Allowances* (DRA) merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat (97,5%). Kegunaan AKG yang dianjurkan adalah 1) untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk. 2) untuk perencanaan dalam pemberian makanan tambahan maupun perencanaan makanan institusi. 3) untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional. 4) Acuan pendidikan gizi; dan 5) Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.

Ketersediaan Zat Gizi Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah Kalori, Protein, Lemak, Vitamin dan Mineral. Peningkatan konsumsi pangan padi-padian kkal/kapita/hari menunjukkan peningkatan 2,56% per tahun, pangan hewani meningkat 7,32% per tahun, kacang-kacangan meningkat sebesar 0,92% per tahun dan gula meningkat sebesar 0,57% per tahun. Sementara empat indikator lainnya mengalami penurunan seperti konsumsi umbi-umbian turun sebesar -1,88% per tahun, minyak lemak turun sebesar -4,12% per tahun dan sayur dan buah turun sebesar -2,33% pertahun serta penurunan yang paling signifikan adalah buah biji berminyak turun sebesar 10,66% per tahun. Oleh karena itu harus dilakukan upaya yang maksimal agar delapan komponen keterpenuhan gizi ini harus berjalan seimbang agar kesehatan masyarakat terjaga dan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat diwilayah ini.

Tabel 2.107
Perkembangan Realisasi Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Konsumsi	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	Kkal/kap/Hari	353,02	355,27	384,81	362,85	388,19	2,56
2	Umbi-umbian	Kkal/kap/Hari	97,53	96,27	92,77	94,21	90,32	-1,88
3	Pangan hewani	Kkal/kap/Hari	116,95	114,81	154,72	153,77	149,09	7,32
4	Minyak lemak	Gram/kap/Hari	24,25	23,53	21,75	21,4	20,47	-4,12
5	Buah biji berminyak	Gram/kap/Hari	34,55	33,37	22,56	20,04	20,91	-10,66
6	Kacang-kacangan	Gram/kap/Hari	38,73	38,61	40,4	39,32	40,12	0,92
7	Gula	Gram/kap/Hari	39,72	39,65	40,77	38,62	40,52	0,57
8	Sayur dan buah	Gram/kap/Hari	137,81	138,17	124,2	149,36	119,88	-2,33

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan program mutu dan keamanan pangan melalui kedua program tersebut seharusnya bisa dilakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan disemua rantai distribusi pangan baik, ditingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen.

Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengawasan keamanan pangan segar adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.

2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan

Sebagai daerah otonom melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, secara umum permasalahan sektor pertanahan Kabupaten Kampar tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah.

Permasalahan yang bersifat umum antara lain adalah (1) Luas lahan bersertifikat, (2) Luas lahan yang dimiliki oleh pemerintah, (3) Luas lahan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, (4) Jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan. Dari permasalahan umum tersebut dapat menimbulkan konflik dimasyarakat seperti (1) Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, (2) Adanya alih fungsi lahan non pertanian, (3) tidak terkendalinya harga jual dan beli tanah, (4) masih banyaknya kepemilikan tanah yang terdaftar.

Undang-undang 23 tahun 2014 terkait kewenangan Kabupaten terhadap urusan pertanahan antara lain: Pemberian izin lokasi dalam satu Kabupaten, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah Kabupaten; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten; Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kabupaten, Penerbitan izin membuka tanah; Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.

1) Penyelesaian izin lokasi

Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (*ex post*) untuk melihat apa yang terjadi, dan apa perbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (*ex ante*) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.

Tabel 2.108
Perkembangan Realisasi Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kondisi Lahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Permohonan Izin Lokasi	Unit	Na	Na	Na	Na	395.355	0,00
2.	Izin Lokasi	Unt	Na	Na	Na	Na	Na	0,00
3.	Penyelesaian izin Lokasi	%	Na	Na	Na	Na	Na	0,00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Di Kabupaten Kampar lahan banyak dipergunakan sebagai usaha perkebunan, selain itu banyak pula lahan pertanahan dipergunakan untuk kegiatan usaha lainnya, untuk pemanfaatan lahan selain dilengkapi dengan bukti sah kepemilikan berupa sertifikat juga harus ada izin lokasi. Dari jumlah pemohon izin lokasi yang ada di Kabupaten Kampar persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021. Disamping itu selama tahun 2017-2021 Pemerintah Daerah juga telah menertibkan aset-aset daerah dengan melengkapi administrasi kepemilikan lahan berupa sertifikat secara bertahap kemudian pemerintah daerah juga telah memfasilitasi konflik lahan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Salah satu permasalahan yang sering timbul berkenaan dengan pertanahan adalah terkait dengan batas wilayah. Pada hakikatnya penetapan batas wilayah administrasi suatu daerah adalah sebagai upaya untuk menunjukkan batas dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Namun demikian penetapan batas administrasi pemerintahan suatu daerah seringkali menimbulkan berbagai konflik kepentingan masyarakat, bahkan menyentuh aspek-aspek yang berkenaan dengan harga diri, kehormatan dan marwah suatu kesatuan masyarakat di daerah tertentu. Oleh karenanya penyelesaian berbagai permasalahan perbatasan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dan seimbang dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Secara administrasi, Kabupaten Kampar berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Rokan Hulu di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat. Kewenangan penyelesaian perbatasan antar daerah Kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka sejak pemekaran wilayah Kabupaten Kampar telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Kabupaten yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merumuskan kesepakatan garis batas yang akan dilakukan pelacakan dan penetapan di lapangan.

3) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat tentang pendaftaran tanah yang digunakan sebagai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan data yang dikemukakan pada Tabel 2.108 menunjukkan pada tahun 2021 sekitar 305.772 hektar lahan yang disertifikat dari luas lahan 1.128.928 hektar yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.109
Perkembangan Realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Kondisi Lahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	ha	Na	Na	Na	Na	305.772	0,00
2	Jumlah Luas Wilayah	ha	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	0,00
3	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Na	Na	Na	Na	27,09	0,00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu utama dalam wacana semua tingkat, baik nasional maupun internasional. Hal ini tidak lepas dari timbulnya kesadaran bahwa fenomena perubahan alam yang banyak menimbulkan bencana ini juga disumbang oleh perilaku manusia. Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ekologis yang juga masuk dalam jaringan ekosistem yang luas membuat manusia harus selalu mempertimbangkan faktor lingkungan dalam setiap kegiatan maupun pembangunan. Kemajuan pembangunan nasional saat ini membawa perubahan yang signifikan, namun kemajuan pembangunan tidak diimbangi dengan kemajuan kelestarian lingkungan alamnya. Terbukti dengan banyaknya kerusakan alam yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu indikator pembangunan berkelanjutan untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah. Pengelolaan lingkungan hidup adalah jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem. Sementara itu menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Kabupaten antara lain Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota; Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/kota, kinerja masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.110

Tabel 2.110
Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota	Ada/ Tidak	KLHS RPJMD	KLHS DDDT	KLHS RTRW	Tidak	RDTR Siak Hulu	Ada
2	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Izin	37	37	39	39	39	1,35
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan	Kasus	28	18	21	14	13	-14,88

No.	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
	dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.							

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) Pemantauan Kualitas Air

Mutu air adalah kondisi air yang diukur dan di uji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan status air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada satu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan, sumber air adalah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pada tahun 2021 Kabupaten Kampar melakukan pemantauan kualitas air menggunakan metode *STORET* atau penentuan mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air.

Pemantauan Kualitas Air dilakukan dengan menghitung Indeks Kualitas Air yang merupakan salah satu bagian dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Angka COD dan BOD yang lebih tinggi dari baku mutu menunjukkan tingkat pencemaran dalam kondisi baik. Hal ini perlu dilakukan tindakan pengelolaan lingkungan air supaya tidak berlanjut. Hasil pemantauan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.111
Perkembangan Realisasi Index Kualitas Air Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil					Indeks Kualitas Air
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	TSS	mg/L	50	27	12	8,66	17,346	12	Baik
2	DO	mg/L	6	4,5	4,8	5,9	3,6	4,17	Baik
3	BOD	mg/L	2	2,1	<0,2	2,8	63,22	8,241	Baik
4	COD	mg/L	10	16,74	<1,53	23,65	28,59	27,79	Baik
5	Total Fosfat	mg/L	0,2	<0,01	0,12	<0,10	0,815	0,149	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya. Dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar salah satunya pilar pembangunan lingkungan dengan 4 (empat) tujuan (1) Konsumsi dan produksi berkelanjutan, (2) Perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, (3) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, (4) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat.

Implementasi dukungan terhadap pilar pembangunan lingkungan Kabupaten Kampar melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (2) peningkatan pengelolaan bencana, (3) pemulihan pencemaran air dan tanah, dari hasil kebijakan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) program pembangunan, (1) Program pengendalian kebakaran hutan, (2) penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, (3) pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2) Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 (dua) periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter kimia berupa SO₂ dan NO₂. Pemantauan lingkungan khususnya kualitas udara menjadi konsekuensi bagi perusahaan dan kegiatan yang mengemisikan pencemar udara. Pemantauan kualitas udara meliputi udara emisi dan udara ambien diperlukan untuk pemenuhan peraturan (pemantaun rutin-abnormal-darurat, AMDAL/UKL-UPL, PROPER, dll) dan memprediksi dampak pencemaran emisi udara ke lingkungan. Empat komponen pencemaran udara secara keseluruhan menunjukkan kualitas baik terutama kadar NO₂ dan Kadar SO₂. Hasil pemantauan indek kualitas udara di Kabupaten Kampar tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.112
Perkembangan Realisasi Index Kualitas Udara Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Parameter	Parameter		
		Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Indeks Pencemaran Udara
		µg/m ³	µg/m ³	
1	Transportasi	16,27	12,15	Baik
2	Industri	6,39	2,47	Baik
3	Permukiman	9,40	5,02	Baik
4	Perkantoran	3,34	7,22	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

3) Index Kualitas Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) saat ini yang digunakan dalam perhitungan hanya tutupan lahan berhutan. Seringkali di daerah tutupan hutan diartikan sebagai status kawasan hutan. Berikut data indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.113
Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Hutan Produksi	Satuan	Luas	Indeks Tutupan Hutan
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	Ha	162.290	Baik
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Ha	117.809	Baik
3	Hutan Produksi Konversi (HPK)	Ha	134.375	Baik
4	Kawasan Hutan Tata Guna	Ha	162.290	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

4) Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan lingkungan hidup perkotaan menjadi perhatian Kabupaten Kampar dengan menerbitkan PERDA tentang permasalahan pengelolaan persampahan (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (2) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan. Pelayanan persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 terdiri dari prasarana TPS dengan pertumbuhan sebesar 13,64% atau dari 85 unit TPS pada tahun 2017 bertambah menjadi 104 unit TPS pada tahun 2020 dan kemudian berkurang menjadi 85 unit TPS tahun 2021.

Rasio pengelolaan persampahan mengalami peningkatan dari 30,00% tahun 2017 turun

menjadi 50,00% pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan kemampuan penanganan. Oleh karena itu program peningkatan pengelolaan persampahan dengan meningkatkan daya tampung salah satu upaya menampung produksi sampah yang bertambah setiap tahunnya akibat pertambahan jumlah penduduk dan jumlah usaha. Berikut data pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.114
Perkembangan Realisasi Cakupan Area Pelayanan Persampahan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah	Km ² /Ha	774,81	774,81	774,81	774,81	774,81	0,00
2	Luas Areal Pelayanan	Km ² /Ha	na	na	na	na	na	na
3	Jumlah TPS	Unit	85	93	98	104	85	0,66
4	Daya Tampung TPS (sampah)	Meter Kubik	99,5	120	120	134	138	8,85
5	Daya Tampung TPS (penduduk)	Meter Kubik	39.800	34.299	34.299	30.632	29.409	-7,13
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
7	Rasio	%	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	13,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

5) Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Jumlah sampah yang tertangani hanya tumbuh sebesar 1,26% sementara jumlah volume sampah sampai meningkat sebesar 3,29% dan produksi sampah meningkat 2,00% pertahun. Oleh karena perlu adanya upaya extra penanganan sampah dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca berupa pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak tertangani secara baik. Masyarakat sebaiknya berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Berikut data pengelolaan persampahan Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.115
Perkembangan Realisasi Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah sampah yang ditangani	Meter Kubik	47.635	47.986	49.128	52.441	47.635	3,29
2	Volume produksi sampah	Meter Kubik	12.344.811	12.591.707	12.843.541	13.100.412	12.344.811	2,00
3	Persentase	%	0,39	0,38	0,38	0,40	0,39	1,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan pembangunan kependudukan. Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2017 sebanyak 508.732 jiwa meningkat menjadi 553.540 jiwa pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,70% per tahun.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sebesar 3,16% per tahun. Oleh karena itu program peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminkud) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum dapat terpenuhi. Berikut data perkembangan penduduk wajib KTP dan ber KT serta rasio penduduk ber KTP dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.116

Perkembangan Realisasi Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Sudah Ber KTP di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	508.732	520.679	516.692	533.347	553.540	1,70
3	Jumlah Penduduk Ber KTP	Jiwa	435.309	483.576	516.690	533.322	553.522	4,92
4	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	85,57	92,87	100	100	100	3,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2022

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting (Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin) dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Dari rasio tersebut dapat dilihat, kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 0,86% per tahun atau naik dari 92,19% tahun 2017 menjadi 96,23% tahun 2021, artinya anak umur 0-4 tahun sudah memiliki akte kelahiran. Hal ini mengindikasikan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akte kelahiran yang sudah mulai meningkat.

Akte Kelahiran sangat bermanfaat untuk kegunaan antara lain: Pengakuan negara tentang status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang; merupakan dokumen atau alat bukti yang sah mengenai identitas seseorang; Data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya, seperti ijazah, KTP dan KK; syarat memasuki dunia pendidikan dari TK s/d perguruan tinggi; syarat melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI; syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan; syarat Membuat passport; syarat mengurus tunjangan keluarga; syarat mengurus warisan; syarat mengurus beasiswa; Salah satu syarat mengurus pensiun bagi pegawai; syarat mengurus pencatatan perkawinan; syarat mengurus dokumen-dokumen jika hendak melaksanakan ibadah haji; syarat

mengurus pelaporan dan Akta kematian; syarat mengurus perceraian; syarat mengurus pengakuan anak; dan syarat mengurus pengangkatan anak atau adopsi. Jelasnya lihat Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117
Perkembangan Realisasi Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Bayi	Jiwa	1.153	4.929	6.430	7.171	6.267	40,30
2	Belum Memiliki Akte Kelahiran	Jiwa	90	334	530	348	236	21,26
3	Sudah Meiliki Akte Kelahiran	Jiwa	1.063	4.595	5.900	6.823	6.031	41,50
4	Rasio bayi ber akte kelahiran	%	92,19	93,22	91,76	95,15	96,23	0,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan masyarakat dapat dicirikan dari beberap karakter sebagai berikut.

1. Community leader: petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
2. Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Community Fund: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
4. Community material: setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.
5. Community knowledge: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community based health education.
6. Community technology: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang.

1) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

- LSM Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah.
- LSM memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar tetap kondusif.
- LSM salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri yang berperan dalam ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan.

LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dan berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Perkembangan kondisi LSM Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118
Perkembangan Realisasi LSM Aktif di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah LSM Terdaftar	Unit	177	177	179	180	180	0,42
2	Jumlah LSM Aktif	Unit	65	72	108	110	113	16,34
3	Jumlah LSM Tidak Aktif	Unit	112	105	71	70	67	-11,08
4	Persentase LSM Aktif	%	36,72	40,68	60,34	61,11	62,78	15,78

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2022

LSM merupakan bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya, dimana jumlah LSM tumbuh hanya tumbuh sebesar 0,42% per tahun selama periode 2017-2021. Jumlah yang aktif pada tahun 2017 hanya 36,72% dan meningkat menjadi 62,78% tahun 2021 dengan pertumbuhan 15,78% per tahun. Semakin banyaknya LSM aktif diharapkan mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga pemberdayaan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar kedepan.

2) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pemberdayaan desa merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Hal ini menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat desa sangat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa

Kantor Desa adalah pusat pelayanan di desa, menjadi sentral segala kegiatan yang ada di desa baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor desa. Keberadaan dan kondisi dari sebuah kantor desa bisa mencerminkan dari identitas desa itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat melihat kantor saja untuk menentukan

nilai sebuah desa secara keseluruhan. Kantor yang layak adalah kantor yang dapat memberi rasa nyaman baik untuk aparatur maupun masyarakat.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,32% per tahun dari 75,21% tahun 2017 menjadi 82,64% tahun 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya upaya keras untuk memenuhi Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sehingga mencapai 100% lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Adapun kelembagaan pedesaan antara lain: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan lancar, keaktifan LPM dalam pembangunan desa berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian selama tahun 2017-2021 kelompok binaan LPM mengalami pengurangan sebesar -0,56% per tahun atau berkurang dari 1.607 kelompok menjadi 1.571 kelompok tahun 2021 atau berkurang sebanyak 36 kelompok. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jumlah pembinaan agar segala aspirasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirumuskan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.119

Perkembangan Lembaga Pedesaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	75,51	80,57	80,57	82,64	82,64	2,32
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1.607	1.607	1.571	1.571	1.571	-0,56
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	242	242	242	242	242	0,00
4	Persentase LPM Berprestasi	%	50	50	50	50	50	0,00
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	0,00
6	Persentase Posyandu aktif	%	67,36	66,70	66,80	68,50	71,40	1,49
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	20,00	20,20	20,50	20,60	21,00	1,23
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	10,00	12,10	12,20	12,20	12,20	5,46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2022

Selama kurun waktu tahun 2017-2021 jumlah PKK Aktif di Kabupaten Kampar sebesar 100,00%. Hal ini tak terlepas dari peran serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam

peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan peran dalam pembangunan desa. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.119 persentase PKK yang aktif tahun 2017-2021 adalah atau sama dengan jumlah desa dan kelurahan per kecamatan. Berikut digambarkan perkembangan capaian Lembaga Pedesaan yang terdapat di Kabupaten Kampar selama 2017-2021.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tujuan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat dapat secara mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan swadaya masyarakat, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Sehingga masyarakat merasa bahagia dan puas dengan adanya Program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data pelaksanaan swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat hanya tumbuh 1,23% per tahun atau dari 20,00% tahun 2017 dan meningkat menjadi hanya 21,00% tahun 2021. Demikian halnya dengan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat hanya berjalan berkisar antara 10,00% hingga 12,20% selama periode tahun 2017-2021.

Perkembangan jumlah desa menurut status desa mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021, yang mana pada tahun 2017 jumlah desa berkembang 48 dan kemudian bertambah menjadi 136 desa tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 40,01% dari tahun 2017-2021. Sementara itu pada jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan dari 52 desa tahun 2017 berkurang menjadi 23 desa tahun 2021. Sedangkan desa mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari belum ada tahun 2017 bertambah menjadi 6 desa tahun 2021.

Selain itu pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDES juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan sebesar 133,06% per tahun atau naik dari 15 BUMDES pada tahun 2017 menjadi 217 BUMDES tahun 2021. Peningkatan jumlah lembaga ekonomi BUMDES tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Peran Badan Usaha Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi sangat penting dalam penbgembangan perekonomian masyarakat desa. jelasnya lihat Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120

Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Desa	Unit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Unit	52,00	21,00	17,00	24,00	23,00	10,41
3	Jumlah Desa Tertinggal	Unit	140,00	94,00	52,00	21,00	19,00	26,67
4	Jumlah Desa Berkembang	Unit	48,00	115,00	148,00	146,00	136,00	40,01
5	Jumlah Desa Maju	Unit	2,00	11,00	24,00	45,00	58,00	171,14
6	Jumlah Desa Mandiri	Unit	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	45,83
7	Jumlah Program pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Unit	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan Sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak. Berikut data urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

1) Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Tabel 2.120 dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2021 rata – rata 2,46%, jika dihitung rata – rata jumlah anak per pasangan menikah adalah 1 orang, artinya program pengendalian penduduk yang rancang oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk dengan dua orang anak saja cukup sudah tercapai dengan baik.

2) Total Fertility Rate (TFR)

TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Tabel 2.121 dapat diketahui TFR Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan negative sebesar 5,08% per tahun atau TFR tahun 2017 sebesar 2,81% kemudian turun menjadi 2,25% tahun 2021. Secara umum penambahan jumlah penduduk wilayah ini didominasi oleh faktor kelahiran. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi.

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitas, pmdampingan dan pembinaan. Tabel 2.121 dapat diketahui peran aktif dinas dan badan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB meningkat secara signifikan dengan pertumbuhan sebesar 32,08% selama tahun 2017-2021.

4) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah

akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan. Rasio akseptor KB mengalami penurunan sebesar -15,04% per tahun. Faktor yang berpengaruh terhadap akseptor KB antara lain faktor Sosio Demografi. Faktor tersebut merupakan indikator terkait status Sosio-Ekonomi yang termasuk dalam pendidikan, pendapatan keluarga, status pekerjaan, jenis rumah, gizi serta pengukuran pendapatan tidak langsung lainnya (Bertrand, 1980). Sedangkan faktor pemungkin (jumlah petugas lapangan KB) dan faktor penguat (dukungan masyarakat atau perangkat desa). Kondisi ini telah memberikan dampak terhadap TFR yang masih diatas 2% per tahun, lihat Tabel 2.1201

5) Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP)

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah (kawin sah, secara hukum/adat, agama, negara dan sebagainya, juga hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri).

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa UKP rata-rata berada pada usia 22 tahun dan belum masuk dalam umur 25-49 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa masa reproduksinya pembuahan cukup lama, maka akan dapat melahirkan anak dengan jumlah yang banyak. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua, lihat Tabel 2.121.

6) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi. Kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Selain itu wadah berbasis institusi itu adalah salah satu program yang dikembangkan pemerintah sebagai wadah pusat pelayanan informasi dan konseling untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, konseling jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR), pertumbuhan dan perkembangan anak, dan konseling peningkatan ketahanan keluarga, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga serta memberikan informasi kependudukan dan KB. Berdasarkan data Tabel 2.121 menunjukkan bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 6,52% per tahun atau bertambah dari 1.356 PPKS tahun 2017 menjadi 1.724 PPKS tahun 2021, lihat Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121

Perkembangan Realisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,42	0,93	0,76	7,38	0,77	2,46
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,81	2,77	2,75	2,75	2,25	-5,08
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	32,08

4	Rasio Akseptor KB	%	83,11	66,49	63,60	62,80	41,10	-15,04
5	Rata-rata Usia Kawin Pertama	Tahun	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	1.356,00	1.294,00	1.524,00	1.559,00	1.724,00	6,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Tahun 2022. Catatan PPKS Tahun 2021 angka estimasi.

2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan

Dalam rangka menunjang pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kampar diantara kawasan strategis Pariwisata, Pertanian dan Kawasan Industri peran transportasi memegang peranan yang penting dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang sehingga perlu pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Jalur transportasi yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah transportasi darat dan air. Sebagai daerah yang dilalui oleh 2 (dua) sungai yang besar, yaitu Sungai Kampar, transportasi air sudah sejak lama berkembang dan menopang mobilitas kehidupan masyarakat. Sungai dahulu merupakan jalur utama untuk distribusi kebutuhan makanan, hasil pertanian dan mobilisasi orang dari suatu tempat ke tempat lain. Seiring dengan semakin berkembangnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat menyebabkan sungai bukan lagi sebagai sarana transportasi yang dominan dan utama.

Pengembangan jaringan jalan sarana dan prasarana jalan bagi keperluan angkutan barang atau orang harus ditunjang dengan perlengkapan yang setiap tahun dilaksanakan untuk menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran penggunaan jalan, perlengkapan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 Pasal 25 yaitu Alat Perlengkapan jalan berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Pengendali dan Pengamanan Jalan, Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Penyandang Cacat, Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan Luar Badan Jalan. Perkembangan indikator kinerja perhubungan tahun 2017-2021 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122

Perkembangan Realisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun(%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	5.325	20.960	17.950	9.392	5.784	48,29
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,70	0,70	0,60	0,50	0,45	-10,24
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.648	4.005	4.963	5.520	6.178	14,21
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Unit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	19,08	54,97	56,62	56,52	59,49	49,05
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	80,00	85,00	85,00	90,00	92,00	3,59
7	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	26,00	26,00	26,00	225,00	172,00	185,46
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	-18,99
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ Unit	6.859	7.538	8.376	9.108	9.866	9,52
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/ Unit	6.859	7.538	8.376	9.108	9.866	9,52

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang bis terus meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 48,29% per tahun. Pertambahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 20.960 orang kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yang dipicu oleh kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi dengan pembelian kredit oleh lembaga keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Rasio Ijin Trayek

Pemberian izin trayek angkutan umum agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk di naiki. Menyadari betul akan pentingnya efektivitas pemerintah mengeluarkan izin trayek angkutan umum. Berdasarkan Tabel 2.122 menunjukkan bahwa pemberian izin trayek rasionya mengalami penurunan sebesar 10,24% per tahun atau berkurang dari 0,70 tahun 2017 menjadi 0,45 pada tahun 2021. Kondisi ini sejalan dengan Jumlah arus penumpang angkutan umum yang menurun akibat penggunaan kendaraan umum yang terus mengalami pengurangan.

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe (pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan) dan uji berkala (pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji). Jumlah Uji KIR di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan 14,21% per tahun. Tingginya angka Uji kir angkutan umum menunjukkan adanya peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang menggunakan kendaraan umum terutama untuk angkutan barang, jelasnya tercantum pada Tabel 2.122.

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Kampar hanya terdapat terminal bis sebanyak 3 unit dari tahun 2017-2021, Sedangkan pelabuhan laut dan udara tidak ada, jelasnya lihat Tabel 2.122.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Penyelenggaraan layanan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur adalah satu cara penyelenggaraan angkutan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil bus penumpang serta truk. Selama periode tahun 2017-2021 persentase jumlah angkutan darat mengalami peningkatan sebesar 49,05% per tahun atau naik dari 19,08% tahun 2017 menjadi 59,49% tahun 2021. Data ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kapasitas daya angkut armada transportasi barang karena jumlah barang mengalami peningkatan.

6) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali dengan bilangan 100. Berikut adalah data indikator kepemilikan KIR angkutan umum. Tabel 2.122 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021. Kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan sebesar 3,59% per tahun atau naik dari 80,00% tahun 2017 menjadi 92,00% tahun 2021.

7) Pemasangan Rambu Rambu

Sementara itu, jumlah rambu yang terpasang baru pada tahun 2017 sebesar 26,00 unit kemudian bertambah menjadi 172 unit pada tahun 2021. Tujuan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan bertujuan (1) Peningkatan pengamanan dan keselamatan jalan, (2) Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/ kendaraan bermotor, dan (3) Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ. Berikut data sarana dan prasarana penunjang transportasi di Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2021.

8) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten sepanjang 2.073,10 km.

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Berdasarkan pada Tabel 2.122 menunjukkan bahwa rasio Panjang jalan per kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 18,99% atau jumlah kendaraan per km jalan berkurang dari 70,00 km pada tahun 2017 menjadi 30,00 km per kendaraan tahun 2021 atau bertambah kendaraan per km selama periode 2017-2021. Kondisi ini menunjukkan kepadatan lalu lintas terjadi dimana jumlah kendaraan semakin bertambah akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli terutama alat transportasi mobil penumpang.

9) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan (Transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada

10) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting. Aktifitas masyarakat yang terus meningkat menuntut peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Seiring meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Kampar, jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan produksi barang dan jasa yang harus diangkut melalui transportasi umum. Oleh karena itu peningkatan ketersediaan prasarana transportasi seperti; pertambahan panjang jalan, kapasitas jalan.

2.3.2.10 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informasi

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Begitu juga dalam organisasi pemerintahan. Saat ini dalam era informasi, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan informasi dalam pemerintahan menjadi sangat krusial. Untuk itu pemerintah

perlu untuk mengetahui, mengembangkan dan menjaga saluran informasi yang dimiliki, agar kewajiban pemerintah untuk memenuhi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaganya agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki portal saluran informasi resmi <http://portalkampar.go.id>, selain portal berskala Kabupaten, dalam memproduksi informasi pembangunan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, beberapa PD Kabupaten Kampar telah merancang portal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penyebaran informasi dilakukan melalui media telekomunikasi, penyiaran dan internet. Media Telekomunikasi melakukan penyebaran informasi dengan pesan singkat (SMS Blast) melalui operator telekomunikasi seluler dibawah koordinasi Pusat Informasi dan Humas. Media Penyiaran dilakukan dengan Radio Siaran dimana chanel frekuensi untuk masing-masing lokasi dapat dilihat pada leaflet. Penyebarluasan informasi melalui internet merupakan salah satu langkah yang efektif dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar seiring pasatnya laju perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar. Perkembangan Indikator TIK di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	60,00	75,00	75,00	95,00	99,00	15,47
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	63,47	76,64	75,09	99,16	99,04	14,92
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	28,89	34,52	41,27	49,71	60,05	17,18
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	15,90	16,55	10,34	10,12	8,27	-1,83

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2017-2022

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk kegiatan telekomunikasi. Termasuk dalam kegiatan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan tetap untuk telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, serta penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seperti jaringan bergerak terestrial, Seluler dan satelit.

2) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/telepon

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang agak lambat. Walaupun persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami peningkatan dari 63,47% tahun 2017 menjadi 99,04% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 13,17% per tahun dari total jumlah penduduk. Wilayah ini mempunyai peluang untuk tumbuh sangat cepat dan besar dalam penggunaan HP seiring dengan perkembangan pasar online baik terhadap produk luar maupun yang dikembangkan diwilayah ini dan pengurusan administrasi pemerintahan secara online.

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Kebutuhan terbesar terhadap akses internet saat adalah untuk Pendidikan dan pengajaran serta pasar online. Pemerintah juga harus membuka jalan dan memberikan berbagai insentif agar industri digital ini bisa tumbuh dan mendapat akses pendanaan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di diwilayah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring tingkat penggunaan di dunia Pendidikan dan pemasaran. Pertumbuhan penggunaan dan

kepemilikan akses internet dalam rumah tangga mengalami penurunan dari 15,90% tahun 2017 menjadi 8,27% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -3,58% per tahun. Penurunan penggunaan internet rumah tangga sebabkan oleh akses internet lebih mudah dengan menggunakan HP/telp cellular.

2.3.2.11 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai penyangga perekonomian nasional. Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian daerah dan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Peran koperasi dalam perekonomian Kabupaten Kampar diharapkan dapat melibatkan pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah dalam menggerakkan perekonomian.

1) Persentase Koperasi Aktif

Aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan jumlah koperasi selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan negative -10,99% dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 185 unit dari 285 unit koperasi pada tahun 2017 kemudian berkurang menjadi 93,00 unit koperasi aktif dari 276 unit koperasi pada tahun 2021. Koperasi Penurunan jumlah koperasi aktif dapat disebabkan oleh adanya replanting pada perkebunan kelapa sawit sehingga tidak berjalannya kegiatan koperasi terutama dalam penyediaan transportasi TBS.

2) Persentase Jumlah UKM

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) capaian selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari persentase UMKM tahun 2017 sebesar 5.421 kemudian meningkat menjadi menjadi 18.380 UMKM pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 35,55% per tahun. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level UMKM karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM dan keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa.

Mudahnya berinovasi di dalam menjalankan usaha dan teknologi dapat berubah-ubah disesuaikan kebutuhan sehingga tidak terlalu baku. Sehingga dapat bertumbuh sesuai dengan zamannya dan UMKM tidak memiliki birokrasi. Ruang lingkup yang kecil memudahkan UMKM dalam berkoordinasi dan fleksibel dalam menyesuaikan bisnisnya disesuaikan pasar. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM.

UMKM Kabupaten Kampar merupakan penopang kelancaran dan stabilitas perekonomian Kabupaten Kampar. Adapun intisari yang ingin disampaikan adalah bahwa terlepas dari besarnya peran yang telah diberikan oleh UMKM untuk perekonomian, efektifitas pemberdayaan UMKM selama ini perlu peningkatan kinerja, karena struktur UMKM masih melulu didominasi Usaha Mikro. Target pemberdayaan UMKM sangatlah besar jika proses pengembangan usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan yang baik dan berkelanjutan. Perkembangan jumlah koperasi aktif dan UMKM selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124

Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Koperasi	Unit	285,00	241,00	257,00	272,00	276,00	-0,37

2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	189,00	191,00	132,00	70,00	93,00	-10,99
3	Persentase Koperasi Aktif	%	66,32	79,25	51,36	25,74	33,70	-8,66
4	Jumlah UMKM	%	5.421	5.490	6.462	11.590	18.380	39,23

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.12 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan investasi, untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengupayakan masuknya penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), dengan masuknya investor dari PMDN dan PMA. Investasi dapat membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, mengurangi jumlah dan tingkat pengangguran serta peningkatan produksi barang dan jasa serta transfer teknologi pada pekerja lokal. Peningkatan investasi juga dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru disekitar lokasi kegiatan investasi. Demikian halnya transfer teknologi akan menambah pengetahuan bagi pekerja lokal terutama tentang metode kerja yang baik serta penguasaan dalam pemanfaatan teknologi industri modern bagi pekerja dan masyarakat lokal.

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Data investor dan investasi di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021, dapat dilihat dengan jumlah investor (PMDN/PMA) naik dari pada tahun 2017 sebanyak 20 unit menjadi 28 unit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 9,18% per tahun. Pertambahan jumlah investor terutama berasal dari PMDN diaman pada tahun 2017 sebanyak 12 investor kemudian meningkat menjadi 20 investor pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 14,67% per tahun. Sementara investor PMA tidak mengalami pertambahan selama periode tahun 2017-2021 hanya sebanyak 8 investor.

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi mengalami peningkatan realisasi investasi dari Rp.1.078,12 milyar tahun 2017 kemudian naik menjadi Rp. 7.914,80 milyar tahun 2021 dengan tingkat peningkatan pertumbuhan nilai investasi sebesar 102,43% per tahun. Pertumbuhan nilai investasi tersebut terutama didorong oleh besaran nilai investasi PMDN dari Rp. 800,61 milyar tahun 2017 naik menjadi 4.966,37 milyar tahun 2021. Peningkatan nilai investasi tersenut disebabkan karena optimalisasi pemanfaatan RTRW. Namun demikian masih diperlukan program peningkatan iklim investasi harus terus dilakukan dengan mendorong investor lokal untuk investasi pada industri hilir kelapa sawit dan karet serta sub sektor perikanan budidaya. Maka upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah antara lain meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

Tabel 2.125

Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Proyek	Unit	110	126	147	451	698	73,20
2	PMDN	Rp. Milyar	800,61	355,76	1.798,78	7.341,37	4.966,37	156,46
3	PMA	Rp. Milyar	277,52	439,76	184,72	239,96	2.948,43	289,77
4	Total	Rp. Milyar	1.078,12	795,53	1.983,50	7.581,33	7.914,80	102,43
5	Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	1.524	2.152	12.502	18.202	10.644	131,56

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2022

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja terserap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dari 1.524 orang pada tahun 2017 menjadi 10.644 orang pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 131,56% per tahun. Tingginya laju penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kampar telah mampu mengurangi angka pengangguran, namun belum secara signifikan dimana persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Kampar tahun 2017 sebanyak 5,93% dan hanya menurun menjadi 4,27% tahun 2021 dengan penurunan hanya 6,54% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya peningkatan angkatan kerja setiap tahun lebih kurang 3,12%.

2.3.2.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan alalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Tabel 2.126
Perkembangan Organisasi Pemuda di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	11,50	12,00	13,38	14,00	14,00	5,12
2	Persentase wirausaha muda	%	77,42	79,50	80,61	75,98	77,58	0,11
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Dalam regulasi tersebut juga memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Sementara dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait kepemudaan antara lain memuat tentang Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten. Selain itu memuat tentang Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi, Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Dalam regulasi atau undang-undang 23 Tahun 2014, tentang keberamukaan mengatur aspek Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten. Berikut disajikan beberapa indikator perkembangan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.127
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	65	68	70	70	70	1,89
3	Cakupan pembinaan atlet muda	Cabor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah atlet berprestasi	Atlit	112	112	116	116	116	0,89
5	Jumlah prestasi olahraga		9	9	10	10	10	2,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2022

Dalam rangka mewadahi aktivitas kepemudaan diperlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan agar dapat menghasilkan generasi yang berprestasi, cerdas, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, bertanggung jawab, serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dalam hal ini beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemuda Kabupaten Kampar antara lain:

1. Melibatkan peran serta pemuda dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
2. Membangun fasilitas dan sarana olah raga disetiap kecamatan.
3. Memberikan ruang kepada pemuda untuk berorganisasi, berkreasi, dan berprestasi dalam bidang olahraga (pembinaan atlet muda).
4. Memberikan dukungan pemuda untuk berprestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional.

2.3.2.14 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang statistik yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Kabupaten hanya terkait dengan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah Kabupaten.

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi dalam merancang kebijakan maupun melakukan evaluasi dengan efektif dan efisien, urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS dan PD di daerah serta lembaga terkait lainnya, sehingga pertanggungjawaban produk data merupakan hasil analisa bersama, dalam kondisi ini sering terjadi perbedaan data, hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan terhadap definisi data.

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan untuk penyusunan program dan kegiatan yang disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel yang baik. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang statistik yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kampar sejak 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.122 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar. Data yang disajikan dalam bentuk dokumen data statistik daerah, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketersediaan data valid, akurat dan update.

Kabupaten Kampar Dalam Angka (KDA) merupakan publikasi Kampar bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian setiap tahun. Buku ini berisi kumpulan data dari berbagai Dinas/Instansi di Kabupaten Kampar maupun hasil pengumpulan sensus dan survey. Data yang dicakup dalam buku ini meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, masalah sosial, pertanian, industri, perdagangan, penyediaan air

minum, keuangan dan pendapatan regional. Saat ini data tersebut tersedia di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang diterbitkan setiap tahunnya.

Tabel 2.128

Perkembangan Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	60,00
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00
3	Buku "PDRB"	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.15 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Urusan persandian pada tahun 2017-2021 Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar melalui satu program penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dengan kegiatan layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Kabupaten Kampar.

Tabel 2.129

Perkembangan Perangkat Daerah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	42	42	42	42	56	8,33

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2022

Adapun layanan yang dilakukan yaitu melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, penatalaksanaan persuratan dinas, penatalaksanaan persuratan berita rahasia, pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem elektronik daerah di lingkungan pemerintah daerah.

2.3.2.16 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Kabupaten terkait: Kebudayaan antara lain; Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kabupaten. Kesenian tradisional antara lain: Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah. Bidang sejarah adalah pembinaan sejarah local. Bidang cagar budaya antara lain: Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten, pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi. Bidang pemuseuman hanya mengatur terkait pengelolaan museum Kabupaten.

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kampar pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan beraklaq mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat

terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Berikut data perkembangan pelestarian budaya di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, terus dikembangkannya kegiatan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya, dan relokasi situs cagar budaya.

Tabel 2.130
Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kebudayaan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	18	20	7	8	11	-13,47
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1 (Candi Muara Takus)	0,00				
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	12	12	12	12	12	0,00
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	12	12	12	12	12	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam melestarikan nilai budaya yang mana sebagian besar penduduknya bersuku melayu adalah dengan merajut nilai-nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan kemajuan masa kini agar tercipta harmonisasi antara representasi masa lalu dan masa sekarang, beberapa kebiasaan yang masih tetap dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan telah menjadi agenda tahunan. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenis perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Kampar terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus. Dari beberapa jumlah perpustakaan di Kabupaten Kampar tersebut, yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan adalah perpustakaan Desa. perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi atau tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi pustaka baik buku-buku atau bacaan lainnya, yang digunakan untuk sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Jumlah kunjungan perpustakaan menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 11.361 orang kemudian meningkat menjadi 34.237 orang pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 46,38%. Kinerja perpustakaan lihat tabel 2.131. Perkembangan indikator perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.131
Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	11.361	10.100	10.377	28.335	34.237	46,38
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	18.890	19.651	20.788	20.780	20.788	2,45
3	Populasi yang harus dilayani		677.125	672.270	674.414	728.421	725.631	1,81
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk/1.000	%	0,0015	0,0013	0,0014	0,0038	0,0046	46,71
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	3.787	3.366	3.459	14.165	11.412	70,43
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Exemplar	85.949	87.988	84.169	84.169	84.169	-0,49
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.17 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam pembinaan kearsipan.

Kearsipan di Kabupaten Kampar menganut sistem kearsipan desentralisasi dimana sistem kearsipan dalam pelaksanaannya tidak dipusatkan pada satu unit kerja masing-masing unit pengelola data menyimpan sendiri arsipnya. Perkembangan kearsipan dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 100% dari jumlah PD pada tahun 2021. Sedangkan jumlah kegiatan untuk peningkatan SDM kearsipan sebanyak 1-5 kegiatan selama tahun 2017-2021, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.132 dibawah ini.

Tabel 2.132
Perkembangan Kearsipan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	0,00
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1	1	1	3	5	66,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Kampar, yaitu Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Sumberdaya Mineral, Perdagangan dan Perindustrian dan Transmigrasi.

2.3.2.18 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Kampar bersumber dari bidang perikanan tangkap atau air tawar dan bidang perikanan budidaya baik kolam dan keramba. Khusus untuk perikanan budidaya, komoditas yang dikembangkan antara lain ikan mas, patin, nila, bawal, gurami, lele, lomak, baung dan lainnya. Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Kampar cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari luasnya perairan umum yang dimiliki seperti Sungai Kampar beserta anak sungainya, rawa-rawa dan danau serta potensi pengembangan kolam oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan peruntukan budidaya sub sector perikanan belum ada peruntukan dalam tataruang wilayah lihat Tabel 2.88 Rencana Peruntukan Kawasan RTRW 2019-2039. Perkembangan produksi perikanan menurut jenis budidaya Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.133 berikut ini.

Tabel 2.133
Produksi Perikanan Menurut Jenis Pengelolaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenis Pengelolaan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Tawar	Ton	3.773,05	2.647,42	2.714,20	2.774,20	2.177,76	-11,65
2	Kolam	Ton	33.211,56	39.466,00	29.023,80	37.604,50	42.008,50	8,41
3	Keramba	Ton	24.936,49	24.284,76	27.512,84	15.767,65	14.916,86	-9,35
Jumlah		Ton	61.921,10	66.398,18	59.250,84	56.146,35	59.103,12	-0,88

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

Produksi ikan menurut jenis budidaya mengalami penurunan produksi sebesar -0,88% selama periode 2017-2021 atau turun dari 61.921,10 ton tahun 2017 menjadi 59.103,12 ton tahun 2021. Penurunan produksi terjadi pada jenis produksi ikan air tawar dengan rata-rata penurunan sebesar -11,65% dan produksi ikan keramba juga mengalami rata-rata penurunan sebesar -9,35%. Perkembangan produksi perikanan menurut jenis ikan di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.134 berikut ini.

Tabel 2.134
Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021

No	Jenis Ikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mas	Ton	27.690,86	12.194,60	9.530,93	8.698,14	7.895,47	-23,94
2	Patin	Ton	20.079,34	25.942,55	14.332,51	32.401,13	21.909,73	19,53
3	Nila	Ton	1.667,89	8.996,48	19.327,61	2.953,73	12.533,19	198,46
4	Bawal	Ton	254,84	612,00	151,59	307,93	188,11	32,29
5	Gurami	Ton	136,29	123,20	25,32	138,64	163,53	94,11
6	Lele	Ton	27.690,86	7.761,29	12.595,36	3.638,74	14.056,32	51,37
7	Lomak	Ton	20.079,34	1.029,36	193,99	4.176,60	4.688,00	-40,95
8	Baung	Ton	1.664,53	793,60	91,53	1.053,70	173,95	206,73

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

Produksi menurut jenis ikan menunjukkan bahwa ikan patin mengalami peningkatan produksi dari 20.079,34 ton pada tahun 2017 naik menjadi sebanyak 21.909,73 ton pada tahun 2021. Produksi jenis ikan paling sedikit adalah jenis ikan gurami hanya berkisar antara 136,29 ton tahun 2017 naik menjadi 163,53 ton ada tahun 2021.

Sementara itu jumlah produksi perikanan berdasarkan jenis pengelolaan menurut kecamatan tahun 2021 menunjukkan bahwa produksi perikanan terbanyak terdapat di Kecamatan Kuok yaitu 22.870,55 ton atau 38,70% terutama dikontribusikan oleh jenis ikan patin sebanyak 12.390,74 ton atau sebesar 56,55% dari produksi di Kecamatan Kuok. Sementara itu produksi ikan paling sedikit terdapat di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 22,12 ton atau sebesar 0,04% dari produksi perikanan Kabupaten Kampar. Jumlah produksi perikanan menurut kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135
Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Distribusi (%)
1	Koto Kampar Hulu	22,12	0,04
2	Tambang	40,78	0,07
3	Kampar Kiri Hulu	62,30	0,11
4	Tapung Hulu	78,48	0,13
5	Kampar Kiri Hilir	94,95	0,16
6	Tapung Hilir	168,57	0,29
7	Kampar Kiri	269,93	0,46
8	Kampar Kiri Tengah	283,54	0,48
9	Rumbio Jaya	329,42	0,56
10	Bangkinang	423,47	0,72
11	Perhentian Raja	493,40	0,83
12	Tapung	549,57	0,93
13	Kampar Utara	602,16	1,02
14	Gunung Sahilan	833,00	1,41
15	Kampa	1.035,02	1,75
16	Siak Hulu	1.235,73	2,09
17	Bangkinang Kota	1.947,22	3,29
18	Salo	2.531,29	4,28

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Distribusi (%)
19	Kampar	11.496,63	19,45
20	XIII Koto Kampar	13.734,99	23,24
21	Kuok	22.870,55	38,70

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2) Konsumsi Ikan

Ikan mengandung banyak asam lemak omega-3 yang sehat yang dapat mengurangi peradangan, membantu melindungi jantung Anda, dan mencegah penyakit kronis. Menurut National Institutes of Health, ikan mengandung vitamin D yang tinggi, dan dianggap sebagai salah satu sumber makanan terbaik untuk nutrisi. Konsumsi ikan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017-2021, KKP menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 47,34 kg/kapita/tahun 2017 naik menjadi 56,39kg/kapita/tahun ditahun 2021.

Berdasarkan pada target tersebut menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebanyak 61,16 kg/kapita naik menjadi sebanyak 63,65 kg/kapita tahun 2021 dengan tingkat capaian 106,15%. Demikian halnya dengan konsumsi ikan nasional tahun 2021 sebanyak 59,97 kg/kapita. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian konsumsi ikan Kabupaten Kampar sebesar 0,20% per tahun.

Tabel 2.136
Perkembangan Konsumsi Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Konsumsi Ikan Nasional	Kg/Kapita	47,34	50,69	54,49	56,39	59,97	5,77
2	Konsumsi Ikan Kab. Kampar	Kg/Kapita	61,16	63,38	60,90	63,78	63,65	0,20
3	Capaian dari konsumsi Nasional	%	129,19	125,03	111,76	113,11	106,15	-5,19

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan konsumsi ikan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat Kabupaten Kampar serta minat untuk mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan, karena ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi dan budaya masyarakat Kabupaten Kampar. Menilik hal tersebut, pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) tidak hanya merupakan tugas dari Kabupaten Kampar namun juga tugas bersama antar instansi terkait karena dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kampar akan turut mendukung pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Dalam upaya mendukung pelaksanaan gerakan nasional GEMARIKAN diperlukan suatu koordinasi lintas lembaga, lintas sektoral, lintas profesi dan lintas budaya. Langkah tersebut membutuhkan strategi baru yang melibatkan seluruh komponen bangsa, agar mampu membangunkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga.

Konsumsi ikan yang banyak akan menghasilkan bangsa yang cerdas makan ikan perlu lebih digalakkan. Kalaupun ikan yang kaya DHA seperti tuna atau salmon sulit terjangkau, ikan lokal seperti lele, mas, mujair, bandeng, teri, kakap atau jenis lainnya tidak jadi masalah, karena ikan tersebut juga kaya protein, bahkan ikan asin memiliki kandungan protein tertinggi. Sebenarnya DHA dapat dibentuk dalam tubuh manusia, namun kemampuan fisiologis setiap orang untuk mengubah dari bahan baku (asam lemak tak jenuh ganda) menjadi DHA berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesehatan, penyerapan dan kondisi lemaknya di dalam tubuh. Dengan demikian mengkonsumsi ikan sangat dianjurkan, selain mengandung DHA ikan juga mengandung EPA

(C20H3O20. DHA dan EPA secara bersama dikenal sebagai Omega 3, yang sudah dikenal dapat mencegah serangan jantung, stroke dan impotensi.

Upaya peningkatan konsumsi ikan masih dapat dilakukan dengan melihat potensi pengembangan produksi perikanan budidaya yang masih luas, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya harus tetap di topang dengan menekan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam. Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga perwakilan rakyat, swasta maupun stake holder lainnya. "Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, akan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan di tambahkan lagi usaha perikanan budidaya tidak mengenal gender.

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya. Tujuan utama pembinaan kelompok nelayan dalam rangka peningkatan daya saing sub sektor perikanan.

Tabel 2.137

Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	30 KUB	35 KUB	40 KUB	45 KUB	50 KUB	13,64
2	Produksi Perikanan kelompok Nelayan	Ton	1.400,20	1.450,09	1.605,05	1.799,80	1.836,95	7,11

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

Perkembangan bina cakupan kelompok bina nelayan terjadi peningkatan sebesar 13,64% per tahun dengan produksi kelompok nelayan dengan pertumbuhan sebesar 7,11% per tahun, jelasnya lihat Tabel 2.137 di atas.

4) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan dikategorikan sejahtera.

Perkembangan NTN Provinsi Riau selama periode 2017-2021, tumbuh sebesar -2,37% per tahun sementara Kabupaten Kampar tumbuh sebesar 8,30%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan kondisi NTN Provinsi Riau mengalami tren penurunan sementara NTN Kabupaten Kampar dengan kecenderungan peningkatan dan diharapkan juga dapat menggambarkan kondisi ril NTN Kabupaten Kampar dilapangan.

NTN mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual nelayann dengan produk yang dibutuhkan nelayan dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTN menunjukkan tingkat daya saing produk perikanan dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk perikanan dapat

dilakukan. Perkembangan NTN Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	NTN Provinsi Riau	Indek	115,25	103,65	101,92	94,37	96,23	-2,37
2	NTN Kab. Kampar	Indek	77,01	79,75	88,28	98,99	101,03	8,30

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

2.3.2.19 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang menjadi unggulan Kabupaten Kampar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar terus berusaha meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Peningkatan pengelolaan bidang-bidang tersebut diharapkan dapat menambah keberhasilan pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri serta peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.139. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 1,47 juta orang kemudian pada tahun 2021 kunjungan wisatawan menjadi 1,10 orang dengan pertumbuhan secara keseluruhan kunjungan wisatawan meningkat sebesar -4,48% selama tahun 2017-2021. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.139
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wisatawan	Juta Orang	1,49	1,65	1,19	0,87	1,10	-4,48
	Jumlah	Juta Orang	1,49	1,65	1,19	0,87	1,10	-4,48

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kunjungan wisatawan terutama mendatangi 80 objek wisata diantaranya adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 kilometer dari Kota Pekanbaru.

Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter, yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok ± 80 cm, di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 kilometer, mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir Sungai Kampar Kanan. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi sulung/tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa dan Palangka.

Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9 bahkan pada abad ke-11. Namun candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kampar.

Sementara itu lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar berkisar antara 1-7 hari. Perkembangan lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut

Tabel 2.140
Perkembangan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lama Kunjungan	Hari	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan selain mengetahui situs cagar budaya juga dapat meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pariwisata Kabupaten Kampar. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut karena diselenggarakannya berbagai program dan kegiatan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

Disisi lain peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dari sector pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat Pada Tabel 2.141 dimana Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2017 sebesar Rp. 54,801 Juta kemudian meningkat menjadi Rp. 54,801 juta pada tahun 2021 dengan peningkatan pertumbuhan rasio PAD sektor pariwisata terhadap total PAD sebesar 49,30% per tahun selama periode 2017-2021 atau naik dari 0,017% pada tahun 2017 menjadi 0,035% pada tahun 2021. Perkembangan nilai PAD sector pariwisata di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.141
Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PAD Pariwisata	Rp. Milyar	54,80	196,98	133,45	111,48	54,80	49,30
2	Total PAD	Rp. Milyar	316,43	229,82	262,88	246,05	277,42	-1,64
3	Rasio	%	0,017	0,086	0,051	0,045	0,035	80,23

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.3.2.20 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertanian menjadi sektor tertinggi ketiga dari tiga sektor utama yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor pertanian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% per tahun atau naik dari 27,37% pada tahun 2017 menjadi 32,91% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor pertanian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 3,50% per tahun atau naik dari 29,78% pada tahun 2017 menjadi 34,15% tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan perkembangan pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

Walaupun kontribusi PDRB sektor pertanian baik harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan, namun nilai PDRB baik harga berlaku dan harga konstan dengan masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,69% per tahun dan 4,34% per tahun.

Nilai PDRB pertanian yang semakin meningkat sehingga akan sangat berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bagi sektor industri pengolahan, berperan pada pengendalian inflasi, pengurangan jumlah penduduk miskin, penurunan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja di wilayah di Kabupaten Kampar. Bukti empiris menunjukkan bahwa tatkala sektor-sektor lain, khususnya sektor konstruksi dan industri manufaktur, mengalami kontraksi hebat, sementara sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif. Ketika sektor-sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian justru mengalami peningkatan. Tatkala ekspor produk non-pertanian mengalami

penurunan, ekspor produk pertanian justru mengalami peningkatan tajam. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai sector yang harus dikelola secara optimal sebagai andalan pembangunan ekonomi daerah dan pendukung sektor industri (high tech agro industry) secara berkelanjutan. Perkembangan kontribusi PDRB sektor pertanian selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.142 berikut.

Tabel 2.142
Perkembangan Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB HB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
	PDRB HK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
2	PDRB HB Sektor Pertanian	Rp. Milyar	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	9,99
	PDRB HK Sektor Pertanian	Rp. Milyar	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	5,62
3	Kontribusi PDRB HB Sektor Pertanian	%	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	5,06
	Kontribusi PDRB HK Sektor Pertanian	%	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	3,50

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha 2011-2022

2) Produktifitas Bahan Pangan Utama (Padi)

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu prioritas dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi, maka diperlukan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan terwujud jika tersedia peruntukan lahan pangan berkelanjutan, namun pada Tabel 2.88 (tidak tersedia berkelanjutan oleh karena itu upaya lain yang harus dilakukan adalah tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian), tersedia irigasi teknis persawahan, tersedia sarana prasarana produksi pertanian baik jumlah dan kualitas, adanya kelembagaan petani yang optimal, manajemen persawahan secara modern atau *Good Agricultural Practices*.

Tabel 2.143
Produktivitas Padi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Tanam	Hektar	7.351,00	9.159,00	8.003,00	6.644,00	5.181,00	-6,76
2	Luas Panen	Hektar	8.331,00	8.656,00	7.195,00	7.088,00	5.147,00	-10,46
3	Produksi	Ton	42.236,18	42.017,48	37.245,45	36.823,04	28.965,54	-8,59
4	Produktivitas	Kw/Ha	5,07	4,85	5,18	5,20	5,63	2,78

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan data Tabel 2.143 menunjukkan bahwa walaupun lahan pertanian belum tersedia kecuali peruntukan lahan tanaman pangan dan luas tanamnya terus mengalami pengurangan. Pada tahun 2017 luas tanam pangan khususnya padi yaitu 7.351 hektar kemudian berkurang menjadi 5.181 hektar tahun 2021 dengan penurunan -6,76% per tahun. Demikian halnya dengan luas panen yang berkurang sebesar -10,46% per tahun. Kondisi hanya diimbangi dengan peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi selama 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produktifitas tanaman padi sebanyak 5,07 ton/ha kemudian naik menjadi 5,63 ton/ha pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 2,78% per tahun. Namun peningkatan produktivitas ini tidak secepat penurunan luas tanam dan luas panen sehingga produksi terus berkurang dengan persentase pengurangan sebesar -8,59% pertahun.

Upaya peningkatan produktivitas padi melalui optimalisasi pengelolaan usahatani secara baik (*Good Agricultural Practices*).

Selain produksi padi, komoditas pertanian di Kabupaten Kampar adalah tanaman Jagung, Kedelai, Kacang-Kacangan, dan Ubi-Umbian. Jagung merupakan tanaman semusim yang bisa tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah, tetapi biasanya lebih subur di tanah liat. Tak hanya pipilan jagung yang bisa digunakan, hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi termasuk untuk mendukung ketersediaan pakan ternak dan bahan baku industri.

Kacang-kacangan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar terdiri kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman kacang-kacangan tersebut dapat dilihat pada

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman umbi yang paling sering dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Ubi kayu sering disajikan sebagai makanan ringan yang lezat. Sementara itu, daunnya bisa dimasak menjadi sayur yang bernutrisi. Demikian halnya dengan ubi jalar merupakan tanaman merambat yang batangnya tidak berkayu. Ubi ubi jalar sendiri terbentuk dari akar yang membengkak. Ubi jalar sering diolah menjadi berbagai masakan tradisional, umumnya adalah camilan seperti keripik. Daun ubi jalar bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Tabel 2.144
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian
di Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Panen							
	Jagung	Ha	1.162	1.163	1.164	1.165	1.167	0,10
	Kedelai	Ha	235	235	235	236	236	0,10
	Kacang Tanah	Ha	238	238	238	239	239	0,10
	Kacang Hijau	Ha	90	90	90	90	90	0,10
	Ubi Kayu	Ha	668	669	669	670	671	0,10
	Ubi Jalar	Ha	180	180	180	181	181	0,10
2	Produksi							
	Jagung	Ton	2.773	2.867	2.960	3.054	3.148	3,22
	Kedelai	Ton	270	279	288	297	307	3,22
	Kacang Tanah	Ton	226	234	241	249	257	3,22
	Kacang Hijau	Ton	87	90	93	96	99	3,22
	Ubi Kayu	Ton	17.017	17.592	18.167	18.743	19.318	3,22
	Ubi Jalar	Ton	1.497	1.548	1.598	1.649	1.699	3,22
3	Produktivitas							
	Jagung	Ton/ha	2,39	2,46	2,54	2,62	2,70	3,12
	Kedelai	Ton/ha	1,15	1,19	1,22	1,26	1,30	3,12
	Kacang Tanah	Ton/ha	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	3,12
	Kacang Hijau	Ton/ha	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	3,12
	Ubi Kayu	Ton/ha	25,47	26,31	27,14	27,97	28,80	3,12
	Ubi Jalar	Ton/ha	8,32	8,59	8,86	9,13	9,40	3,12

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022, Data Tahun 2018-2021 Estimasi.

3) Produktivitas Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Pinang dan Kopi. Sektor perkebunan berkembang sangat pesat, terutama perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengembangan perkebunan dengan berbagai macam pola. Ada pola perusahaan swasta yang menanamkan modalnya untuk pembukaan lahan perkebunan baru, ada Pola Kemitraan, Pola Inti Plasma, dan

Pola Swadaya. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut ini.

Tabel 2.145
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Panen							
	Kelapa Sawit	Ha	225.799	225.916	226.085	226.003	226.169	0,04
	Karet	Ha	93.349	93.098	93.367	93.402	92.741	-0,16
	Kelapa	Ha	1.853	1.838	1.839	1.798	1.798	-0,75
	Kakao	Ha	316	335	335	335	335	1,50
	Pinang	Ha	109	109	109	109	109	0,00
	Kopi	Ha	14	14	14	14	14	0,00
2	Produksi							
	Kelapa Sawit	Ton	2.664.676	2.665.029	2.703.547	2.703.547	2.868.627	1,89
	Karet	Ton	52.769	64.857	69.952	76.734	111.190	21,34
	Kelapa	Ton	446	446	451	483	485	2,16
	Kakao	Ton	43	43	44	44	45	1,15
	Pinang	Ton	22,40	22,40	22,40	27,90	27,90	6,14
	Kopi	Ton	417	417	417	417	417	0,00
3	Produktivitas							
	Kelapa Sawit	Ton/ha	11,80	11,80	11,96	11,96	12,68	1,85
	Karet	Ton/ha	0,57	0,70	0,75	0,82	1,20	21,59
	Kelapa	Ton/ha	0,24	0,24	0,25	0,27	0,27	2,96
	Kakao	Ton/ha	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,27
	Pinang	Ton/ha	0,21	0,21	0,21	0,26	0,26	6,14
	Kopi	Ton/ha	30	30	30	30	30	0,00

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Dari data luas lahan dan produksi perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki jumlah luas lahan dan produksi dengan proporsi terbanyak bila dibandingkan dengan komoditas lainnya, disusul dengan komoditas karet. Selama tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan peningkatan luas panen, produksi produktivitas perkebunan Kabupaten Kampar secara positif. Hal ini dapat dilihat selama tahun 2017-2021 dimana semua komoditas mengalami peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas, kecuali kelapa sawit dan kakao. Menurunnya produktivitas tanaman kelapa sawit juga dapat disebabkan masih banyaknya tanaman umur muda yang baru direplanting dan atau tanaman yang sudah tua dan harus diremajakan. Oleh karena itu diperlukan pendataan khususnya tanaman kelapa sawit agar komoditas tetap menjadi andalan bagi ekonomi daerah terutama petani swadaya.

4) Produktivitas Peternakan

Komoditas unggulan sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, dan Itik. Populasi terbesar untuk jenis ternak besar yaitu sapi, sedangkan untuk ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing. Melihat potensi ternak yang besar pemerintah ingin menjadikan Kabupaten Kampar sebagai sentra pengembangan sapi potong di daerah Riau.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal di atas, yaitu melalui pengembangan Kawasan Peternakan Pola Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dan Pola Sistem Integrasi Sapi dan Padi (SISPA), sehingga peternak sapi tidak lagi kesulitan menyediakan pakan ternaknya. Potensi lahan perkebunan untuk pengembangan pola SISKA di

Kabupaten Kampar sebesar 226.169 hektar. Perkembangan populasi ternak ruminansia berkurang dari 72.452 ekor tahun 2017 menjadi 69.666 ekor tahun 2021 dengan pertumbuhan -0,71% per tahun. Pola Siska yang telah dikembangkan di beberapa lokasi tersebut telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kampar. Pola Siska yang telah dikembangkan di beberapa lokasi tersebut telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kampar, lihat Tabel 2.146.

Tabel 2.146
Populasi Ternak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Populasi Ternak	Ekor						
	Sapi Potong	Ekor	40.085	41.414	28.755	28.461	29.001	-6,59
	Kerbau	Ekor	15.938	16.105	14.309	14.420	14.621	-1,98
	Kambing	Ekor	16.020	16.276	20.739	21.069	24.751	12,02
	Domba	Ekor	409	471	1.408	1.064	1.293	52,80
	Ayam Buras	Ekor	294.318	309.534	302.259	291.745	326.994	2,86
	Ayam Ras Potong	Ekor	14.025.153	14.792.610	13.256.272	13.521.397	18.113.705	7,76
	Itik	Ekor	25.926	25.510	39.916	41.314	45.816	17,32
2	Produksi Daging							
	Sapi Potong	Kg	830.392	1.095.869	929.766	994.720	1.029.557	6,83
	Kerbau	Kg	711.454	789.086	1.026.850	1.066.892	1.138.544	12,91
	Kambing	Kg	31.585	39.061	42.668	36.083	39.507	6,74
	Domba	Kg	309	355	3.373	3.525	2.026	206,75
	Ayam Buras	Kg	362.815	205.816	477.429	486.978	495.239	23,10
	Ayam Ras Potong	Kg	3.690.626	3.788.474	4.235.243	3.941.528	4.271.347	3,97
	Itik	Kg	17.291	19.220	19.604	19.944	18.130	1,45
3	Produktivitas							
	Sapi Potong	Kg/Ekor	20,72	26,46	32,33	34,95	35,50	14,90
	Kerbau	Kg/Ekor	44,64	49,00	71,76	73,99	77,87	16,14
	Kambing	Kg/Ekor	1,97	2,40	2,06	1,71	1,60	-4,03
	Domba	Kg/Ekor	0,76	0,75	2,40	3,31	1,57	50,80
	Ayam Buras	Kg/Ekor	1,23	0,66	1,58	1,67	1,51	21,98
	Ayam Ras Potong	Kg/Ekor	0,26	0,26	0,32	0,29	0,24	-1,45
	Itik	Kg/Ekor	0,67	0,75	0,49	0,48	0,40	-10,40

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sedangkan populasi ternak unggas mengalami pertumbuhan sebesar 7,67% per tahun dimana jumlah ternak unggas tahun 2017 sebanyak 14.345.397 ekor kemudian bertambah menjadi 18.486.515 ekor tahun 2021. Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Kampar untuk kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.146 diatas.

5) Cakupan Bina Kelompok Petani

Pembinaan kelompok tani bermaksud untuk membantu para petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam petani dalam pengelolaan kelompok. Meningkatkan cakupan bina kelompok tani yang mendapat pelayanan baik bantuan maupun penyuluhan dan pendampingan.

Pembinaan kelompok tani di Kabupaten Kampar selalu ditingkatkan setiap tahunnya karena penguatan kelembagaan pertanian salah satunya adalah pembinaan terhadap kelompok tani. Cakupan pembinaan kelompok tani secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 17,79% per tahun atau bertambah dari 1.801 kelompok tahun 2017 menjadi 2.956 kelompok pada tahun 2021, jelasnya lihat Tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.147
Perkembangan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Produksi Perikanan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kelompok Tani Tanaman Pangan	Kelompok	1.801	2.956	2.956	2.270	2.956	17,79
2	Kelompok Tani Perkebunan	Kelompok	771	774	767	760	778	0,24
3	Kelompok Tani Peternakan	Kelompok	257	257	257	257	257	0,00
4	Cakupan Pembinaan (%)	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kontribusi pertanian khususnya tanaman pangan maka program pendampingan kelompok yang fokus pada perbaikan kualitas produksi, menguatkan kelembagaan kelompok dan membantu perencanaan bisnis, perbaikan pencatatan, dan organisasi kelompok tani. Berikut disajikan kemampuan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok tani di Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.148
Kelas kelompok Tani di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Kelas Kelompok					Jumlah Anggota
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Dikukuhkan	
1	Kampar Kiri	96	79	3	0	0	14	2.190
2	Kampar Kiri Hulu	92	61	14	0	0	17	1.732
3	Kampar Kiri Hilir	67	60	5	0	0	2	1.453
4	Gunung Sahilan	130	61	3	0	0	39	2.512
5	Kampar Kiri Tengah	119	62	14	0	0	17	2.346
6	XIII Koto Kampar	146	119	24	1	0	2	3.648
7	Kuok	135	95	25	6	0	9	3.849
8	Salo	71	49	15	3	0	4	2.742
9	Tapung	476	464	2	0	0	10	6.605
10	Tapung Hulu	252	242	2	0	0	7	3.742
11	Tapung Hilir	317	294	12	0	0	11	5.825
12	Bangkinang Kota	56	33	6	2	0	14	834
13	Bangkinang	181	107	49	14	1	10	3.930
14	Kampar	130	73	33	7	0	17	2.990
15	Kampa	79	54	24	1	0	0	2.062
16	Rumbio Jaya	116	27	66	11	0	12	2.654
17	Kampar Utara	104	60	29	5	0	9	2.182
18	Tambang	106	58	29	1	0	18	2.559
19	Siak Hulu	117	92	23	1	0	2	1.851
20	Perhentian Raja	93	81	3	0	0	9	1.901
21	Koto Kampar Hulu	73	59	8	0	0	6	2.110
Jumlah		2.956	2.230	389	52	1	229	5.863

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2022

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani mutlak diperlukan agar kelompok tani memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai fasilitas dalam program pembangunan pertanian melalui pemetaan atas keberadaan dan kemampuan kelompok tani yang ada. Pengklasifikasian terhadap kelompok tani diatas diukur berdasarkan pada 1). Kemampuan merencanakan; 2). Kemampuan mengorganisasikan; 3). Kemampuan melaksanakan kegiatan;

4). Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan dan 5). Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoknya.

2.3.2.21 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan

1) Perdagangan Lokal

Salah satu kegiatan ekonomi atau perdagangan yang ada di Kabupaten *Kampar* adalah perdagangan lokal antara daerah atau wilayah atau masuknya barang dari dan keluar dari wilayah di Kabupaten Kampar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, dimana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 2017-2021, jumlah perdagangan atau barang (CPO) yang dijual keluar dari Kabupaten Kampar mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -1,75% per tahun. Sementara jumlah barang berupa beras yang didatangkan dari luar Kabupaten Kampar 2017-2021 tumbuh sebesar 7,22% per tahun, hal ini dapat dilihat Tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149

Perkembangan Volume dan Nilai Perdagangan Lokal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Volume							
	CPO Keluar	Ton	985.612,64	840.407,52	926.496,33	787.846,46	885.960,52	-1,75
	Beras Masuk	Ton	53.049,99	57.010,16	47.876,12	59.262,51	67.365,69	7,22
2	Nilai							
	CPO Keluar	Rp. Milyar	8.739,33	6.748,50	6.359,48	7.096,37	17.567,14	32,65
	Beras Masuk	Rp. Milyar	480,10	545,97	466,41	590,43	651,63	9,03

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Ketiadaan industri hilirisasi terhadap CPO di Kabupaten Kampar maka seluruh produksi CPO diperdagangkan ke luar wilayah terutama untuk kegunaan bahan baku industri hilir yang terdapat di Kota Dumai dan ekspor melalui pelabuhan Dumai. Jumlah produksi CPO yang diperdagangkan tersebut nilainya mengalami peningkatan dari 8,739 triliun tahun 2017 meningkat menjadi 17,567 triliun tahun 2021 dengan pertumbuhan nilai perdagangan sebesar 32,65% per tahun.

Disisi lain perdagangan kebutuhan pokok terutama beras yang didatangkan untuk memenuhi deficit konsumsi beras di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,03% per tahun dengan nilai Rp. 480,10 tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 651,63 milyar tahun 2021. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di wilayah ini. Hal ini harus menjadi prioritas dalam rangka memenuhi ketersediaan beras melalui produksi bukan hanya melalui distribusi atau perdagangan antar wilayah se Riau atau luar provinsi Riau.

2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sangat penting dalam rangka peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.150

Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Pedagang	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yangmendapatkan bantuan binaan	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67

2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Pada tahun 2017 sebanyak 3 kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan kemudian meningkat menjadi 12 kelompok pedagang/usaha informal yangmendapatkan bantuan binaan tahun 2021 dengan pertumbuhan 41,67% per tahun.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perindustrian

Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Cakupan bina kelompok pengrajin adalah persentase kelompok pengrajin yang dibina pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh kelompok pengrajin yang ada. Pada tahun 2017 sebanyak 3 kelompok kemudian meningkat menjadi 12 kelompok tahun 2021 dengan pertumbuhan 41,67% per tahun. Kelompok pengrajin merupakan salah lembaga ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan dalam meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah. Jumlah kelompok pengrajin tahun 2017 sebanyak 230 kelompok dan kemudian bertambah menjadi 313 kelompok pengrajin dengan pertumbuhan 8,28% per tahun.

Tabel 2.151

Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kelompok Industri	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan pembinaan Pemda	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67
2	Jumlah Kelompok Pengrajin	Kelompok	230	245	250	300	313	8,28
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.3.2.2.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Transmigrasi

Transmigrasi diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama dibidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kampar mencadangkan lokasi transmigrasi lokal Diharapkan dengan pengembangan transmigrasi diwilayah tersebut akan terjadi peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Kabupaten Kampar kedepan.

2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Bidang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam hal ini Kabupaten Kampar dalam jangka 2023-2026.

Dokumen perencanaan Kabupaten Kampar terdiri dari rencana jangka panjang daerah (RPJPD) Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam rencana setrategis

perangkat daerah (RENSTRA-PD). RPJMD akan dijabarkan dalam rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).
- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017–2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA)
- Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA sejak tahun 2019-2039
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD selama tahun 2017-2022.
- Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD selama tahun 2017-2022
- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama tahun 2019-2039

Tabel 2.152

Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.3.3.2 Bidang Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kampar setiap tahun menetapkan perda APBD Kabupaten Kampar dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan pada Tabel 2.153 tersebut dapat dilihat kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 terjadinya peningkatan kinerja secara keseluruhan. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SILPA mengalami penurunan sebesar 62,03% per tahun. Artinya terjadinya efektifitas pengelolaan anggaran baik dari aspek belanja maupun pendapatan. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung terjadi peningkatan sebesar 2,88% per tahun. Hal ini akan mempengaruhi proporsi besaran anggaran terhadap belanja wajib terutama terutama pembangunan infrastruktur daerah.

Demikian halnya dengan Perbandingan belanja langsung terhadap APBD yang naik sebesar 2,04% per tahun sementara Perbandingan belanja tidak langsung terhadap APBD hanya sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,22% per tahun dari tahun 2017-2020. Tahun 2021 sudah

menggunakan nomenklatur pengelolaan keuangan daerah dengan pola belanja operasi dan belanja modal.

Penetapan APBD dilaksanakan secara fluktuatif, maka kedepan diperlukan ketepatan waktu sebagaimana regulasi yang berlaku yaitu 30 November tahun sebelum berjalan, namun jika dilihat 2017 disahkan pada tanggal 31 Januari.

Tabel 2.153
Perkembangan Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0,00
2	Jumlah SILPA	Rp. Juta	62.666.603.463	50.358.346.403	209.375.181.473	230.932.112.320	96.243.047.178	62,03
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,59	3,25	7,20	8,61	3,64	27,22
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	82,10	63,57	89,35	83,59	Na	2,88
5	Perbandingan belanja langsung terhadap APBD	%	43,17	38,86	47,63	45,53	Na	2,04
6	Perbandingan belanja tidak langsung terhadap APBD	%	54,91	61,14	52,81	54,47	Na	0,22
7	Penetapan APBD	Waktu	31 Januari 2027	28 Desember 2017	28 Desember 2018	27 Desember 2019	31 Desember 2020	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.3.3.3 Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

Bidang Pendidikan dan pelatihan serta Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan dalam penyusunan, penyiapan, pelaksanaan, pengkoordinasian, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai meliputi Diklat Struktural, Fungsional, dan Pengembangan Karier Pegawai seluruh pegawai Kabupaten Kampar.

Tabel 2.154
Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	67,45	46,55	35,68	31,68	31,83	-16,27
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,49	33,69	85,95	31,78	6,72	131,73
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,36	0,05	0,72	0,02	0,10	89,17
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35,00	35,00	35,00	36,00	38,00	2,10
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	PD	176,00	176,00	193,00	644,00	667,00	61,73
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	5.894	5.968	6.091	5.547	5.412	-2,01

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar telah merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kampar 2017-2021. Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, jelasnya lihat Tabel 2.154 diatas.

2.3.3.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang binwas pemerintahan daerah, Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sejak tahun 2017-2021. Penunjang Urusan Bidang penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pembangunan kerja sama antar daerah yang di implemntasikan melalui beberapa kegiatan antara lain. Perkembangan kinerja indicator penelitian dan pengembangan selama tahun 2017-2021, kinerja masing masing indicator jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.155

Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	0	0	0	0	0	0
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	0	0	0	0	0
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0	5	10	60	300,00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0	5	10	60	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.3.3.5 Bidang Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan antar pemerintah dan aparatur pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah serta pengawasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tindak lanjut dari fungsi pengawasan terdiri dari jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tindak lanjut dalam proses dan belum ditindak lanjuti. Persentase tindak lanjut temuan turun sebesar -3,02% per tahun, sementara temuan BPK mengalami peningkatan sekitar 13,47% atau naik dari 2020 sebanyak 8 kasus menjadi 20 kasus pada tahun 2021, walaupun dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan. Selain dari itu fungsi pengawasan juga menjalankan beberapa rencana aksi KPK dalam rangka pencegahan tindak korupsi. Perkembangan kinerja indicator pengawasan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.156

Perkembangan Indikator Pengawasan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	65,01	64,31	71,52	50,74	54,22	-3,02
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	Na	Na	Na	Na	Na	0,00

3	Jumlah temuan BPK	Unit	32	23	22	8	20	13,47
---	-------------------	------	----	----	----	---	----	-------

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.3.3.6 Sekretariat Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban kepala daerah yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahunnya berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 serta dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2018. Dari evaluasi tersebut yang dilakukan secara terukur mendapatkan perolehan Gambaran kinerja dari pemerintah daerah sampai dengan saat ini hasil evaluasi pemerintah Kabupaten Kampar terhadap kinerja pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan telah memperoleh nilai B dan level 3 sesuai penilaian SPIP.

2.3.3.7 Sekretariat DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu DPRD juga memiliki tugas dan wewenang dalam Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Tabel 2.157

Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	RKPD & Perubahan RKPD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Renstra PD & Renstra Revisi PD Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	2 Dokumen	DPA & DPPA PD Setwan				

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Dalam menjalankan fungsi penunjang Sekretariat DPRD melakukan kegiatan memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota DPRD, menyusun program-program kerja DPRD serta menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD seperti penyusunan jadwal kegiatan DPRD serta alat perangkat DPRD.

Jumlah Anggota DPRD yang menjalankan fungsi tersebut sebagaimana disajikan data jumlah anggota DPRD Kabupaten Kampar menurut fraksi dan jumlah orang masing-masing fraksi pada Tabel 2.158 berikut.

Tabel 2.158
Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fraksi Partai Golkar	Orang	9	9	6	6	6	Berkurang
2	Fraksi PPP	Orang	0	0	6	6	6	Tetap
3	Fraksi Partai Gerindra	Orang	5	5	6	6	6	Bertambah
4	Fraksi PAN	Orang	5	5	5	5	5	Tetap
5	Fraksi Partai Demokrat	Orang	7	7	6	6	6	Berkurang
6	Fraksi PKB	Orang	5	5	0	0	0	Berkurang
7	Fraksi Nasdem	Orang	0	0	5	5	5	Tetap
8	Fraksi Hanura-Perjuangan	Orang	5	5	0	0	0	Berkurang
9	Fraksi PBB-PKPI	Orang	4	4	6	6	6	Bertambah

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani dibandingkan dengan daerah sekitar.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Selama periode 2017-2021, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga berlaku terus mengalami peningkatan dari Rp.43,79 Juta/Kapita/tahun 2017 meningkat menjadi Rp 50,27 juta/kapita/tahun pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 6,46 juta/kapita/selama lima tahun dengan rata pertumbuhan sebesar 3,69% per tahun. Berikut Tabel 2.159 disajikan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.159

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Konsumsi RT Kabupaten Kampar	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	32.496,78	34.370,41	36.361,63	36.729,47	41.052,05	6,08
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	20.624,32	21.368,45	22.072,86	21.648,80	23.654,66	3,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	35,02	36,29	37,86	37,06	39,32	2,98
Rata-rata Konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)						
a. ADHB	162,65	168,10	173,91	174,63	201,10	5,59
b. ADHK 2010	103,23	104,51	105,57	102,93	115,87	3,08
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Juta Rp)						
a. ADHB	43,79	45,89	48,18	45,33	50,27	3,69
b. ADHK 2010	27,79	28,53	29,25	26,72	28,97	1,23
Pertumbuhan						
a. Total Konsumsi RT	5,04	5,77	5,79	1,01	11,77	6,08
b. Per-RT	4,34	3,35	3,45	0,41	15,16	5,59
c. Perkapita	2,65	2,52	-8,66	8,43	1,23	5,84
Jumlah RT (<i>unit</i>)	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46

Sumber: BPS, PDRB Pengeluaran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dan Olahan)

Demikian halnya dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga konstan di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Selama periode 2017-2021, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga konstan terus mengalami peningkatan dari Rp.27,79 Juta/Kapita/tahun 2017 meningkat menjadi Rp 28,97 juta/kapita/tahun pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 1,17 juta/kapita/selama lima tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 1,23% per tahun.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani

NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Tabel 2.160
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	134,77	123,6	133,68	134,51	148,38	2,70
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	128,35	133,05	136,85	105,65	147,66	5,87
3.	NTP	105,00	92,90	97,68	127,32	100,49	0,72

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar (Riau Dalam Angka Tahun 2017-2021) dan BRS, dan olahan 2022

Berdasarkan Tabel 2.160 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan nilai NTP dari tahun 2017 sebesar 105,00 menjadi sebesar 100,49 pada tahun 2021, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani hal ini akan berakibat pada penurunan produktivitas sektor pertanian. Oleh karena perlu dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani agar biaya logistik mengalami penurunan sehingga terjadi peningkatan penerimaan petani dan sekaligus dapat meningkatkan daya beli petani. Berikut Tabel 2.160 disajikan perkembangan NTP per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk belanja konsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk belanja konsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan). Berdasarkan Tabel 2.161 dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2021, rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT/kapita harga berlaku sebesar 3,19% per tahun atau naik dari Rp. 23,91 juta/kapita tahun 2017 menjadi 26,64 juta/kapita tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 2,72 juta/kapita atau hanya bertambah senilai Rp. 0,54 juta/Kapita/Tahun.

Tabel 2.161
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Harga Beraku (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	17.744.194,00	18.701.650,00	19.831.675,00	18.801.416,00	21.751.093,84	5,48
2	Jumlah RT	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
4	Rasio (Juta Rp/RT)	88,81	91,47	94,85	89,39	106,55	5,03
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	23,91	24,97	26,28	23,20	26,64	3,19
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	54,60	54,41	54,54	51,19	52,98	-0,69
B	Harga Konstan (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	11.442.508	11.811.143	12.165.327	11.383.543	12.776.163	3,01
2	Jumlah RT	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
4	Rasio (Juta Rp/RT)	57,27	57,77	58,18	54,12	62,58	2,56
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	15,42	15,77	16,12	14,05	15,65	0,75
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	55,48	55,27	55,11	52,58	54,01	-0,63

Sumber: BPS, PDRB Pengeluaran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dan Olahan)

Selama periode yang sama rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT harga konstan sebesar 2,56% per tahun atau naik dari Rp. 15,42 juta/kapita tahun 2017 menjadi 15,65 juta/kapita tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 0,23 juta/kapita atau hanya bertambah senilai Rp.0,05 juta/Kapita.

Dalam periode yang sama terjadi kecenderungan penurunan rasio konsumsi non pangan terhadap total konsumsi RT baik pada PDRB harga berlaku maupun PDRB harga konstan. Rasio konsumsi RT pada harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 54,60% kemudian turun menjadi 52,98% atau berkurang sebesar 1,62% dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,63% per tahun selama tahun 2017-2021. Demikian halnya rasio konsumsi non pangan pada harga konstan mengalami penurunan sebesar -1,47% per tahun dari 55,48% pada tahun 2017 menjadi 54,01% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara sebaliknya yaitu terjadinya peningkatan konsumsi pangan RT dari 44,52% pada tahun 2017 meningkat menjadi 45,99% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,86% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kecepatan peningkatan pendapatan RT belum selaras kecepatan peningkatan peningkatan harga barang dan jasa pada sektor pangan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten sepanjang 2.073,10 km. Berikut Tabel 2.162 disajikan mengenai panjang jalan terhadap jumlah kendaraan per kilometer di Kabupaten Kampar selama tahun 2017 -2021.

Tabel 2.162
Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kondisi Jalan							
Baik	Km	1.101,29	1.159,27	1.170,60	1.199,55	1.215,55	2,51
Rusak Ringan	Km	822,86	778,29	810,21	796,46	780,05	-1,27
Rusak Berat	Km	148,95	135,55	92,30	77,10	77,50	-14,21
Jumlah	Km	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	0,00
Proporsi jalan kondisi Baik	%	53,12	55,92	56,47	57,86	58,63	2,51
Jenis Kendaraan							
Mobil Penumpang	Unit	23.993	26.708	29.040	31.627	34.151	9,23
Bus	Unit	59	64	75	82	90	11,19
Truk	Unit	16.320	17.732	19.461	20.979	22.549	8,42
Sepeda Motor	Unit	233.096	259.197	283.834	309.447	334.816	9,48
Jumlah	Unit	273.468	303.701	332.410	362.135	391.606	9,40
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/km	131,91	146,5	160,34	174,68	188,90	9,40

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Berdasarkan pada Tabel 2.162 menunjukkan bahwa rasio Panjang jalan per kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 9,40% atau jumlah kendaraan per km jalan bertambah dari 131,91 kendaraan pada tahun 2017 bertambah menjadi 188,90 kendaraan per km tahun 2021 atau bertambah sebanyak 57,00 kendaraan per km

selama periode 2017-2021. Pertambahan jumlah kendaraan terutama disumbang oleh kendaraan mobil penumpang dengan pertumbuhan sebesar 9,23% per tahun, bus dengan pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun, truk dengan pertumbuhan sebesar 8,42% per tahun, sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 9,48% per tahun dan total dengan pertumbuhan sebesar 9,40% per tahun.

2.4.2.2 Ketaatan Terhadap RTRW

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang RTRW belum disahkan, progres terakhir Ranperda RTRW sudah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan DPRD Kabupaten Kampar, dan saat ini masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga, indikator ketaatan terhadap RTRW belum bisa diukur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karakteristik wilayah, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kampar meliputi:

1. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
2. Pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui skenario Kampar Kabupaten hijau;
3. Penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan; dan
4. Pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat menghasilkan nilai tambah.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan, Rencana sistem perkotaan Kabupaten Kampar dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), untuk menunjang aksesibilitas regional.

2.4.2.3 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari padi, palawija, jagung, kedelai, ubi jalar, sayur-sayuran, cabe, terung, ketimun, kangkong, bayam, dan buah-buahan. Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa, Kakao, Pinang dan Kopi. Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Kampar sebesar 91,71% tahun selama tahun 2017-2021. Berikut disajikan data luas wilayah produktif Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.163
Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	838.247	838.247	838.247	838.247	838.247	0,00
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	914.063	914.063	914.063	914.063	914.063	0,00
3	Rasio	%	91,71	91,71	91,71	91,71	91,71	0,00

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.4.2.4 Luas Wilayah Industri

Guna lahan industri di Kabupaten Kampar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kawasan industri kecil dan kawasan industri besar, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil.

Peruntukan luas wilayah industri di Kabupaten Kampar seluas 5.850 hektar yang terletak di Kecamatan Tambang, Tapung, dan Siak Hulu dan khusus untuk industri agro di kota Petapahan. Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi karet, kelapa sawit, dan kayu dan perikanan. Industri skala menengah ke atas perlu dikembangkan dalam sistem kemitraan dengan skala menengah dan kecil atau rumah tangga. Berdasarkan data tersebut menunjukkan rasio luas wilayah industri di Kabupaten Kampar terhadap Kawasan budidaya sebesar 1,67%. Berikut disajikan data perkembangan luas wilayah industri Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 164

Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0,00
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	914.063	914.063	914.063	914.063	914.063	0,00
3	Rasio	%	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.4.2.5 Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Rumah makan atau restoran merupakan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kabupaten Kampar juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan.

Berdasarkan pada Tabel 2.165 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe sebesar 9,19% per tahun atau naik dari 96 unit pada tahun 2017 bertambah menjadi 133 unit pada tahun 2021. Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sector ekonomi lainnya selama periode 2017-2021. Berikut perkembangan data jumlah jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.165

Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Restoran/Rumah Makan/warung/ Kafe	Unit	96	118	133	133	133	9,19

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

2.4.2.6 Hotel dan Penginapan

Ketersediaan akomodasi hotel di suatu wilayah dengan jumlah dan kualitas yang baik menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah bersangkutan. Jumlah hotel, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur. Hotel memiliki peran sebagai faktor yang mendukung jalannya usaha diberbagai sektor karena memiliki peran dalam membantu meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya serta sebagai penguat daya saing daerah karena hotel mampu berperan sebagai atraksi wisata sekaligus sebagai perantara yang dapat menciptakan citra suatu destinasi serta reputasi manajemen kekayaan daerah. Berikut data jumlah akomodasi hotel, kamar dan tempat tidur Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.166

Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
4.	Hotel Bintang	Unit	3	3	3	3	3	0,00
5.	Jumlah Kamar	Unit	277	277	277	277	277	0,00
6.	Jumlah Tempat Tidur	Unit	406	406	406	406	406	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan data Tabel 2.166 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kampar Akomodasi hotel masih kategori non Bintang. Perkembangan hotel non bintang dengan pertumbuhan sebesar 3,82% per tahun, kamar tumbuh sebesar 4,09% per tahun dan tempat tidur tumbuh sebesar -1,74. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kapasitas kamar atau penambahan ukuran kamar tanpa penambahan tempat tidur.

2.4.2.7 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Air Minum Layak

Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. Sistem penyediaan air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dll).

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan produksi air minum untuk melayani kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus terus dilakukan.

Tabel 2.167

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	5,08
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Layak	RT	130.964	141.344	185.023	191.173	219.127	14,19
3	Akses Air Minum	%	65,55	69,13	88,49	90,07	90,41	8,91
4	Jumlah Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rumah Rangka Berakses SPAM/Sumur Bor	%	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	4,70

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyediaan air minum layak di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah RT yang dapat mengakses air minum yang bersumber dari leding dan sumur pompa/bor sebesar 14,49% lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah RT yang hanya sebesar 5,08%. Kondisi tersebut telah meningkatkan rasio akses air minum RT mencapai 90,41% pada tahun 2021 dari 65,55% pada tahun 2017 atau naik 24,86% selama 2017-2021.

2.4.2.8 Rasio Elektrifikasi

Selama periode tahun 2017-2021, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Kabupaten Kampar terus meningkat dari rasio elektrifikasi 98,26% tahun 2017 meningkat menjadi 107,95% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,62% per tahun. Peningkatan rasio elektrifikasi diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akibat adanya penerangan untuk belajar, selain itu juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat karena ketersediaan energi listrik yang dapat digunakan untuk usaha produktif. Adanya korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Berikut data Rasio elektrifikasi Kabupaten Kampar sepanjang tahun 2017-2021

Tabel 2.168
Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	Unit	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	5,99
2	Rumah Tangga Berlistrik	Unit	196.324	211.835	234.913	248.457	261.643	7,32
3	Rasio Elektrifikasi	%	98,26	103,61	112,35	117,06	107,95	1,62

Sumber: PLN Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022

Akses kelompok masyarakat terhadap listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi dengan pompa air. Listrik juga akan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat pengolah makanan. Selain itu juga ketersediaan energi listrik juga akan mendorong peningkatan investasi pada di wilayah Kabupaten Kampar.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi dipengaruhi oleh adanya rasa aman dan kondisi yang kondusif perpolitikan suatu daerah, Investor perlu diberikan rasa aman dalam menanamkan modal, rasa aman dapat ditunjukkan dari angka kriminalitas serta kondisi yang kondusif perpolitikan dapat dilihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi. Salah satu indikator yang menggambarkan iklim berinvestasi yang baik pada suatu wilayah adalah rendahnya angka kriminalitas.

Secara keseluruhan dari 11 jenis kriminalitas, namun yang terdapat jenis kriminalitas di Kabupaten Kampar hanya 5 jenis dan secara relatif berfluktuatif dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,34% per tahun sehingga suasana relatif aman dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Meskipun rendah, trend kecenderungan angka kriminalitas semakin meningkat dengan tingkat peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2021.

Selama tahun 2017-2021 angka kriminalitas yang cenderung mengalami peningkatan hanya kasus pencurian dan penganiayaan yang tumbuh masing-masing sebesar 0,60% dan 0,97% per tahun, sedangkan tindak kriminal yang lainnya cenderung mengalami penurunan seperti penipuan dan relatif sedikit.

Tabel 2.169
Angka Kriminalitas Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kasus	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pencurian	Kasus	180	194	95	139	220	0,60
2	Curanmor	Kasus	-	-	-	-	-	-
3	Penganiayaan	Kasus	67	140	118	90	101	0,97
4	Pembunuhan	Kasus	2	2	4	2	1	45,45
5	Pemerasan	Kasus	4	2	1	2	2	45,45
6	Pemeriksaan	Kasus	-	-	-	-	-	-
7	Pengrusakan	Kasus	-	-	-	-	-	-

No	Kasus	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
8	Perjudian	Kasus	-	-	-	-	-	-
9	Penipuan	Kasus	35	35	17	15	16	4,24
10	Narkotika	Kasus	-	-	-	-	-	-
11	Penebangan Liar	Kasus	-	-	-	-	-	-
Jumlah		Kasus	288	373	235	248	340	0,34

Sumber: Polres Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Sedangkan jumlah unjuk rasa yang terdapat di Kabupaten Kampar yang selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 4 kejadian tahun 2017 bertambah menjadi 20 kejadian tahun 2021. Demonstrasi terbanyak terkait dengan kasus lahan 3 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 14 kasus tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 250,00% per tahun. Selama periode 2017-2021 jumlah kasus terbanyak pada tahun 2021 yaitu 20 kasus. Perkembangan jumlah demonstrasi menurut masalah yang dimunculkan Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.170 berikut.

Tabel 2.170
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Masalah	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lahan	Kali	3,00	1,00	0,00	4,00	14,00	250,00
2	Agama	kali	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	300,00
3	Politik	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4	Sumber Daya Alam	Kali	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ketenagakerjaan	Kali	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
6	Lainnya	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Demonstrasi	Kali	4,00	3,00	0,00	7,00	20,00	185,71

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kedepan perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas untuk mengurangi jumlah kasus tersebut menunjukkan semakin bertambah untuk menjaga keamanan. Para investor jika ingin berinvestasi di suatu daerah tidak akan hanya melihat pada satu faktor saja sebab ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih daerah tersebut seperti kemudahan dalam berusaha, infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik tetapi termasuk kondisi keamanan.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1 Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan

terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja, keahlian/keterampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di wilayah ini.

Pertumbuhan tertinggi terhadap rasio lulusan S1, S2 dan S3 adalah lulusan S2 dengan pertumbuhan 20,03% per tahun selama tahun 2017-2021. Rasio lulusan S3 yang tinggi dan terlatih akan dapat melakukan riset secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan dan menjawab fenomena yang dihadapi oleh kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar kedepan. Riset adalah sebuah aktivitas yang mengeksplorasi intelektualitas manusia untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Riset dilakukan menurut prinsip dan kaidah ilmiah universal seperti berpikir secara runtut dan argumentatif, menjunjung tinggi obyektivitas dan kejujuran ilmiah, serta rendah hati dalam mengakui karya-karya orang lain yang berpengaruh atau terkait dengan risetnya. Kompetensi inilah yang dituntut dari seorang doktor, di manapun ia bekerja. Singkat kata, seorang doktor mungkin tidak bisa mempertahankan posisi leading edgenya dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena berbagai sebab, tetapi ia tetap dituntut untuk bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas, obyektif, dan orisinil dalam profesinya sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah. Berdasarkan data Pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan rasio lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas dari 3,70% tahun 2017 menjadi 4,93% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,56% per tahun. Jelasnya lihat pada Tabel 2.171 berikut.

Tabel 2.171

Perkembangan Realisasi Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kasus	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk 15 Th Keatas	Jiwa	538.506	549.274	546.348	605.912	584.841	2,20
2	Tidak/Belum tamat SD/ Sederajat	%	273.849	278.678	283.426	288.255	331.410	5,04
3	Tamat SD/ Sederajat	%	165.015	160.931	156.738	152.654	155.435	-1,47
4	SLTP/ Sederajat	%	128.527	127.244	125.948	124.665	126.710	-0,35
5	SLTA/ Sederajat	%	142.243	146.387	150.420	154.564	155.485	2,25
6	Akademi/ Diploma I/ SARMUD	%	5.937	5.815	5.690	5.568	14.026	36,39
7	Jumlah S1, S2 dan S3	Jiwa	19.921	22.315	24.496	26.892	28.849	9,71
	Jumlah S1	Jiwa	19.021	21.257	23.297	25.533	27.448	9,61
	Jumlah S2	Jiwa	844	999	1.135	1.290	1.329	12,15
	Jumlah S3	Jiwa	37	59	64	69	72	20,03
8	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3	%	3,70	4,06	4,48	4,95	4,93	7,56

Sumber: Dinas Pependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.4.2 Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan tinggi yaitu jika lebih dari 41%, rasio ketergantungan sedang jika berkisar antara 30 – 40%, dan Rasio ketergantungan rendah bila kurang dari 30%. Rasio ketergantungan penduduk menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif (0-14 Tahun dan >65 Tahun).

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori tinggi karena selama periode tahun tersebut melebihi 41%. Hal tersebut dapat dilihat 42,50% pada tahun 2017 meningkat menjadi 46,42% pada tahun 2021. Artinya pada tahun 2017 rasio ketergantungan sebesar 42,50% hal ini menunjukkan bahwa di antara 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 42,50 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) yang mengantungkan hidupnya dengan usia produktif. Rasio ini pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 44,27% artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 44,27 orang penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Tabel

2.172 menunjukkan struktur usia belum produktif, produktif, dan tidak produktif serta rasio ketergantungan di Kabupaten Kampar selama 2017-2021.

Tabel 2.172
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	0-4	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97
2	5-9	78.464	74.128	76.575	82.958	83.600	1,72
3	10-14	77.923	72.984	76.501	83.715	84.362	2,17
4	15-19	69.209	71.600	57.527	60.887	61.358	-2,40
5	20-24	68.150	69.047	66.317	71.623	72.177	1,53
6	25-29	66.973	63.768	64.993	69.863	70.403	1,35
7	30-34	67.553	64.714	65.187	65.979	66.489	-0,37
8	35-39	66.042	64.755	66.308	69.196	69.731	1,39
9	40-44	55.799	55.556	58.601	62.136	62.617	2,96
10	45-49	49.196	49.366	50.615	54.132	54.551	2,65
11	50-54	35.656	38.777	41.175	43.820	44.159	5,53
12	55-59	26.803	28.578	30.412	33.006	33.261	5,59
13	60-64	15.357	18.997	20.203	22.747	22.923	10,85
14	65-69	8.658	10.880	12.157	13.317	13.420	11,93
15	70-74	4.449	5.800	5.962	6.511	6.561	10,78
16	75+	4.661	7.436	6.891	7.136	7.191	14,13
17	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
18	Jumlah Penduduk <15 tahun (Belum Produktif)	203.543	199.682	208.281	229.947	231.725	3,40
19	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (Umur Produktif)	520.738	525.158	521.338	553.389	584.841	2,99
20	Jumlah Penduduk 65 Tahun Ke atas (Umur Tidak Produktif)	17.768	24.116	25.010	26.963	27.172	12,00
21	Rasio Ketergantungan (%)	42,50	42,62	44,75	46,42	44,27	1,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2022

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Banyak usia produktif tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori Urusan Pemerintahan Wajib/Urusan Pemerintahan Pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan 2022 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori Urusan Pemerintahan Wajib/pilihan pemerintahan daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan; dan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

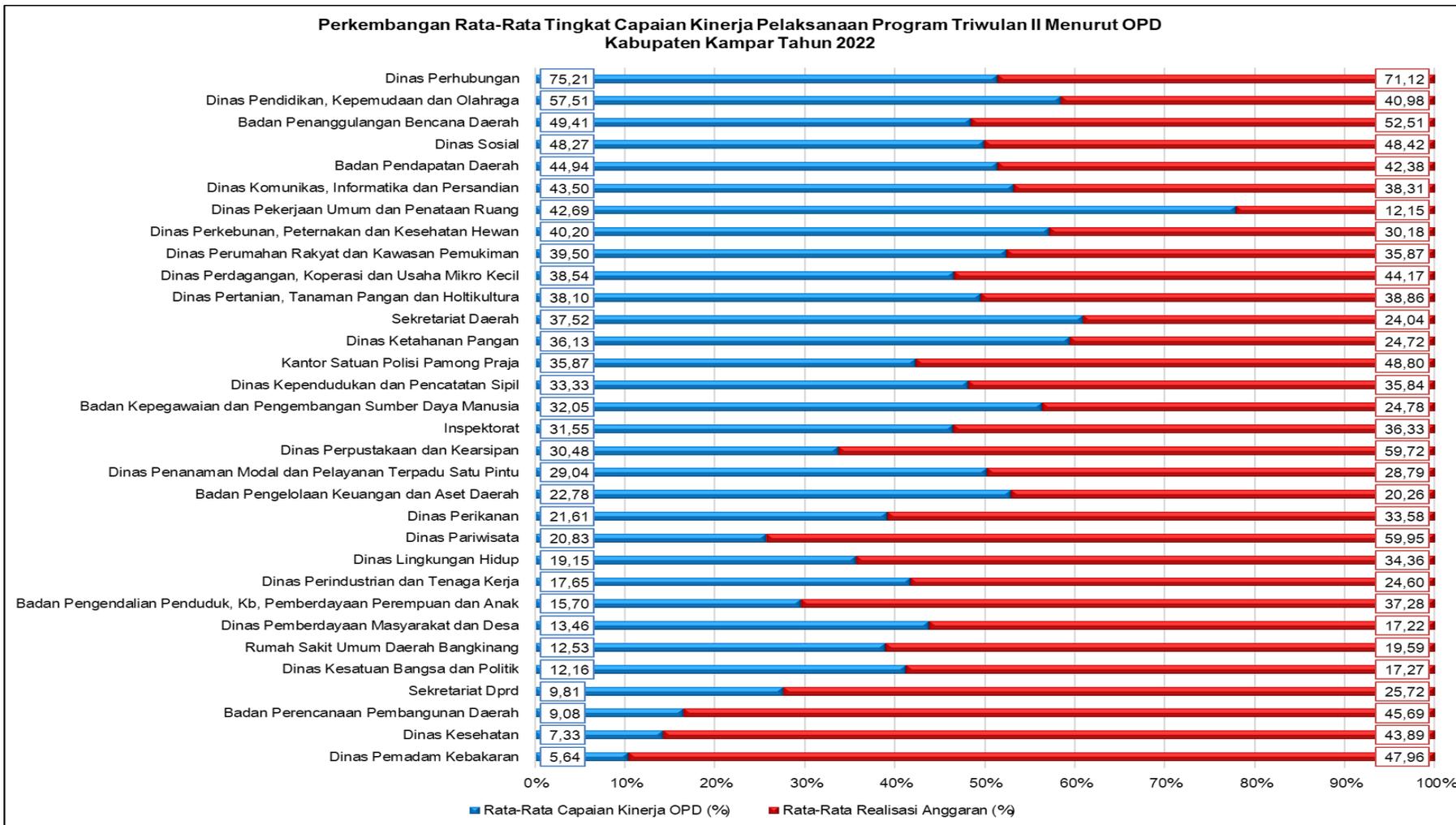
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan setiap tahun dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target dari program dan kegiatan akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan II menurut perangkat daerah dari perencanaan pembangunan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.35 dan Lampiran I Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 ini.

Berdasarkan Tabel 2.173 dan Gambar 2.35 menunjukkan bahwa hingga triwulan II tahun 2022 Perangkat Daerah urutan I adalah Dinas Perhubungan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 75,21% dengan predikat kinerja tinggi dan realisasi anggaran dengan capaian realisasi keuangan sebesar 71,12% dengan predikat kinerja sedang. Sementara itu perangkat daerah dengan tingkat capaian kinerja terendah adalah Dinas Pemadaman Kebakaran dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 5,64% dengan predikat sangat rendah dan realisasi anggaran capaian realisasi keuangan sebesar 47,96% dengan predikat kinerja sangat rendah.

Sedangkan Kecamatan dengan urutan I adalah Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 80,06% dengan predikat kinerja tinggi dan realisasi anggaran dengan capaian realisasi keuangan sebesar 53,46% dengan predikat kinerja rendah. Kecamatan dengan tingkat capaian kinerja terendah adalah Kecamatan Tapung Hilir tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 23,75% dengan predikat sangat rendah dan realisasi anggaran capaian realisasi keuangan sebesar 52,77% dengan predikat kinerja rendah, jelasnya lihat Tabel 2.174 dan Gambar 2.36.

Tabel 2.173
Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022

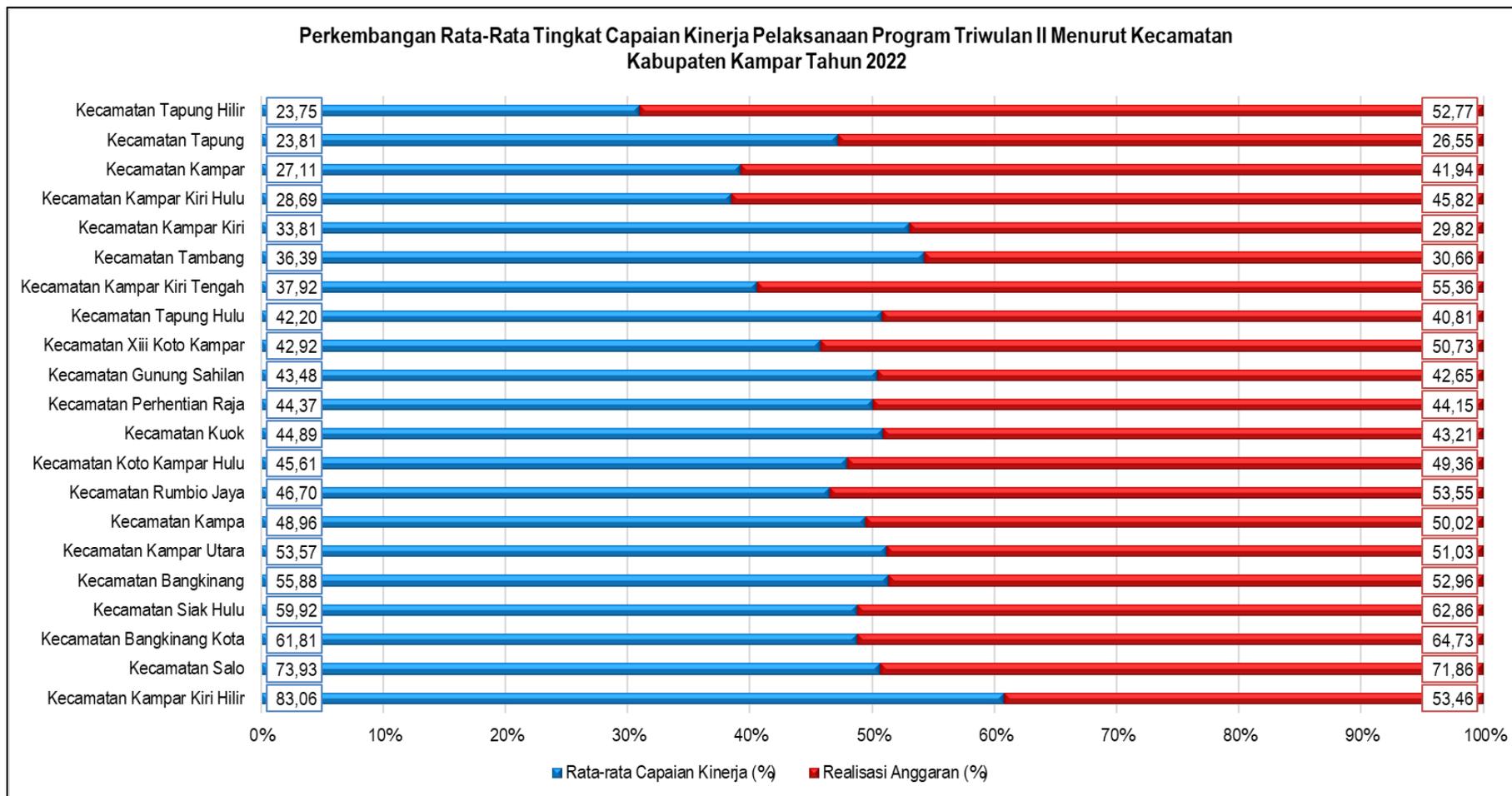
No	Perangka Daerah	APBD Murni	Realisasi Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Rata-rata Capaian Kinerja	Peringkat Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Peringkat Kinerja
1	DINAS PERHUBUNGAN	36.560.896.177	37.050.995.273	75,21	T	71,12	S
2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	889.753.474.359	301.660.123.639	57,51	SR	40,98	SR
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.188.378.486	5.863.034.342	49,41	SR	52,51	SR
4	DINAS SOSIAL	12.998.003.843	6.407.657.422	48,27	SR	48,42	SR
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.815.397.226	7.712.001.871	44,94	SR	42,38	SR
6	DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	11.134.332.565	6.232.568.658	43,50	SR	38,31	SR
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.543.242.846	13.988.037.237	42,69	SR	12,15	SR
8	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.413.725.528	9.475.422.349	40,20	SR	30,18	SR
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	40.242.457.162	11.067.668.033	39,50	SR	35,87	SR
10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	13.480.760.232	4.917.901.176	38,54	SR	44,17	SR
11	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	27.561.473.924	13.801.120.513	38,10	SR	38,86	SR
12	SEKRETARIAT DAERAH	99.632.364.619	27.451.397.602	37,52	SR	24,04	SR
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.062.078.725	1.905.162.209	36,13	SR	24,72	SR
14	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.610.537.843	7.144.691.868	35,87	SR	48,80	SR
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.755.133.885	5.378.051.134	33,33	SR	35,84	SR
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.844.763.584	3.849.227.668	32,05	SR	24,78	SR
17	INSPEKTORAT	15.921.361.447	7.804.183.521	31,55	SR	36,33	SR
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.262.756.681	3.094.527.858	30,48	SR	59,72	SR
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.677.892.203	5.940.458.940	29,04	SR	28,79	SR
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	400.886.122.302	38.087.216.478	22,78	SR	20,26	SR
21	DINAS PERIKANAN	17.284.957.329	6.118.383.697	21,61	SR	33,58	SR
22	DINAS PARIWISATA	8.629.583.657	5.084.750.082	20,83	SR	59,95	SR
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.485.413.882	12.321.718.260	19,15	SR	34,36	SR
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	12.487.870.522	5.374.253.880	17,65	SR	24,60	SR
25	BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	23.602.544.859	6.096.932.235	15,70	SR	37,28	SR
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.071.789.077	3.671.951.321	13,46	SR	17,22	SR
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	135.337.080.993	35.848.170.512	12,53	SR	19,59	SR
28	DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.623.840.927	1.538.649.984	12,16	SR	17,27	SR
29	SEKRETARIAT DPRD	89.091.649.543	36.873.383.672	9,81	SR	25,72	SR
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.530.256.604	9.198.060.284	9,08	SR	45,69	SR
31	DINAS KESEHATAN	236.982.137.848	106.001.720.841	7,33	SR	43,89	SR
32	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.521.408.961	5.792.980.411	5,64	SR	47,96	SR



Gambar 2.35
Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022

Tabel 2.174
Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Menurut Kecamatan
Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Kecamatan	APBD Murni	Realisasi Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Rata-rata Capaian Kinerja	Peringkat Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Peringkat Kinerja
1	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	2.167.197.327	1.196.471.826	83,06	T	53,46	R
2	KECAMATAN SALO	1.478.300.324	722.637.729	73,93	S	71,86	S
3	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	3.682.014.980	1.816.563.654	61,81	R	64,73	R
4	KECAMATAN SIAK HULU	2.634.566.516	1.420.897.364	59,92	R	62,86	R
5	KECAMATAN BANGKINANG	3.419.535.757	1.213.278.037	55,88	R	52,96	R
6	KECAMATAN KAMPAR UTARA	1.085.647.122	498.247.779	53,57	R	51,03	R
7	KECAMATAN KAMPA	1.615.883.796	869.064.654	48,96	SR	50,02	R
8	KECAMATAN RUMBIO JAYA	1.586.532.540	728.374.483	46,70	SR	53,55	S
9	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	1.457.812.434	788.807.540	45,61	SR	49,36	SR
10	KECAMATAN KUOK	1.738.323.105	825.857.770	44,89	SR	43,21	SR
11	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.848.069.694	599.344.000	44,37	SR	44,15	SR
12	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	1.482.997.612	807.682.524	43,48	SR	42,65	SR
13	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	2.600.846.203	1.244.025.369	42,92	SR	50,73	R
14	KECAMATAN TAPUNG HULU	1.623.789.459	758.989.838	42,20	SR	40,81	SR
15	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	2.037.012.110	1.018.154.501	37,92	SR	55,36	R
16	KECAMATAN TAMBANG	2.621.980.742	1.363.949.641	36,39	SR	30,66	SR
17	KECAMATAN KAMPAR KIRI	2.864.438.305	1.430.896.371	33,81	SR	29,82	SR
18	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	2.098.967.968	1.088.299.521	28,69	SR	45,82	SR
19	KECAMATAN KAMPAR	3.149.037.112	1.614.981.840	27,11	SR	41,94	SR
20	KECAMATAN TAPUNG	2.030.494.706	1.304.454.666	23,81	SR	26,55	SR
21	KECAMATAN TAPUNG HILIR	2.013.915.073	1.009.119.908	23,75	SR	52,77	R



Gambar 2.36
Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Faktor-faktor yang mendorong perkembangan tingkat capaian kinerja masing-masing perangkat daerah secara umum antara lain adanya dukungan ASN dalam pelaksanaan program pembangunan dan tersedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian Pegawai perangkat daerah perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan administrasi baik dari segi penyelenggaraan kegiatan, keuangan dan perencanaan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data pada Gambar 2.35, menunjukkan Dinas Perhubungan perbandingan antara capaian kinerja fisik dan capaian keuangan relative seimbang. Hal ini terjadi karena target kinerja fisik dan pengalokasian anggaran secara relative sama juga dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh waktu pekerjaan. Namun demikian masih terbatasnya dan kurangnya aparatur teknis transportasi yang membantu memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi indikator kinerja program (outcome) urusan perhubungan disampaikan pada Tabel 2.173 dan Gambar 2.35 di atas.

Sementara itu terdapat Perangkat Daerah yang capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diparistasi sangat tinggi seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tingginya disvaritas antara tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing sangat dipengaruhi oleh diasumsi yang digunakan dalam penentuan pagu anggaran yang secara relatif kurang mendekati biaya yang semestinya sehingga masih terdapat gap antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh standar harga yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar relative agak berbeda antar PD sebagian agak tinggi sebagian lagi agak rendah dan kebijakan harga satuan yang sangat rigid. Selain itu juga dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang diawal triwulan I dan II masih didominasi penyelesaian administrasi seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana capaian kinerja sudah mencapai 42,69% sementara capaian realisasi anggaran hanya mencapai 12,15%. Namun demikian di triwulan III dan IV capaian kinerja dan realisasi anggaran ini akan mengalami peningkatan secara signifikan karena program dan kegiatan secara fisik akan terealisasi pada akhir tahun karena pekerjaan fisik membutuhkan waktu yang relative lama ketimbang program dan kegiatan yang tingkat capaiannya kurang dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan. Hal ini berlaku juga untuk Perangkat Daerah lainnya di Pemerintah Kabupaten Kampar. Perkembangan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan menurut Perangkat Daerah Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.175

Evaluasi Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II Kabupaten Kampar Tahun 2022

I. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																	
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.																								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13			16 = 15/100																						
1		DINAS PENDIDIKAN																																															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.402.436.342.235		1.281.465.707.178					588.197.850.123		75.362.298.791		173.450.329.942						248.812.628.733																												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dipora	8.971.256.000	100 persen	1.788.972.000	100 persen	619.617.627.656	100 persen	514.896.576		137.220.690		48.756.400							185.977.090																												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan	100 persen	4.485.628.000	100 persen	894.486.000	100 persen	220.880.506	100 persen	232.415.730	8,00	137.220.690	1,00	48.756.400,00	-	-	-	-	-	185.977.090	9,00	80,02	100,00	406.857.596	109,00	45,49																						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	66 Dokumen	2.662.200.000	22 Dokumen	500.000.000	11 Dokumen	87.999.892	11 Dokumen	95.267.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	87.999.892	50,00	17,60																						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dipora	194 Dokumen	450.000.000	210 Dokumen	190.000.000	77 Dokumen	94.999.892	77 Dokumen	187.213.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00	94.999.892	36,67	50,00																						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dipora	24 Dokumen	1.373.428.000	4 Dokumen	204.486.000	- Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				3,00	26,87																												
Predikat kinerja																				SR	SR																												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan dinas dipora	- 0	3.251.546.487.035	1.264.859.426.290	100 persen	612.441.645.669	100 persen	581.339.569.199		74.348.149.168		171.581.745.287							245.929.894.455																												
		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaj dan Tunjangan ASN Dinas Dipora Kab. Kampar	60 Bulan	3.250.927.948.535	24 Bulan	1.263.626.728.290	12 Bulan	612.388.263.906	12 Bulan	581.286.187.503	3,00	74.340.649.446	3,00	171.562.361.225,00	-	-	-	-	-	245.903.010.671	50,00	42,30	16,00	858.291.274.577	75,00	67,92																						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Keuangan diporkota	24 Bulan	250.000.000	24 Bulan	1.102.698.000	12 Bulan	38.382.143	12 Bulan	38.382.165	3,00	-	3,00	19.384.062,00	-	-	-	-	-	19.384.062	50,00	50,50	18,00	57.766.205	75,00	5,24																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Dokumen	59.091.000	2 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	7.499.887	1 Dokumen	7.499.722	1,00	7.499.722	-	-	-	-	-	-	-	7.499.722	100,00	100,00	2,00	14.999.609	100,00	100,00																						
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Bahan tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	100.000.000																																										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Dokumen	59.447.500	2 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	7.499.733	1 Dokumen	7.499.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.499.733	50,00	50,00																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50	48,20																												
Predikat kinerja																				SR	SR																												
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi kepegawaian dinas dipora	100 persen	2.624.833.000	100 persen	860.000.000	100 persen	284.425.968	100 persen	190.165.750		-		102.115.750						102.115.750																												
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Lembaga Sekolah dan Instansi Pemerintahan	60 Bulan	2.624.833.000	24 Bulan	860.000.000	12 Bulan	284.425.968	12 Bulan	190.165.750	3,00	-	3,00	102.115.750,00	-	-	-	-	-	102.115.750	50,00	53,70	18,00	386.641.718	75,00	44,95																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	53,70																												
Predikat kinerja																				SR	SR																												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum dinas dipora	100 persen	10.132.581.500	4.234.155.650	100 persen	1.365.083.077	100 persen	1.398.775.891		-			342.285.450						342.285.450																												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (8 sd 18 Jenis)	60 Bulan	390.458.000	24 Bulan	158.254.950	12 Bulan	58.254.146	12 Bulan	64.976.900	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	15,00	58.254.146	62,50	36,81																					

RUMAH KEMENTERIAN KEPEGAWAIAN

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Mekan dan Mimun Rapat (7 s.d 12 Jenis)	60 Bulan	2.079.451.000	24 Bulan	420.400.000	12 Bulan	180.067.320	12 Bulan	150.123.000	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	15,00	180.067.320	62,50	42,83	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang distrik dan dianggakan (11 s.d 14 Jenis Dokumen)	60 Bulan	1.311.862.000	24 Bulan	270.173.400	12 Bulan	51.584.560	12 Bulan	59.117.470	3,00	-	3,00	21.971.400,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.971.400	50,00	37,17	18,00	73.555.960	75,00	27,23
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORDA	60 Bulan	738.336.000	24 Bulan	50.150.000	12 Bulan	20.149.065	12 Bulan	20.148.950	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	15,00	20.149.065	62,50	40,18
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Instansi/Lembaga Pemerintahan dengan Tujuan koordinasi dan Konsultasi	60 Bulan	3.702.196.500	24 Bulan	1.296.677.500	12 Bulan	144.925.129	12 Bulan	347.642.686	3,00	-	3,00	146.362.850,00	-	-	-	-	-	-	6,00	146.362.850	50,00	42,10	18,00	291.287.979	75,00	22,46
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	30 Dokumen	1.901.278.000	8 Dokumen	2.028.499.800	4 Dokumen	910.102.857	4 Dokumen	756.766.885	2,00	-	-	173.951.200,00	-	-	-	-	-	-	2,00	173.951.200	50,00	22,99	6,00	1.084.054.057	75,00	53,44
Rata-rata capaian kinerja (%)																							37,50	17,04		68,75	37,16				
Predikat kinerja																							SR	SR							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana dinas dikpora		2.200.000.000	24 Bulan	1.600.000.000	100 Persen	450.790.000	100 Persen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	450.790.000	25,00	28,17	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	6 Unit	2.200.000.000	4 Unit	1.600.000.000	1 Unit	450.790.000	1 Unit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00	0,00		25,00	28,17				
Predikat kinerja																							SR	SR							
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang perkantoran dikpora	100 persen	126.165.046.200	100 persen	7.640.393.238	100 Persen	4.602.810.560	100 Persen	4.504.536.978			876.928.933		1.331.752.987	-	-	-	-	-								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, tvkmi dan internet (24 Gedung)	60 Bulan	3.758.158.000	24 Bulan	716.200.000	12 Bulan	310.841.700	12 Bulan	569.032.460	3,00	55.648.688	3,00	183.205.392,00	-	-	-	-	-	-	6,00	238.854.080	50,00	41,98	18,00	549.895.780	75,00	76,75
				Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Perabotan Kacamran/SKG Perkantoran dan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan	60 Bulan	6.676.528.000	24 Bulan	1.051.823.038	12 Bulan	1.057.629.140	12 Bulan	535.264.488	-	-	3,00	390.729.350,00	-	-	-	-	-	-	3,00	390.729.350	25,00	73,00	15,00	1.448.358.490	62,50	137,70
				Jumlah Jenis Perawatan dan Perengkapan Kantor	-	60 Bulan	143.207.000																								
				Jumlah jenis ATK	-	60 Bulan	4.258.678.000																								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Tenaga Adm. Kantor Jasa Kebersihan Kantor dan Veruest	60 Bulan	103.394.380.000	24 Bulan	5.872.370.200	12 Bulan	3.234.339.720	12 Bulan	3.400.240.030	3,00	821.280.245	3,00	757.818.245,00	-	-	-	-	-	-	6,00	1.570.098.490	50,00	46,44	18,00	4.813.438.210	75,00	81,97
				-	-	60 Bulan	5.081.316.200																								
				-	-	60 Bulan	2.852.779.000																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							41,87	53,80		70,83	98,81				
Predikat kinerja																							SR	SR							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan gedung dinas dikpora	100 persen	796.138.500		492.760.000		251.991.876		249.905.729			43.674.068															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	796.138.500	24 Bulan	492.760.000	12 Bulan	251.991.876	12 Bulan	249.905.729			3,00	43.674.068,00	-	-	-	-	-	3,00	43.674.068	25,00	17,48	15,00	295.665.944	62,50	60,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,00	17,48		62,50	60,00				
Predikat kinerja																							SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																							34,83	36,15							
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah		1.372.450.297.547	100 persen	#REF!	100 Persen	#REF!	100 Persen	288.394.416.159			4.622.159.630		43.300.790.198	-	-	-	-									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	tercapainya APK SD	100 persen	918.633.954.547	100 persen	498.728.445.670	100 Persen	266.156.855.393	100 Persen	208.758.423.808			3.088.864.969		24.652.210.211	-	-	-	-									

Data Persebaran, Kemungkinan dan Anggaran

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK Negeri yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional	60 Bln	921.680.000	24 Bulan	996.412.500	10 TK Negeri	795.800.587	10 TK Negeri	797.402.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	795.800.587	41,67	79,87										
					Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi		1.387.412.898					471.592.194															1.387.412.898											
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD									1.382.896.641			3,00	1.382.896.641,00						3,00	1.382.896.641		100,00	3,00	1.382.896.641										
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									142.255.078																									
					Pengalokasian Dana BOP PAUD	Seluruh TK Negeri - Swasta Kabupaten Kampar	2.668,00 Orang	1.782.962.000	1.050 Orang	308.040.000	525 Peserta	24.830.022	525 Peserta	41.243.988			3,00	33.263.988,00						3,00	33.263.988	0,57	80,65	528,00	58.084.010	50,29	18,86								
					Peningkatan Kapasitas Pengalokasian Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	94.870,00 Siswa	56.922.000,000	37.948 Siswa	22.768.800,000	18.974 Siswa	11.384.400,000	18.974 Siswa	10.878.000,000													18.974,00	11.384.400,000	50,00	50,00									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		12,57	31,69												18,42	19,04
																							Predikat kinerja		SR	SR													
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Peningkatan PKBM	100 persen	128.092.567,000		34.539.392,690		28.669.045,384		2.587.138,892			49.449,067																						
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Paket A/B dan C	1.580 Peserta	708.942.000	5.000 Peserta	452.433.875	2.500 Peserta	93.942.517	2.500 Peserta	140.861.707			150,00	49.449.067,00								150,00	49.449.067	6,00	35,10	2.650,00	143.391.584	53,00	31,69						
					-	1.000 Orang	723.328,000																																
					-	6.845 Orang	608.418,000																																
					-	4.330 Orang	824.624,000																																
					Penyusunan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ kesetaraan								145.476.111																										
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik untuk mengahjuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF	1.276 Orang	550.000,000	480 Orang	1.871.866,750	240 peserta	471.978,527	240 peserta	356.525,250														240,00	471.978,527	50,00	25,21								
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan	Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar	440 lembaga	1.144.000,000	160 Lembaga	250.000,000	80 Lembaga	95.270,855	80 Lembaga	90.875,824														80,00	95.270,855	50,00	38,11								
					Pengalokasian Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	Terlaksananya pendidkan program kesetaraan		8.989.000,000	2.152 Siswa	3.595.600,000	1.076 Siswa	1.797.800,000	1.076 Siswa	1.853.400,000														1.076,00	1.797.800,000	50,00	50,00								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		1,20	7,02												40,60	29,00
																							Predikat kinerja		SR	SR													
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		17,84	74,86													
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1.130.945,000	100 persen	1.189.224,831	100 persen	200.000,000	100 persen	200.000,000			66.580,000																							
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tercapainya Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi	1.130.945,000	2 2 Dokumen	1.189.224,831	1 1 Dokumen	200.000,000	1 1 Dokumen	200.000,000			66.580,000											33,29	1,00	266.580,000	50,00	22,42								
					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Guru PAUD Yang belum mengikut Sosialisasi Kurikulum 13	750 Guru	1.130.945,000	1.030 Guru	1.189.224,831	95 Guru	200.000,000	95 Guru	200.000,000			95,00	66.580.000,00						95,00	66.580.000	100,00	33,29	190,00	266.580,000	18,45	22,42								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	33,29												18,45	22,42
																							Predikat kinerja		SR	SR													
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		100,00	33,29													
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		12.836.232,800	100 persen	3.827.272,524		605.051,455		2.046.721,419			550.007,300																							
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tercapainya Persentase Wirausaha Pemuda	12.836.232,800	100	3.827.272,524	605.051,455		2.046.721,419			550.007,300																								
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	336 Peserta	1.987.364,000	84 Peserta	441.763,000	42 Peserta	550.000,000	42 Peserta	1.150.000,236			30,00	500.000,000,00						30,00	500.000,000	71,43	43,48	72,00	1.050.000,000	85,71	237,68								
					-	168 Orang	1.263.324,000																																

Data Pendidikan dan Kebudayaan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

		Penyenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera PASKIBRAKA	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	486 Orang	9.585.544.000	162 Orang	3.385.509.524	81 Peserta	55.051.455	81 Peserta	896.721.183	-	-	80,00	50.007.300,00	-	-	-	-	80,00	50.007.300	98,77	5,58	161,00	105.058.755	99,38	3,10																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								85,10	24,53																						92,55	120,39	
Predikat kinerja																								SR	SR																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																								85,10	24,53																								
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN			24.214.242.000		4.440.000.000		7.931.633.040		10.914.486.658	-	-	4.307.957.820	-	-	-	-	-	4.307.957.820	-	-	-	-	-	-	-																						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan Sarpras Olahraga yang berstandar Nasional		11.653.765.000		1.830.000.000		1.878.610.546		2.407.048.086	-	-	150.066.000	-	-	-	-	-	150.066.000	-	-	-	-	-	-	-																						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkomunitas Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pelatihan Pelatih dan Teknis olahraga	504 Peserta	1.411.430.000	252 Peserta	1.000.000.000	126 Peserta	188.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,00	188.300.000	50,00	18,83																					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan	39 Paket	10.242.335.000	2 Keg	830.000.000	6 Paket	1.690.310.546	6 Paket	2.407.048.086	-	-	3,00	150.066.000,00	-	-	-	-	3,00	150.066.000	50,00	6,23	9,00	1.640.376.546	450,00	221,73																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								50,00	6,23																						500,00	240,56	
Predikat kinerja																								SR	SR																								
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya kejuaraan tingkat daerah	100 persen	3.438.614.000	100 persen	600.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	504.438.106	-	-	336.982.736	-	-	-	-	-	336.982.736	-	-	-	-	-	-	-																						
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	25 Event	3.438.614.000	6 Event	600.000.000	3 Event	200.000.000	3 Event	504.438.106	-	-	2,00	336.982.736,00	-	-	-	-	2,00	336.982.736	66,67	66,60	5,00	536.982.736	83,33	89,50																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								66,67	66,60																							83,33	89,50
Predikat kinerja																								SR	SR																								
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terseleenggaranya Koordinasi pada lembaga olahraga		544.464.000	100 persen	600.000.000	100 persen	46.656.348	100 persen	53.665.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Data cabor dan sarana keolahragaan	110 Cabor	544.464.000	44 Cabor	600.000.000	22 Cabor	46.656.348	22 Cabor	53.665.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	46.656.348	50,00	7,78																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-																							50,00	7,78
Predikat kinerja																								SR	SR																								
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		8.577.399.000		1.410.000.000		5.806.366.146		7.949.334.782	-	-	3.820.909.084	-	-	-	-	-	3.820.909.084	-	-	-	-	-	-	-																						
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kejurda Provinsi	25 Event	3.110.269.000	10 Event	1.000.000.000	5 Event	5.643.719.473	5 Event	7.796.300.097	-	-	2,00	3.784.757.360,00	-	-	-	-	2,00	3.784.757.360	40,00	48,55	7,00	9.428.476.833	70,00	942,85																						
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga rekreasi	60 Bulan	5.467.130.000	10 Venue	410.000.000	5 Venue	162.646.673	5 Venue	153.034.685	-	-	3,00	36.151.724,00	-	-	-	-	3,00	36.151.724	60,00	23,82	8,00	198.798.397	80,00	48,49																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								50,00	36,08																							75,00	495,67
Predikat kinerja																								SR	SR																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																								50,00	36,08																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																								889.753.474.539																									
Predikat kinerja																								SR	SR																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																								57,51	40,38																								
Predikat kinerja dari Seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																								SR	SR																								

Dinas Pendidikan, Kemandirian dan Olahraga

2) Dinas Kesehatan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																				
No	Kode Rekening	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																						
2			DINAS KESEHATAN																																																	
			Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		46.105.152	100	persen	10.770.150.158		12.959.845.406	100,00	persen	140.546.723.748		22.908.052.650		69.508.934.770		-								92.416.987.420																									
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	persen	1.981.885	100	persen	634.928.473		729.415.609	100,00	persen	479.214.165		134.672.000		198.792.000		-						333.464.000																									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	914.820	3	Dokumen	383.217.902	3	Dokumen	411.312.230	3	Dokumen	244.800.714	0,37	89.543.000	0,44	107.013.000,00	-	-	-	-	0,80	196.556.000	26,76	80,29	3,80	607.868.230	126,76	158,62																				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD					41.929.594	15,00		60.242.210	0,42	25.080.000	0,42	25.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,83	50.160.000	5,55	83,26	0,83	92.089.594	-	-																					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD					51.767.016	2,00		49.649.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.767.016	-	-																					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi					9.424.800	2,00		9.424.800	1,00	9.390.000	1,00	9.390.000,00	-	-	-	-	-	-	1,99	18.780.000	99,63	199,26	1,99	28.204.800	-	-																						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	4	Kali	1.067.065	1		251.710.571	4		214.981.969	4,00	115.097.175	0,09	10.659.000	0,50	57.309.000,00	-	-	-	-	0,59	67.968.000	14,76	59,05	4,59	282.949.969	459,05	112,41																					
																				29,34		84,37					117,16	54.2065853																								
Predikat kinerja																																																				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		103.282		51.982.372		4.400	1,00	105.758.009.459	21.855.874.265	59.438.473.403	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	81.249.764.368	0,57	76,90	0,77	81.249.764.368	-	-																							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase gaji tunjangan ASN yang dibayarkan					134,00		105.650.418.524	0,21	21.855.874.265	0,56	59.393.890.103,00	-	-	-	-	-	-	0,77	81.249.764.368	0,57	76,90	0,77	81.249.764.368	-	-																							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan dinas kesehatan	1	Dokumen	103.282	1	51.982.372	4.400	100,00	107.590.935	-	-	0,41	44.583.300,00	-	-	-	-	-	0,41	44.583.300	0,41	41,44	0,41	44.587.700	41,44	85,77																							
																				0,49		59,17					20,72	42,89																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																				
			Administrasi Kegeawaian Perangkat Daerah		3.388.110		270.261.445		170.261.445	1,00	11.933.070	6.332.300	6.332.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.664.600																													
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan nakes jumlah pertemuan BTCLS	31	Orang	3.388.110		270.261.445	31		170.261.445	-	11.933.070	0,53	6.332.300	0,53	6.332.300,00	-	-	-	-	1,06	12.664.600	-	106,13	32,06	182.926.045	-	67,68																						
																				-		106,13					-	67,68																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.168.134		3.805.282.950		3.078.759.426	1,00	517.063.643	-	184.230.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.230.366																													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	Jenis	690.425	10	50.323.615	1	39.546.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	39.546.115	10,00	78,58																					

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis alat kantor yang disediakan	42 Jenis	772.732	33	1.472.990.814	1	1.224.262.348	100,00	64.139.983	-	-	0,45	29.085.000,00	-	-	-	-	0,45	29.085.000	0,45	45,35	1,45	1.253.347.348	4,40	85,09																					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan alat kebersihan kantor yang disediakan	100 %	1.463.199	1	497.842.500	1	377.842.500	100,00	50.519.700	-	-	0,48	24.477.000,00	-	-	-	-	0,48	24.477.000	0,48	48,45	1,48	402.319.500	148,45	80,81																					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	418.700	1	48.087.963	1	27.990.463	100,00	5.633.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.990.463	100,00	58,21																					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25 Surat Kabar	147.575	1	33.830.000	1	17.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	17.550.000	100,00	51,88																					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pembinaan dan evaluasi ke puskesmas dan jaringannya persentase rapat / koordinasi dan konsultasi yang di ikut	100 %	2.392.985	1	1.700.548.000	1	1.391.568.000	100,00	396.770.000	-	-	0,33	130.668.366,00	-	-	-	-	0,33	130.668.366	0,33	32,93	1,33	1.522.236.366	132,93	89,51																					
						100 %	4.282.518	1	1.660.058	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,21	21,12																											
Predikat kinerja																						SR	SR																											
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.427.018		5.034.484.949		5.954.074.302	1,00	7.157.022.070	-	-	-	1.500.255.080	-	-	-	-	1.500.255.080																												
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, jasa air, dan listrik yang dibayar	12 Bulan	3.283.678	12	793.802.949	12	383.099.620	100,00	337.254.070	-	-	0,21	70.687.580,00	-	-	-	-	0,21	70.687.580	0,21	20,96	12,21	453.787.200	101,75	57,17																					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan upah kerjanya, Jumlah Jasa THL yang dibayarkan upah kerjanya Jumlah Tenaga Kebersihan kantor yang dibayarkan upah kerjanya	10 Orang	3.289.150	1	4.240.682.000	10	5.567.598.000	100,00	6.819.768.000	-	-	0,21	1.429.567.500,00	-	-	-	-	0,21	1.429.567.500	0,21	20,96	10,21	6.997.165.500	1.020,96	165,00																					
						88 Orang	8.798.905			88	2.443.182																																							
						46 Orang	5.055.286			46	933.500																																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,21	20,96																											
Predikat kinerja																						SR	SR																											
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	4.395.898	100 persen	753.882.756		1.663.152.593	100,00 persen	414.519.900	-	-	-	51.424.707	-	-	-	-	51.424.707																												
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin						84.766.000	100,00	38.530.000	-	-	0,24	9.375.000,00	-	-	-	-	0,24	9.375.000	0,24	24,33	0,24	94.141.000	-	-																					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan puskel / Ambulance yang dipelihara secara rutin / berkala	7 Unit	3.932.918		533.942.871	1	331.681.708	100,00	110.649.400	-	-	0,38	42.049.707,00	-	-	-	-	0,38	42.049.707	0,38	38,00	1,38	373.731.415	-	69,99																					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki	80 Unit	462.980		219.939.885	1	131.994.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	131.994.885	-	60,01																					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala						1.114.710.000	100,00	265.340.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114.710.000	-	-																					

Dinas Kesehatan

			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pulau Gadang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	727.808.964	1	Puskesmas	344.650.464	100	382.789.800	-	-	-	-	-	-	-	1,00	344.650.464	100,00	47,35				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tambang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	2.872.426.700	1	Puskesmas	1.496.166.268	100	1.552.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.496.166.268	100,00	52,09				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tapung	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.566.141.068	1	Puskesmas	809.551.179	100	759.315.740	-	-	-	-	-	-	-	1,00	809.551.179	100,00	51,69				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Petahahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.673.249.448	1	Puskesmas	784.307.111	100	861.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	784.307.111	100,00	46,87				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pantai Cermin	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.847.211.088	1	Puskesmas	870.342.940	100	839.592.120	-	-	-	-	-	-	-	1,00	870.342.940	100,00	47,12				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Suka Ramai	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.490.590.279	1	Puskesmas	780.019.264	100	793.580.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	780.019.264	100,00	52,33				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sinama Nenek	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	888.326.402	1	Puskesmas	432.217.573	100	395.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	432.217.573	100,00	48,66				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kota Garo	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	3.741.455.451	1	Puskesmas	2.151.733.169	100	1.448.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.151.733.169	100,00	57,51				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanah Tinggi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.556.484.982	1	Puskesmas	719.319.681	100	675.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	719.319.681	100,00	46,21				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sibiruang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.688.856.280	1	Puskesmas	806.971.396	100	876.501.320	-	-	-	-	-	-	-	1,00	806.971.396	100,00	47,78				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Sasak	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	609.674.310	1	Puskesmas	355.216.607	100	342.820.871	-	-	-	-	-	-	-	1,00	355.216.607	100,00	58,26				
Rate-rata capaian kinerja (%)																				0,01	-	96,88	49,19				
Predikat kinerja																				SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																				4,35	43,91						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	persen	3.269.261.292		47.042.133.384	110.314.538.755		85.529.954.307	344.916.800		8.857.733.293	-	-	-	9.202.650.093								
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	persen	264.321.852		284.039.470	58.203.847.658		29.657.296.017			193.611.064	-	-	-	193.611.064								
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun serta sarana dan prasarannya																							
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Kegiatan DAK Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun dan Jumlah Puskesmas yang dibangun	6	Unit	31.221.220			1	19.031.698.256	100,00	694.127.430		-	0,08	54.587.430,00	-	-	0,08	54.587.430	0,08	7,86	1,08	19.086.285.686		
					12	Unit	8.221.220			1																	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun						1.507.319.000	100,00														1.507.319.000		
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun							5,00																
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan tipe Rumah sakit							1,00																
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah peningkatan tipe Puskesmas							4,00																
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes yang dikembangkan							2,00																
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang direhab dan dipelihara							1,00																

Data Kelembagaan

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab dan dipelihara Jumlah Puskesmas yang direhab dan dipelihara	6 Unit	31.221.220		1	2.244.997.190	100,00	10.679.932.666	-	-	0,01	18.932.350,00	-	-	-	-	0,01	18.932.350	0,01	0,18	1,01	2.263.929.540	-	-									
					12 Unit	8.221.220		1																												
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhab dan dipelihara					8,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi dan pemeliharaan					8,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis sarana dipuskesmas pembantu yang diadakan Jumlah dan jenis sarana dipuskesmas yang diadakan	7 Jenis	15.084.600		1	1.175.273.145	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.175.273.145	-	-									
					7 Jenis	4.026.000		1																												
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas pembantu yang diadakan Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas yang diadakan	7 Jenis	15.084.600		1	7.885.820.627	15,00	277.371.284			0,40	28.151.284,00	-	-	-	-	-	0,40	28.151.284	2,70	10,15	1,40	7.913.971.911	-	-								
					7 Jenis	4.026.000		1																												
					100 %	15.285.540		1																												
					31 Puskesmas	45.354.522		1																												
					1 Jenis	9.648.710		1																												
			Pengadaan Alat Kesehatan/Atas Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya					10.858.025.062	60,00	6.353.901.936			0,00	8.520.000,00	-	-	-	-	0,00	8.520.000	0,00	0,13	0,00	10.866.545.062	-	-									
			Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat dan BMHP					8.197.027.187	100,00	5.161.900.520			0,01	59.520.000,00	-	-	-	-	0,01	59.520.000	0,01	1,15	0,01	8.256.547.187	-	-									
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Jumlah BMHP yang diadakan dengan jumlahKebutuhan RKO					7.019.647.721	100,00	6.490.062.182			0,00	23.900.000,00	-	-	-	-	0,00	23.900.000	0,00	0,37	0,00	7.043.547.721	-	-									
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara			194.039.470		194.039.470	100,00															194.039.470	-	-									
			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara						15,00																										
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Atas Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Kalibrasi Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya			90.000.000		90.000.000	100,00															90.000.000	-	-									
					100 %	76.500.000		-																												
					100 %	427.000		-																												
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				0,47	3,31								
																							Predikat kinerja				SR	SR								
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.004.939.440	2	2 Dokumen	46.758.093.914		52.052.728.980	1,00	Dokumen	55.581.459.068	279.920.800	8.541.006.779	-	-	-	-	8.820.927.579															

Disdikbud

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang terpantau pelaksanaan PKK Persentase pelayanan ibu hamil yang sesuai dengan standar	1 Kegiatan	916.067	1		260.527	1	156.540.219	100,00	170.101.552	-	0,25	45.172.500,00	-	-	-	-	0,25	45.172.500	0,25	26,56	1,25	201.712.719	125,32	77.424,88	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah terlaksananya kegiatan PKK-KB Kes Jumlah terlaksananya pertemuan evaluasi program kesehatan ibu dan anak Jumlah terlaksananya pertemuan PKK Persentase pelayanan ibu bersalin yang sesuai dengan standar							178.383.038	100,00	902.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.383.038	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah persentase cakupan pelayanan bayi baru lahir yang sesuai dengan standar jumlah terlaksananya kegiatan SHK jumlah terlaksananya program kegiatan audit perinatai								100,00	26.798.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah evaluasi program kesehatan keluarga yang dilaksanakan Jumlah evaluasi program masalah gizi balita Jumlah persentase pelayanan kesehatan balita yang sesuai dengan standar Jumlah petugas puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan SIDIITK							137.494.405	100,00	18.086.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.494.405	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah SLTA/ Sederajat yang Melakukan SBH Jumlah Terbentuknya Puskesmas PKPR Jumlah UKS yang dibina	31 Puskesmas	605.006	1		166.336	1,00	92.644.325	100,00	49.999.850	11,05	-	0,46	30.829.850,00	-	-	-	-	11,51	30.829.850	11,51	61,66	12,51	123.474.175	1.250,94	74.232,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							46.180.000	100,00	106.714.927	-	0,30	31.950.000,00	-	-	-	-	0,30	31.950.000	0,30	29,94	0,30	78.130.000	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah persentase cakupan kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang mampu santun lansia Jumlah terlaksananya posyandu lansia	31 Puskesmas	538.945	1		54.420.000	1,00	44.923.073	100,00	18.213.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	44.923.073	100,00	82,55	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar	80 %	1.027.775				1,00	61.166.521	100,00	31.006.831	-	0,56	17.450.100,00	-	-	-	-	0,56	17.450.100	0,56	56,28	1,56	78.616.621	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Diabetes Melitus Sesuai Standar							76.613.508	100,00	10.221.149	-	0,94	9.587.000,00	-	-	-	-	0,94	9.587.000	0,94	93,80	0,94	86.200.508	-	-	

Dinas Kesehatan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan Dokter Spesialisik Jiwa Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	31 Puskesmas	459.750		360.295.184		169.493.357	100,00		141.094.055		-	0,14	20.209.000,00	-	-	-	-	0,14	20.209.000	0,14	14,32	0,14	189.702.357	-	-	52,65
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	5.850 Kasus	652.820		77.878.632		53.628.632	100,00		27.004.441		-	0,21	5.622.000,00	-	-	-	-	0,21	5.622.000	0,21	20,82	0,21	59.250.632	-	-	76,08
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15 Kasus	564.770		160.085.714		95.574.193	100,00		57.366.191		-	0,10	5.770.500,00	-	-	-	-	0,10	5.770.500	0,10	10,06	0,10	101.344.693	-	-	63,31
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Krisis Kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana									10.610.124.450	0,01	109.852.000	0,25	2.498.313.499,00	-	-	-	-	0,26	2.608.165.499	-	24,58	0,26	2.608.165.499	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa lokus stunting yang dibina Jumlah pelaksanaan MMD diwilayah puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan PMT dan Vitamin A Jumlah status gizi yang terpantau Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar	250 Paket	3.025.000				1.047.768.902	100,00		878.519.090		-	0,05	112.980.700,00	-	-	-	-	0,05	112.980.700	0,05	12,86	0,05	1.160.749.602	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Persentase Peralaksanaanya Upaya Kesehatan Kerja						74.652.106	100,00		69.462.717		-	0,21	12.600.000,00	-	-	-	-	0,21	12.600.000	0,21	18,14	0,21	87.252.106	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase pengawasan dan pengendalian sampah dan limbah Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan						233.306.320	100,00		951.058.358		-	0,05	43.875.950,00	-	-	-	-	0,05	43.875.950	0,05	4,61	0,05	277.182.270	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Media Informasi						143.594.000	100,00		50.000.000		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	143.594.000	-	-	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional						219.972.850					-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	219.972.850	-	-	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase frekuensi surveillance epidemiologi Persentase tercapainya pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19						1.254.094.966	100,00		115.721.809		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.254.094.966	-	-	
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan dan pembinaan kesehatan haji Penurunan jumlah kasus caries gigi, penurunan jumlah gangguan indra pada anak sekolah Persentase kegiatan yang mendapatkan pelayanan mata						97.562.215	100,00		251.146.634	-	-	0,72	181.275.500,00	-	-	-	-	0,72	181.275.500	0,72	72,18	0,72	278.837.715	-	-	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							1.508.864.827	50,00		560.751.690		0,09	48.487.200,00	-	-	-	-	0,09	48.487.200	0,17	8,65	0,09	1.557.352.027	-	-		

Daerah Kesehatan

				Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Pagar	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.715.561.842	1	813.168.350	100,00	874.108.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	813.168.350	100,00	47,40	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Simalinyang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.578.319.150	1	748.114.586	100,00	815.283.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	748.114.586	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Raja	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.163.800.692	1	550.172.804	100,00	620.055.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	550.172.804	100,00	47,27
				Operasional Pelayanan Puskesmas Rumbio	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.166.636.899	1	553.007.627	100,00	613.383.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	553.007.627	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pandau Jaya	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.441.047.634	1	683.034.193	100,00	759.080.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	683.034.193	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kubang Jaya	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.509.750.695	1,00	715.644.418	100,00	797.126.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	715.644.418	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan Baru	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.235.203.825	1,00	585.480.234	100,00	664.296.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	585.480.234	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Salo	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.441.012.078	1	683.001.563	100,00	748.674.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	683.001.563	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Besurat	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	873.928.145	1	404.683.500	100,00	487.559.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	404.683.500	100,00	46,31
				Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bungsu	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.028.659.818	1	487.223.833	100,00	533.060.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	487.223.833	100,00	47,36
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pulau Gadang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	754.617.213	1	357.563.951	100,00	328.727.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	357.563.951	100,00	47,38
				Operasional Pelayanan Puskesmas Tambang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	2.744.898.535	1	1.301.069.254	100,00	1.445.659.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.301.069.254	100,00	47,40
				Operasional Pelayanan Puskesmas Tapung	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif				1	1.646.938.688	1	780.640.956	100,00	865.568.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	780.640.956	100,00	47,40

Dinas Kesehatan

3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3		RUHAK SAKIT UMUM DAERAH																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	-	100 persen	154.394.874	127.863.276.859	100,00 persen	88.434.062.605	5.570.155.146	25.546.873.396	-	-	-	-	-	-	31.117.028.542							
		Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Rensra, Renja dan Penja	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
		Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
		Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
		Koordinasi dan Penyusun DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun DPA-SKPD	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
		Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
		Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		25.732.479	-	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.595	-	46,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-				46,51	
																			Predikat kinerja	SR	SR					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	- 0	162.135.330.162	80.581.159.847	36.167.842.628	100,00 persen	34.358.815.954	3.917.156.761	17.957.560.126	-	-	-	-	-	21.874.716.887									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	162.125.377.732	80.559.762.122	36.157.890.198	12,00	34.358.815.954	3,00	3.917.156.761,00	3,00	17.957.560.126,00	-	-	-	-	6,00	21.874.716.887	50,00	63,67	7,00	58.032.607.085	700,00	72,04	
		Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.952.430	21.397.725	9.952.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.952.430	-	46,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	63,67				350,00	59,27
																			Predikat kinerja	SR	SR					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 persen	-	100 persen	-	100 pe	100,00 persen	1.281.770.850	-	250.989.183	-	-	-	-	250.989.183									
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terukurnya Tingkat Realisasi Program/Kegiatan Rumah Sakit	1	50.550.000	108.682.500	50.550.000	12,00	678.770.850	3,00	0,23	153.000.000,00	-	-	-	-	3,23	153.000.000	26,88	22,54	3,23	203.550.000	322,54	187,29		
		Bimbingan T. Terampil Perundang - Undangan																	0,42	250.989.183	-	41,62	0,42	250.989.183	-	-
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	13,44	32,08					
																			Predikat kinerja	SR	SR					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 persen	22.449.199.786	17.657.827.841	8.519.783.165	100,00 persen	7.075.465.897	454.715.258	3.975.518.472	-	-	-	-	-	4.430.233.730									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terseainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	999.758.800	537.470.713	249.986.378	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	249.986.378	100,00	46,51

Dasar Data: Rumah Sakit Umum Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	1	3.457.012.370	1	111.072.999	1	458.436.860	12,00	723.563.996	0,08	58.770.300,00	0,76	553.278.500,00	-	-	-	-	0,85	612.048.800	7,05	84,59	1,85	1.070.485.660	184,59	963,77	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	1	9.567.410.139	1	9.782.237.236	1	4.619.426.384	12,00	3.318.209.511	0,07	237.270.000,00	0,65	2.173.141.486,00	-	-	-	-	0,73	2.410.411.486	6,05	72,64	1,73	7.029.837.870	172,64	71,86	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	3.358.843.795	1	3.117.380.153	1	1.828.183.757		1.393.880.630	-	-	0,31	429.105.198,00	-	-	-	-	0,31	429.105.198	-	30,78	1,31	2.257.288.955	130,78	72,41	
													-	-	0,39	354.723.200,00	-	-	-	-	0,39	354.723.200	-	-	0,39	354.723.200	-	-		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	1	1.200.696.861	1	1.627.029.240	1	756.757.786	12,00	907.585.760			0,64	465.270.088,00	-	-	-	-	0,64	465.270.088	5,30	51,26	1,64	1.222.027.874	163,54	75,11	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Akomodasi Rapat dan Konsultasi Rumah Sakit Pertahun	1	3.865.477.821	1	2.482.637.500	1	606.992.000	12,00	732.226.000	0,22	158.674.958,00	-	-	-	-	-	-	0,22	158.674.958	1,81	21,67	1,22	765.666.958	121,67	30,84	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	4,04	52,19		145,54	210,08				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
				Pengadaan Milik Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.191.270.000	24 Bulan	1.920.000.000		800.000.000	100,00 Persen	-																	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	1	3.191.270.000	1	1.920.000.000	1	800.000.000															1,00	800.000.000	100,00	41,67	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00		100,00	41,67				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	9 Unit	21.691.701.730	100 persen	16.965.027.526	9	8.160.157.740	100,00 Persen	8.718.009.904		1.198.283.127		3.362.805.615	-	-	-	-	4.561.088.742	-	52,32	9,00	12.721.246.482	9,00	74,99		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1.349.998.045	1	3.779.994.526	1	1.867.160.240	12,00	2.463.229.300	0,18	438.442.877	0,37	906.723.247,00	-	-	-	-	0,55	1.345.166.124	4,55	54,61	1,55	3.212.326.364	154,61	84,98	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Umum Kantor	1	20.341.703.685	1	13.185.033.000	1	6.292.997.500	12,00	6.254.780.604	0,12	759.840.250	0,39	2.456.082.368,00	-	-	-	-	0,51	3.215.922.618	4,28	51,42	1,51	9.508.920.118	151,42	72,12	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	4,42	53,01		153,01	78,55				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	150 Klp	16.942.182.255	45 Klp	578.590.918	15,00 Klp	8.768.582.055	40,00 Klp	-																	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teripatiharanya dengan Rutin dan berkala Perengkapan Gedung Kantor	1	269.112.055	1	578.590.918	-	269.112.055																269.112.055	-	46,51	
				Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berfungsinya Gedung Rumah Sakit	1	16.673.070.200	1	8.499.470.000																	1,00	8.499.470.000	100,00	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-		25,00	11,63				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	217.590.841.330	100 persen	120.400.000.000		65.375.099.701	100,00 persem	37.000.000.000																	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kualitas Kebutuhan Administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang	1	217.590.841.330	1	120.400.000.000	1	65.375.099.701	12,00	37.000.000.000	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	4,00	65.375.099.701	400,00	54,30	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	-		400,00	54,30				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1	19,38	40,19							

Dinas Sinau Satu Umur/daerah

1	592.378.241	-	-	1	592.378.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	592.378.241	-	-	
1	5.246.270.000	-	-	1	5.246.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.246.270.000	-	-	
1	718.079.372	-	-	1	239.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	239.700.000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	-	-
Predikat kinerja																			SR	SR	-	-
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																			1,52	18,24	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					135.337.080.993														35.848.170.512	-	-	-
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																			12,531	19,59	-	-
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																			SR	SR	-	-

Dinas Rencanah Sakeluruhan Daerah

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																									
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.											
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 7 + 13	16 = 15*100	17																									
4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																							
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	62.424	100 persen	200.000.000		150.857.734	100,00	persen	241.331.850		-	133.460.000		-																									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	62.424	100 persen	200.000.000		150.857.734	100,00	persen	241.331.850		-	133.460.000		-																									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dok	50.000.000		54.995.320	1,00	Dok	105.683.550			101.250.000		-	-	-	-	1,00	101.250.000	100,00	95,80	1,00	156.245	60,00	312,49														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dok	50.000.000		59.732.250	1,00	Dok	46.452.000			32.210.000		-	-	-	-	1,00	32.210.000	100,00	69,34	1,00	91.942	50,00	183,88														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dok	50.000.000		8.296.124	1,00	Dok	8.160.900			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.296	-	16,59													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Dok	62.424		27.834.040	1,00	Dok	81.035.400			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	27.834	150,00	55,67												
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	41,29																									
													Predikat kinerja		SR	SR																									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81.093		21.288.891,614	100,00	persen	9.676.945,957		1.632.493,692	3.386.990,176		-	-	-	-		5.019.483,868																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Bulan		24 Bulan	21.188.891,614		Bulan	10.334.824,796	12,00	Bulan	9.631.065,757	3,00	1.632.493,692	3,00	3.386.990,18	-	-	-	6,00	5.019.483,868	50,00	52,12	6,00	15.354.309	25,00	72,46												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			60 Bulan	81.093		24 Bulan	100.000.000		36 Bulan	45.862.350	12,00	Bulan	45.880.200	3,00	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	39,00	45.862	162,50	45,86													
													Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	26,06																									
													Predikat kinerja		SR	SR																									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	1.159.959		463.983,600	100,00	persen	222.617,000		-	-		-	-	-	-		-																				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Keg	549.459		219.783,600	1,00	Keg	9.250.000			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	3,00	9.250	150,00	4,21												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Keg	610.500		244.200,000	1,00	Keg	208.757.000			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	2,00	107.195	100,00	43,90												
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																									
													Predikat kinerja		SR	SR																									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	8.169.815		2.666.700,694	100,00	persen	947.377,758		192.538,085	500.996,759		-	-				693.536,844																				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60 Bulan	53.164		27.091,170	36	Bulan	13.545.585	12,00	Bulan	13.386.500	3,00		6,00	5.940.000	-	-	-	9,00	5.940.000	75,00	44,37	45,00	19.486	187,50	71,93												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60 Bulan	1.600.000		975.263,906	36	Bulan	524.281,953	12,00	Bulan	277.840.000	3,00		6,00	182.025.000	-	-	-	9,00	182.025.000	75,00	65,51	45,00	706.307	187,50	72,42												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60 Bulan	456.307		163.381,200	36	Bulan	81.690.600	12,00	Bulan	77.552.000	3,00		33.365,750	3,00	40.671,21	-	-	-	6,00	74.036,961	50,00	95,47	42,00	155.728	175,00	95,32											

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (ATK) pakai habis	60 Bulan	155.446	24 Bulan	127.272,418	36 Bulan	63.636,209	12,00 Bulan	32.223,258	3,00	16.141,695	3,00	8.854,30	-	-	-	-	6,00	24.995,996	50,00	77,57	42,00	88.632	175,00	69,64
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	213.190	24 Bulan	55.440,000	36 Bulan	27.720,000	12,00 Bulan	69.040,000	3,00	15.000,000	3,00	11.500,000	-	-	-	-	6,00	26.500,000	50,00	38,38	42,00	54.220	175,00	97,80
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya kebutuhan rapat dan koordinasi	60 Bulan	5.691,708	24 Bulan	1.338.252,000	36 Bulan	623.066,000	12,00 Bulan	477.336,000	3,00	128.030,640	3,00	252.008,25	-	-	-	-	6,00	380.038,887	50,00	79,62	42,00	1.003,105	175,00	74,96
Rata-rata capaian kinerja (%)																						58,33	66,82		179,17	80,34			
Predikat kinerja																						SR	SR						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	-	100 persen	-	-	100,00 persen	533.500,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Perot-mangan Dinas Alau Kendaran Dinas Jabatan								533.500,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-		-	-			
Predikat kinerja																						SR	SR						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan		7.721,619	24 Bulan	2.370.905,498		1.193.240,749	100,00 Persen	1.180.243,882		195.278,440		354.185,189	-	-	-	-	6,00	549.463,629						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	60 Bulan	2.057,419	24 Bulan	480.860,000	36 Bulan	248.218,000	12,00 Bulan	240.430,000	3,00	56.103,174	3,00	60.202,15	-	-	-	-	6,00	116.305,322	50,00	48,37	42,00	364.523	175,00	75,81
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	1.479,437	24 Bulan	61.300,000	36 Bulan	30.650,000	12,00 Bulan	30.650,000	3,00	-	3,00	21.920,54	-	-	-	-	6,00	21.920,541	50,00	71,52	42,00	52.571	175,00	85,76
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	4.184,763	24 Bulan	1.828.745,498	36 Bulan	914.372,749	12,00 Bulan	909.163,882	3,00	139.175,266	3,00	272.062,50	-	-	-	-	6,00	411.237,766	50,00	45,23	42,00	1.325,611	175,00	72,49
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	55,04		175,00	78,02			
Predikat kinerja																						SR	SR						
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Fasilitas penunjang kinerja	100 persen	5.376,165	100 persen	2.557.635,852		1.278.817,926	100,00 Persen	1.221.104,026		395.514,852		260.872,648	-	-	-	-	6,00	656.387,500						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perotangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	60 Bulan	436,710	24 Bulan	259.849,852	36 Bulan	129.924,926	12,00 Bulan	129.913,026	3,00	33.481,538	3,00	15.110,79	-	-	-	-	6,00	48.592,323	50,00	37,40	42,00	178.517	175,00	68,70
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	60 Bulan	197,366	24 Bulan	642.586,000	36 Bulan	321.293,000	12,00 Bulan	320.991,000	3,00	87.033,314	3,00	103.779,88	-	-	-	-	6,00	190.813,195	50,00	59,45	42,00	512.106	175,00	79,69
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	4.742,089	24 Bulan	1.470.000,000	36 Bulan	735.000,000	12,00 Bulan	770.200,000	3,00	275.000,000	3,00	141.981,98	-	-	-	-	6,00	416.981,982	50,00	54,14	42,00	1.151,982	175,00	78,37
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	51,51		175,00	76,19			
Predikat kinerja																						SR	SR						
				Penataan Organisasi					92.600,000		46.300,000		62.550,000		-	-	48.750,000	-	-	-	-	48.750,000	-	-	-	-	95.050,000	-	-
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Bulan	-	24 Bulan	92.600,000	- Bulan	46.300,000	12 Bulan	62.550,000	3,00	-	6,00	48.750,000	-	-	-	-	9,00	48.750,000	75,00	77,94	9,00	95.050	37,50	102,65
Rata-rata capaian kinerja (%)																						68,75	70,11		184,38	101,40			
Predikat kinerja																						SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																						39,32	36,85						
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100 persen	23.715,250	100 persen	7.972.550,918		7.112.278,253	100,00 Persen	1.847.592,700		256.320,000		194.230,061	-	-	-	-	450.550,061							
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	100 persen	23.715,250	100 persen	7.972.550,918		7.112.278,253	100,00 Persen	1.847.592,700		256.320,000		194.230,061	-	-	-	-	450.550,061							
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA	55 Dok	3.780,000	10 Dok	989.600,688	33 Dok	329.866,896	2,00 Dok	228.828,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	329,867	330,00	33,33

Dinas Peningkatan dan Pemeliharaan Barang

				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	50 Keg	3.648.100	20 Keg	3.499.846,962	1 Keg	5.127.175,481	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.127.175	5,00	146,50																		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang Dipelihara	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dipelihara	62 Keg	10.050.000	20 Keg	2.901.401,418	42 Keg	1.358.420,709	12,00 Keg	1.380.123,545	3,00	256.320.000	3,00	177.099,86	-	-	-	6,00	433.419,860	50,00	31,40	48,00	1.791.841	240,00	61,76													
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang Dipelihara	15 Keg	5.707.150	20 Keg	424.514,314	9 Keg	199.537,157	12,00 Keg	189.756,125	3,00	-	-	6,00	17.130,201	-	-	9,00	17.130,201	75,00	9,03	18,00	216.667	90,00	51,04													
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Monitoring Alokasi Air Irigasi	5 Keg	530.000	2 Keg	157.187,536	3 Keg	97.278,010	1,00 Keg	48.884,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	97.278	150,00	61,89	-	-												
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		31,25	10,11			116,43	50,64													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		31,25	10,11																	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			13.546.496	100 persen	8.535.735,598		4.364.062,799	100,00 persen	9.909.408,294		-		174.292,262	-	-		174.292,262																				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Presensi Rumah Tangga Berakses Air Bersih	100 persen	13.546.496	100 persen	8.535.735,598		4.364.062,799	100,00 persen	9.909.408,294		-		174.292,262	-	-		174.292,262																				
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM									274.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jangkauan Jaringan Perpipaan	5 Keg	13.546.496	4 Keg	8.535.735,598	3 Keg	4.364.062,799	2,00 Keg	9.634.418,294	-	-	1,00	174.292,26	-	-	-	1,00	174.292,262	50,00	1,81	4,00	4.538.355	100,00	53,17													
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	1,81			12,5	6,65													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		50,00	1,81																	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	100 persen	-		-	100,00 persen	3.597.633,700		-		14.643,700	-	-		14.643,700																				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	-	100 persen	-		-	100,00 persen	3.597.633,700		-		14.643,700	-	-		14.643,700																				
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota									81.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman									3.516.243,700	-	-	-	14.643,70	-	-	-	-	14.643,700	-	0,42	-	14.644	-	-													
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,42			0	0,00													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		-	0,42																	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100 persen	38.460.232		10.316.601,210		6.315.739,105		6.480.495,380		-		78.984,680	-	-		78.984,680																				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Sistem Jaringan Drainase/Perkotaan Berfungsi Baik	100 persen	38.460.232		10.316.601,210	1	6.315.739,105		6.480.495,380		-		78.984,680	-	-		78.984,680	-	-	1,00	6.394.724	-	-														
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	- Dok	-	4 Dok	591.721,220	- Dok	567.017,610	2,00 Dok	339.530,500	-	-	10,00	30.142,80	-	-	-	10,00	30.142,800	500,00	8,88	10,00	597.160	250,00	100,92													
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	70 Unit	38.460,232	40 Unit	9.724.879,990	42 Unit	5.748.721,495	19,00 Unit	5.783.431,880	-	-	-	44.841,88	-	-	-	-	44.841,880	-	0,78	42,00	5.793.563	105,00	59,57													
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase									357.533,000	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,000	-	1,12	-	4.000	-	-													
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		166,67	3,59			118,33	53,50													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		166,67	3,59																	

Data Pengisian Unsur dan Perataan Ruang

										122.534,000	-	13.932,500	-	-	13.932,500								
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						100 persen	-	-	-	-													
Rate-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-
Predikat kinerja																				SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 11																				50,00	13,73		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												162.543.242.846		13.988.037.237									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																	42,69	12,15					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																	SR	SR					

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																	
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																			
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100		17																													
5		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																																															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.111.680	15.584.135		6.915.336		6.091.662.265			2.027.167.25200								3.042.615.253																												
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		200.884	248.529		74.333		137.665.973		44.460.000		40.536.600							84.996.600																												
		1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Keg	50.000	2 Keg	59.869	-	29.434.989	1 Dok	46.560.752	1,00	24.190.000	-	22.370.000000	-	-	-	-	-	46.560.000	100,00	100,00	1,00	75.996	50,00	126,94																						
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Keg	30.000	2 Keg	34.550	-	13.500.000	1 Dok	25.167.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	-	39,07																					
		3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Keg	50.000	2 Keg	64.003	-	7.216.722	1 Dok	23.696.900	-	1,00	11.426.600000	-	-	-	-	-	-	11.426.600	100,00	48,22	1,00	18.643	50,00	29,13																						
		4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Keg	30.000	2 Keg	30.548	-	7.537.513	1 Dok	11.810.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.538	-	24,67																					
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Dok	40.884	2 Dok	59.559	1 Dok	16.643.886	1 Dok	30.430.632	1,00	20.270.000	-	6.740.000000	-	-	-	-	-	27.010.000	100,00	88,76	2,00	43.654	100,00	73,30																						
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		60,00	47,40																										
																				Predikat kinerja		SR	SR																										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		5.121.506	10.107.342		4.216.439		3.526.780.361		568.961.435		1.399.155.129							1.968.116.564																												
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.023.109	2 Tahun	10.046.218	-	4.200.310.382	1 Tahun	3.453.573.439	0,25	549.687.935	0,25	1.387.905.12900	-	-	-	-	-	1.937.593.064	50,00	56,10	0,50	6.137.903	25,00	61,10																						
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	48.397	2 Dok	30.574	1 Dok	11.243.852	1 Dok	17.807.166	-	14.386.500	-	-	-	-	-	-	-	14.386.500	-	80,79	1,00	25.630	50,00	83,83																						
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dok	50.000	2 Dok	30.550	4.885.062	1 Dok	55.399.756	0,25	4.887.000	1,00	11.250.000000	-	-	-	-	-	-	16.137.000	125,00	29,13	1,25	21.022	62,50	68,81																						
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		58,33	55,34																										
																				Predikat kinerja		SR	SR																										
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		50.000	12.800		6.739		-											-																												
		1. Rekamisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Keg	50.000	2 Keg	12.800	-	6.738.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.739	-	52,65																					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																										
																				Predikat kinerja		SR	SR																										

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	639.722	60 Unit	158.762	30.00	Unit	91.650.326	1 Tahun	122.640.000	0,25	20.184.461	0,25	17.345.49900	-	-	-	-	0,50	37.529.960	50,00	30,60	30,50	129.180	50,83	81,37	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	457.566	14 Unit	239.726	7,00	Unit	101.134.315	1 Tahun	137.504.452	0,25	52.046.480	0,25	25.692.00000	-	-	-	-	0,50	77.738.480	50,00	56,54	7,50	178.873	53,57	74,62	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	124.000	2 Tahun	211.930	-	-	105.964.754	1 Tahun	320.387.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.966	-	50,00	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	29,05	-	-	34,80	68,66
																								Predikat kinerja		SR	SR	-	-	-	-
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		53,12	44,73	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							2.099.997	565.345	259.375	748.433.040	113.499.52300	-	-	-	-	147.308.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	136.062.657					30.000.00000																	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				48.790.856	-	-	0,25	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,25	12.000.000	-	24,59	0,25	12.000	-	-			
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				38.872.000	-	-	0,25	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,25	9.000.000	-	23,15	0,25	9.000	-	-			
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				48.399.801	-	-	0,25	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,25	9.000.000	-	18,60	0,25	9.000	-	-			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		-	22,11	-	-	-	-
																								Predikat kinerja		SR	SR	-	-	-	-
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	95.641.030					-																	
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana					95.641.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	
																								Predikat kinerja		SR	SR	-	-	-	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	2.099.997	565.345	Bln	259.375	516.729.353	113.499.52300	-	-	-	-	147.308.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Ijin Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota					249.999.995	0,25	6.066.00000	-	-	-	-	6.066.000	-	2,43	0,25	6.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60 Bln	2.099.997	2 Tahun	565.345	12,00	Bln	259.375.340	1 Tahun	266.729.358	0,25	33.808.835	0,25	113.499.52300	-	-	-	-	0,50	147.308.358	50,00	55,23	12,50	406.684	625,00	71,94	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	55,23	-	-	625,00	71,94
																								Predikat kinerja		SR	SR	-	-	-	-
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		25,00	27,61	-	-	-	-

Dinas Perumahan, Rakyat dan Kemasyarakatan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			11.301.375	1.160.023	487.495	599.709.371			90.351.30000		-	-			112.899.992															
	Penerbitan Iain Pembangunan dan Perumahan	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	6.012.127	621.826	242.910	241.009.789			23.789.30000		-	-			40.435.292															
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	28 Dok	5.289.248	4	Dokumen	459.528	3,00	Dok	193.488.423	2	Dokumen	197.759.850	-	16.645.992	0,25	18.950.00000	-	-	-	-	0,25	35.595.992	12,50	18,00	3,25	229.084	81,25	49,85	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	60 Bln	722.879	2	Tahun	162.298	12,00	Bln	49.421.397	1	Tahun	43.249.939	-	-	0,25	4.839.30000	-	-	-	-	0,25	4.839.300	25,00	11,19	12,25	54.261	612,50	33,43	
Rata-rata capaian kinerja (%)															18,75	14,59				346,88	41,64									
Predikat kinerja															SR	SR														
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	5.289.248	538.197	244.585	278.899.652			5.902.700	66.562.00000					72.464.700															
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	28 Dok	5.289.248	6	Dokumen	538.197	3,00	Dok	244.585.053	3	Dokumen	278.899.652	-	5.902.700	0,25	66.562.00000	-	-	-	-	0,25	72.464.700	8,33	26,00	3,25	317.050	54,17	58,91	
Rata-rata capaian kinerja (%)															8,33	25,00				54,17	58,91									
Predikat kinerja															SR	SR														
	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					79.999.930				77.055.60000					77.055.600															
	Penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design Perumahan Perumahan Perumahan Kumuh					79.999.930				77.055.60000					77.055.600															
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	96,32				-	-									
Predikat kinerja															SR	SR														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															9,03	45,64														
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		35.839.324	16.147.387	20.576.457	8.143.147.037			3.713.827.50300						3.809.098.837															
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	35.839.324	16.147.387	20.576.457	8.143.147.037			3.713.827.50300						3.809.098.837															
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.261 Unit	35.839.324	782	Unit	16.147.387	411,00	Unit	20.576.457.006	500	Unit	8.143.147.037	3,00	95.271.334	200,00	3.713.827.50300	-	-	-	-	203,00	3.809.098.837	40,60	46,78	614,00	24.385.556	78,52	151,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)															40,60	46,78				78,52	151,02									
Predikat kinerja															SR	SR														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4															40,60	46,78														
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		48.259.194	30.637.123	20.428.513	23.676.313.827			3.634.439.85000						3.717.923.413															

dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan evaluasi

6) Satpol PP

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		CPO Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9-12				13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 13/100		17				
6		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Cakupan Laporan Penunjang/Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten		79.886.260.403	100 persen	32.092.902.842		5.360.005.566	100,00	14.134.775.814				3.924.320.608	-	-					6.418.951.613						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan (Rencana SKPD) dan Laporan akuntabilitas (Lakip, LKPD, LPPD)	100 persen	33.500.000	100 persen	27.000.000		3.499.814	100,00	3.499.523				-	-	-					3.499.523						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Renstra Satpol PP	2	20.000.000	1	20.000.000		-		-				-	-	-					-						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Renja, DPA, RKA, LKJP, Lap. Tahunan	35	13.500.000	14	7.000.000		21	3.499.814	7,00	3.499.523	5	3.499.523,00	-	-	-				5,00	3.499.523	71,43	100,00	26,00	6.999.337	185,71	99,99
													Rata-rata capaian kinerja (%)		71,43		100,00				62,86		50,00					
													Predikat kinerja		S		ST											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	23.922.836.803		8.935.139.142		3.962.742.774	100,00	3.651.640.163				1.292.163.493	-	-					1.829.898.702						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya gaji dan tunjangan ASN	60	23.909.336.803	24	8.928.139.142		3.959.242.960	12,00	3.648.140.640	3	534.235.686,00	3,00	1.292.163.493,00	-	-	-			6,00	1.826.399.179	50,00	50,06	42,00	5.785.642.139	175,00	64,80
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terb. administrasi keuangan akhir tahun	35	13.500.000	14	7.000.000		21	3.499.814	7,00	3.499.523	1	3.499.523,00	-	-	-			1,00	3.499.523	14,29	100,00	22,00	6.999.337	157,14	99,99	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		32,14		76,03				166,07		82,40					
													Predikat kinerja		SR		R											
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	1.277.771.000	100 persen	-	100 persen	15.000.000	100,00	-											-						
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	393	1.277.771.000				1	15.000.000					-	-	-					-						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-				-		-					
													Predikat kinerja		SR		SR											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	4.950.599.000		2.417.108.000		1.030.981.452	100,00	1.049.030.407				166.171.050	-	-					734.105.823						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan listrik Lainnya	12	10.000.000	12	10.000.000			12,00	13.603.200	3,00	5.907.200,00	-	-	-	-			3,00	5.907.200	25,00	43,43	3,00	5.907.200	25,00	59,07	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat Peralatan dan Perlengkapan lainnya	1	368.269.000	0	300.000.000	0,60	339.322.096	12,00	300.101.813	3	224.687.541,00	3,00	2.000.000,00	-	-	-			6,00	226.687.541	50,00	75,54	6,80	566.009.637	1.650,00	188,67
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	60	716.218.000	24	322.308.000	36	301.809.000	12,00	301.805.200	3	114.115.150,00	3,00	65.281.150,00	-	-	-			6,00	179.396.300	50,00	59,44	42,00	481.205.300	175,00	149,30
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat-alat Peralatan dan Perlengkapan lainnya	60	215.280.000	24	120.000.000	36	15.520.356	12,00	15.520.194	3	4.561.282,00	-	-	-	-			3,00	4.561.282	25,00	29,39	39,00	20.081.638	162,50	16,73	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	Terpenuhiya bahan bacaan atau surat kabar pada Satpol PP	60	250.720.000	24	160.000.000	36	18.480.000	12,00	18.480.000				3,00	4.312.000,00	-	-	-		3,00	4.312.000	25,00	23,33	39,00	22.792.000	162,50	14,25
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya koordinasi kearsyasan dan keterlibatan lingkungan	1	3.390.112.000	0	1.504.800.000	0,60	355.850.000	12,00	399.520.000	3	218.663.600,00	3,00	84.577.900,00	-	-	-			6,00	313.241.000	50,00	78,40	6,80	669.091.000	1.650,00	44,46
													Rata-rata capaian kinerja (%)		45,00		61,91				765,00		94,00					
													Predikat kinerja		SR		SR											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.432.047.500	24 Bulan	19.648.132.000		38.057.290	100,00	8.659.129.904				2.252.584.439	-	-					3.557.406.939						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	60	336.532.000	24	163.132.000	36	38.057.290	12,00	30.346.800	3,00	4.705.000,000	3,00	7.466.000,00	-	-	-			6,00	12.171.000	50,00	40,11	42,00	50.228.290	175,00	30,79

Dinas Siber dan Informatika

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi/nya Pelayanan Kepada Masyarakat	60	47.095.515.000	24	19.485.000.000	36	-	12,00	8.628.793.104	3,00	1.300.117.500.000	3,00	2.245.118.439,00	-	-	-	6,00	3.545.235.939	50,00	41,09	42,00	3.545.235.939	175,00	18,19			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										50,00	40,60				175,00	24,49
Predikat kinerja																										SR	SR					
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Unit	2.269.506.600	100 persen	1.065.523.700	9	309.724.236	100,00 Persen	771.475.817																		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi/nya pemeliharaan mobil dinas jabatan	60	349.151.700	24	173.060.800	36	74.457.476	12,00	99.243.213	3	26.780.000.000	3,00	33.080.000.000	-	-	-	-	6,00	59.860.000	50,00	60,32	42,00	134.317.476	175,00	77,61		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi/nya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	60	1.626.933.000	24	668.030.000	36	235.266.760	12,00	468.580.604	3	45.549.000.000	3,00	175.921.626.000	-	-	-	-	6,00	221.470.626	50,00	47,26	42,00	456.737.386	175,00	68,37		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	1	281.421.900	0	212.432.900	0,60	-	100,00	106.144.000	3	8.310.000.000	3,00	4.400.000.000	-	-	-	-	6,00	12.710.000	6,00	11,97	6,60	12.710.000	1.650,00	5,98		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhi/nya pemeliharaan gedung kantor	12	12.000.000	12	12.000.000				97.508.000																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										35,33	39,85				1.000,00	75,98
Predikat kinerja																										SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																										38,88	52,90					
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum		100 persen	12.532.898.315	100 persen	2.709.000.000		1.192.455.984	100,00 Persen	1.475.762.029																		
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		150 Kip	6.472.618.200	45 Kip	2.709.000.000	15 Kip	541.696.000	40,00 kip	1.475.762.029																		
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Desku Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawalan	Terpenuhi/nya pengawasan lingkungan masyarakat dan pengamanan tempat penting dan hat/2 besar	60	1.744.925.000	24	550.000.000	36	143.310.000	12,00	527.780.532	3	43.821.656.000	3,00	242.904.090.000	-	-	-	-	6,00	286.725.746	50,00	54,33	42,00	430.035.746	175,00	78,19		
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terpenuhi/nya keterlibatan masyarakat dan meningkatkan PAD Kab.Kampar	60	3.057.380.000	24	1.600.000.000	36	193.391.000	12,00	685.278.566	3	132.972.169.000	3,00	206.571.793.000	-	-	-	-	6,00	339.543.962	50,00	49,55	42,00	532.934.962	175,00	33,31		
					Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Terbinanya Aparatur Satuan Perindungan masyarakat deskep deska kecamatan	1	727.533.200	24	355.000.000	0,60	-	100,00	99.032.405	3	14.157.070.000	3,00	21.299.416.000	-	-	-	-	6,00	35.456.486	6,00	35,60	6,60	35.456.486	27,50	9,99		
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Terlaksananya latihan dan ataksi marching band	60	353.980.000	24	204.000.000	36,00	37.375.000	12,00	163.670.526			3,00	64.014.061,00	-	-	-	-	3,00	64.014.061	25,00	39,11	39,00	101.389.061	162,50	49,70		
							60	588.800.000				167.620.000																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										32,75	44,70				136,00	42,80
Predikat kinerja																										SR	SR					
							100 persen	-	100 persen	-		225.015.000	100,00 persen	-																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										-	-					
Predikat kinerja																										SR	SR					
							20 Dokumen	6.060.280.115	8 Dokumen	-	4,00	425.744.984	4,00 Dokumen	-	-																	
							60	6.060.280.115			12,00	425.744.984																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										-	-					
Predikat kinerja																										SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																										32,75	44,70					
Predikat kinerja																										SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																										15.610.537.843						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																										35,87	48,80					
Predikat KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																										SR	SR					

Dinas Statistik/Padat/Perang

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Pelayanan Kepada Masyarakat	60	47.095.515.000	24	19.485.000.000	36	-	12,00	8.628.793.104	3,00	1.300.117.500.000	3,00	2.245.118.439,00	-	-	-	-	6,00	3.545.235.939	50,00	41,09	42,00	3.545.235.939	175,00	18,19																											
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	40,60																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
				Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Unit	2.289.596.600	100 persen	1.065.523.700	9	309.724.236	100,00 Persen	771.475.817																																											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya pemeliharaan mobil dinas jabatan	60	349.151.700	24	173.060.800	36	74.457.476	12,00	99.243.213	3	26.780.000.000	3,00	33.080.000,00	-	-	-	-	-	6,00	59.860.000	50,00	60,32	42,00	134.317.476	175,00	77,61																										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	60	1.626.933.000	24	668.030.000	36	235.266.760	12,00	468.580.604	3	45.549.000.000	3,00	175.921.626,00	-	-	-	-	-	6,00	221.470.626	50,00	47,26	42,00	456.737.386	175,00	68,37																										
				Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya peralatan kantor	1	281.421.900	0	212.432.900	0,60	-	100,00	106.144.000	3	8.310.000.000	3,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	6,00	12.710.000	6,00	11,97	6,60	12.710.000	1.660,00	5,98																										
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor	12	12.000.000	12	12.000.000				97.508.000																																											
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,33	39,85																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																																		
				Program Peningkatan Keterlambatan Dan Keterlambatan Umum		100 persen	12.532.898.315	100 persen	2.709.000.000		1.192.455.984	100,00 Persen	1.475.762.029																																											
				Penanganan Gangguan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		150 Klp	6.472.618.200	45 Klp	2.709.000.000		541.696.000	40,00 klp	1.475.762.029																																											
				Penanganan Gangguan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	Terpenuhiya pengawasan lingkungan masyarakat dan pengamanan tempat2 penting dan hari2 besar	60	1.744.925.000	24	550.000.000	36	143.310.000	12,00	527.780.532	3	43.821.656.000	3,00	242.904.090,00	-	-	-	-	-	6,00	286.725.746	50,00	54,33	42,00	430.035.746	175,00	78,19																										
				Perindakan atas Gangguan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penarbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terpenuhiya keterlambatan masyarakat dan meningkatkan PAD Kab.Kampar	60	3.057.380.000	24	1.600.000.000	36	193.391.000	12,00	685.278.566	3	132.972.169.000	3,00	206.571.793,00	-	-	-	-	-	6,00	339.543.962	50,00	49,55	42,00	532.934.962	175,00	33,31																										
				Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	Terbihnya Aparatur Satuan Perindungan masyarakat diselap desa/ kelurahan	1	727.533.200	24	355.000.000	0,60	-	100,00	99.032.405	3	14.157.070.000	3,00	21.299.416,00	-	-	-	-	-	6,00	35.456.486	6,00	35,80	6,60	35.456.486	27,50	9,99																										
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Terlaksananya latihan dan akses mardang band	60	353.980.000	24	204.000.000	36,00	37.375.000	12,00	163.670.526																																											
						60	888.800.000																																																	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		32,75	44,70																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																																		
						100 persen	-	100 persen	-	225.015.000	100,00 persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	225.015.000	-	-																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
						20 Dokumen	6.060.280.115	8 Dokumen	-	4,00	425.744.984	4,00 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
						60	6.060.280.115			12,00	425.744.984																																													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																																		
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		32,75	44,70																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																		
																						Predikat kinerja		SR	SR																															
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,87	48,80																															
																						Predikat kinerja		SR	SR																															

Data Sajian Realisasi Kinerja

7) Dinas Pemadam Kebakaran

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																									
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.																										
				13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100																																															
7		DINAS PEMADAM KEBAKARAN																																																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					66.078.206.518		7.882.415.878		11.193.679.038		438.005.564		3.821.030.125		-		-																																						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi administrasi keuangan perangkat daerah				57.060.274.670		2.322.312.900		2.227.563.572		351.855.564		1.183.814.189		-		-																																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD									251.083.000				26.851.000																																										
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	24 Bulan	57.037.714.670	-	-	2.306.119.900	12 Bulan	1.965.328.572	3,00	351.855.564		1.156.963.189	-	-	-	-	-	-	3,00	1.508.818.753	25,00	76,77	3,00	3.814.938.663	12,50	6,69																										
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Inspektori	-	-	-	7 Dok	12.000.000	-	-	10.913.000	7 Dok	5.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,94																				
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	21 kec	2.200.000.000		24 Bulan	10.560.000	-	-	5.280.000	12 Bulan	6.152.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8,33	25,59																																			
Predikat kinerja																					SR	SR																																			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan				267.954.000		133.977.000		426.187.301		-		45.910.500		-		-																																						
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya				100 Persen	267.954.000	-	-	133.977.000	100 Persen	369.047.250	-	-	45.910.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,13																			
		Mendidik dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi									40.117.146		-		-		-																																								
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan									17.022.905		-		-		-																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	12,44																																			
Predikat kinerja																					SR	SR																																			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				2.409.432.790		1.199.274.721		910.870.251				409.151.984		-		-																																						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Sistem Penerangan yang berguna Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	400.000.000	-	-	83.000.000	100 Persen	4.480.960		4.050.000.000		-		-																																						
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan AT K, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				12 Bulan	349.478.150	-	-	196.121.711	12 Bulan	78.216.024	3,00	28.329.035		37.884.262,00	-	-	-	-	-	-	3,00	66.013.297	25,00	84,40	3,00	262.135.008	25,00	75,01																										
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Perkantoran				12 Bulan	657.198.800	-	-	335.577.700	12 Bulan	546.745.573	3,00	21.600.000		263.410.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	285.010.000	25,00	52,13	3,00	620.587.700	25,00	94,43																										
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan guna Kelancaran Administrasi Perkantoran				12 Bulan	126.619.840	-	-	63.409.310	12 Bulan	54.957.694	3,00	32.458.397		13.838.095,00	-	-	-	-	-	-	3,00	46.296.482	25,00	84,24	3,00	109.705.802	25,00	86,64																										
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan guna Menambah Kelancaran Pelaksanaan Tugas				12 Bulan	32.400.000	-	-	4.500.000	12 Bulan	9.990.000		8.143.500,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,02																				

Dinas Pemadam Kebakaran

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	843.736.000	-	-	516.666.000	12 Bulan	216.480.000	3,00	18.685.149					82.026.127,00	-	-	-	-	3,00	100.711.276	25,00	46,52	3,00	617.377.276	25,00	73,17	
Rate-rata capaian kinerja (%)																									16,67	73,20		16,67	65,01					
Predikat kinerja																									SR	SR								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.631.124.194			851.048.097		-		-																		
				1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpenuhi Peralatan lainnya			100 Persen	446.663.554	-	-	276.615.777		-	-	-	-	-	-	-											276.615.777		61,93	
				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi Sarana dan prasarana Kantor			100 Persen	1.184.460.640	-	-	574.432.320		-	-	-	-	-	-	-											574.432.320		48,50	
Rate-rata capaian kinerja (%)																									-	-		-	55,21					
Predikat kinerja																									SR	SR								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.606.846.464			2.788.215.960		7.075.024.164																				
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya			100 Persen	13.920.000	-	-	6.960.000	100 Persen	5.430.000	3,00	700.000					1.800.000	-	-	-	-	3,00	2.500.000	3,00	46,04	3,00	9.460.000	3,00	67,96	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	110.596.000	-	-	54.273.700	12 Bulan	88.734.000	3,00	13.558.300					13.413.316	-	-	-	-	3,00	26.971.616	25,00	30,40	3,00	81.245.316	25,00	73,46	
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi Pelayanan Umum Perkantoran			12 Bulan	3.482.330.464	-	-	2.726.982.260	12 Bulan	6.980.860.164	3,00	1.253.072.366					1.937.116.936	-	-	-	-	3,00	3.190.189.302	25,00	45,70	3,00	5.917.171.562	25,00	169,92	
Rate-rata capaian kinerja (%)																									17,67	40,71		17,67	103,78					
Predikat kinerja																									SR	SR								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara				1.102.574.400			587.587.200		554.033.750																				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas										98.039.400							18.093.200	-	-	-	-		18.093.200	-	18,46	-	18.093.200	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya			12 Bulan	1.102.574.400			587.587.200	12 Bulan	437.770.000	3,00	86.150.000					202.350.000	-	-	-	-	3,00	288.500.000	25,00	65,90	3,00	876.087.200	25,00	79,46	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										18.224.350							9.380.000	-	-	-	-		9.380.000	-	51,47	-	9.380.000	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																									25,00	65,90		25,00	79,46					
Predikat kinerja																									SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																										11,28	36,31							
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.136.055.034			121.184.492		327.729.923							153.742.475													
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfaksanya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				1.136.055.034			121.184.492		232.427.960							153.742.475													
				1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya			12 Bulan	308.309.034			53.391.492	100 Persen	37.351.100	-	-					37.349.575,00	-	-	-	-		37.349.575	-	100,00	-	90.741.067	-	29,43	
														12.648.900																				
														11.988.180																				
																					6.727.900,00						6.727.900	-	100,00	-	6.727.900	-	-	
														38.941.800																				
																					38.650.000													

Dasar Pembiayaan Keadayaan

		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								12.672.000											12.652.000	-	99,84	-	12.652.000	-	-																		
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah			12 Bulan	827.746.000	67.793.000	100 Persen	100.100.100	-	-	97.013.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.013.000	-	96,92	-	164.806.000	-	19,91																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	62,00																					
																					Predikat kinerja		SR	SR																					
										23.997.332											11.998.102	-	-	-	-	-	-																		
										11.999.230											11.998.102	-	-	-	-	-	-																		
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab. Kampar							11.998.102											11.998.102	-	100,00	-	11.998.102	-	-																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	50,00																					
																					Predikat kinerja		SR	SR																					
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran								35.996.331											12.827.438	-	-	-	-	-	-																		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya pencegahan Kebakaran							11.997.438											7.097.438,00	-	59,16	-	7.097.438	-	-																		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	terlaksananya pembentukan balakar							11.999.507											5.730.000,00	-	47,75	-	5.730.000	-	-																		
										11.999.386											-	-	-	-	-	-	-																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	35,64																					
																					Predikat kinerja		SR	SR																					
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya pertolongan Kepada masyarakat							35.308.300											32.070.932	-	-	-	-	-	-																		
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan Penyelamatan bagi petugas pemadam							35.308.300											32.070.932	-	90,83	-	32.070.932	-	-																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	90,83																					
																					Predikat kinerja		SR	SR																					
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		-	59,62																					
																					Predikat kinerja		-	-																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.521.408.961											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		5,64	47,96																					
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR																					

Dasar Peningkatan Kebakaran

8) Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																														
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100	15=7+13	16=15*100	17														
8		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	242.620.000.000	37.682.200.172		19.898.518.081		8.195.059.791				3.166.174.779	-	-				4.498.104.372										
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Teranggarkan kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2021			131.005.570			71.487.974					7.200.000	-	-				43.420.124										
		Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah			7 Dokumen	25.010.370		7.825.185	7 Dokumen	22.136.474	7,00	22.136.474	-	-	-	-	-	7,00	22.136.474	100,00	100,00	7,00	29.961.659	100,00	119,80				
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkordinir dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	58.998.550		24.819.275	1 Dokumen	28.797.750	1,00	7.197.750	-	-	-	-	-	1,00	14.397.750	100,00	50,00	1,00	39.217.025	100,00	66,47				
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkordinir dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	15.700.200		3.173.570	1 Dokumen	6.885.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.173.570	-	20,21				
		4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terkordinir dan tersusunnya Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	15.700.200		3.170.100	1 Dokumen	6.885.900	1,00	6.885.900	-	-	-	-	-	1,00	6.885.900	100,00	100,00	1,00	10.056.000	100,00	64,05				
		5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terkordinir dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	15.598.250		3.118.125	1 Dokumen	6.781.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.118.125	-	19,99				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		60,00	50,00												60,00	58,10	
													Predikat kinerja		R	SR														
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel			100.000.000		7.553.190.174		3.560.577.844		3.219.235.127								1.805.582.119					5.366.159.963					
		Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN			28 Bulan	7.540.949.694	-	3.559.911.604	14 Bulan	3.218.031.827	3,00	434.779.086	5,00	1.369.599.733,00	-	-	-	8,00	1.804.378.819	57,14	56,07	8,00	5.364.290.423	28,57	71,14				
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun			5 Lap	100.000.000		666.240	1 Dokumen	1.203.300	1,00	1.203.300	-	-	-	-	-	1,00	1.203.300	100,00	100,00	2,00	1.869.540	200,00	15,27				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		78,57	78,04													114,29	43,20
													Predikat kinerja		R	R														
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.050.000.000		1.531.227.334		684.232.384		1.201.478.367		299.064.613		382.721.966		-	-		681.786.579									
		Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya Sarana Penerangan Bangunan Kantor dan Gudang			60 bin	250.000.000		18.103.140	12	9.051.570	12 Bulan	55.157.100	3,00	47.942.850	3,00	1.782.000,00	-	-	-	6,00	49.724.850	50,00	90,15	18,00	58.776.420	75,00	324,68		
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya dan lancarnya Pelaksanaan, Kebutuhan Peralatan Kerja di Kantor			60 bin	1.250.000.000		547.903.684	12	211.216.267	12 Bulan	656.377.291	3,00	125.438.030	3,00	283.355.062,00	-	-	-	6,00	408.793.092	50,00	62,28	18,00	620.009.359	75,00	113,16		
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Kampar			60 bin	350.000.000		150.793.760	-	53.373.130	12 Bulan	90.414.030	3,00	31.092.390	3,00	15.301.230,00	-	-	-	6,00	46.393.620	50,00	51,31	6,00	99.766.750	25,00	66,16		
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor			60 bin	400.000.000		25.087.550	12	14.701.817	12 Bulan	16.045.946	3,00	4.558.843	3,00	3.668.451,00	-	-	-	6,00	8.227.294	50,00	51,27	18,00	22.929.111	75,00	91,40		

Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Indikator : Masyarakat yang tangguh terhadap Bencana		70.500.000.000	891.712.768	116.698.184	328.197.120	19.350.700	134.037.920	-	-	153.388.620													
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	55 Keg	70.000.000.000	24 Bulan	747.988.470	12	56.436.035	12 Bulan	49.560.700	3,00	19.350.700	-	14.220.000,00	-	-	-	-	3,00	33.570.700	25,00	67,74	15,00	90.006.735	62,50	12,03
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	21 Kec	500.000.000	24 Bulan	143.724.298	12	60.262.149	12 Bulan	278.636.420	-	6,00	119.817.920,00	-	-	-	-	-	6,00	119.817.920	50,00	43,00	18,00	180.080.069	75,00	125,30
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	43,00			75,00	125,30	
Predikat kinerja																			SR	SR					
Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Indikator : Masyarakat yang Tangguh terhadap Bencana		4.450.000.000	8.450.775.738	5.162.040.125	1.441.000.700	149.492.850	943.121.050	-	-	1.092.613.900													
	Sub Kegiatan 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60 Bln	1.000.000.000	480 Relawan	-	12	492.048.540	240 Relawan	210.993.790	40,00	74.868.280	40,00	107.808.710,00	-	-	-	-	80,00	182.676.990	33,33	86,58	92,00	674.725.530	19,17	#DIV/0!
	2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			8 Unit	113.700.000	-	56.850.000	4 Unit	31.460.000		-								-	-	-	-	56.850.000	-	50,00
	3. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			44 Paket	7.657.341.040	9	4.273.274.236	22 Paket	1.035.164.570	-	69.724.570	21,00	711.760.000,00	-	-	-	21,00	781.484.570	95,45	75,49	30,00	5.054.758.806	68,18	66,01	
	4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40 Bln	3.450.000.000	24 Bulan	679.734.698	21	339.867.349	12 Bulan	163.382.340	3,00	4.900.000	3,00	123.552.340,00	-	-	-	6,00	128.452.340	50,00	78,62	27,00	468.319.689	112,50	68,90	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44,70	78,62			49,96	68,90	
Predikat kinerja																			SR	SR					
Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Indikator : Tercapainya Kebutuhan Makan Bagi Korban Bencana/Pengungsi dan Aparatur PB yang Tangguh, Tangkas dan Tangguh		2.500.000.000	603.437.046	62.817.636	91.332.650	6.900.000	59.057.450	-	-	65.957.450													
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	350 Kejadian	2.500.000.000	24 Bulan	603.437.046	-	62.817.636	12 Bulan	91.332.650	3,00	6.900.000	3,00	59.057.450,00	-	-	-	6,00	65.957.450	50,00	72,22	6,00	128.775.086	25,00	21,34	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	72,22			25,00	21,34	
Predikat kinerja																			SR	SR					
Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Indikator : Perda PB di Kabupaten Kampar		1.000.000.000	365.685.872	215.289.192	132.788.225	37.430.000	15.540.000	-	-	52.970.000													
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24 Bulan		24 Bulan	216.537.176	-	105.874.348		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.874.348	-	48,89
	2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perencanaan serta Terevaluasinya kegiatan PB	8 Lap	1.000.000.000	24 Bulan	149.148.696	12	109.414.844	12 Bulan	132.788.225	1,00	37.430.000	3,00	15.540.000,00	-	-	-	4,00	52.970.000	33,33	39,89	16,00	162.384.844	66,67	108,87	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			33,33	39,89			33,33	108,87	
Predikat kinerja																			SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																			44,51	58,43					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			10.188.378.486				5.863.034.342		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			49,41	52,51					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			SR	SR					

Dinas Bina Pengulangan Bencana Daerah

9) Dinas Sosial

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																		
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
				13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100																								
9		DINAS SOSIAL																																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.939.800	100 persen	14.965.206		7.055.740	100 persen	6.836.500,575					2.507.619,766		-		-															
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1.364.109	100 persen	655.000	395.496	100 persen	405.389,947					70.529,500																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terfaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar mulai dari Renstra, RKU, Musrenbangkab, Forum Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, RKPD, Renja, Renja Perubahan, serta dokumen dokumen perencanaan lainnya	35 Dok	1.324.109	14 Dok	380.000	7 Dok	335.211,878	7 Dok	374.410,244	2,10	57,030,00	1,75	78.965,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	135,996	55,00	36,32	10,85	471,208	77,50	124,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terfaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	- Tahun	-	2 Tahun	140.000	- Tahun	17.821,804	1 Tahun	15.397,843	1,00	11.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11,071	100,00	71,90	1,00	28,893	50,00	20,64			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terfaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kampar			2 Tahun	55.000	-	10.043,029			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,043	-	18,26			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terfaksananya koordinasi dan percekakan DPA Dinas Sosial Kabupaten Kampar			2 Tahun	30.000	-	14.806,708	1 Tahun	2.728,740	1,00	2.428,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,429	100,00	89,00	1,00	17,235	50,00	57,45			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terfaksananya koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kampar			2 Tahun	35.000	-	10.036,868			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,037	-	28,88			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	40.000	2 Laporan	15.000	1 Laporan	7.575,390	1 Laporan	12.853,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7,575	50,00	50,50			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				42,50	32,87				37,92	49,92								
Predikat kinerja																				SR	SR													
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	30.000		7.551.536		3.754.871	100 persen	3.592.039,645		524.705,107		1.239.994,471																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kampar akuntabel			2 Tahun	7.536.536	- Tahun	3.749.883,106	1 Tahun	3.578.384,125	0,25	524.705,11	0,25	1.239.994,47	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1.764.700	50,00	49,32	0,50	5.514,583	25,00	73,17			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terfaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan dan laporan tahunan akhir tahun yang akuntabel	5 Laporan	30.000	2 Laporan	15.000	1 Laporan	4.987,520	1 Tahun	13.655,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4,988	50,00	33,25			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25,00	24,86				37,50	53,21								
Predikat kinerja																				SR	SR													

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Penuhuan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.060.127	100 persen	1.671.670	100 persen	535.720	100 persen	562.480,628			327.352,351	-	-	-	395.526								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 Tahun	49.747	2 Tahun	17.670	1 Tahun	14.758,179					-	-	-	-	-	-	1,00	14.758	50,00	83,52			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pengadaan Komputer PC/Note Book dan perengkapannya serta peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	459.539	2 Tahun	340.000	1 Tahun	199.351,954	1 Tahun	342.985,308	0,40	21.948,50	0,50	285.651,15	-	-	-	0,90	307.600	89,68	89,68	1,90	506,952	94,84	149,10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minum rapat harian dan tamu	5 Tahun	231.855	2 Tahun	110.000	1 Tahun	37.180,000	1 Tahun	20.400,000	0,65	12.470,00	0,10	1.600,00	-	-	-	0,75	14.070	75,00	68,97	1,75	51,250	87,50	46,59
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan serta pengadaan agar lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	5 Tahun	171.006	2 Tahun	100.000	1 Tahun	30.239,165	1 Tahun	18.079,320	0,40	6.074,10	0,20	2.909,00	-	-	-	0,60	8.983	60,00	49,69	1,60	39,222	80,00	39,22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	147.980	2 Tahun	52.000	1 Tahun	13.629,000	1 Tahun	17.280,000	0,25	2.601,00	0,25	2.601,00	-	-	-	0,50	5.202	50,00	30,10	1,50	18,831	75,00	36,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi di dalam dan luar daerah serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	5 Tahun	2.000.000	2 Tahun	1.052.000	1 Tahun	240.562,000	1 Tahun	163.736,000	0,25	25.080,00	0,30	34.591,20	-	-	-	0,55	59.671	55,00	36,44	1,55	300,233	77,50	28,54
Rata-rata capaian kinerja (%)																		54,95	45,81		77,47	63,87			
Predikat kinerja																		SR	SR						
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.419.350		1.437.000		732.016	100 persen	630.050.500			581.500.000	-	-	-	581.500.000								
	Pengadaan Kendaraan Dinas									550.000,000	-		502.100,00	-	-	-	-	502.100	-	91,29	-	502.100	-	-	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebeleur Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	5 Tahun	769.350	2 Tahun	334.000	1 Tahun	54.900,000	1 Tahun	80.050,500	0,10		0,50	79.400,00	-	-	-	0,60	79.400	60,00	99,19	1,60	134,300	80,00	40,21
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Puskessos di Kabupaten Kampar	3 Paket	650.000	2 Paket	1.103.000	1 Paket	677.115,560			0,05		-	-	-	-	0,05	-	-	-	1,05	677,116	52,38	61,39	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20	63,492766		66,19	50,80			
Predikat kinerja																		SR	SR						
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.023.973	24 Bulan	2.245.000		1.163.586	100 Persen	1.092.855.000			232.241,194	-	-	-	478.142								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelayanan administrasi	5 Tahun	1.023.973	3 Tahun	345.000	1 Tahun	204.405,955	1 Tahun	154.185,000	0,25	24.148,243	0,25	25.653,69	-	-	-	0,50	49.802	50,00	32,30	1,50	254,208	50,00	73,68
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, masyarakat, kebersihan kantor, serta terjaminnya keamanan dan aset di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor Loka Bina Karya, Rumah Dinas dan Kantor PKH			84 Orang	1.900.000	- Orang	959.180,000	42 Orang	938.670,000	10,50	221.752,500	39,50	206.587,50	-	-	-	50,00	428.340	119,05	45,63	50,00	1.387,520	59,52	73,03
Rata-rata capaian kinerja (%)																		84,52	38,97		54,76	73,36			
Predikat kinerja																		SR	SR						

Dinas Sosial

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintah daerah	9 Unit	2.042.321	100 persen	1.345.000	9	474.052	100 Persen	553.684.855														47.565.950	-	-	-	57.546				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas / mobil jabatan	10 Unit	503.280	6 Unit	175.000	2 Unit	132.366.900	2 Unit	78.705.000	0,50	5.592.150	0,05	24.783,70	-	-	-	-	0,55	30.376	27,50	38,59	2,55	162.743	42,50	93,00						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / mobil Operasional	30 Unit	750.000	30 Unit	396.000	6 Unit	215.531.950	6 Unit	96.042.530	1,50	3.138.300	1,80	20.232,25	-	-	-	-	3,30	23.371	55,00	24,33	9,30	238.903	31,00	60,33						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran perbaikan peralatan dan mesin kerja sehingga dapat berfungsi dengan baik	5 Tahun	164.041	3 Tahun	59.000	1 Tahun	45.049.563	1 Tahun	9.196.825	0,30	1.250.000	0,20	2.550,00	-	-	-	-	0,50	3.800	50,00	41,32	1,50	48.850	50,00	82,80						
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	4 Paket	625.000	3 Paket	715.000	1 Paket	81.103.560	1 Paket	369.740.500				0,25		-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	1,25	81.104	41,67	11,34					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		39,38	26,06			41,29	61,87								
																				Predikat kinerja		SR	SR												
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		44,39	38,64												
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang Menangani PMKS	150 Klp	11.712.630	45 Klp	9.830.000	15 Klp	3.363.315	40 Klp	3.997.454.817		665.074.500		1.138.663.356	-	-	-	-	1.803.738													
				PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATENKOTA	Meningkatnya SDM PSKS di Kabupaten Kampar		11.712.630		9.830.000		3.363.315		3.997.454.817		665.074.500		1.138.663.356	-	-	-	-	1.803.738													
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat	325 Orang	5.610.421	134 Orang	1.340.000	67 Orang	536.696.734	67 Orang	534.693.550	16,75	28.979.000	16,75	187.891,50	-	-	-	-	33,50	216.871	50,00	40,56	100,50	753.567	75,00	56,24						
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Kampar	110 Orang	1.713.113	42 Orang	745.000	21 Orang	275.958.106	21 Orang	251.103.433	5,25	30.636.500	5,25	68.040,00	-	-	-	-	10,50	98.677	50,00	39,30	31,50	374.635	75,00	50,29						
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pendamping serta Operator PKH	635 Orang	4.389.096	254 Orang	2.100.000	127 Orang	822.993.823	115 Orang	796.901.088	29,00	28,75	274.172,50	-	-	-	-	57,75	274.173	50,22	34,40	184,75	1.097.166	72,74	52,25							
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Meningkatnya PSKS Kelembagaan serta Terlaksananya Pelayanan PMKS oleh Lembaga Puskesmas melalui SLRT di Kabupaten Kampar	-	-	2 Tahun	5.500.000	Tahun	1.727.665.982	1 Tahun	2.414.756.746	0,26	605.459.000	0,29	608.559,36	-	-	-	-	0,55	1.214.018	55,00	50,27	0,55	2.941.684	27,50	53,49						
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya SDM dan Kinerja LK3 di Kabupaten Kampar			30 Orang	145.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		41,04	32,91			50,05	42,45								
																				Predikat kinerja		SR	SR												
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		41,04	32,91												
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	20 Dokumen	3.888.247	8 8 Dokumen	1.775.500	4	579.820	4 Dokumen	425.380.003	-	25.103.000	12,600	304.905.000	-	-	-	-	12,60	330.008												

Dasar Sosial

PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Jumlah Korban Bencana yang Terjadi		3.445.457		3.405.000		1.753.840		638.533.896		15.633.000		177.630.000		-	-	-	-	193.263										
	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL KABUPATENKOTA	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana		1.220.000		2.245.000		1.180.658		324.503.920		8.712.000		44.630.000		-	-	-	-	53.342										
	Penyediaan Makanan	Terdapatnya Bantuan Logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	5 Tahun	420.000	2 Tahun	400.000	1 Tahun	20.850.938				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.851	50,00	5,21						
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terbangunnya tempat pengungsian korban bencana alam dan bencana sosial di lokasi daerah rawan bencana			2 Tahun	1.500.000	- Tahun	1.051.050.000	1 Tahun	227.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051.050	-	70,07						
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar	5 Tahun	800.000	2 Tahun	345.000	1 Tahun	108.757.179	1 Tahun	96.703.920	0,25	8.712.000	0,35	44.630,00	-	-	-	-	0,60	53.342	60,00	55,16	1,60	162.099	80,00	46,99				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				20,00	18,39	130,00		122,27						
Predikat kinerja																				SR	SR									
	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATENKOTA	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	60,00	2.225.457		1.160.000	12	573.182		314.029.976		6.921.000		133.000.000		-	-	-	-	139.921										
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana oleh anggota Tagana Kabupaten Kampar serta meningkatnya SDM anggota Tanaga Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	350 Orang	2.225.457	140 Orang	1.160.000	70 Orang	573.181.956	70 Orang	314.029.976	17,50	6.921.000	17,50	133.000,00	-	-	-	-	35,00	139.921	50,00	44,56	105,00	713.103	75,00	61,47				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	44,56	75,00		61,47						
Predikat kinerja																				SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																				35,00	31,47									
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	60	3.398.800		845.000	12	666.546		597.464.820		234.481.800		68.543.100		-	-	-	-	303.025										
	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATENKOTA	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1	3.398.800	1	845.000	-	666.546	1	597.464.820	-	234.481.800		68.543.100		-	-	-	-	303.025										
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	20 Makam	3.398.800	4 Makam	445.000	12 Makam	115.183.479				-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	115.183	300,00	25,88						
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan			2 Makam	150.000	Makam	483.843.876	1 Makam	527.144.540	0,60	216.475.800		50.024,10	-	-	-	-	0,60	266.500	60,00	50,56	0,60	750.344	30,00	500,23				
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaganya keamanan dan ketertiban di Makam Pahlawan			2 Makam	250.000	Makam	67.519.051	1 Makam	70.320.280	0,26	18.006.000	0,29	18.519,00	-	-	-	-	0,55	36.525	55,00	51,94	0,55	104.044	27,50	41,62				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				38,33	34,17	119,17		189,24						
Predikat kinerja																				SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																				38,33	34,17									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				12.998.003.843		6.407.657.422								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				48,27	48,42									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				SR	SR									

Dinas Sosial

II. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																			
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100																	
10		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA																																	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tertindakannya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		4.123.080	100 persen	1.229.232	1.137.432	100 persen	1.493.830.392	-		317.754	-	-						317.754														
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tertindakannya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 persen	4.123.080	100 persen	1.229.232	1.137.432	100 persen	1.493.830.392	-		317.754	-	-						317.754														
		1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		100	2.073.080	40,00	729.232	16,00	26.407.928	16 orang	389.556.368	-	-	-	42.930,00	-	-	-	-	-	42.930	-	11,02	16,00	69.338	40,00	9,51								
				60	100.000	-	-	12,00	6.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	6.537	-	-								
				15	975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tertindakannya pengadaan sarana pelatihan kerja	6	975.000	6,00	500.000	1,00	1.104.488	5 paket	1.104.274.024	-	-	-	274.824,00	-	-	-	-	-	274.824	-	24,89	1,00	1.379.312	16,67	275,86								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	17,95			28,33	142,69								
																				Predikat kinerja		SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																																			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar	-	1.125.000		1.817.400	129.733	100 persen	170.350.094	-		51.480.000	-	-						51.480														
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar	100	375.000	100	150.000	100	73.699	100	102.108.840	22,28	-		33.890.000	-	-			22,28	33.890														
		1. Perluasan Kesempatan Kerja	Tertindakannya perluasan kesempatan kerja	105	375.000	42 Kec	150.000	12	73.699.063	12	102.108.840	3,00	-	3,00	33.890,00	-	-	-	6,00	33.890	50,00	33,19	18,00	107.589	42,86	71,73									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	32,19			42,86	71,73								
																				Predikat kinerja		SR	SR												
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar	100 persen	750.000	100 persen	1.667.400	56.034	100 persen	68.241.254	-		17.590.000	-	-						17.590														
		1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tertindakannya aplikasi informasi pasar kerja online	5	375.000	2	150.000	-	23.119.292	12	31.399.770	3,00	-	3,00	2.640,00	-	-	-	6,00	2.640	50,00	8,41	6,00	25.759	300,00	17,17									
		2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tertindakannya informasi pasar kerja	105	375.000	42	1.517.400	-	32.914.521	12	36.841.484	3,00	-	3,00	14.950,00	-	-	-	6,00	14.950	50,00	40,58	6,00	47.865	14,29	3,15									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	8,41			300,00	17,17								
																				Predikat kinerja		SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																																			
		Program Hubungan Industrial	Tertindakannya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial	100 persen	2.000.000		1.099.560	245.588	100 persen	495.349.001	-		175.637.600	-	-						123.960														
		Pengawasan Penurunan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial	100	1.000.000	100	381.760	100,00	99.197	100	297.306.114	-	-		94.367.600	-	-	-	-	-	42.690														

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

	1. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerjasama yang terdaftar	15	1.000.000	8	381.760	3.00	99.197.057	15	89.412.210	1,00	-	3,00	42.690.000	-	-	-	4,00	42.690	26,67	47,75	7,00	141.887	87,50	37,17	
	2. Penyelenggaraan Pendapatan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja			1	93.847		90.997.268	1	207.893.904	-	-	-	51.677.60	-	-	-	-	51.678	-	24,86	-	142.675	-	152,03	
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				13,33	36,30			43,75	94,60
	Predikat kinerja																				SR	SR				
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial		1.000.000	24 Bulan	717.800		146.391	100 Persen	198.042.887				81.270.000					81.270							
	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang difasilitasi	150	1.000.000	150	420.000	30,00	40.319.418	50	51.326.905	10,00	-	10,00	17.350.000	-	-	-	20,00	17.350	40,00	33,80	50,00	57.669	33,33	13,73	
	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan			100	228.587		103.073.295	50	107.409.470		-	15,00	57.600.000	-	-	-	15,00	57.600	30,00	53,63	15,00	160.673	15,00	70,29	
	3. Penyelenggaraan Vertifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afilias	Jumlah serikat pekerja yang difasilitasi			30	69.214		2.998.551	15	39.306.512		-	2,00	6.320.000	-	-	-	2,00	6.320	13,33	16,08	2,00	9.319	6,67	13,46	
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				27,78	34,50			18,33	32,49
	Predikat kinerja																				SR	SR				
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																				20,56	35,40				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	20.463.872	100 persen	11.944.376		9.421.971	100,00 Persen	6.931.866.283			1.165.040.719	2.328.934.769					4.165.712							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	526.745	2	489.455	-	240.205	dokumen	269.459.260			9.542.000	54.710.100					64.252							
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan SKPD	1	6.645	2 Dokumen	107.599	-	155.776	1 Dokumen	150.264.840		2.480.000	-	49.160.10	-	-	-	-	51.640	-	34,37	-	207.416	-	192,77	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	105	500.000	2 Dokumen	260.000	21,00	5.522	1 Dokumen	2.679.680		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	5.522	1.050,00	2,12	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA perubahan SKPD			2 Dokumen	12.964		6.290	1 Dokumen	3.379.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290	-	48,52	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	5.902			1 Dokumen	2.779.620		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA perubahan SKPD			2 Dokumen	5.902			1 Dokumen	1.878.420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LK/JP SKPD	5	20.100	2 Dokumen	6.700	1,00	7.229	1 Dokumen	8.527.800		7.062.000	-	-	-	-	-	-	7.062	-	82,81	1,00	14.291	50,00	213,30	
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan			2 Dokumen	90.388		65.389	1 Dokumen	99.949.100		-	-	5.550.000	-	-	-	-	5.550	-	5,55	-	70.939	-	78,48	
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	17,53			550,00	267,59
	Predikat kinerja																				SR	SR				

Dinas Pendapatan dan Tenaga Kerja

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	48.600		7.425.513		3.774.552		3.402.109.217		824.040.096		1.252.389.659		-	-		2.076.430																														
			1. Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia gaji dan tunjangan ASN			12,00 Bulan	7.409.313		3.767.838.215		12 Bulan	3.391.833.217		819.980.096	3,00	1.252.389.66	-	-	-	-	3,00	2.072.370	25,00	61,10	3,00	5.840.208	25,00	78,82																						
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedia laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	28.500	2,00 Dokumen	9.500	1,00	4.050		1 Dokumen	7.513.000		4.060.000	-	-	-	-	-	-	-	4.060	-	54,04	1,00	8.110	50,00	85,37																						
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedia laporan keuangan semesteran SKPD	5	20.100	2,00 Dokumen	6.700	1,00	2.664.220		1 Dokumen	2.763.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.664	50,00	39,76																							
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	8,33	38,38																								41,67	67,99			
																					Predikat kinerja	SR	SR																												
			Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	375.000	100 persen	-		-	100,00 Persen	32.100.000																																							
			1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang diingkatkan kompetensinya	50	375.000	20 Orang		2,00			10 Orang	32.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00		-	10,00	#DIV/0!																						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00																									10,00	#DIV/0!		
																					Predikat kinerja	SR	SR																												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	4.381.032	100 persen	1.476.046		520.535	100 persen	730.661.938		51.304.210		114.835.373							166.140																												
			1. Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60	28.458	24 Bulan	9.698	1,00	3.688.150		12 Bulan	3.650.400		606	-	-	-	-	-	-	-	606	-	16,61	1,00	4.295	4,17	44,28																						
			2. Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	60	445.023	24 Bulan	150.000	12,00	75.983.298		12 Bulan	76.486.268		8.425	3,00	18.590,00	-	-	-	-	3,00	27.015	25,00	35,32	15,00	102.998	62,50	68,67																						
			3. Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Tersedia bahan logistik kantor	60	381.875	24 Bulan	127.350	12,00	84.745.510		12 Bulan	78.446.510		6.809	3,00	15.465,00	-	-	-	-	3,00	22.274	25,00	28,39	15,00	107.019	62,50	84,04																						
			4. Penyelesaian Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedia barang cetak dan pengandaan kantor	60	156.286	24 Bulan	52.142	12,00	21.685.550		12 Bulan	27.475.760		3.604	3,00	6.773,60	-	-	-	-	3,00	10.378	25,00	37,77	15,00	32.063	62,50	61,49																						
			5. Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	141.890	24 Bulan	48.356	-	10.920.000		12 Bulan	10.920.000		-	3,00	2.772,00	-	-	-	-	3,00	2.772	25,00	25,38	3,00	13.692	12,50	28,31																						
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	3.227.500	24 Bulan	1.088.500	12,00	323.512.000		12 Bulan	533.683.000		31.860	3,00	71.234,77	-	-	-	-	3,00	103.095	25,00	19,32	15,00	426.607	62,50	39,19																						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	20,83	27,13																									44,44	54,33		
																					Predikat kinerja	SR	SR																												
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	950.000	100 persen	300.000		181.760	100 persen	600.551.796				179.319.000						179.319																													
			1. Pengadaan Mebel	Tersedia mebel kantor	80	750.000	40	150.000	-	-		1	196.402.164		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	11	200.000	24	150.000	-	181.759.773		1	404.149.632		-	-	179.319,00	-	-	-	-	-	179.319	-	44,37	-	361.079	-	240,72																						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	44,37																									-	120,36		
																					Predikat kinerja	SR	SR																												
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	4.896.995	100 persen	870.162		1.698.141	100 persen	1.312.609.812		255.854.513		295.879.825						551.734																													
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	511.000	24	210.000	12,00	106.596.000		12	106.596.000		17.897.013	3,00	25.171,37	-	-	-	-	3,00	43.068	25,00	40,40	15,00	149.664	62,50	71,27																						

Diastatistikan tenaga kerja

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa layanan umum kantor	60	1.855.405	24	660.162	12,00	1.048.020.000	12	1.206.013.812	237.957.500	3,00	270.708,45	-	-	-	3,00	508.666	25,00	42,18	15,00	1.556.686	62,50	235,80																					
							60	2.530.500	-	-	12,00	543.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	543.525	-	-																					
							0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	41,29																							62,50	153,54		
Predikat kinerja																						SR	SR																										
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	1.741.500		382.000		720.114		584.494,260		24.299,900		431.800,812	-	-	-		456.101																										
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas	60	985.500	8	330.000	12,00	128.031,410	12	124.671,410	21.064,900	3,00	37.398,80	-	-	-	3,00	58.464	25,00	46,89	15,00	186.495	187,50	56,51																					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60	156.000	24	52.000	12,00	281.592,850	12	459.822,850	3.235,000	3,00	394.402,01	-	-	-	3,00	397.637	25,00	86,48	15,00	679.230	62,50	1.306,21																					
							60	600.000	-	-	2,00	310.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	310.490	-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	66,69																								125,00	681,36	
Predikat kinerja																						SR	SR																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																						11,31	33,63																										
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.544.000	100 persen	1.001.200		2.286.663	100 persen	3.154.440,534		-		671.736,696	-	-	-		671.737																											
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.544.000		1.001.200		2.286.663		3.154.440,534		-		671.736,696	-	-	-		671.737																											
					1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	60	2.500.000	40	600	14,00	615.804,716	12	319.290,560	-	3,00	30.652,00	-	-	-	3,00	30.652	25,00	9,60	17,00	646.457	42,50	107.742,79																					
					2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana industri	10	1.000.000	100	600	2,00	1.006.377,179	12	834.883,650	-	3,00	446.699,00	-	-	-	3,00	446.699	25,00	53,50	5,00	1.453.076	5,00	242.179,36																					
					3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	12	750.000	40	1.000.000	2,00	664.481,434	12	2.000.266,324	-	-	194.385,70	-	-	-	-	194.386	-	9,72	2,00	858.867	5,00	85,89																					
							40	2.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
							80	452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
							50	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
							0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						16,67	24,27																								17,50	116.669,35	
Predikat kinerja																						SR	SR																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																						16,67	24,27																										
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	546.700	100 persen	300.000		84.630	100 persen	129.162,322		-		22.601,000	-	-	-		22.601																											
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	100	546.700	100	300.000	100,00	84.630	100	129.162,322	-	-	22.601,000	-	-	-	-	22.601	-	17,50	100,00	107,231	100,00	35,74																					
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IUI serta pemenuhan komitmen IUI	105	546.700	120	300.000	10,00	84.630,364	12	129.162,322	-	3,00	22.601,00	-	-	-	3,00	22.601	25,00	17,50	13,00	107,231	10,83	35,74																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	17,50																									10,83	35,74
Predikat kinerja																						SR	SR																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																						25,00	17,50																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	17,50																										
Predikat kinerja																						SR	SR																										

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Ruang Lingkup Kabupaten Kampar	100 persen	180.000		500.000		57.090		112.751.896		-		21.010.000	-	-				21.010										
					Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Ruang Lingkup Kabupaten Kampar	100	180.000	100	500.000	100,00	57.090	100		112.751.896	15,53	-		21.010.000	-	-				21.010									
					1. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten kampar	3	180.000	2	250.000	1,00	57.089.757	1		46.432.456		-	-	21.010,00	-	-	-	-	-	21.010	-	45,25	1,00	78,100	50,00	31,24			
					2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	Terlaksananya diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten kampar	0	-	2	250.000	-	-	1		66.319.440		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															Rata-rata capaian kinerja (%)												-	22,62			25,00	15,62		
															Predikat kinerja												SR	SR						
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7												-	22,62						
															JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												12.487.870.522			5.374.253.880				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												17,65			24,60				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												SR			SR				

Dasar Penguasaan Tenaga Kerja

2) Dinas Ketahanan Pangan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																											
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHAN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																																			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																	
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
11		DINAS KETAHANAN PANGAN																																																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																																									
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																																									
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	Bln	99.500.000	36	Bln	70.400.000	36	Bln	19.800.000	100 %	19.800.000	100,00	7.292.600	25,00	4.950.000,00	-	-	-	-	125,00	12.242.600	125,00	61,83	161,00	32.042.600	447,22	45,52																													
		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas									100 %	2.946.298.809	24,99	377.485.194	30,51	946.422.011,00	-	-	-	-	55,50	1.323.907.205	55,50	44,93	55,50	4.306.164.329	-	-																														
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas	60	Bln	696.896.600	48	Bln	607.521.600	48	Bln	346.965.000	100 %	346.633.840	7,69	6.351.200	23,79	77.183.460,00	-	-	-	-	31,48	83.534.660	31,48	24,17	79,48	430.499.660	165,58	70,86																													
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terservicenyanya peralatan kerja	24	Bln	43.000.000,00	24	Bln	43.000.000,00	24	Bln	10.696.350	100 %	17.193.000			37,67	5.994.000,00	-	-	-	-	37,67	5.994.000	37,67	34,86	61,67	16.690.350	256,96	38,81																													
		5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24	Bln	210.000.000	24	Bln	210.000.000	24	Bln	227.309.031	100 %	205.182.645			20,85	44.977.103,00	-	-	-	-	20,85	44.977.103	20,85	21,92	44,85	272.286.134	186,87	129,66																													
		6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24	Bln	24.886.250	24	Bln	24.886.250	24	Bln	8.898.283	100 %	7.550.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	8.898.283	100,00	35,76																													
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	108.180.090	48	Bln	99.168.390	36	Bln	16.494.615	100 %	19.639.740	25,00	2.705.676	24,99	5.074.183,00	-	-	-	-	49,99	7.779.859	49,99	39,61	85,99	24.274.474	179,15	24,48																													
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	60	Bln	99.649.800	36	Bln	81.074.800	36	Bln	19.764.000	100 %	19.764.000			25,00	9.774.000,00	-	-	-	-	25,00	9.774.000	25,00	49,45	61,00	29.538.000	169,44	36,43																													
		9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan snack rapat staf	60	Bln	902.850.000	48	Bln	835.600.000	36	Bln	23.592.600	100 %	26.330.000	25,00	6.351.200	27,00	7.132.740,00	-	-	-	-	52,00	13.483.940	52,00	51,21	88,00	37.076.540	183,33	4,44																													
		10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rakor dan konsultasi yang diikuti	60	Bln	1.924.896.800	48	Bln	1.360.296.800	36	Bln	167.732.000	100 %	161.854.000	25,00	8.085.000	-	30.065.000,00	-	-	-	-	25,00	38.120.000	25,00	23,55	61,00	205.852.000	127,08	15,13																													
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	24	Bln	420.000.000	24	Bln	420.000.000	-	Bln	62.200.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.200.000	-	14,81																														
		12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	5	Unit	318.904.600	5	Unit	283.740.000	3	Unit	32.794.415	100 %	37.676.915	16,67	4.549.150,00	54,04	9.510.147,00	-	-	-	-	70,71	14.059.297	70,71	37,32	73,71	46.853.712	1.474,20	16,51																													
		13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	5	Unit	173.434.300	5	Unit	141.952.150	3,00	Unit	26.503.423	100 %	29.942.973	8,33	1.874.250,00	39,00	6.362.984,00	-	-	-	-	47,33	8.237.234	47,33	27,51	50,33	34.740.657	1.006,60	24,47																													
		14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	140	Dokumen Laporan	52.560.000	120	Dokumen Laporan	43.560.000	120	Dokumen Laporan	4.330.775	100 %	4.054.475	100,00	4.054.475,00	-	-	-	-	-	100,00	4.054.475	100,00	100,00	220,00	8.385.250	183,33	19,25																														
		15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	100	Dokumen Laporan	52.560.000	80	Dokumen Laporan	43.560.000	120	Dokumen Laporan	3.345.076	100 %	3.378.736	100,00	3.378.736,00	-	-	-	-	-	100,00	3.378.736	100,00	100,00	220,00	6.723.812	275,00	15,44																														
		16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2	Dokumen	18.940.000,00	2	Dokumen Laporan	18.940.000,00	2,00	Dokumen Laporan	78.447.908	100 %	68.517.908	37,50	16.427.850,00	-	-	-	-	-	37,50	16.427.850	37,50	23,98	39,50	94.875.758	1.974,75	500,93																														
																						Rate-rata capaian kinerja (%)		48,63	40,02																																		
																						Predikat kinerja		SR	SR																																		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		48,63	40,02																																		

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

Program Penanganan Kerawanan Pangan														1.102.871.500	867.300.000	78.894.725	73.105.475	-	25.615.550	-	-	25.615.550													
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan														1.102.871.500	867.300.000	78.894.725	73.105.475	-	25.615.550	-	-	25.615.550													
Indikator Tersusunnya Peta Kerentanan dan Rawan Pangan														1.102.871.500	867.300.000	78.894.725	73.105.475	-	25.615.550	-	-	25.615.550													
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														76 Kecamatan	61 Kecamatan	867.300.000	63 Kecamatan	78.894.725	100 %	73.105.475,00	-	42,04	25.615.550,00	-	-	-	42,04	25.615.550	42,04	35,04	105,04	104.510,275	172,20	12,05	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		42,04	35,04																		
														Predikat kinerja		SR	SR																		
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		42,04	35,04																		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														5.573.016.926	5.418.222.426	2.263.777.252	2.842.336.251	79	204.678.700	-	-	204.678.700													
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														1.892.118.255	1.892.118.255	519.976.413	171.088.243	79	84.527.185	-	-	84.527.185													
Stabilnya harga dan stok pangan																																			
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan														63 Kecamatan	63 Kecamatan	296.758.500	- Kecamatan	35.995.588	100 %	34.643.242	33,13	11.477.250,00	-	-	-	33,13	11.477.250	33,13	33,13	33,13	47.472.838	52,59	16,00		
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan NERICA Bahan Makanan														63 Kecamatan	84 Kecamatan	770.056.140	42 Kecamatan	146.753.825	100 %	136.445.001	45,68	73.049.935,00	-	-	-	45,68	73.049.935	45,68	53,54	87,68	219.803.760	104,38	28,54		
Pembangunan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														63 Kecamatan	63 Kecamatan	825.303.615	42 Kecamatan	337.227.000												42,00	337.227.000	66,67	40,86		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		26,27	28,89																		
														Predikat kinerja		SR	SR																		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														3.543.468.711	3.388.674.211	1.146.060.948	1.514.800.008	-	81.136.515	-	-	81.136.515													
Meningkatnya pola pangan harapan																																			
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun														63 Kecamatan	63 Kecamatan	1.931.788.120	42 Kecamatan	145.836.330	100 %	209.068.470	2,34	16.251.000,00	-	-	-	2,34	16.251.000	2,34	7,77	44,34	162.087.330	70,37	8,39		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														22 Desa	22 Desa	1.611.680.591	22 Desa	1.456.896.091	100 %	1.305.731.538	4,97	64.885.515,00	-	-	-	4,97	64.885.515	4,97	4,97	26,97	1.065.110.133	122,59	73,11		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		3,65	6,37																		
														Predikat kinerja		SR	SR																		
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Kota														137.429.960	137.429.960	597.739.891	1.156.448.000	-	39.015.000	-	-	39.015.000													
Tersedianya cadangan pangan daerah																																			
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														42 Kecamatan	42 Kecamatan	137.429.960	42 Kecamatan	230.950.483	100 %	849.734.000	30,05	17.934.000,00	-	-	-	30,05	17.934.000	30,05	2,11	72,05	248.884.483	171,55	181,10		
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														21 Kecamatan	21 Kecamatan	-	21 Kecamatan	366.789.408	100 %	306.714.000	6,87	21.081.000,00	-	-	-	6,87	21.081.000	6,87	6,87	27,87	387.870.408	132,71	-		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		18,46	4,49																		
														Predikat kinerja		SR	SR																		
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		16,13	13,25																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3.358.998.794	2.719.262.694	241.162.929	1.107.913.148	2.280.000	49.157.000	-	-	50.187.000													
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														3.358.998.794	2.719.262.694	241.162.929	1.107.913.148	2.280.000	49.157.000	37,14	-	50.187.000													
Meningkatnya pola pangan harapan																																			
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														30 Kecamatan	30 Kecamatan	3.358.998.794	30 Kecamatan	241.162.929	100 %	1.107.913.148	0,21	2.280.000,00	4,32	47.907.000	-	-	-	4,53	50.187.000	4,53	4,53	34,53	291.349.929	115,10	10,71
														Rata-rata capaian kinerja (%)		42,00		5.599.999.954	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.599.999.954	-	-	
														Predikat kinerja		SR		5.579.683.491	16 Des	730.049.915	-	-	0,17	1.250.000	-	-	-	0,17	1.250.000	1,06	0,17	42,17	5.580.918.491	-	-

Daerah Kabupaten/Pangan

																	Rate-rata capaian kinerja (%)		4,53		4,53				115,10		10,71	
																	Predikat kinerja		SR		SR							
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		4,53		4,53							
						5.511.247.700		4.085.924.000		135.665.440		125.906.810				38.710.000	-	-		38.710.000								
						5.511.247.700		4.085.924.000		135.665.440		125.906.810				38.710.000	-	-		38.710.000								
						5.511.247.700	105 Kecamatan	4.085.924.000	105 Kecamatan	135.665.440	100 %	125.906.810		69,34		38.710.000,00	-	-	-	69,34	38.710.000	69,34	30,74	174,34	174.375.440	166,04	4,27	
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		69,34		30,74				166,04		4,27	
																	Predikat kinerja		SR		SR							
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		69,34		30,74							
																	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		8.062.078.725		1.905.162.209							
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		36,13		24,72							
																	Predikat Kinerja dari Seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR		SR							

Dinas Kesehatan Pangan

3) Dinas Lingkungan Hidup

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																		
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100		17																				
12		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																																														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	61.477.505.280	100	persen	41.403.005.479		44.868.579.655	100,00	persen	15.972.439.637		5.690.767.137	-	-					8.090.748.139																											
		Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan	980.840.233	100	persen	616.613.489		238.795.376	100,00	persen	203.313.308		50.490.000	-	-					65.554.000																											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya musyawarah dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	172.468.000		131.658.152	1	Dokumen	128.768.344	6,29%	8.100.000	0,44	48.420.000,00	-	-	-	-	0,50	56.520.000	50,00	43,89	0,50	188.178.152	25,00	109,11																				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	18.634.000		5.901.144	1	Dokumen	18.483.344	18,84%	3.482.000,00	-	-	-	-	-	-	0,19	3.482.000	18,84	18,84	0,19	9.383.144	9,42	50,35																				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2	Dokumen	18.634.000		5.901.144	1	Dokumen	3.483.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.901.144	-	31,67																				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dokumen	18.634.000		5.901.144	1	Dokumen	4.833.344	72,04%	3.482.000,00	0,28	1.350.000,00	-	-	-	-	1,00	4.832.000	100,00	99,97	1,00	10.733.144	50,00	57,60																				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	Dokumen	18.634.000		7.251.144	1	Dokumen	4.833.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.251.144	-	38,91																				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	49.735.700	2	Laporan	19.565.700	4	Lap	19.801.144													4,00	19.801.144	200,00	101,20																				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	5	Lap	888.725.777	2	Dokumen	350.043.789	4	Lap	42.201.144			0,30	720.000,00	-	-	-	-	0,30	720.000	30,00	2,21	4,30	42.921.144	215,00	12,26																				
				1	Lap	42.378.756			1	Lap	20.180.360														1,00	20.180.360		-																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		29,41	23,56																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Pelaporan Keuangan	-	0	99.471.400	9.692.870.632		4.709.190.938	100,00	persen	4.543.812.919		1.622.438.543	-	-					2.314.170.973																											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		2	Tahun	9.635.105.232		4.668.064.794	12	Bulan	4.540.749.575	15,23%	691.732.430	0,40	#####	-	-	-	-	0,55	2.314.170.973	4,58	50,96	0,55	6.982.235.767	27,50	72,47																				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Lap	49.735.700	2	Laporan	19.565.700	4	Lap	18.401.144													4,00	18.401.144	200,00	94,05																				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2	Laporan	19.565.700																																									
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5	Lap	49.735.700	2	Laporan	18.634.000	4	Lap	22.725.000													4,00	22.725.000	200,00	121,95																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		2,29	25,48																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								

Dinas Lingkungan Hidup

Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Tertindakannya Pengelolaan Retribusi Daerah	100 persen	-	100 persen	31.200.000	100 persen	-	100,00 persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Tertindakannya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	2 Laporan	31.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Predikat kinerja																					SR	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya SDM Aparatur Daerah	100 persen	1.396.083.127	-	170.000.000	-	512.855.505	100,00 persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
Sosialisa Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya SDM aparaturng tentang Peraturan Perundang-undangan	6 Tahun Anggaran	965.622.801	2 Tahun	170.000.000	4 Tahun	44.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	44.560.000	200,00	26,21																					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya implementasi SDM Aparatur dalam peraturan perundang-undangan	1 Tahun Anggaran	8.650.000	2 Tahun	-	1 Tahun Anggaran	43.582.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.582.900	50,00	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja																					SR	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertindakannya Penyediaan Administrasi Kantor	-	5.489.756.815	24 Bulan	2.146.805.234	-	3.535.733.034	100,00 Persen	554.893.910	-	-	-	-	164.748.761	-	-	-	-	262.243.504	-	-																					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan Komponen Listrik penerangan Bangunan Kantor	72 bln	104.675.223	2 Tahun	22.014.207	48 bln	4.145.915	1 Tahun	3.970.990	23,47%	932.063	0,47	1.755.113,00	-	-	-	-	0,70	2.687.176	70,00	67,67	48,70	6.833.091	2.435,00	31,04																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 Keg	583.744.734	2 Tahun	182.107.389	4 Keg	333.489.338	1 Tahun	124.317.630	11,39%	14.154.178	0,19	15.310.575,00	-	-	-	-	0,30	29.464.753	30,00	23,70	4,30	362.954.091	215,00	199,31																	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	-	-	2 Tahun	165.948.000	-	63.945.235	1 Tahun	11.080.970	18,01%	1.995.472	0,27	2.920.922,00	-	-	-	-	0,45	4.916.394	45,00	44,37	0,45	68.861.629	22,50	41,50																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya makan dan minum rapat	72 bln	426.483.628	2 Tahun	167.775.878	48 bln	48.762.000	1 Tahun	22.639.750	44,39%	10.050.000	0,36	7.950.000,00	-	-	-	-	0,80	18.000.000	80,00	79,51	48,80	66.762.000	2.440,00	39,79																	
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	72 bln	425.747.894	2 Tahun	167.486.445	48 bln	58.762.500	1 Tahun	24.523.570	30,60%	7.503.610	0,31	5.690.508,00	-	-	-	-	0,62	13.194.118	62,00	53,80	48,62	71.956.618	2.431,00	42,96																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	72 bln	170.522.400	2 Tahun	67.262.400	48 bln	5.220.000	12 Bulan	5.400.000	-	-	0,26	891.000,00	-	-	-	-	0,26	891.000	2,17	16,50	48,26	6.111.000	2.413,00	9,09																	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan/atau dalam daerah	72 bln	514.409.240	2 Tahun	1.374.210.915	48 bln	520.476.000	1 Tahun	363.061.000	17,31%	62.859.420	0,36	130.230.643,00	-	-	-	-	0,53	193.090.063	53,18	53,18	48,53	713.566.063	2.426,59	51,93																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					48,91	48,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Predikat kinerja																					SR	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah	9 Unit	-	100 persen	8.800.000.000	9,00	-	100,00 Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	6 Unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Penggadaan Alat Besar		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Besar	-	-	1 Unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Penggadaan Mebel		Terpenuhinya Kebutuhan Mebel perkantoran	-	-	2 Tahun	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya Peralatan dan mesin untuk pelaksanaan Operasional perkantoran	-	-	2 Tahun	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					48,91	48,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Predikat kinerja																					SR	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 Tahun	2.000.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-						
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		46.607.883.127		18.277.874.966		34.411.674.802		10.516.465.900		3.820.494.533		-	-	-	-	5.384.702.762								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	849.059.450	72 Rekening	334.014.450	48 bin	133.206.565	12 Bulan	151.921.900	20,22%	30.725.229	0,21	30.971.033,00	-	-	-	0,41	61.696.262	3,42	40,61	48,41	194.902.827	67,24	58,35	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	72 Bulan	2.159.433.049	2 Tahun	47.921.990	48 bin	12.335.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	12.335.006	2.400,00	25,74	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Lapangan	72 Bulan	824.097.015	2 Tahun	17.895.938.526	48 bin	9.873.199.000	12 Bulan	10.364.544.000	14,80%	1.533.483.000	0,37	3.789.523.500,00	-	-	-	0,51	5.323.006.500	4,28	51,36	48,51	15.196.205.500	2.425,68	84,91	
				72 Bulan	42.653.476.673			48 bin	24.339.984.231														48,00	24.339.984.231	-	-	
				72 Bulan	121.816.940			48 bin	52.950.000														48,00	52.950.000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				2,57	30,65						
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60	6.903.470.578		1.667.641.158	12,00	1.460.330.000		153.853.600		31.481.600		32.595.300		-	-	-		64.076.900						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional atau lapangan	7 Unit	1.596.388.078	25 Unit	630.000.000	7 unit	218.490.000	100	153.853.600	20,46%	31.481.600,000	0,22	32.595.300,00	-	-	-	0,42	64.076.900	0,42	41,65	7,42	282.566.900	29,68	44,85	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	4.500.000.000	14 Unit	209.632.500																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				2 Unit	200.000.000																				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Perkantoran dan bangunan lainnya	6 Tahun	807.082.500	2 Unit	628.008.658	4 Tahun Anggaran	1.241.840.000														4,00	1.241.840.000	200,00	197,74	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,21	20,82						
Predikat kinerja																				SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																				10,30	18,61						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	60	-		500.000.000	12,00	72.423.000		25.364.468		6.840.000		6.840.000		-	-	-		6.840.000						
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kampar	1	-	2	500.000.000	-	72.423.000	1,00	25.364.468	-	-		6.840.000	-	-	-		6.840.000							
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar			2 Tahun	500.000.000		72.423.000	100	25.364.468		0,29	6.840.000,00	-	-	-	0,29	6.840.000	0,29	26,97	0,29	79.263.000	14,40	15,85		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,29	26,97						
Predikat kinerja																				SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																				0,29	26,97						

Dinas Lingkungan Hidup

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	60	7.876.743.764			3.337.040.000	12,00	5.052.893.513			356.436.120			35.730.440			91.460.000	-	-	-	127.190.440															
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	1	7.876.743.764	1		1.970.730.000	-	3.906.639.577	1,00		331.780.680	-		13.355.000			89.180.000	-	-	-	102.535.000															
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Diaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	terlaksananya Pembantuan tentang kerusakan tanah untuk produksi Biomassa Terlaksananya Pembantuan tentang kuualitas Air dan Neraca Sumber Daya Air Terlaksananya Pembantuan tentang Sumber Emisi tidak Berbahaya Kualitas	126	Kec	1.829.999.820	2 Tahun		623.680.000	84	Kec	1.523.849.462	2		331.780.680	4,03%	13.355.000.000	0,36		89.180.000,00	-	-	-	102.535.000	19,95	30,90	84,40	1.626.384.462	4.219,95	260,77								
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembantuan Pencemaran air dan kerusakan tanah/lahan	6	Lap Kualitas Tanah	1.820.155.000	50	Tiik		794.250.000	4	Lap Kualitas Tanah	461.777.400							-	-	-	-	-	-	-	4,00	461.777.400	8,00	58,14								
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					2 Tahun		552.800.000										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
									2	Keg	1.465.787.944		2	Keg	358.851.815							-	-	-	-	-	-	-	2,00	358.851.815			-								
									5	Keg	1.111.775.000		4	Keg	1.323.071.800							-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.323.071.800			-								
									5	Keg	791.796.000		4	Keg	239.089.100							-	-	-	-	-	-	-	4,00	239.089.100			-								
									6	Tahun	857.250.000										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		19,95	30,90			2.113,98	159,46										
																								Predikat kinerja		SR	SR														
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	60	-			1.366.310.000	12,00	1.146.253.936			24.655.440			22.375.440			2.280.000	-	-	-	24.655.440															
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya pengendalian kerusakan hutan dan lahan				34	Tiik		585.822.000			1.107.354.428	100						-	-	-	-	-	-	-	-	1.107.354.428			-	189,03						
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2	Tahun		780.488.000			38.899.508	100			24.655.440	90,75%	22.375.440	0,09		2.280.000,00	-	-	-	1,00	24.655.440	1,00	100,00	1,00	63.554.948	50,00	8,14					
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		0,50	50,00			25,00	88,58										
																								Predikat kinerja		SR	SR														
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		10,23	40,45														
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	60	-			5.700.000.000	12,00	5.339.059.968			5.836.656.027						1.637.257.387	-	-	-	1.840.567.987															
					Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kampar	1	-			1		5.700.000.000	-		5.339.059.968	1			5.836.656.027			1.637.257.387	-	-	-	1.840.567.987														
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolaanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar				2	Tahun		5.700.000.000			5.339.059.968	1	Tahun		5.836.656.027	3,48%	203.310.600	0,18		1.637.257.387,00	-	-	-	0,22	1.840.567.987	21,63	31,53	0,22	7.179.627.955	10,82	125,96					
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		21,63	31,53			10,82	125,96										
																								Predikat kinerja		SR	SR														
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		21,63	31,53														

Dasar lingkungan hidup

														Predikat kinerja		SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6														1,88	38,55									
PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE KEGIATAN PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH TERLAKSANA	60	2.139.995.750				788.392.000	12,00	769.699.562			730.139.100		372.221.000			349.866.000	-	-	-	722.087.000			
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	1.320.603.750	1			488.392.000	-	46.001.316	1,00														
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Lap	1.320.603.750	10	Hutan Adat		488.392.000	4	Lap		46.001.316													
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-				40,00	9,42				
Predikat kinerja														SR	SR									
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH di Kabupaten Kampar	60,00	819.392.000				300.000.000	12,00	723.698.246			730.139.100		372.221.000			349.866.000	-	-	-	722.087.000			
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Keg	819.392.000	2	Tahun		300.000.000	4	Keg	1	Tahun	730.139.100	50,98%	372.221.000.000	0,48		349.866.000,00	-	-	-	0,99	722.087.000	99,03	98,90
		60	420.000.000																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			249,52	481,93				
Predikat kinerja																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7														49,52	98,90									
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	60	1.388.442.240				1.143.431.097	12,00	135.960.660			89.083.176		-			16.201.046	-	-	-	16.201.046			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kampar	1	1.388.442.240	1			1.143.431.097	-	135.960.660	1,00		89.083.176					16.201.046	-	-	-	16.201.046			

Dinas Lingkungan Hidup

					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan serta Tersusunnya Buku/Publikasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	5	Buku SLHD	1.388.442.240	2	Tahun	655.039.097	2	Buku SLHD	135.960.660	3	Organisasi	89.083.176		0,20	16.201.046,00	-	-	-	-	0,20	16.201.046	6,67	18,19	2,20	152.161.706	110,00	23,23				
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terciptanya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup				2	Tahun	488.392.000								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												6,67	18,19		55,00	11,61					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												6,67	18,19		55,00	11,61					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												6,67	18,19		55,00	11,61					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												6,67	18,19		55,00	11,61					
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	60		1.612.385.675			475.404.584	12,00	65.606.290			71.719.798			6.852.754						30.231.544	-	-	-		37.084.298						
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kampar	1		1.612.385.675	1		475.404.584	-	65.606.290	1,00		71.719.798	-		6.852.754						30.231.544	-	-	-		37.084.298						
					Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Dunia Pendidikan/ Masyarakat	5	Keg	1.238.470.934	15	Sekolah	475.404.584	4	Keg	65.606.290	1	Tahun	71.719.798	9,55%		6.852.754.000	0,42				30.231.544,00	-	-	-	0,52	37.084.298	51,71	51,71	4,52	102.690.588	30,11	21,60
Rata-rata capaian kinerja (%)																												51,71	51,71		30,11	21,60					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												51,71	51,71		30,11	21,60					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												51,71	51,71		30,11	21,60					
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP TERLAKSANA	60		574.488.342			151.114.872	12,00	104.807.479			47.240.096			25.770.596						1.800.000	-	-	-		27.570.596						
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kampar	1		574.488.342	1		151.114.872	-	104.807.479	1		47.240.096	-		25.770.596						1.800.000	-	-	-		27.570.596						
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran				2	Tahun			46.899.574	1	Tahun	47.240.096	54,55%		25.770.596.000	0,11					1.800.000,00	-	-	-	0,66	27.570.596	65,73	58,36	0,66	74.470.170	32,87	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	90	Kasus	574.488.342	15	Kasus	151.114.872	75	Pengaduan	57.907.905						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	57.907.905	500,00	38,32			
Rata-rata capaian kinerja (%)																												32,87	29,18		266,43	19,16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												32,87	29,18		266,43	19,16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												32,87	29,18		266,43	19,16					
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TERLAKSANA	60		26.546.991.290			14.740.636.952	12,00	7.636.697.165			3.041.223.232									922.385.870	-	-	-		1.272.568.754						
					Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar	1		26.546.991.290	1		14.740.636.952	-	7.636.697.165	1,00		3.041.223.232									922.385.870	-	-	-		1.272.568.754						

Dinas Lingkungan Hidup

			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Jakstrada Kabupaten Kampar dan tercapainya target pengelolaan persampahan			1 Dokumen	640.000.000		65.845.880	1 Dokumen	8.156.690													65.845.880		10,29				
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah			26 %	1.050.000.000		965.661.573	1 Tahun	872.232.350			0,16	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,16	75.000.000	16,17	8,60	0,16	1.040.661.573	0,62	99,11
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di PAT/PST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan			5 Keg	10.736.940.050	18 Sarana	4.000.000.000	4 Keg	1.521.669.945	1 Tahun	1.047.890.702	25,04%	262.395.114	0,30	306.357.120,00	-	-	-	-	0,55	568.752.234	55,00	54,28	4,55	2.090.422.179	25,28	52,26	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			2 Tahun	300.000.000		19.980.000																		19.980.000		6,66	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di PAT/PST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			5 Keg	15.313.183.740	26 Sarana	6.000.000.000	4 Keg	2.974.379.508	1 Tahun	1.112.943.490	7,89%	87.787.770	0,49	541.028.750,00	-	-	-	-	0,57	628.816.520	57,00	56,50	4,57	3.603.196.028	17,58	60,05	
			Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				2 Tahun																								
							5 Keg				3 Keg	1.592.292.759																			
							1 Keg	496.867.500			1 Keg	496.867.500																			
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta di Kabupaten Kampar						1.375.318.476																					
			Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan terkait ttn Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan terkait ltn Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			2 Tahun	200.000.000																							
			Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terciptanya kota sehat adipura			2 Piala Adipura	755.318.476																							
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			2 Tahun	420.000.000																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,63	23,87			8,70	45,87		
																						Predikat kinerja		SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												26.485.413.882	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 11												25,63	23,87					
																								12.321.718.260							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												19,15	34,36																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												SR	SR																		

Dinas Lingkungan Hidup

4) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																									
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp																
				13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp																
13		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			4.652.356.335	100 persen	9.291.980.979		10.785.319.327	100,00	persen	9.755.133.885		3.079.539.406		2.298.511.728		-							5.378.051.134																
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100 persen	15.705.800	100 persen	91.990.899		70.158.451	100,00	persen	58.177.540		-		10.065.060		-						10.065.060																
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dan percetakan renja SKPD				1 K	10.667.866		9.698.060	1 K	40.474.120	-	-	-	3.286.120,00	-	-	-	-	-	-	-	3.286.120	-	8,12	-	12.984.180	-	121,71											
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tercetaknya RKA				1 K	52.817.369		48.015.790	1 K	3.492.090	-	-	-	3.371.970,00	-	-	-	-	-	-	-	3.371.970	-	96,56	-	51.387.760	-	97,29											
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tercetaknya RKA Perubahan				1 K	3.183.873		2.894.430	1 K	3.406.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894.430	-	90,91											
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan percetakan DPA				1 K	3.243.086		2.948.260	1 K	3.406.970	-	-	-	3.406.970,00	-	-	-	-	-	-	-	3.406.970	-	100,00	-	6.355.230	-	195,96											
		5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan percetakan DPA Perubahan				1 K	3.074.705		2.795.186	1 K	3.476.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.795.186	-	90,91											
		6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itlisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LKJP Dan Dokumen SAKP		5 Lap	7.852.900	2 lap	9.502.000	1 K	2.306.725	1 K	3.920.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.306.725	50,00	24,28											
					5 lap	7.852.900	2 lap	9.502.000	1 K	1.500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500.000	50,00	15,79											
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						3.804.057.709		3.940.161.520	100,00	persen	3.507.828.248		381.895.923		1.114.360.051		-					1.496.255.974																	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 K		1 K	3.804.057.709	1 K	3.940.161.520	1 K	3.507.828.248	0,25	381.895.923	0,25	1.114.360.051,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1.496.255.974	50,00	42,65	1,50	5.436.417.494	150,00	142,91										
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			76.756.300	24 Bulan	104.786.100		222.860.700	100,00	Persen	-		-		-		-																							
		1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Adminkuk (DAK)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Tentang Adminkuk (DAK)		6 Orang	25.900.000	9 Kali	43.250.000	1 K	61.010.700	1 K	-		-		-		-										1,00	61.010.700	11,11	141,07										
					5 K	50.856.300	2 k	61.536.100	1 K	161.850.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	161.850.000	50,00	263,02											
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			2,00 unit	2.373.232.128	2 Unit	2.899.676.613	-	2.928.545.306	1,00 unit	3.855.608.924		2.175.068.175		677.455.308		-						2.852.523.483																	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhinya penerangan kantor		5 Tln	3.859.900	2 'tln	4.670.479	1 K	4.821.860	1,00 K	10.271.244	0,25	2.660.000	0,25	1.968.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4.628.000	50,00	45,06	1,50	9.449.860	75,00	202,33										

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
14		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			11.306.163.000	100 persen	30.479.528.002		6.945.402.173	100 persen	6.423.190.505				2.255.433.848	-	-				3.049.578.476							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	1.036.516.000	100 persen	1.479.466.200		322.895.302	100 persen	326.654.637		52.949.000		75.738.400	-	-			128.687.400							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusannya Renja, Renja Perubahan, DPA, DPPA dan Renstra Perangkat Daerah		22 Dokumen	900.000.000	22 Dokumen	1.355.157.700	100 %	259.543.570	8 Dokumen	135.123.900	2	52.949.000.000	-	36.657.400.000	-	-	-	-	2.00	89.606.400	25,00	66,31	101,88	349.149.970	463,09	25,76
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas yang disusun		5 Dokumen	136.516.000	6 Dokumen	64.308.500	100 %	19.807.102	6 Dokumen	23.455.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	19.807.102	1.666,67	30,80	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP "A"		- Dokumen	-	12 Dokumen	60.000.000	100 %	43.544.630	1 Dokumen	168.075.227	-	-	-	39.081.000.000	-	-	-	-	39.081.000	-	23,25	100,00	82.625.630	833,33	137,71	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		8,33	29,86			987,70	64,76								
													Predikat kinerja		SR	SR												
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			- 0	69.406.000		19.805.021.355	100,00 persen	3.801.807.184					1.199.319.367	-	-				1.679.681.452							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan		- -	-	24 Bulan	19.744.480.693	100 %	3.795.696.235	100 %	3.833.885.250	3	480.362.085	-	1.199.319.367,00	-	-	-	-	3,00	1.679.681.452	3,00	43,81	103,00	5.475.377.687	429,17	27,73
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		5 Dokumen	69.406.000	5 Dokumen	60.540.662	100 %	6.110.949	1 Kegiatan	5.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.110.949	2.000,00	10,09	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		1,50	21,91			1.214,58	18,91								
													Predikat kinerja		SR	SR												
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				560.000.000	24 Bulan	145.310.000		-	100,00 Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian		- 0	-	12 Bulan	20.000.000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	833,33	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan profesional		1 Orang	560.000.000	5 orang	125.310.000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	2.000,00	-	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			2.833,33	-								
													Predikat kinerja		SR	SR												
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9,00 Unit	4.841.991.000	100 persen	4.473.736.447	9,00	1.165.487.646	100 Persen	763.290.547									257.804.626	-	33,78	9,00	1.423.292.272	9,00	31,81	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		60 bulan	125.004.000	60 Bulan	86.000.000	12 Bulan	43.897.610	12 bulan	15.364.800	3	5.672.000.000	-	3.833.000.000	-	-	-	-	3,00	9.505.000	25,00	61,86	15,00	53.402.610	25,00	62,10
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ATK, Komputer PC, Laptop, dan Printer		60 bulan	988.696.000	60 Bulan	426.636.750	100 %	410.066.127	12 bulan	238.551.275	3	32.951.500.000	-	45.462.000.000	-	-	-	-	3,00	78.413.500	25,00	32,87	103,00	488.479.627	171,67	114,50
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga		60 bulan	295.569.000	60 Bulan	89.000.000	93 %	29.312.729	12 bulan	36.926.912	3	6.689.200.000	-	12.728.600.000	-	-	-	-	3,00	19.417.800	25,00	52,58	96,33	48.730.529	160,55	54,75
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60 bulan	284.370.000	60 Bulan	472.056.000	96 %	68.516.660	12 bulan	51.702.000	3	5.143.200.000	-	9.702.000.000	-	-	-	-	3,00	14.845.200	25,00	28,71	99,00	83.361.860	165,00	17,66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	395.971.000	60 Bulan	355.024.697	100 %	89.761.520	12 bulan	55.441.560	3	13.551.300.000	-	11.344.000.000	-	-	-	3,00	24.895.300	25,00	44,90	103,00	114.656.820	171,67	32,30																
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bulan	252.381.000	60 Bulan	211.040.000	94 %	26.784.000	12 bulan	26.784.000	3	4.158.000.000	-	5.544.000.000	-	-	-	3,00	9.702.000	25,00	36,22	96,91	36.486.000	161,52	17,29																
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Luar dan Dalam Daerah)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	2.500.000.000	60 Bulan	2.833.979.000	96 %	497.149.000	12 bulan	338.520.000	3	35.675.926.000	-	65.349.900.000	-	-	-	3,00	101.025.826	25,00	29,84	99,43	598.174.826	165,72	21,11																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,00	41,00			145,87	45,87																	
Predikat kinerja																					SR	SR																					
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.677.700.000		1.923.600.000		721.735.100		450.790.000		-		439.700.000		-		-		439.700.000																					
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan	2 unit	500.000.000	2 Unit	510.000.000	-	472.230.000	1 unit	450.790.000	-	-	1,00	439.700.000.000	-	-	-	1,00	439.700.000	100,00	97,54	1,00	911.930.000	50,00	178,81																
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan	- unit	-	-	500.000.000	-	-						-	-	-	-	-																							
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pegawai	-	-	40 Orang	20.000.000	-	-						-	-	-	-	-																							
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	2 keg	351.000.000	2 Kegiatan	390.000.000	-	199.505.100						-	-	-	-	-					199.505.100	-	51,16																
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan mesin lainnya	2 keg	226.700.000	2 Kegiatan	391.600.000	97,29 %	50.000.000						-	-	-	-	-				97,29	50.000.000	4.864,50	12,77																
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Keg	600.000.000	1 Kegiatan	112.000.000								-	-	-	-	-																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					33,33	32,51			1638,1667	80,9110295																	
Predikat kinerja																					SR	SR																					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60,00	1.743.400.000		1.850.528.000	12,00	620.047.500		638.458.300		141.078.124		-		-		-		287.376.041		-	12,00	907.423.541		-															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	53.500.000	60 Bulan	15.460.000	100 %	4.000.000	12 bulan	4.000.000	3	1.000.000.000	3,00	1.000.000.000	-	-	-	6,00	2.000.000	50,00	50,00	106,00	6.000.000	176,67	38,81																
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon, air dan listrik	60 bulan	333.200.000	60 Bulan	297.700.000	89,91 %	79.847.000	12 bulan	99.900.000	3	17.152.669.000	3,00	17.726.049.000	-	-	-	6,00	34.878.718	50,00	34,91	95,91	114.725.718	159,85	38,54																
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit AC	226.700.000	15 Unit AC	91.000.000	97,29 %	32.245.500	15 unit	14.130.000	4	2.440.000.000	3,00	4.370.000.000	-	-	-	7,00	6.810.000	46,67	48,20	104,29	39.055.500	695,27	42,92																
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Tenaga Harian Lepas	60 bulan	750.000.000	60 Bulan	1.446.368.000	96,43 %	438.255.000	12 bulan	520.428.300	3	125.705.248.000	3,00	117.982.075.000	-	-	-	6,00	243.687.323	50,00	46,82	102,43	681.942.323	170,72	47,15																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					49,17	44,98			300,63	41,85																	
Predikat kinerja																					SR	SR																					
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	1.377.150.000	2	801.866.000	-	313.429.441	1,00	404.482.681		245.634.257		-		-		-		256.328.957	-	63,37	-	569.758.398	-	71,85															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	14 Unit Mobil Dinas	750.000.000	14 Unit Mobil Di	468.866.000	88,91 %	103.934.541	2 unit	137.894.931	2	5.744.700.000	-	47.442.257.000	-	-	-	2,00	53.186.957	100,00	38,57	90,91	157.121.498	649,36	33,51																

Dasar Pemeringkatan/penyusutan dan Deas

				36 Pasar Desa	683.092.000	50 Pasar Desa	867.069.000	100 %	5.753.013	25,00 Pasar Des	63.007.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.753.013	200,00	0,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
				100 %	769.243.000			- %	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				20,00 Posyantik	1.125.000.000	21 Posyantik	305.316.400	- %	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	21,00	22,08				68,55	26,39	
																							Predikat kinerja	SR	SR						
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5	21,00	22,08						
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	8.071.789.077												3.671.951.321								
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	13,46	17,22						
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	SR	SR						

6) Dinas Pengendalian KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
				13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100																		
15		BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	33.838.725.863	100 persen	12.100.349.178		6.336.117.210	100,00 persen	6.320.439.651			2.033.148.940	-	-	-	-	2.939.246.964										
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	29.538.531.613	100 persen	8.516.291.874	4.326.670.323	100,00 persen	4.411.043.500			1.564.024.337	-	-	-	-	2.217.454.169										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 bulan	25.653.650.613	24 bulan	6.918.593.020	3.626.302.784	12,00 bulan	3.404.078.424	3,00	571.661.042	3,00	1.394.278.437,00	-	-	-	6,00	1.965.939.479	50,00	57,75	18,00	5.992.242.263	75,00	80,83			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan SDM	15 orang	108.460.000	15 orang	27.000.000	-	9.000.000	3,00 orang	13.500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	33,33			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Komponen Listrik	60 bulan	305.002.500	24 bulan	5.029.516	2.514.758	12,00 bulan	2.458.021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2.514.758	50,00	50,00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	473.583.000	24 bulan	372.998.758	-	180.046.631	12,00 bulan	291.972.475	3,00	8.764.030	3,00	61.760.000,00	-	-	-	6,00	70.524.030	50,00	24,15	6,00	250.570.661	25,00	67,18		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya Makan dan Minum Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Kantor	60 bulan	320.650.000	24 bulan	158.841.100	76.616.550	12,00 bulan	90.609.000	3,00	10.040.000	3,00	21.960.000,00	-	-	-	6,00	32.000.000	50,00	35,32	18,00	108.616.550	75,00	68,38			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan Kantor DPPKBP3A Kabupaten Kantor	60 bulan	168.580.500	24 bulan	38.267.480	13.685.600	12,00 bulan	23.799.080	3,00	2.653.960	3,00	5.012.700,00	-	-	-	6,00	7.666.660	50,00	32,21	18,00	21.352.260	75,00	55,80			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Majalah	60 bulan	133.980.000	24 bulan	18.270.000	6.183.000	12,00 bulan	9.133.500	-	-	3,00	1.413.000,00	-	-	-	3,00	1.413.000	25,00	15,47	15,00	7.596.000	62,50	41,58			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mensinergikan Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Kampar	60 bulan	2.374.625.000	24 bulan	977.292.000	412.321.000	12,00 bulan	575.493.000	3,00	60.310.800	3,00	79.600.200,00	-	-	-	6,00	139.911.000	50,00	24,31	18,00	552.232.000	75,00	56,51			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		34,38	23,65			145,83	151,20		
																			Predikat kinerja		SR	SR						
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	-	793.980.000		448.821.854	273.417.567	100,00 persen	234.321.755			54.713.000	-	-	-	-	54.713.000										
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan	210.012.000	1 Kegiatan	93.029.328	-	62.060.964	1,00 Kegiatan	55.784.300	-	-	3,00	54.713.000,00	-	-	-	3,00	54.713.000	300,00	98,08	3,00	116.773.964	300,00	125,52		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60 bulan	583.968.000	24 bulan	355.792.526	-	211.356.603	12,00 bulan	178.537.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.356.603	-	59,40			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		150,00	49,04			150,00	92,48		
																			Predikat kinerja		SR	SR						
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.405.000.000	24 Bulan	2.450.911.360	1.289.306.740	100,00 Persen	1.166.499.471			342.764.366	-	-	-	-	545.043.832										

Dinas Pengendalian KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa tenaga harian lepas	60 bulan	657.800.000	24 bulan	116.854.000	12 bulan	112.048.060	12,00 bulan	104.979.325	3,00	19.085.496	3,00	22.824.226,00	-	-	-	-	6,00	41.909.722	50,00	39,92	18,00	153.957.782	75,00	131,75
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat Kebersihan dan Honor jasa tenaga harian lepas	60 bulan	748.000.000	24 bulan	2.334.057.360	12 bulan	1.177.258.680	12,00 bulan	1.061.520.146	3,00	183.193.970	3,00	319.940.140,00	-	-	-	-	6,00	503.134.110	50,00	47,40	18,00	1.680.392.790	75,00	71,99
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	43,66		75,00	101,87		
Predikat kinerja																							SR	SR					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	9,00 Unit	2.100.414.250	100 persen	684.324.090	9	446.722.580	100,00 Persen	508.574.925			71.647.237	-	-	-	-	122.035.963								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Mobil Operasional dan Pajak Kenderaan Dinas	60 bulan	264.088.000	24 bulan	48.225.300	12 bulan	52.868.550	12,00 bulan	37.566.358	3,00	2.142.000	3,00	9.406.855,00	-	-	-	-	6,00	11.548.855	50,00	30,74	18,00	64.417.405	75,00	133,58
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Operasional dan Kenderaan Operasional Lapangan	60 bulan	742.340.500	24 bulan	268.042.734	12 bulan	152.576.002	12,00 bulan	152.039.239	3,00	17.573.326	3,00	42.025.114,00	-	-	-	-	6,00	59.598.440	50,00	39,20	18,00	212.174.442	75,00	79,16
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mobil Operasional dan Peralatan Mesin Lainnya	60 bulan	196.301.875	24 bulan	44.704.056	12 bulan	22.352.028	12,00 bulan	30.143.028	3,00	1.575.000	3,00	12.812.768,00	-	-	-	-	6,00	14.387.768	50,00	47,73	18,00	36.739.796	75,00	82,18
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	60 bulan	897.683.875	24 bulan	323.352.000	-	218.926.000	12,00 bulan	288.826.300	3,00	29.098.400,00	3,00	7.402.500,00	-	-	-	-	6,00	36.500.900	50,00	12,64	6,00	255.426.900	25,00	78,99
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	32,58		62,50	93,48		
Predikat kinerja																							SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																							71,09	37,23					
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TERSEDIAINYA DATA KEPENDUDUKAN	-	326.796.606		154.277.708		263.398.189		-		105.848.608	-	-	-	-	105.848.608									
				Kegiatan Pemetaan Pendataan Penduduk Cakupan Daerah	Tersosialisasinya Grand Designe, Kependudukan dan Buku Data Terpilih	2 unit	-	2 Unit	326.796.606	-	154.277.708	1,00 unit	263.398.189	-	-	105.848.608	-	-	-	-	105.848.608								
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tertaksananya Program Bangga Kencana	5 Buku	-	5 Buku	326.796.606	2,00	154.277.708	5,00 buku	263.398.189	-	-	105.848.608,00	-	-	-	-	105.848.608	-	40,19	2,00	260.126.316	40,00	79,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	40,19		40,00	79,60		
Predikat kinerja																							SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																							-	40,19					
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR, UNMEETNEED, MCPR	60	34.006.518.050		16.745.838.546	12	8.151.719.257		6.751.568.709			659.498.106	-	-	-	-	803.282.494								
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.	Tersosialisasinya Grand Designe, Kependudukan dan Buku Data Terpilih	60 bulan	10.902.774.500	60 Bulan	4.189.616.488	100 %	2.056.828.404	12,00 bulan	1.557.615.962			330.175.970	-	-	-	-	406.376.958								
				Adekuasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tertaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	1.014.612.500	21 Kec.	334.034.016	-	139.046.891	21,00 Kec.	166.866.692	11.811.896.000		19.235.000,00	-	-	-	-	31.046.896	-	18,61	-	170.093.787	-	50,92		
				KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	462.000.000	21 Kec.	223.897.548	21 Kec.	101.938.010	21,00 Kec.	311.948.495	48.331.480,000		30.840.000,00	-	-	-	-	79.171.480	-	25,38	21,00	181.109.490	100,00	80,89		
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tertaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	9.000.000.000	21 Kec.	3.500.683.246	21 Kec.	1.750.341.623	21,00 Kec.	1.011.300.001	-		244.672.001,00	-	-	-	-	244.672.001	-	24,19	21,00	1.995.013.624	100,00	56,99		
				Pengendalian Program KKBPK	Tertaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	426.162.000	21 Kec.	131.001.678	21 Kec.	65.501.880	21,00 Kec.	67.500.774	16.057.612		35.428.969,00	-	-	-	-	51.486.581	-	76,28	21,00	116.988.461	100,00	89,30		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	36,11		75,00	69,53		
Predikat kinerja																							SR	SR					

Diarsipkan oleh BPPK Kabupaten Kampar

				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG	30 orang	219.859.200	30 orang	127.513.980	-	-	54.956.990	30,00 orang	63.606.301		44.311.700.000	-	-	-	-	44.311.700	-	69,67	-	99.268.690	-	77,85																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																
Predikat kinerja																						SR	SR																									
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1,00	519.094.400	1	127.497.920	-	-	57.007.960	1,00	63.747.626	-	-	7.137.400	-	-	-	-	7.137.400	-																									
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Tercapainya Sosialisasi Perempuan Berpolitik di Bidang Hukum, Sosial dan Ekonomi	36 orang	519.094.400	36 orang	127.497.920	-	-	57.007.960	36,00 orang	63.747.626	-	-	4	7.137.400,00	-	-	-	4,00	7.137.400	11,11	11,20	4,00	64.145.360	11,11	50,31																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11,11	11,20																									
Predikat kinerja																						SR	SR																									
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Informasi dan menampung aspirasi hak-hak anak		978.612.800		408.420.654			191.166.905		204.208.290			-					127.892.860																										
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbenahnya Pendidikan dan Keterampilan peran Perempuan sebagai kepala Rumah Tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga	21 orang	144.980.000	21 orang	170.233.704	-	-	72.073.602	21,00 orang	85.115.180	-	-	5	9.030.000,00	-	-	-	5,00	9.030.000	23,81	10,61	5,00	81.103.602	23,81	47,64																			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terperuhnya Pendidikan dan keterampilan perempuan sebagai kepala keluarga	21 orang	833.632.800	21 orang	238.186.950	21,00 orang		119.093.303	21,00 orang	119.093.110	-	-	1	118.862.860,00	-	-	-	1,00	118.862.860	4,76	99,81	22,00	237.956.163	104,76	99,90																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						14,29	55,21																									
Predikat kinerja																						SR	SR																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																						8,47	45,36																									
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN SATGAS PKDRT DALAM HAL PENANGANAN KDRT		969.834.250		169.941.344			80.721.917		186.626.146			13.554.201					60.209.750						73.763.951																				
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan program	2 unit	969.834.250	2 Unit	169.941.344	-		80.721.917	1,00 unit	186.626.146	-		13.554.201	-				60.209.750	-					73.763.951																				
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal Penanganan KDRT	11 Desa	969.834.250	11 Desa	169.941.344	11 Desa		80.721.917	11,00 Desa	109.820.286			13.554.201,000	-				60.209.750,00	-					73.763.951																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																
Predikat kinerja																						SR	SR																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																						-	67,17																									
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDUKUK, KESEHATAN DAN EKONOMI SESUAI JENIS KELAMIN		8.133.497.900		4.163.797.910			2.125.459.484		2.400.225.139			-					430.155.207						430.155.207																				

Desa Pengabdian Produktif KB Pemberdayaan Perempuan dan Anak

		Predikat kinerja	SR	SR								
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10	16,50	66,61								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	23.602.544.859		6.096.932.235									
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)	15,70	37,28								
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)	SR	SR								

Dinas
 Pengendalian
 Perilaku Ktd,
 Pemerintahan

7) Dinas Perhubungan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																									
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.															
16		DINAS PERHUBUNGAN																																							
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			33.522.238.996	100 persen	34.295.992.240	10.920.434.637	100 persen	9.296.626.330	1.810.489.034	3.539.012.761	-	-	5.349.501.795																										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	73.462.500	100 persen	21.562.500	130.521.750	100 persen	173.512.510	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	10,37	-	148.521.750	-	688,80																				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							1	137.905.760		0,13	18.000.000		0,13	18.000.000	13,05	13,05	0,13	18.000.000	-	-																			
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100	73.462.500	100	21.562.500	100	130.521.750	1	35.606.750		-	-	-	-	-	-	100,00	130.521.750	100,00	605,32																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																6,53	-																								
Predikat kinerja																SR	SR																								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	24.617.906.570		24.625.095.570	4.539.514.923	100 persen	4.153.245.132	587.294.278	1.577.756.060	-	-	2.165.050.338																										
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	100	24.594.498.070	100	24.594.498.070	100	4.529.627.423	1	4.130.775.112	0,14	584.894.278	0,38	1.569.756.060,00	-	-	-	0,52	2.154.650.338	52,16	52,16	100,52	6.684.277.761	100,52	27,18															
		Koordinasi dan penyusunan laporan akhir keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	100	23.408.500	100	30.597.500	100	9.887.500	1	22.470.020	0,11	2.400.000	0,36	8.000.000,00	-	-	-	0,46	10.400.000	46,28	46,28	100,46	20.287.500	100,46	66,30															
Rata-rata capaian kinerja (%)																98,44	98,44																								
Predikat kinerja																ST	ST																								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terealisasinya pemenuhan pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	334.089.872	100 persen	272.089.872	43.625.000	100 persen	40.000.000	-	-	-	-	-																										
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian	100	334.089.872	100	272.089.872	100	43.625.000	1	40.000.000		-	-	-	-	-	-	100,00	43.625.000	100,00	16,03																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-																								
Predikat kinerja																SR	SR																								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.541.767.106		2.884.130.306	1.501.332.389	100 persen	677.885.474	387.955.718	229.284.324	-	-	617.240.042																										
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	17.212.600	100	13.875.000	100	21.833.020	1	8.915.960	-	-	1,00	8.900.000,00	-	-	-	1,00	8.900.000	99,82	99,82	101,00	30.733.020	101,00	221,50															
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	374.882.420	100	292.401.220	100	449.741.518	1	115.993.756	0,52	60.100.800	0,43	49.644.200,00	-	-	-	0,95	109.745.000	94,61	94,61	100,95	559.486.518	100,95	191,34															
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	360.000.000	100	300.000.000	100	166.300.000	1	81.392.250	0,47	38.225.000	0,47	38.637.500,00	-	-	-	0,94	76.862.500	94,43	94,43	100,94	243.162.500	100,94	81,05															

Dinas Perhubungan

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	635.492.850	100	511.724.850	100	128.253.851	1	111.000.505	0,52	57.184.000	0,32	35.192.250,00	-	-	-	-	0,83	92.376.250	83,22	83,22	100,83	220.630.101	100,83	43,11
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	81.100.000	100	63.000.000	100	40.354.000	1	17.027.000	0,15	2.500.000	0,32	5.400.000,00	-	-	-	-	0,46	7.900.000	46,40	46,40	100,46	48.254.000	100,46	76,59
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100	2.073.079.236	100	1.703.129.236	100	694.850.000	1	343.556.000	0,67	229.945.918	0,27	91.510.374,00	-	-	-	-	0,94	321.456.292	93,57	93,57	100,94	1.016.306.292	100,94	59,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																						85,34	85,34			100,85	112,21	
Predikat kinerja																						T	T					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		354.400.500	24 Bulan	202.433.334		829.565.644	100 Persen	1.101.760.000				927.860.000	-	-	-	-		927.860.000						
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	60.500.000	100	60.500.000	100	-	1	443.100.000	-	-	1,00	441.800.000	-	-	-	-	1,00	441.800.000	99,71	-	101,00	441.800.000	101,00	730,25
			Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	100	26.366.667	100	377.600.000	1	630.660.000	-	-	0,73	458.175.000,00	-	-	-	-	0,73	458.175.000	72,65	72,65	100,73	836.775.000	100,73	3.169,82
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	293.900.500	100	115.566.667	100	451.965.644	1	28.000.000	-	-	1,00	27.885.000,00	-	-	-	-	1,00	27.885.000	99,59	99,59	101,00	479.850.644	101,00	415,22
Rata-rata capaian kinerja (%)																						125,97	86,12			100,91	1438,43	
Predikat kinerja																						SR	SR					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.599.271.748	100 persen	4.800.299.358		2.702.729.700	100 Persen	2.882.091.200			736.879.038							1.429.641.415						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	1.775.256.042	100	1.451.256.042	100	384.701.200	1	407.103.700	0,30	123.700.238	0,29	116.353.177,00	-	-	-	-	0,59	240.053.415	58,97	58,97	100,59	624.754.615	100,59	43,05
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	784.015.706	100	3.349.043.316	100	2.318.028.500	1	2.474.987.500	0,25	613.178.800	0,23	576.409.200,00	-	-	-	-	0,48	1.189.588.000	48,06	48,06	100,48	3.507.616.500	100,48	104,73
Rata-rata capaian kinerja (%)																						53,52	53,52			100,54	73,89	
Predikat kinerja																						R	R					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.041.340.700		1.490.381.300		1.173.145.231		268.132.017			98.360.000							191.710.000						
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeleiharanya Barang Milik Daerah	100	411.269.500	100	342.707.500	100	97.940.744	1	91.645.293	0,17	15.700.000	0,40	37.100.000,00	-	-	-	-	0,58	52.800.000	57,61	57,61	100,58	150.740.744	100,58	43,99
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeleiharanya Barang Milik Daerah	100	1.067.088.100	100	828.480.600	100	215.306.644	1	121.352.074	0,45	54.100.000	0,36	43.950.000,00	-	-	-	-	0,81	98.050.000	80,80	80,80	100,81	313.356.644	100,81	37,82
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeleiharanya Barang Milik Daerah	100	290.343.200	100	166.082.600	100	717.463.343	1	12.937.450	0,57	7.400.000	-	-	-	-	-	0,57	7.400.000	57,20	57,20	100,57	724.863.343	100,57	436,45	
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeleiharanya Barang Milik Daerah	100	272.639.900	100	153.110.600	100	142.434.500	1	42.197.200	0,50	21.160.000	0,29	12.300.000,00	-	-	-	-	0,79	33.460.000	79,29	79,29	100,79	175.894.500	100,79	114,88
Rata-rata capaian kinerja (%)																						68,73	68,73			100,69	158,28	
Predikat kinerja																						S	S					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																						64,08	49,74					
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			26.474.698.331	100 persen	213.425.214.421		46.289.497.335	100,00 Persen	27.037.919.847			540.000.000							31.474.543.478						

Dinas Penunjang

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 persen	490.500.000	100 persen	3.175.500.000		334.600.000	100,00 Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
					Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya RULLAJ KAMIPAR	100	490.500.000	100	3.175.500.000	100	334.600.000													100,00	334.600.000	100,00	10,54																						
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00																					14,29	1,51			
																							Predikat kinerja	SR	SR																									
					Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	4.431.937.712	100 persen	189.940.619.802		43.321.377.805	100 persen	25.382.067.255									30.268.290.310																											
					Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	1.480.100.000	100	1.700.472.045	100	130.310.000		-	-	0,25	6.276.430.723,00	-	-	-	-	-	0,25	6.276.430.723	-	-	100,25	6.406.740.723	100,25	376,76																				
					Penyediaan perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	2.171.450.000	100	62.139.510.045	100	7.716.592.874	1	3.960.452.730	0,11	430.136.000	0,81	3.194.384.200,00	-	-	-	-	0,92	3.624.520.200	91,52	91,52	100,92	11.343.113.074	100,92	18,25																				
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	780.387.712	100	126.100.637.712	100	35.472.474.931	1	21.421.614.525	0,81	17.285.292.864	0,14	3.082.046.523,00	-	-	-	-	0,95	20.367.339.387	95,08	95,08	100,95	55.839.814.318	100,95	44,28																				
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	93,30	93,30																						100,70	146,43		
																							Predikat kinerja	ST	ST																									
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terealisasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 persen	2.635.482.955	100 persen	1.900.032.955		54.825.035	100 persen	33.750.035									22.732.500																											
					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Fasilitas Perparkiran	100	2.635.482.955	100	1.900.032.955	100	54.825.035	1	33.750.035	-	-	0,67	22.732.500,00	-	-	-	-	0,67	22.732.500	67,36	67,36	100,67	77.557.535	100,67	4,08																				
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	67,36	67,36																							100,67	4,08	
																							Predikat kinerja	S	S																									
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terealisasinya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	8.687.034.664	100 persen	8.663.881.664		606.752.874	100 persen	118.695.000		35.395.000		5.514.000	-	-	-	-	-	40.909.000																										
					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	1.400.000.000	100	2.000.000.000	100	396.072.234	1	5.150.000	0,50	2.575.000	0,02	2.757.000,00	-	-	-	-	0,52	5.332.000	52,32	103,53	100,52	401.404.234	100,52	20,07																				
					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	298.492.000	100	149.623.000	100	42.645.640	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	42.645.640	100,00	28,50																				
					Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	3.597.592.764	100	3.047.142.764	100	87.366.000	1	72.925.000	0,08	5.700.000	-	-	-	-	-	-	0,08	5.700.000	7,82	7,82	100,08	93.065.000	100,08	3,05																				
					Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	3.390.949.900	100	3.467.115.900	100	80.670.000	1	40.620.000	0,67	27.120.000	0,07	2.757.000,00	-	-	-	-	0,74	29.877.000	73,55	73,55	100,74	110.547.000	100,74	3,19																				
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	44,56	61,63																							100,33	13,70	
																							Predikat kinerja	SR	SR																									
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	5.614.543.000		5.492.955.000		1.004.310.835		849.530.200		250.600.000		429.259.000	-	-	-	-	679.859.000																											
					Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penataan Rekayasa Lalin	100	3.637.112.000	100	3.892.955.000	100	641.433.835	1	517.150.000	0,11	55.025.000	0,65	335.809.000,00	-	-	-	-	0,76	390.834.000	75,57	75,57	100,76	1.032.267.835	100,76	26,52																				
					Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penataan Rekayasa Lalin	100	1.420.931.000	100	700.000.000	100	112.715.000	1	46.538.750	0,55	25.675.000	0,06	2.850.000,00	-	-	-	-	0,61	28.525.000	61,29	61,29	100,61	141.240.000	100,61	20,18																				

Dinas Pembangunan

			Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penataan Rekyasa Lalin	100	556.500.000	100	900.000.000	100	250.162.000	1	285.841.450	0,59	169.900.000	0,32	90.600.000,00	-	-	-	-	0,91	260.500.000	91,13	91,13	100,91	510.662.000	100,91	56,74
Rata-rata capaian kinerja (%)																						76,00	76,00			100,76	34,48	
Predikat kinerja																						T	T					
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		658.700.000	100 persen	349.350.000		38.240.000	100 persen	66.506.000		1.020.000		21.341.000	-	-	-	-		22.361.000						
			Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Tersedianya Perizinan Andalalin	100	329.350.000	100	168.675.000	100	36.440.000	1	48.206.000	0,01	570.000	0,44	21.341.000,00	-	-	-	-	0,45	21.911.000	45,45	45,45	100,45	58.351.000	100,45	34,39
			Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Tersedianya Perizinan Andalalin	100	329.350.000	100	179.675.000	100	1.800.000	1	18.300.000	0,02	450.000	-	-	-	-	-	-	0,02	450.000	2,46	2,46	100,02	2.250.000	100,02	1,25
Rata-rata capaian kinerja (%)																						47,91	47,91			100,24	17,82	
Predikat kinerja																						SR	SR					
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terealisasinya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		556.500.000	100 persen	227.875.000		440.370.000	100 persen	92.500.000		-		84.900.000	-	-	-	-		84.900.000						
			Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan	100	556.500.000	100	227.875.000	100	440.370.000	1	92.500.000	-	-	0,92	84.900.000,00	-	-	-	-	0,92	84.900.000	91,78	91,78	100,92	525.270.000	100,92	230,51
Rata-rata capaian kinerja (%)																						91,78	91,78			100,92	230,51	
Predikat kinerja																						ST	ST					
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	3.400.000.000		3.675.000.000		489.020.786		493.971.357		252.985.000		102.506.668	-	-	-	-		355.491.668						
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum	100	3.400.000.000	100	3.675.000.000	100	489.020.786	1	493.971.357	0,51	252.985.000	0,21	102.506.668,00	-	-	-	-	0,72	355.491.668	71,97	71,97	100,72	844.512.454	100,72	22,98
Rata-rata capaian kinerja (%)																						71,97	71,97			100,72	22,98	
Predikat kinerja																						S	S					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																						61,61	63,74					
			Program Pengelolaan Pelayaran			148.500.000	100 persen	220.000.000		944.160.000	100 persen	227.250.000		152.050.000		74.900.000	-	-	-	-		226.950.000						
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terealisasinya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100 persen	148.500.000	100 persen	220.000.000		944.160.000	100 persen	227.250.000		152.050.000	0,33	74.900.000	-	-	-	-		226.950.000						
			Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Terbangunnya Sarpras LLASDP	100	148.500.000	100	220.000.000	100	944.160.000	1	227.250.000	0,67	152.050.000	0,33	74.900.000,00	-	-	-	-	1,00	226.950.000	99,96	99,87	101,00	1.171.110.000	101,00	532,32
Rata-rata capaian kinerja (%)																						99,96	99,87			101,00	532,32	
Predikat kinerja																						ST	ST					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																						99,96	99,87					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						36.560.896.177						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																						75,21	71,12					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																						T	S					

Dinas Perhubungan

8) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																													
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100			15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
17		DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN																											
		Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			17.152.000.000	100 persen	11.677.875.967		6.802.381.567	100,00	persen	7.256.629.189		1.551.619.659		2.217.956.353	-	-	-	-			3.769.576.012						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	28.000.000	100 persen	48.769.200		120.200.000	100,00	persen	402.449.500		70.858.700		27.809.607	-	-	-	-			98.668.307					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar			2 Dok	18.000.000		78.000.000	12,00		285.563.500	3,00	70.858.700.00	3,00	6.529.607	-	-	-	-	6,00		77.388.307	50,00	27,10	6,00	155.388.307	300,00	863,27
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJ Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar		6 Dok	28.000.000	2 Dok	30.769.200	1	42.200.000	1,00		116.886.000		3,00	21.280.000	-	-	-	-	3,00		21.280.000	300,00	18,21	4,00	63.480.000	200,00	206,31
Rata-rata capaian kinerja (%)																			175,00	22,65				250,00	534,79				
Predikat kinerja																			SR	SR									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten		43.000.000	24 Bulan	7.201.343.102		4.009.816.451	100,00	Persen	4.054.546.505		501.244.610		1.470.801.337	-	-	-	-			1.972.045.947						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			2 Tahun	7.193.386.318	12,00	4.006.333.011	12,00		4.050.596.395	3,00	501.244.610	3,00	1.470.801.337	-	-	-	-	6,00		1.972.045.947	50,00	48,69	18,00	5.978.378.958	900,00	83,11
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		60 Eks	43.000.000	20 Eks	7.956.784	10,00	3.483.440	1,00	3.950.110		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	10,00	3.483.440	50,00	43,78	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	24,34				475,00	63,44				
Predikat kinerja																			SR	SR									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							-	100,00	persen	37.888.000		-		-	-	-	-	-		-							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								100,00		37.888.000		-		-	-	-	-	-	-		-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-				-	-				
Predikat kinerja																			SR	SR									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			9 Unit	8.425.000.000	100 persen	1.687.141.498	9	1.087.591.255	100,00	Persen	1.244.275.145		565.317.804		312.251.324	-	-	-	-		877.569.128	-	70,53	9,00	1.965.160.383	9,00	116,48
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		72 bulan	142.000.000	24 Bulan	31.891.761	12	13.742.783	12,00		13.372.620	3,00	4.493.524	3,00	6.505.210	-	-	-	6,00		10.998.734	50,00	82,25	18,00	24.741.517	75,00	77,58
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		72 bulan	654.000.000	24 Bulan	611.255.670	12	415.149.665	12,00		495.597.765	3,00	339.145.068	3,00	89.523.989	-	-	-	6,00		428.669.057	50,00	86,50	18,00	843.818.722	75,00	138,05
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		72 bulan	1.075.000.000	24 Bulan	272.872.830	12	188.840.400	12,00		183.531.600	3,00	45.882.900	3,00	56.536.900	-	-	-	6,00		102.419.800	50,00	55,80	18,00	291.260.200	75,00	106,74
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan		72 bulan	1.445.000.000	24 Bulan	96.467.437	12	67.736.407	12,00		91.692.160	3,00	17.849.275	3,00	18.626.611	-	-	-	6,00		36.475.896	50,00	39,78	18,00	104.212.293	75,00	108,03
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		72 bulan	128.000.000	24 Bulan	51.388.800	12	19.980.000	12,00		28.512.000	3,00	4.950.000	3,00	4.950.000	-	-	-	6,00		9.900.000	50,00	34,72	18,00	29.880.000	75,00	58,14
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72 bulan	4.981.000.000	24 Bulan	623.265.000	12	382.142.000	12,00		431.569.000	3,00	152.997.037	3,00	136.108.614	-	-	-	6,00		289.105.651	50,00	66,99	18,00	671.247.651	75,00	107,70
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	61,01				75,00	99,37				
Predikat kinerja																			SR	SR									

Dasar Kontribusi Informasi Persandian

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 unit	5.145.000.000		2 Unit	2.033.739.924	-	1.260.876.640	1,00 unit	1.104.103.000	-	300.669.154	-	281.768.396	-	-	-	-	582.437.550	-	52,75	-	1.843.314.190	-	90,64																							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	3.677.000.000		24 Bulan	539.241.924	12,00	283.256.640	12,00	247.163.000	3,00	53.309.154	3,00	48.958.396	-	-	-	6,00	102.267.550	50,00	41,38	18,00	385.524.190	75,00	71,49																							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048 Hari	1.468.000.000		24 Bulan	1.494.498.000	12,00	977.620.000	12,00	856.940.000	3,00	247.360.000	3,00	232.810.000	-	-	-	6,00	480.170.000	50,00	56,03	18,00	1.457.790.000	75,00	97,54																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	48,70																												
Predikat kinerja																						SR	SR																												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.511.000.000			706.882.243	100 %	323.897.221	12,00 bulan	413.367.039		113.529.391	3,00	125.325.689	3,00	-	-	-	6,00	238.855.000	50,00			562.752.301		79,61																						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Kali	1.284.000.000		2 Unit	267.317.500	12	148.187.955	12,00	152.992.000	3,00	51.760.700	3,00	39.450.350	-	-	-	6,00	91.211.050	50,00	59,62	18,00	239.399.005	900,00	89,56																							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	577.000.000		3 Unit	332.728.868	12	141.483.016	12,00	224.780.200	3,00	59.180.900	3,00	58.811.750	-	-	-	6,00	117.992.650	50,00	52,49	18,00	259.475.666	600,00	77,98																							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bulan	1.650.000.000		24 Bulan	106.835.875	12	34.226.250	12,00	35.594.839	3,00	2.587.791	3,00	27.063.589	-	-	-	6,00	29.651.380	50,00	83,30	18,00	63.877.630	75,00	59,79																							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								42.560.000															42.560.000	-	-																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						37,50	48,85																												
Predikat kinerja																						SR	SR																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																						67,59	41,11																												
			Program Informasi dan Komunikasi Publik		1	8.513.000.000		2	4.953.478.232	-	4.642.898.672	1,00	2.563.231.840	-	427.314.000	-	1.477.760.200	-	-	-	-	1.905.074.200	-	74,32	-	6.547.972.872	-	132,19																							
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.513.000.000			4.953.478.232		4.642.898.672		2.563.231.840		427.314.000		1.477.760.200		-	-	-	1.905.074.200		74,32	-	6.547.972.872		132,19																							
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	jumlah Dokumen Index Kepuasan Masyarakat				5 Dokume	100.000.000		278.049.572															278.049.572		278,05																							
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8.400 Berita/ informasi	1.348.000.000		24 Bulan	827.140.000	12	221.420.000	12,00	185.760.000	3,00	56.590.000.000	3,00	70.970.000,00	-	-	-	6,00	127.560.000	50,00	68,67	18,00	348.980.000	75,00	42,19																							
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Komunikasi Publik	100 Persen	5.148.000.000		24 Bulan	2.623.098.450	12	2.649.078.720	12,00	1.385.323.000	3,00	133.693.500	3,00	1.018.796.400,00	-	-	-	6,00	1.152.491.900	50,00	83,19	18,00	3.801.570.620	75,00	144,93																							
			Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	72 Bulan	2.017.000.000		24 Bulan	953.239.782	12	325.045.380	12,00	269.703.000	3,00	50.977.500	3,00	102.621.800,00	-	-	-	6,00	153.599.300	50,00	56,95	18,00	478.644.680	75,00	50,21																							
			Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Dialog / Talkshow / Hibauan kepada Publik								12,00	128.245.840	3,00	37.285.000	3,00	19.560.000,00				6,00	56.845.000	50,00	44,33	6,00	56.845.000	-	-																							
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Publikasi melalui 'Balaho' /Spanduk/ Running Teks				12 Bulan	450.000.000		1.169.305.000	12,00	594.200.000	3,00	148.768.000	3,00	265.810.000,00	-	-	-	6,00	414.578.000	50,00	69,77	6,00	1.583.883.000	50,00	351,97																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	64,58																												
Predikat kinerja																						SR	SR																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																						50,00	64,58																												
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			1.413.000.000			1.888.885.923		522.960.945		1.044.085.086		264.816.710		208.750.736	-	-	-		473.567.446																													

Dasakominfo, Humas dan Prensida

	Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	28,15			45,00	28,32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Predikat kinerja	SR	SR					
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5	25,00	28,15					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11.134.332.565							
		6.232.568.658						
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	43,50	38,31					
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	SR	SR					

9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET L KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																						
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
				13 = 9+10+11+12		14 = 138*100		15 = 7 * 13		16 = 156*100																																												
18		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																																																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	12.876.120.000	100 persen	18.863.098.528		11.101.371.953	100,00 persen	11.170.496.433				4.183.562.540	-	-	-	-	5.379.979.793																																			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	816.000.000	100 persen	394.000.000		166.352.062	100,00 persen	136.625.733		69.606.900		28.100.000	-	-	-	97.706.900																																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunya dokumen perencanaan tahunan OPD	100	53.000.000	100	313.000.000	100,00	80.830.320	100,00	102.828.226	35,11	36.100.000,00	27	28.100.000	-	-	-	62,43	64.200.000	62,43	62,43	162,43	145.030.320	162,43	46,34																												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunya dokumen RKA-SKPD	100	53.000.000	100	27.000.000	100,00	7.129.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.129.500	100,00	26,41																												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunya dokumen RKA-SKPD	100	710.000.000	100	27.000.000	100,00	47.169.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	47.169.000	100,00	174,70																												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunya dokumen laporan kinerja OPD	-	-	100	27.000.000	-	31.223.242	100,00	33.787.507	99,14	33.506.900,00	-	-	-	-	-	99,14	33.506.900	99,14	99,14	99,14	64.730.142	99,14	239,74																												
Rate-rata capaian kinerja (%)																				40,39	40,39																																	
Predikat kinerja																				SR	SR																																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	53.000.000		12.008.098.528		5.698.748.485	100,00 persen	5.554.555.707			2.034.482.599	-	-	-	2.616.724.031																																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	100	11.981.098.528	100,00	5.689.731.163	100,00	5.537.307.494	10,20	565.058.732,00	37	2.034.482.599	-	-	-	46,95	2.599.541.331	46,95	46,95	146,95	8.289.272.494	146,95	69,19																												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100	53.000.000	100	27.000.000	100,00	9.017.322	100,00	17.248.213	99,62	17.182.700,00	-	-	-	-	99,62	17.182.700	99,62	99,62	199,62	26.200.022	199,62	97,04																													
Rate-rata capaian kinerja (%)																				73,28	73,28																																	
Predikat kinerja																				R	R																																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.170.000.000	24 Bulan	500.000.000		301.095.205	100,00 Persen	157.338.000		5.060.000		12.500.000	-	-	17.560.000																																				
		Pengadaan Pakaiannya	Persentase terhadap penyediaan pakaiannya beserta atribut kelengkapannya	100	250.000.000	100	170.000.000	100,00	85.405.875	100,00	16.500.000	-	-	76	12.500.000	-	-	75,76	12.500.000	75,76	75,76	175,76	97.905.875	175,76	57,59																													
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100	-	100	330.000.000	100,00	-	100,00	140.838.000	3,59	5.060.000,000	-	-	-	-	3,59	5.060.000	3,59	3,59	103,59	5.060.000	103,59	1,53																													
				100	920.000.000		-	100,00	215.689.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	215.689.330	-	-																													
Rate-rata capaian kinerja (%)																				39,68	39,68																																	
Predikat kinerja																				SR	SR																																	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

													Rata-rata capaian kinerja (%)		47.28	47.28					147.28	100.16													
													Predikat kinerja		SR	SR																			
				Memelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.010.000.000	2	745.000.000	-	1.463.432.595	1,00	1.166.001.680							634.281.700	-	-	-	821.584.265											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	600.000.000	100	185.000.000	100,00	131.887.370	100,00	172.352.100	16,59	28.588.865.000	14	23.666.000	-	-	-	-	30,32	52.254.865	30,32	30,32	130,32	184.142.235	130,32					99,54		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	410.000.000	100	80.000.000	100,00	33.878.250	100,00	37.670.850	25,00	9.417.500.000	29	10.972.500	-	-	-	-	54,13	20.390.000	54,13	54,13	154,13	54.268.250	154,13					67,84		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	100	355.000.000	-	1.039.332.210	100,00	907.654.730	12,84	116.503.700.000	65	585.787.200	-	-	-	-	77,37	702.290.900	77,37	77,37	77,37	1.741.623.110	77,37					490,60		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	100	125.000.000	-	258.334.765	100,00	48.324.000	67,86	32.792.500.000	29	13.856.000	-	-	-	-	96,53	46.648.500	96,53	96,53	96,53	304.983.265	96,53					243,99		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		64.59	64.59					114.59	225.49													
													Predikat kinerja		SR	SR																			
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		55.19	55.19																			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60	1.350.000.000		1.055.127.613	12,00	308.699.354		93.599.780																						
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1.350.000.000	1 Kegiatan	1.055.127.613	1,00 Kegiatan	308.699.354	1,00 Kegiatan	93.599.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	308.699.354	100,00					29,26		
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100	1.350.000.000	100	500.000.000	100,00	183.983.427		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.983.427	100,00							36,80	
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	-	-	100	555.127.613	-	124.715.927	100,00	93.599.780	-	-	4	4.151.000	-	-	-	-	4,43	4.151.000	4,43	4,43	4,43	128.866.927	4,43					23,21		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		2.22	2.22					52.22	30.01													
													Predikat kinerja		SR	SR																			
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		2.22	2.22																			
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60	3.950.000.000		1.250.000.000	12,00	1.370.058.600		-																						

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100	450.000.000	-	181.030.409									19	54.181.000	-	-	-	-	19,24	54.181.000	-	-	19,24	235.211.409	19,24	52,27
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100	450.000.000	-	96.599.750	100,00	99.775.750	12,48	11.400.000.000	39	35.970.000	-	-	-	51,87	47.370.000	51,87	47,48	51,87		143.969.750	51,87	31,99				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										18,14	16,64			25,93	16,00	
Predikat kinerja																										SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																										18,14	16,64					
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			950.000.000	450.000.000		117.657.485	217.055.930		45.570.000	78.701.000	-	-										124.271.000						
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 unit		950.000.000	2 Unit	450.000.000	-	117.657.485	1,00 unit	217.055.930	-	45.570.000	-	78.701.000	-	-							124.271.000	-	57,25	-	241.928.485	-	53,76
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100		950.000.000	100	450.000.000	100,00	117.657.485	100,00	217.055.930	20,99	45.570.000.000	36	78.701.000	-	-	-	57,25	124.271.000	57,25	57,25	157,25	241.928.485	157,25	53,76				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										57,25	57,25			157,25	53,76	
Predikat kinerja																										SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																										57,25	57,25					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											12.677.892.203		5.940.459.940																			
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			29,04	28,79															
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			SR	SR															

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10) Dinas Pariwisata

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																									
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13		16=15/6*100															
19		DINAS PARIWISATA																																							
		Program Pengembangan Kebudayaan			1.600.000.000	100 persen	2.904.557.690		4.597.602.380	100,00	persen	561.807.362			111.380.000	-	-	-	-			452.414.112																			
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembiayaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	100 persen	800.000.000	100 persen	2.694.557.690		856.878.543	100,00	persen	280.918.486			57.900.000	-	-	-	-			260.844.986																			
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4 Event	800.000.000	2 Kegiatan	2.442.557.690	1,00	26.274.000	-					-	-	-	-	-			-				1,00	26.274.000	50,00	1,08												
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Budayawan/Tokoh Adat	2 Kegiatan	252.000.000	-	-	830.604.543	12,00	280.918.486	0,25	202.944.986	0,25	57.900.000,00	-	-	-	-	0,50			260.844.986	4,17	92,85	0,50	1.091.449.529	25,00	433,11													
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17	92,85			37,50	217,10													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
		Pembiayaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembiayaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	- 0	800.000.000	210.000.000	3.740.723.837	100,00	persen	280.888.876				53.480.000	-	-	-	-			191.569.126																				
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana lembaga adat yang dibangun	4 event	800.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	12,00	3.740.723.837	12,00	280.888.876	0,25	138.089.126,00	0,25	53.480.000,00	-	-	-	-	0,50		191.569.126	4,17	68,20	12,50	3.932.292.963	625,00	1.872,52													
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17	68,20			625,00	1.872,52													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		4,17	80,53																	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			6.750.000.000	24 Bulan	995.400.000		598.389.114	100,00	Persen	595.229.109			69.032.596	-	-	-	-			210.297.022																			
		Pembiayaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	5 Dok	6.750.000.000	4 Dokumen	995.400.000	1,00	Dokumen	598.389.114	2,00	Dokumen	595.229.109	-		69.032.596	-	-	-	-			210.297.022	-	35,33	1,00	808.686.136	25,00	81,24												
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pembiayaan Seni Tradisional	100 Event	3.534.000.000	2 Kegiatan	995.400.000	20,00	598.389.114	12,00	595.229.109	0,25	141.264.426	0,25	69.032.596,00	-	-	-	-	0,50		210.297.022	4,17	35,33	20,50	808.686.136	1.025,00	81,24													
				2 dok	360.000.000										-	-	-	-	-			-																			
				5 event	2.856.000.000										-	-	-	-	-			-																			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17	35,33			525,00	81,24													
																					Predikat kinerja		SR	SR																	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		4,17	35,33																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,00	Unit	14.614.600.000	100 persen	15.949.643.289	9,00	5.200.341.256	100,00	Persen	5.087.007.678							2.613.460.890	-	51,38	9,00	7.813.802.146	9,00	48,99														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		212.000.000		102.900.000		70.176.087					71.967.750	-						5.310.000	-	51,32																		

Dinas Pariwisata

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	5 unit	3.500.000.000	2 Unit	841.496.379	1,00	77.012.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	77.012.231	50,00	9,15							
Rata-rata capaian kinerja (%)																												-	-										
Predikat kinerja																												SR	SR										
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1,00	1.530.300.000	1	1.921.839.000	-	901.133.535	1,00	1.021.669.300	-	212.031.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.520.185	-	42,73	-	1.337.653.720	-	69,60				
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 bln	965.000.000	24	192.300.000	12,00	63.284.535	12,00	83.289.000	3,00	10.368.505	3,00	9.907.242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.275.747	50,00	24,34	18,00	83.560.282	75,00	43,45				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas dan Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan	60 bln	565.300.000	24	1.729.539.000	12,00	837.849.000	12,00	938.380.300	3,00	214.120.576	3,00	202.123.862.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.244.438	50,00	44,38	18,00	1.254.093.438	75,00	72,51				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												50,00	34,35										
Predikat kinerja																												SR	SR										
					Penyelenggaraan Barung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2 unit	1.098.700.000	2 Unit	549.603.600	-	249.350.628	1,00 unit	241.334.004	-	69.644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.509.500	-	-	377.860.128	-	-					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Jabatan	60 bln	675.700.000	2 OPD	293.403.600	-	116.721.289	12,00	107.234.152	3,00	28.994.400	3,00	36.033.800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.028.200	50,00	60,64	6,00	181.749.489	300,00	61,95				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Operasional/Lapangan	-	-	-	-	-	111.799.339	12,00	112.949.852	3,00	22.471.100	3,00	26.800.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.271.300	50,00	43,62	6,00	161.070.639	-	-				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Perbaikan Perlatan dan Mesin Lainnya	60 bln	96.000.000	24 Bulan	46.200.000	12,00	20.830.000	12,00	21.150.000	3,00	7.400.000	3,00	6.810.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.210.000	50,00	67,19	18,00	35.040.000	75,00	75,84				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bln	327.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												50,00	57,15										
Predikat kinerja																												SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																												37,50	43,23										
					PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DAESTINASI PARIWISATA		52.379.108.000		7.963.034.929		7.110.829.766		1.465.148.561				897.121.000										1.036.553.861												
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata		19.065.000.000		420.000.000	-	3.277.861.598																											
					Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan Objek Tujuan Wisata	60 bln	16.065.000.000	2 Dokumen	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	60 bln	3.000.000.000	2 Dokumen	210.000.000	12,00	3.277.861.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	3.277.861.598	600,00	1.560,89					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												-	-										
Predikat kinerja																												SR	SR										
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata	2 unit	33.314.108.000	2 Unit	7.543.034.929	-	3.832.968.168	1,00 unit	1.465.148.561	-	897.121.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036.553.861	-	70,75	-	4.869.522.029	-	64,56				
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Keparwisataaan	60 bln	32.835.800.000	2 Dokumen	-	12,00	1.287.900.000	-	144.898.910	3,00	128.365.910.000	3,00	6.750.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.115.910	-	-	18,00	1.423.015.910	900,00	-			

Dinas Pariwisata

11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100										
20		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																							17			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.435.234.300	100 persen	8.314.500.094		5.868.984.903	100,00 persen	5.568.356.642		1.026.212.103		1.560.866.706								2.587.078.809						
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terpenuhi nya Dokumen Perencanaan OPD	100 persen	71.980.938	100 persen	37.485.450	29.632.767	100,00 persen	30.720.151		15.992.509		-							15.992.509							
		1. Penyusunan dokume perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	60 Bulan	12.073.421	24 Bulan	6.324.173	12 Bulan	4.999.346	12,00 Bulan	4.999.256	3,00	4.999.256,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	4.999.256	25,00	100,00	15,00	9.998.602	62,50	158,10
		2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD	60 Bulan	13.920.727	24 Bulan	8.171.479	12 Bulan	6.459.667	12,00 Bulan	6.495.987	3,00	6.495.987,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.495.987	25,00	100,00	15,00	12.955.654	62,50	158,55
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	60 Bulan	12.800.255	24 Bulan	6.851.007	12 Bulan	5.415.816	12,00 Bulan	5.481.196		-									-	-	-	12,00	5.415.816	50,00	79,05
		4. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	60 Bulan	10.839.236	24 Bulan	5.089.988	12 Bulan	4.023.706	12,00 Bulan	4.497.266	3,00	4.497.266,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	4.497.266	25,00	100,00	15,00	8.520.972	62,50	167,41
		5. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	60 Bulan	10.643.642	24 Bulan	4.894.394	12 Bulan	3.869.086	12,00 Bulan	3.249.586		-									-	-	-	12,00	3.869.086	50,00	79,05
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Adanya pelaporan SKPD	60 Bulan	11.903.658	24 Bulan	6.154.410	12 Bulan	4.865.146	12,00 Bulan	5.996.860		-									-	-	-	12,00	4.865.146	50,00	79,05
Rata-rata capaian kinerja (%)																		12,50	50,00				56,25	120,20				
Predikat kinerja																		SR	SR									
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		-	4.858.439.481		4.846.940.985	3.261.716.278	100,00 persen	3.563.185.524		470.631.836		1.197.173.775								1.667.805.611						
		7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbiayanya gaji dan tunjangan ASN	24 Bulan	4.847.958.948	24 Bulan	4.842.209.700	12 Bulan	3.257.976.132	12,00 Bulan	3.560.331.058	3,00	470.631.836	3,00	1.197.173.775,00	-	-	-	-	-	6,00	1.667.805.611	50,00	48,84	18,00	4.925.781.743	75,00	101,73
		8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pelaporan keuangan akhir tahun	60 Bulan	10.480.533	24 Bulan	4.731.285	12 Bulan	3.740.146	12,00 Bulan	2.854.466		-									-	-	-	12,00	3.740.146	50,00	79,05
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25,00	23,42				62,50	90,39				
Predikat kinerja																		SR	SR									
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100 persen	34.211.748	100 persen	28.462.500		100,00 persen	36.000.000		-		36.000.000								36.000.000						
		9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek	24 Bulan	34.211.748	24 Bulan	28.462.500	12 Bulan	-	12,00 Bulan	36.000.000		-	3,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	36.000.000	25,00	100,00	15,00	36.000.000	62,50	126,48
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25,00	100,00				62,50	126,48				
Predikat kinerja																		SR	SR									
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100 persen	817.236.566		782.741.079	575.188.916	100,00 persen	334.103.808		240.275.461		45.839.735								286.115.196						
		10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kompons Instalasi Listrik Kantor	60 Bulan	42.230.014	24 Bulan	36.480.766	12 Bulan	28.838.650	12,00 Bulan	4.237.600	3,00	4.237.600	-	-	-	-	-	-	-	3,00	4.237.600	25,00	100,00	15,00	33.076.150	62,50	90,67
		11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	159.723.311	24 Bulan	153.974.063	12 Bulan	206.157.472	12,00 Bulan	120.277.672	3,00	103.425.088	3,00	10.086.068,00	-	-	-	-	-	6,00	113.511.156	50,00	94,37	18,00	319.668.628	75,00	207,61
		12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	54.432.773	24 Bulan	48.683.525	12 Bulan	38.485.000	12,00 Bulan	13.030.000	3,00	8.836.000	3,00	1.377.000,00	-	-	-	-	-	6,00	10.213.000	50,00	78,38	18,00	48.698.000	75,00	100,03
		13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	55.608.558	24 Bulan	49.859.310	12 Bulan	37.263.894	12,00 Bulan	13.240.536	3,00	5.945.928	3,00	1.835.467,00	-	-	-	-	-	6,00	7.781.395	50,00	58,77	18,00	45.045.289	75,00	90,34

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	17.088.708	24 Bulan	11.339.460	12 Bulan	8.964.000	12,00 Bulan	8.964.000	3,00	4.482.000,00	-	-	-	-	3,00	4.482.000	25,00	50,00	15,00	13.446.000	62,50	118,58	
				15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	488.153.203	24 Bulan	482.403.955	12 Bulan	255.480.000	12,00 Bulan	174.354.000	3,00	117.830.845	3,00	28.059.200,00	-	-	-	6,00	145.890.045	50,00	83,67	18,00	401.370.045	75,00	83,20
Rata-rata capaian kinerja (%)																					41,67	77,53		70,83	115,07			
Predikat kinerja																					SR	SR						
				KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			1.433.215.994	24 Bulan	1.421.717.498		1.045.851.264	100,00 Persen	385.821.050		6.401.050		-	-	-	-	6.401.050							
				16. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	24 Bulan	263.359.351	24 Bulan	257.610.103	12 Bulan	422.171.264	12,00 Bulan	6.401.050	3,00	6.401.050,000	-	-	-	-	-	3,00	6.401.050	25,00	100,00	15,00	428.572.314	62,50	166,36
				17. Pengadaan Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor	24 Bulan	1.169.856.643	24 Bulan	1.164.107.395	12 Bulan	623.680.000	12,00 Bulan	379.420.000		-	-	-	-	-	-		-	-	12,00	623.680.000	50,00	53,58	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					12,50	50,00		56,25	109,97			
Predikat kinerja																					SR	SR						
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 persen	1.047.342.481	100 persen	1.035.843.985		829.079.000	100,00 Persen	1.051.315.544		253.146.447		256.087.481	-	-	-	509.233.928							
				18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	133.784.958	24 Bulan	128.035.710	12 Bulan	101.214.000	12,00 Bulan	152.994.800	3,00	23.970.904	3,00	59.173.590,00	-	-	-	6,00	83.144.494	50,00	54,34	18,00	184.358.494	75,00	143,99
				19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	913.557.523	24 Bulan	907.808.275	12 Bulan	727.865.000	12,00 Bulan	898.320.744	3,00	229.175.543	3,00	196.913.891,00	-	-	-	6,00	426.089.434	50,00	47,43	18,00	1.153.954.434	75,00	127,11
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50,00	50,89		75,00	135,55			
Predikat kinerja																					SR	SR						
				KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 persen	172.807.093	100 persen	161.308.598		127.516.678	100,00 Persen	167.210.565		39.764.800		25.765.715	-	-	-	65.530.515							
				20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Bulan	140.417.705	24 Bulan	134.668.457	12 Bulan	106.457.278	12,00 Bulan	105.886.515	3,00	32.146.800	3,00	25.765.715,00	-	-	-	6,00	57.912.515	50,00	54,69	18,00	164.369.793	75,00	122,06
				21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Bulan	32.389.389	24 Bulan	26.640.141	12 Bulan	21.059.400	12,00 Bulan	10.124.050	3,00	7.618.000		-	-	-	-	3,00	7.618.000	25,00	75,25	15,00	28.677.400	62,50	107,65
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								51.200.000	3,00	51.100.000,000	-	-	-	-	3,00	51.100.000	-	99,80	3,00	51.100.000	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,00	76,58		68,75	114,85			
Predikat kinerja																					SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																					27,38	61,20						
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		662.057.413	100 persen	639.060.422		501.809.257	100,00 persen	449.623.410				139.029.833	-	-	-	362.638.530								
				KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100 persen	153.059.798	100 persen	147.310.550		220.187.800	100,00 persen	51.469.292				22.350.000	3,00	-	3,00	37.019.292							
				Pengembangan Bahan Pustaka						198.563.250	3,00			-	-	-	-	-	-		-	-	-	198.563.250	-	-		
				22. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Pengembangan Bahan Pustaka	60 Bulan	153.059.798	24 Bulan	147.310.550	12 Bulan	220.187.800	12,00 Bulan	51.469.292	3,00	14.669.292	3,00	22.350.000,000	-	-	-	6,00	37.019.292	50,00	71,93	18,00	257.207.092	75,00	174,60
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50,00	71,93		9,375	21,83			
Predikat kinerja																					SR	SR						
				KEGIATAN PEMBUDAYAAN SEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100 persen	508.997.615		491.749.871	1	281.621.457		398.154.118				116.679.833	-	-	-	325.619.238	-	-	1,00	607.240.695	-	-	
				23. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tersedianya Sosialisasi Budaya Baca	60 Bulan	123.709.238	24 Bulan	117.959.990	12 Bulan	61.193.004	12,00 Bulan	160.144.195	3,00	110.404.090	3,00	11.830.105,000	-	-	-	6,00	122.234.195	50,00	76,33	18,00	183.427.199	75,00	155,50

Dinas Penguasaan dan Keuangan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

		24. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan Budaya Gemar Membaca	60 Bulan	163.418.700	24 Bulan	157.669.452	12 Bulan	112.927.883	12,00 Bulan	135.067.748	3,00	37.464.310	3,00	77.854.838,00	-	-	-	-	6,00	115.319.148	50,00	85,38	18,00	228.247.031	75,00	144,76																				
		25. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Literasi	24 Bulan	221.869.677	24 Bulan	216.120.429	12 Bulan	107.500.570	12,00 Bulan	102.942.175	3,00	61.071.005	3,00	26.994.890,00	-	-	-	-	6,00	88.065.895	50,00	85,55	18,00	195.566.465	75,00	90,49																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	82,42			75,00	130,25	Predikat kinerja		SR	SR																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																				50,00	77,17																										
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			-	100 persen	-	-	100,00 persen	45.699.904					24.642.140	-	-	-	-		24.642.140																										
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota								45.699.904					24.642.140	-	-	-	-		24.642.140																										
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno								45.699.904		3,00			24.642.140,00	-	-	-	-	3,00	24.642.140	-	53,92	3,00	24.642.140	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	53,92																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																				-	53,92																										
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			71.301.445	100 persen	65.552.198		36.541.919	100,00 persen	113.319.139		51.972.445		2.850.000	-	-	-	-		54.822.445																										
		KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA			71.301.445		65.552.198		36.541.919		89.252.445		51.972.445		2.850.000	-	-	-	-		54.822.445																										
		26. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Adanya Penyelamatan Arsip Dinamis	60 Bulan	71.301.445	24 Bulan	65.552.198	12 Bulan	36.541.919	12,00 Bulan	89.252.445	3,00	51.972.445,00	3,00	2.850.000,00	-	-	-	-	6,00	54.822.445	50,00	61,42	18,00	91.364.364	75,00	139,38																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	61,42																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																				-	61,42																										
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA			36.604.306	2 2 Dokum	30.855.058		16.671.655	1,00 Dokumen	24.066.694		-		-	-	-	-	-		-																										
		27. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Adanya Penyelamatan Arsip Statis	60 Bulan	36.604.306	24 Bulan	30.855.058	12 Bulan	16.671.655	12,00 Bulan	24.066.694		-		-	-	-	-	-		-																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																				50,00	54,03																										
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			100 persen	94.170.987		82.672.491		47.310.340		85.757.586		28.965.434		36.380.500	-	-	-		65.345.934																										
		KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG SERSIKALA KABUPATEN/ KOTA			500 Berita	32.464.543		26.715.295	100	18.454.385		44.358.970		15.062.470		26.510.500	-	-	-		41.572.970	-	-	100,00		60.027.355	-	-																			
		28. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	60 Bulan	32.464.543	24 Bulan	26.715.295	12 Bulan	18.454.385	12,00 Bulan	44.358.970	3,00	15.062.470,00	3,00	26.510.500,00	-	-	-	-	6,00	41.572.970	50,00	93,72	18,00	60.027.355	75,00	224,69																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	93,72																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																				50,00	57,42																										
		KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN			61.706.444		55.957.197		28.855.955		41.398.616		13.902.964		9.870.000	-	-	-	-		23.772.964																										
		29. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyelesaian atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Daerah	60 Bulan	61.706.444	24 Bulan	55.957.197	12 Bulan	28.855.955	12,00 Bulan	41.398.616	3,00	13.902.964,00	3,00	9.870.000,00	-	-	-	-	6,00	23.772.964	50,00	57,42	18,00	52.628.919	75,00	94,05																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	57,42																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7																				50,00	75,57																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.262.756.681										3.094.527.855																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																				30,48	59,72																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																				SR	SR																										

Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

III Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Dinas Perikanan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATENKOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100			15 = 7 + 13		16 = 15/100	
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
21			DINAS PERIKANAN																									
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.666.788	100 persen	12.807.755	7.081.540	100,00 persen	8.061.531.990																		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1.112.000	100 persen	321.000	119.413	100,00 persen	164.152.840																	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dok	1.060.000	10 Dok	300.000	5,00 Dok	109.510	5,00 Dok	150.163.984	0,75	17.344.328	52.748.856,00	-	-	-	-	0,75	70.093.184	15,00	46,68	5,75	70.202.694	57,50	23.400,90	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	52.000	2 Lap	21.000	1,00 Lap	9.903	1,00 Dok	13.988.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9.903	50,00	47,16		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		7,50	23,34			53,75	11.724,03		
																			Predikat kinerja		SR	SR						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	27.170.788	9.053.996	4.258.756	100,00 persen	4.215.797.688																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72 Bulan	27.118.788	24 Bulan	9.039.596	12,00 Bulan	4.257.277	12,00 Bulan	4.213.827.372	3,00	600.386.323	1.403.768.536,00	-	-	-	-	3,00	2.004.154.859	25,00	47,56	15,00	2.008.412.136	62,50	22.217,94	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Lap	52.000	2 Lap	14.000	1,00 Lap	1.479	1,00 Lap	1.970.316	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-	2,00	-	1,02	1.479	51,00	10,56		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		13,50	23,78			56,75	11.114,25		
																			Predikat kinerja		SR	SR						
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.119.000	100 persen	1.513.277	100 persen	489.383	100,00 persen	419.486.873																
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 Bulan	71.000	24 Bulan	22.250	12,00 Bulan	6.688.060	12,00 Bulan	7.776.573	3,29	2.131.545	1.444.445,00	-	-	-	-	3,29	3.575.990	27,41	45,98	15,29	3.582.678	63,70	16.101,92	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Paket	350.000	31 Paket	388.972	1,00 Paket	281.256.550	15,00 Paket	30.326.526	7,56	19.108.482	2.677.424,00	-	-	-	-	7,56	21.785.906	50,41	71,84	8,56	22.067.163	27,62	5.673,19	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	298.000	24 Bulan	95.200	12,00 Bulan	9.440.915	12,00 Bulan	8.415.102	4,09	2.866.264	1.244.190,00	-	-	-	-	4,09	4.110.454	34,06	48,85	16,09	4.119.895	67,03	4.327,62	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	72 Bulan	30.000	24 Bulan	11.000	- -	-	12,00 Bulan	2.040.000	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	3,00	-	12,50	-	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	88.000	24 Bulan	28.000	12,00 Bulan	6.347.224	12,00 Bulan	7.098.672	5,11	3.023.398	668.251,00	-	-	-	-	5,11	3.691.649	42,59	52,00	17,11	3.697.996	71,30	13.207,13	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan	82.000	24 Bulan	17.855	12,00 Bulan	13.140.000	12,00 Bulan	13.140.000	3,00	2.340.000	2.340.000,00	-	-	-	-	3,00	4.680.000	25,00	35,62	15,00	4.693.140	62,50	26.284,74	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Bulan	1.200.000	24 Bulan	950.000	12,00 Bulan	172.510.000	12,00 Bulan	350.690.000	3,00	52.457.100	77.063.401,00	-	-	-	-	3,00	129.520.501	25,00	36,93	15,00	129.693.011	62,50	13.651,90	
																			Predikat kinerja		32,78	41,60			52,45	11.320,93		

Dinas Perikanan

			Sub. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	48,00 UPI	1.000.000	45 UPI	1.080.000	9,00 UPI	41.249.961	20,00 UPI	108.413.924	2,75	14.908.899						12.710.000,00	-	-	-	-	2,75	27.618.899	13,75	25,48	11,75	27.660.149	26,11	2.561,12																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											13,75	25,48			26,11	2.561,12																				
Predikat kinerja																											SR	SR																								
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	1.000.000		95.500.000		166.683		775.209.672								88.775.200,00	-	-	-	-		111.050.177,000																										
			Sub. Kegiatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72 Bulan	500.000	24 Bulan	95.250.000	12,00 Bulan	69.680	12,00 Bulan	189.652.053	1,18	18.663.753						88.775.200,00	-	-	-	-	1,18	107.438.953	9,84	56,65	13,18	107.508.633	54,92	112,87																				
			Sub. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72 Bulan	500.000	24 Bulan	250.000	12,00 Bulan	97.003	12,00 Bulan	585.557.619	0,07	3.611.224							-	-	-	-	0,07	3.611.224	0,62	0,62	12,07	3.708.227	50,31	1.483,29																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											5,23	28,63			52,61	798,08																				
Predikat kinerja																											SR	SR																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																											9,49	27,05																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																											6.118.383.697																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																											SR	SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																											17.284.957.329																									

Dinas Perikanan

2) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																													
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp															
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100																											
22		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																																											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	117.360.450.437	100 persen	40.842.907.572		24.761.677.045	100,00 persen	19.186.828.749			8.877.042.345	-	-	-	-	-	-	12.096.057.062																									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 persen	90.366.376.555	100 persen	36.146.550.822	18.068.613.260	100,00 persen	16.467.971.927			7.937.130.897	-	-	-	-	-	-	10.743.725.012																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60 Bn	90.366.376.555	48	36.146.550.622	18.068.613.260	12,00	16.467.971.927	3,00	2.806.594.115	3,00	7.937.130.897,00	-	-	-	-	-	10.743.725.012	50,00	65,24	42,00	28.812.338.272	87,50	79,71																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	65,24			87,50	79,71	Predikat kinerja																			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.370.875.250	24 Bulan	2.791.622.000		1.404.962.740	100,00 Persen	1.640.635.290			630.234.212	-	-	-	-	-	-	891.308.023																									
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air	60 Bn	640.321.450	48	154.322.000	77.322.000	12,00	77.323.750	3,00	10.960.141	3,00	23.299.342,00	-	-	-	-	-	34.259.483	50,00	44,31	42,00	111.581.483	87,50	72,30																			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bn	50.000.000	48	13.000.000	6.355.740	12,00	6.261.540		4.833.670	6,00	6.224.870,00	-	-	-	-	-	11.058.540	50,00	176,61	42,00	17.414.280	87,50	133,96																			
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa tenaga THL, CS, penjaga malam dan petugas kebun	60 Bn	3.680.553.800	48	2.624.300.000	1.321.285.000	12,00	1.557.050.000	3,00	245.280.000	3,00	600.710.000,00	-	-	-	-	-	845.990.000	50,00	54,33	42,00	2.167.275.000	87,50	82,58																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	91,75			87,50	96,28	Predikat kinerja																			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	8.796.756.592	100 persen	1.259.734.950		2.115.301.475	100,00 Persen	1.010.179.322			280.743.836	-	-	-	-	-	-	421.126.827																									
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk admn kantor	60 Bn	305.112.302			144.327.400	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	144.327.400	-	-																			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bola lampu, saklar dan fitting untuk penerangan kantor	60 Bn	49.401.900	48	13.170.000	6.585.120	12,00	13.152.256	3,00	2.127.840	3,00	4.255.680,00	-	-	-	-	-	6.383.520	50,00	48,54	42,00	12.968.640	87,50	98,47																			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bn	300.000.000	48	225.000.000	95.789.227	12,00	266.737.858	3,00	8.573.523	3,00	26.637.589,00	-	-	-	-	-	35.211.112	50,00	13,20	42,00	131.000.339	87,50	58,22																			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bn	138.788.280	48	40.000.000	18.900.000	12,00	18.900.000	-	4.536.000	6,00	9.072.000,00	-	-	-	-	-	13.608.000	50,00	72,00	42,00	32.508.000	87,50	81,27																			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60 Bn	1.053.192.350	48	190.000.000	93.413.760	12,00	158.272.800	3,00	26.134.500	3,00	50.798.400,00	-	-	-	-	-	76.932.900	50,00	48,61	42,00	170.346.660	87,50	89,66																			
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terfaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bn	4.004.737.600	48	750.000.000	299.641.000	12,00	532.379.000	3,00	96.851.600	3,00	179.585.600,00	-	-	-	-	-	276.437.200	50,00	51,92	42,00	576.078.200	87,50	76,81																			
				60 Bn	2.752.742.500			1.435.862.500	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.435.862.500	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	49,13			87,50	80,77	Predikat kinerja																			

Dinas Pertanian

			Pengawasan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pemeliharaan UPA dan Pengelolaan Asinan	60 Bln	1.595.387.000	48	250.000.000	36	55.749.515	12,00	192.032.910	-	35.932.317,00	6,00	58.229.045,00	-	-	-	-	6,00	94.161.362	50,00	49,03	42,00	149.910.877	87,50	59,96		
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura	100 Ha	1.421.102.350	80	736.184.860	60	441.753.617	20,00	438.620.916	-	40.383.539,00	10,00	80.527.612,00	-	-	-	-	10,00	120.911.151	50,00	27,57	70,00	562.664.768	87,50	76,43		
					60 Bln	741.750.000																								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	38,30		29,17	19,99				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2	50,00	38,30							
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		67.179.947.425	100 persen	9.880.184.620		14.378.993.138	100,00 persen	6.157.118.139				597.419.962	-	-	-	-	722.609.906									
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	60 persen	15.839.513.625	100 persen	1.858.311.620		737.257.071	100,00 persen	763.067.824				323.063.644	-	-	-	-	396.780.770									
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Tersedianya data statistik pertanian tahun 2021	200 Bk	2.256.397.425	160	500.000.000	120,00	206.831.774	40,00	240.686.214	10,00	34.451.654	10,00	120.179.634,00	-	-	-	-	20,00	154.631.288	50,00	64,25	140,00	361.463.062	87,50	72,29		
			Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, P2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, P2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, LCP2B	Terlaksananya pembagian padi IP 200	3.000 Ha	13.583.116.200	2.000	1.358.311.620	#####	530.425.297	250,00	522.381.610	-	39.265.472	50,00	202.884.010,00	-	-	-	-	50,00	242.149.482	20,00	46,35	2.050,00	772.574.779	102,50	56,88		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	35,00	55,30		29,17	24,10				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Prasarana Pertanian	60 persen	51.340.433.800	100 persen	8.021.873.000		13.641.736.067	100,00 persen	5.394.050.315		51.472.818		274.356.318	-	-	-	-	325.829.136									
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi	500 Ha	4.408.012.300	400	1.250.000.000	300	3.613.465.800	-	307.422.754	-	11.340.518,00	-	35.460.518,00	-	-	-	-	-	46.801.036	-	15,22	300,00	3.660.266.836	75,00	292,82		
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Terbangunnya jalan usaha tani	60 Bln	5.371.873.000	48	4.051.873.000	36	237.740.169	12,00	1.390.131.318	-	6.862.300,00	3,00	100.886.300,00	-	-	-	-	3,00	107.748.600	25,00	7,75	39,00	345.488.769	81,25	8,53		
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukung nye						2.579.174.000				33.270.000,00								33.270.000				2.612.444.000					
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Terlaksananya pengelolaan lahan dan air pertanian lainnya	60 Bln	34.958.173.000	48	2.720.000.000	36	1.222.958.098	12,00	3.696.496.243	-	-	3,00	138.009.500,00	-	-	-	-	3,00	138.009.500	25,00	3,73	39,00	1.360.967.598	81,25	50,04		
					60 Bln	1.230.502.500			24	616.525.000															24,00	616.525.000				
					60 Bln	5.371.873.000			12	5.371.873.000															12,00	5.371.873.000				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	8,90		79,17	117,13				
																					Predikat kinerja	SR	SR							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3	16,67	8,90							
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		6.844.239.100	100 persen	277.109.340		924.602.274	100,00 persen	191.421.344		26.187.788		43.766.320	-	-	-	-	69.954.108									
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		6.844.239.100	100 persen	277.109.340		924.602.274	100,00 persen	191.421.344		26.187.788		43.766.320	-	-	-	-	69.954.108									
			Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Terkendainya serangan OPT lebih dini	2.500 Ha	1.176.285.400	2.000	277.109.340	1.500	71.319.674	500,00	191.421.344	-	26.187.788,00	250,00	43.766.320,00	-	-	-	-	250,00	69.954.108	50,00	36,54	1.750,00	141.273.782	87,50	50,98		

Daftar Riwayat

				60	Bln	5.767.953.700			12	853.282.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	853.282.600	-	-							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	36,54			29,17	16,99					
																			Predikat kinerja	SR	SR									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4	50,00	36,54									
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan dan Pembinaan Izin Usaha Pertanian			10.940.755.755	100	persen	249.510.000		1.492.267.794	100,00	persen	235.126.964		31.931.813	162.657.995	-	-			194.589.808								
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian			10.940.755.755	100	persen	249.510.000		1.492.267.794	100,00	persen	235.126.964		31.931.813	162.657.995	-	-			194.589.808								
				25	kali	3.938.567.600			3	594.612.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	594.612.350	-	-							
		Pembinaan dan pengawasan penerapan izn usaha pertanian	Pembinaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	10	kali	1.605.188.500	8		249.510.000	6	41.541.394	2,00		235.126.964		31.931.813	1,00	162.657.995,00	-	-	1,00	194.589.808	50,00	82,76	7,00	236.131.202	87,50	94,64		
				60	Bln	1.482.717.900			24	656.412.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	656.412.400	-	-							
				60	Bln	840.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				60	Bln	1.102.477.100			24	199.701.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	199.701.650	-	-							
				60	Bln	1.971.804.655			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	82,76			-	-					
																			Predikat kinerja	SR	SR									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5	50,00	82,76									
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.908.528.700	100	persen	1.218.570.175		721.631.710	100,00	persen	1.160.324.902			415.584.896	-	-			502.837.116								
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.908.528.700	100	persen	1.218.570.175		721.631.710	100,00	persen	1.160.324.902			415.584.896	-	-			502.837.116								
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian	60	Bln	2.179.264.350	48		768.090.175	36	303.501.089	12,00		694.876.665	3,00	87.252.220,00	3,00	241.206.665,00	-	-	6,00	328.458.885	50,00	47,27	42,00	631.969.974	87,50	82,28		
		Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan petani	24	Bln	729.264.350	12		450.480.000	-	202.880.621	12,00		465.448.237	-	-	6,00	174.378.231,00	-	-	6,00	174.378.231	50,00	37,46	6,00	377.258.852	50,00	83,75		
		Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan							215.250.000																	215.250.000	-	-	
		Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota	Terlalthnya petani tanaman pangan dan hortikultura																										-	-
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	28,24			29,17	27,43					
																			Predikat kinerja	SR	SR									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6	33,33	28,24									
																			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	27.561.473.924	13.801.120.513									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	38,10	38,86									
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	SR	SR									

Dinas Pertanian

3) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100								
23		DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			23.104.333		11.005.335		10.460.566.770			3.214.685.230	-	-			5.043.775.770								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			352.490		191.197		236.487.178			19.783.600	-	-			123.312.800								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan RKA dan RKPA serta DPA dan DPPA	6	1.444.717	2	342.095	4	173.296.519	4,00	220.220.578	2	103.529	0,75	19.783,60	-	-	123.313	2,75	123.313	68,75	56,00	6,75	296.609	337,50	86,70
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	6	34.772	2	10.395	4	17.900.386	2,00	16.266.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	17.900	200,00	172,20
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		34,38	28,00			268,75	129,45
																			Predikat kinerja		SR	SR				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.005.775		7.401.378		7.344.028.849			2.314.277.030	-	-			3.399.995.798								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	19.000.000	2	19.000.000	-	7.398.327.200	12,00	7.340.843.084	0,22	1.085.719	0,33	2.314.277,03	-	-	3.399.996	0,55	3.399.996	4,58	46,32	0,55	10.798.323	27,50	56,83
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	19.622	2	5.775	4,00	3.050.525	1,00	3.185.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3.051	200,00	52,82
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		2,29	23,16			113,75	54,83
																			Predikat kinerja		SR	SR				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat			1.734.643		889.451		826.538.489			116.654.730	-	-			441.132.790								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan kabel listrik kantor dinas dan UPT	72	212.249	24	35.015	48	13.031.288	12,00	12.892.550	2	1.716	3,90	4.191,44	-	-	5,90	5.907	45,83	45,82	53,50	18.939	222,92	54,09	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	694.405	24	105.000	24	357.125.322	12,00	440.317.684	7	263.303	1,30	46.338,85	-	-	8,50	309.642	70,83	70,32	32,50	666.767	135,42	635,02	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	72	231.468	24	68.145	48	74.140.000	12,00	74.140.000	3	16.896	2,10	12.936,00	-	-	4,85	29.832	40,42	40,24	52,85	103.972	220,21	152,57	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya cetak dan pengandaan Dinas	72	226.222	24	113.548	48	53.027.871	12,00	53.004.255	2	6.998	2,30	9.976,24	-	-	3,90	16.974	32,50	32,02	51,90	70.002	216,25	61,65	

Dinas Perkebunan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya surat kabar dan media online	72	246.097	24	77.062	47,61	36.408,000	12,00	76.768,000	1	9.192	1,40	8.772,00	-	-	-	-	2,84	17.964	23,67	23,40	50,45	54.372	210,22	70,56																					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	1.156.971	24	1.335.873	47,89	355.719,000	12,00	169.416,000	2	26.373	2,45	34.440,20	-	-	-	-	4,32	60.814	36,00	35,90	52,21	416.533	217,53	31,18																					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		41,54	41,28																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000		582.582		472.230,000		-		445.800,000	-	-				445.800,000																											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	4	500.000	4	500.000	-	582.582,000	4,00	472.230,000	-	-	1,00	445.800,00	-	-	-	-	1,00	445.800	25,00	94,40	1,00	1.028.382	25,00	205,68																					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	94,40																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				510.561		1.125.490		1.160.982,904				254.992,280	-	-				521.085,612																											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, PAM dan listrik	72	1.238.355	24	309.078	48	180.385,100	12,00	180.385,100	3	27.104	0,70	27.564,65	-	-	-	-	3,70	54.668	30,83	30,31	51,70	235.053	215,42	76,05																					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga jasa pelayanan umum kantor	72	538.302	24	201.483	48	945.104,500	12,00	980.597,804	3	238.990	2,80	227.427,63	-	-	-	-	5,80	466.417	48,33	47,56	53,80	1.411.522	224,17	700,57																					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		39,58	38,94																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000,865		815,237		420.299,350				63.177,590	-	-				112.448,770																											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	42	853.687	14	140.813	27,89	246.605,000	7,00	221.425,000	1	44.610	1,80	55.580,00	-	-	-	-	3,25	100.190	46,43	45,25	31,14	346.795	222,43	246,28																					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan dan Mesin Lainnya	72	113.419	24	71.379	48	27.454,350	12,00	27.454,350	2	4.662	3,40	7.597,59	-	-	-	-	5,44	12.259	45,33	44,65	53,44	39.714	222,67	55,64																					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor dinas layak pakai	12	788.673	12	788.673	5	541.178,000	2,00	171.420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	541.178	41,67	68,62																					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		30,59	29,97																								
																					Predikat kinerja		SR	SR																								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		24,77	36,53																								
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				11.005,764		15.918,824		3.300.388,167				1.392.779,200	-	-				2.165.917,221																											
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Petani yang Memanfaatkan Sumber Daya Genetik (SDG)				2.016,337		1.165,141		1.876.825,281				1.028.185,200	-	-				1.309.811,385																											

Dinas Pertanian

																Rata-rata capaian kinerja (%)				52,58	39,84			225,71	71,53			
																Predikat kinerja				SR	SR							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5				51,31	40,62							
																Rata-rata capaian kinerja (%)				69,58	51,99			510,75	168,38			
																Predikat kinerja				SR	SR							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6				69,58	51,99							
																Rata-rata capaian kinerja (%)				33,33	22,51			299,70	69,40			
																Predikat kinerja				SR	SR							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7				33,33	22,51							

Diast Perkebunan

4) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																												
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 7 + 13	16 = 15*100	17												
24		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.051.451.362	2.755.054.092	6.488.309.779	8.581.246.417			2.256.582.414	-	-	3.659.517.061															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	413.300.000	110.000.000	116.670.130	183.984.327			70.684.710	-	-	145.064.319															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	30 Buku	395.660.000	24	100.000.000	12	108.328.081	12	165.780.395	3	56.175.680	3,00	70.684.710,00	-	-	-	-	6,00	126.860.390	50,00	76,52	18,00	235.188.471	75,00	235,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya LKJIP SKPD	40 Buku	17.640.000	11	10.000.000	1	8.342.049	10	18.203.932	10	18.203.929,00	-	-	-	-	-	-	10,00	18.203.929	100,00	100,00	11,00	26.545.978	100,00	265,46	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	88,26			87,50	250,32								
													Predikat kinerja		S	S												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	26.006.245.338	14.803.196	4.113.156.239	100 persen	4.121.817.363			1.325.564.291	-	-	1.895.134.181													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Persentase Terhadap Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Bln	25.991.665.338	24	9.039.596	12	4.110.224.471	12	4.115.606.873	3	563.359.400	3,00	1.325.564.291,00	-	-	-	-	6,00	1.888.923.691	50,00	45,90	18,00	5.999.148.162	75,00	66.365,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Buku	14.580.000	20	5.763.600	10	2.931.768	10	6.210.490	10	6.210.490,00	-	-	-	-	-	-	10,00	6.210.490	100,00	100,00	20,00	9.142.258	100,00	158,62	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	72,95			87,50	33.261,92								
													Predikat kinerja		R	R												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.328.440.000	1.222.650.593	1.052.811.981	1.043.136.754			337.444.120	-	-	713.507.110															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	72 Bln	258.000.000	24	30.797.671	12	23.086.470	12	55.713.650	3	43.344.125	3,00	8.450.275,00	-	-	-	-	6,00	51.794.400	50,00	92,97	18,00	74.880.670	75,00	243,14	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bln	423.000.000	24	252.085.413	12	284.194.498	12	420.070.664	3	73.922.740	2,00	122.036.080,00	-	-	-	-	5,00	195.958.820	41,67	46,65	17,00	480.153.318	70,83	190,47	

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Tersedianya Makanan dan Minuman	72 Bln	453.470.000	24	59.276.300	12	64.234.200	12	64.055.000	3	39.296.500	3,00	19.319.500,00	-	-	-	-	6,00	58.616.000	50,00	91,51	18,00	122.850.200	75,00	207,25		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	72 Bln	247.000.000	24	141.558.875	12	120.653.926	12	130.255.176	3	85.485.675	3,00	31.559.125,00	-	-	-	-	6,00	117.044.800	50,00	89,86	18,00	237.698.726	75,00	167,92		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Tersedianya Bahan Bacaan/Referensi Peraturan Perundang-undangan bagi aparaturnya	72 Bln	109.280.000	24	12.210.000	12	4.860.000	12	4.860.000	3	1.815.000	3,00	1.815.000,00	-	-	-	-	6,00	3.630.000	50,00	74,69	18,00	8.490.000	75,00	69,53		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luardalam Daerah	72 Bln	3.837.690.000	24	726.722.334	12	555.782.887	12	368.182.264	3	132.198.950	3,00	154.264.140,00	-	-	-	-	6,00	286.463.090	50,00	77,80	18,00	842.245.977	75,00	115,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						48,61	78,91		74,31	165,70					
Predikat kinerja																						SR	SR								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan									1.183.861.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengadaan Mebel (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Terlaksananya pengadaan Meublier	45 Unit	16.894.750	20	16.894.750	10,00	20.694.750	2	291.047.664	-	-	1,50	288.868.688,00	-	-	-	-	1,50	288.868.688	75,00	99,25	11,50	309.563.438	57,50	1.832,31		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya									96.774.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	33,08		19,17	610,77					
Predikat kinerja																						SR	SR								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.315.666.024		1.003.901.955		773.234.140		996.623.304				144.535.405					372.657.988									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bln	765.000.000	24	223.919.455	12,00	114.389.140	12	135.485.940	3	22.979.401	3,00	20.021.352,00	-	-	-	-	6,00	43.000.753	50,00	31,74	18,00	157.389.893	75,00	70,29		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	28 Bln	550.666.024	24	779.982.500	12,00	658.845.000	12	861.137.364	3	205.143.182	3,00	124.514.053,00	-	-	-	-	6,00	329.657.235	50,00	38,28	18,00	988.502.235	75,00	126,73		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	35,01		75,00	98,51					
Predikat kinerja																						SR	SR								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1.987.800.000		403.698.348	100,00 %	432.437.289	12 bulan	664.001.255				89.485.200					244.284.775									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHAMIKRO KECIL)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	22,00 Unit	1.303.370.000	24	188.130.748	12,00	167.631.589	12	184.982.915	3	86.762.275	3,00	57.083.200,00	-	-	-	-	6,00	143.845.475	50,00	77,76	18,00	311.477.064	75,00	165,56		

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	45,00 Paket	145.130.000	24	145.130.000	12,00	165.775.100	12	373.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	165.775.100	50,00	114,23	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	250,00 Unit	539.300.000	24	70.437.600	12,00	99.030.600	12	105.754.340	3	68.037.300	3,00	32.402.000,00	-	-	-	-	6,00	100.439.300	50,00	94,97	18,00	199.469.900	75,00	283,19
Rata-rata capaian kinerja (%)																							33,33	57,58				66,67	187,66
Predikat kinerja																							SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																							51,16	60,97					
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			3.270.160.000	100 persen	535.681.578		339.920.528	100 persen	207.709.573				61.710.563	-	-	-	-	-	-	105.030.753					
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas		3.270.160.000		535.681.578	-	339.920.528		207.709.573				61.710.563	-	-	-	-	-	-	105.030.753					
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	23,00 Koperasi Berprestasi	1.950.460.000	15	344.685.918	12,00	265.035.718	3	63.186.714	1	1.710.000,000	1,00	3.647.894,00	-	-	-	-	2,00	5.357.894	66,67	8,48	14,00	270.393.612	93,33	78,45
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	825,00 Koperasi	1.319.700.000	335	190.995.660	150,00	74.884.810	185	144.522.859	20	41.610.190	25,00	58.062.669,00	-	-	-	-	45,00	99.672.859	24,32	68,97	195,00	174.557.669	58,21	91,39
Rata-rata capaian kinerja (%)																							45,50	38,72				75,77	84,92
Predikat kinerja																							SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																							45,50	38,72					
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPiUSP KOPERASI			980.560.000	100 persen	119.643.326		52.775.367	100 persen	54.962.530		12.456.716		22.910.000	-	-	-	-	-	-	35.366.716					
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian KSPiUSP		980.560.000		119.643.326	1,00 Kegiatan	52.775.367	1	54.962.530	-	12.456.716		22.910.000	-	-	-	-	-	-	35.366.716					
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPiUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya Pemenuhan 17/PerM.KUKMIX/2015	470,00 Koperasi	980.560.000	90	119.643.326	30,00	52.775.367	60	54.962.530	15	12.456.716	15,00	22.910.000,00	-	-	-	-	30,00	35.366.716	50,00	64,35	60,00	88.142.083	66,67	73,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	64,35				66,67	73,67
Predikat kinerja																							SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																							50,00	64,35					
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			43.790.169	100 persen	43.790.169		-	100 persen	743.053.206		125.733.366		238.185.075	-	-	-	-	-	363.918.441						
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Pengurus dan Anggota Koperasi	1,00	43.790.169	1	43.790.169	-	-	1	338.853.206	-	125.733.366		131.930.000	-	-	-	-	-	257.663.366	-	76,04	-	257.663.366	-	588,40

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang dilatih	120,00 Orang	43.790.169	50	43.790.169	-	-	50	338.853.206	13	125.733.366	13,00	131.930.000,00	-	-	-	-	26,00	257.663.366	52,00	76,04	26,00	257.663.366	52,00	588,40																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					52,00	76,04																		52,00						588,40				
Predikat kinerja																					SR	SR																												
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									404.200.000					106.255.075	-	-	-		106.255.075																													
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro									404.200.000			5,00	106.255.075,00	-	-	-	-	5,00	106.255.075	-	26,29	5,00	106.255.075	-																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																						26,29																												
Predikat kinerja																					SR	SR																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																					26,00	51,16																												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.412.175.000		420.809.911		236.102.961		2.152.413.765		112.798.642		109.855.596		-				222.654.228																													
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya SDM UMK		1.412.175.000		420.809.911		236.102.961		2.152.413.765		112.798.642		109.855.596		-				222.654.228																													
		Panduan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Termonitornya dan terdapatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5.800,00 UMK	979.980.000	400	102.122.634	200,00	51.489.734	200	1.153.516.735	50	38.254.566.000	50,00	23.429.032,00	-	-	-	-	100,00	61.683.598	50,00	5,35	300,00	113.173.332	75,00	110,82																							
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	48,00 Bln	432.195.000	24	316.687.277	12,00	184.613.227	12	998.897.030	3	74.544.076	3,00	86.426.554,00	-	-	-	-	6,00	160.970.630	50,00	16,11	18,00	345.583.857	75,00	108,44																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50,00	10,73																										75,00	109,63	
Predikat kinerja																					SR	SR																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																					50,00	10,73																												
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.471.250.000		112.447.875		18.397.263		387.329.702		24.184.998		23.927.711		-				48.112.709																													
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		2,00 unit	2.471.250.000	2 Unit	112.447.875	-	18.397.263	1 unit	387.329.702	-	24.184.998		23.927.711		-			-	48.112.709																													
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL)	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	17,00 Event	2.471.250.000	13	112.447.875	3,00	18.397.263	10	387.329.702	3	24.184.998.000	2,50	23.927.711,00	-	-	-	-	5,50	48.112.709	55,00	12,42	8,50	66.509.972	65,38	59,15																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					55,00	12,42																											65,38	59,15
Predikat kinerja																					SR	SR																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																					55,00	12,42																												
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.120.035.806	100 persen	166.597.403		83.504.943	100 persen	255.041.503		16.429.332		22.811.700		-				39.041.032																													

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

IV Penunjang Urusan

1) BAPPEDA

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab					
				K Rp		K Rp		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.							
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13/100		15=7+13		16=15/100														
27		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		15.863.808	100 persen	20.904.294	10.909.605	100 persen	12.580.875	-	-	-	-	-	6.407.880,158																	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistennya antar dokumen perencanaan perangkat Daerah	100 persen	481.046	100 persen	611.854	158.459	100 persen	205.015	-	-	-	-	-	81.170.540																	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun			4 Dokumen	194.277	98.016,632	2 Dokumen	168.586	-	16.618,76	-	42.466,20	-	59.085	-	35,05	-	157,102	-	-											
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	26 Dokumen	481.046	6 Dokumen	111.576	4	45.141,998	3 Dokumen	36.428	3.000	6.285,58	-	15.800,00	-	22.086	100,00	60,63	7,00	67,228	26,92	13,98										
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja			2 Dokumen	306.001	15.300,460												15,300													
			Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	33,33 SR	31,89 SR																												
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya keuangan OPD	-	-		13.152.021	6.327.570	100 persen	6.079.660						3.327.357,578																	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100 persen	13.023.255	6.264.084,618	100 persen	6.016.542	25.000	751.130,41	-	2.542.079,77	-	3.293.210	25,00	54,74	25,00	9.557.295	-	-											
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-		2 Dokumen	48.561	23.280,317	1 Dokumen	23.138	-	10.300,00	-	-	-	10.300	-	44,52	-	33.590	-	-											
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan			2 Dokumen	80.205	40.205,250	1 Dokumen	39.979	-	9.747,40	-	14.100,00	-	23.847	-	59,65	-	64.053	-	-											
			Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	8,33 SR	52,97 SR																												
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur ASN	100 persen	-	100 persen	122.134	62.069	100 persen	410.685						138.017,000	-																
		1. Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			116 PNS	122.134	62.068,500	58 ASN	143.619	-	-	138.017,00	-	-	138.017	-	96,10	-	200.086	-	-											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi								22.125																							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan								244.941																							
			Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	- SR	32,03 SR																												
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.600.721		3.111.957	1.606.824	100 persen	3.056.353						2.168.120,048																	

Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

						1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	60 Bulan	801.717	24 Bulan	270.663	12	90.570,101	12 Bulan	147.234	3.000	41.678,99	-	67.719,68	-	-	-	-	-	3,00	109.399	25,00	74,30	15,00	199.969	25,00	24,94																												
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik	100 persen	1.302.603	24 Bulan	941.094	100	648.534,418	12 Bulan	1.589.511	3.000	964.021,35	-	461.070,79	-	-	-	-	-	3,00	1.425.092	25,00	89,66	103,00	2.073.627	103,00	159,19																												
								60 Bulan	851.702			12	-																																															
						3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan minuman kantor	100 persen	604.558	24 Bulan	210.899	100	101.998,750	12 Bulan	178.420	3.000	62.309,00	-	58.692,00	-	-	-	-	-	3,00	121.001	25,00	67,82	103,00	223.000	103,00	36,89																												
						4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	753.806	24 Bulan	180.141	12	81.140,920	12 Bulan	136.354	3.000	36.249,86	-	41.232,75	-	-	-	-	-	3,00	77.483	25,00	56,82	15,00	158.624	25,00	21,04																												
						5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	100 persen	330.991	24 Bulan	124.380	100	64.800,000	12 Bulan	64.800	3.000	10.520,00	-	10.920,00	-	-	-	-	-	3,00	21.440	25,00	33,09	103,00	86.240	103,00	26,06																												
						6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	250 Kali	2.955.345	24 Bulan	1.384.780	100	619.780,000	12 Bulan	940.034	3.000	167.575,31	-	246.130,31	-	-	-	-	-	3,00	413.706	25,00	44,01	103,00	1.033.486	41,20	34,97																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																											25,00	60,96																																
Predikat kinerja																											SR	SR																																
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.461.996	24 Bulan	2.115.445		1.765.299	100 Persen	1.104.517		164.393.015	-	-	-	-	-	-		487.224.255																																			
						1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	413.927	24 Bulan	173.420	12	124.800,000	12 Bulan	124.800	3.000	17.347,40	-	29.129,50	-	-	-	-	-	3,00	46.477	25,00	37,24	15,00	171.277	25,00	41,38																												
						2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	23 Orang	2.101.050	24 Bulan	1.942.025	23	951.629,000	12 Bulan	979.717	3.000	147.045,62	-	293.701,74	-	-	-	-	-	3,00	440.747	25,00	44,99	26,00	1.392.376	113,04	66,27																												
								60 Bulan	1.961.519			12	458.920																																															
								7 Orang	985.500			7	229.950																																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																											25,00	41,11																																
Predikat kinerja																											SR	SR																																
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.669.665	100 persen	1.790.884		989.384	100 Persen	1.724.646		98.465.575	-	-	-	-	-	-		205.990.737																																			
						1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	9 Unit	111.753	100 persen	619.329	9	245.829,365	100 Persen	284.215	21.660	61.576,68	-	37.578,51	-	-	-	-	-	21,66	99.155	21,66	34,89	30,66	344.985	340,67	308,70																												
						2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rentang waktu penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 Bulan	630.259	24 Bulan	215.208	12	107.208,250	12 Bulan	121.783	3.000	36.888,90	-	69.946,65	-	-	-	-	-	3,00	106.836	25,00	87,73	15,00	214.044	25,00	33,96																												
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	5 Kali	927.653	100 Persen	956.346	1	636.346,238	100 Persen	1.318.648		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1,00	636.346	20,00	68,60																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																											15,55	40,87																																
Predikat kinerja																											SR	SR																																
								100 persen	650.379																																																			
								20 Orang	650.379																																																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																											-	-																																
Predikat kinerja																											SR	SR																																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																											17,87	43,30																																
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE (%) KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		11.630.678	100 persen	4.458.414		2.154.093	100 Persen	3.111.614		746.994.994	-	1.017.145.240	-	-	-	-	-		1.764.140.234																																		
						Penyusunan Perencanaan dan Pendaanaan	Terpenuhiya dokumen perencanaan dan pendaanaan	100 persen	5.944.855	100 persen	3.108.632	100 Persen	1.499.005	100 Persen	2.015.698		706.286,044	-	338.910,725	-	-	-	-	-		1.045.196,769																																		
						1. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah permasalahan dan isi strategis	2 Dokumen	1.232.667	2 Dokumen	360.804	1	180.401,924	1 Dokumen	200.723		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1,00	180.402	50,00	14,64																													

Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

						3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan			2	2	Dokumen	220.766		99.875,511	1	Dokumen	175.296		14.302,20	20.812,50	-	-	-	-	-	35.115	-	20,03	-	134.990	-	-		
						4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan			2	2	Dokumen	29.846		14.922,840	1	Dokumen	44.559		4.358,00	7.520,00	-	-	-	-	-	11.878	-	26,66	-	26.801	-	-		
						5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia			2	2	Dokumen	33.956		16.977,857	1,00	Dokumen	73.591			33.073,90	-	-	-	-	-	33,074	-	44,94	-	50,052	-	-		
						6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia			2	2	Dokumen	43.043		21.521,410	1,00	Dokumen	85.981			8.836,40	-	-	-	-	-	8,836	-	10,28	-	30,358	-	-		
						7. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia			2	2	Dokumen	1.100.582		526.721,166	1,00	Dokumen	458.834		46.659,50	57.481,80	-	-	-	-	-	104,141	-	22,70	-	630,862	-	-		
						8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang pembangunan manusia		5	Dokumen		500.000	2	2	Dokumen	39.609	1	19.804,468	1,00	Dokumen	78.344		28.974,80	-	-	-	-	28,975	-	36,98	1,00	48.779	20,00	9,76	
				4	Dokumen		400.000					1		17.326															17.326	25,00	4,33				
				Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Predikat kinerja													SR	SR																	
				100	persen		2.486.995			-			101.364		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				5	Dokumen		869.340			1		57.350		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	57.350	20,00	6,60			
				5	Dokumen		1.617.655			1		44.014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	44.014	20,00	2,72			
				Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Predikat kinerja													SR	SR																	
						Koodinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Realisasi laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan			-	100	persen	949.128		474.563	100	persen	832.514		51.113,400	146.890,100	-	-	-	-	-	198.003,500	-	-	-	-	-	-		
						1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian			2	2	Dokumen	94.162		47.080,832	1,00	Dokumen	250.064		11.588,10	20.664,80	-	-	-	-	-	32,253	-	12,90	-	79.334	-	-		
						2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian			2	2	Dokumen	163.986		81.992,830	1,00	Dokumen	69.005		4.184,50	23.220,00	-	-	-	-	-	27,405	-	39,71	-	109.397	-	-		
						3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian			2	2	Dokumen	245.673		122.836,591	1,00	Dokumen	211.148		16.485,30	32.486,90	-	-	-	-	-	48,972	-	23,19	-	171.809	-	-		
						4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA			2	2	Dokumen	196.275		98.137,736	1,00	Dokumen	80.322			19.491,80	-	-	-	-	-	19,492	-	24,27	-	117.630	-	-		
						5. Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA			2	2	Dokumen	66.605		33.302,540	1,00	Dokumen	72.651		11.010,80	27.896,60	-	-	-	-	-	38,907	-	53,55	-	72.210	-	-		

Dinas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Realisasi dokumen penelitian dan pengembangan bidang litbang	100 persen	228.338	100 persen	250.154	102.304	100 persen	339.698	-	-	-	25.041,050	-	-	-	-	25.041,050									
			1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen pengkajian keberadaan masyarakat hukum adat	1 Dokumen	228.338	2 2 Dokumen	250.154	1	102.304,298					-	-	-	-	-	-	-	1,00	102.304	100,00	44,80				
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								223.158									-	-								
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan								116.540				25.041,05					-	25,041	21,49		25,041					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-								
Predikat kinerja																				SR	SR								
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya dokumen informasi kelitbangan		-	100 persen	508.932	254.466	100,00 persen	345.424		22.090,042	-	153.874,490	-	-	-	-	-	175.964,532								
			1. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen/informasi kelitbangan/jumlah riset penelitian daerah yang menjadi dokumen kajian			2 2 Dokumen	508.932	254.465,950	1,00 Dokumen	345.424		22.090,04		153.874,49	-	-	-	-	-	175.965	50,94		430.430					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	50,94								
Predikat kinerja																				SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																				-	25,47								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				19.530.256.604									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				9.198.060.284									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				9,08	45,69								

Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) BPKAD

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																													
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100			15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
28		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	18.507.480.000		13.926.382.454	100 %	12.080.226.034	100,00 %	12.273.502.508		25,00	4.036.762.879	-	-			5.080.895.882										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.046.800.000		465.300.000	100	2.835.669.602	100,00	1.369.652.858		17,95	380.893.728	-	-			17,95	522.530.946	17,95	38,15	117,95	3.358.200.548	117,95	110,22			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik	60	260.000.000	24	240.000.000	12	238.572.000	12,00	264.369.000	3,00	35.871.540	18,31	48.395.025,00	-	-	-	-	21,31	84.266.565	177,55	31,87	33,31	322.838.565	55,51	124,17		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	60	150.000.000	24	120.275.000	12	181.942.750	12,00	181.652.750	3,00	37.250.100	9,58	17.410.000,00	-	-	-	-	12,58	54.660.100	104,87	30,09	24,58	236.602.850	40,97	157,74		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam	60	465.300.000	24	465.300.000	12	938.400.000	12,00	923.631.108	3,00	68.515.578	34,11	315.088.703,00	-	-	-	-	37,11	383.604.281	309,28	41,53	49,11	1.322.004.281	81,86	284,12		
				60	220.000.000			0,92	184.280.185				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	184.280.185	1,53	83,76			
				60	215.000.000			0,86	170.992.981				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	170.992.981	1,43	79,53			
				65	145.000.000			2,07	267.504.686				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07	267.504.686	3,18	184,49			
				60	17.000.000			0,92	10.980.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	10.980.000	1,53	64,53			
				60	225.000.000			0,98	194.911.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98	194.911.000	1,63	86,63			
				60	997.000.000			0,38	371.200.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	371.200.000	0,63	37,23			
				60	352.500.000			0,79	276.886.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	276.886.000	1,32	78,55			
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		197,23	34,50						
				Predikat kinerja																		SR	SR						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.970.000.000		1.800.442.000	100 %	1.338.774.380	100,00 %	2.062.033.897			222.876.526	-	-			583.505.200										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	60	516.000.000	24	414.353.600	12	513.423.860	12,00	1.014.264.682	3	265.292.686	7,45	75.577.082,00	-	-	-	-	10,45	340.869.768	87,10	33,61	22,45	854.293.628	37,42	165,56		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	60	225.000.000	24	199.500.000	12	194.786.250	12,00	197.360.000	3	39.390.000	21,95	43.310.900,00	-	-	-	-	24,95	82.700.900	207,88	41,90	36,95	277.487.150	61,58	123,33		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	215.000.000	24	198.888.400	12	198.620.270	12,00	199.264.215	3	23.746.388	20,20	40.253.544,00	-	-	-	-	23,20	63.999.932	193,34	32,12	35,20	262.620.202	58,67	122,15		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	17.000.000	24	12.000.000	12	11.655.000	12,00	11.655.000	3,00	1.566.000	15,29	1.782.000,00	-	-	-	-	18,29	3.348.000	152,41	28,73	30,29	15.003.000	50,48	88,25		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	997.000.000	24	975.700.000	12	420.289.000	12,00	639.490.000	3	30.633.600	9,69	61.953.000,00	-	-	-	-	12,69	92.586.600	105,73	14,48	24,69	512.875.600	41,15	51,44		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		149,29	30,17						
				Predikat kinerja																		SR	SR						
		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah		19	411.500.000		163.213.000	19,00	55.850.000	19,00	784.967.299																		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	100	175.000.000	104	163.213.000	52,00	-	52,00	OPD	448.939.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	-		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									336.027.349																		
				30	160.000.000								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				60	76.500.000			0,73	55.850.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	55.850.000	1,22	73,01	
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-						
				Predikat kinerja																		SR	SR						
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		53,22	73,01						

Dasar Sistem Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Database Aseel/BMD yang akan di Hapus	100	675.000.000	24	600.000.000	12,00	667.256.054	100,00	707.522.145	3,00	86.522.233	18,82	133.137.471,00	-	-	-	-	21,82	219.659.704	21,82	31,05	33,82	886.915.758	33,82	131,39
			Optimalisasi Penggunaan, Pemantauan, Pemindahtanganan, Penrusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang di Hapus	100	219.620.000	104	95.000.000	100,00	99.285.260	100,00	275.348.600			23,66	65.154.300,00	-	-	-	-	23,66	65.154.300	23,66	23,66	123,66	164.439.560	123,66	74,87
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data BMD yang di Verifikasi	100	140.800.000	104	140.800.000	-	216.973.743	52,00	486.107.872			16,35	79.476.992,00	-	-	-	-	16,35	79.476.992	31,44	16,35	16,35	296.450.735	16,35	210,55
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,64	23,69			57,94	138,94		
Predikat kinerja																					SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																					22,68	17,73						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 400.886.122.302																					38.087.216.478							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					22,78	20,26						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						

Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinaskendaraan dinas jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinaskendaraan dinas jabatan	30 Unit	1.080.907.389	14	357.828.074	6	218.056.325	7,00	207.874.562	2,00	13.770.000,00	2,00	77.336.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	91.106.459	57,14	43,83	10,00	309.162.783	33,33	28,60																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																												53,57	35,15																															31,67	68,08			
Predikat kinerja																												SR	SR																																			
				Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Terealisasinya pemenuhan pelayanan administrasi aparatur	100 persen	1.652.135.692		203.328.000		96.174.000	100,00 persen	52.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																												
				Bimbingan teknis implementasi peraturan undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan undangan	84	1.652.135.692	24 Bulan	203.328.000	-	88.374.000	12,00 Bulan	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.374.000	-	5,35																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																												-	-																																		5,35	
Predikat kinerja																												SR	SR																																			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Terealisasinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		48.805.920	24 Bulan	551.316.632		292.702.316	100,00 Persen	97.127.399				31.080.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	48.805.920	2 Laporan	119.469.820	2 Laporan	59.734.910	1,00 Laporan	42.202.550	1,00	17.202.550,000	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,13																										
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Laporan	186.453.266		84.046.633	2,00 Laporan	37.565.420	1,00	14.702.970,000	-	7.037.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Laporan	61.705.494		43.110.747	1,00 Laporan	3.743.245	-		3.743.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Laporan	68.393.462		34.196.731	1,00 Laporan	4.223.594	-		3.083.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2 Laporan	58.060.290		42.996.145	1,00 Laporan	4.178.050	-		4.178.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2 Laporan	57.234.300		28.617.150	1,00 Laporan	5.214.500	-		3.038.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												25,00	75,60																																			
Predikat kinerja																												SR	SR																																			
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	73.014.670	100 persen	21.527.438.000		10.809.687.308	100,00 Persen	10.347.297.629				2.393.327.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN			24 Bulan	21.487.752.820		10.789.844.718	12,00 Bulan	10.333.727.889	3,00	1.189.674.660	3,00	2.393.327.982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda	5 Laporan	73.014.670	2 Laporan	39.685.180	1 Laporan	19.842.590	1,00 Laporan	13.569.740	1,00	13.569.740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												75,00	67,34																																			
Predikat kinerja																												R	R																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																												41,43	51,80																																			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah		37.005.609.210	100 persen	9.315.645.994		4.566.563.711	100,00 Persen	3.355.029.175				767.710.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersediannya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	37.005.609.210	100 persen	9.315.645.994		4.566.563.711	100,00 Persen	3.355.029.175				767.710.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									

Dinas Badan Perencanaan Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedia dokumen pelaporan pajak daerah	60 Bulan	2.128.514.615	24 Bulan	733.232.652	12 Bulan	373.269.326	12,00 Bulan	107.187.360	3,00	4.560.000	3,00	21.189.900,00	-	-	-	-	6,00	25.749.900	50,00	24,02	18,00	399.019.226	30,00	18,75
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya dokumen estimasi jumlah pendapatan daerah	1 Dok	1.479.999.081	4 Dok	588.772.550	0,20	152.598.275	2,00 Dok	251.717.575	0	16.230.000,000		27.600.000,00	-	-	-	-	-	43.830.000	-	17,41	0,20	196.428.275	20,00	13,27
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terselenggaranya pemeriksaan pajak daerah	105 Kec	1.463.242.057	24 Bulan	326.028.288	21	294.249.448	12,00 Bulan	413.002.235	3,00		3,00	74.304.214,00	-	-	-	-	6,00	74.304.214	50,00	17,99	27,00	368.553.662	25,71	25,19
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya jawaban atas keberatan wajib pajak			24 Bulan	497.062.404		146.366.702	12,00 Bulan	86.023.560	3,00		3,00	43.490.000,00	-	-	-	-	6,00	43.490.000	50,00	50,56	6,00	189.856.702	-	-
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedia penilaian PBB dan BPHTB	105 Kec	4.654.337.225	24 Bulan	1.451.215.540	21	720.944.770	12,00 Bulan	575.304.720	3,00	16.000.000,000	3,00	80.875.000,00	-	-	-	-	6,00	96.875.000	50,00	16,84	27,00	817.819.770	25,71	17,57
							60 Bulan	3.750.071.780									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	20,00	-
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedia ketetapan pajak daerah	60 Bulan	3.905.667.218	24 Bulan	1.396.999.700	12 Bulan	632.555.850	12,00 Bulan	531.246.270	3,00	142.790.250,000	3,00	272.829.000,00	-	-	-	-	6,00	415.619.250	50,00	78,23	18,00	1.048.175.100	30,00	26,84
							105 Kec	3.483.212.135			21	116.250.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	116.250.000	20,00	3,34
							105 Kec	11.161.751.586			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedia database wajib pajak yang akutable	105 Kec	2.081.075.963	24 Bulan	627.870.504	21	255.870.252	12,00 Bulan	153.236.230	3,00	10.220.000,000	3,00	36.610.000,00	-	-	-	-	6,00	46.830.000	50,00	30,56	27,00	302.700.252	25,71	14,85
					Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya penagihan pajak daerah	105 Kec	1.127.587.550	42 Kecamatan	540.715.112	21	363.687.216	12,00 Bulan	156.230.285	3,00	9.033.000,000	3,00	58.443.650,00	-	-	-	-	6,00	67.476.650	50,00	43,19	27,00	431.163.866	25,71	38,24
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 Paket	1.770.150.000	1 Paket	1.655.767.738	1 Paket	972.733.869	1,00 Paket	301.003.000	1,00	48.657.800,000	-	47.055.200,00	-	-	-	-	1,00	95.713.000	100,00	31,80	2,00	1.068.446.869	50,00	60,36
					Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedia perencanaan pengelolaan pajak daerah			24 Bulan	362.817.862		147.754.931	21,00 Kecamatan	124.420.740	5,00	16.800.000,000	5,00	4.659.956,00	-	-	-	-	10,00	21.459.956	47,62	17,25	10,00	169.214.887	-	-
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi PDRD			14 Kecamatan	455.915.138		228.796.319	7,00 Kecamatan	508.920.975	3,00	8.730.000,000	1,00	27.414.810,00	-	-	-	-	4,00	36.144.810	57,14	7,10	4,00	264.941.129	-	-
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah			24 Bulan	429.087.200		92.758.100	12,00 Bulan	111.530.815	3,00	16.722.000,000	3,00	66.642.850,00	-	-	-	-	6,00	83.364.850	50,00	74,75	6,00	176.122.950	-	-
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah			24 Bulan	250.161.306		68.728.653	12,00 Bulan	35.205.410	3,00	-	-	6.595.550,00	-	-	-	-	3,00	6.595.550	25,00	18,73	3,00	75.324.203	-	-
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	48,44	32,96			20,99	16,78	
																							Predikat kinerja	SR	SR					
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2				48,44	32,96										
															JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				20.815.397.226	7.712.061.871										
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)				44,94	42,38										
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)				SR	SR										

Dinas Badan Perencanaan Daerah

4) Dinas BKPSDM

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																								
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
												K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp														
30		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	48.638.397.277	100 persen	42.901.007.693		6.491.781.769	100 persen	5.075.638.195		37.131.000		1.710.591.316	-	-			2.474.574.233																					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 persen	907.520.400	100 persen	61.247.200	106.782.467	100 persen	132.508.927		37.131.000		30.624.342	-	-			67.755.342																					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah	72 Laporan	891.752.400	24 Laporan	58.149.200	48,00	103.824.882	2	108.929.322	1,00	37.131.000	-	30.624.342,00	-	-	1,00	67.755.342	50,00	62,20	49,00	171.580.224	204,17	295,07															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Dokumen	15.768.000	2 Dokumen	3.098.000	4,00	2.957.585	1	23.579.605	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2.957.585	200,00	95,47																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,00	31,10																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.903.059.972	24 Bulan	37.892.592.772		4.134.654.334	100 Persen	4.100.407.309				1.476.860.730	-	-			2.091.267.925																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 bulan	37.889.419.972	84 bulan	37.889.419.972	56,00	4.131.593.849	14	4.096.154.829	3,00	614.407.195	4,00	1.476.860.730,00	-	-	7,00	2.091.267.925	50,00	51,05	63,00	6.222.861.774	75,00	16,42															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	13.640.000	2 Dokumen	3.172.800	4,00	3.060.485	1	4.252.480	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3.060.485	200,00	96,46																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,00	25,53																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi pelayan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Unit	1.647.333.400	100 persen	693.896.918	9,00	505.605.650	100 Persen	97.111.383			30.643.080	-	-			48.383.183																					
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya pelayan persemayaman dan pemakaman pegawai Negeri Sipil	133 kejadian	1.270.839.000	64 kejadian	576.896.918	57,00	456.342.500	8	97.111.383	20,00	17.740.103	2,00	30.643.080,00			22,00	48.383.183	275,00	49,82	79,00	504.725.683	123,44	87,49															
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.590 PNS	376.494.400	6 PNS	117.000.000	220,00	49.263.150											220,00	49.263.150	3.666,67	42,11																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																137,50	24,91																							
Predikat kinerja																SR	SR																							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.715.081.653		3.231.949.971	100,00 %	692.314.462	12,00 bulan	251.502.944			3,00	81.703.070	3,00	-	-	6,00	108.831.029																					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 bin	33.827.232	24 bin	13.527.082	48,00	4.858.488	12	2.651.300	-	-	3,00	1.030.000,00	-	-	3,00	1.030.000	25,00	38,85	51,00	5.888.488	212,50	43,53															

Data Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bin	374.723.350	206 unit	1.188.516.932	36,00	351.550.456	188	59.455.526	40,00	11.146.059	40,00	30.162.820,00	-	-	-	-	80,00	41.308.879	42,55	69,48	116,00	392.859.335	56,31	33,05	
							72 bin	484.503.721			48,00				3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	51,00	-	-	-	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rentang waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bin	273.000.000	24 bin	365.442.380	48,00	38.670.600	12	36.819.300	3,00	-	3,00	11.180.000,00	-	-	-	-	6,00	11.180.000	50,00	30,36	54,00	49.850.600	225,00	13,64	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 bin	374.723.350	24 bin	113.113.097	48,00	38.698.918	12	38.956.818	3,00	-	3,00	12.597.250,00	-	-	-	-	6,00	12.597.250	50,00	32,34	54,00	51.296.168	225,00	45,35	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bin	29.304.000	24 bin	9.863.280	48,00	3.960.000	12	3.960.000	-	-	-	981.000,00	-	-	-	-	3,00	981.000	25,00	24,77	51,00	4.941.000	212,50	50,09	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bin	3.145.000.000	24 bin	1.541.487.200	48,00	254.576.000	12,00	109.660.000	3,00	15.981.900	3,00	25.752.000,00	-	-	-	-	6,00	41.733.900	50,00	38,06	54,00	296.309.900	225,00	19,22	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		40,43	38,98			192,72	34,15
																								Predikat kinerja		SR	SR				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2.904.359.004	2	725.579.520	-	953.522.220	1	417.514.316	-	-	71.430.094	-	-	-	-	-	134.233.154	-	32,15	-	1.087.755.374	-	149,92		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bin	1.350.000.000	24 bin	386.635.200	48,00	201.767.620	12	127.835.000	3,00	5.096.959	3,00	17.593.993,00	-	-	-	-	6,00	22.690.952	50,00	17,75	54,00	224.458.572	225,00	58,05	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bin	708.840.000	24 bin	338.944.320	48,00	267.660.000	12	289.679.316	3,00	57.706.101	3,00	53.836.101,00	-	-	-	-	6,00	111.542.202	50,00	38,51	54,00	379.202.202	225,00	111,88	
							72 bin	451.319.004			48,00	251.354.600				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	251.354.600	-	-		
							72 bin	394.200.000			48,00	232.740.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	232.740.000	-	-		
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	28,13			225,00	84,97
																								Predikat kinerja		SR	SR				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		561.042.848		295.741.312		98.902.636		76.593.316		-	19.330.000	-	-	-	-	-	24.103.600		31,47	-	123.006.236		41,59		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan dan Kendaraan Jabatan	2 Unit	422.000.000	6 Unit	203.700.000	2,00	52.227.852	2	38.217.516	1,00	4.773.600	1,00	12.791.000,00	-	-	-	-	2,00	17.564.600	100,00	45,96	4,00	69.792.452	66,67	34,26	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan	2 Unit	33.748.848	- Unit	-	-	16.874.424	2	4.535.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.874.424	-	-	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rentang waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bin	105.294.000	24 bin	92.041.312	48,00	29.800.360	12	33.840.700	-	-	3,00	6.539.000,00	-	-	-	-	3,00	6.539.000	25,00	19,32	51,00	36.339.360	212,50	39,48	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	21,76			93,06	24,58
																								Predikat kinerja		SR	SR				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		53,27	28,40				
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENUHNYA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		11.569.502.805	100 persen	9.000.505.892		3.561.913.811	100 persen	1.997.017.678			492.995.474	-	-	-	-		743.998.707								
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhiya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 persen	7.820.071.105	100 persen	6.050.432.140		2.931.413.132	100 persen	340.163.779			51.221.289	-	-	-	-		86.276.919								
					Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah penerimaan Calon ASN (CPNS/PPPK) dan Jumlah ASN Yang Diampuh	1.650 CPNS/ PPPK	572.873.919	450 CPNS/ PPPK	1.820.847.900	780,00	56.859.413					-	-	-	-	-					780,00	56.859.413	173,33	3,12		

Dasar Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Penerima SK pensiun	1.300 PNS	412.902.991	700 PNS	121.541.904	880,00	49.561.750	350	43.687.049	30,00	9.159.760	195,00	23.081.289,00	-	-	-	-	225,00	32.241.049	64,29	73,80	1.105,00	81.802.799	157,86	67,30																									
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pejabat ASN HUKORPRI Tingkat Kabupaten	6 kali	343.608.000	2 kali	145.665.590	3,00	30.177.958	1	200.940.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	30.177.958	150,00	20,72																								
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diupdate	52.750 berkas	647.546.652	17.952 berkas	197.168.600	15.425,00	167.971.546	3.150	95.535.870	1.380	25.895.870	870,00	28.140.000,00	-	-	-	-	2.250,00	54.035.870	71,43	56,56	17.675,00	222.007.416	98,46	112,60																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							33,93	32,59																														
Predikat kinerja																							SR	SR																														
				Mutasi dan Promosi ASN	Terpenuhi Pelayaran Mutasi dan Promosi ASN							1.003.549.844												511.353.788																														
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Pindah Tugas dan Mutasi Jabatan	3.000 PNS	360.945.400	1.315 PNS	144.603.994	1.953,00	117.409.445	300	65.059.088	98,00	14.398.938	233,00	36.407.800,00	-	-	-	-	331,00	50.806.738	110,33	78,09	2.284,00	168.216.183	173,69	116,33																									
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN Penerima SK kenaikan pangkat	6.000 berkas	833.446.600	4.950 berkas	1.689.378.237	8.679,00	462.872.468	1.400	405.898.415	250,00	177.919.665	501,00	27.320.000,00	-	-	-	-	751,00	205.239.665	53,64	50,56	9.430,00	668.112.133	190,51	39,55																									
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengisian jabatan struktural	742 Jabatan	1.418.312.400	1.684 Jabatan	1.931.225.915	2.217,00	909.419.242	760	532.592.341	3,00	-	-	255.307.385,00	-	-	-	-	3,00	255.307.385	0,39	47,94	2.220,00	1.164.726.627	131,83	60,31																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							54,79	58,86																														
Predikat kinerja																							SR	SR																														
				Pengembangan Kompetensi ASN	Terpenuhi Peningkatan Kapasitas ASN		1.822.440.400		2.377.964.315		397.687.969		484.101.705											11.389.000																														
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah	400 org	800.000.000	200 org	358.534.915	405,00	78.077.038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,00	78.077.038	202,50	21,78																								
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN penerima beasiswa luang belajar dan klatan dinas	15 Og	1.022.440.400	12 Og	2.019.429.400	10,00	319.610.931	3	484.101.705	2,00	11.389.000	-	-	-	-	-	-	2,00	11.389.000	66,67	2,35	12,00	330.999.931	100,00	16,39																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							33,33	1,18																														
Predikat kinerja																							SR	SR																														
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terpenuhi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1.926.991.300		572.109.437		232.812.710		169.202.350											134.579.000																														
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang dilakukan penilaian dan Evaluasi Kinerja	27.500 PNS	312.902.000	12.500 PNS	87.474.816	13.144	50.600.116	5.200,00	34.684.160	-	5.180.000	5.200,00	22.400.000,00	-	-	-	-	5.200,00	27.580.000	100,00	79,52	18.344,00	78.180.116	146,75	89,37																									
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	6.480 PNS	418.805.700	2.160 PNS	78.303.139	5.629,00	72.620.800	300,00	54.308.030	-	6.660.000	200,00	43.999.000,00	-	-	-	-	200,00	50.659.000	66,67	93,28	5.829,00	123.279.800	269,86	157,44																									
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	930 Org	457.074.200	590 Org	184.490.381	595,00	41.484.308	150,00	29.956.000	-	-	100,00	16.800.000,00	-	-	-	-	100,00	16.800.000	66,67	56,08	695,00	58.284.308	117,80	31,59																									
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	115 kasus	369.104.700	40 kasus	110.920.550	39,00	32.899.690	20,00	26.470.000	-	-	-	15.760.000,00	-	-	-	-	-	15.760.000	-	59,54	39,00	48.659.690	97,50	43,87																									
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Proses Izin Perceraian Pegawai	115 ASN	369.104.700	40 ASN	110.920.550	39,00	35.207.796	25,00	23.784.160	-	-	-	23.780.000,00	-	-	-	-	-	23.780.000	-	99,98	39,00	58.987.796	97,50	53,18																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							46,67	77,68																														
Predikat kinerja																							SR	SR																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																							42,18	42,38																														
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA		18.875.424.027	100 persen	10.873.953.950		2.150.826.568	100 persen	772.107.711											631.054.728	42,18																													
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Terpenuhi Pengembangan Kapasitas dibidang Kompetensi Teknis	60 persen	503.040.000	100 persen	142.825.400		4.935.210	100 persen	-											579.192.600																														

Data Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Kembangpol

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																															
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
53		DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.865.135.894	100 persen	14.492.852.048	5.580.777.464	100 persen	4.999.802.332	633.670.173	625.602.810	-	-	1.259.272.983																	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	236.706.516	100 persen	211.048.950	75.077.388	100 persen	42.890.309	-	1	9.615.025	9.615.025																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJAPD)	5 Dokumen	82.750.000	4 Dokumen	96.421.500	1 Dokumen	15.990.593	2 Dokumen	15.110.540	-	-	-	-	-	-	1,00	15.990.593	25,00	16,58										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	10.997.043	1 Dokumen	10.680.425	-	1,00	9.615.025,00	-	-	-	1,00	9.615.025	100,00	90,02	1,00	20.612.068	50,00	89,91						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	10.997.043	1 Dokumen	10.680.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.997.043	-	47,97						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	23.840.416	2 Dokumen	22.925.490	1 Dokumen	6.994.709	1,00	Dokumen	6.418.919	-	-	-	-	-	1,00	6.994.709	50,00	30,51										
				3 Laporan	130.116.100	-	-	1 Laporan	30.098.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	30.098.000	-	-										
														Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	22,51															
														Predikat kinerja	SR	SR															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.618.202.913	2.360.348.202		2.354.460.947	530.118.173	360.186.133	-	-	890.304.306																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	24 Bulan	3.618.202.913	-	2.360.348.202	12 Bulan	2.344.130.687	3,00	530.118.173	3,00	360.186.133,00	-	-	6,00	890.304.306	50,00	37,98	6,00	3.250.652.508	25,00	89,84						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan	5 Dokumen	23.840.416	4 Dokumen	45.851.190	1 Dokumen	9.415.831	2 Dokumen	10.330.260	-	-	-	-	-	-	1,00	9.415.831	25,00	20,54										
				3 Dokumen	28.683.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
														Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	18,99															
														Predikat kinerja	SR	SR															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.653.814	100 persen	138.180.000	-		-																						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pegawai yang terampil dan cakap	12 Orang	239.653.814	2 Kegiatan	138.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-															
														Predikat kinerja	SR	SR															

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.799.473.501	6.640.703.580	2.122.598.888	919.143.568	-	-	128.436.960	-	-	128.436.960	-	-	-	-	-	25,00	21,81	57,35	40,52					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang baik	60 Bulan	50,00	17,00	Bulan	44.100.000	12 Bulan	32.389.247	12 Bulan	22.998.745	-	-	3,00	6.947.575,00	-	-	-	3,00	6.947.575	25,00	30,21	15,00	39.336.822	88,24	89,20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan lainnya administrasi pada kantor kesbangpol	60 Bulan	50,00	19,83	Bulan	1.643.250.000	12 Bulan	903.382.919	12 Bulan	159.801.689	-	-	3,00	34.736.220,00	-	-	-	3,00	34.736.220	25,00	21,74	15,00	938.119.139	75,63	57,09
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60 Bulan	50,00	23,14			12 Bulan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	51,86	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	165.500.103	24	Bulan	250.078.080	12 Bulan	120.265.222	12 Bulan	124.613.134	-	-	3,00	20.309.531,00	-	-	-	3,00	20.309.531	25,00	16,30	15,00	140.574.753	62,50	56,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	60 Bulan	45.421.944	24	Bulan	7.035.000	12 Bulan	3.780.000	12 Bulan	3.780.000	-	-	3,00	1.260.000,00	-	-	-	3,00	1.260.000	25,00	33,33	15,00	5.040.000	62,50	71,64
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	60 Bulan	957.462.833	24	Bulan	4.055.320.500	12 Bulan	900.042.000	12 Bulan	573.815.000	-	-	3,00	58.681.634,00	-	-	-	3,00	58.681.634	25,00	10,23	15,00	958.723.634	62,50	23,64
			36 Bulan	80.896.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	21,81					
																		Predikat kinerja		SR	SR					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.362.850.000	2.530.500.000	-	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	2.860.750.000	10 Unit	2.530.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1 Unit	502.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					
																		Predikat kinerja		SR	SR					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.766.853.231	1.280.716.605	-	974.146.986	-	-	787.505.608	103.552.000	-	-	93.692.092	-	-	-	-	-	-	197.244.092	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	327.233.360	24	Bulan	185.745.000	12 Bulan	171.721.500	12 Bulan	93.270.000	-	-	3,00	12.566.428,00	-	-	-	3,00	12.566.428	25,00	13,47	15,00	184.287.928	62,50	99,22
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	60 Bulan	31.136.010	24	Bulan	59.850.000	12 Bulan	54.194.700	12 Bulan	32.275.000	-	-	3,00	1.575.000,00	-	-	-	3,00	1.575.000	25,00	4,88	15,00	55.769.700	62,50	93,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, jasa pengamanan kantor dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	25 Orang	589.294.778	24	Bulan	1.035.121.605	12 Bulan	615.690.000	12 Bulan	661.960.608	3,00	103.552.000	3,00	79.550.664,00	-	-	-	6,00	183.102.664	50,00	27,66	18,00	798.792.664	75,00	77,17
			10 Orang	401.105.070				12 Bulan	65.700.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	65.700.000	-	-
			60 Bulan	158.963.983				12 Bulan	53.478.786			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	53.478.786	-	-
			36 Bulan	55.025.440	-	-	-	12 Bulan	13.362.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	13.362.000	-	-
			60 Bulan	5.494.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			36 Bulan	198.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	15,34					
																		Predikat kinerja		SR	SR					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.851.620	73.500.000	48.606.000	305.801.900	-	-	33.672.600	-	-	33.672.600	-	-	-	-	-	-	-	33.672.600	-	-	-	-	-	

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	60 Bulan	37.851.620	24 Bulan	73.500.000	12 Bulan	48.606.000	12 Bulan	47.104.500	-	-	3,00	14.000.000,00	-	-	-	3,00	14.000.000	25,00	29,72	15,00	62.606.000	62,50	85,18																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	152.627.500	15 Unit	399.000.000	2 Unit	201.120.000	4 Unit	167.417.400	-	-	1,00	19.672.600,00	-	-	-	1,00	19.672.600	25,00	11,75	3,00	220.792.600	20,00	55,34																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	-	4 Paket	825.300.000	-	198.418.000	2 Paket	91.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.418.000	-	24,04																	
				4 Bangunan	99.345.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				4 Paket	106.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	13,82																				
																				Predikat kinerja		SR	SR																				
				11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
				20 Orang	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																				
																				Predikat kinerja		SR	SR																				
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		25,00	18,49																				
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		8.692.541.039		2.910.841.920		806.077.520		616.507.770				161.344.488					161.344.488																							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		8.692.541.039		2.910.841.920		806.077.520		616.507.770				161.344.488					161.344.488																							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah penyelenggara upacara peringatan hari besar nasional	7 Kegiatan	266.691.850	4 Kegiatan	107.341.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Pembinaan, Pendidikan dan pelatihan	200 Orang	426.180.245	588 Orang	2.152.500.000	-	243.468.750	294 Orang	274.255.972	-	-	100,00	115.444.488,00	-	-	-	100,00	115.444.488	34,01	42,09	100,00	358.913.238	17,01	16,67																	
				294 Orang	784.397.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				4 Orang	824.494.535	-	-	26.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.792.000	-																		
				4 Kegiatan	166.507.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi pengurus forum pembauran kebangsaan	- 0	-	24 Bulan	651.000.000	-	535.816.770	12 Bulan	342.251.798	-	-	3,00	45.900.000,00	-	-	-	3,00	45.900.000	25,00	13,41	3,00	581.716.770	12,50	89,36																	
				100 Orang	404.921.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				276 OrmasLSM	619.325.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				96 OrmasLSM	688.522.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				188 Orang	1.091.037.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				1.000 Orang	352.285.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				1.000 Orang	108.439.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				4 Kegiatan	1.180.753.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
				672 Orang	1.612.545.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		

Dinas Kearsifan, Bangunan dan Teknik

		84 Orang	1.856.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		84 Orang	472.729.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		300 Persen	2.580.058.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		63 Orang	2.416.369.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			13,69	1,78	10,08	16,72		
		Predikat kinerja																			SR	SR				
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																			13,69	1,78				
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	6.141.595.867	100 persen	6.858.235.440	3.912.249.441	100,00 persen	3.542.968.110	-	104.529.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.529.200					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	6.141.595.867	100 persen	6.858.235.440	3.912.249.441	100,00 persen	3.542.968.110	-	104.529.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.529.200					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik	60 Bulan	637.857.548	28 Kasus	2.125.076.310	12 Bulan	1.094.698.624	14 Kasus	946.157.240	-	-	2,00	20.959.800,00	-	-	-	-	2,00	20.959.800	14,29	2,22	14,00	1.115.658.424	50,00	52,50
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesiagaan, pencegahan dan perlindungan terhadap gangguan keamanan, kenyamanan, dan bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme di daerah	387 Orang	464.596.584	150 Orang	864.959.130	-	-	75 Orang	50.756.500	-	-	-	83.569.400,00	-	-	-	-	-	83.569.400	-	164,65	-	83.569.400	-	9,66
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peningkatan kewaspadaan daerah dini dan peningkatan pemantauan jumlah orang asing, Ormas Asing, Tenaga Kerja Asing di daerah	75 Orang	363.127.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	-	-	200 Persen	3.024.000.000	-	-	2.031.471.833	100 Persen	2.141.304.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031.471.833	-	67,18
			60 Bulan	1.048.336.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60 Bulan	1.048.336.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			4,76	55,62	12,50	27,81	
			Predikat kinerja																			SR	SR			
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6																			4,76	55,62			
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			13.623.840.927	1.538.649.984			
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																			12,16	17,27			
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																			SR	SR			

Dinkesdam Bagan Pak

VI Pengawasan
1) Inspektorat

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																								
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
				13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100																														
31		INSPEKTORAT																																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.167.248.946	100 persen	27.981.783.998		13.516.188.597	100 persen	12.833.731.447		18.000.000	38	5.408.035.303	-	-	-	-			6.813.373.521																		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	315.352.400	100 persen	144.000.000		72.000.000	100 persen	77.500.000		18.000.000	2	40.000.000	-	-	-	-			58.000.000																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspekturat Tahun 2017 s.d 2022	1 Dok	17.075.000	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			-																		
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	5 Dok	298.277.400	10 Dok	144.000.000		1 Dok	72.000.000	5 Dok	77.500.000	2,0	18.000.000,00	2,00	40.000.000,00	-	-	-	-	4,00	58.000.000	80,00	74,84	5,00	130.000.000	50,00	90,28												
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80,00	74,84			50,00	90,28															
Predikat kinerja																				SR	SR																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		7.870.000	24 Bulan	23.777.719.178		11.492.298.375	100,00 Persen	10.629.786.534			4	4.940.943.072	-	-	-	-			5.984.697.557																		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			28 Bulan	23.771.919.178	-	-	11.489.398.375	14 Bulan	10.629.786.534	3,00	1.043.754.485	4,00	4.940.943.072,00	-	-	-	-	7,00	5.984.697.557	50,00	56,30	7,00	17.474.095.932	25,00	73,51												
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	7.870.000	2 Dok	5.800.000		1 Dok	2.900.000				-	-	-	-	-	-			-			1,00	2.900.000	50,00	50,00												
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25,00	26,15			37,50	61,75															
Predikat kinerja																				SR	SR																			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	9,0 Unit	3.176.425.700	100 persen	725.134.000	9,00	192.380.000	100,00 Persen	277.726.000			5	26.180.000	-	-	-	-	5,00	36.930.000	5,00	13,30	14,00	229.310.000	14,00	31,62													
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	18 Orang	2.587.147.800	36 Orang	573.474.000	18 Orang	137.630.000	18 Orang	216.476.000			1,00	15.180.000,00	-	-	-	-	1,00	15.180.000	5,56	7,01	19,00	152.810.000	52,78	26,65													
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	15 Kali	544.727.900	30 Keg	151.660.000	19 Kali	54.750.000	15 Kali	61.250.000	1,00	10.750.000	4,00	11.000.000,00	-	-	-	-	5,00	21.750.000	33,33	35,51	24,00	76.500.000	80,00	50,44													
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Keg	44.550.000	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-			-			-	-	-													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				19,44	21,26			66,39	38,54															
Predikat kinerja																				SR	SR																			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2,00 unit	11.886.378.038	2 Unit	1.820.599.924	-	879.156.634	1,00 unit	743.357.149			14	136.353.778	-	-	-	-	14,00	285.035.719	1.400,00	38,34	14,00	1.164.192.353	700,00	63,95													

Dinas Inspektorat

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	212.735.500	24 Bulan	19.342.920	12 Bulan	12.601.490	12 Bulan	44.195.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	12.601.490	50,00	65,15	
					2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	4.784.490.403	24 Bulan	488.390.904	12 Bulan	300.487.499	12 Bulan	237.562.055	3,00	41.199.682	-	27.777.158,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	68.976.840	25,00	29,04	15,00	369.464.339	62,50	75,65
					3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	1.058.317.000	24 Bulan	249.991.400	12 Bulan	154.095.700	12 Bulan	128.300.000	3,00	27.415.000	3,00	42.465.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	69.880.000	50,00	54,47	18,00	223.975.700	75,00	89,59
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	60 Bulan	586.435.100	24 Bulan	177.690.700	12 Bulan	96.915.945	12 Bulan	88.379.194	3,00	22.190.983	3,00	21.242.310,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	43.433.293	50,00	49,14	18,00	140.349.238	75,00	78,99
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	249.927.600	24 Bulan	62.400.000	12 Bulan	31.200.000	12 Bulan	31.200.000	-	-	6,00	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	14.400.000	50,00	46,15	18,00	45.600.000	75,00	73,08
					6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	4.994.472.435	24 Bulan	822.784.000	12 Bulan	283.856.000	12 Bulan	213.720.000	3,00	57.876.276	2,00	30.469.310,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	88.345.586	41,67	41,34	17,00	372.201.586	70,83	45,24
Rate-rata capaian kinerja (%)																										36,11	36,69		68,06	71,28			
Predikat kinerja																										SR	R						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		2.830.102.678		961.310.400	100,00 %	497.965.200	12,00 bulan	599.058.264	6	128.935.391	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	268.516.584	50,00		766.481.784		79,73		
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	707.499.178	24 Bulan	270.710.400	12,00 Bulan	137.155.200	12 Bulan	150.931.200	3,00	35.826.842	3,00	30.829.053,00	-	-	-	-	-	-	6,00	66.655.895	50,00	44,16	18,00	203.811.095	75,00	75,29	
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2.122.603.500	24 Bulan	690.600.000	12,00 Bulan	360.810.000	12 Bulan	448.127.064	3,00	103.754.351	3,00	98.106.337,50	-	-	-	-	-	-	6,00	201.860.689	50,00	45,05	18,00	562.670.689	75,00	81,48	
Rate-rata capaian kinerja (%)																										50,00	44,80		75,00	78,38			
Predikat kinerja																										SR	SR						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1,00	4.263.896.130	2	464.880.496	-	346.088.388	1,00	422.753.500	7	62.873.062	-	-	-	-	-	-	-	7,00	107.243.661	700,00	25,37	7,00	453.332.049	350,00	97,52		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Kali	494.042.640	4 Unit	137.380.000	2 Unit	68.690.000	2 Unit	68.690.000	1,00	9.250.599	-	16.741.062,00	-	-	-	-	-	-	1,00	25.991.661	50,00	37,84	3,00	94.681.661	75,00	68,92	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	14 Kali	851.445.790	14 Unit	235.315.496	7 Unit	203.725.888	7 Unit	123.411.000	1,00	22.860.000	4,00	34.012.000,00	-	-	-	-	-	-	5,00	56.872.000	71,43	46,08	12,00	260.597.888	85,71	110,74	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya fungsi peralatan kerja perkantoran	12 Bulan	401.153.200	24 Bulan	92.185.000	12 Bulan	52.392.500	12 Bulan	46.092.500	3,00	12.460.000	3,00	11.920.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	24.380.000	50,00	52,89	18,00	76.772.500	75,00	83,28	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya fungsi bangunan/gedung perkantoran	12 Bulan	2.517.254.500	-	-	2 Kegiatan	21.280.000		184.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	21.280.000	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																										42,86	34,20		78,57	87,65			
Predikat kinerja																										SR	SR						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1,00	459.900.000	1	Kegiatan	-	1,00	Kegiatan	-	1,00	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00 Unit	459.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																										-	-		-	-			
Predikat kinerja																										SR	SR						

Dinas Informatika

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

			1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan bina desa	-	0	-	126 Laporan	176.100.000	-	-	113.850.000	63 Laporan	85.700.000	-	-	-	-	0,50	38.100.000,00	-	-	-	-	-	0,50	38.100.000	0,79	44,46	0,50	151.950.000	0,40	86,29	Dinas Inspektoral	
			2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	-	0	-	2 Laporan	91.700.000	-	-	29.950.000	1 Laporan	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.950.000	-	32,66		
			3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi saber pungli, pengelolaan LHKPN dan Korsugah KPK	3	Laporan	866.869.360	6	Laporan	494.750.000	3	Laporan	114.500.000	3	Laporan	165.950.000	-	-	0,03	3.250.000,00	-	-	-	-	0,03	3.250.000	1,00	1,96	3,03	117.750.000	50,50	23,80			
																								0,60	15,47		25,45	71,37							
																								Predikat kinerja		SR	SR								
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		0,60	15,47								
																								Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		15.921.361.447	7.894.183.521								
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		31,55	36,33								
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		SR	SR								

V Pendukung
1) Sekretariat Daerah

EVALUASI HASIL RKPd KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																			
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																								
																K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100			15 = 7 + 13		16 = 15/6*100																				
25		SEKRETARIAT DAERAH																																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		279.202.730.723	100 persen	140.107.144.518		106.320.939.921	100,00 persen	80.250.817.367	71.465.949.275		10.584.651.487		557.436.848	-	-																																		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	1.315.830.973	100 persen	1.402.609.666		1.462.806.597	100,00 persen	1.150.361.286	655.703.433		352.282.058		557.436.848	-	-																																	
				100 persen	1.235.830.973			100	456.999.800						-	-	-	-																																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen	80.000.000	100 persen	815.241.232	100	704.166.277	100,00	785.771.074	407.213.241	45,00	306.889.254	55	420.318.893,00	-	-	-	-	100,00	727.208.147	100,00	92,55	100,00	727.208.247	100,00	727.208.247,00																							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan RKA-SKPD	100 persen	137.356.540			51.956.270	100,00	79.535.567	51.956.270	82,00	23.053.067		29.445.675,00	-	-	-	-	82,00	52.498.742	82,00	66,01	82,00	52.498.842	-	52.498.842,00																								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Perubahan RKA-SKPD	100 persen	54.974.420			62.509.571	100,00	81.749.801	15.215.185				14.400.000,00	-	-	-	-	-	14.400.000	-	17,61	-	14.400.100	-	14.400.100,00																								
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan DPA-SKPD	100 persen	49.884.730			15.842.365	100,00	22.339.737	15.842.365	100,00	22.339.737		-	-	-	-	-	100,00	22.339.737	100,00	100,00	100,00	22.339.837	-	22.339.837,00																								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 persen	47.567.364			22.689.624	100,00	14.983.058	16.683.682				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100,00																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan LKJIP-PD	100 persen	297.585.380	100	148.642.690	100,00	165.982.049	148.702.690				97,00	93.272.280,00	-	-	-	-	97,00	93.272.280	97,00	56,19	97,00	93.272.380	-	93.272.380,00																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																						55,39	63,17		151.619.917,87																										
Predikat kinerja																						SR	SR																												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	51.893.350		41.525.603.934		20.926.055.112	100,00 persen	18.850.405.562	19.572.139.914		2.653.565.710			-	-																																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah			28 bulan	41.383.350.410		20.854.928.350	14,00	18.706.485.663	19.501.013.152	3,00	2.600.889.773	7	8.960.319.761	-	-	-	10,00	11.561.209.534	71,43	61,80	100,00	11.561.209.548	-	41.290.034.100,00																								
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			24 bulan	8.479.216		4.239.608	100,00	44.607.426	4.239.608			43	19.363.803	-	-	-	43,00	19.363.803	43,00	43,41	43,00	19.363.903	-	80.682.929,17																								
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD			24 bulan	21.663.976		10.831.988	100,00	45.736.536	10.831.988			46	21.020.818	-	-	-	46,00	21.020.818	46,00	45,96	46,00	21.020.918	-	87.587.158,33																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 persen	51.893.350	100 persen	112.110.332	100	56.055.166	100,00	53.575.937	56.055.166	100,00	52.675.937		-	-	-	-	100,00	52.675.937	100,00	98,32	100,00	52.676.037	100,00	52.676.037,00																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																						62,37	49,75		10.377.745.056,13																										
Predikat kinerja																						SR	SR																												

Dinas Sekretariat Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100 Persen	1.200.000.000		600.000.000	12,00	600.000.000	600.000.000										12		12,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							21,85	20,62	102.654.902,00
Predikat kinerja																							SR	SR	
	Penyelenggaraan Kegiatan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	-	23.261.972.086	1,00	14.174.013.322		11.775.055.477	11.353.209.833		1.280.911.860								1.280.911.860,00				
	Sub Kegiatan 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dana Pemeliharaan dan Pajak Mobil Jabatan		100 Persen	3.696.975.600	1.349.030.200	100,00	1.665.939.464	1.731.760.600	4,80	80.000.000						4,80	80.000.000	4,80	4,80	4,80	80.000,100	-	80.000,100,00	
	Sub Kegiatan 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dana Pemeliharaan dan Pajak Mobil Operasional		100 Persen	5.685.199.820	2.685.213.087	100,00	1.779.739.820	2.681.550.900	6,36	113.255.500						6,36	113.255.500	6,36	6,36	6,36	113.255,600	-	113.255,600,00	
	Sub Kegiatan 23. Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Kantor		100 Persen	510.704.486	255.352.243	100,00	255.352.243	255.352.243								-					100	-	100,00	
	Sub Kegiatan 24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor		100 Persen	2.952.166.180	1.692.144.060	100,00	1.446.325.670	1.476.083.000	11,25	162.888.360						11,25	162.888.360	11,25	11,25	11,25	162.888,460	-	162.888,460,00	
	Sub Kegiatan 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		100 Persen	4.438.933.400	4.466.544.066	100,00	3.255.121.340	2.219.466.700	16,93	551.031.000						16,93	551.031.000	16,93	16,93	16,93	551.031,100	-	551.031,100,00	
	Sub Kegiatan 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 Persen	5.977.992.600	3.725.729.666	100,00	3.372.576.940	2.988.996.300	11,08	373.737.000						11,08	373.737.000	11,08	11,08	11,08	373.737,100	-	373.737,100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							8,41	8,40	213.485.410,00
Predikat kinerja																							SR	SR	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	7.361.984.414	4.332.579.282		12.319.531.155	3.490.242.207		164.158.500							164.158.500,00							
	Sub bagian 27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan		100 Persen	1.703.000.000	779.750.000	100,00	1.202.735.200	779.750.000													100	#DIV/0!	100,00	
	Sub Kegiatan 28. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		100 Persen	2.953.000.000	2.453.500.000	100,00	9.471.329.720	1.357.500.000													100	#DIV/0!	100,00	
	Sub Kegiatan 29. Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor		100 Persen	1.136.051.984	446.144.500	100,00	608.788.720	568.025.992	22,10	134.541.000						22,10	134.541.000	22,10	22,10	22,10	134.541,100	#DIV/0!	134.541,100,00	
	Sub Kegiatan 30. Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor		100 Persen	1.569.932.430	653.184.782	100,00	1.036.677.515	784.966.215	2,86	29.617.500						2,86	29.617.500	2,86	2,86	2,86	29.617,600	#DIV/0!	29.617,600,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							6,24	6,24	41.039.725,00
Predikat kinerja																							SR	SR	
	Penataan Organisasi		6.736.370.021	2	2 Dokur	1.889.472.180		874.734.271	1,00	Dokum	1.155.849.584	874.734.748		22.079.500				243.026.889,00							

Dinas Sekretariat Daerah

					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya pedoman sebagai rujukan bagi OPD dalam menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dimuat dalam RKA-OPD	100 Persen	1.809.316.222	100 Persen	977.219.476	100	448.609.411	100,00	530.887.725	448.609.738	5,00	22.079.500	55	83.947.598,00	-	-	-	-	60,00	106.027.098	60,00	19,97	60,00	106.027.198	60,00	106.027.198,00
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Publik dan SOP Seluruh OPD Kabupaten Kampar	100 Persen	2.073.908.575	100 Persen	245.575.578	100	115.287.523	100,00	155.210.073	115.287.523			45,000	18.060.073,00	-	-	-	-	45,00	18.060.073	45,00	11,64	45,00	18.060.173	45,00	18.060.173,00
					Peringatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penyusunan E-Sakip OPD, Dokumen Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar	100 Persen	1.288.176.100	100 Persen	238.771.990	100	115.785.055	100,00	167.995.386	115.785.055			35,000	18.225.600,00	-	-	-	-	35,00	18.225.600	35,00	11,54	35,00	18.225.700	35,00	18.225.700,00
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya peta proses bisnis Kabupaten Kampar	100 Persen		100 Persen	219.757.690		102.378.709	100,00	165.923.200	102.378.709			50,000	44.903.318,00	-	-	-	-	50,00	44.903.318	50,00	27,06	50,00	44.903.418	50,00	44.903.418,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKJIP Tahun 2020 dan Penja Tahun 2021 Kabupaten Kampar	100 Persen	1.564.969.124	100 Persen	208.147.446	100	92.673.573	100,00	145.833.400	92.673.723			45,000	55.810.600,00	-	-	-	-	45,00	55.810.600	45,00	38,27	45,00	55.810.700	45,00	55.810.700,00
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		21,70	47,00			48.605.437,80		
																							Predikat kinerja		SR	SR					
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		500 Berita	38.417.738.999		10.615.847.374	100	9.033.972.082		4.149.376.015	4.777.131.208			731.829.096	-	-	-	-		2.291.918.086,00							
					Fasilitasi Keprotokolkan	Terpenuhinya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan keprotokolkan serta peringatan hari-hari besar			24 bulan	9.180.005.144		3.644.353.825	12,00	3.443.953.618	4.059.210.093	3,00	704.184.193	32	1.185.200.866,00	-	-	-	-	35,40	1.889.385.059	295,00	54,86	35,40	1.889.385.071	-	7.872.437.795,83
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan			24 bulan	347.910.204		300.561.696	12,00	156.946.250	173.955.102			33	25.000.000,00	-	-	-	-	33,30	25.000.000	277,50	15,93	33,30	25.000.012	-	104.166.716,67
					Pandokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya dokumentasi tugas pimpinan	110 Bulan	1.816.606.530	24 bulan	1.087.932.026	4,00	932.056.013	12,00	548.476.147	543.966.013	3,00	27.644.893	54	349.888.134,00	-	-	-	-	57,20	377.533.027	476,67	68,83	57,20	377.533.039	52,00	1.573.054.329,17
							110 Bulan	1.102.915.598			4,00	540.000						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							110 Bulan	22.403.947.080			4,00	3.796.625.282						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							110 Keg	2.639.008.055			4,00	192.140.250						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							110 Bulan	7.139.882.986			4,00	41.534.598						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							110 Bulan	1.657.689.375				78.287.000						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							110 Bulan	1.657.689.375			47.873.418							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		46,54	41,97			3.183.219.613,89		
																							Predikat kinerja		SR	SR					
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		24,83	27,58					
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100 persen	102.638.229.667		36.732.218.586		37.365.208.399		15.247.242.604	16.109.670.278			1.123.522.458	-	-	-	-		3.611.084.247							
					Administrasi Tata Pemerintahan			14.116.940.743		2.980.788.704		3.100.485.154		1.665.488.635	1.341.327.027			237.902.281						729.095.865							
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar	100 Persen		316.388.964		146.860.537	12,00	121.015.748	135.940.532	3,00	19.230.000	3	30.890.000,00	-	-	-	-	6,00	50.120.000	50,00	41,42	6,00	50.120.012	-	50.120.012,00	

Dinas Sekretariat Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				4.890.891.500		1.342.101.390		1.063.929.690		887.887.687	603.945.432		161.792.418		161.371.011	-	-	-	-		323.163.429											
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	terlaksananya Koordinasi pembinaan BUMD dan BLUD	105,00	kecamatan	541.143.350	100	Persen	294.643.898	21,00	147.321.665	100,00	260.852.754	147.321.949	20,00	50.040.928	43	58.117.200,00	-	-	-	-	63,00	108.158.128	63,00	41,46	63,00	108.158.228	60,00	108.158.228,00				
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program dana bergulir, pengendalian inflasi dan pengalangan bantuan pangan	17,50	Milyar	2.940.577.750	100	Persen	787.347.176	13,00	326.568.167	100,00	421.448.055	326.568.325	20,00	69.998.234	40	70.337.869,00	-	-	-	-	60,00	140.336.103	60,00	33,30	60,00	140.336.203	342,86	140.336.203,00				
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	100,00	Persen		100	Persen	260.110.316		130.055.158	100,00	205.586.878	130.055.158	20,50	41.753.256	40	32.915.942,00	-	-	-	-	60,50	74.669.198	60,50	36,32	60,50	74.669.298	60,50	74.669.298,00				
						75,00	kali	704.585.200			20,00	136.057.100								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						75,00	kali	704.585.200			24,00	323.927.600								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									37,03	61,17		107.721.243,00								
Predikat Kinerja																									SR	SR										
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				3.841.556.138		1.169.379.518		526.230.663		461.247.311	526.230.956		65.147.307		199.981.773	-	-	-	-		265.129.080											
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan, tersusunnya perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100	Persen	1.435.657.001	100	Persen	697.692.416	100,00	297.963.230	100,00	206.965.180	313.951.208	19,25	39.845.953	53	109.516.916,00	-	-	-	-	72,17	149.362.869	72,17	72,17	72,17	149.362.969	72,17	149.362.969,00				
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mengetahui secara dini pelaksanaan pembangunan	100	persen	1.651.627.262	100	Persen	197.251.700	100,00	88.925.379	100,00	119.397.323	88.927.694	7,34	8.760.060	28	33.604.053,00	-	-	-	-	35,48	42.364.113	35,48	35,48	35,48	42.364.213	35,48	42.364.213,00				
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Penggunaan APBD, Tersedianya data pelaporan pelaksanaan pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan/Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran	100	persen	754.271.875	100	Persen	274.435.402	100,00	139.342.054	100,00	134.884.808	123.352.054	12,26	16.541.294	42	56.860.804,00	-	-	-	-	54,42	73.402.098	54,42	54,42	54,42	73.402.198	54,42	73.402.198,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									54,02	54,02		88.376.460,00								
Predikat Kinerja																									SR	SR										
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				8.368.137.956		4.094.722.948		1.995.736.766		2.088.423.095	1.995.737.474		356.006.007		397.702.952	-	-	-	-		753.708.959											
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pelelangan paket Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kampar berjalan dengan lancar serta terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Katalog Lokal	5,00	paket	1.222.724.221	24	bulan	1.766.287.472	12,00	857.331.463	12,00	1.177.583.460	857.331.736	3,00	181.527.214	3	229.846.986,00	-	-	-	-	6,00	411.374.200	50,00	34,93	6,00	411.374.212	120,00	1.714.059.216,67				
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Sistem Jasa Pengadaan Barang Jasa secara online dan Peningkatan pelayanan pada ruang LPSE	315,00	paket	5.091.659.223	24	bulan	1.822.002.160	12,00	911.000.838	12,00	761.020.626	911.001.080	3,00	138.128.107	3	135.853.393,00	-	-	-	-	6,00	273.981.500	50,00	36,00	6,00	273.981.512	1,90	1.141.589.633,33				

Dinas Sekretariat Daerah

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya basis sistem lokal dan penguatan IJKPLJ	315.00 paket	2.053.754.512	24 bulan	506.433.316	1,00	227.404.465	12,00	149.819.009	227.404.658	3,00	36.350.686	3	32.002.573,00	-	-	-	-	6,00	68.353.259	50,00	45,62	6,00	68.353.271	1,90	284.805.295,83																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																						38,85	6,00																													1.046.818.048,61		
Predikat kinerja																						SR	SR																															
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			-		1.640.000.000		710.078.152		696.746.555	664.956.862		189.895.426		203.298.959	-	-	-	-		393.194.385																															
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersedianya data dibidang Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan	24 bulan		460.000.000		460.842.250	12,00	404.709.745	465.427.368	3,00	85.759.952	3	136.828.801,00	-	-	-	-	6,00	222.588.753	50,00	55,00	6,00	222.588.765	-	927.453.187,50																										
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dibidang pertambangan dan Lingkungan Hidup	24 bulan		460.000.000		102.746.483	12,00	136.197.250	94.546.757	3,00	26.492.850	3	49.372.400,00	-	-	-	-	6,00	75.865.250	50,00	55,70	6,00	75.865.262	-	316.105.258,33																										
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya data dibidang Energi dan Sumber Daya Air	24 bulan		720.000.000		146.489.419	12,00	155.839.560	104.982.737	3,00	77.642.624	3	17.097.758,00	-	-	-	-	6,00	94.740.382	50,00	60,79	6,00	94.740.394	-	394.751.641,67																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																						57,17	6,00																														546.103.362,50	
Predikat kinerja																						SR	SR																															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																					46,77	31,80																																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					99.632.364.619	91.366.490.277																																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					37,52	24,04																																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					SR	SR																																

Dasar Situasional Daerah

2) Sekretariat DPRD

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																								
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																													
				13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100																																														
26		SEKRETARIAT DPRD																																																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			34.712.186.748	100 persen	83.761.559.498	48.023.067.606	100 persen	49.706.358.733																																														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	62.119.393	100 persen	304.717.720	152.358.860	100 persen	122.280.000																																														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	24 bln	32.244.120	36	16.122.060	12	7.200.000																																														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	-	24 bln	37.580.550	36	18.790.275	12	15.270.000																																														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	24 bln	37.580.550	36	18.790.275	12	15.270.000																																														
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	-	24 bln	37.580.550	36	18.790.275	12	15.270.000																																														
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	24 bln	37.580.550	36	18.790.275	12	15.270.000																																														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 bh	62.119.393	24 bh	122.151.400	3	61.075.700	1	54.000.000																																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-																																			
Predikat kinerja																				SR	SR																																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	-	20.696.289	11.037.692.108	5.016.317.696	100 persen	5.218.943.904																																															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Kampar	-	24 bln	11.023.540.708	36	5.009.241.996	12	5.207.667.054	3,00	621.947.870	-	1.745.152.844,00	-	-	-	-	-	-	3,00	2.367.100.714	25,00	45,45	39,00	7.376.342.710	162,50	66,91																												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tepat waktu	5 bh	20.696.289	24 bh	14.151.400	3	7.075.700	1	11.276.850																																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				12,50	22,73																																			
Predikat kinerja																				SR	SR																																			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	415.830.571	100 persen	1.331.880.000	1.547.226.000	100 persen	1.352.204.500																																														
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya seragam pakaian adat melalui sistem rangkai HJT Kabupaten Kampar	-	24 bln	277.200.000	36,00	138.600.000	12	147.262.500	3,00	146.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	146.795.000	25,00	99,68	39,00	285.395.000	162,50	102,96																												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya peningkatan kualitas SDM ASN pada Sekretariat DPRD	60 bln	415.830.571	24 bln	1.054.680.000	36,00	1.408.626.000	12	1.204.942.000	3,00	244.325.500	-	387.436.800,00	-	-	-	-	-	3,00	631.762.300	25,00	52,43	39,00	2.040.388.300	162,50	193,46																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																				25,00	76,08																																			
Predikat kinerja																				SR	SR																																			

Dinas Sekretariat DPRD

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	bln	2.399.060.096	24	bln	1.567.184.000	3	825.888.000	12	815.616.000	3,00	20.192.682	-	-	-	-	-	3,00	195.702.582	25,00	23,99	6,00	1.021.590.582	25,00	65,19	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	bln	335.780.500	24	bln	2.337.940.000	36	1.285.136.000	12	1.538.378.300	3,00	76.193.000	-	-	-	-	-	3,00	89.593.000	25,00	5,82	39,00	1.374.729.000	162,50	58,80	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	bln	312.581.120	24	bln	63.540.000	3	76.770.000	12	81.770.000	3,00	43.806.000	-	-	-	-	-	3,00	100.576.000	25,00	123,00	6,00	177.346.000	25,00	279,11	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bln	-	24	bln	512.270.750	-	225.635.375	12	225.635.375	-	-	-	-	-	-	-	-	40.095.004	-	17,77	-	265.730.379	-	51,87	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	37,44			47,50	101,81		
																					Predikat kinerja	SR	SR						
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	persen	6.507.426.090			61.066.202.076	1	33.690.430.213		34.372.181.357		7.588.949.948		8.431.018.332	-	-	-	-	16.019.968.280	-	-	1,00	49.710.398.483	-	-	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terperuhnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	bln	3.253.713.045	24	bln	59.720.184.576	36	33.017.421.463	12	33.321.061.607	3,00	7.588.949.948	-	8.431.018.332,00	-	-	-	-	3,00	16.019.968.280	25,00	48,08	39,00	49.037.389.743	162,50	82,11
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Akibat DPRD	Tercaipainya peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	60	bln	3.253.713.045	24	bln	1.346.017.500	36	673.008.750	12	1.051.119.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	673.008.750	150,00	50,00	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	34,43			120,00	95,26		
																					Predikat kinerja	SR	SR						
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			4.512.181.728	2	2 Dokum	2.162.047.100		1.024.622.300	1	Dokume	949.866.780		310.300.350	-	-	-	-	-	316.662.850	-	33,34	-	1.341.285.150	-	62,04	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya fasilitas Rapat - rapat DPRD	60	bln	2.256.090.864	24	bln	1.199.251.000	36	574.360.500	12	499.609.000	3,00	6.362.500	-	206.524.000,00	-	-	-	-	3,00	212.886.500	25,00	42,61	39,00	787.247.000	162,50	65,64
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60	bln	2.256.090.864	24	bln	962.796.100	36	450.261.800	12	450.257.780	-	-	-	-	-	-	-	-	103.776.350	-	23,05	36,00	554.038.150	150,00	57,54	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	32,83			52,08	30,87		
																					Predikat kinerja	SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																					15,00	38,91							
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				233.500.339.872	100	persen	74.226.040.280		40.414.457.577	100	persen	39.385.290.810		68.797.820		8.718.497.765	-	-	-	14.093.108.896							
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terperuhnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10	persen	10.973.157.702	2	2 Dokum	9.842.072.000		4.839.975.000	1	Dokume	4.908.464.750		68.797.820		68.579.600	-	-	-	-	137.377.420	-	2,80	-	4.977.352.420	-	50,57
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Ranperda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	60	bln	-	24	bln	1.857.016.000	36	1.004.190.000	12	1.614.636.850	3,00	68.797.820	-	68.579.600,00	-	-	-	-	3,00	137.377.420	25,00	8,51	39,00	1.141.567.420	162,50	61,47

Gubernur Riau

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

				Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Pembahasan Ranperda oleh DPRD	60 bln	10.973.157.702	24 bln	7.985.056.000	36	3.835.785.000	12	3.293.827.900	-	-	-	-	-	-	-	36,00	3.835.785.000	150,00	48,04																			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	4,25		52,08	26,68																	
																				Predikat kinerja		SR	SR																				
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terepenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	500 Berita	-		2.128.775.000	100	1.342.304.500		1.065.003.600	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.342.304.500	-	-																			
				Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA - PPAS APBD oleh DPRD	60 bln	-	24 bln	244.270.000	36,00	290.512.000	12,00	307.413.600	-	-	-	-	-	-	-	36,00	290.512.000	150,00	118,93																			
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA - PPAS APBD oleh DPRD		-	24 bln	244.270.000		127.491.000	12,00	181.310.200	-	-	-	-	-	-	-		127.491.000	-	52,19																			
				Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD oleh DPRD		-	24 bln	640.938.000		394.540.000	12,00	109.443.600	-	-	-	-	-	-	-		394.540.000	-	61,56																			
				Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan oleh DPRD		-	24 bln	304.148.000		215.594.000	12,00	109.443.600	-	-	-	-	-	-	-		215.594.000	-	70,88																			
				Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester oleh DPRD		-	24 bln	6.759.000		3.379.500	12,00	3.259.000	-	-	-	-	-	-	-		3.379.500	-	50,00																			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD		-	24 bln	686.390.000		310.788.000	12,00	354.133.600	-	-	-	-	-	-	-		310.788.000	-	45,28																			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-		25,00	66,47																	
																				Predikat kinerja		SR	SR																				
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terepenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		-		9.276.850.400		4.706.257.280		11.847.260.120								4.449.796.990																						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum oleh DPRD	60 bln	-	24 bln	1.957.186.800	36,00	1.089.378.040	12,00	3.485.403.200	3,00	476.549.400	-	319.698.200,00	-	-	-	3,00	796.247.600	25,00	22,85	39,00	1.885.625.640	162,50	96,34															
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur oleh DPRD		-	24 bln	2.625.586.800		1.485.827.120	12,00	3.038.642.600	3,00	475.905.200	-	905.008.000,00	-	-	-	3,00	1.380.913.200	25,00	45,45	3,00	2.866.740.320	12,50	109,18															
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat oleh DPRD		-	24 bln	1.957.186.800		945.229.120	12,00	2.295.857.000	3,00	489.034.925	-	290.375.465,00	-	-	-	3,00	779.410.300	25,00	33,95	3,00	1.724.639.510	12,50	88,12															
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian DPRD		-	24 bln	2.291.386.800		1.185.823.000	12,00	2.843.185.600	3,00	339.817.600	-	978.691.800,00	-	-	-	3,00	1.318.509.400	25,00	46,37	3,00	2.504.332.400	12,50	109,29															
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh DPRD		-	24 bln	445.503.200			12,00	184.171.720	-		-	174.716.400,00	-	-	-	-	174.716.400	-	94,87	-	174.716.400	-	39,22															
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	48,70		40,00	88,43																	
																				Predikat kinerja		SR	SR																				
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terepenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 persen	10.259.382.451	100 persen	10.151.571.000		6.870.981.500	100,00 persen	5.934.167.200				2.323.534.739	-	-	-		2.535.837.739																					

Dinas Sekretariat Daerah

VII Kecamatan
1) Kecamatan Kampar Kiri

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022. Table with 22 columns: No, Kode Rekening, Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022), Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022), Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) K and Rp, Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) K and Rp, Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2) K and Rp, Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2) K and Rp, Realisasi Kinerja Pada Triwulan (I, II, III, IV) K and Rp, Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD K and Rp, Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun K and Rp, Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun K and Rp, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi K and Rp, and OPD Penanggung Jawab.

Kecamatan Kampar Kiri

										100.000.000						100.000.000	100,00	100,00																		
										100.000.000	-	-	2,00	100.000.000,00	-	-	-	2,00	100.000.000,00	100,00	100,00	2,00	100.000.000,00	-	-											
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			-	-									
																				Predikat kinerja		SR	SR													
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		100,00	100,00													
										402.500.000			23.000.000			11.550.000					14.850.000		-		3.300.000		-	-		3.300.000						
										402.500.000			23.000.000			11.550.000					14.850.000		-		3.300.000		-	-		3.300.000	42,86	22,22			71,43	64,57
										402.500.000	14 Bulan	23.000.000	7 Bulan	11.550.000	7 Bulan	14.850.000	-	-	3,00	3.300.000,00	-	-	-	-	3,00	3.300.000,00	42,86	22,22	10,00	14.850.000	71,43	64,57				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		42,86	22,22			71,43	64,57									
																				Predikat kinerja		SR	SR													
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6		42,86	22,22													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.864.438.305		1.430.896.371																								
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		33,81	29,82													
																				PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR													

Kecamatan Kampar Kiri

2) Kecamatan Tapung Hilir

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I II III IV						K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
				9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8*100	15 = 7 + 13	16 = 15/8*100	17														
33		KECAMATAN TAPUNG HILIR																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.913.915.073																
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.558.082.808																
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	9.165.369.150	28 Bulan	3.341.607.068	14 Bulan	1.623.852.228	14 bulan	1.558.082.808	3	259.556.483	503.903.179.00	-	-	-	-	3	763.459.662	21,43	49,00	17,00	2.387.311.890	60,71	0,26
													Rata-rata capaian kinerja (%)				21,43	49,00			60,71	0,26				
													Predikat kinerja				SR	SR								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	16.600.000	2 Orang	4.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-			-	-				
													Predikat kinerja				SR	SR								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							128.833.302																
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	13.860.000	2 Tahun	4.020.000	1 Tahun	2.700.000	12 bulan	1.320.000															0,24
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	134.645.000	2 Tahun	73.783.762	1 Tahun	51.927.620	12 bulan	13.254.422	3	5.683.176	-	-	-	-	3	5.683.176	25,00	42,88	4,00	57.610.796	200,00	0,43	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	754.115.542	2 Tahun	151.780.900	1 Tahun	85.006.800	12 bulan	62.126.800	3	11.451.000	15.435.700.00	-	-	-	3	26.886.700	25,00	43,28	4,00	111.893.500	200,00	0,15	
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	74.707.200	2 Tahun	9.408.787	1 Tahun	8.753.520	12 bulan	2.291.080	3	1.176.800	311.680.00	-	-	-	3	1.488.480	25,00	64,97	4,00	10.242.000	200,00	0,14	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	22.638.000	24 Bulan	3.564.000	12 Bulan	2.376.000	12 Bulan	1.188.000	3	198.000	198.000.00	-	-	-	3	396.000	25,00	33,33	15,00	2.772.000	62,50	0,12	
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.200 Orang	319.067.400	325 OH	128.157.000	145 OH	83.178.000	175 OH	48.653.000	3,00	3.750.000	27.547.290.00	-	-	-	3	31.297.290	1,71	64,33	148,00	114.475.290	45,54	0,36	
													Rata-rata capaian kinerja (%)				16,95	49,80			126,34	0,24				
													Predikat kinerja				SR	SR								

Kecamatan Tapung Hilir

3) Kecamatan Tapung Hulu

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100								
35		KECAMATAN TAPUNG HULU																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.512.239.459			427.792.198	-	-		658.989.838									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Keuangan	6.000.000.000		2.400.000.000		984.228.172		1.014.437.438			374.646.098	-	-		540.227.838									
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bln	6.000.000.000	28 Bln	2.400.000.000	14 Bln	984.228.172	14 Bln	1.014.437.438	3	165.581.740	3,00	374.646.098,00	-	-	6,00	540.227.838	42,86	53,25	20,00	1.524.456.010	71,43	0,25	
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		42,86	53,25			71,43	0,25
																			Predikat kinerja		SR	SR				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.900.000		49.800.000		16.800.000		32.528.000			-	-		-										
		1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	18 OK	149.900.000	6 OK	49.800.000	3 OK	16.800.000	4 OK	32.528.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	16.800.000	50,00	0,11	
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		-	-			50,00	0,11
																			Predikat kinerja		SR	SR				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.714.000.000		610.000.000		305.754.693		329.763.326			38.133.000	-	-		83.429.400									
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48 Bln	24.000.000	24 Bln	2.000.000	12 Bln	6.000.000	12 Bln	6.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	6.000.000	50,00	0,25	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bln	340.000.000	24 Bln	68.000.000	12 Bln	68.406.876	12 Bln	68.406.876	3	9.862.000					3,00	9.862.000	25,00	14,42	15,00	52.199.723	62,50	0,15	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bln	600.000.000	24 Bln	240.000.000	12 Bln	149.016.420	12 Bln	122.760.000	3	12.756.000	3,00	15.774.000,00	-	-	6,00	28.530.000	50,00	23,24	18,00	177.546.420	75,00	0,30	
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bln	120.000.000	24 Bln	48.000.000	12 Bln	19.650.550	12 Bln	21.074.450	3	5.380.500	3,00	353.000,00	-	-	6,00	5.733.500	50,00	27,21	18,00	25.384.050	75,00	0,21	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bln	30.000.000	24 Bln	12.000.000	12 Bln	5.940.000	12 Bln	5.940.000			-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	5.940.000	50,00	0,20	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	60 Bln	600.000.000	24 Bln	240.000.000	12 Bln	82.810.000	12 Bln	105.582.000	3	17.297.900	3,00	22.006.000,00	-	-	6,00	39.303.900	50,00	37,23	18,00	122.113.900	75,00	0,20	
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		29,17	17,01			64,58	0,22
																			Predikat kinerja		SR	SR				

4) Kecamatan Tapung

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																																									
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																											
				9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 138*100	15 = 7 + 13	16 = 138*100																																														
35		KECAMATAN TAPUNG																																																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.106.223.500	5.242.800.000	2.259.656.452	2.018.944.706																																																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		10.000.000.000	4.000.000.000	1.743.812.495	1.454.306.085																																																	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bln	10.000.000.000	4.000.000.000	1.743.812.495	1.454.306.085	14,00	Bln	1.454.306.085	3	238.188.598	6,00	759.834.408,00	-	-	-	-	9,00	998.023.006	64,29	68,63	23,00	2.741.835.501	32,86	0,27																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		64,29	68,63																																		
																				Predikat kinerja		R	R																																		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		170.796.000	72.000.000	-	24.396.000																																																	
		1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	19 OK	170.796.000	8 OK	72.000.000	- OK	-	3,00	OK	24.396.000	-	-	3	15.505.600,00	-	-	-	3,00	15.505.600	100,00	63,56	3,00	15.505.600	15,79	0,09																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	63,56																																		
																				Predikat kinerja		SR	R																																		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.763.427.500	702.000.000	239.463.394	266.645.226																																																	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48 Bln	25.000.000	24 Bln	10.000.000	4.093.500	12,00	Bln	4.773.600	3	1.200.000	3	3.286.800,00	-	-	-	-	6,00	4.486.800	50,00	93,99	18,00	8.580.300	37,50	0,34																														
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bln	200.000.000	24 Bln	80.000.000	37.255.278	12,00	Bln	42.531.876	3	9.404.800	3	22.859.818,00	-	-	-	-	6,00	32.264.618	50,00	75,86	18,00	69.519.896	30,00	0,35																														
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bln	816.442.500	24 Bln	325.000.000	112.593.420	12,00	Bln	127.380.000	3	19.464.000	3	28.557.000,00	-	-	-	-	6,00	48.021.000	50,00	37,70	18,00	160.614.420	30,00	0,20																														
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bln	105.185.000	24 Bln	40.000.000	18.077.196	12,00	Bln	19.561.750	3	4.649.000	3	9.803.813,00	-	-	-	-	6,00	14.452.813	50,00	73,88	18,00	32.530.009	30,00	0,31																														
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bln	33.000.000	24 Bln	14.000.000	3.564.000	12,00	Bln	3.564.000	3	594.000	3	1.782.000,00	-	-	-	-	6,00	2.376.000	50,00	66,67	18,00	5.940.000	30,00	0,18																														
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	60 Bln	583.800.000	24 Bln	233.000.000	63.880.000	12,00	Bln	68.834.000	3,00	6.750.000	3	19.340.000,00	-	-	-	-	6,00	26.090.000	50,00	37,90	18,00	89.970.000	30,00	0,15																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	64,33																																		
																				Predikat kinerja		SR	R																																		

Kecamatan Tapung

5) Kecamatan Tambang

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																	13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100				
36		KECAMATAN TAMBANG																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.636.935.770		15.601.465.770		2.810.894.055		2.510.430.742				846.621.467	-	-			1.262.299.641								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	13.023.178.770		13.023.178.770		2.029.916.832		2.019.503.344				660.241.467	-	-			1.001.019.641								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi/nya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	13.023.178.770	84	13.023.178.770	70	2.029.916.832	14	2.019.503.344	3	340.778.174	3,00	660.241.467,00	-	-	-	6,00	1.001.019.641	42,86	49,57	76,00	3.030.936.473	90,48	23,27	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		42,86	49,57			90,48	23,27							
													Predikat kinerja		SR	SR											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	43.500.000		43.500.000		15.600.000		-									-								
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi ASN	1	43.500.000	1	43.500.000	1	15.600.000										-				1,00	15.600.000	100,00	35,86	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	35,86							
													Predikat kinerja		SR	SR											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	973.804.000		972.204.000		241.607.323		264.633.998				114.820.500	-	-			148.249.500								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	21.760.000	1	21.760.000	1	10.962.000										-				1,00	10.962.000	100,00	50,38	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	182.058.000	1	182.058.000	1	76.792.521	12	76.991.048	3,00	4.529.000	3,00	59.976.500,00	-	-	-	6,00	64.505.500	50,00	83,78	7,00	141.298.021	700,00	77,61	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	198.066.000	1	198.066.000	1	75.661.530	12	67.873.930	3,00	8.000.000	3,00	16.400.000,00	-	-	-	6,00	24.400.000	50,00	35,95	7,00	100.061.530	700,00	50,52	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1	94.460.000	1	94.460.000	1	10.671.272	12	9.019.020			6,00	5.624.000,00	-	-	-	6,00	5.624.000	50,00	62,36	7,00	16.295.272	700,00	17,25	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	455.860.000	1	455.860.000	1	62.480.000	12	110.750.000	3,00	20.900.000	3,00	32.820.000,00	-	-	-	6,00	53.720.000	50,00	48,51	7,00	116.200.000	700,00	25,49	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	46,12			600	49,29							
													Predikat kinerja		SR	SR											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	913.090.000		913.090.000		184.775.500		193.501.000				42.536.200	-	-			83.007.200								

Kecamatan Tambang

						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	47.950.000	6 Lapo	300.000.000	2 Laporan	100.000.000	1 -	100.000.000								1,00	100.000.000,00						1,00	100.000.000	100,00	100,00	3,00	200.000.000	50,00	66,67							
																	Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	100,00			50,00	66,67											
																	Predikat kinerja											ST	ST															
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											100,00	100,00															
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			47.950.000		47.950.000		11.550.000		11.550.000		-		1.650.000		-		-							1.650.000														
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		47.950.000		47.950.000		11.550.000		11.550.000		-		1.650.000		-		-							1.650.000	42,86	14,29				400,00	27,53							
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa se-Kecamatan	1	47.950.000	1	47.950.000	1	11.550.000	7	11.550.000				3,00	1.650.000,00	-	-		-	3,00				1.650.000	42,86	14,29	4,00	13.200.000	400,00	27,53									
																	Rata-rata capaian kinerja (%)											42,86	14,29			400,00	27,53											
																	Predikat kinerja											SR	SR															
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5											42,86	14,29															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	2.621.980.742											1.363.949.641																
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											36,39	30,66															
																	PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR															

Kecamatan Tambeng

6) Kecamatan Kampar

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
				5		6		7		8		9				10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 13*100	
37		KECAMATAN KAMPAR																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.528.367.005	6.611.346.802		2.989.932.986	2.771.615.716																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		12.895.973.445	5.158.389.378		2.314.019.773	2.216.655.029																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	12.895.973.445	5.158.389.378	14 Bulan	2.314.019.773	14,00 Bulan	2.216.655.029	3	375.135.872	3,00	769.579.907,00	-	-	-	-	6,00	1.144.715.779	42,86	51,64	20,00	3.458.735.552	71,43	67,05
Rata-rata capaian kinerja (%)																				42,86	51,64			71,43	67,05	
Predikat kinerja																				SR	SR					
		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawainan yang dilaksanakan		268.447.500	107.379.000		-	-																	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas dan Atributnya	100 Persen	178.447.500	100 Persen	71.379.000	12 Bulan	-	-																
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi ASN	100 Persen	90.000.000	100 Persen	36.000.000	12 Bulan	-	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			12,00	-	
Predikat kinerja																				SR	SR					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		1.719.562.850	667.825.140		357.843.802	274.579.916																	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	65.626.590	24 Bulan	26.250.636	12 Bulan	5.940.000																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	623.509.700	24 Bulan	249.403.880	12 Bulan	138.569.490	12,00 Bulan	90.461.666	3	8.648.399	3,00	12.350.399,00	-	-	-	6,00	20.998.758	50,00	23,21	18,00	159.568.248	75,00	63,98
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	361.282.500	24 Bulan	144.513.000	12 Bulan	79.555.500	12,00 Bulan	70.868.700	3	12.726.000	3,00	8.645.400,00	-	-	-	6,00	21.371.400	50,00	30,16	18,00	100.926.900	75,00	69,84
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 Bulan	135.824.060	24 Bulan	54.329.624	12 Bulan	27.164.812	12,00 Bulan	26.885.550	3	5.129.600	3,00	6.378.750,00	-	-	-	6,00	11.508.350	50,00	42,80	18,00	38.673.162	75,00	71,18
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Bulan	45.000.000	24 Bulan	18.000.000	12 Bulan	9.000.000	12,00 Bulan	9.000.000	2	1.404.000	3,00	2.808.000,00	-	-	-	5,00	4.212.000	41,67	46,80	17,00	13.212.000	70,83	73,40
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	488.320.000	24 Bulan	195.328.000	12 Bulan	97.614.000	12,00 Bulan	77.364.000	3	19.266.000	3,00	13.500.000,00	-	-	-	6,00	32.766.000	50,00	42,35	18,00	130.380.000	75,00	66,75
Rata-rata capaian kinerja (%)																				40,28	30,89			70,14	61,30	
Predikat kinerja																				SR	SR					

Kecamatan Kampar

7) Kecamatan Kampar Kiri Hulu

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100			15 = 7+13	
38		KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU																								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			11.604.693.679	4.641.877.472		1.860.435.779	1.987.417.968		336.067.385	652.232.136		-				988.299.521								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		9.324.250.295	3.729.700.118		1.457.854.100	1.453.009.146		240.848.295	518.872.797		-				759.721.092								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		70 bin	9.324.250.295	28 bin	3.729.700.118	14 bin	1.457.854.100	14 bin	1.453.009.146	3	240.848.295	3,00	518.872.797,00	-	-	759.721.092	42,86	52,29	20,00	2.217.575.192	71,43	59,46	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		42,86	52,29			71,43	59,46	
																		Predikat kinerja		SR	R					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.586.900.355	634.760.142		291.334.941	357.244.931		69.474.088	99.012.650		-				168.486.738								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor		60 bin	19.060.500	24 bin	7.624.200	12 bin	3.653.175	12 bin	7.990.000	3,00	4.507.200	3,00	3.482.800,00	-	-	7.990.000	50,00	100,00	18,00	11.643.175	75,00	152,71	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 bin	450.701.394	24 bin	180.280.558	12 bin	78.331.298	12 bin	119.705.931	3	22.213.188	3,00	50.841.550,00	-	-	73.054.738	50,00	61,03	18,00	151.386.036	75,00	83,97	
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan		24 bin	4.500.000	10 bin	1.800.000																		
		Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik		60 bin	259.407.600	24 bin	103.763.040	12 bin	74.697.300	12 bin	70.489.800	3	20.378.700	3,00	9.798.300,00	-	-	30.177.000	50,00	42,81	18,00	104.874.300	75,00	101,07	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan		60 bin	78.644.861	24 bin	31.457.944	12 bin	16.737.168	12 bin	23.751.200	3	3.735.000	3,00	10.240.000,00	-	-	13.975.000	50,00	58,84	18,00	30.712.168	75,00	97,63	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 bin	774.586.000	24 bin	309.834.400	12 bin	117.916.000	12 bin	135.308.000	3	18.640.000	3,00	24.650.000,00	-	-	43.290.000	50,00	31,99	18,00	161.206.000	75,00	52,03	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	58,93			75,00	97,48	
																		Predikat kinerja		SR	R					
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.643.000		29.457.200	6.825.000		6.825.000		-													
		Pengadaan Mebel	Teraksananya pengadaan mebel		48 bin	73.643.000	19 bin	29.457.200	12 bin	6.825.000	1 Tahun	6.825.000		-								12,00	6.825.000	62,50	23,17	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			62,50	23,17	
																		Predikat kinerja		SR	SR					
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			372.708.609		149.083.444	69.005.848		130.955.456		25.260.952		25.839.653				51.100.605							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		60 bin	64.571.109	24 bin	25.828.444	12 bin	10.660.848	12 bin	12.620.456	3	1.318.452	3,00	3.859.653,00	-	-	5.178.105	50,00	41,03	18,00	15.838.953	75,00	61,32	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi		60 bin	308.137.500	24 bin	123.255.000	12 bin	58.345.000	12 Tahun	118.335.000	3	23.942.500	3,00	21.980.000,00	-	-	45.922.500	50,00	38,81	18,00	104.267.500	75,00	84,59	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	39,92			75,00	72,96	
																		Predikat kinerja		SR	SR					

8) Kecamatan Siak Hulu

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
				K		Rp		K		Rp		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
39		KECAMATAN SIAK HULU																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			12.919.670.149	5.553.892.310		2.580.365.284		2.524.416.516					846.819.808	-	-					1.316.547.364					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.436.874.468	4.754.053.122		2.250.654.599		2.132.392.429					756.565.377	-	-					1.123.070.087					
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	11.436.874.468	28 bulan	4.754.053.122	14 bulan	2.250.654.599	14,00 bulan	2.132.392.429	3	366.504.710	3,00	756.565.377,00	-	-	-	-	6,00	1.123.070.087	42,86	52,67	20,00	3.373.724.686	71,43	70,97
Rata-rata capaian kinerja (%)																				42,86	52,67			71,43	70,97		
Predikat kinerja																				SR	R						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.870.000	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	12 org	104.870.000	4 org	36.000.000	- org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	-		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		793.918.730	429.699.012		147.271.597		215.106.021					40.996.090	-	-					107.543.799					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	10.063.850	24 Bulan	1.200.000	12 bulan	6.000.000	12,00 Bulan	6.000.000	3	2.400.000	3,00	2.400.000,00	-	-	-	-	6,00	4.800.000	50,00	80,00	18,00	10.800.000	75,00	90,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Tahun	83.590.190	24 bulan	147.185.660	12 bulan	68.443.817	12,00 Bulan	121.039.251	3	43.800.653	3,00	8.707.035,00	-	-	-	-	6,00	52.507.688	50,00	43,38	18,00	120.951.505	75,00	82,18
				132 Unit	8.000.000																						
		3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 Bulan	434.307.500	24 Bulan	79.884.000	12 bulan	40.807.800	12,00 Bulan	47.376.720	3	11.627.100	3,00	17.691.120,00	-	-	-	-	6,00	29.318.220	50,00	61,88	18,00	70.126.020	75,00	87,78
		4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	83.590.190	24 Bulan	25.041.352	12 bulan	18.219.980	12,00 Bulan	14.590.050	3	4.369.956	3,00	5.447.935,00	-	-	-	-	6,00	9.817.891	50,00	67,29	18,00	28.037.871	75,00	111,97
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	10.251.000	24 Bulan	3.888.000	12 bulan		12,00 Bulan														12,00		50,00	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	382 OH	82.058.000	24 bulan	172.500.000	12 bulan	13.800.000	12,00 Bulan	26.100.000	3	4.350.000	3,00	6.750.000,00	-	-	-	-	6,00	11.100.000	50,00	42,53	18,00	24.900.000	75,00	14,43
				108 OH	82.058.000																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				41,67	49,18			70,83	199,39		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		498.084.551	281.332.000		128.672.500		145.524.000					40.418.697	-	-					63.013.328					

Kecamatan Siak Hulu

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

						89.100.000			35.640.000			10.150.000			10.150.000														4.350.000	42,86	42,86				50,00	40,68	Kecamatan Siak Hilu																							
						89.100.000	35	bln	14	bln	35.640.000	4	10.150.000	7	bln	10.150.000	-	-	3,00	4.350.000,00	-	-	-	-	3,00	4.350.000	42,86	42,86	7,00	14.500.000	50,00	40,68																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																										42,86	42,86																																	
Predikat kinerja																										SR	SR																																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																										42,86	42,86																																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																										59,92	62,86																																	
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																										R	R																																	

9) Kecamatan XIII KOTO Kampar

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100		17							
40		KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.126.375.039	4.226.104.908	1.948.030.770	2.124.697.873			705.447.515	-	-			1.115.675.389												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.468.132.358	3.302.206.886	1.521.132.114	1.576.651.950			559.846.987	-	-			825.569.656												
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	9.468.132.358	28 bulan	3.302.206.886	14 bulan	1.521.132.114	14,00 bulan	1.576.651.950	3	265.722.669	4,00	559.846.987,00	-	-	-	-	7,00	825.569.656	50,00	52,36	21,00	2.346.701.770	75,00	71,06
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	52,36				75,00	71,06					
Predikat kinerja																SR	SR										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.940.000	23.557.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		1. Bimbingan Teknimplerentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang-undangan	12 org	25.940.000	4 org	23.557.136	- org	-	-	-	-	-	-	-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-				-	-					
Predikat kinerja																SR	SR										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		841.827.640	515.703.685	217.275.131	264.258.499			50.743.278	-	-			139.909.253											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	34.383.030	24 Bulan	16.077.720	12 bulan	8.038.860	12,00 Bulan	5.347.000			9,00	5.347.000,00	-	-	-	-	9,00	5.347.000	75,00	100,00	21,00	13.385.860	87,50	83,26
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Tahun	42.155.080	24 bulan	147.535.758	12 bulan	73.767.879	12,00 Bulan	132.624.241	3	23.435.301	3,00	11.938.400,00	-	-	-	-	6,00	35.373.701	50,00	26,67	18,00	109.141.580	75,00	73,98
				132 Unit	166.747.500																						
		3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 Bulan	305.415.750	24 Bulan	120.280.695	12 bulan	80.057.310	12,00 Bulan	68.979.750	3	42.842.874	3,00	19.934.220,00	-	-	-	-	6,00	62.777.094	50,00	91,01	18,00	142.834.404	75,00	118,75
		4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	42.155.080	24 Bulan	26.107.512	12 bulan	17.561.082	12,00 Bulan	17.817.508	3	3.187.800	3,00	4.023.658,00	-	-	-	-	6,00	7.211.458	50,00	40,47	18,00	24.772.540	75,00	94,89
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	17.791.200	24 Bulan	5.292.000	12 bulan	2.520.000	12,00 Bulan	2.520.000			9,00	2.520.000,00	-	-	-	-	9,00	2.520.000	75,00	100,00	21,00	5.040.000	87,50	95,24
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	382 OH	116.590.000	24 bulan	200.410.000	12 bulan	35.330.000	12,00 Bulan	36.970.000	3	19.700.000	3,00	6.980.000,00	-	-	-	-	6,00	26.680.000	50,00	72,17	18,00	62.010.000	75,00	30,94
				108 OH	116.590.000																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-				-	-					
Predikat kinerja																SR	SR										

Kecamatan XIII KOTO KAMPAR

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		628.331.491	379.473.200	198.106.600	247.246.600				75.908.850					116.870.136																																
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bulan	61.548.000	24 Bulan	36.403.200	12 bulan	18.201.600	12,00 Bulan	18.201.600	3	4.441.286	3,00	2.868.850,00	-	-	-	-	6,00	7.310.136	50,00	40,16	18,00	25.511.736	75,00	70,06																							
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	1.825,0 Hari	193.315.000	24 Bulan	343.070.000	12 bulan	179.905.000	12,00 Bulan	229.045.000	3	36.520.000	3,00	73.040.000,00	-	-	-	-	6,00	109.560.000	50,00	47,83	18,00	289.465.000	75,00	84,37																							
				60 Bulan	373.468.491																																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																		
Predikat kinerja																				SR	SR																													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeenuhnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		162.143.550		5.164.001		11.516.925		36.540.824				18.948.400						33.326.324																													
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	143.587.550				8.934.924	1,00	29.086.924	1,00	14.377.924		11.554.000,00	-	-	-	-	1,00	25.931.924	100,00	89,15	1,00	34.866.848	-	-																							
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeenuhnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	60 bulan	18.556.000	24 bulan	5.164.001	12 bulan	2.582.001	12,00 Bulan	7.453.900			9,00	7.394.400,00	-	-	-	-	9,00	7.394.400	75,00	99,20	21,00	9.976.401	87,50	193,19																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75,00	99,20																													
Predikat kinerja																				SR	SR																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																				25,00	30,31																													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN			3.997.931.100		731.705.596		399.298.078		365.998.330				24.000.000						24.000.000																													
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.997.931.100		731.705.596		399.298.078		365.998.330				24.000.000						24.000.000					20,00	50,00																							
		1. Pembangunan sarana dan Prasarana di kelurahan	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	3.296.131.100	100 Persen	531.805.596	20 persen	265.898.078	50,00 persen	208.375.930				-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	265.898.078	20,00	50,00																							
		2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	100 persen	701.800.000	100 Persen	199.900.000	20 persen	133.400.000	50,00 persen	157.622.400		7,50	24.000.000,00	-	-	-	-	-	7,50	24.000.000	15,00	15,23	27,50	157.400.000	27,50	78,74																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				15,00	15,23																													
Predikat kinerja																				SR	SR																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																				15,00	15,23																													
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			-		-		52.509.284		-																																							
					-		-		52.509.284		-																																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-																													
Predikat kinerja																				SR	SR																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																				-	-																													
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum			-		-		47.490.716		-																																							
					-		-		47.490.716		-																																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-																													
Predikat kinerja																				SR	SR																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																				-	-																													

Kabupaten Xi'koo' Kampar

10) Kecamatan Rumbio Jaya

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 7 + 13		16 = 15*100					
41		KECAMATAN RUMBIO JAYA																									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		6.758.092.921		3.063.988.626		1.369.655.468		1.466.732.549																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	5.442.574.356		2.260.368.862		1.099.421.061		1.077.923.323																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bin	5.442.574.356	24 bin	2.260.368.862	12 bin	1.099.421.061	12 bin	1.077.923.323	3	169.583.603	3,00	370.457.875,00	-	-	-	-	6,00	540.041.478	50,00	50,10	18,00	1.639.462.539	75,00	72,53
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	50,10			75,00		
																			Predikat kinerja		SR	SR					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.616.000		-		15.600.000		-																	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek perundangan-undangan	1 OK	9.166.000	-	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan dan Aset	4 OK	24.450.000	-	-	3,00	OK	15.600.000	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	15.600.000	-	-
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-		
																			Predikat kinerja		SR	SR					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.291.839		506.607.354		213.981.927		236.561.837																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bin	196.214.266	24 bin	147.186.908	48 bin	58.920.712	12 bin	51.625.797	3	4.864.272	3	15.048.462,00	-	-	-	-	6,00	19.912.734	50,00	38,57	54,00	78.833.446	225,00	53,56
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	36 bin	7.920.000	-	-	36 bin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-	-	
		Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 bin	273.671.500	24 bin	145.192.500	48 bin	72.596.250	12 bin	81.366.000	3	5.800.000	-	-	-	-	-	-	3,00	5.800.000	25,00	7,13	51,00	78.396.250	212,50	53,99
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bin	35.234.073	24 bin	47.549.946	48 bin	23.112.965	12 bin	13.824.040	3	4.687.610	3	1.938.790,00	-	-	-	-	6,00	6.626.400	50,00	47,93	54,00	29.739.365	225,00	62,54
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bin	544.252.000	24 bin	166.678.000	48 bin	59.352.000	12 Bin	89.746.000	3	6.900.000	3	28.030.000,00	-	-	-	-	6,00	34.930.000	50,00	38,92	54,00	94.282.000	225,00	56,57
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		43,75	33,14			221,88		
																			Predikat kinerja		SR	SR					
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.597.000		26.839.360		13.419.680		120.789.780																	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)								
																			Predikat kinerja								

Kecamatan/Rumbio Jaya

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 bin	84.597.000	24 bin	26.839.360	48 bin	13.419.680	12 bin	17.019.680	3	2.233.323	3	4.870.146,00	-	-	-	-	-	6,00	7.103.469	50,00	41,74	54,00	20.523.149	225,00	76,47	
				Pengadaan Mebel									11.615.100									-	-	-	-	-	-	-	-		
				Panedaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								7.796.250			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.796.250	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								81.515.000	92.155.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.515.000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							16,67	13,91		225,00					
Predikat kinerja																							SR	SR							
				Memeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teraksananya MemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.013.726		276.173.050		27.232.800		31.457.600				12.455.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.679.200			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin	60 bin	126.177.126	24 bin	207.320.600	48 bin	22.145.300	12 bin	26.057.600	3	7.224.000	3	10.425.200,00	-	-	-	-	-	-	6,00	17.649.200	50,00	67,73	54,00	39.794.500	225,00	19,19
				Memeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 bin	13.836.600	24 bin	62.852.450	48 bin	5.087.500	12 bin	5.400.000	3	-	3,00	2.030.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	2.030.000	50,00	37,59	54,00	7.117.500	225,00	11,32
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	52,06		225,00	15,26				
Predikat kinerja																							SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																							40,10	37,45							
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							42.413.993		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											42.413.993		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											42.413.993	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	-		-	-				
Predikat kinerja																							SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																							-	-							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							-		100.000.000		-		88.311.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terseleenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								100.000.000		-		88.311.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												83.900.000		1,00		72.211.202		1,00								100,00	86,07	1,00	72.211.202	-	-
				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1	16.100.000		1,00		16.100.000,00		-	-	-	-	-	1,00	16.100.000	100,00	100,00	1,00	16.100.000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	93,03		-	-				
Predikat kinerja																							ST	ST							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																							100,00	93,03							
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			66.850.000		23.100.000		11.550.000		19.800.000		-		5.970.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kemampuan Rancangan

						66.850.000		23.100.000		11.550.000		19.800.000		-	5.970.000		-	5.970.000	-	30,15			200,00	75,84	Kemampuan Rambu-rujukan		
						66.850.000	14 bln	23.100.000	28 bln	11.550.000	7 bln	19.800.000	-	-	5.970.000,00	-	-	5.970.000	-	30,15	28,00	17.520.000	200,00	75,84			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	30,15				200,00	75,84
																				Predikat kinerja	SR	SR					
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4	-	30,15					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	1.586.532.540										728.374.483						
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	46,70	53,55					
																				PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	SR	S					

11) Kecamatan Kampar Utara

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																													
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 7 + 13	16 = 15/100	17									
42		KECAMATAN KAMPAR UTARA																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	18.871.683.798	7.360.366.038			1.392.532.233	1.074.097.122				322.714.764	-	-														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	16.848.208.735	5.520.218.930			1.028.337.564	706.749.492				214.240.404	-	-														
				70 Bulan	16.848.208.735	28 Bulan	5.520.218.930	42 Bulan	1.028.337.564	14 Bulan	706.749.492	3	111.193.364	3,00	214.240.404,00	-	-	-	-	6,00	325.433.768	42,86	46,05	48,00	1.353.771.332	171,43	24,52		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																				42,86	46,05			171,43	24,52
				Predikat kinerja																				SR	SR				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	77.850.000	77.850.000			8.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi ASN	9 kegiatan	77.850.000	- kegiatan	77.850.000	4 kegiatan	8.490.000	- kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	8.490.000	-	10,91	
				Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	10,91
				Predikat kinerja																				SR	SR				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	1.109.333.806	790.880.786			126.969.246	120.576.274				39.356.806	-	-														
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	543.125.000	24 Bulan	296.909.550	36 Bulan	62.507.760	12 Bulan	56.004.700	3	6.341.250	3,00	9.999.000,00	-	-	-	-	6,00	16.340.250	50,00	29,18	42,00	78.848.010	175,00	26,56		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan guna Kelancaran Administrasi Perkantoran	60 Bulan	126.055.000	24 Bulan	53.817.430	36 Bulan	10.763.486	12 Bulan	10.809.574			6,00	8.106.806,00	-	-	-	-	6,00	8.106.806	50,00	75,00	42,00	16.870.292	175,00	35,06		
		Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan bacaan peraturan perundang - undangan	60 Bulan	25.007.006	24 Bulan	25.007.006	36 Bulan	3.402.000	12 Bulan	3.402.000			6,00	1.701.000,00	-	-	-	-	6,00	1.701.000	50,00	50,00	42,00	5.103.000	175,00	20,41		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	415.146.800	24 Bulan	415.146.800	36 Bulan	50.296.000	12 Bulan	50.360.000	3,00	7.050.000	3,00	19.550.000,00	-	-	-	-	6,00	26.600.000	50,00	52,82	42,00	76.896.000	175,00	18,52		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	34,50			116,67	16,76
				Predikat kinerja																				SR	SR				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.909.889	805.034.954			203.609.823	216.548.606				57.809.954	-	-														
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaye Ar dan Listrik	60 Bulan	86.963.805	24 Bulan	86.963.805	36 Bulan	13.798.810	12 Bulan	16.798.810	3	2.961.390	3,00	5.139.808,00	-	-	-	-	6,00	8.101.198	50,00	48,22	42,00	21.900.008	175,00	25,18		
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perengkapan kantor	60 Bulan	-	24 Bulan	135.125.065	36 Bulan	27.025.013	12 Bulan	24.649.796	3	5.995.011	3,00	17.838.146,00	-	-	-	-	6,00	23.833.157	50,00	96,69	42,00	50.858.170	175,00	37,64		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	582.946.084	24 Bulan	582.946.084	36 Bulan	162.786.000	12 Bulan	175.100.000	3	37.942.000	3,00	34.832.000,00	-	-	-	-	6,00	72.774.000	50,00	41,56	42,00	235.560.000	175,00	40,41		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	62,16			175,00	34,41
				Predikat kinerja																				SR	SR				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	166.381.368	166.381.368			25.125.600	30.222.750				11.307.600	-	-														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60 Bulan	87.608.185	24 Bulan	87.608.185	36 Bulan	19.795.800	12 Bulan	24.670.350			6,00	7.953.900,00	-	-	-	-	6,00	7.953.900	50,00	32,24	42,00	27.749.700	175,00	31,67		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor	60 Bulan	18.773.183	24 Bulan	18.773.183	36 Bulan	5.329.800	12 Bulan	5.552.400			6,00	3.353.700,00	-	-	-	-	6,00	3.353.700	50,00	60,40	42,00	8.663.500	175,00	46,25		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Kegiatan	60.000.000	- Kegiatan	60.000.000	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	46,32			390,00	77,93
				Predikat kinerja																				SR	SR				
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																				48,21	47,28				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.750.000	57.750.000			46.200.000	11.550.000				4.050.000	-	-														

Kecamatan Kampar Utara

12) Kecamatan Kampa

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																										
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/8*100				17				
43		KECAMATAN KAMPA																								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		7.195.736.647	3.019.667.592		1.465.114.874		1.504.333.796		521.374.522		-	-		769.064.654										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	5.299.026.015	2.322.819.838		1.131.493.373		1.161.409.919		408.068.456		-	-		601.436.293										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bln 5.299.026.015	24 bln 2.322.819.838		12 bln 1.131.493.373		14 bln 1.161.409.919		3 193.367.837	4,00	408.068.456,00	-	-		7,00	601.436.293	50,00	51,79	19,00	1.732.929.666	79,17	74,60		
				Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	51,79					79,17	74,60			
				Predikat kinerja												SR	SR									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.616.000		-		-		-		-													
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek perundang-undangan	1 OK	9.166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan dan Aset	4 OK	24.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-					-	-			
				Predikat kinerja												SR	SR									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.057.223.906		340.014.554		174.867.138		170.007.277					72.338.766										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penediaan dan Perlengkapan Kantor	60 bln 196.214.266	24 bln 89.784.814		12 bln 32.175.968		12 bln 44.892.407	3	5.900.435	3,00	13.263.096,00	-	-		6,00	19.163.531	50,00	42,69	18,00	51.339.499	75,00	57,18		
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	36 bln 7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 bln 273.671.500	24 bln 125.365.000		12 bln 69.190.650		12 bln 62.682.500	3	8.251.000	3,00	25.683.000,00	-	-		6,00	33.934.000	50,00	54,14	18,00	103.124.650	75,00	82,26		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bln 35.166.140	24 bln 9.572.740		12 bln 5.758.520		12 bln 4.786.370	3	1.393.760	3,00	1.982.670,00	-	-		6,00	3.376.430	50,00	70,54	18,00	9.134.950	75,00	95,43		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln 544.252.000	24 bln 115.292.000		12 bln 67.742.000		12 bln 57.646.000	3	7.800.000	3,00	31.410.000,00	-	-		6,00	39.210.000	50,00	68,02	18,00	106.952.000	75,00	92,77		
				Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	56,85					75,00	81,91			
				Predikat kinerja												SR	SR									
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.000.000		11.000.000		11.000.000																	
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	36 bln 25.000.000	12 bln 11.000.000		12 bln 11.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-					100,00	100,00			
				Predikat kinerja												SR	SR									
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		640.857.000		291.313.000		123.843.500		145.656.500					31.448.000										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 bln 84.597.000	24 bln 33.783.000		12 bln 14.053.500		12 bln 16.891.500	3	2.179.000	3,00	5.133.000,00	-	-		6,00	7.312.000	50,00	43,29	18,00	21.365.500	75,00	63,24		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi	60 bln 556.260.000	24 bln 257.530.000		12 bln 109.790.000		12 Tahun 128.765.000	3	27.725.000	3,00	26.315.000,00	-	-		6,00	54.040.000	50,00	41,97	18,00	163.830.000	75,00	63,62		
				Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	42,63					75,00	63,43			
				Predikat kinerja												SR	SR									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.013.726		54.520.200		23.910.863		27.260.100					9.519.300										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin	60 bln 126.177.126	24 bln 45.927.000		12 bln 20.817.563		12 bln 22.963.500		3,00	8.066.100,00	-	-	-	-	3,00	8.066.100	25,00	35,13	15,00	28.883.663	62,50	62,89		
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan/Barang milik daerah yang terpelihara	60 bln 13.836.600	24 bln 8.593.200		12 bln 3.093.300		12 bln 4.296.600	3	1.073.100	3,00	1.453.200,00	-	-	-	6,00	2.526.300	50,00	58,80	18,00	5.619.600	75,00	65,40		
				Rata-rata capaian kinerja (%)												37,50	46,96					68,75	64,14			
				Predikat kinerja												SR	SR									
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1												46,88	50,06									

Kecamatan Kampa

13) Kecamatan Salo

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																					
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)	OPD Penanggung Jawab																	
				Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		I		II							III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.													
44		KECAMATAN SALO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.804.370.600		2.923.691.230		1.336.794.593		1.366.750.324		384.957.573		-	-				613.497.729																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		5.408.468.100		2.163.387.240		1.027.091.417		947.130.210		298.338.137		-	-				436.979.038																	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bln	5.408.468.100		2.163.387.240		1.027.091.417	14 Bln	1.027.091.417	14.0 Bln	947.130.210	3,00	138.640.901	3,00	298.338.137,00			6,00	436.979.038	42,86	46,14		20,00	1.464.070.455	71,43	67,67									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,00	436.979.038	42,86	46,14		20,00	1.464.070.455	71,43	67,67										
Predikat kinerja																			SR	SR																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		51.880.000		50.282.000		25.141.000		-		-		-	-				-																	
		1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemetaan ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	5 OK	51.880.000		50.282.000		25.141.000	- OK	25.141.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.141.000	-	50,00									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-																	
Predikat kinerja																			SR	SR																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		874.418.000		358.378.244		153.340.343		248.571.931		42.940.319		-	-				95.684.648																	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bln	67.690.000		24 Bln	17.885.000	12 Bln	1.344.000	12 Bln	3.224.800	3,00	957.400	3,00	1.358.500,00	-	-	-	6,00	2.315.900	50,00	71,82		18,00	3.659.900	75,00	20,46									
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bln	340.000.000		24 Bln	40.077.400	12 Bln	71.399.307	12 Bln	125.082.498	3,00	26.741.929	3,00	28.337.400,00	-	-	-	6,00	55.079.329	50,00	44,03		18,00	126.478.636	75,00	315,59									
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bln	183.950.000		24 Bln	68.638.444	- Bln	36.822.150	12 Bln	71.568.000	3,00	11.025.000	3,00	3.062.000,00	-	-	-	6,00	14.087.000	50,00	19,68		6,00	50.909.150	25,00	73,95									
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bln	32.088.000		24 Bln	40.077.400	12 Bln	6.751.896	12 Bln	6.996.633	3,00	3.382.419,00	-	-	-	-	-	3,00	3.382.419	25,00	48,41		15,00	10.134.305	62,50	25,29									
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bln	57.240.000		24 Bln	7.300.000	12 Bln	3.648.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	3.648.000	50,00	49,97									
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	60 Bln	193.450.000		24 Bln	184.200.000	12 Bln	33.375.000	12 Bln	41.710.000	3,00	14.020.000	3,00	6.800.000,00	-	-	-	6,00	20.820.000	50,00	49,92		18,00	54.195.000	75,00	29,42									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,00	20.820.000	50,00	49,92		18,00	54.195.000	75,00	29,42										
Predikat kinerja																			SR	SR																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		327.122.500		299.679.760		106.625.270		136.691.620		29.203.754		-	-				60.281.680																	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	67.690.000		24 Bln	19.679.760	12 Bln	10.550.820	12 Bln	16.966.620	3,00	2.127.926	3,00	2.216.254,00	-	-	-	6,00	4.344.180	50,00	25,60		18,00	14.895.000	75,00	75,69									
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bln	259.432.500		24 Bln	280.000.000	12 Bln	96.074.450	12 Bln	119.725.000	3,00	28.950.000	3,00	26.987.500,00	-	-	-	6,00	55.937.500	50,00	46,72		18,00	152.011.950	75,00	54,29									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,00	55.937.500	50,00	46,72		18,00	152.011.950	75,00	54,29										
Predikat kinerja																			SR	SR																	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		142.482.000		51.963.986		24.596.563		34.356.563		13.575.363		-	-				20.542.363																	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	60 Bln	127.782.000		24 Bln	41.763.986	12 Bln	20.696.563	12 Bln	22.166.563	3,00	5.747.000	3,00	7.115.363,00	-	-	-	6,00	12.862.363	50,00	58,03		18,00	33.558.926	75,00	80,35									
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 Bln	14.700.000		24 Bln	10.200.000	12 Bln	3.900.000	12 Bln	12.190.000	3,00	1.220.000	3,00	6.460.000,00	-	-	-	6,00	7.680.000	50,00	63,00		18,00	11.580.000	75,00	113,53									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,00	7.680.000	50,00	63,00		18,00	11.580.000	75,00	113,53										
Predikat kinerja																			SR	SR																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	60,51																	
Predikat kinerja																			SR	R																	
		Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum			-		-		34.690.478		-		-		-	-			-	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-																	
Predikat kinerja																			SR	SR																	

Kecamatan Salo

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2													-	-										
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum			-	-	65.309.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				-	-	65.309.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				-	-	65.309.269	1	0	-	-	-	-	-	-	-							65.309.269		
Predikat kinerja													SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3													-	-										
	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100,00	100,00					-	-	
	koordinasi, monitoring, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana covid-19 dan koordinasi, monitoring, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana daerah serta kebakaran hutan dan lahan	tercapainya koordinasi, monitoring, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana covid-19 dan koordinasi, monitoring, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana daerah serta kebakaran hutan dan lahan				1 Th	100.000.000			1,00	100.000.000,00	-	-	-	1,00	100.000.000	100,00	100,00	1,00	100.000.000		-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00										
Predikat kinerja													ST	ST										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4													100,00	100,00										
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERLAKSANANYA PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		69.300.000	23.100.000	11.550.000	11.550.000	-	-	9.150.000	-	-	-	-	9.150.000									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		69.300.000	23.100.000	11.550.000	11.550.000	-	-	9.150.000	-	-	-	-	9.150.000	85,71	79,22					92,86	89,61	
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 Blh	69.300.000	14 Bln	23.100.000	7 Bln	11.550.000	7 Blh	11.550.000	-	-	6,00	9.150.000,00	6,00	9.150.000	85,71	79,22	13,00	20.700.000		92,86	89,61	
Rata-rata capaian kinerja (%)													85,71	79,22										
Predikat kinerja													T	T										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5													85,71	79,22										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													1.478.300.324	722.637.729										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													73,93	71,86										
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													S	S										

Kecamatan Sialang

No	Kategori	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Uraian	2022		2023		2024	2025			2026			2027	2028	2029	2030	Tahun	Kecamatan				
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN																										
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4.450.890.000		5.949.869.100		809.385.026		772.356.558		-		53.250.000		-				Kecamatan Banghalang				
		Kelurahan				4.450.890.000		5.949.869.100		809.385.026		772.356.558		-		53.250.000		-				8.600,00	28,99			
		1. Pembangunan sarana dan Prasarana di kelurahan	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	1 Kelurahan		1.772.156.000	1 Kelurahan	1.723.756.650	86 %	499.705.059	100 %	544.356.558	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00	499.705.059	8.600,00	28,99		
				1 Kelurahan		1.786.110.000	1 Kelurahan	1.723.756.650	100,00 %												100,00	-	10.000,00	-		
		2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Terpenuhinya Insentif RT RW dan Operasional Lembaga di Kelurahan serta Jumlah Masyarakat yang dilatih	1 Kelurahan		405.910.000	1 Kelurahan	1.240.677.900	100,00 %	299.179.967	100 %	213.000.000	-	6,00	47.250.000,00	-	-	-	6,00	47.250.000	6,00	22,18	106,00	346.429.967	10.600,00	27,92
				1 Kelurahan		419.864.000	1 Kelurahan	1.240.677.900	100,00 %												-	100,00	-	10.000,00	-	
		3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terealisasi dan dievaluasi	35 bln		66.850.000	14 bln	21.000.000		7 bln	10.500.000	7 bln	15.000.000	-	-	6.000.000,00	-	3,00	6.000.000	42,86	40,00	10,00	16.500.000	71,43	78,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				16,29	20,73		13.090,48	45,16		
Predikat kinerja																				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																				16,29	20,73					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																										
		Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Tertaksananya Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			-		-		-		100.000.000	-		100.000.000		-									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Camat yang dilimpahkan dengan bantuan khusus dari Pemerintahan Provinsi			-		-		1	100.000.000		1,00	100.000.000,00		-		1,00	100.000.000	100,00	100,00	1,00	100.000,00		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	100,00					
Predikat kinerja																				ST	ST					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																				100,00	100,00					
		Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum				-		-		30.748.271		-		-		-		-								
						-		-		30.748.271		-		-		-		-					30.748.271		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-					
Predikat kinerja																				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																				-	-					
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum				-		-		69.251.729		-		-		-		-								
						-		-		69.251.729		-		-		-		-					69.251.729		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-					
Predikat kinerja																				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																				-	-					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.419.535.757	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										1.213.278.037				
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4											55,88	52,96														
R											R															

15) Kecamatan Kuok

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																	
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.							
														13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 7 + 13		16 = 15/100													
46		KECAMATAN KUOK																															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.330.053.646		3.102.289.232		1.452.428.979		1.626.773.105																						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.809.973.080		2.380.009.200		1.165.114.965		1.269.033.292																						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7.809.973.080	28 Bulan	2.380.009.200	14 Bulan	1.165.114.965	14,00 bulan	1.269.033.292	3	191.818.669	4,00	401.972.105,00	-	-	-	7,00	593.790.774	50,00	46,79	21,00	1.758.905.739	75,00	73,90							
					Rata-rata capaian kinerja (%)																												
					Predikat kinerja																												
						144.000.000		9.000.000																									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-																								
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	144.000.000	2 Orang	9.000.000																										
					Rata-rata capaian kinerja (%)																												
					Predikat kinerja																												
						144.000.000		9.000.000																									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.526.208.066		327.728.706		143.056.551		148.136.250																						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	5.560.000	- Tahun	- Tahun	- Tahun		12,00 bulan	-																						
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	228.802.066	2 Tahun	60.363.826	1 Tahun	27.665.180	12,00 bulan	30.786.930	3	5.466.480	3,00	2.978.576,00	-	-	-	6,00	8.445.056	50,00	27,43	7,00	36.110.236	350,00	59,82							
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	785.210.000	2 Tahun	144.473.700	1 Tahun	64.527.300	12,00 bulan	70.332.000	3	10.381.950	3,00	10.462.000,00	-	-	-	6,00	20.843.950	50,00	29,64	7,00	85.371.250	350,00	59,09							
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	5 Tahun	27.414.000	2 Tahun	10.485.180	1 Tahun	5.042.071	12,00 bulan	6.119.320	3	1.507.910	3,00	497.180,00	-	-	-	6,00	2.005.090	50,00	32,77	7,00	7.047.161	350,00	67,21							
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	4.032.000	- Bulan		12 Bulan		12,00 Bulan																							
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.120,00 Orang	475.190.000	305 OH	112.406.000	150,00 OH	45.822.000	185,00 OH	40.898.000	3	3.900.000	3,00	5.700.000,00	-	-	-	6,00	9.600.000	3,24	23,47	156,00	55.422.000	51,15	49,31							
					Rata-rata capaian kinerja (%)																												
					Predikat kinerja																												
						1.526.208.066		327.728.706		143.056.551		148.136.250																					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		667.726.500		330.718.200		119.015.450		182.399.100																						
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	99.300.000	24 Bulan	37.198.200	12 Bulan	18.687.950	12,00 bulan	18.599.100	3	4.828.200	3,00	4.323.000,00	-	-	-	6,00	9.151.200	50,00	49,20	18,00	27.839.150	75,00	74,84							
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	568.426.500	24 Bulan	293.520.000	12 Bulan	100.327.500	12,00 bulan	163.800.000	3	36.880.000	3,00	35.200.000,00	-	-	-	6,00	72.080.000	50,00	44,00	18,00	172.407.500	75,00	58,74							
					Rata-rata capaian kinerja (%)																												
					Predikat kinerja																												
						667.726.500		330.718.200		119.015.450		182.399.100																					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah		182.146.000		54.833.126		25.242.013		27.204.463																						
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	102.596.000	2 Unit	45.530.126	1 Unit	20.590.513	1,00 unit	22.502.563	0,25	2.262.500	0,25	6.037.000,00	-	-	-	0,50	8.299.500	50,00	36,88	1,50	28.890.013	75,00	63,45							
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	128,00 Unit	79.550.000	32 Unit	9.303.000	15 Unit	4.651.500	15,00 Unit	4.701.900	3	1.642.200	-	-	-	-	-	3,00	1.642.200	20,00	34,93	18,00	6.293.700	56,25	67,65							
					Rata-rata capaian kinerja (%)																												
					Predikat kinerja																												
						182.146.000		54.833.126		25.242.013		27.204.463																					
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																												
					Predikat kinerja																												
						-		-		50.117.110		-		-		-		-		-		-		-									
		Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum			-		-		50.117.110		-		-		-		-		-		-		-		-								

16) Kecamatan Bangkinang Kota

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																																															
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab																							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17																											
47		KECAMATAN BANGKINANG KOTA																																													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																													
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28 Bln	75.606.378.512	12 bln	2.137.754.360	12.00	2.136.955.843	3	341.217.388	3.00	709.628.365,00	-	-	-	-	6.00	1.050.845.753	50,00	49,17	18,00	3.188.600.113	64,29	4,22																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00	49,17																								
Predikat kinerja																						SR	SR																								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			89.264.000		56.364.000		-			-																																		
		1. Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	13,00 OH		89.264.000	9 OH	56.364.000		- OH																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-																								
Predikat kinerja																						SR	SR																								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			1.478.362.391		459.123.163		210.503.764		373.830.938						129.420.186	-	-	-	-	198.432.027																								
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 keg		10.500.000	2 keg	10.500.000	- keg	1.536.620	12,00 bln	4.932.800	3,00	515.000	3,00	960.800,00	-	-	-	-	6,00	1.475.800	50,00	29,92	6,00	3.012.420	300,00	28,69																			
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bln		160.075.605	24 bln	87.500.040	12 bln	78.980.638	12,00 bln	146.332.988	3	40.562.176	3,00	41.088.771,00	-	-	-	-	6,00	81.650.947	50,00	55,80	18,00	160.631.585	75,00	183,58																			
				100 %		154.764.313			100 %																																						
				5 keg		538.063.250			100 %																																						
		3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 bln		358.747.700	24 bln	207.137.700	12 bln	101.556.960	12,00 bln	137.657.730	3	11.620.450	3,00	31.870.170,00	-	-	-	-	6,00	43.490.620	50,00	31,59	18,00	145.047.580	75,00	70,02																			
		4. Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	60 bln		32.142.023	24 bln	16.015.923	12 bln	10.180.546	12,00 bln	15.393.420			3,00	9.620.445,00	-	-	-	-	3,00	9.620.445	25,00	62,50	15,00	19.800.991	62,50	123,63																			
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.808 exampir		23.040.000	2.112 exampir	10.560.000	924 Exampir	2.376.000	12,00 bln	2.376.000			3,00	1.184.000,00	-	-	-	-	3,00	1.184.000	25,00	49,83	927,00	3.560.000	43,89	33,71																			
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	108 OH		61.350.000	261 OH	127.409.500	36 OH	15.873.000	12,00 bln	67.138.000	3	16.314.215	3,00	44.696.000,00	-	-	-	-	6,00	61.010.215	50,00	90,87	42,00	76.883.215	16,09	60,34																			
				382 OH		139.679.500			65 OH		12,00 bln																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						41,67	53,42																								
Predikat kinerja																						SR	SR																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.057.551.474		364.773.750		238.077.380		273.587.560						59.012.383	-	-	-	108.605.730																									
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bln		357.314.000	24 bln	183.414.000	12 bln	53.417.380	12,00 bln	72.932.560	3	10.893.347		20.792.383,00	-	-	-	-	3,00	31.685.730	25,00	43,45	15,00	85.103.110	62,50	46,40																			
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 bln		391.392.724	24 bln	181.359.750	12 bln	184.660.000	12,00 bln	200.655.000	3	38.700.000		38.220.000,00	-	-	-	-	3,00	76.920.000	25,00	38,33	15,00	261.580.000	62,50	144,23																			
				1.825 OH		308.844.750			12 bln		12,00 bln																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,00	40,89																								
Predikat kinerja																						SR	SR																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			214.404.740		104.536.740		33.572.861		54.092.063						23.337.431	-	-	-	30.432.243																									
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	100 %		116.742.740	2 Unit	46.324.740	100 %	19.905.011	12,00 bln	27.010.463	3,00	6.716.812		10.982.606,00	-	-	-	-	3,00	17.699.418	25,00	65,53	103,00	37.604.429	5,150,00	81,18																			

Kep. Bangkinang

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

					2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhi pemeliharaan terhadap barang milik daerah	100 %	97.662.000	100 %	58.212.000	100 %	13.667.850	12,00 bln	27.081.600	3,00	378.000	12.354.825,00	-	-	-	3,00	12.732.825	25,00	47,02	103,00	26.400.675	103,00	45,35											
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	56,27			51,50	22,68										
																						Predikat kinerja		SR	SR														
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		35,42	49,94														
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN		9.631.324.400		5.928.869.100		798.999.228		731.998.576		-		321.647.937		-	-	-	321.647.937																	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.631.324.400		5.928.869.100		798.999.228		731.998.576		-		321.647.937		-	-	-	321.647.937																	
					1. Pembangunan sarana dan Prasarana di kelurahan	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	5 Kelurahan	2.813.509.650	4 Kelurahan	3.447.513.300	12	369.998.883	12,00	358.800.576	3	3,00	214.999.937,00	-	-	-	6,00	214.999.937	50,00	59,92	18,00	584.998.820	450,00	16,97											
							5 Kelurahan	2.816.696.650				100 %				-		-	-	-	-	-	-	-	100,00														
					2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Terpenuhi Insentif RT RW dan Operasional Lembaga di Kelurahan serta Jumlah Masyarakat yang dilatih	5 Kelurahan	1.804.367.900	4 Kelurahan	2.481.355.800	12	429.000.345	12,00	373.198.000	3	3,00	106.648.000,00	-	-	-	6,00	106.648.000	50,00	28,58	18,00	535.648.345	450,00	21,59											
							5 Kelurahan	2.196.750.200				100 %				-		-	-	-	-	-	-	-	100,00														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	44,25			450,00	19,28										
																						Predikat kinerja		SR	SR														
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		50,00	44,25														
					Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum					60.507.976																													
										60.507.976																													
										60.507.976			3													60.507.976													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-														
																						Predikat kinerja		SR	SR														
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		-	-														
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum					39.492.024																													
										39.492.024																													
										39.492.024			3														39.492.024												
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-														
																						Predikat kinerja		SR	SR														
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		-	-														
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.750.000		23.100.000		11.550.000		111.550.000		-		106.599.964		-	-	-	106.599.964																	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.750.000		23.100.000		11.550.000		111.550.000		-		6.600.000		-	-	-	6.600.000																	
					1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 bln	57.750.000	14 bln	23.100.000	7 bln	11.550.000	7 bln	11.550.000	-	3,00	6.600.000,00	-	-	-	3,00	6.600.000	42,86	57,14	10,00	18.150.000	71,43	78,57											
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		42,86	57,14			71,43	78,57										
																						Predikat kinerja		SR	SR														
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								100.000.000		-		99.999.964		-	-	-	99.999.964																	
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Realisasi Pemenuhan Terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100.000.000		-		99.999.964		-	-	-	99.999.964																	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1	100.000.000		1,00	99.999.964,00	-	-	-	1,00	99.999.964	100,00	100,00	1,00	99.999.964														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00														
																						Predikat kinerja		ST	ST														
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		100,00	100,00														
																						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		3.682.014.880															
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		61,81	64,73														
																						PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		R	R														

smpk kuta bang watany

17) Kecamatan Kampar Kiri Tengah

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																						
No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)	OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17		
48		KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH																				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota																				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhi gaji dan Tunjangan ASN	156,00 Bln	1.908.352.848	26 Bln	318.058.808	13	1.647.394	13	1.602.902.157	3	261.471	-	539.999.93	-	-	-	-	-	-	

Kecamatan Kampar Kiri Tengah

18) Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100			15 = 7 + 13		16 = 15*100	
49		KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		2.186.305.100	972.670.700			1.872.990.462	1.984.747.327			882.441.271	-	-			1.174.921.826											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-			1.517.111.292	1.457.721.019			718.946.657	-	-			945.880.952											
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN					1.517.111.292	12,00	1.457.721.019	3,00	226.934.295	3,00	718.946.657,00	-	-	6,00	945.880.952	50,00	64,89	6,00	2.462.992.244	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,00	64,89									
Predikat kinerja																		SR	SR									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi laporan yang disusun	3.500.000	2.500.000			-	-			-	-	-	-	-	-											
		1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan kltiasar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	3.500.000	2 Dok	2.500.000	- Dok	- Dok			-	-	-	-	-	-											
		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Dok	3.500.000	2 Dok	2.500.000	- Dok	- Dok			-	-	-	-	-	-											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-									
Predikat kinerja																		SR	SR									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1.018.355.600	445.939.700			152.510.515	274.299.230			58.726.022	-	-			85.121.736											
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik, penerangan kantor	60 Bulan	23.622.000	24 Bulan	13.000.000	12 Bulan	3.148.661	12,00	10.651.998	3,00	867.700	3,00	1.826.290,00	-	-	6,00	2.693.990	50,00	25,29	18,00	5.842.651	75,00	44,94			
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta Alat Tulis Kantor	60 Bulan	236.753.500	24 Bulan	85.939.700	12 Bulan	41.043.161	12,00	74.833.493	3,00	1.329.930	3,00	5.265.398,00	-	-	6,00	6.595.328	50,00	8,81	18,00	47.638.489	75,00	55,43			
		3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	47.195.100	24 Bulan	23.000.000	12 Bulan	8.830.093	12,00	16.828.639	3,00	2.353.584	3,00	3.254.834,00	-	-	6,00	5.608.418	50,00	33,33	18,00	14.438.511	75,00	62,78			
		4. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54 Bulan	17.400.000	12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	-	-			-	-	-	-	-					12,00	-	100,00	-			
		5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	187.310.000	24 Bulan	100.000.000	12 Bulan	29.532.600	12,00	76.799.100	3,00	514.500	3,00	13.279.500,00	-	-	6,00	13.794.000	50,00	17,96	18,00	43.326.600	75,00	43,33			
		6. Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan kinerja Aparatur Sekretariat OPD	971 OH	506.075.000	365 OH	219.200.000	201,00	69.956.000	279,00	95.186.000	3,00	21.330.000	3,00	35.100.000,00	-	-	6,00	56.430.000	2,15	59,28	207,00	126.386.000	56,71	57,66			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40,43	28,94									
Predikat kinerja																		SR	SR									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.257.500	344.461.000			173.041.460	205.796.000			87.405.000	-	-			117.895.000											
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,00 Bulan	141.030.000	24 Bulan	67.590.000	12 Bulan	22.248.960	12,00	29.226.000	3,00	4.845.000	3,00	9.680.000,00	-	-	6,00	14.525.000	50,00	49,70	18,00	36.773.960	75,00	54,41			

Kecamatan Kampar Kiri Hilir

											31.060.400	1												31.060.400																				
											Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-																				
											Predikat kinerja												SR	SR																				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum																							42.303.379																					
																							42.303.379																					
																							42.303.379																					
											Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-																				
											Predikat kinerja												SR	SR																				
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4												-	-																				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																							100.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat												100.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000																
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												1	100.000.000	-	1,00	10.000.000.00	-	-	1,00	10.000.000	100,00	10,00	1,00	10.000.000	-	-							
											Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	10,00																				
											Predikat kinerja												ST	ST																				
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5												100,00	10,00																				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																							57.750.000	23.100.000	7.250.000	11.550.000	-	11.550.000	-	-	11.550.000													
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												57.750.000	23.100.000	7.250.000	11.550.000	-	11.550.000	-	-	11.550.000													
1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa												7 Desa	57.750.000	7 Desa	23.100.000	7 Desa	7.250.000	7,00 Desa	11.550.000	-	7,00	11.550.000.00	-	-	-	7,00	11.550.000	100,00	100,00	14,00	18.800.000	200,00	81,39
																							- 0	-	-	-	2 Keg	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	100.000.000	-	-				
																							- 0	-	-	-	1 Keg	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100.000.000	-	-				
																							60 Bulan	136.720.000																				
																							149 Siswafi	136.720.000																				
																							208 Qon/ Qan'ah	301.470.000																				
																							208 Qan & Qan'ah	301.470.000																				
																							13 Tim	120.000.000																				
																							13 Tim	120.000.000																				
											Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00																				
											Predikat kinerja												SR	SR																				
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6												100,00	100,00																				
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												2.167.197.327																					
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												1.196.471.826																					
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												83,06	53,46																				
											PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												T	R																				

Kemahasiswaan

19) Kecamatan Gunung Sahilan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
				9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 7 + 13	16 = 15*100																
50		KECAMATAN GUNUNG SAHILAN																							17		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5.778.031.435	28 Bulan	2.147.749.236	14 Bulan	990.690.202	14 bulan	886.293.505	3	154.501.515	3,00	326.276.559,00	-	-	-	-	6,00	480.778.074	42,86	54,12	20,00	1.461.468.276	71,43	68,05
Rata-rata capaian kinerja (%)																				42,86	54,12			71,43	68,05		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	16.776.000		-		8.388.000		-		-		-	-	-	-								
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang		16.776.000				1 OK	8.388.000		-		-		-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	-		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.321.307.100		375.011.218		156.440.441		296.320.911				28.815.150		-	-	-		160.813.900						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	25.000.000	2 Tahun	4.975.500	- Tahun	2.487.750	12 bulan	2.473.200	3	984.000	-	-	-	-	-	-	3,00	984.000	25,00	39,79	3,00	3.471.750	150,00	69,78
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	119.969.500	2 Tahun	55.176.962	1 Tahun	19.792.231	12 bulan	104.939.571	3	92.908.150	3,00	4.746.950,00	-	-	-	-	6,00	97.655.100	50,00	93,06	7,00	117.447.331	350,00	212,86
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	666.512.500	2 Tahun	135.901.260	1 Tahun	63.590.940	12 bulan	103.097.320	3	16.171.000	3,00	13.820.400,00	-	-	-	-	6,00	29.991.400	50,00	29,09	7,00	93.582.340	350,00	68,86
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	39.305.100	2 Tahun	15.441.496	1 Tahun	7.423.520	12 bulan	8.402.820	3	935.600	3,00	1.547.800,00	-	-	-	-	6,00	2.483.400	50,00	29,55	7,00	9.906.920	350,00	64,16
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	22.510.000	24 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				-	-	-	-	-	-				12,00		50,00		
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	2.500,00 Orang	448.010.000	305 OH	163.516.000	150,00 OH	63.146.000	235 OH	77.408.000	3,00	21.000.000	3,00	8.700.000,00	-	-	-	-	6,00	29.700.000	2,55	38,37	156,00	92.846.000	51,15	56,78
Rata-rata capaian kinerja (%)																				44,39	38,31			216,86	78,74		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		479.906.500		216.854.000		108.427.000		155.366.950				29.951.300		-	-	-		62.257.050						
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	54.990.000	24 Bulan	22.806.000	12 Bulan	11.403.000	12 bulan	15.607.950	3	2.778.750	3,00	2.948.800,00	-	-	-	-	6,00	5.727.550	50,00	36,70	18,00	17.130.550	75,00	75,11
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	424.916.500	24 Bulan	194.048.000	12 Bulan	97.024.000	12 bulan	139.759.000	3	29.527.000	3,00	27.002.500,00	-	-	-	-	6,00	56.529.500	50,00	40,45	18,00	153.553.500	75,00	79,13
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	38,57			75,00	77,12		
Predikat kinerja																				SR	SR						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		136.554.000		44.719.976		22.359.538		23.088.246				3.833.500		-	-	-		3.833.500						
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	116.810.000	2 Unit	42.065.726	1 Unit	21.032.863	1 unit	21.761.571		0,30	3.833.500,00	-	-	-	-	-	0,30	3.833.500	30,00	17,62	1,30	24.866.363	65,00	59,11

Kecamatan Gunung Sahilan

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

							2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	80 Unit	19.744.000	32 Unit	2.653.350	5 Unit	1.326.675	16 Unit	1.326.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.326.675	15,63	50,00																				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		15,00	8,81			80,63	109,11																		
																								Predikat kinerja		SR	SR																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		30,45	27,96																						
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-		-		28.773.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																						
																								Predikat kinerja		SR	SR																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		-	-																						
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum		-		-		71.227.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																						
																								Predikat kinerja		SR	SR																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		-	-																						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000	100,00	100,00																				
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000		-		100.000.000	100,00	100,00																				
							1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		1 Keg	100.000.000		Keg	-	1 Keg	100.000.000		-	1,00	100.000.000,00		-	-	-	-	1,00	100.000.000	100,00	100,00																			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00																						
																								Predikat kinerja		ST	ST																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		100,00	100,00																						
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			70.840.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
							Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70.840.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
							1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	40 Bulan	70.840.000	19 Bulan	23.100.000	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	11.550.000	36,84	50,00																			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																						
																								Predikat kinerja		SR	SR																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		-	-																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		807.682.524																							
																								PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 3 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		43,48	42,65																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		43,48	42,65																						
																								PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 3 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR	SR																						
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		43,48	42,65																						
																								PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 3 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR	SR																						

Kecamatan Gunung Sahilan

20) Kecamatan Perhentian Raja

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																														
No	Kode Rekening	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Diopome)/Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13*100 15 = 7 + 13 16 = 13*100 17																										
51		KECAMATAN PERHENTIAN RAJA																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10.661.199.685		3.895.499.044		1.752.889.032		1.736.520				80.107															
		Administrasi Keuangan Peringkat Daerah			8.367.199.685		3.163.640.028		1.447.659.382		1.387.304				-															
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memenuh Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	8.367.199.685	28 Bulan	3.163.640.028	14 Bulan	1.447.659.382	14 bulan	1.387.304	3	339.379	-	-	-	-	-	-	-	3,00	339.379	21,43	24,46	17,00	1.447.998.761	60,71	45,77		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								21,43	24,46				60,71	45,77
Predikat kinerja																								SR	SR					
		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah		123.000.000		19.800.000		-		4.950				-															
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	12 Orang	123.000.000	4 Orang	19.800.000	-	-	2 OK	4.950																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-					
Predikat kinerja																								SR	SR					
		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah		1.404.000.000		408.095.890		172.081.000		189.477				46.227															
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,0 Tahun	19.000.000	2 Tahun	36.217.800	1 Tahun	3.000.000	12 bulan	4.717	3	985	-	-	-	-	-	-	-	3,00	985	25,00	20,88	4,00	3.000.985	200,00	8,29		
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	133.000.000	2 Tahun	37.160.990	1 Tahun	15.201.000	12 bulan	33.603	3	5.560	3,00	20.692,00	-	-	-	-	-	6,00	26.252	50,00	78,12	7,00	15.227.252	350,00	40,98		
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	785.000.000	2 Tahun	177.147.300	1 Tahun	67.280.000	12 bulan	100.452	3	27.640	3,00	13.028,00	-	-	-	-	-	6,00	40.668	50,00	40,49	7,00	67.320.668	350,00	38,00		
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	29.000.000	2 Tahun	13.361.800	1 Tahun	7.500.000	12 bulan	7.955	3	1.596	3,00	1.557,00	-	-	-	-	-	6,00	3.153	50,00	39,63	7,00	7.503.153	350,00	56,15		
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	735,00 OH	438.000.000	350 OH	144.208.000	1 Tahun	79.100.000	175 OH	42.750	40	10.700	40,00	10.950,00	-	-	-	-	-	80,00	21.650	45,71	50,64	81,00	79.121.650	23,14	54,87		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								44,14	45,95				254,63	39,66
Predikat kinerja																								SR	SR					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		589.000.000		255.638.000		110.289.650		129.406				26.405															
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	82.000.000	24 Bulan	29.478.000	12 Bulan	13.786.000	12 bulan	14.739	3	3.737	3,00	3.592,00	-	-	-	-	-	6,00	7.329	50,00	49,73	18,00	13.793.329	75,00	46,79		
		2. Penyediaan Jasa Petyayan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	507.000.000	24 Bulan	226.160.000	12 Bulan	96.503.650	12 bulan	114.667	3	24.120	3,00	22.813,00	-	-	-	-	-	6,00	46.933	50,00	40,93	18,00	96.550.583	75,00	42,69		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								50,00	45,33				75,00	44,74
Predikat kinerja																								SR	SR					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeenuhnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		178.000.000		48.325.126		22.859.000		25.383				7.475															
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	133.000.000	2 Tahun	41.005.126	1,00 Unit	20.459.000	1 unit	20.503	0,25	4.300	0,25	6.795,00	-	-	-	-	-	0,50	11.095	50,00	54,12	1,50	20.470.095	75,00	49,92		

Kecamatan Perhentian Raja

					2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	105,00	Unit	45.000.000	21	Unit	7.320.000	1,00	Tahun	2.400.000	12	bulan	4.880	3	1.220	3,00	680,00	-	-	-	-	-	-	6,00	1,900	50,00	38,93	7,00	2.401.900	33,33	32,81										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	46,52		108,33	82,73																				
																				Predikat kinerja		SR	SR																							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		33,11	32,45																							
					Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum			-			-			-			-				-																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																				Predikat kinerja		SR	SR																							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		-	-																							
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum			-			-			-			-				-																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																				Predikat kinerja		SR	SR																							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		-	-																							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			57.000.000			23.100.000				11.550			-				-																								
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.000.000				23.100.000				11.550			-				-																	50,00	50,00						
					1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35	Bulan	57.000.000			14	Bulan	23.100.000			7,00	Bulan	11.550				-																7,00	11.550.000	50,00	50,00				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																							
																				Predikat kinerja		SR	SR																							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		-	-																							
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-			400.000				300.000			100.000				-																								
					Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						400.000				300.000			100.000				-																		100,00	100,00				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Camat yang dilimpahkan dengan bantuan khusus dari Pemerintahan Provinsi						4	keg	400.000			3,00	keg	300.000			1	keg	100.000																100,00	100,00					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00																							
																				Predikat kinerja		ST	ST																							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		100,00	100,00																							
															JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.848.069.694	599.344.000																												
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		44,37	44,15																							
																				PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR	SR																							

Kecamatan Panteuluhan Raja

21) Kecamatan Koto Kampar Hulu

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KABUPATEN KAMPAR TRIWULAN II TAHUN 2022																											
No	Kode Rekening	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Tahun 2022)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2021 (Tahun N-2)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 (TAHUN N-2)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)	OPD Penanggung Jawab							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II							III	IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		K	Rp.	K	Rp.	17							
52		KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU																									
		1. Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5.582.879.515	28 Bulan	2.233.151.806	14 Bulan	859.060.046	14 bulan	1.001.565.358	3	161.397.162	3,00	372.121.292,00	-	-	-	-	6	533.518.454	42,86	53,27	20,00	1.392.578.500	71,43	62,36
Rata-rata capaian kinerja (%)																42,86	53,27			71,43	62,36						
Predikat kinerja																SR	R										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		144.000.000		16.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	144.000.000	2 Orang	16.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-						
Predikat kinerja																SR	SR										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.905.201.400		281.814.368		247.102.732		137.872.514				43.279.684		-				67.569.182						
		1. Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyelesaian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	35.000.000	2 Tahun	5.681.400	1 Tahun	17.808.000	12 bulan	4.630.000			3,00	3.420.000,00	-	-	-	-	3	3.420.000	25,00	73,87	4,00	21.228.000	200,00	373,64
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	499.973.000	2 Tahun	54.956.626	1 Tahun	65.187.732	12 bulan	33.004.656			3,00	16.941.124,00	-	-	-	-	3	16.941.124	25,00	51,33	4,00	82.128.856	200,00	149,44
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	793.150.000	2 Tahun	68.325.450	1 Tahun	41.020.000	12 bulan	30.047.000	3	5.049.400	3,00	6.118.560,00	-	-	-	-	6	11.167.960	50,00	37,17	7,00	52.187.960	350,00	76,38
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	21.003.400	2 Tahun	18.692.892	1 Tahun	17.827.000	12 bulan	10.340.858	3	4.540.098	-	-	-	-	-	-	3	4.540.098	25,00	43,90	4,00	22.367.098	200,00	119,66
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	13.275.000	24 Bulan	-	12 Bulan	2.520.000	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2.520.000	50,00	-
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.320,00 Orang	542.800.000	305 OH	134.158.000		102.740.000	175 OH	59.850.000	3,00	14.700.000	3,00	16.800.000,00	-	-	-	-	6	31.500.000	3,43	52,63	6,00	134.240.000	1,97	100,06
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,69	51,78			166,99	136,53						
Predikat kinerja																SR	R										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		527.800.000		266.748.800		93.412.986		152.766.000				36.254.211		-				74.502.504						
		1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	C Bulan	109.800.000	24 Bulan	38.188.800	12,00 Bulan	10.062.986	12,00 bulan	19.206.000	3	4.858.293	3,00	2.864.211,00	-	-	-	-	6	7.722.504	50,00	40,21	18,00	17.785.490	75,00	46,57
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	418.000.000	24 Bulan	228.560.000	12,00 Bulan	83.350.000	12,00 bulan	133.560.000	3	33.390.000	3,00	33.390.000,00	-	-	-	-	6	66.780.000	50,00	50,00	18,00	150.130.000	75,00	65,69
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	45,10			75,00	56,13						
Predikat kinerja																SR	SR										

Kecamatan Koto Kampar Hulu

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma: 1) mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; 2) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; 4) terintegrasi sehingga dapat mengifisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan 5) memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut rumusan permasalahan hubungan antara prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten Kampar 2023.

1) Kearifan Lokal dan Kebudayaan

1. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan Melayu Riau dan pariwisata sebagai perekat dan penguat nilai-nilai luhur yang membantu terbangunnya kehidupan sosial yang sehat, harmonis, agamis, dan berbudaya
2. Terbatasnya upaya pendekatan penguatan pendidikan moral, budaya lokal dan karakter daerah sebagai penangkal perkembangan budaya negatif.

2) Perekonomian

1. Masih terbatasnya kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam penyediaan kebutuhan pangan karena belum tergarapnya potensi secara maksimal akibat terbatasnya faktor pendukung
2. Terbatasnya pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura lokal unggulan, perkebunan, dan peternakan
3. Masih belum maksimalnya pengembangan potensi subsektor perikanan budidaya, seperti terbatasnya pusat pembenihan ikan sehingga kebutuhan benih perikanan budidaya masih tergantung dengan daerah lain baik dalam provinsi maupun luar provinsi
4. Belum berkembangnya investasi sektor unggulan perekonomian Kabupaten Kampar terutama subsector yakni pertanian, perkebunan dan perikanan
5. Kecilnya peran sektor pertambangan sebagai mendukung keuangan daerah karena DBH yang menurun
6. Belum optimalnya sinergitas program provinsi Riau dan Kampar dalam menarik investasi dalam rangka peningkatan produktifitas sektor unggulan dan daya saing
7. Belum optimalnya penanganan penanggulangan kemiskinan daerah terutama lemahnya sinergitas antara program dari masing-masing OPD, belum focus dan lokusnya penanganan serta potensi unggulan belum mampu menjadi lokomotif penurunan angka kemiskinan.
8. Belum berkembangnya sejumlah wilayah yang menjadi kutub-kutub pertumbuhan baru terutama potensi industri
9. Belum optimalnya upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan
10. Terbatasnya pengembangan potensi wisata Kabupaten Kampar yang terdiri dari wisata alam (sungai, taman nasional, air terjun); Wisata Budaya (objek situs dan candi); Wisata Kuliner (makanan khas incaran warga Pekanbaru); dan Wisata Kreatif (sentra perikanan beserta produk olahannya) sehingga menjadi destinasi wisata baru.

3) Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

1. Terdapat kecamatan terisolir menjadi tantangan dalam pekerjaan umum, sarana jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan,

kesehatan ekonomi

2. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur dasar melalui: konektivitas daya saing dan pemantapan jalan provinsi dalam sistem dan jaringan transportasi, ketersediaan dan kualitas air baku, kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan, sanitasi masyarakat, dan infrastruktur sumberdaya air.
3. Belum optimalnya monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW
4. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana utilitas umum dan penerangan kawasan permukiman
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara
6. Belum terkelolanya lingkungan secara berkelanjutan terutama pada sentra produksi agroindustri hasil perikanan

4) Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat
3. Terbatasnya perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan
4. Terbatasnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pember-dayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Terbatasnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui beragam kegiatan pelatihan, magang dan BLK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri
6. Terbatasnya pemberdayaan masyarakat dan desa

5) Kesehatan

1. Terbatasnya fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
3. Belum optimalnya pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat

6) Tatakelola Pemerintahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi (IT) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan
2. Belum optimalnya keselarasan kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara dengan perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial, ekonomi dan politik
3. Desa sebagai basis masyarakat dan pemerintahan daerah yang terendah, belum optimal kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi manajemen pemerinta-han, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Perumusan isu strategis dan masalah mendesak dibawah ini didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan diselaraskan dengan Prioritas Nasional maupun Provinsi Riau. Identifikasi dilakukan terhadap prioritas pembangunan dan persoalan yang mendesak pada kebijakan Nasional, Provinsi dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2023. Identifikasi terhadap isu strategis nasional dimaksudkan untuk melakukan

sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah (provinsi dan kabupaten), sehingga penentuan arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas utama perlu mendapat perhatian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.176.

Tabel 2.176
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
1	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pengembangan industri, pariwisata, dan investasi pasca pandemi Covid-19 • Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan masih rendah • Belum optimalnya pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan, khususnya di wilayah pesisir timur Sumatera • Nilai tambah dan daya saing produk industri masih rendah • Terbatasnya kesiapan destinasi dan industri pariwisata untuk merespon kunjungan wisatawan dan menyediakan jasa • Perkembangan ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan optimal. • Ekspor didominasi produk bernilai tambah rendah dan perdagangan dalam negeri belum efisien. • Kemitraan usaha belum dikembangkan optimal untuk mengatasi <i>missing middle</i> dalam rantai pasok/nilai. • Akses pembiayaan usaha produktif yang terbatas • Produktivitas tenaga kerja masih rendah. • Pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah masih rendah 	<p>Industri, Pertanian, dan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurun/ melambatnya produksi migas dan hasil tambang • Terbatasnya kapasitas perekonomian daerah menyediakan lapangan kerja baru • Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung • Produksi produk IKM yang belum memenuhi kebutuhan pasar • Perizinan dan sertifikasi produk IKM serta HAKKI • Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online • Luas tanam dan luas panen semakin menurun • Sarana dan prasarana belum merata sesuai kebutuhan usaha tani • Produktivitas tanaman pangan dari hortikultura masih rendah • Penerapan teknologi pertanian belum optimal • Masih terdapatnya destinasi wisata yang belum memenuhi standar pariwisata berkelanjutan • Promosi pariwisata yang belum optimal • Atraksi wisata belum beragam • SDM pariwisata yang belum seluruhnya tersertifikasi • Belum berkembangnya ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat • Masih rendahnya kontribusi sektor potensial (industri pengolahan, pertanian, dan ekonomi kreatif berbasis UMKM) dalam mendukung pergeseran sektor basis dari sektor migas kepada sektor potensial dan belum optimalnya hilirisasi sektor-sektor potensial berbasis sumberdaya alam 	<p>Membangkitkan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum berkembangnya investasi pendukung sektor perekonomian unggulan Kabupaten Kampar yakni: pertanian, perkebunan dan perikanan • Belum berkembangnya industri dari potensi industri ada • Menurunnya peran sektor pertambangan sebagai mendukung keuangan daerah dari DBH • Belum optimalnya sinergitas program Riau dan Kampar dalam menarik investasi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan yang berdaya saing dan penanggulangan kemiskinan • Belum optimalnya upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan • Terbatasnya pengembangan potensi wisata Kabupaten Kampar yang terdiri dari wisata alam (sungai, taman nasional, air terjun); Wisata Budaya (objek situs dan candi); Wisata Kuliner (makanan khas incaran warga Pekanbaru); dan Wisata Kreatif (sentra perikanan beserta produk olahannya) sehingga menjadi destinasi wisata baru • Terbatasnya pengembangan potensi sektor perikanan • Terbatasnya pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura lokal unggulan, perkebunan, dan peternakan • Terbatasnya pemberdayaan masyarakat dan desa
2	<p>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemulihan dampak pandemi Covid-19 • Terbatasnya transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah • Belum optimalnya keunggulan kompetitif wilayah • Terbatasnya pemerataan dan kualitas hidup • Terbatasnya pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, 	<p>Pemerataan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah, kawasan perbatasan negara serta infrastruktur pendukung kawasan industri dan pariwisata 	<p>Pemulihan dampak pandemi Covid-19 secara berkelanjutan sesuai dengan tatanan kehidupan normal baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial • Terbatasnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui beragam kegiatan pelatihan, magang dan BLK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
	<p>kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya peran dan efisiensi pelayanan pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan • Terbatasnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, destinasi wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) • Terbatasnya pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera 		
3	<p>Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan dasar penduduk belum merata ▪ Partisipasi sekolah penduduk miskin masih selalu lebih rendah pada setiap jenjang pendidikan ▪ Belum optimalnya sistim perlindungan sosial 	<p>Sumberdaya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan • Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan • Belum optimalnya penurunan kejadian mortalitas dan morbiditas • Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan menuju rumah sakit umum dan khusus • Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) • Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan panti • Belum optimalnya pemberdayaan melalui peningkatan peran dan fungsi serta pembinaan terhadap PSKS • Belum terintegrasinya pelayanan sosial melalui pembentukan layanan sosial terpadu satu pintu (SLRT) serta pembinaan unsur sosial pemberi layanan • Belum optimalnya peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Budaya Melayu 	<p>Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan • Terbatasnya kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan serta prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, seperti rumah sakit dan sekolah yang dikelola oleh pemerintah • Belum optimalnya peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular • Pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat • Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal • Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat • Terbatasnya perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan • Terbatasnya upaya pendekatan penguatan pendidikan moral, budaya lokal dan karakter daerah sebagai penangkal perkembangan budaya negatif.
4	<p>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jaringan pelabuhan utama terpadu • Terbatasnya transformasi digital (infrastruktur, pemanfaatan dan enabler) • Belum optimalnya keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi • Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing 	<p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan di Provinsi Riau dalam kondisi mantap masih rendah • Belum optimalnya peningkatan angkutan orang dan barang melalui terminal/pelabuhan/bandara • Terbatasnya layanan air minum lintas kabupaten/kota dan layanan sanitasi • Belum tersedianya layanan penanganan sampah lintas kabupaten/kota • Terbatasnya sistim irigasi di 8 DI dan 34 DIR 	<p>Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum berkembangnya sejumlah wilayah yang menjadi kutub-kutub pertumbuhan baru • Terdapat kecamatan terisolir menjadi tantangan dalam pekerjaan umum, sarana jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan ekonomi • Belum optimalnya peningkatan infrastruktur dasar melalui: konektivitas daya saing dan pemantapan jalan

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kapasitas mitigasi dan penanganan bencana • Belum optimalnya penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang • Permasalahan tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan kebijakan satu peta. • Belum optimalnya peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah • Belum optimalnya upaya penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Panjangnya abrasi pantai yang belum tertangani 	<p>provinsi dalam sistem dan jaringan transportasi, ketersediaan dan kualitas air baku, kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan, sanitasi masyarakat, dan infrastruktur sumberdaya air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara • Belum optimalnya monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW • Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana utilitas umum dan penerangan kawasan permukiman
5	<p>Memperkuat stabilitas Polhukhanakam dan transformasi pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM aparatur. • Belum optimalnya penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multi-pihak, dan menghasilkan inovasi daerah 	<p>Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang prima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan implementasi nilai reformasi birokrasi dan peningkatan budaya kerja • Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik • Belum optimalnya peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi • Belum optimalnya peningkatan implementasi pemantauan dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) atas resiko perangkat daerah • Belum optimalnya peningkatan penanganan gratifikasi implementasi SPBE • Belum terintegrasinya penyusunan kebijakan tata kelola pemerintahan 	<p>Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi (IT) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan • Belum optimalnya keselarasan kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara dengan perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial, ekonomi dan politik • Desa sebagai basis masyarakat dan pemerintahan daerah yang terendah, belum optimal kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi manajemen pemerintahan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. • Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan Melayu Riau dan pariwisata sebagai perekat dan penguat nilai-nilai luhur yang membantu terbangunnya kehidupan sosial yang sehat, harmonis, agamis, dan berbudaya

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis permasalahan atas layanan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten

Kampar, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Tabel 2.177
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Permasalahan
Pendidikan	
1	Berkurangnya lembaga PAUD sebesar -13,50% pertahun selama tahun 2017-2021. Tahun 2021 jumlah lembaga PAUD hanya 354 unit. Sementara jumlah penduduk anak usia dini 0-4 tahun sebanyak 63.763. Artinya setiap lembaga PAUD harus sebanyak 80 Orang.
2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memasukkan putra putrinya ke sekolah sesuai kelompok usia sekolah atau terdapat siswa sekolah yang bukan merupakan penduduk wilayah tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari APK SD/MI yang melebihi 100% yaitu 102,18 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang bersekolah belum termasuk usia sekolah atau melebihi usia sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi terkait usia sekolah yang belum maksimal atau masih terdapat penduduk luar diwilayah perbatasan yang memanfaatkan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk jejang pendidikan SMP/MTs menunjukkan APK pada tahun 2021 sudah mencapai 100,30 tahun 2021 sementara APK SMP/MTs baru mencapai 84,64 kondisi menunjukkan bahwa terdapat siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan ke SMP/MTs baik yang belum memasuki usia sekolah maupun melebihi usia sekolah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi dan lainnya.
3	APM SD/MI dan SMP/MTs masing-masing 97,80 dan 84,64 pada tahun 2021. APM kondisi ini menggambarkan masih terdapat usia sekolah yang bersekolah di wilayah Kabupaten Kampar belum sesuai usia sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran orang tua yang masih rendah dalam menyekolahkan putra putrinya sesuai usia sekolah atau disebabkan oleh jangkauan atau akses pendidikan yang masih terbatas terutama jarak sekolah dan infrastruktur wilayah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan APM adalah mematuhi regulasi terkait dengan usia sekolah baik oleh orang tua siswa termasuk manajemen sekolah.
4	Tingginya angka putus sekolah selama periode tahun 2017-2021 naik dengan pertumbuhan 1.838,19% untuk jenjang pendidikan SD/MI dengan APS sebesar 0,44% dari jumlah siswa SD/MI tahun 2021. Sementara itu angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat dengan pertumbuhan sebesar 711,24%. Kondisi ini terjadi karena adanya faktor ekonomi dan sosial lainnya
5	Masih terdapat lulusan SD/MI sebesar 3,62% yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP/MTs setelah tamat SD/MI tetapi menunda tahun berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat AM (angka melanjutkan sebesar 103,62% pada pada tahun 2021. Demikian halnya dengan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/AMK/MA setelah lulus melainkan dengan menunda sebesar 10,43%.
6	Terjadinya penurunan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik. Pada tahun 2021 masih terdapat 44,97% bangunan SD/MI dalam kondisi rusak. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius karena akan mempengaruhi kualitas lulusan akibat terganggunya proses pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan berikutnya yaitu SMP/MTs bahkan ke SMA/SMK/MA. Kerusakan bangunan sangat merugikan masyarakat karena bangunan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dari aspek ekonomis, kerusakan bangunan mengakibatkan masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pada gedung-gedung sekolah dasar, kerusakan bangunan yang parah akan mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu juga akan mengurangi daya tampung sekolah atau tingkat partisipasi sekolah.
7	Masih terdapat 8,60% guru SD/MI yang belum berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2021 dan guru SMP/MTs yang belum kualifikasi S1/D4 sebesar 4,00% pada tahun. Kondisi ini terjadi karena kekurangan biaya dan sebagian guru tidak bersedia melanjutkan pendidikan akibat dari usia guru yang sudah mendekati masa pensiun.
8	Masih terdapat 59,86% guru SD/MI yang belum bersertifikasi pada tahun 2021 dan guru SMP/MTs yang belum bersertifikasi sebesar 61,33% pada tahun 2021. Masalah utama masih tingginya jumlah guru yang belum bersertifikasi antara lain lebih banyak disebabkan faktor internal dari peserta sertifikasi yaitu dari 10 komponen sertifikasi yang diujikan belum mampu dipenuhi oleh guru peserta sertifikasi. Sedangkan faktor eksternalnya berupa proses dari rekrutmen peserta sertifikasi lebih kecil karena sudah diatur oleh kuota

No	Permasalahan
	dari LPMP. Sertifikasi guru sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru dalam rangka peningkatan kualitas dalam proses pengajaran yang akan berdampak pada kualitas lulusan.
Kesehatan	
1	Masih tingginya angka kematian bayi dengan rata-rata prevalensi sebesar 10,58 selama tahun 2017-2021 atau rata-rata 11 bayi dan 31 bayi per 1.000 kelahiran tahun 2021. Kondisi ini terjadi karena kondisi keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penanganan penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan menyusui yang masih terbatas.
2	Masih tingginya angka kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 31 bayi per 1.000 kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan Selain itu kejadian AKBA sebanyak 32 balita. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan Kesehatan terhadap setiap ibu hamil belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar baik terhadap ibu bersalin dan setiap bayi baru lahir.
3	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan selama tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan sebesar 17,01%. Pada tahun 2021 AKI sebanyak 112 orang per 100.000 kelahiran hidup. Permasalahan terjadinya karena menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 90,10% hingga tahun 2021. Hal tersebut juga terjadi karena akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga Kesehatan yang mengalami penurunan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 baru mencapai 92,00% tahun 2021.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak dengan rasio jalan rusak terhadap panjang jalan 2.073,10 km pada tahun 2021 sebesar 41,37%. Permasalahan utama tingginya rasio angka kerusakan jalan kendaraan berat yang melintasi jalan yang melebihi MST jalan yang hanya sebesar 8 ton terutama untuk penggunaan pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit, industri kehutanan dan tambang.
2	Masih rendahnya rasio panjang jalan yang belum dapat dilewati dengan kecepatan diatas 40 km per jam yaitu hanya 5,23% pada tahun 2021. Permasalahan ini terjadi karena kondisi permukaan jalan sebagian besar masih didominasi oleh jalan kerikil dan jalan tanah.
3	Jumlah RT yang mendapatkan pembangunan fasilitas air limbah pada tahun 2021 hanya 0,55% dari jumlah RT yang ada. Masih rendahnya akses sanitasi air limbah tersebut disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur air limbah masih sangat terbatas sementara dengan penambahan jumlah RT terus mengalami peningkatan.
4	Masih tingginya rasio irigasi yang mengalami kerusakan sebanyak 36,75%. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan produksi pangan padi sehingga terus mengalami penurunan.
5	Masih tingginya rasio rumah tangga yang belum mendapatkan akses minum bersih tahun 2021 yaitu sebesar 22,15%. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya penyakit yang diakibatkan kekurangan air bersih dan masih terdapat 9,59% RT yang belum mendapatkan air minum layak.
6	Masih terdapat rasio bangunan yang belum mendapatkan IMB sebesar 81,06% pada tahun 2021. Rendahnya rasio ini berkaibat pada rendahnya penerimaan PAD yang diperoleh dari pengeluaran izin membangun.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	Masih rendahnya rasio rumah layak huni yang dibangun pada tahun 2021 hanya 0,15%. Rendahnya rasio rumah layak huni disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun rumah layak huni sangat terbatas terutama untuk penduduk miskin.
2	Masih terdapat 284,84 hektar kawasan pemukiman kumuh dari jumlah kawasan pemukiman. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah dan kurangnya partisipasi lembaga sosial terutama dalam penataan kawasan kumuh. Hal ini mengakibatkan pada lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.
3	Rasio ketersediaan PSU baru 17% dari kawasan pemukiman warga terutama yang belum memiliki PSU seperti Prasarana Jalan, Prasarana Drainase, Prasarana Air Minum, Prasarana Air Limbah, Prasarana Persampahan, Prasarana Jaringan Listrik, Ruang Terbuka Hijau.
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	

No	Permasalahan
1	Berkurangnya jumlah Linmas sebesar -12,00% per tahun atau berkurang sebanyak 1.324 orang selama periode 2017-2021. Disatu sisi jumlah masyarakat terus mengalami penambahan. Pertambahan jumlah masyarakat mengakibatkan risiko gangguan K3 semakin tinggi.
2	Masih terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran K3 dengan pertumbuhan 24,58% per tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penjagaan K3 akibat berkurang jumlah aparat satpol PP yang dapat mencegah pelanggaran K3.
Sosial	
1	Masih terdapat 25,00% dari 12 indikator PSKS yang belum terdapat data kasus maupun penanganan pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena terbatasnya kemampuan PSKS dalam baik dari sisi jumlah maupun cakupan layanan serta secara umum rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu penanganan PMKS tersebut.
2	Masih terdapat PSKS belum tertangani 100% tahun 2021 yaitu Anak Dengan Kedistabilan, Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas.
3	Belum sinkronnya dan bersinerga program penanggulangan kemiskinan antar OPD sehingga jumlah penduduk miskin secara nominal masih sangat banyak terutama pada lapangan usaha pertanian.

2.6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis permasalahan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan dan Perpustakaan. Permasalahan masing-masing urusan tersebut di sajikan pada Tabel 2.178 berikut.

Tabel 2.178
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Permasalahan
Tenaga Kerja	
1	Rendahnya kemampuan OPD terkait dalam penempatan tenaga kerja misalnya pada tahun 2021 hanya 112 orang yang ditempatkan oleh OPD terkait. Rendahnya penempatan pencari kerja hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia akibat rendahnya investasi disetiap lapangan usaha. Disisi lain lapangan kerja yang sedia tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja atau pencari kerja
2	Menurunnya kemampuan tenaga dimana rasio lulusan S1-S3 yang bekerja tahun 2021 hanya mencapai 245 orang dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2021. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja akibat belum tersedia program peningkatan kualitas tenaga kerja secara terstruktur sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Terjadinya penurunan Indeks Pemberdayaan Gender dengan pertumbuhan -2,97% per tahun. Berkurang dari 60,80% tahun 2017 menjadi 53,62% tahun 2021.
2	Masih tingginya kasus kejahatan seksual hingga mencapai 46 kasus pada tahun 2021 dari hanya 20 kasus pada tahun 2017 atau naik sebesar 37,54% per tahun dan KDRT dari 9 kasus tahun 2017 naik menjadi 11 kasus tahun 2021. Penyebab utama kekerasan seksual antara lain 1) keluarga yang mengalami broken home, 2) pola asuh orang tua yang tidak sehat, 3) mudahnya mendapatkan konten pornografi, 4) tingginya angka kemiskinan dan 5) tingginya angka pengangguran, 6) rentannya ketahanan keluarga, 7) kecenderungan korban kejahatan seksual yang belum tertangani 8) rendahnya efek jera 9) efek cegah dari norma dan hukum. Sedangkan Huraerah (2010) menyebutkan kekerasan seksual terjadi karena; 1) lemahnya pengawasan orang tua dalam media elektronik, 2) anak mengalami cacat (keterbelakangan, autisme, dll), 3) keluarga yang belum matang secara psikologis, 4) kesibukan orang tua dan 5) kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Faktor tersebut berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang.
Pangan	

No	Permasalahan
1	Turunnya rasio ketersediaan pangan pokok beras, hingga tahun 2021 hanya terpenuhi sebesar 21,37% dari total kebutuhan beras wilayah ini. Penyebab utama turun ketersediaan beras tersebut adalah menurunnya luas panen dan produksi.
2	Terjadinya penurunan rasio ketersediaan energi dan protein terutama Umbi-umbian, Minyak lemak, Buah biji berminyak dan Sayur dan buah.
3	Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, Mengacu pada kondisi tersebut maka perlu mengembangkan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Untuk mengatasi dengan pengembangan komoditas pangan lokal potensial yang telah dikembangkan namun belum optimal adalah sagu. Keterbatasan (belum optimalnya) pengelolaan cadangan pangan daerah ini akan berdampak pada: <ol style="list-style-type: none"> Instabilitas pasokan pangan antar waktu dan antar daerah Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional, dan Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
Pertanahan	
1	Belum terdapatnya data terkait permasalahan yang bersifat umum antara lain adalah (1) Luas lahan bersertifikat hanya baru mencapai 27,09%, (2) Luas lahan yang dimiliki oleh pemerintah, (3) Luas lahan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, (4) Jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan belum terdata dengan baik.
2	Permasalahan umum tersebut dapat menimbulkan konflik dimasyarakat seperti (1) Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, (2) Adanya alih fungsi lahan non pertanian, (3) tidak terkendalinya harga jual dan beli tanah, (4) masih banyaknya kepemilikan tanah yang terdaftar. Semua hal tersebut merupakan kewenangan Kabupaten untuk menyelesaikan sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Lingkungan Hidup	
1	Menurunnya cakupan areal penanganan sampah dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 50,00%. Sedangkan jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 45,34%. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan stakeholders terkait dalam cakupan pelayanan akibat peningkatan produksi volume sampah sementara partisipasi sangat kurang dalam penanganan sampah baik sampah RT maupun sampah pasar dan pusat keramaian.
2	Rasio jumlah sampah yang tertangani hanya 0,39% dari jumlah volume produksi sampah di wilayah ini.
Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	
1	Masih terdapat bayi lahir yang belum berakte kelahiran sebesar 5,77% tahun 2021, Rasio pasangan berakte nikah, Penerapan KTP Nasional, berbasis NIK, Cakupan penerbitan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan penerbitan akta kelahiran baru mencapai 96,23% atau masih terdapat sekitar 236 bayi yang belum memiliki akte kelahiran.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Rendahnya keaktifan LSM, atau masih terdapat LSM tidak aktif yang mencapai 7,22% tahun 2021. Penyebab tidak aktif LSM mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan kelembagaan terutama terbatasnya sumber pembiayaan, sumber informasi yang terbatas, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebijakan dan sebagainya.
2	Masih terdapat 11,36% desa atau 28 desa yang belum memiliki kantor desa yang layak dari 250 desa tahun 2021. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kecepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
3	Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah masih lemahnya pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat hanya 12,20% tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh masih tingginya ketergantungan perekonomian masyarakat masih pada alam; rendahnya kualitas sumber daya manusia; minimnya sarana dan prasarana desa, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, buruknya aksesibilitas transportasi dan komunikasi.
4	Masih terdapat 23 desa yang dalam kategori desa sangat tertinggal dari 250 desa yang ada.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang belum menjadi rasio akseptor KB tahun 2021 hanya sebesar

No	Permasalahan
	41,10%. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya keluarga miskin yang tidak tertampung dalam Jamkesmas belum tentu dapat tertampung dalam Jamkesos ataupun Jamkesda.
Perhubungan	
1	Masih rendahnya kesediaan rambu-rambu lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2021 hanya sebanyak 172 unit dari kebutuhan. Rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akibat kurang tersedianya anggaran yang memadai. Selain itu beberapa lokasi yang rawan kecelakaan justru rambu-rambu lalu lintas yang hilang, terutama disebabkan lokasi pemasangan rambu rambu lalu lintas tersebut kurang berkoordinasi dengan instansi terkait di kabupaten pasalnya ditempatkan pada titik yang kurang ada pengawasan.
2	Semakin tingginya kepadatan jalan raya dimana rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tahun 2021 sebesar 30,00 km per kendaraan. Oleh karena itu risiko tinggi angka kecelakaan jalan raya semakin tinggi jika rasio panjang jalan dengan kondisi baik semakin berkurang dan kemampuan menyediakan rambu-rambu jalan yang terbatas serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan jalan raya.
Komunikasi dan Informatika	
1	Masih rendahnya akses internet rumah tangga yang terdapat di wilayah ini. Ini ditunjukkan dengan adanya jumlah rumah tangga yang belum dapat mengakses internet 30,95% pada tahun 2021. Faktor pertama yaitu keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kurang mampunya masyarakat untuk membeli perangkat TIK ataupun berlangganan pada akses internet, berlangganan akses internet yang menurut mereka cukup mahal selain itu juga faktor kondisi wilayah yang belum sepenuhnya terdapat sarana dan parasarana telekomunikasi.
2	Belum semua OPD memiliki website sendiri, dan sudah memiliki belum terkoneksi satu sama lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar. Selain itu data dan informasi pembangunan belum tersedia secara lengkap dan ter update dimasing-masing OPD terutama untuk data kinerja OPD sebagai acuan dalam kebutuhan perencanaan pembangunan.
3	Belum tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi.
4	Terjadinya penurunan jumlah RT yang memiliki komputer pribadi sebesar 3,85% per tahun. Kondisi ini dapat menyebabkan turunnya produktifitas dalam hal kemampuan mendapatkan informasi yang dapat menunjang peningkatan keinerja dalam pengelolaan usaha.
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1	Masih terdapat 366,30% koperasi yang tidak aktif dari jumlah koperasi yang terdaftar di OPD terkait. Penyebab tidak aktif koperasi karena sisa hasil usaha atau laba yaitu kurang mampu membukukan kegiatan, kurang mampu mengelola keuangan (manajemen keuangan), penggunaan teknologi kurang (manajemen operasional), kurang mampu mengelola produk (manajemen produksi), kurang mampu membuat anggaran (perencanaan) dan keterbatasan pengetahuan (Skill) hasil ini tidak sesuai dengan kualitas kinerja organisasi yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
2	Masih rendahnya kemampuan pendataan kondisi perkembangan kemampuan pengelolaan usaha. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
Penanaman Modal	
1	Walaupun Terjadi peningkatan jumlah investor tahun 2021 dengan tingkat peningkatan selama periode 2017-2021 sebesar 73,21% per tahun.
2	Peningkatan investasi belum mampu menjadi lokomotif dalam pengurangan angka penangguran dan penurunan kemiskinan di wilayah ini. Sehingga jumlah angka kemiskinan masih termasuk tinggi.
3	Perlunya mendorong investor lokal untuk investasi pada industri hilir kelapa sawit dan karet serta sub sektor perikanan budidaya.
Kepemudaan dan Olahraga	
1	Belum maksimalnya pembinaan terhadap pemuda terutama dalam bidang ekonomi masih belum maksimal. Kenyataan ini dapat dilihat dari masih kecilnya jumlah usahawan muda di Kabupaten Kampar.
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif. Permasalahan dalam bidang kepemudaan dan olahraga adalah masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan. Pembinaan terhadap bibit unggul sebagai regenerasi atlet belum dilakukan secara baik.
Statistik	
1	Masih terbatasnya data, khususnya data statistik sektoral untuk kebutuhan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor.

No	Permasalahan
2	Masih terbatasnya pendataan secara sectoral yang akurat, valid dan up to date serta ter up date secara berkala.
3	Belum sepenuhnya data kebutuhan perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan yang mengacu pada undang-undang 23 tahun 2014.
Persandian	
1	Persentase perangkat daerah yang sudah menggunakan layanan persandian di Kabupaten Kampar mencapai 56%. Namun demikian sistem elektronik daerah di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan data yang menjadi kebutuhan perencanaan dan publik.
Kebudayaan	
1	Belum semua acara event yang diadakan tersosialisasi dengan baik, sehingga sebagian event yang dilaksanakan tidak diketahui masyarakat secara umum.
2	Permasalahan dalam urusan kebudayaan adalah masih belum optimalnya pelestarian budaya khususnya Budaya Melayu. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah karya seni budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.
3	Belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya Budaya Melayu Riau di lingkungan Sekolah (ekstrakurikuler) dan ruang umum (publik).
Perpustakaan	
1	Permasalahan pada Perpustakaan Daerah adalah masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah pengunjung terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani hanya tumbuh sebesar 1,81% pada tahun 2017-2021.
2	Koleksi buku yang dimiliki belum terdigitalisasi secara optimal sebagian besar mengandalkan hardcopy.
Kearsipan	
1	Persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku dari sebelumnya belum menggunakan (tidak ada) meningkat menjadi 80% pada tahun 2021.
2	Masih peningkatan kapasitas SDM kearsipan sehingga masih rendahnya kualitas pengelola kearsipan.

2.6.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis permasalahan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Kampar, yaitu Bidang yaitu Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Permasalahan masing-masing urusan pilihan tersebut di sajikan pada Tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.179
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Permasalahan
Kelautan dan Perikanan	
1	Terjadinya penurunan produksi perikanan air tawar sebesar 11,65% per tahun dan keramba -9,35% per tahun.
2	Terjadinya penurunan rasio konsumsi ikan dari target nasional dengan kecenderungan pertumbuhan -5,19% per tahun selama tahun 2017-2021.
3	Cakupan bina kelompok nelayan meningkat sebesar 13,64% per tahun dari jumlah kelompok yang ada. Sehingga kondisi belum mampu meningkatkan konsumsi ikan per kapita akibat laju pertumbuhan produksi lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan permintaan.
Pariwisata	
1	Masih rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan pertumbuhan -4,48% per tahun dan rata-rata lama menginap hanya 1-7 hari. Rendahnya kunjungan wisatawan ke wilayah ini disebabkan oleh minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung, masih rendahnya kualitas pelayanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2	Masih rendahnya kontribusi PAD pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kampar hanya sebesar 0,035% pada tahun 2021. Penyebab masih rendah penerimaan PAD dari sektor pariwisata karena belum terkelolanya objek wisata secara optimal.
Pertanian	

No	Permasalahan
1	Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan tanaman pangan dan belum tergarapnya lahan pertanian berkelanjutan, sehingga produksi pangan beras terus mengalami penurunan. Penyebab utama belum optimalnya intensitas pemanfaatan lahan tanaman pangan karena kondisi infrastruktur irigasi yang dalam kondisi rusak sebesar 36,75% dari panjang irigasi yang ada.
2	Peningkatan produktifitas tanaman padi sebesar 2,78% per tahun. Hal ini belum mampu meningkatkan ketersediaan akibat belum optimalnya pelaksanaan praktek pertanian terbaik (Good Agricultural Practices) terutama terkait dengan precision farming.
3	Terjadinya penurunan luas areal panen padi sebesar -10,46% per tahun. Penurunan luas panen terutama disebabkan oleh turunnya intensitas pemanfaatan lahan.
4	Terjadinya penurunan produktivitas ternak selama periode 2017-2021 terutama ternak unggas. Penyebabnya berkurangnya produksi ternak unggas terutama terbatasnya cadangan pakan dan kurangnya edukasi cara membuat pakan cadangan seperti pembuatan pakan lokal. Agar pakan tetap tersedia dan campur tangan pemerintah serta dunia swasta agar tidak terus menerus berkurang.
5	Masih terdapat kelompok tani sebanyak 229 yang belum dikukuhkan pada tahun 2021.
Perdagangan	
1	Terjadinya trend penurunan penjualan CPO keluar mengalami penurunan sebesar -1,75% per tahun. Sementara trend jumlah beras masuk ke wilayah ini mengalami peningkatan sebesar 7,22% per tahun. Penyebab utama berkurangnya CPO keluar dan bertambahnya beras masuk akibat dari penurunan produksi CPO dan beras di wilayah ini. Kinerja perdagangan baik keluar dan masuk Kabupaten Kampar diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan diwilayah ini.
2	Penurunan perdagangan migas juga terjadi dikarenakan turunnya harga komoditas di pasar global sehingga memicu penurunan jumlah ekspor ke negara-negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, India dan Tiongkok.
Perindustri	
1	Belum berkembangnya industri hilir berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Kampar yang kaya akan sumberdaya alam baik di darat maupun di laut masih mengandalkan pada ekspor produk-produk primer dan produk-produk antara dalam mengembangkan perekonomiannya. Belum berkembangnya industri hilir sektor tambang dan non migas sebagai keunggulan komparatif Kabupaten Kampar menyebabkan manfaat yang diperoleh masyarakat wilayah masih sangat rendah. Dengan mengembangkan industri hilir yang menghasilkan produk-produk yang siap saji dan siap konsumsi akan meningkatkan nilai tambah produk yang dinikmati masyarakat Kabupaten Kampar. Pengembangan industri hilir mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar mampu meningkatkan keunggulan komparatif yang dimiliki menjadi keunggulan kompetitif.
2	Belum maksimalnya operasi kawasan industri kecil karena masih terbatasnya sarana dan prasarana dan memerlukan waktu untuk pengembangannya.
3	Terbatasnya pembinaan kelompok pengrajin. Sementara IKM dari pengrajin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat kelembagaan usaha UMKM yang tumbuh 39,23% per tahun. Padahal produk industri kerajinan sangat berguna dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini.

2.6.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan daerah dari penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengawasan dan Secretariat Daerah dan Secretariat DPRD dijelaskan sebagaimana Tabel 2.180 berikut.

Tabel 2.180

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Permasalahan
Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten. Konsistensi antar dokumen perencanaan baik terhadap pusat maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan secara bersama-sama, konsisten atau tidaknya dokumen perencanaan dapat

No	Permasalahan
	dilakukan dengan penyesuaian. Di sisi lain dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antar wilayah.
2	Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang baik dan komprehensif pada tahapan input perencanaan, dibutuhkan basis data dan informasi yang valid, up to date, dan akuntabel agar dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh. Dengan keterbatasan data dan informasi yang dimiliki, belum mampu menggambarkan kondisi Kabupaten Kampar, walaupun secara letak geografis berada pada posisi strategis.
Keuangan	
1	Terjadinya peningkatan SILPA dari APBD, kondisi ini menggambarkan efektifitas perencanaan dan atau masih tingginya porsi belanja terhadap risiko ketidakpastian
2	Masih rendahnya rasio belanja langsung terhadap total APBD sebesar sebesar 2,04% dari tahun 2017-2021.
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
1	Berkurangnya jumlah pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
2	Menurunnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dengan penurunan -2,01% per tahun.
Penelitian dan Pengembangan	
1	Terbatasnya data persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.
2	Penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah (RPD). Penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya menunjang tujuan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPD) Kabupaten Kampar, tujuan pembangunan pada bidang ekonomi misalnya lebih difokuskan kepada peningkatan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumber daya alam, di kala migas tidak menjadi sektor utama dalam pembentuk PDRB Kabupaten Kampar.
Pengawasan	
1	Belum tersedianya data tindak lanjut dari fungsi pengawasan terdiri dari jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tindak lanjut dalam proses dan belum ditindak lanjut.
2	Masih terjadinya pelanggaran kedisiplinan oleh pegawai. Kondisi ini akan menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Sekretariat DPRD	
1	Belum optimalnya sistem informasi yang terkait dengan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD selama lima tahun.

2.6.2.5 Aspek Daya Saing

Permasalahan dari aspek daya saing daerah yang meliputi kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.181

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Aspek Daya Saing Daerah

No	Permasalahan
Kemampuan Ekonomi Daerah	
1	Terjadinya penurunan pertumbuhan total konsumsi RT perkapita berdasarkan harga konstan dengan pertumbuhan -2,98% pertahun sementara berdasarkan per RT tumbuh -2,72% per tahun. Kondisi ini

No	Permasalahan
	menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi akibat peningkatan harga terhadap konsumsi Rumah Tangga. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan <i>quantitas</i> dan kualitas konsumsi Rumah Tangga..
2	Nilai Tukar Petani hanya tumbuh 0,72% per tahun sementara nilai yang harus dibayar oleh petani tumbuh sebesar 5,87% per tahun. Upaya peningkatan NTP dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.
3	Terjadinya penurunan rasio konsumsi perkapita non pangan. Untuk harga berlaku dengan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,69% per tahun sementara berdasarkan harga konstan turun sebesar -0,63% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena rasio konsumsi non pangan terus mengalami penurunan lima tahun terakhir.
Fasilitas Wilayah Atau Infrastruktur	
1	Menurunnya kemampuan rasio infrastruktur jalan yang baik untuk menampung jumlah kendaraan yang rasionya peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan sebesar 9,40% per tahun. Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik yang hanya tumbuh sebesar 2,51% per tahun. Sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan darat akibat dari tingginya rasio jalan yang masih dalam kondisi rusak. Rendahnya percepatan pertumbuhan kondisi jalan yang baik disebabkan proporsi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mengalami penurunan akibat penurunan kemampuan keuangan daerah.
2	Masih terdapat 5,23% jumlah wilayah yang dapat dilalui dengan kendaraan roda empat. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa serta sulitnya melakukan optimalisasi peningkatan pemantauan sumberdaya alam yang tersedia dan berisiko terhadap peningkatan angka inflasi daerah.
3	Belum sepenuhnya luas wilayah budidaya dapat diproduktifkan. Kondisi ini dapat dilihat dari rasionya pada tahun 2021 sebesar 91,71%. Disisi lain peruntukan wilayah produktif sebelum sepenuhnya dioptimalkan pemanfaatannya hingga tahun 2021. Sehingga kondisi ini belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya belanja atau konsumsi non pangan.
4	Rendahnya rasio wilayah industri yang diperuntukkan dalam RTRW hanya 0,64% dari luas budidaya, sehingga pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih elastis sangat lambat. Padahal wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam atau bahan baku yang dapat menjadi bahan baku atau supplier terhadap sektor industri.
Iklim Berinvestasi	
1	Masih tingginya angka kriminalitas terutama kasus pencurian dan penganiayaan selama periode 2017-2021. Tentunya kondisi ini sangat mengganggu kelancaran perkembangan investasi. Disisi lain ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti ketersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya di wilayah peruntukan kawasan industri masih juga menjadi persoalan hingga saat ini.
Sumber Daya Manusia	
1	Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di kabupaten Kampar. Dimana pendidikan tinggi untuk jenjang pendidikan S1/D4, S2 dan S3 baru mencapai 7,56% dari jumlah penduduk angkatan kerja di kabupaten Kampar.
2	Rasio ketergantungan cukup tinggi hingga tahun 2021 masih mencapai 46,42% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Tentunya kondisi ini berimplikasi pada beban bagi umur produktif dan pemerintah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kampar memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian Provinsi Riau, nasional dan global yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*. Untuk tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 masih akan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada upaya "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 juga tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan evaluasi capaian triwulan II tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Oleh karena itu faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah yang berbasis keunggulan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perkembangan perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPD Kabupaten Kampar, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Kampar dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi RPJPD yang juga sudah dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2018-2023

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu

indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Perkembangan kondisi tersebut terakumulasi dalam kondisi makro ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku diperkirakan masih akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, kecuali pada tahun 2020 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2022 -2023. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku secara keseluruhan pada tahun 2018 sebesar Rp 77.152,93 miliar menurun menjadi Rp. 73.076,30 tahun 2020 dan meningkat kembali tahun 2021 menjadi Rp 86.670,33 miliar dan esimasi tahun 2020-2023 naik masing-masing menjadi Rp 88.113,19 miliar tahun 2022 dan 89.275,68 tahun 2023. Namun demikian secara keseluruhan dari tahun 2018-2023 meningkat sebesar 4,02%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Realisasi				Estimasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	30.050,45	31.716,08
B	Pertambangan dan Penggalian	28.297,52	25.027,29	17.914,02	22.983,91	21.709,90	19.973,30
C	Industri Pengolahan	17.000,87	18.155,69	18.951,56	22.053,03	23.062,35	24.189,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,16	47,81	52,80	55,53	56,50	57,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,91	4,01	4,05	4,26	4,29	4,30
F	Konstruksi	5.439,62	5.907,26	5.734,65	6.183,68	6.264,66	6.305,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.605,67	2.871,41	2.548,58	2.960,36	2.994,56	3.008,35
H	Transportasi dan Pergudangan	237,61	262,55	255,69	277,10	288,88	300,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,70	70,89	60,57	68,82	68,96	68,62
J	Informasi dan Komunikasi	287,47	311,15	336,51	361,25	365,84	369,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322,67	328,94	340,28	376,53	387,46	398,38
L	Real Estat	708,73	761,45	779,21	812,03	812,63	808,19
M, N	Jasa Perusahaan	2,67	2,97	2,43	2,45	2,49	2,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.115,60	1.135,65	1.153,78
P	Jasa Pendidikan	385,86	425,17	447,55	465,74	472,47	476,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,77	157,02	182,09	204,83	209,57	213,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	236,32	264,37	212,15	223,07	226,54	229,24
PDRB		77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	88.113,19	89.275,68

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2022

Perkembangan perekonomian secara struktural juga dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Kampar selama tahun 2018-2021 dan estimasi tahun 2022-2023. Tabel 3.2 menggambarkan struktur ekonomi menurut sektor berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kampar didominasi sektor pertanian dengan kekuatan berasal dari sub sektor perkebunan. Sektor ekonomi sebagai kontributor terbesar kedua adalah sumbangan sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan dari 22,04% tahun 2018 diperkirakan meningkat menjadi 27,10% tahun 2023. Sementara sektor pertambangan dan penggalian, walaupun masih memberikan kontribusi di atas 20% namun terus mengalami penurunan kontribusi dari 36,68% tahun 2018 dan diperkirakan akan menurun menjadi 22,37% tahun 2023. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi tahun 2018-2021 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,94% dan tahun 2022-2023 diperkirakan rata-rata pertumbuhan kontribusinya sedikit akan menurun menjadi sebesar -0,18%. Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial walaupun tidak terlalu signifikan. Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa lainnya. Walaupun secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB tahun selama tahun 2022-2023.

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2023 (Persen)

No	Sektor	Realisasi				Estimasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,30	27,84	33,04	32,91	34,10	35,53
B	Pertambangan dan Penggalian	36,68	32,39	24,51	26,52	24,64	22,37
C	Industri Pengolahan	22,04	23,50	25,93	25,44	26,17	27,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	7,05	7,65	7,85	7,13	7,11	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,38	3,72	3,49	3,42	3,40	3,37
H	Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,34	0,35	0,32	0,33	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,40	0,46	0,42	0,42	0,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,43	0,47	0,43	0,44	0,45
L	Real Estat	0,92	0,99	1,07	0,94	0,92	0,91
M, N	Jasa Perusahaan	0,0035	0,0038	0,0033	0,0028	0,003	0,003
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,41	1,50	1,52	1,29	1,29	1,29
P	Jasa Pendidikan	0,50	0,55	0,61	0,54	0,54	0,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,20	0,25	0,24	0,24	0,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,34	0,29	0,26	0,26	0,26
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2022

Sementara itu PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan diestimasi tahun 2022-2023 diperkirakan masih tetap akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, kecuali pada

tahun 2020 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2022 -2023. Nilai PDRB atas harga konstan secara keseluruhan pada tahun 2018 sebesar Rp 49.958,84 miliar meningkat menjadi Rp 53.196,37 miliar tahun 2021 dan esimasi tahun 2022-2023 naik masing-masing menjadi Rp 54.537,32 miliar tahun 2022 dan 56.071,70 tahun 2023. Secara keseluruhan dari tahun 2018-2023 meningkat sebesar 2,27%.

Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi tahun 2018-2021, rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 0,15% dan tahun 2022-2023 diperkirakan rata-rata pertumbuhan kontribusinya akan menurun sebesar -0,01%. Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial walaupun tidak terlalu signifikan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Realisasi				Estimasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	19.188,30	20.280,12
B	Pertambangan dan Penggalian	12.362,26	11.628,28	10.889,94	10.566,70	10.018,11	9.506,01
C	Industri Pengolahan	14.668,08	16.051,38	15.900,07	16.568,64	17.245,68	17.969,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,01	26,89	29,18	30,70	32,52	34,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,96	2,97	2,99	3,14	3,18	3,24
F	Konstruksi	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.527,06	3.597,60	3.705,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.631,83	1.716,90	1.466,20	1.690,37	1.741,46	1.780,30
H	Transportasi dan Pergudangan	162,60	170,63	156,80	165,80	168,78	170,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,64	45,45	38,04	42,80	43,55	44,04
J	Informasi dan Komunikasi	214,85	227,22	245,93	262,93	277,47	292,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	238,84	239,42	248,66	261,12	269,58	278,59
L	Real Estat	487,88	514,51	524,58	540,93	560,21	579,96
M, N	Jasa Perusahaan	1,87	1,99	1,59	1,61	1,58	1,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	830,10	870,31	810,96	806,24	806,97	820,05
P	Jasa Pendidikan	252,82	272,27	280,36	289,77	301,07	312,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,62	97,35	110,36	122,84	131,88	141,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	166,71	182,20	142,70	148,88	149,37	150,76
PDRB		49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	54.537,32	56.071,70

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2022

Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi antara lain sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan jasa lainnya. Walaupun secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB tahun selama tahun 2022-2023.

Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan berada di atas perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi unggulan walaupun kondisinya belum tergarap secara maksimal, juga didukung oleh kondisi ekonomi makro yang cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali. Tingkat perekonomian Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 2018-2021 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan pasca terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 ditahun 2020.

Tabel 3.4
Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2023 (Persen)

No	Sektor	Realisasi				Estimasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,89	31,45	33,38	34,15	35,18	36,17
B	Pertambangan dan Penggalian	24,74	22,41	21,18	19,86	18,37	16,95
C	Industri Pengolahan	29,36	30,93	30,92	31,15	31,62	32,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,70	6,79	6,63	6,63	6,60	6,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,27	3,31	2,85	3,18	3,19	3,18
H	Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,33	0,30	0,31	0,31	0,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,44	0,48	0,49	0,51	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	0,46	0,48	0,49	0,49	0,50
L	Real Estat	0,98	0,99	1,02	1,02	1,03	1,03
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,66	1,68	1,58	1,52	1,48	1,46
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,52	0,55	0,54	0,55	0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,33	0,35	0,28	0,28	0,27	0,27
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Perkembangan kondisi perekonomian berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, menggambarkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertambahan produksi barang dan jasa Kabupaten Kampar tahun 2018-2021 dan estimasi tahun 2022-2023 juga masih tetap sangat didominasi oleh sumberdaya alam. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada. Tingginya nilai produksi barang dan jasa dari sektor pertanian terutama didukung oleh perkembangan produksi barang dan jasa dari sub sektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit dan karet serta hasil perikanan budidaya.

Selanjutnya perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,86%, dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar 1,91%, namun pertumbuhan ekonomi menurun drastis menjadi sebesar -0,90% pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi *Covid-19* diseluruh Indonesia, provinsi Riau dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar, sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor terutama perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Akibat dari rendahnya angka pertumbuhan yang berada pada level negatif, hal ini berakibat pula pada angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2022-2023. Angka pertumbuhan pada level 3,45% pada tahun 2021, sedangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi

tahun 2022-2023 masing-masing sebesar 2,51 dan 2,81%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2021 dan estimasi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen)

No	Sektor	BPS				Estimasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,73	5,19	5,83	5,62	5,69
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,51	-5,94	-6,35	-2,97	-5,19	-5,11
C	Industri Pengolahan	3,65	9,43	-0,94	4,20	4,09	4,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,64	3,36	8,55	5,18	5,93	5,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	-0,12	0,45	0,69	4,93	1,48	1,89
F	Konstruksi	3,46	5,21	-3,29	3,53	2,00	3,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	6,19	5,21	-14,60	15,29	3,02	2,23
H	Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,93	-8,10	5,74	1,80	1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	6,57	-16,29	12,51	1,74	1,13
J	Informasi dan Komunikasi	2,09	5,76	8,24	6,91	5,53	5,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	0,24	3,86	5,01	3,24	3,34
L	Real Estat	3,72	5,46	1,96	3,12	3,56	3,52
M, N	Jasa Perusahaan	4,94	6,53	-20,32	1,53	-1,83	1,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	2,92	4,84	-6,82	-0,58	0,09	1,62
P	Jasa Pendidikan	5,88	7,69	2,97	3,36	3,90	3,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	11,11	13,36	11,31	7,36	7,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,37	9,29	-21,68	4,33	0,33	0,93
PDRB		1,91	3,86	-0,90	3,45	2,51	2,81

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

Estimasi pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2023 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan rentang antar 1,31-5,51%, kecuali Kabupaten Bengkalis yang hanya diestimasi berkisar antara 0,38-0,89%. Sementara itu estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 2,81% dan angka optimis sebesar 3,60%. Walaupun estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2023 menjadi 2,81-3,60% kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang hanya sebesar 3,49%. Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2023 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, pertumbuhan Kabupaten Kampar diestimasi akan mampu tumbuh secara dinamis melampaui target Provinsi Riau sehingga diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis, karena adanya dukungan dari sektor perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2022-2023 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat, perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta peningkatan nilai perdagangan yang lebih proporsional.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebesar 7,38% kemudian meningkat menjadi 7,82% pada tahun 2021. Namun demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi Riau yang hanya sebesar 7,12% tahun 2021. Artinya jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena pertambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin.

Estimasi tingkat kemiskinan yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2023 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami penurunan dengan rentang antar 2,33-24,05%. Estimasi target penurunan angka kemiskinan terendah terdapat di Kota Pekanbaru yang hanya berkisar antara 2,33-2,63%. Sementara estimasi angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,31-24,05%. Sementara itu untuk Kabupaten Kampar target penurunan angka kemiskinan berkisar antara 6,43-7,46% tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi penurunan kemiskinan Kabupaten Kampar tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penurunan angka kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,65-6,31%. Estimasi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Estimasi tingkat pengangguran yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2023 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami penurunan dengan rentang antar 0,28-7,78%. Sementara itu estimasi tingkat pengangguran Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 3,48% dan angka optimis sebesar 3,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi tingkat pengangguran Provinsi Riau sebesar 3,92-4,12%. Estimasi tingkat pengangguran Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Sementara itu IPM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programme) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity*/PPP). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Untuk Kabupaten Kampar terjadinya perbaikan IPM hal tersebut dapat dilihat dari IPM tahun Kabupaten Kampar tahun 2020 sebesar 72,83 kemudian meningkat menjadi 73,23 tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,21.

Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2023 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami peningkatan dengan rentang antar 66,34-82,40. Sementara itu estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 73,48% dan angka optimis sebesar 73,55. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau sebesar 73,43-73,69. Estimasi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

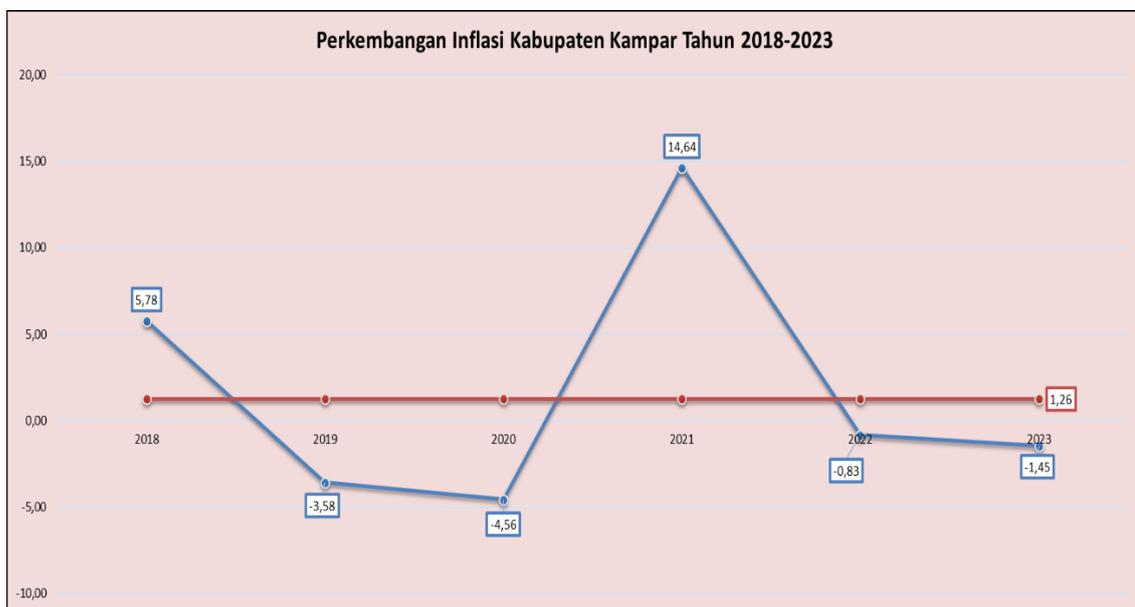
Tabel 3.6
Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				Tingkat Kemiskinan (%)				Tingkat Pengangguran (%)				Indeks Pembangunan Manusia			
		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	0,97	3,55	2,95	3,19-3,82	8,91	8,97	8,49	7,99-8,21	5,21	2,06	1,81	0,28-1,53	70,31	70,60	70,83	71,28-71,75
2	Indragiri Hulu	-0,12	4,51	3,46	3,58-4,23	5,96	6,18	6,02	5,46-5,78	4,91	3,32	3,02	2,69-2,94	69,83	70,01	70,58	70,97-71,13
3	Indragiri Hilir	0,34	4,44	3,86	4,07-4,78	5,93	6,18	5,90	5,30-5,59	4,35	2,66	2,52	2,24-2,51	66,54	66,63	67,01	67,48-67,92
4	Pelalawan	2,25	4,07	3,08	3,23-3,95	9,16	9,63	9,46	8,84-9,24	5,99	2,34	2,25	1,74-1,76	71,56	72,08	72,31	72,58-72,80
5	Siak	-0,10	2,31	1,41	1,47-1,82	5,09	5,18	5,17	4,54-4,88	5,80	4,34	4,03	3,02-3,90	73,68	73,98	74,07	74,34-74,48
6	Kampar	-0,90	3,45	2,51	2,81-3,60	7,38	7,82	7,76	6,43-7,46	6,15	4,27	3,78	3,16-3,48	72,83	73,02	73,23	73,48-73,55
7	Rokan Hulu	1,52	4,98	4,37	4,48-4,72	10,31	10,40	10,20	9,13-9,92	4,42	2,25	2,14	1,05-1,74	69,38	69,67	69,98	70,38-70,72
8	Bengkalis	-3,30	0,51	0,26	0,38-0,89	6,40	6,64	6,37	5,45-6,19	9,31	6,63	6,30	5,44-6,16	73,46	73,58	73,94	74,22-75,59
9	Rokan Hilir	-0,96	1,67	1,28	1,31-1,96	6,72	7,18	6,97	5,88-6,30	4,80	3,25	3,07	2,26-2,51	69,15	69,34	69,70	70,11-70,46
10	Kep Meranti	0,43	2,56	2,43	2,87-3,86	25,28	25,68	24,31	23,31-24,05	7,94	4,43	4,15	3,15-3,80	65,50	65,70	66,12	66,34-66,71
11	Pekanbaru	-4,41	5,24	4,60	4,73-5,51	2,62	2,83	2,71	2,33-2,63	8,56	8,29	8,09	7,05-7,78	81,32	81,58	81,84	82,24-82,40
12	Dumai	-1,04	5,98	4,04	4,19-4,90	3,16	3,42	3,23	2,89-3,17	8,19	6,29	6,13	4,79-5,92	74,40	74,75	74,97	75,32-75,77
	Provinsi Riau	-1,13	3,36	2,69	3,04-3,49	6,82	7,12	6,78	6,65-6,31	6,32	4,42	4,40	4,12-3,92	72,71	72,94	73,19	73,43-73,69

Sumber: BPS dan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama 1 Tahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun. Sementara itu nilai inflasi sebesar 0,15% - 0,20%. Berdasarkan Gambar 3.1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahun 2023 diperkirakan terjadi penurunan menjadi -1,45% dengan rata-rata inflasi selama 5 tahun 1,26% per tahun.



Gambar 3.1
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah termasuk Kabupaten Kampar. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dari setiap sektor ekonomi dalam kurun waktu tahun 2023. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, barang modal baru atau bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2023 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas

pembangunan pada semua sektor dari semua kalangan masyarakat, bukan investasi dari PMA dan PMDN yang tercatat pada instansi terkait. Perkembangan investasi dan estimasi PMTB dan ICOR Kabupaten Kampar berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi				Estimasi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perubahan PDRB HK (ΔY)	836.954,20	884.946,50	846.769,60	1.001.446,30	1.021.466,67	1.091.814,35
PMTB AD-HK	14.710.701,33	15.276.627,29	15.802.436,70	15.586.540,32	16.519.511,17	16.852.786,44
ICOR	17,58	17,26	18,66	15,56	16,17	15,44

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

Hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1,00% pada tahun 2023, maka dibutuhkan investasi baru senilai Rp. 15,44 triliun atau dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 2,81-3,60%, maka dibutuhkan investasi Rp.43,39-55,58 triliun. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan masuknya investasi dari pihak swasta, pemerintah dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke di daerah dan luar daerah serta ke luar negeri. Banyaknya pertambahan jumlah produksi dan jasa akan menjadi pendorong peningkatan PDRB HK atau laju pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Oleh sangat diperlukan faktor pendukung meningkatnya investasi terutama kebijakan pemerintah baik pusat, Provinsi Riau dan Kabuapten Kampar. Selain itu menjaga stabilitasi, mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan memicu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Kondisi seperti ini memerlukan optimisme dan integritas yang kuat untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi termasuk yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ekonomi tentunya akan meningkatnya kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja di tahun 2023. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 (Orang)

Kegiatan Utama	BPS					Estimasi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	420.359	437.312
Bekerja	328.160	352.470	345.195	364.698	376.764	397.184	414.496
Pengangguran Terbuka	20.686	20.305	21.954	23.911	16.797	23.176	22.817
Bukan Angkatan Kerja	221.493	215.394	235.676	220.647	230.520	221.554	222.034
Sekolah	72.545	64.084	61.277	60.454	58.039	59.911	59.642
Mengurus Rumah Tangga	126.353	127.192	143.135	135.959	143.730	138.242	139.397
Lainnya	22.595	24.118	31.264	24.234	28.751	23.400	22.995
Jumlah	570.339	588.169	602.825	609.256	624.081	641.913	659.346
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,93	5,45	5,98	6,15	4,27	3,73	3,48

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2023, sehingga akan memberikan dampak terhadap kondisi pengangguran terbuka yang diperkirakan menurun menjadi 3,48% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,81-3,60% pada tahun 2023 diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata. Estimasi nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 0,30. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akan terjadi adanya angka ketimpangan rendah. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan akibat masih belum terdistribusinya asset produktif pada masyarakat terutama sector-sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti perkebunan terutama komoditas kelapa sawit.

Hal ini juga akan memberikan implikasi terdapat kesenjangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa peristiwa karena adanya dampak kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Pengaruh pandemi Covid-19, gejolak harga BBM dan BBG dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, sangat berdampak pada kondisi perekonomian secara Kabupaten Kampar. Dengan kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kabupaten Kampar yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2023, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 7,19%, penduduk berpendapatan sedang menerima 7,28%, sedangkan penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 85,53%.

Tabel 3.9
Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2023

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan yang Diterima						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	14,90	13,54	12,02	10,42	8,79	7,19
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	25,32	20,77	16,67	13,05	9,92	7,28
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	59,77	65,70	71,31	76,53	81,29	85,53
Index Gini Ratio	-	0,293	0,300	0,306	0,281	0,310	0,300

Sumber: Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2017-2022

Berdasarkan Tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$, dimana Angka Indeks Gini Rasio tahun 2023 sebesar 0,30. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Standar hidup layak juga menjadi salah satu dimensi yang dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di samping pengetahuan, serta dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Dampak pandemi *Covid-19* yang dirasakan oleh seluruh masyarakat mengakibatkan penurunan kemampuan pengeluaran perkapita, terutama untuk wilayah perkotaan. Hal yang menahan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dimana pada tahun ini seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau mengalami penurunan. Perkiraan pada tahun 2023, pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Provinsi Riau mencapai Rp 10.847.000 pertahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar sebesar Rp 10.881.000. Sedangkan untuk angka perkapita tertinggi di Provinsi Riau dicapai oleh Kota Pekanbaru sebesar Rp 14.494.000 per tahun.

Tabel 3.10
Pengeluaran Perkapita Penduduk Provinsi Riau Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	10.274	10.476	10.820	10.243	10.309	10.376	10.409
Indragiri Hulu	10.223	10.481	10.738	10.202	10.260	10.319	10.349
Indragiri Hilir	10.041	10.254	10.382	9.954	9.945	9.968	9.979
Pelalawan	11.725	11.894	12.149	11.606	11.672	11.691	11.701
Siak	11.898	12.119	12.347	11.799	11.807	11.843	11.862
Kampar	10.912	11.128	11.232	10.796	10.858	10.873	10.881
Rokan Hulu	9.303	9.608	9.979	9.374	9.406	9.418	9.424
Bengkalis	11.530	11.640	11.753	11.331	11.415	11.428	11.435
Rokan Hilir	9.250	9.316	9.672	9.362	9.417	9.427	9.432
Kepulauan Meranti	7.673	7.978	8.358	7.790	7.780	7.794	7.801
Pekanbaru	14.547	14.778	15.206	14.433	14.360	14.449	14.494
Dumai	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	11.835	11.844
Provinsi Riau	10.677	10.968	11.255	10.675	10.736	10.810	10.847

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2016-2021 dan Estimasi 2022-2023

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2018-2023 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2023 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
2. Kondisi tersebut terjadi karena lambatnya perubahan struktur perekonomian yang ditandai dengan peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,69% terutama yang bersumber dari subsektor perkebunan pada tahun 2023. Oleh karena kondisi ini harus dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pengembangan dan peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,19% dan didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan walaupun hanya sebesar 2,23%. Namun demikian sektor yang juga memberikan kontribusi yang masuk dalam empat besar yaitu pertambangan dan penggalian diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar -5,11%. Namun diharapkan penurunan tersebut dapat ditutupi dengan

adanya pertumbuhan sector lainnya terutama sector jasa, seiring dengan kebijakan pemulihan pasca *Covid-19*. Kondisi ini diharapkan akan segera dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;

3. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah dapat di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi harus menjadi prioritas menginagt kondisi yang akan dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global dan stabilitas politik dunia yang diperkirakan akan terus berlangsung sehingga harus adanya upaya kebijakan penggantian import terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
4. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejala harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta perkiraan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di atas 3,50%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
5. Perkiraan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar 7,46%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
6. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
7. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik dan gas, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah. Faktor eksternal lainnya adalah masih adanya ekses pandemi *Covid-19*, akan berdampak terhadap kondisi perekonomian yang juga menjadi hambatan dalam percepatan laju pertumbuhan ekonomi.
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu 2018-2021 dan perkembangan saat ini, dan perkiraan kondisi perekonomian pada tahun 2023, maka untuk menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain:

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar harus dikelola secara efektif dan efisien serta berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan pembangunan yang progresif, terarah dan terstruktur;
2. Perlunya upaya percepatan pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier dengan memanfaatkan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol Pekanbaru-Bangkinag dan Air bersih terutama air minum SPAM regional Pekanbaru Kampar. Kebijakan ini akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB baik ADHB dan ADHK;
3. Kebijakan sinkronisasi pembangunan infrastruktur jalan fider dan pendukung lainnya, irigasi dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan harus menjadi pendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 2,81-3,60% di tahun 2023, memang masih dibutuhkan penambahan investasi baru dari investasi yang sudah ada dan selain itu mendorong peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Selain itu perlu optimisme akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar dan tetap memprioritaskan masyarakat lokal. Oleh karena itu terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
7. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun pasar internasional dan sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat Provinsi Riau, Nasional, maupun Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2023 adalah:

1. Perekonomian nasional yang fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi *Covid-19* dan masih dirasakan eksisnya hingga saat ini dan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi sekitar 5,30-5,90% dan jika dapat dicapai maka pada gilirannya akan terjadi perubahan alokasi APBN yang membantu peningkatan dana perimbangan yang sebelumnya mengalami penurunan;
2. Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diprediksikan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 2,81-3,60%

dan pada saat yang sama diprediksikan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi akan naik masing-masing sebesar 5,22% dan 3,99%;

3. Porsi belanja APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja terutama belanja pegawai dan *sharing* pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,81-3,60% yang diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif dengan diperkirakan rata-rata inflasi sekitar 1,26% lima tahun terakhir;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh;
9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2023 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2018-2021 dan perkiraan pulih di tahun 2022-2023, secara substantif rancangan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2023 akan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2023, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD sudah diarahkan untuk mewujudkan rencana jangka menengah tahun pertama RPD 2023-2026. Tentunya aspek-aspek yang berkaitan dengan prioritas pembangunan tersebut telah disejalkan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kampar yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, serta sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2023 yang akan datang. Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki berupa kekuatan atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, serta kelemahan yang dapat menghambat pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Kekuatan:

1) Letak yang Strategis;

Kabupaten Kampar terletak pada wilayah yang cukup strategis berada pada lintasan bagian barat dan selatan yang dapat mendorong keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi untuk dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan. Posisi strategis adalah kawasan yang memiliki; potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi (PLTA

Koto Panjang) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, dan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Kawasan strategis Kabupaten Kampar adalah: a) Kawasan perkotaan di wilayah Bangkinang, Lipat Kain, dan Kota Garo, merupakan kawasan pertumbuhan utama yang perlu dikelola dan dikendalikan perkembangannya; b) Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru, merupakan kawasan potensial sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dalam konstelasi regional dengan posisi sebagai penyangga dan satelit Kota Pekanbaru; c) Kawasan perbatasan dengan Provinsi tetangga, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ini.

2) *Potensi Sumberdaya Alam;*

Kabupaten Kampar mempunyai topografi yang umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Dengan potensi geografis yang demikian, pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas lahan sesuai dengan komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi; peningkatan pembangunan kawasan strategis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan, peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi, serta pengembangan sentra ekonomi.

3) *Kapasitas Pemerintahan yang Semakin Baik;*

Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan pendekatan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen. Berkembangnya sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah baik sumber daya alam, teknologi, budaya dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kapasitas hukum merupakan kekuatan yang dapat mendorong pembangunan daerah. Aspek lain yang sangat mendukung adalah penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah perdesaan di 21 kecamatan, peningkatan pelayanan melalui penambahan sarana kantor, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, serta peningkatan pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

4) *Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan;*

Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan menengah, ikut memperkuat tatanan dan struktur

perekonomian daerah yang ditandai semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM baru yang didukung oleh kehadiran berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan milik Pemerintah Daerah, laba dari BUMN yang disisihkan, maupun lembaga swasta yang memberikan fasilitas pinjaman lunak dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta tumbuh dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan relatif lunak.

5) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah;

Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dimana Kabupaten Kampar menjadi salah satu pemegang sahamnya, telah diperkuat kapasitasnya dan menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, diantaranya PT. Bank RiauKepri, PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER), dan PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) yang akan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar.

6) Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan yang Kondusif;

Terciptanya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih, maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan letak yang strategis, ikut mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik dan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan Kamtibmas, maka suasana Kamtibmas yang kondusif tetap terpelihara dan dapat dikembangkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

7) Dimensi Spiritual dan Kultural Sebagai Basis Nilai dalam Pembangunan;

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang religius dimana nilai-nilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera, memelihara kerukunan hidup antarumat beragama, dan penguatan norma-norma kehidupan beragama. Disamping itu, masyarakat juga memiliki nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan mengakar kuat sebagai kekayaan daerah yang harus dilestarikan. Manusia yang berbudaya identik dengan sikap memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, pengembangan dan revitalisasi budaya daerah menjadi salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang terbuka, keragaman etnik dan suku yang telah menyatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, berkembang dan berusaha di Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwanya. Hal ini menjadi modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan ekonomi daerah guna mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

8) Kualitas Sumberdaya Manusia yang Telah Berkembang;

Kualitas sumberdaya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan varietas daya beli. IPM Kabupaten Kampar saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara regional berada pada urutan ke-5 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan target nilai IPM pada tahun 2023 sebesar 73,48-73,55. Salah satu aspek penting yang mendorong semakin berkembangnya sumberdaya manusia Kabupaten Kampar adalah adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas sumberdaya manusia adalah tumbuhnya lapangan usaha kerja produktif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.

9) Tersedianya Sarana dan Prasarana;

Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk "insentif", yang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah antara lain; melaksanakan pembangunan jalan antardesa, mengupayakan sumber-sumber pembiayaan, membuka isolasi daerah dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan yaitu jalan dan terminal, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memiliki *multiplier effect* dalam peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan strategis pada kantong-kantong produksi, pelebaran dan relokasi ruas jalan, pembangunan turab penahan tebing sungai, pemeliharaan ruas jalan nasional di Kabupaten Kampar, memfungsionalisasikan jalan kabupaten akses beberapa desa ke ibukota kecamatan, penanganan ruas jalan non status, pembangunan/peningkatan bangunan konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir), meningkatkan ketersediaan tenaga listrik di daerah yang belum mempunyai jaringan terutama di kawasan terpencil/miskin dan cepat tumbuh, penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta meningkatkan penyediaan air minum dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG'S).

b. Kelemahan:**1) Ketergantungan Pada Kebijakan Ekonomi Luar Negeri;**

Dengan posisi strategis dan sumbangan sumberdaya alam yang potensial, fenomena globalisasi dan liberalisasi perekonomian, memberikan konsekuensi logis pada kerentanan ekonomi yang tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri. Krisis keuangan global memberikan ketidakpastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak yang paling dirasakan adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan APBD, ataupun fluktuasi harga minyak sawit (CPO) dan komoditas pertanian lainnya serta produk manufaktur yang diproduksi dan selanjutnya dipasarkan pada pasar internasional.

2) Kondisi Lahan;

Fisiografi lahan wilayah Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Untuk beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu pengelolaan potensi sumber daya alam menghadapi permasalahan yang kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem manajemen modern oleh karena pengelolaan lahan gambut membutuhkan sistem drainase dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan lain yang dihadapi pada kawasan "lahan marginal" lainnya adalah untuk memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih. Sebaran potensi sumberdaya alam dan kondisi lahan tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antarwilayah seperti, antar-kawasan perkotaan dan perdesaan, antarkawasan bagian selatan dan barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penguatan struktur perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, walaupun potensi yang telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan pada sektor tersebut tidak seimbang dengan kemajuan pembangunan di hilirnya.

3) Permasalahan Sengketa Lahan dan Tata Ruang;

Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (≤ 2 hektar) untuk menyangga ekonomi rumah tangganya. Selain itu adanya persoalan tapal batas dan terlantarnya lahan-lahan kritis yang belum terselesaikan akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi, sosial dan pemerintahan. Hal terpenting untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan kabupaten tetangga, percepatan penyelesaian tata ruang daerah Kabupaten Kampar, dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dan perkebunan.

4) Distribusi Penduduk dan Pembangunan Tidak Merata;

Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya permukiman mengikuti pola daerah aliran sungai (Sungai Tapung, Sungai Kampar), serta di wilayah daratan belum cukup tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan dan perbatasan pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan, mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar masih digolongkan tinggi sebesar 1,57%, terutama pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu adalah persoalan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk

masyarakat tempatan, dengan isu klasik rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan rendahnya keterampilan, etos kerja, kurang kuatnya budaya wirausaha, rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan antara lain adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kampar pada daerah/kecamatan tertentu, percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota, dan pembangunan secara terpadu pada kawasan terpencil dan miskin.

5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingginya Kemiskinan;

Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil, belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya peran serta lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia sebagian besar penduduk yang relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian. Dari sisi penyebarannya, kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi jumlah maupun keragaman keahlian pada umumnya berada di perkotaan, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Persoalan-persoalan lain yang menjadi indikasi masih lemahnya pembangunan sumberdaya manusia adalah masalah pengembangan metodologi dan kurikulum, PAUD dan penuntasan wajib belajar 9 tahun, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dan perpustakaan serta fasilitas lainnya, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, terbatasnya SMK, pemerataan akses pendidikan dan jumlah pendidik di daerah terpencil dan rawan bencana, pengembangan akademi/politeknik dan tenaga kerja siap pakai, peran dan prestasi pemuda di bidang pembangunan, perluasan kesempatan kerja terutama tenaga kerja wanita, kesetaraan gender, kualifikasi tenaga kerja lokal, keterbatasan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan bencana, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi KB dan kesehatan, lingkungan perumahan sehat dan sanitasi yang layak. Sedangkan untuk persoalan kemiskinan adalah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan UMKM.

6) Lemahnya Penegakan Hukum;

Perubahan paradigma yang telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, masih relatif kurang dipahami secara utuh dan disikapi secara arif oleh sebagian aparaturnya dan para elite, sehingga menyebabkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu upaya penegakan hukum yang masih kurang konsisten, transparan, dan adil, juga telah ikut menciptakan kerawanan terhadap berbagai bentuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, korupsi dan kolusi, illegal logging, sengketa lahan perkebunan dan tapal batas, pembakaran lahan, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.

7) Infrastruktur yang Terbatas;

Pengembangan investasi dan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya, selain itu akses jalan

juga diperlukan dengan tujuan untuk memobilisasi barang khususnya hasil perkebunan. Kerjasama antar daerah sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan mengakses langsung ke kawasan industri sehingga membuka daerah baru yang selama ini terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Karakteristik wilayah dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah menimbulkan kerawanan yang tinggi baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, rawan gizi buruk dan rawan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan masa lalu untuk memperkuat infrastruktur antara lain; program *multi years*, pembangunan jalan antar desa, membuka isolasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan air bawah tanah, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, kebersihan, pasar dan perdagangan, peningkatan saluran irigasi, pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS), peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, PNPM Mandiri, PAMSIMAS serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana, sebahagian telah terhenti atau ditiadakan oleh pemerintah pusat.

8) Degradasi Lingkungan Hidup;

Konflik pemanfaatan ruang sebagian besar dihadapi kecamatan terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang daratan dan perairan berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya, memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang telah diatur dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan Nasional, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, suaka alam, dan kawasan bergambut. Degradasi kualitas lingkungan hidup akan semakin parah akibat tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan hutan. Persoalan iklim global juga terasa makin memprihatinkan karena rusaknya ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam menjadi salah satu bagian terpenting dalam mengatasi tingginya tingkat degradasi lingkungan hidup.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Peluang:

1) Lingkungan Strategis;

Perkembangan politik nasional yang dinamis, disertai dengan tuntutan untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang bagi daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada lebih maksimal dan dinamis berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan kemauan politik tanpa intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Letak dan posisi yang strategis merupakan salah satu daya dukung bagi perkembangan ekonomi,

aspek sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama secara bilateral maupun multilateral yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka untuk mengatasi kondisi kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan.

2) Perkembangan Politik Nasional yang Dinamis;

Stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah. Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan, telah mendorong perkembangan sektor transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain.

3) Kerjasama Regional;

Kerjasama ekonomi regional melalui perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan *biofuel* dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta kebijakan TATRANAS yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan peluang kerjasama tersebut melalui upaya peningkatan sumber pembiayaan terkait dengan *sharing* tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan BUMN/PBS dalam pemanfaatan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperlancar arus transportasi, pemanfaatan lahan yang masih kosong dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga Kabupaten Kampar tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

4) Perkembangan Teknologi;

Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Perutumbuhan teknologi yang semakin cepat ini bukan hanya disebabkan oleh semakin banyaknya ide-ide yang tumbuh, tetapi juga disebabkan oleh pertukaran informasi yang cepat melalui *search engine machine*. Oleh karena itu, akan selalu ada ruang bagi inovator-inovator baru menggantikan teknologi sebelumnya dengan inovasi yang baru dan lebih baik sehingga akan memacu bagi inovator baru untuk menghasilkan teknologi yang akan semakin mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan terutama terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta percepatan proses distribusi seiring dengan perkembangan zaman.

b. Ancaman;**1) *Isu Lingkungan Hidup;***

Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dari sikap ketidakadilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Kabupaten Kampar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan instansi yang membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan memaksimalkan peran serta seluruh PD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, serta tersedianya prana dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2) *Good Governance;*

Dampak globalisasi menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional, dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan dapat menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu proses perwujudan visi ke depan. Dengan melihat pada kondisi dan kemampuan yang ada, baik pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan regional yang setara. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kampar mampu bersaing adalah meningkatnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik, terutama promosi, pelayanan, perizinan dan peningkatan iklim investasi.

3) *Dinamika dan Fluktuasi Kondisi Ekonomi;*

- (a) Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan memperpendek rentang kendali administrasi pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat. Persoalan pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih terdapatnya sejumlah wilayah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (b) Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunan, tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi dan wilayah potensial yang ada di daerah perdesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai.

- (c) Alih fungsi lahan juga menjadi persoalan terhadap tingkat kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan mengingat luasan lahan pertanian padi yang semakin kecil.
- (d) Persoalan kemiskinan dengan kompleksitas faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4) Kebijakan Pemerintah Pusat yang Berubah-Ubah;

Penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena daerah dianggap telah mampu misalnya karena tingginya angka IPM, pada hal kenyataan yang ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya di luar variabel untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya.

5) Keterbukaan Daerah;

Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan prasarana pengangkutan darat dan sungai belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan perdagangan. Kawasan-kawasan tertentu yang dicadangkan menjadi kawasan andalan belum dapat dikembangkan karena ruas jalan yang menghubungkan ke daerah potensial belum berfungsi sepenuhnya karena masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di daerah kecamatan dan pedesaan adalah terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan poros mengingat infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.

6) Globalisasi;

Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing dengan daerah tetangganya maupun negara tetangga untuk menjual potensi infrastruktur daerah yang potensial. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem infrastruktur yang ada agar dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan kehidupan, sementara masyarakat yang berdiam di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat dan mewujudkan *trade barrier*, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi dan sebagainya.

Untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah:

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana serta kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;

3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Meningkatnya kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan *Regional Economic Development Strategic Program (RED-SP)* dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui *One Stop Services*;
10. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur.

Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan daya saing dan kemandirian wilayah, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, secara operasional meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain; peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako, mengembangkan promosi dan informasi harga;
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;
5. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam mengantisipasi penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;
6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar keteringgalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Perangkat Daerah (PD). Perkembangan APBD Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2021 terlihat pada Tabel 3.11.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten

Kampar, yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP, RPD, dan RKPD Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	REALISASI					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1	2.220.571.511.817,91	2.327.551.167.364,67	2.740.386.717.079,62	2.364.677.158.217,73	2.437.859.087.698,00	2,98
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.	316.432.572.651,91	229.382.839.237,67	262.882.861.942,62	246.053.581.866,15	277.420.117.554,00	-1,64
3	Hasil Pajak Daerah	5.1.1.1.	98.335.386.350,80	114.532.289.252,95	125.596.329.592,00	114.156.064.087,00	146.101.688.702,00	11,25
4	Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.	8.790.847.528,00	14.488.684.166,70	9.061.327.594,00	10.985.538.155,50	12.793.411.760,00	16,26
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.3.	30.123.709.254,00	31.687.665.925,00	30.345.896.566,00	23.246.742.484,00	27.916.502.794,00	-0,59
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4.	179.182.629.519,11	68.674.199.893,02	97.879.308.190,62	97.665.237.139,65	90.608.514.298,00	-6,65
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.	1.887.481.589.166,00	1.994.236.613.127,00	2.360.783.215.137,00	2.001.276.349.475,58	2.100.668.840.144,00	3,44
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.2.1.	1.525.027.088.899,00	1.676.335.496.809,00	1.957.011.119.683,00	1.629.589.954.092,00	1.928.631.672.211,00	7,07
9	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1.	232.036.085.819,00	222.848.856.511,00	205.212.510.570,00	204.179.514.316,00	-	-28,09
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2.	264.186.431.811,00	373.824.111.279,00	526.830.735.281,00	300.507.257.774,00	-	-15,13
11	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3.	728.616.246.000,00	774.370.036.000,00	821.233.336.000,00	765.107.999.000,00	-	-23,63
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4.	300.188.325.269,00	305.292.493.019,00	403.734.537.832,00	359.795.183.002,00	-	-19,23
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.2.2.	192.408.523.000,00	184.378.856.000,00	245.996.698.200,00	228.444.100.800,00	-	-19,47
14	Dana Otonomi Khusus	5.1.2.2.1.	-	-	-	15.839.028.000,00	-	
15	Dana Penyesuaian	5.1.2.2.2.	192.408.523.000,00	184.378.856.000,00	245.996.698.200,00	212.605.072.800,00	-	-21,08
16	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.2.3.	170.045.977.267,00	133.522.260.318,00	157.775.397.254,00	143.242.294.583,58	172.037.167.933,00	1,89
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.1.	113.539.475.361,00	110.505.614.318,00	133.355.397.254,00	117.875.294.583,58	-	-23,40
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.3.2.	56.506.501.906,00	23.016.646.000,00	24.420.000.000,00	25.367.000.000,00	-	-37,32
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3.	16.657.350.000,00	103.931.715.000,00	116.720.640.000,00	117.347.226.876,00	59.770.130.000,00	121,93
20	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	16.657.350.000,00	103.931.715.000,00	116.720.640.000,00	117.347.226.876,00	1.094.000.000,00	109,43
21	Pendapatan Dana Darurat	5.1.3.2.	-	-	-	-	-	
22	Pendapatan Lainnya	5.1.3.3.	-	-	-	-	58.676.130.000,00	

Sumber: BAPENDA dan BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2022

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Untuk memperkirakan APBD Tahun 2023, angka yang akan diambil adalah berdasarkan realisasi (perubahan) dan target APBD tahun 2021 dan 2022. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda, terutama alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu).

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan APBD, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah:

1. Perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan dilakukan karena prediksi SILPA tidak akurat;
2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu PD, meskipun total alokasi untuk PD yang bersangkutan tidak berubah;
3. Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan *adjustment* pada saat melakukan perubahan APBD.

Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh PD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (*variance*) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan realisasi APBD (perubahan), terlihat bahwa setiap tahun akan terjadi peningkatan belanja daerah. Namun kenaikan ini tidak diiringi dengan besarnya peningkatan pendapatan daerah terutama yang berasal dari penerimaan asli daerah (PAD). Berdasarkan realisasi dan target angka APBD dari tahun 2020-2021, estimasi terhadap APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan. Pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan akan menurun menjadi Rp 1.927,64 milyar dibandingkan dengan target tahun 2022.

Adapun estimasi terhadap sumber pendapatan potensial yang dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah tahun 2023 diperoleh dari sumber: a) Pendapatan Asli Daerah Rp 267,51 milyar (11,22%); b) Pendapatan Transfer Rp 1.660,12 (88,78%); dan c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 0 (0,00%). Untuk tahun 2023 diperkirakan masih akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 73,542 milyar, karena perkiraan pendapatan daerah hanya sebesar Rp 1.927,64 milyar sedangkan belanja yang harus dikeluarkan sebesar Rp 2.001,18 milyar.

Tabel 3.12
Realisasi, Target dan Proyeksi APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023

No	URAIAN	Realisasi	Realisasi	Target/Proyeksi	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN DAERAH	2.364.677.158.217,73	2.437.859.087.698,00	2.412.166.907.158,00	1.927.636.713.168,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	246.053.581.866,15	277.420.117.554,00	270.587.472.871,00	267.510.498.175,00
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	114.156.064.087,00	146.101.688.702,00	136.003.615.653,00	143.108.821.775,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.985.538.155,50	12.793.411.760,00	13.268.542.000,00	13.798.510.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.246.742.484,00	27.916.502.794,00	26.856.353.777,00	23.273.308.815,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.665.237.139,65	90.608.514.298,00	94.458.961.441,00	87.329.857.585,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.001.276.349.475,58	2.100.668.840.144,00	2.141.579.434.287,00	1.660.126.214.993,00
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.629.589.954.092,00	1.928.631.672.211,00	2.000.025.911.692,00	1.518.572.692.398,00
1.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	204.179.514.316,00	-	-	-
1.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	300.507.257.774,00	-	-	-
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	765.107.999.000,00	-	768.144.602.000,00	768.144.602.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	359.795.183.002,00	-	-	-
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	228.444.100.800,00	-	-	-
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	15.839.028.000,00	-	-	-
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	212.605.072.800,00	-	-	-
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	143.242.294.583,58	172.037.167.933,00	141.553.522.595,00	141.553.522.595,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117.875.294.583,58	-	141.553.522.595,00	141.553.522.595,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	25.367.000.000,00	-	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	117.347.226.876,00	59.770.130.000,00	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	117.347.226.876,00	1.094.000.000,00	-	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	58.676.130.000,00	-	-
2.	BELANJA DAERAH	2.497.866.793.719,31	2.432.511.200.684,00	2.504.270.281.104,00	2.001.178.768.601,00
2.1.	Belanja Operasi	1.677.667.836.396,33	1.727.407.841.851,00	1.778.366.373.186,00	1.421.104.205.750,86
2.2.	Belanja Modal	425.556.346.479,98	348.643.374.842,00	358.928.354.400,00	286.821.996.688,60
2.3.	Belanja Tidak Terduga	11.798.042.545,00	3.392.283.032,00	3.492.355.381,00	2.790.764.037,57
2.4.	Belanja Transfer	382.844.568.298,00	353.067.700.959,00	363.483.198.137,00	290.461.802.123,96
	Surplus (Defisit)	-133.189.635.501,58	5.347.887.014,00	-92.103.373.946,00	-73.542.055.433,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2020-2021, Tahun 2022-2023 Angka Estimasi

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah disusun ke dalam Tabel 3.12, perkembangan realisasi dan target/proyeksi pendapatan daerah tahun 2015-2023 dari tahun ke tahun berfluktuasi, walaupun ada yang menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu menggembirakan. Masih banyak potensi pendapatan daerah yang harus dicari dan digali, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang cukup signifikan.

Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan

formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD Kampar masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target RAPBD, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Kampar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kampar adalah:

1) Pajak Daerah

- Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah dijalankan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian potensi;
- Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha;
- Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda;
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan;
- Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 DPPKA Kabupaten Kampar dan Bank Persepsi;
- Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda pada wajib pajak yang lalai;

- Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak;
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang baru;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/ bimbingan teknis.
- 2) Retribusi Daerah:
- Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain.
 - Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetorannya;
 - Menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan seperti retribusi Pemadam Kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar;
 - Mengoptimalkan pemungutan retribusi.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
 - Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito;
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (AP);
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru.
- 5) Pendapatan Transfer:
- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil migas dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) serta Pajak Penghasilan;
 - Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru;
 - Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan

dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, realisasi (perubahan) belanja daerah tahun 2017-2021 dan perkiraan di tahun 2022-2023, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan pembangunan. Realisasi belanja operasi sampai tahun 2021 sebesar Rp. 1.727,40 milyar dengan pertumbuhan 2,39%, belanja modal sebesar Rp. 348,64 milyar dengan pertumbuhan 7,13%, belanja tidak terduga sebesar Rp. 3.392,28 milyar atau 1.245,18% dan belanja transfer sebesar Rp. 353,06 milyar dengan pertumbuhan 5,47%. Gambaran tentang perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	REALISASI					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	BELANJA	5.2.	2.232.826.396.846,42	2.168.293.382.294,82	2.714.727.108.612,92	2.497.866.793.719,31	2.432.511.200.684,00	2,93
2	BELANJA OPERASI	5.2.1.	1.586.635.068.229,42	1.519.345.176.787,08	1.731.255.069.162,92	1.677.667.836.396,33	1.727.407.841.851,00	2,39
3	Belanja Pegawai	5.2.1.1.	997.271.235.658,72	989.028.383.687,25	996.091.496.888,00	942.843.640.945,00	980.261.149.266,00	-0,37
4	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.	531.010.223.024,70	489.328.198.375,83	702.036.847.574,92	711.138.619.155,33	654.294.744.500,00	7,23
5	Belanja Bunga	5.2.1.3.	-	-	-	-	74.277.448.085,00	
6	Belanja Subsidi	5.2.1.4.	2.668.379.760,00	1.948.451.774,00	1.327.974.700,00	-	18.574.500.000,00	-39,71
7	Belanja Hibah	5.2.1.5.	44.902.149.786,00	25.412.352.950,00	24.963.350.000,00	23.685.576.296,00	-	-37,57
8	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.6.	10.783.080.000,00	13.627.790.000,00	6.835.400.000,00	-	-	-30,87
9	BELANJA MODAL	5.2.2.	352.062.836.537,00	315.557.219.865,74	578.989.100.174,00	425.556.346.479,98	348.643.374.842,00	7,13
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.2.2.1.	2.460.807.730,00	4.140.521.471,00	10.635.118.700,00	-	1.125.952.960,00	31,28
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.	82.001.435.800,00	46.927.498.748,00	87.701.233.063,00	1.314.306.030,00	139.048.356.088,00	2606,30
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.2.3.	54.573.122.658,00	75.630.571.003,74	138.827.490.154,00	113.508.592.543,79	51.549.311.363,00	12,33
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.4.	186.253.508.315,00	154.721.702.453,00	306.551.568.973,00	77.581.973.550,66	145.332.172.309,00	23,46
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5.	26.773.962.034,00	2.182.440.000,00	35.273.689.284,00	192.880.990.351,53	11.587.582.122,00	444,31
15	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.2.6.	-	31.954.486.190,00	-	40.270.484.004,00	-	-50,00
16	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3.	784.548.080,00	1.233.285.648,00	227.925.056,00	11.798.042.545,00	3.392.283.032,00	1245,18
17	Belanja Tidak Terduga	5.2.3.1	784.548.080,00	1.233.285.648,00	227.925.056,00	11.798.042.545,00	3.392.283.032,00	1245,18
18	TRANSFER	5.2.4.	293.343.944.000,00	332.157.699.994,00	404.255.014.220,00	382.844.568.298,00	353.067.700.959,00	5,47
19	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.2.4.1.	5.292.225.000,00	9.754.817.500,00	11.265.841.500,00	12.844.826.571,00	13.935.415.056,00	30,58
20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.1.	4.365.899.000,00	8.193.554.500,00	10.112.409.000,00	11.599.395.900,00	-	6,45
21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.2.	926.326.000,00	1.561.263.000,00	1.153.432.500,00	1.245.430.671,00	-	350,43
22	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	5.2.4.2.	288.051.719.000,00	322.402.882.494,00	392.989.172.720,00	369.999.741.727,00	339.132.285.903,00	4,91
23	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.2.4.2.1.	-	-	391.655.071.770,00	369.999.741.727,00	339.132.285.903,00	-3,47
24	Bantuan Keuangan Lainnya	5.2.4.2.2.	288.051.719.000,00	322.402.882.494,00	1.334.100.950,00	-	-	-46,92
25	SURPLUS/DEFISIT	5.3	(12.254.885.028,51)	159.257.785.069,85	25.659.608.466,70	(133.189.635.501,58)	5.347.887.014,00	-551,63

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Dengan adanya perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, target dan proyeksi belanja tahun 2020-2023 mengalami perubahan. Perubahan terhadap belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sesuai dengan perkembangan belanja daerah dari tahun 2020-2023, belanja daerah akan selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Pada tahun 2023 porsi belanja daerah Kabupaten Kampar yang paling besar adalah untuk kegiatan belanja operasi sebesar 75,97%, belanja modal sebesar 10,79%, diikuti oleh belanja transfer 13,121%, dan belanja tidak terduga sebesar 0,11%. Perkembangan angka target dan proyeksi belanja daerah ini dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023

No	URAIAN	REALISASI	REALISASI	TARGET/PROYEKSI	PROYEKSI
		2020	2021	2022	2023
1.	BELANJA OPERASI	1.818.655.702.350,01	1.858.238.805.647,59	1.878.352.267.657,06	1.519.208.518.313,78
1.1.	Belanja Pegawai	1.108.838.497.515,00	1.007.192.531.862,00	1.018.094.321.591,21	823.433.171.956,35
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.991.919.537,01	759.076.567.332,59	767.292.765.193,12	620.585.264.438,32
1.3.	Belanja Hibah	25.648.064.384,00	72.454.706.453,00	73.238.951.718,58	59.235.555.140,05
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	3.177.220.914,00	19.515.000.000,00	19.726.229.154,14	15.954.544.779,06
2.	BELANJA MODAL	457.890.125.296,16	319.473.232.192,00	266.852.376.337,87	215.829.804.795,05
2.1.	Belanja Modal Tanah	2.351.889.000,00	1.781.775.000,00	1.488.296.498,54	1.203.731.992,82
2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.522.824.475,00	112.049.242.595,00	93.593.464.617,29	75.698.254.876,57
2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.983.647.812,16	52.218.318.574,00	43.617.370.708,12	35.277.664.507,99
2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	173.297.129.722,00	138.789.171.061,00	115.929.024.330,07	93.763.222.327,69
2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.734.634.287,00	14.634.724.962,00	12.224.220.183,85	9.886.931.089,99
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.063.766.000,00	5.005.000.000,00	2.710.620.255,18	2.192.345.627,86
3.1.	Belanja Tidak Terduga	17.063.766.000,00	5.005.000.000,00	2.710.620.255,18	2.192.345.627,86
4.	BELANJA TRANSFER	383.273.088.727,00	342.967.700.960,00	324.433.483.753,57	262.401.318.768,30
4.1.	Belanja Bagi Hasil	12.938.342.700,00	13.935.415.057,00	13.182.335.368,14	10.661.853.224,97
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	370.334.746.027,00	329.032.285.903,00	311.251.148.385,43	251.739.465.543,33
	Jumlah	2.676.882.682.373,17	2.525.684.738.799,59	2.472.348.748.003,68	1.999.631.987.505,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2020-2021, Tahun 2022-2023 Angka Estimasi

Dokumen perencanaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk RKPD dan APBD menggambarkan program-program strategis, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas, terutama yang disusun setiap tahunnya. Adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (*sharing*) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dicerminkan dari adanya kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain, yang diharapkan akan berkelanjutan. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis melalui kegiatan pembangunan pada wilayah/daerah tertinggal, upaya pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan, serta perawatan infrastruktur.

Kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yang relatif terbatas jika dibandingkan permasalahan daerah yang harus diatasi;
- 2) Efektifitas dan efisien alokasi belanja lokalitas (setiap PD), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta lebih mengutamakan alokasi belanja untuk urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;

- 3) Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- 4) Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara;
- 6) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 7) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/ kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan dan langkah antisipasinya;
- 8) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kampar;
- 9) Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
- 10) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan Wajar Dikdas 12 tahun, serta menciptakan pendidikan berkualitas dan terjangkau;
- 11) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 12) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
- 13) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 3,48% diantaranya adalah melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan untuk balai pelatihan ketenagakerjaan;
- 14) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
- 15) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kampar, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 16) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*). Selanjutnya kebijakan alokasi belanja dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan

bahwa efisiensi dan penghematan belanja operasi tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

Sementara ini kebijaksanaan di bidang pembangunan pada prinsipnya masih diarahkan agar berpengaruh positif pada program provinsi dan perekonomian daerah kabupaten, menstimulir sektor swasta, memperluas lapangan kerja, bermanfaat pada produksi dalam negeri/daerah, serta meningkatkan produksi komoditi ekspor dan pariwisata. Penyediaan anggaran belanja dimaksudkan untuk:

- 1) Pembiayaan belanja pegawai;
- 2) Mendukung tugas-tugas pemerintah daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang didukung oleh tersedianya peralatan dan keterampilan dengan pembiayaan yang memadai;
- 4) Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatan;
- 5) Penyediaan biaya operasional dan perjalanan dalam rangka tugas pengawasan, koordinasi dan kelancaran pemasukan penerimaan daerah.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, ditambah lagi dengan semakin menurunnya dana perimbangan yang diterima, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat. Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting diperhatikan karena rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal. Implikasinya sangat besar karena pemerintah kabupaten yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani kegiatan ekonomi rakyat.

Ketidakmampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Tidak adanya rencana strategis yang jelas sering membuat keberlanjutan kegiatan pembangunan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi yang pada umumnya dihadapi adalah bahwa kegiatan pembangunan di daerah yang sering tergantung pada selera kepala daerah. Pergantian pimpinan daerah sering membuat arah kegiatan pembangunan berubah sesuai dengan selera pemimpin yang baru. Kondisi ini tentu sangat merugikan dilihat dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Inefisiensi tidak hanya terjadi dalam kegiatan yang bersifat fisik, tetapi sering terjadi dalam kegiatan non fisik. Misalnya gaung otonomi daerah telah mendorong kabupaten mengembangkan lembaga-lembaga yang bisa mengelola kegiatan tata pemerintahan lokal. Dalam beberapa hal penghidupan kembali lembaga lokal yang memiliki nilai positif, namun kurang diperhatikan efisiensinya. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan kelembagaan membuat pemerintah daerah hanya sibuk berbenah diri, baik dari sisi kelembagaan misalnya struktur organisasi pemerintah daerah, maupun non kelembagaan misalnya peninjauan kembali peraturan daerah yang berlaku.

Kinerja birokrasi sejak diberlakukannya otonomi daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inefisiensi terjadi karena kesalahan dalam membuat kebijakan, baik karena ketidakmampuan aparatur maupun dalam ketidak-jelasan visi pemerintahan. Untuk itu perlunya penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping, tetapi berorientasi pada fungsi sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerahnya. Persoalan inefisiensi berkaitan dengan responsivitas dari pemerintah.

Responsivitas dimaknai sebagai sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah kabupaten. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah mendorong mereka mengambil tindakan yang cepat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Persoalannya adalah bahwa setiap PD selalu mempunyai alasan-alasan tertentu agar alokasi anggaran rutin atau operasionalnya tidak dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah. Di sinilah persoalan yang dihadapi oleh Kepala Daerah, dalam hal ini dengan dibantu oleh Bappeda dapat menyusun anggaran (RKPD dan APBD) sesuai dengan kinerja dari setiap PD.

Persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan dari kalangan DPRD untuk mengalokasikan pos anggaran yang besar untuk kepentingan tertentu. Sepertinya ada indikasi bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan setiap prioritas anggaran pembangunan yang telah ditetapkan terutama yang telah digariskan dalam RPD. Proses penyusunan RAPBD biasanya melalui negosiasi yang alot untuk dapat meyakinkan DPRD, karena masih adanya persoalan kepentingan di dalam penyusunan anggaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di atas tentu saja berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. Dana alokasi (perimbangan) hendaknya tidak habis dialokasikan hanya untuk anggaran kegiatan rutin dan baru sisanya untuk pembangunan.

Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan untuk kegiatan belanja dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- 3) Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/ kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- 4) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 5) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- 7) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- 8) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 9) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah provinsi.

Berdasarkan Tabel 3.15, perkiraan di tahun 2023 kegiatan belanja untuk Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.15
Realisasi, Target dan Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Menurut Perangkat Daerah Tahun 2020-2023 (Rupiah)

No	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target/Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Distribusi Tahun 2023 (%)
I	WAJIB PELAYANAN DASAR	2.021.474.892.750,45	1.580.969.162.369,47	1.547.583.144.155,27	1.021.320.577.986,00	51,08
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	656.475.304.471,01	901.065.021.529,22	882.036.836.832,78	502.261.569.785,00	25,12
2	Dinas Kesehatan	317.202.886.910,05	279.948.277.211,74	274.036.486.833,73	180.430.639.420,00	9,02
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	301.212.351.603,49	192.945.962.562,16	188.871.438.166,76	123.670.784.928,00	6,18
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	461.090.938.001,98	132.513.363.271,97	129.715.020.543,27	144.820.370.841,00	7,24
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	235.876.279.227,28	46.764.003.179,39	45.776.467.243,16	39.524.097.069,00	1,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	25.485.328.495,92	15.337.426.861,42	15.013.539.701,10	15.131.193.315,00	0,76
7	Dinas Sosial	24.131.804.040,72	12.395.107.753,57	12.133.354.834,49	15.481.922.628,00	0,77
II	WAJIB NON PELAYANAN DASAR	152.728.123.205,31	188.363.444.898,84	184.385.691.535,92	151.584.155.705,00	7,58
1	Dinas Ketahanan Pangan	18.698.123.311,31	11.431.066.512,17	11.189.671.674,20	7.196.291.619,00	0,36
2	Dinas Lingkungan Hidup	28.678.503.031,47	25.294.281.124,47	24.760.130.711,90	19.395.405.396,00	0,97
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.628.617.199,95	6.488.637.787,42	16.143.152.668,00	0,81
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.337.085.471,89	12.114.048.554,33	11.858.230.885,45	17.028.703.724,00	0,85
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.341.266.643,84	8.014.688.834,95	7.845.439.140,65	7.325.046.178,00	0,37
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.964.435.538,09	11.250.138.660,54	11.012.564.555,26	8.682.291.084,00	0,43
7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	26.102.293.448,53	19.031.549.634,08	18.629.652.065,27	12.769.920.940,00	0,64
8	Dinas Perhubungan	16.931.492.392,74	65.947.005.183,88	64.554.373.392,80	29.916.792.027,00	1,50
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	14.371.020.792,92	9.903.072.433,36	9.693.944.915,57	10.756.653.756,00	0,54
10	Dinas Pemanan Modal & Pelayanan Terpadu	17.038.646.350,92	12.050.398.561,18	11.795.925.017,09	11.011.124.756,00	0,55
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.265.256.223,61	6.698.578.199,93	6.557.121.390,33	11.358.773.557,00	0,57
III	PILIHAN	80.884.420.638,80	94.007.157.891,60	92.021.967.566,36	108.125.360.995,00	5,41
1	Dinas Pertanian Tan. Pangan & Hortikultura	11.289.988.857,52	25.505.706.019,50	24.967.090.854,83	31.164.592.676,00	1,56
2	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Keswan	22.915.335.028,95	27.736.418.236,79	27.150.696.145,25	21.240.260.584,00	1,06
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.472.381.426,97	12.771.273.766,00	12.501.577.184,49	13.217.461.277,00	0,66
4	Dinas Perikanan	12.829.723.171,20	11.769.899.551,23	11.521.349.427,58	20.891.701.214,00	1,04
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	5.006.707.726,11	7.696.935.769,95	7.534.396.206,29	10.145.881.541,00	0,51
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.370.284.428,06	8.526.924.548,13	8.346.857.747,93	11.465.463.703,00	0,57
IV	PENUNJANG	66.878.597.743,52	437.271.473.469,09	428.037.420.253,34	460.441.419.059,00	23,03
1	Inspektorat Kabupaten	12.605.705.469,73	16.491.463.482,47	16.143.206.025,39	20.315.633.478,00	1,02
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.401.418.182,86	15.315.304.126,94	14.991.884.142,09	20.542.332.414,00	1,03
3	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	13.860.513.839,40	376.014.160.238,94	368.073.704.535,35	386.043.705.897,00	19,31
4	Badan Pendapatan Daerah	18.500.522.517,19	19.700.885.869,03	19.284.853.633,79	21.031.506.421,00	1,05
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.510.437.734,34	9.749.659.751,71	9.543.771.916,70	12.508.240.849,00	0,63
V	PENDUKUNG	301.865.785.328,36	163.054.077.261,04	159.610.792.899,20	189.627.313.714,00	9,48
1	Sekretariat Daerah	153.830.285.604,09	84.285.033.565,10	82.505.149.597,24	101.412.385.043,00	5,07
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	148.035.499.724,28	78.769.043.695,94	77.105.643.301,97	88.214.928.671,00	4,41
VI	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.706.153.362,76	13.807.466.129,88	13.515.887.820,40	22.681.162.448,00	1,13
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.706.153.362,76	13.807.466.129,88	13.515.887.820,40	22.681.162.448,00	1,13
VII	KEWILAYAHAN	45.344.709.343,96	48.211.956.779,75	47.193.843.773,18	45.851.997.598,00	2,29
	Kecamatan	45.344.709.343,96	48.211.956.779,75	47.193.843.773,18	45.851.997.598,00	2,29
	Jumlah	2.676.882.682.373,17	2.525.684.738.799,67	2.472.348.748.003,68	1.999.631.987.505,00	100,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2020-2021, (Tahun 2022 - 2023 Estimasi)

Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2023 masih diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan alokasi belanja PD juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan

dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja PD tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Jika perkiraan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka akan menyebabkan terjadinya transaksi keuangan yang defisit dan sebaliknya akan terjadi surplus. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kecenderungannya selama periode 2017-2021 APBD Kabupaten Kampar mengalami defisit yang ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 62.613.231.431,77 dan mengalami peningkatan tahun 2021 menjadi sebesar Rp 96.243.047.178.

Tabel 3.16
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Komponen	Pembiayaan					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
PEMBIAYAAN DAERAH	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0	96.243.047.178	47,91
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0	96.243.047.178	47,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebel	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0	96.243.047.178	47,91
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	1.000.000.000,00	0	101.590.934.192	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	1.000.000.000,00	0	0	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
SILPA	50.358.346.403,26	209.375.181.473,11	230.932.112.320,17	-133.189.635.501,58	101.590.934.192	-1,97

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023, disusun berdasarkan perkiraan SILPA dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2022. Tahun 2023 estimasi realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 71.995.274.337,00. Jika target penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 hanya sebesar Rp 71.995.274.337,00, maka perkiraan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 akan sebesar Rp 71.995.274.337. Perkembangan penerimaan pembiayaan tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17
Realisasi, Target, & Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023

Komponen	CATATAN	Realisasi	Realisasi	Target/Proyeksi	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.	0	96.243.047.178,00	99.082.217.069,00	71.995.274.337,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.1.	0	96.243.047.178,00	99.082.217.069,00	71.995.274.337,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	5.3.1.1	0	96.243.047.178,00	99.082.217.069,00	71.995.274.337,00
Pencairan Dana Cadangan	5.3.1.2	0	0	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.2.	0	101.590.934.192,00	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.2.1.	0	0	-	-
Pembayaran Pokok Utang	5.3.2.2.	0	0	-	-
SILPA	5.4	-133.189.635.501,58	101.590.934.192,00	104.587.866.750,00	0,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2020-2021, Tahun 2022-2023 Angka Estimasi

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan adalah:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2023
2. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan.
3. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
4. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2023 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah, yang ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sekaligus berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022. Namun dengan adanya perubahan terhadap periode kepemimpinan daerah sampai dengan tahun 2024, pemilihan Kepala Daerah yang akan memimpin selama lima tahun ke depan baru akan terlaksana di tahun 2024. Walaupun periode perencanaan Jangka Menengah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang baru belum ditetapkan, namun arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan tetap harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga akan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2023.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, di tahun 2023 rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah memasuki tahapan ke lima RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target visi dan misi Kabupaten Kampar yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2023-2026. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung visi dan misi pembangunan Nasional dan Provinsi Riau. Uraian tentang visi dan misi Kabupaten Kampar, dalam pembangunan Nasional dan Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Visi dan Misi Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau

No	Visi Pembangunan	Misi Pembangunan
1	<p>RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD 2023-2026 “Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global. 2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan. 4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. 5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan
2	<p>RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

No	Visi Pembangunan	Misi Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing 4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
3	RPJM Nasional 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah, dalam kerangka negara kesatuan

Sumber: RPJPD 2005-2025 dan RPD Kampar 2023-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan RPJM Nasional 2020-2024

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023, mengacu kepada: 1) Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026; 2) Telaah Pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022; 3) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global) dan pokok-pokok pikiran DPRD; 4) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional; 5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; dan 6) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2023.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: 1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs; Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026; 3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah; dan 4) Korelasinya terhadap isu-isu strategis daerah.

Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan provinsi ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun 2023, dengan tetap memperhatikan kondisi objektif daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan Daerah dari masing-masing urusan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan diuraikan pada bagian ini terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2024 dan target sasaran tahun 2023 yang tertuang dalam RKP tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan target sasaran tahun 2023 yang

tertuang dalam RKPDP Provinsi Riau Tahun 2023 dan tujuan dan saran pembangunan Kabupaten Kampar dalam RPD tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RKPDP Kabupaten Kampar Tahun 2023, secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional 2020-2024 dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong trans-formasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, akan dicapai melalui pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan trans-migrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 3. Terpenuhinya layanan dasar 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda 5. Meningkatnya produktivitas dan daya saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 2. Meningkatnya konektivitas wilayah 3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan 4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien

No	Tujuan	Sasaran
		5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 3. Pembangunan rendah karbon
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Konsolidasi demokrasi 2. Optimalisasi kebijakan luar negeri 3. Penegakan hukum nasional yang mantap 4. Reformasi birokrasi dan tata kelola 5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sumber: RPJMN Nasional 2020-2024

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJM Nasional tahun ke empat yang dituangkan dalam sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, ditetapkan target sasaran yang harus dicapai sebagaimana pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator dan Target Sasaran RPJM Nasional 2020-2024 Dalam RKP Tahun 2023

No	Indikator	Target Sasaran	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,30-5,90	%
2	Perununan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02	%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30-6,00	%
4	Rasio Gini	0,375-0,378	Nilai
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	Indek
6	Tingkat Kemiskinan	7,00-8,00	%
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,00-105,00	Nilai
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,00-107,00	Nilai

Sumber: PMDN 81 Tahun 2022 tentang Pedum RKPD 2023

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dijelaskan sebagaimana Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kesetaraan gender
2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman	1. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur	1. Meningkatnya pelayanan transportasi 2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 3. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga

No	Tujuan	Sasaran
		4. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air
4	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Menurunnya emisi gas rumah kaca
5	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan 2. Meningkatnya investasi daerah 3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 4. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
6	Meningkatkan pemajuan budaya Melayu	1. Meningkatnya kebudayaan melayu riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
7	Meningkatkan nilai tambah pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara 2. Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara
8	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi 2. Meningkatnya penerapan <i>e-government</i>

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 20219-2024

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMD tahun ke empat yang dituangkan dalam sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, ditetapkan target sasaran yang harus dicapai sebagaimana pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator dan Target Sasaran RPJMD 2019-2024 Dalam RKPD Tahun 2023

No	Indikator	Target Sasaran	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,82-3,49	%
2	Perununan Emisi Gas Rumah Kaca	176.020,27	(GgCO2-e)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10-3,92	%
4	Rasio Gini	0,328-0,319	Nilai
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,43-73,69	Indek
6	Tingkat Kemiskinan	6,65 - 6,31	%

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2023

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah diperlukan tujuan dan sasaran yang terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkualitas harus terkait erat dengan permasalahan daerah yang akan ditangani. Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJPD tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	1. Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis 2. Terciptanya toleransi antar multikultur
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
4	Mengurangkan tingkat kriminalitas	1. Berkurangnya tingkat kriminalitas
5	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	1. Meningkatkan pengamalan agama 2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan
6	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah 2. Meningkatnya investasi daerah
7	Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	1. Menurunnya TPT
8	Meningkatkan Daya beli masyarakat	1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
9	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan 2. Meningkatnya pelayanan transportasi
10	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

Sumber: RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPD tahun pertama yang dituangkan dalam sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2023, ditetapkan target sasaran yang harus dicapai sebagaimana pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Indikator dan Target Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026
Dalam RKPD Tahun 2023

No	Indikator	Target Sasaran	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,81-3,60	%
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	35.940,55	(GgCO2-e)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16-3,48	%
4	Rasio Gini	2,33-2,17	Nilai
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,48-73,55	Indek
6	Tingkat Kemiskinan	6,43-7,46	%

Sumber: RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 dan Balitbang Provinsi Riau, Indikator Makro Kabupaten Kota Tahun 2023

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan. Pencapaian target sasaran diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2023 mengacu dan memerhatikan: 1) RTRW Kabupaten Kampar; 2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; 3) Hasil evaluasi kinerja RKP Tahun 2022; 4) Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2023 dan prioritas Provinsi dalam RKP Tahun 2023; 5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan tahun 2023.

Untuk menyusun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat mempedomani strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Selain itu dapat juga mempedomani strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJM Nasional tahun 2020-2024. Uraian tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan disajikan dalam Tabel 4.8 berikut ini.

4.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan kepada pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, Peningkatan SDM berkualitas, Revolusi mental, Pembangunan Infrastruktur Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim dan menjaga Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. Jelasnya secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

No	Strategi	Arah Kebijakan
A	Pembangunan Ekonomi	
1	Pengelolaan sumberdaya ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
B	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pembangunan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa 2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah 4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah
C	Peningkatan Kualitas SDM	
1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2	Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan sosial 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3	Peningkatan Layanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya. 2. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 3. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO. 4. Peningkatan kualitas pemuda.
6	Pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga, 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial, 3. Reformasi agraria 4. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas 3. Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi 4. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 5. Penguatan pendamping pembangunan pengelolaan manajemen talenta nasional
D	Revolusi Mental	
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila 6. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
2	<p>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 3. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
3	<p>Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 5. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
4	<p>Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra 3. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
E Infrastruktur Pelayanan Dasar		
	<p>Peningkatan Infrastruktur pelayanan dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni
	<p>Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku
	<p>Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, pengembangan dan pengelolaan SPAM 2. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga 3. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi 4. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, 5. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi 7. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan
	Keselamatan dan Keamanan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas. 2. Penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan
15	Ketahanan kebencanaan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai
16	Waduk multiguna dan modernisasi irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi
17	Infrastruktur ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan 2. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan 3. Mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (<i>road overloading</i>) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP), pengembangan fasilitas dan perlengkapan jalan, serta pembangunan terminal antarnegara untuk mendukung kemudahan arus penumpang dan barang di wilayah perbatasan negara, pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, pembangunan kapal penyeberangan untuk mendukung daerah 3T, dan penyediaan subsidi perintis untuk angkutan penyeberangan, sungai, danau dan bus. Selain itu, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan transportasi 4. Penyediaan angkutan bus yang terhubung dengan simpul simpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
18	Infrastruktur perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan) 2. Pengembangan sistem layanan panggilan darurat 3. Pengembangan sistem <i>Public Protection and Disaster Relief</i> (PPDR) 4. Penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan 5. Mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan

No	Strategi	Arah Kebijakan
		publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (<i>new town</i>)
19	Energi dan kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
20	Transformasi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dana <i>Universal Service Obligation</i> (USO) dalam menyedia-kan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet 2. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet 3. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pita lebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar 4. Pengembangan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional 5. Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra pemerintah yang aman. 6. Pengembangan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional 7. Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan <i>Analog Switch Off</i> (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut 8. Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan 9. Mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi. 10. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian 11. Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan <i>start up</i> yang ada, terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari investor global 12. Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan 13. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri. 14. Adopsi pemanfaatan teknologi global (<i>Big Data</i>, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja
F	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	

No	Strategi	Arah Kebijakan
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
23	Pembangunan rendah karbon	1. Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan
G	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
24	Konsolidasi demokrasi	1. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi, dan kualitas komunikasi publik
25	Peningkatan kualitas komunikasi publik	1. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri 2. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional 3. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional
26	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan regulasi, perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata, penguatan sistem anti korupsi, peningkatan akses terhadap keadilan
27	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1. Penguatan implementasi manajemen ASN, penataan kelembagaan dan proses bisnis, reformasi sistem akuntabilitas kinerja, dan transformasi pelayanan publik
28	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Stabilitas Keamanan Nasional, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan <i>Confidence Building Measures</i> (CBM) dan reformasi anggaran. 2. Penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan keamanan dan ketahanan Siber

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

4.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau

Strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan kepada pembangunan Peningkatan SDM berkualitas, Peningkatan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga, Peningkatan pengarusutamaan gender. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, Pembangunan konektivitas, Peningkatan cakupan pelayanan air minum, Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, Penanganan kawasan kumuh permukiman, Peningkatan akses ketenagalistrikan, Peningkatan pengaturan air dan penanggulangan abrasi/banjir, Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, Peningkatan daya saing sektor unggulan, Peningkatan daya tarik investasi, Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa, Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, Peningkatan kewirausahaan pemuda, Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan, Melayu Riau, Peningkatan pengelolaan destinasi wisata, Peningkatan promosi pariwisata, Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi. Sedangkan arah kebijakan pemerintah provinsi Riau jelasnya secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
2	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa - Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3	Peningkatan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan, pengembangan pengelolaan keolahragaan
4	Peningkatan pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan - Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
5	Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat - Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan
6	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kewaspadaan dini - Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
7	Pembangunan konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan jalan dan jembatan - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
8	Peningkatan cakupan pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan air minum
	Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sarana prasarana sanitasi
9	Penanganan kawasan kumuh permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
10	Peningkatan akses ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah - Mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan
11	Peningkatan pengaturan air dan penanggulangan abrasi/banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
12	Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan - Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana - Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan - Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
13	Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau - Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/ tercemar) yang terlanjar secara terkoordinasi
14	Peningkatan daya saing sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi hasil industri - Meningkatkan produksi pertanian
15	Peningkatan daya tarik investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
16	Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan

No	Strategi	Arah Kebijakan
17	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
18	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	- Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
19	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	- Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
20	Peningkatan kewirausahaan pemuda	- Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
21	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
22	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata	- Peningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
23	Peningkatan promosi pariwisata	- Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata - Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
24	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi	- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan - Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan - Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan
25	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi	- Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik - Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar

Strategi pembangunan Kabupaten Kampar antara lain: Pengimplementasian dan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tentang global, Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat, Pengembangan ekonomi rakyat yang berbasis pedesaan pada sumberdaya lokal dengan crientasi pada agribisnis, agroindustri, tenaga kerja dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional Pengimplementasian dan Pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan, Perwujudan sumberdaya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan ke depan, dan taat pada aturan dan norma yang berlaku dengan dukungan sistem pendidikan untuk menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu dengan melalui beberapa upaya. - Mengendalikan dan mengembangkan benda-benda sejarah, permuseuman dan kepurbakalaan, melestarikan nilai-nilai seni budaya tradisional yang Islami, menjadi nilai-nilai seni budaya tradisi yang islami.

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan nilai budaya lokal khususnya budaya Kampar untuk memperkuat dan memperkaya khasanah budaya daerah dan budaya nasional, serta menangkal penetrasi budaya asing yang negatif melalui revitalisasi dan peningkatan upaya mengapresiasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. - Memasyarakatkan budaya Kampar melalui pendidikan di sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya; dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. - Memasyarakatkan nilai-nilai mulia budaya Kampar dan menjadikan budaya Kampar sebagai ruh motivasi dalam melaksanakan pembangunan - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu - Mendorong kerukunan umat berdampingan antara masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi.
2	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman - Menghargai terciptanya asimilasi kultur serta semangat heterogenitas dan prulalitas sebagai daya dukung pembentukan karakter bangsa
3	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dengan merencanakan dan melaksanakan program dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel. - Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (<i>good governance and clean government</i>) sesuai dengan STOK yang berlaku. - Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas kompetensi, dan profesionalisme, termasuk pementapan sistem pengangkatan, penempatan, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang secara proporsional. - Memperkuat kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga legislative dan yudikatif dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan public dan penegak hukum. - Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah bagi pembangunan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta. - Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku. - Mewujudkan aparatur yang berkemampuan tinggi dan memiliki integritas untuk menghindarkan terjadinya KKN - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, penegakan hukum dan kehidupan politik secara demokratis. - Menggali dan mengembangkan potensi daerah guna menunjang perekonomian daerah perlu ditumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimum, terutama dalam hal perijinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum, dan pelayanan kepentingan masyarakat akan hak-hak sipilnya.

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan regulasi dan sarana informasi tahapan pembangunan yang mudah diakses, sehingga public mengetahui tahapan pencapaian pembangunan sebagai perwujudan transparansi melalui e-government. - Mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintah secara adil dan terbuka - Melaksanakan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pemantapan struktur kelembagaan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diamanatkan kebijakan pembangunan daerah; perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas; penyediaan prasarana dan sarana fisik dan sosial; serta peningkatan kinerja pelayanan untuk menunjang produktifitas nasyarakat - Menyediakan akses yang tinggi bagi publik untuk memperoleh pelayanan umum dari lembaga dan aparat pemerintah. - Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat. - Menjamin kebebasan media sebagai sarana penyebarluasan informasi dalam rangka pencerdasan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta sarana pembangunan nilai-nilai demokrasi. - Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi sumber keuangan pendanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi
5	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dengan upaya: - Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan - Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan - Melaksanakan pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk agar mampu mendukung kehidupan bermasyarakat yang berbudaya. - Membangun kerjasama antar daerah, dalam perumusan kebijakan redistribusi penduduk melalui transmigrasi lokal dan migrasi masuk ke Kabupaten Kampar.
6	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan melalui upaya pemenuhan standart pelayanan minimum terhadap pemenuhan standart kompetensi lulusan, standart isi, standart proses, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan, standart pembiayaan, dan standart penilaian pendidikan. - Memberikan jaminan Pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata bagi masyarakat
7	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui upaya memberikan kesepahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial - Melibatkan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.. - Melaksanakan tanggungjawab aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. - Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan sistem tanggap darurat jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum - Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, memiliki budaya politik yang sehat dan santun. - Menghargai terciptanya asimilasi kultural, semangat heterogenitas dan pluralitas yang memiliki daya dukung terhadap pembentukan karakter bangsa (<i>nation building</i>). - Melaksanakan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) serta kehidupan demokratis guna terwujudnya masyarakat yang mandiri. - Menciptakan demokrasi, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan guna mewujudkan transparansi public. - Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi masyarakat; dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aspirasi masyarakat. - Menjamin kebebasan dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. - Mewujudkan supremasi hukum di lingkungan masyarakat
8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran dengan memajukan dan memotivasi program pembinaan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemertintah melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata - Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat.
9	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama untuk membantu memajukan pendidikan agama selain di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama serta membentuk sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama. - Menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menyelenggarakan tugas pemerintah, sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berakhlak luhur, memiliki integritas, jujur, dan menghindari KKN. - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan - Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
10	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) - Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) - Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan - Meningkatkan produksi dan produktivitas tersebut melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu serta meningkatkan pra dan pasca panen. - Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>unggul dan peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri peng-olahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan usaha agrobisnis peternakan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal bidang peternakan guna tersedianya produk ternak secara kontinyu baik kuantitas maupun kualitas. - Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan secara profesional dan terintegrasi dengan kegiatan <i>off-farm</i> serta kegiatan lainnya.
11	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah - Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan energy (<i>biofuel</i>) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi pasar regional melalui diversifikasi, produktifitas dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.
14	Peningkatan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	<p>Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun objek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
15	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi dan perizinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum, dan kepastian hukum - Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
16	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan - Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan dan pariwisata.
17	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa - Meningkatkan pendapatan masyarakat dari produksi barang dan jasa - Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara pemerintah Daerah, Swasta, UKM, Koperes dan Perbankan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan
18	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	<p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Kampar melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan termasuk agropolitan yang berfungsi mengolah komoditi pertanian

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui kegiatan dan agrobisnis serta pusat perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana untuk mendukung perkembangan pusat sub-wilayah, dan agropolitan diwilayah perdesaan yang sesuai dengan standar penyediaan prasarana dan sarana - Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang diterapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar. - Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berskala kecil dan menengah pada kawasan pedesaan dan relative tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan. - Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana sosial lainnya di pusat-pusat kecamatan dan sentra ekonomi. - Memperkuat fungsi TRTW Kabupaten Kampar dan rencana yang lebih rinci sebagai acuan pemanfaatan ruang serta membangun system pengendalian alih fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kawasan budidaya dan pelestariannya. - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaanya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah; regulasi perizinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan. - Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar
19	Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sisitem permukiman secara terpadu dengan Prasarana kelengkapan dasar listik, air bersih, sanitasi dengan lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman untuk mendukung Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
20	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu dengan tatanan transportasi yang terorganisasi secara tersistem dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, penyebrangan, laut dan udara yan terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang yang terus berkembang secara dinamis yang terpadu dengan mewujudkan keterpaduan intramoda dan antarmoda dalam jaringan prasarana dan pelayanan
21	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya denganmemanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber-sumber perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam migas di Kabupaten Kampar sebagai sumber pendanaan perekonomian perlu dilengkapi dengan pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan guna menunjang kesinambungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang
22	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	<p>Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan kerusakan lingkungan yang terwujud sebagai bencana banjir yang terjadi secara berkala, melalui pengelolaan

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk memulihkan fungsi sebagai penampung air hujan, peresapan air, penyimpan air, dan pengaliran air.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan pencemaran dan sedimentasi pada badan air oleh kegiatan domestic, pertanian, perkebunan, industri dan kehutanan. - Mengembangkan kemampuan penyelenggaraan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologis Kabupaten Kampar - Mencegah terjadinya kebakaran hutan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar dan wilayah sekitarnya dan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga. - Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengelolaan lingkungan, peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan diwujudkan dalam penetapan standar kualitas; melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan; pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan; penegakan hukum bagi pelanggaran; dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Sumber: RPD Kabupaten Kampar 2023-2026

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan daerah tahun 2023 merupakan bagian pertama dalam agenda pelaksanaan perencanaan pembangunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Namun karena adanya perubahan terhadap pemilihan kepala daerah di tahun 2024, RKPD tahun 2023 untuk mempedomani RPJPD dan RPD Kabupaten Kampar, RPJMD Provinsi Riau dan RPJM Nasional. Selain itu terkait juga dengan isu-isu strategis yang terdapat dalam RPD Kabupaten Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau. Prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing" maka tema rencana kerja pembangunan nasional Tahun 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan sejumlah Prioritas Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) PN 1: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) PN 2: Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan
- 3) PN 3: Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*
- 4) PN 4: Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5) PN 5: Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 6) PN 6: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (perubahan iklim)
- 7) PN 7: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
- 8) PN 8: Pembangunan Ibu Kota Nusantara

4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-4 RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan

perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2023 “**Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif**” dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan Masyarakat
- 2) Pelayanan Publik
- 3) Daya Saing Daerah

Adapun sasaran prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2023 antara lain yaitu:

- 1) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
- 2) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah;
- 3) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat;
- 5) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
- 6) Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan Mancanegara;
- 7) Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan

4.3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar

Selanjutnya pertimbangan lain dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ini merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD, yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Adapun saran dan masukan dari DPRD yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Menyediakan ruang kelas belajar yang layak di seluruh sekolah Kabupaten Kampar, dengan prioritas utama dilakukan pada desa tertinggal untuk pemerataan pembangunan pendidikan;
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;
 - c. Mengembangkan pendidikan yang mengarah pada isu-isu global;
 - d. Menyediakan sistem pendidikan dan pelaksanaan pendidikan pasca *Covid-19*;
 - e. Penempatan guru-guru terutama pada desa-desa tertinggal dan/atau daerah yang jauh dari perkotaan di Kabupaten Kampar.
2. Bidang Kesehatan
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
 - b. Meningkatkan pelayanan RSUD Bangkinang;
 - c. Meningkatkan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Mengurangkan jumlah bayi terkena gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/ Balita dan mengurangkan angka stunting;
 - e. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit menular.
3. Bidang Infrastruktur
 - a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di desa tertinggal di Kabupaten Kampar;
 - b. Meningkatkan penataan kota terutama pembangunan dan pemeliharaan rung terbuka hijau di Kabupaten Kampar;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - d. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (sektor pertanian, industri dan lainnya)

4. Bidang Sosial
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan;
 - b. Mengurangkan angka penyandang masalah kesejahteraan social;
 - c. Meningkatkan kesempatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
5. Bidang Ekonomi
 - a. Mengkoordinasikan seluruh stakeholder untuk peningkatan pembangunan ekonomi;
 - b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM;
 - c. Membangun infrastruktur pertanian;
 - d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah, melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan BUMD.

Berdasarkan lima bidang prioritas pembangunan di atas (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan social) maka disusun program prioritas. Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Kegiatan prioritas merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam pencapaian program prioritas. Selanjutnya dari program prioritas tersebut selanjutnya ditetapkan kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tersebut dimaksudkan agar fokus pada pencapaian target menjadi sasaran program. Kegiatan prioritas dibuat dalam rangka perancangan agenda, evaluasi tugas, alokasi waktu, dan juga tingkat kepentingan masing-masing pekerjaan terhadap capaian program. Selain itu, prioritas bersifat fleksibel untuk mengantisipasi apabila terdapat tugas yang tidak begitu penting namun mendesak.

Prioritas Pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, kegiatan prioritas dan sub kegiatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja, serta sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan Strategis Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Langsung Pencapaian Kinerja, Serta Sasaran Yang Ingin Dicapai

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
1	Pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Siswa - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Mebel PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
2	Kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	Dinas Kesehatan

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Obat, Vaksin - Pengadaan Bahan Habis Pakai 	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - Pengembangan Rumah Sakit - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - Pengadaan Obat, Vaksin 	RSUD
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 	RSUD
3	Infrastruktur (Pekerjaan Umum) dan (Perumahan Dan Kawasan Permukiman)	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Pembangunan Bendung Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Peningkatan Bendung Irigasi - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa - Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi Bendung Irigasi - Rehabilitasi Bendung Irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 	Dinas PUPR

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa - Operasional Unit Pengelola Irigasi 	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Pembangunan Jalan - Rekonstruksi Jalan - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pembangunan Jembatan - Rehabilitasi Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jembatan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - Pembangunan Jalan Strategis Desa - Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 	Dinas PERKIM

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 	
			Program Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 	Dinas PERKIM
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik - Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 	Dinas PERKIM
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 	Dinas PERKIM
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 	Dinas PERKIM
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 	Dinas PERKIM

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 	Dinas PERKIM
4	Sosial	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui upaya memberikan kesepahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial dan Kebudayaan	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Layanan Kedaruratan 	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 	Dinas Sosial
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja - Pelayanan antar Kerja 	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan Bimbingan JabPenyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaanatan bagi Pencari Kerja - Perluasan Kesempatan Kerja 	
			Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Ekonomi (Industri, Perikanan, Pertanian, Koperasi Dan UKM Perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), industri, Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata, - Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah, - Meningkatkan daya beli masyarakat dan 	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 	Dinas Ketahanan Pangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
		pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 	Dinas Ketahanan Pangan
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 	Dinas Ketahanan Pangan
			Program penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan
			Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
					- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
				(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pembangunan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pembangunan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	- Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	- Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	- Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat

4.4 Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar

Sinkronisasi sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023. Untuk melihat arah kebijakan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kampar Tahun 2023

Provinsi Riau						Kabupaten Kampar				
No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan
1	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur ≥25 tahun (tahun).	9,51 – 9,58 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Aksesabilitas Pendidikan - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan - Peningkatan Mutu serta pemerataan pendidik dan Tenaga Kependidikan - Peningkatan Mutu Peserta Didik, Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi 	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur ≥25 tahun (Tahun).	9,53 Tahun	Menciptakan jejaring pendidikan pengembangan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pembedaan keilmuan yang terkait dengan karakteristik global pendidikan masa depan sebagai kelanjutan wajib belajar Sembilan tahun
			Harapan Lama Sekolah	13,36 - 13,39 Tahun				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02 Tahun	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,93-71,99 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan - Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasana Kesehatan - Meningkatkan pelayanan Kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan kejadian luar bisa 		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,04 Tahun	
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	6,65 - 6,31 Persen	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat - Penyediaan jaminan kesehatan dan Pendidikan masyarakat - Pemberdayaan ekonomi masyarakat 	Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,58%	Mengubah pendekatan perencanaan pendidikan menengah dan tinggi dari pendekatan demokratis ke pendekatan sistem yang dipadu dengan pendekatan ketenagaakerjaan dengan unsur-unsur pengendalian pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja sehingga terciptanya keseimbangan antara lulusan			

Provinsi Riau						Kabupaten Kampar				
No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10-3,92 Persen	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan nilai tambah produk - Optimalisasi kegiatan program padat karya - Peningkatan kualitas tenaga kerja 		Menurunnya TPT	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,20%	<p>sekolah dengan lapangan kerja yang tersedia.</p> <p>Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan</p>
2	Pelayanan Publik	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	76.01	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama - Meningkatkan ketentraman di masyarakat 	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD - Meningkatkan Profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah - Meningkatkan Tata Laksana Pemerintahan 	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	57,63		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Opini BPK	WTP			Opini BPK	WTP		
			Nilai SAKIP	71,1			Nilai SAKIP	Nilai BB		
			Nilai LPPD	3.49			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,44	
			Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,37			Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	C		
3	Daya Saing Daerah	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan	Nilai PDRB (ADHB)	Rp.775.234,53 - Rp.790.679,36 Mi	Peningkatan nilai tambah dan output industri (Makanan dan Minuman)2. Peningkatan inovasi teknologi	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	31,75%	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah

Provinsi Riau						Kabupaten Kampar					
No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan	
		kesenjangan pendapatan				berbasis potensi unggulan		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	34,27%	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	
									Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,95%	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
			Koefisien Gini (Indeks)	0,35	Tanaman Hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp.161,568.12 Mi	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi			Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	4,44%	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air.	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	28,3	Tanaman Pangan -Padi dengan meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan (Padi)			Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Produksi Padi (Ton)	29.046,06	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	69.37	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya beli masyarakat - Penumbuhan pusat distribusi logistik daerah (pasar induk, pasar grosir) - Efisiensi jalur logistik 				Rasio Ketersediaan	21,92%	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara (Jiwa)	79.223	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah kunjungan dan kenyamanan tamu hotel 			Meningkatnya Kontribusi sector unggulan	Kunjungan wisata	1,15	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
		Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (Hari)	2,35	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata - Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu 				Lama kunjungan Wisata	7,31	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
		Meningkatnya keberlanjutan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	78,30	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan melayu Riau			Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kampar Yang Agamis	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	12,00	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara
		Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	20					Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan	20				Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11		

Provinsi Riau						Kabupaten Kampar				
No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Fokus Kebijakan/ Arah Kebijakan
4	Pembangunan Lingkungan Hidup					Meningkatkan Kualitas LH Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	35.940,55	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, isu strategis yang menjadi permasalahan pokok untuk ditangani melalui pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar maka kebijakan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023 perlu mempertimbangkan beberapa kebijakan lainnya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, implementasi otonomi daerah merupakan momentum strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah tempatan. Pengalaman dan kekeliruan yang telah dilakukan pada masa lalu harus menjadi pelajaran dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik dan menimbulkan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Implikasinya, praktek pembangunan daerah mau tidak mau harus diformulasikan dengan pendekatan yang benar-benar mampu memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah, sesuai dengan batas kewenangan daerah, dengan mengacu kepada visi, misi, serta strategi pembangunan daerah.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023. Untuk melihat arah kebijakan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi dan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13: Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	RKP Tahun 2023		RKPD Provinsi Riau Tahun 2023		RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023	
	Prioritas	Sasaran	Prioritas	Sasaran	Prioritas	Sasaran
1	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan	Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
				Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i>	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka		Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
2	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Meningkatnya Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Sosial	Terciptanya Toleransi Antar Multikultur
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sosial	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sosial	Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
3	Mendorong pemulihan dunia usaha	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
				Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan Mancanegara Meningkatnyainvestasi daerah	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
	1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi	Menurunnya tingkat ketimpangan (Gini Ratio)		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
	2) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (perubahan iklim)			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
	3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnyakunjungan wisatawan mancanegara	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
				Meningkatnyakenyamanan wisatawan mancanegara	Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan Meningkatkan investasi daerah
				Meningkatnyakeberlanjutan Budaya Melayu Riau	Sosial	Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kampar Yang Agamis
				Meningkatnya PengembanganBudaya Melayu Riau	Sosial	
				Meningkatnya PemanfaatanBudaya Melayu Riau	Sosial	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kebijakan pendanaan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan penguatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid 19. Selain itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Kampar diproyeksikan sebesar Rp 1.927.636.713.168 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 267.510.498.175, Dana Transfer sebesar Rp. 1.660.126.214.993. Sedangkan belanja daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 1.999.631.987.505.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung urusan, penunjang urusan, kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatankegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2023.

Belanja daerah Tahun 2023 dipergunakan untuk: 1) Belanja Operasi diantaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah (KDH), Wakil Kepala Daerah (WKDH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); belanja barang/jasa; belanja subsidi bunga kredit bagi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan petani; belanja hibah antara lain untuk BOSDa TK/PAUD, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan; dan belanja bantuan sosial berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Total pendapatan sebesar Rp. 1.927.636.713.168,00 yang dialokasikan untuk belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 1.999.631.987.505,00. Adapun perkiraan (pagu indikatif) belanja daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakannya ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Pagu Anggaran Belanja Menurut Urusan dan OPD Tahun 2023

No	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN 2023 (Rupiah)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	1.021.320.577.986,00
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	502.261.569.785,00
2	Dinas Kesehatan	180.430.639.420,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	123.670.784.928,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.820.370.841,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	39.524.097.069,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.131.193.315,00
7	Dinas Sosial	15.481.922.628,00
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	151.584.155.705,00
1	Dinas Ketahanan Pangan	7.196.291.619,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	19.395.405.396,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.143.152.668,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.028.703.724,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.325.046.178,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.682.291.084,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	12.769.920.940,00
7	Dinas Perhubungan	29.916.792.027,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10.756.653.756,00
9	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu	11.011.124.756,00
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.358.773.557,00
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	108.125.360.995,00
1	Dinas Pertanian Tan. Pangan & Hortikultura	31.164.592.676,00
2	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Keswan	21.240.260.584,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.217.461.277,00
4	Dinas Perikanan	20.891.701.214,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	10.145.881.541,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.465.463.703,00
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	460.441.419.059,00
1	Inspektorat Kabupaten	20.315.633.478,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.542.332.414,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	386.043.705.897,00
4	Badan Pendapatan Daerah	21.031.506.421,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12.508.240.849,00
V	PENDUKUNG URUSAN	189.627.313.714,00
1	Sekretariat Daerah	101.412.385.043,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	88.214.928.671,00
VI	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.681.162.448,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.681.162.448,00
VII	KEWILAHANAN (KECAMATAN)	45.851.997.598,00
1	Kampar Kiri	2.868.841.286,00
2	Kampar Kiri Hulu	2.023.659.513,00
3	Kampar Kiri Hilir	2.435.008.090,00
4	Gunung Sahilan	1.412.104.765,00
5	Kampar Kiri Tengah	1.997.264.700,00
6	XIII Koto Kampar	2.560.791.725,00
7	Koto Kampar Hulu	1.441.227.850,00
8	Kuok	1.561.994.616,00
9	Salo	1.314.877.008,00
10	Tapung	2.210.592.467,00
11	Tapung Hulu	1.581.531.304,00
12	Tapung Hilir	2.212.812.808,00
13	Bangkinang Kota	3.594.807.403,00
14	Bangkinang	3.273.249.947,00
15	Kampar	3.617.052.466,00
16	Kampar Timur	1.559.965.458,00
17	Rumbio Jaya	1.543.544.313,00
18	Kampar Utara	1.294.914.558,00
19	Tambang	2.645.613.267,00
20	Siak Hulu	2.787.096.155,00

No	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN 2023 (Rupiah)
21	Perhentian Raja	1.915.047.899,00
Jumlah		1.999.631.987.505,00

Program pada Dokumen RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pagu anggaran indikatif tersebut akan digunakan untuk mendukung rencana program yang akan dilaksanakan pada perangkat daerah dari jumlah dan jenis program, jumlah dan jenis kegiatan, jumlah dan jenis sub kegiatan yang terdapat di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya dijelaskan pada rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dan jumlah pagu anggaran disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Rekap Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program	264
	Jenis Program	129
2	Jumlah Kegiatan	612
	Jenis Kegiatan	251
3	Jumlah Sub Kegiatan	1.616
	Jenis Kegiatan	708
4	Pagu Indikatif	1.999.631.987.505

Berdasarkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan total pagu anggaran Rp. 1.999.631.987.505. Selanjutnya dari jumlah pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2023 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023. Dari total pagu anggaran tersebut digunakan sebesar 13,48% untuk pagu anggaran program prioritas senilai Rp. 287.622.366.743,00 yang terbagi pada lima prioritas pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan sosial. Rincian dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Pada program Prioritas dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Distribusi (%)
1	Pendidikan	3	8	41	64.444.108.729,00	22,41
2	Kesehatan	2	5	19	37.599.333.072,00	13,07
3	Infrastruktur	9	12	67	132.665.319.784,00	46,12

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Distribusi (%)
4	Ekonomi	35	54	89	42.697.589.705,00	14,85
5	Sosial	8	9	27	10.216.015.453,00	3,55
Jumlah		57	88	244	287.622.366.743,00	100,00

Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengalokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar senilai Rp. 134.448.670.431, Namun dalam pagu anggaran kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp. 6.047.000.000, jelasnya sebagaimana yang disajikan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Rekap Program dan Pendanaan
Standart Pelayanan Minimum dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No.	SPM/Urusan dan Program	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1.	SPM Pendidikan		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengelolaan Pendidikan	78.824.108.728	
	1. Pendidikan anak usia dini	2.276.996.001	
	2. Pendidikan dasar	53.825.905.613	
	3. Pendidikan menengah	21.766.207.114	
2.	4. Pendidikan kesetaraan	955.000.000	
	SPM Kesehatan:		Dinas Kesehatan dan RSUD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36.652.333.072	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.047.000.000	
	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	-	
	2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	-	
	3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	
	4. Pelayanan kesehatan balita	-	
	5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	
	6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	
	7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	-		
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	-		
11. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	-		
3.	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.000.000.000	
	2.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	3.400.000.000	
	2. Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	600.000.000	

No.	SPM/Urusan dan Program	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
4.	SPM Perumahan Rakyat:		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	1.929.928.752	
	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	250.000.000	
	2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	1.209.828.752	
5.	SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:		Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10.391.169.159	
	2. Program Penanggulangan Bencana		
	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		
	2. Pelayanan informasi rawan bencana		
	3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6.	SPM Sosial:		Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	1.518.315.924	
	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.133.315.924	
	2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	-	
	3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	-	
	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	
	Program Penanganan Bencana	1.132.814.796	
	1. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Kampar	-	
Jumlah	134.448.670.431		

Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar tahun 2023, maka disajikan dukungan pendanaan menurut bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial dengan jumlah program sebanyak 19 program dengan pagu anggaran indikatif senilai Rp. 247.621.994.731,70 dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kampar selengkapnya disajikan sebagaimana pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Penanggulangan Kemiskinan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.709.297.011,60	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.800.749,10	Dinas Kesehatan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	881.475.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	157.305.000.000,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.600.000.000,00	Dinas Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.000.000.000,00	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.000.000.000,00	Dinas Perikanan
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	136.375.128,00	Dinas Pertanian TPH
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.436.532.004,00	Dinas Pertanian TPH
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	499.492.477,00	Dinas Pertanian TPH
12	Program Penyuluhan Pertanian	722.172.915,00	Dinas Pertanian TPH
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	120.517.191,00	Dinas Pertanian TPH
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.210.000.000,00	Dinas Pupr Cipta Karya
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.362.000.000,00	Dinas Pupr Cipta Karya
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.769.967.994,00	Dinas Pupr Cipta Karya
17	Program Pemberdayaan Sosial	570.415.190,00	Dinas Sosial
18	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.046.949.072,00	Dinas Sosial
19	Program Rehabilitasi Sosial	35.000.000,00	Dinas Sosial
Jumlah		247.621.994.731,70	

Untuk mendukung penanganan stunting di Kabupaten Kampar tahun 2023, disajikan berdasarkan program dan pagu anggaran menurut perangkat daerah yang bersifat indikatif untuk setiap program pembangunan daerah. Jumlah program untuk penanganan stunting sebanyak 11 program yang terdapat pada 7 perangkat daerah dengan jumlah pagu anggaran senilai Rp. 31.239.094.421,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Rekap Program dan Pendanaan
Penanganan Stunting dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.210.000.000,00	Dinas Cipta Karya
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.649.967.994,00	Dinas Cipta Karya

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.166.037.186,00	Dinas Kesehatan
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.110.616.496,00	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	13.109.477.203,00	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.635.012.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Program Penyuluhan Pertanian	340.998.000,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	30.000.000,00	Dinas Sosial
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.186.985.542,00	DPPKBP3A
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	700.000.000,00	DPPKBP3A
	Jumlah	31.239.094.421,00	

Untuk mendukung pemulihan ekonomi dampak pandemic COVID 19 di Kabupaten Kampar tahun 2023, disajikan berdasarkan program dan pagu anggaran menurut perangkat daerah yang bersifat indikatif untuk setiap program pembangunan daerah sebagai pada Tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7
Rekap Jumlah Program dan Pendanaan
Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Menurut Perangkat Daerah
Dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	395.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.655.500.640,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	455.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.125.978.018,00	Dinas Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.990.700.000,00	Dinas Perikanan
7	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	755.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	940.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Program Pengembangan UMKM	50.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.257.940.386,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.983.000.000,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.163.623.596,00	Dinas Perikanan

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.702.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.925.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.700.804.943,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.937.221.625,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Program Penyuluhan Pertanian	2.812.000.007,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.768.571.743,00	Sekretariat Daerah
19	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20	Program Perizinan Usaha Pertanian	863.478.674,00	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	207.952.628,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
22	Belanja tak terduga	2.192.345.627,86	BPKAD
Jumlah		42.011.117.887,86	Perangka Daerah

Selanjutnya adalah gambaran tentang rencana program yang akan dilaksanakan dengan rencana pagu indikatif menurut urusan dan perangkat daerah yang melaksanakan. Sedangkan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan disajikan pada Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8
Rencana Program dan Pendanaan dalam RKP
Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR		1.022.867.359.082,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		502.261.569.785,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	434.086.201.048,00
		Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	125.000.000,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	63.824.108.729,00
		Program Pengembangan Kurikulum	495.000.000,00
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	115.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.331.260.008,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	150.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	135.000.000,00
2	Dinas Kesehatan		180.430.639.420,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	153.228.306.348,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.202.333.072,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang		123.670.784.928,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.169.437.164,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.450.000.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.051.347.764,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		144.820.370.841,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.173.897.772,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	22.600.000.001,00
		Program Pengelolaan Dan Air Limbah	600.000.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.400.000.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.800.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Kontruksi	1.000.000.000,00
		Program Penglolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.400.000.002,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	78.846.473.066,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.400.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	22.600.000.001,00
		Program Pengelolaan Dan Air Limbah	600.000.000,00
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	200.000.000,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	200.000.000,00
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	200.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman		39.524.097.069,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.503.174.079,00
		Program Kawasan Permukiman	843.374.000,00
		Program Pengembangan Perumahan	1.929.928.752,00
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	402.076.274,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	16.045.543.964,00
		Program Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh	11.800.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		15.131.193.315,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.340.431.286,00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.790.762.029,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		16.143.152.668,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.494.252.668,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.648.900.000,00
8	Dinas Sosial		15.481.922.628,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.795.627.559,00
		Program Pemberdayaan Sosial	2.740.750.457,00
		Program Penanganan Beencana	1.132.814.796,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.047.464.820,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.246.949.072,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.518.315.924,00
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR		151.584.155.705,00
1	Dinas Ketahanan Pangan		7.196.291.619,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.116.291.619,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	175.000.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	225.000.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	755.000.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.925.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup		19.395.405.396,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.333.283.878,00
		Program Pengakuan Keberadaab Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terikat dengan PPLH	600.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	3.646.734.192,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	415.387.326,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	400.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		17.028.703.724,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.428.296.594,00
		Program Penanggulangan Bencana	8.600.407.130,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		7.325.046.178,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.185.046.178,00
		Program Pencatatan Sipil	10.000.000,00
		Program Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Informasi admistrasi Kependudukan	100.000.000,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		8.682.291.084,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.282.291.084,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.445.000.000,00
		Program Pemberdayaan Lembaga	480.000.000,00
		Program Penataan Desa	275.000.000,00
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	200.000.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA		12.769.920.940,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.976.425.685,00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	900.000.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	841.792.336,00
		Program Pengendalian Penduduk	150.000.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	965.266.824,00
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	522.373.384,00
		Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	44.151.845,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.846.715.334,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	413.375.246,00
		Program Perlindungan Perempuan	109.820.286,00
7	Dinas Perhubungan		29.916.792.027,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.924.227.023,00
		Program Pengelolaan Pelayaran	222.565.000,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalam (LLAJ)	18.771.000.004,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.639.753.756,00
		Program Penyelenggaraab Persandian Untuk Pengamanan Informasi	178.900.000,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	370.000.000,00
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.472.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	96.000.000,00
9	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu		11.011.124.756,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.513.382.240,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	747.742.516,00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	130.000.000,00
		Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000,00
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		11.358.773.557,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.748.773.557,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	230.000.000,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.330.000.000,00
		Program Pengelolaan Arsip	430.000.000,00
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	620.000.000,00
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		108.125.360.995,00
1	Dinas Pertanian Tan. Pangan & Hortikultura		31.164.592.676,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.507.697.048,00
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	528.440.386,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.348.754.943,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian	1.699.221.625,00
		Program Penyuluhan Pertanian	1.627.000.000,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	453.478.674,00
2	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Keswan		21.240.260.584,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.257.760.577,00
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	729.500.000,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.983.000.000,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.652.000.000,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.023.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	1.185.000.007,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	410.000.000,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		13.217.461.277,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.743.461.276,00
		Program Pemasaran Pariwisata	662.000.000,00
		Program Pengembangan Sumber daya dan Ekonomi Kreatif	1.240.000.001,00
		Program Peningkatan daya 12arik Destinasi Parwisata	1.702.000.000,00
		Program Pengembangan Bidang Kebudayaan	1.980.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	890.000.000,00
4	Dinas Perikanan		20.891.701.214,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.560.750.301,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	733.614.984,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.283.012.333,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.050.700.000,00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.263.623.596,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK		10.145.881.541,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.180.380.901,00
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	113.394.072,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	85.791.070,00
		Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	202.862.230,00
		Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	207.952.628,00
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	350.000.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	1.655.500.640,00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	212.517.470,00
		Program Pengembangan UMKM	50.000.000,00
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USO Koperasi	57.482.530,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		11.465.463.703,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.125.463.703,00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.850.000.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Idustri Nasional	160.000.000,00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	200.000.000,00
		Program Hubungan Industrial	960.000.000,00
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	470.000.000,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	410.000.000,00
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	180.000.000,00
		Program Hubungan Industrial	960.000.000,00
IV	PENUNJANG URUSAN		460.441.419.059,00
1	Inspektorat Kabupaten		20.315.633.478,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.384.223.478,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.443.610.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	487.800.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		20.542.332.414,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.304.734.199,00
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.706.331.144,00
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.823.051.557,00
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.708.215.514,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah		386.043.705.897,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.380.247.079,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	700.000.000,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	370.963.458.818,00
4	Badan Pendapatan Daerah		21.031.506.421,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.778.669.443,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.252.836.978,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		12.508.240.849,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.630.379.964,00
		Program Kepegawaian Daerah	4.843.957.158,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.033.903.727,00
V	PENDUKUNG		188.080.532.618,00
1	Sekretariat Daerah		101.412.385.043,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.976.130.787,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	19.490.259.492,00
		Program Pengelolaan Perbatasan	500.000.000,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	4.446.054.764,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		88.214.928.671,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.425.188.264,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	38.789.740.407,00
VI	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		22.681.162.448,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		22.681.162.448,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.171.771.204,00
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	965.516.275,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.629.546.414,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.496.507.764,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.684.760.414,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.733.060.377,00
VII	KEWILAHANAN (KECAMATAN)		45.851.997.598,00
1	Kampar Kiri		2.868.841.286,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.383.041.286,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	366.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
2	Kampar Kiri Hulu		2.023.659.513,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.912.109.513,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
3	Kampar Kiri Hilir		2.435.008.090,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.957.458.090,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	366.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
4	Gunung Sahilan		1.412.104.765,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.300.554.765,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
5	Kampar Kiri Tengah		1.997.264.700,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.885.714.700,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
6	XIII Koto Kampar		2.560.791.725,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.084.643.395,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	365.998.330,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.150.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
7	Koto Kampar Hulu		1.441.227.850,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.329.677.850,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
8	Kuok		1.561.994.616,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.450.444.616,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
9	Salo		1.314.877.008,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.203.327.008,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
10	Tapung		2.210.592.467,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.099.042.467,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
11	Tapung Hulu		1.581.531.304,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.469.981.304,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
12	Tapung Hilir		2.212.812.808,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.101.262.808,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
13	Bangkinang Kota		3.594.807.403,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.751.257.403,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	732.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
14	Bangkinang		3.273.249.947,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.500.893.389,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	757.356.558,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00
15	Kampar		3.617.052.466,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.139.631.070,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	365.721.396,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.700.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
16	Kampar Timur		1.559.965.458,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.448.415.458,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
17	Rumbio Jaya		1.543.544.313,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.423.744.313,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
18	Kampar Utara		1.294.914.558,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.183.364.558,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
19	Tambang		2.645.613.267,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.534.063.267,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
20	Siak Hulu		2.787.096.155,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.676.946.155,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.150.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
21	Perhentian Raja		1.915.047.899,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.798.547.899,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.500.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000,00
Jumlah Pagu Anggaran			1.999.631.987.505,00

Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu anggaran indikatif menurut perangkat daerah untuk pembangunan daerahh Kabupaten Kampar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 5.9 berikut (Lampiran I RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023)

BAB VI

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 telah ditetapkan sebanyak 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar pada Tahun 2023. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kampar 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Target 2023
1	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Persen	NA	57,47
2	Indeks toleransi	Nilai	Nilai B	Nilai B
3	SAKIP	Nilai	Nilai B	Nilai B
4	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,78	87,44
6	Indeks SPBE	Indeks	C	C
7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,02	73,90
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,04
9	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	9,27	9,53
10	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	14,40
11	Persentase Pengurangan kriminalitas	Persen	0,34	0,30
12	Persentase Indeks melek Alquran (Kitab Suci)	Persen	65,71	68,45
13	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persen	100,00	100,00
14	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	34,15	34,27
15	Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	31,15	31,75
16	Pertumbuhan Investasi	Persen	4,40	2,87
17	Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Persen	4,27	4,20
18	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persen	7,82	7,51
19	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Na	80,42
20	Persentase Penurunan emisi GRK terhadap baseline	GgCO2-e	36.620,73	35.940,55

Sumber : RPD Kabupaten Kampar 2023-2026

Selain, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2023 pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagaimana Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Indikator dan Target Kinerja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	PDRB			
	a. Harga Berlaku dengan Migas (Rp Milyar)	86.670,330	87.596,386	95.433,013
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Milyar)	53.196,370	55.121,493	58.080,071
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,45	2,21-3,46	2,62-3,49
3	Laju inflasi (%)	4,34	2,76-4,04	2,73-3,80
4	PDRB per kapita			
	a. Harga Berlaku Dengan Migas (Rp Juta)	101,04	106,48	113,92
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Juta)	65,15	67,00	69,33
5	Indek Gini Ratio	0,277	0,267	0,239
6	Kemiskinan			
	a. Penduduk Miskin (Jiwa)	68,74	67,74	67,21
	b. Tingkat Kemiskinan (%)	7,82	7,51	6,91
	c. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun)	477.603	505.352	562.401

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
	d. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,99	0,87	0,70
	e. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,16	0,13
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,02	73,90	74,90
	a. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,27	9,53	9,82
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,55	14,02	14,40
	c. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,83	71,04	71,49
	d. Pengeluaran Per Kapita Riil (Rp 000)	10.858	11.153	11.283
2	Angka Melek Huruf (%)	99,38	99,47	99,74
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) (%)	67,29	67,99	70,13
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,06	63,58	65,59
5	Rasio Penduduk Bekerja (%)	65,97	67,09	70,57
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,27	4,20	3,99
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK per Tenaga Kerja (%)	0,140	0,142	0,149
8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II			
9	Index Kepuasan Masyarakat	86,78	87,44	89,45
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	11,38	11,83	12,39
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
12	Pangan (PPH dan Rawan Pangan)	89,86	91,50	96,58
13	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK (%)	34,15	34,27	34,63
14	Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK (%)	19,86	20,00	20,43
15	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB ADHK (%)	3,18	3,20	3,28
16	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK (%)	31,15	31,75	33,64
17	Jumlah grup kesenian 10.000 per penduduk.	80,00	83,00	92,00
18	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	135,00	150,00	195,00
II	PELAYANAN UMUM			
2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
2.1.1	PENDIDIKAN			
1	Rata - Rata Lama Sekolah	9,27	9,53	9,82
2	Harapan Lama Sekolah	13,55	14,02	14,40
3	Angka Partisipasi Kasar			
	a. SD/MI (%)	98,90	98,90	99,20
	b. SMP/MTS (%)	82,50	82,50	90,00
4	Angka Partisipasi Murni			
	a. SD/MI (%)	90,15	90,15	95,00
	b. SMP/MTS (%)	70,00	70,00	85,30
5	Angka Partisipasi Sekolah			
	a. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	100,98	101,47	102,95
	b. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	91,79	92,23	93,58
6	Angka Putus Sekolah			
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,44	0,42	0,34
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,260	1,254	1,236
7	Angka Kelulusan (AL)			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00
8	Angka Melanjutkan			
	a. Angka Melanjutkan SD/MI	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Melanjutkan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00
9	Keersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah			
	a. SD/MI	192,00	192,00	192,00
	b. SMP/MTs	275,00	216,00	216,00
10	Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar			
	a. SD/MI	15,00	15,00	15,00
	b. SMP/MTs	12,00	12,00	12,00
11	Guru Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat			
	a. Guru SD/MI	40,14	42,55	50,68
	b. Guru SMP/MTs	38,67	40,99	48,82
2.1.2	KESEHATAN			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	31,00	28,91	23,44
2	AKBA/1.000 kelahiran	32,00	29,84	24,20
3	Angka Relatif Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2,50	2,33	1,89
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	7,00	6,53	5,29
5	Rasio Posyandu per 1000 balita	0,52	0,54	0,63
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	26.451,00	26.451,00	28.387,00
7	Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk	1,79	1,75	1,71
8	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,0217	0,0219	0,0225
9	Rasio Puskesmas Keliling per satuan penduduk	0,0306	0,0333	0,0431
10	Rasio dokter umum per satuan penduduk	0,2119	0,2156	0,2274
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,00	93,95	100,00
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,00	97,79	100,00
13	Persentase Balita Gizi Kurang	3,20	2,68	1,57
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	4,42	3,70	2,17
15	Persentase Balita Kurus	4,15	3,47	2,04
16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	78,80	84,12	100,00
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100,00	100,00	100,00
18	Prevalensi Tuerkulosi (%)	62,00	82,47	100,00
19	Prevalensi HIV/AIDS (kasus)	135,00	116,29	74,33
20	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tk kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,10	100,00	100,00
2.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	58,63	62,03	73,46
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0025	0,00	0,00
3	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	5,23	5,53	6,55
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	55,01	58,20	68,93
5	Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak	0,55	0,58	0,69
6	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,25	66,92	79,25
7	Rasio Jaringan Irigasi	1,814	1,92	2,27
8	Persentase peningkatan layanan air minum bersih	73,85	78,13	92,53
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	11,56	12,23	14,48
10	Rasio bangunan ber-IMB	18,94	20,04	23,73
2.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,153	0,162
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	0,033	0,034	0,036
3	Rasio pemukiman layak huni	0,042	0,043	0,045
4	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	0,090	0,092	0,097
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	17,000	17,340	18,401
2.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.471,00	1.588,83	2.002,02
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota	21,00	21,00	21,00
3	Jumlah Aparat Pamong Praja	385,00	415,84	523,98
4	Jumlah Patroli Petugas satpol PP dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24 jam	672,00	725,83	914,59
5	Jumlah Pelanggaran K3	114,00	100,00	100,00
6	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	114,00	725,83	100,00
7	Jumlah Perda	9,00	10,00	12,96
8	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	100,00	100,00	100,00
2.1.6	SOSIAL			
1	Persentase PSKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (BS)	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PSKS yang Tertangani	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Korban Bencana yang Menerima bantuan Sosial Selama Masa tanggap Darurat	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100,00	100,00	100,00
2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
2.2.1	TENAGA KERJA			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27	4,20	3,99
2	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,06	63,58	66,59
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	44,00	46,20	53,48
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12,00	12,60	14,59
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	112,00	117,60	136,14
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	324,00	340,20	393,82
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	101,00
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14,00	14,70	18,02
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100,00	100,00	101,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	300,00	315,00	364,65
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	245,00	257,25	297,80
2.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	5.081,00	5.089,13	5.105,43
2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	63,24	63,34	63,54
3	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	8,89	8,89	15,56
4	Proporsi Perempuan Sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	61,41	61,51	61,71
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35,43	35,49	35,60
6	Jumlah perempuan di lembaga swasta	120,19	120,38	120,77
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,79	89,93	90,22
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,62	53,71	53,88
9	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00	100,00	101,00
2.2.3	PANGAN			
1	Rasio Ketersediaan	21,37	21,92	23,64
2	Padi-padian	388,19	398,13	429,49
3	Umbi-umbian	90,32	92,63	99,93
4	Pangan hewani	149,09	152,91	164,95
5	Minyak lemak	20,47	20,99	22,65
6	Buah biji berminyak	20,91	21,45	23,13
7	Kacang-kacangan	40,12	41,15	44,39
8	Gula	40,52	41,56	44,83
9	Sayur dan buah	119,88	122,95	132,64
2.2.4	PERTANAHAN			
1	Penyelesaian izin Lokasi	Na	Na	Na
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Na	Na	Na
3	Persentase luas lahan bersertifikat	27,09	27,89	30,43
2.2.5	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,13	70,73	72,54
2	Indeks Kualitas Air	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Baik
4	Status tingkat pencemaran udara	Baik	Baik	Baik
5	Status Tingkat Pencemaran Air	Baik	Baik	Baik
6	Persentase penanganan sampah	0,390	0,44	0,65
7	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	50,00	56,82	83,39
2.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3,32	3,10	2,54
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	100,00	100,00
4	Rasio bayi ber akte kelahiran	96,23	97,06	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
2.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase LSM Aktif	62,78	66,15	79,94
2	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	82,64	87,07	89,34
3	Persentase LPM Berprestasi	50,00	52,68	54,05
4	Persentase PKK aktif	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Posyandu aktif	71,40	75,23	87,98
2.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	3,32	3,10	2,54
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,40	2,90
3	Persentase PD yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	30,00	31,96	38,62
4	Rasio Akseptor KB	41,10	43,78	52,91
5	Rata-rata Usia Kawin Pertama	22,00	23,43	28,32
6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1724,00	1.836,40	2.219,53
2.2.9	PERHUBUNGAN			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	5.784,00	5.991,65	6.660,39
2	Rasio ijin trayek	0,45	0,47	0,52
3	Jumlah uji kir angkutan umum	6.178,00	6.399,79	7.114,09
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00	3,11	3,45
5	Persentase layanan angkutan darat	59,49	60,04	100,00
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	92,00	95,30	105,94
7	Pemasangan Rambu-rambu	172,00	178,17	198,06
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	30,00	31,08	34,55
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	9.866,00	10.220,19	11.360,89
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	9.866,00	10.220,19	11.360,89
2.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	99,00	99,11	99,44
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	99,04	99,15	99,48
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	60,05	60,12	60,31
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	8,27	8,61	9,71
2.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Jumlah UMKM yang produktif	18.380	19.971,71	25.622,67
2	Jumlah Koperasi aktif	93,00	101,05	129,65
3	Persentase Koperasi Aktif	33,70	40,27	68,72
2.2.12	PENANAMAN MODAL			
1	PMDN	4.966,37	5.184,89	5.899,85
2	PMA	2.948,43	3.078,16	3.502,62
3	Daya Serap Tenaga Kerja	10.644	11.112,34	12.644,65
2.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Persentase wirausaha muda	77,58	77,67	77,92
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	14,00	14,72	17,10
3	Jumlah prestasi olahraga	10,00	11,00	14,00
2.2.14	STATISTIK			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada
2.2.15	PERSANDIAN			
1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	56,00	56,00	56,00
2	Persentase PD yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	56,00	56,00	56,00
2.2.16	KEBUDAYAAN			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11,00	11,00	11,00
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	12,00	12,00	12,00
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12,00	12,00	12,00
2.2.17	PERPUSTAKAAN			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	34.237	35.175	38.146
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	20.788	21.297	22.901
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,0046	0,0050	0,0062
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	11.412,00	11.727	12.725
5	Jumlah koleksijudul buku perpustakaan	84.169,00	86.164	92.436
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	4,00	7,00	22,00
2.2.18	KEARSIPAN			
1	Indeks Manajemen Kearsipan	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pengelola Kearsipan	100,00	100,00	100,00
3	Penilaian/ predikat kearsipan	5,00	5,67	8,24
2.3	Urusan Pilihan			
2.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Konsumsi Ikan	63,65	63,78	64,16
2	Cakupan bina kelompok nelayan	50,00	56,82	83,39
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	1.836,95	1.967,56	2.417,78
4	Nilai Tukar Nelayan	101,03	109,42	138,98
5	Produksi perikanan	59.103,12	62.808,89	75.379,48
2.3.2	PARIWISATA			
1	Jumlah Kunjungan wisata	1,10	1,15	1,31
2	Lama kunjungan Wisata	7,00	7,31	8,34
3	PAD sektor pariwisata	54,80	57,26	65,30
2.3.3	PERTANIAN			
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK (%)	34,15	34,27	34,63
	a. Produksi Padi (Ton)	28.965,54	29.046,06	29.288,98
	b. Produksi Jagung(Ton)	1.167	1.178	1.214
	c. Produksi Cabe (Ton)	30,01	30,31	34,57
2	Jumlah produksi perkebunan rakyat:			
	a. Produktivitas Karet (Ton)	1,20	1,22	1,30

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
	b. Produktivitas Kelapa Sawit	12,68	13,25	15,11
3	Jumlah Produksi Ternak			
	Produksi daging Kerbau (kg)	1.138.544	1.189.551	1.356.696
	Produksi daging Sapi (kg)	1.029.557	1.099.876	1.340.983
4	Cakupan Kelompok Binaan (Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan)	100,00	100,00	100,00
2.3.4	PERDAGANGAN			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	3,18	3,20	3,28
2	Volume Perdagangan CPO	885.960,52	901.464,82	949.624,78
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	100,00	100,00	100,00
2.3.5	PERINDUSTRIAN			
1	Kontribusi Sub Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	31,15	31,75	33,64
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100,00	100,00	100,00
2.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN			
2.4.1	PERENCANAAN			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada	Ada	Ada
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada	Ada	Ada
2.4.2	KEUANGAN			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	12,39	12,57	13,12
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
2.4.3	KEPEGAWAIAN			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31,83	33,23	37,81
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6,72	7,02	7,98
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,10	0,10	0,12
2.4.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	60,00	62,64	71,28
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	60,00	62,64	71,28
2.5	FUNGSI PENGAWASAN			
2.6.1	PENGAWASAN			
	Persentase tindak lanjut temuan	54,22	56,61	64,41
2.6	Aspek Daya Saing			
2.6.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	52,98	53,27	54,16
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	50,27	53,08	62,49
2.6.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur			
1	Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	188,90	206,66	270,58
2	Rasio Luas Wilayah Produktif	91,71	92,21	93,74
2.6.3	Fokus Iklim Berinvestasi			
1	Angka Kriminalitas	340,00	224,40	64,51
2	Jumlah Demonstrasi	20,00	13,20	3,79
2.6.4	Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3	4,93	5,30	6,60
2	Rasio Keregantungan	46,42	45,26	41,97

Sumber : RPD Kabupaten Kampar 2023-2026

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbangda di tingkat kabupaten.

RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Lembaga Pemerintah, RKPD Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Lembaga (RKL) Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keppres, atau Peraturan Daerah;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau yang sudah menjadi wewenang daerah;
 - d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing lembaga pemerintah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, melalui asas dekonsentrasi atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan;
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, RKPD Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RK-Perangkat Daerah) Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);
 - b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah kabupaten melalui pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah;
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
 5. Dalam membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah, pemerintah daerah telah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
 6. Pada Awal Tahun Anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Kampar melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
 7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan

Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 ini bersumber dari dana pemerintah. Selain itu juga pendanaan pembangunan yang dari masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan maupun bukan kemitraan dengan pemerintah. Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2023 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta;
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah lainnya;
3. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
4. Peningkatan kemampuan komunikasi dan koordinasi untuk memperoleh dana Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau;
5. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
6. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal;
7. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan indukatif;
8. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
9. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan;
10. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, serta dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor;
11. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan Perangkat Daerah maupun BUMD;
12. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Pusat serta Provinsi yang diserahkan kelolakan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
13. Pengembangan berbagai kebijakan program/kegiatan pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional;
14. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
15. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

LAMPIRAN I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	498,645,309,777							864,599,800,000				
1 01	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dipkora	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	714,896,576	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Guru ditlingkungan Dinas Dipkora	6 Dokumen	300,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	432,415,730	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Guru ditlingkungan Dinas Dipkora	3 Dokumen	100,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	95,267,846	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Guru ditlingkungan Dinas Dipkora	4 Laporan	250,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	187,213,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Guru ditlingkungan Dinas Dipkora	12 Bulan	582,120,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi keuangan dinas dipkora	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	427,316,440,042	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dipkora	12 orang/bulan	582,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan			12 orang/bulan	427,263,058,346	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dipkora	2 Dokumen	100,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	38,382,165	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dipkora	1 Laporan	10,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7,499,722	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dipkora	1 Laporan	10,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7,499,809	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dipkora	1 Laporan	10,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi kepegawaian dinas dipkora	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	250,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN Dinas Dipkora	4 Dokumen	250,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	"Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai"	4 Dokumen			4 Dokumen	250,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dipkora/UPT Dipkora/Gedung Guru	4 paket	100,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum dinas dipkora	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	1,333,775,959	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dipkora/UPT Dipkora/Gedung Guru	4 paket	200,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	4 paket			4 paket	85,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dipkora/UPT Dipkora/Gedung Guru	4 paket	100,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	4 paket			4 paket	150,123,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dipkora/UPT Dipkora/Gedung Guru	4 paket	100,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
1 01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan"	4 paket			4 paket	59,117,470	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dipkora/UPT Dipkora/Gedung Guru	7 Dokumen	60,000,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	3 Laporan	347.642,686	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dikpora/UPT Dikpora/Gedung Guru	3 Laporan	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	6 Dokumen	646.891,903	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Gedung Dinas Dikpora/UPT Dikpora/Gedung Guru	6 Dokumen	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang perkantoran dikpora	12 Bulan	4.221.183.642							12 Bulan	6.680.000.000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	569.032,460	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dikpora/UPT Dikpora dan Gedung Guru	12 Laporan	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan"	12 Laporan	535.264,488	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dikpora/UPT Dikpora dan Gedung Guru	12 Laporan	580.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Laporan	3.116.886,694	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dikpora/UPT Dikpora dan Gedung Guru	12 Laporan	5.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tewujudnya pemeliharaan gedung dinas dikpora	24 Gedung	249.905,729							24 Gedung	300.000.000	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	249.905,729	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Dikpora/UPT Dikpora dan Gedung Guru	11 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah	9,82 Tahun	63.824,108,729							9,50 Tahun	270.089.800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	523 lembaga	38.825.905,614							523 lembaga	172.732.910,000	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas Baru yang Berambah	36 ruang	2.660.364,001	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	36 ruang	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU yang telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ITU yang telah Dibangun	10 Ruang		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	10 Ruang	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	23 unit	5.721.196,005	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	23 unit	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Seding/Berat	14 ruang	1.799.000,001	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	14 ruang	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	34 paket	1.760.000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	34 paket	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlempapan Siswa	Jumlah Perlempapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Unit	250.000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	4 Unit	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	490.000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	1 paket	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	17592 Peserta didik	286.315,159	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Nasional	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	17592 Peserta didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Nasional	Daerah
1 01 02 2.01 24	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	97 Satuan Pendidikan			97 Satuan Pendidikan	171.259.620	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	97 Satuan Pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik			240 Peserta Didik	388.584.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	240 Peserta Didik	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	550 orang/bulan			550 orang/bulan	24.519.978.931	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	550 orang/bulan	30.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	175 orang/bulan			175 orang/bulan	564.057.092	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	175 orang/bulan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	495 Satuan Pendidikan			495 Satuan Pendidikan	150.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	495 Satuan Pendidikan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	486 Orang			486 Orang	65.149.904	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SD/SMP Negeri dan Swasta	486 Orang	66.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah pertama yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	149 Lembaga	0 Lembaga		149 Lembaga	21.766.207.114						149 Lembaga	68.736.890.000		
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berambah	10 ruang			10 ruang	1.316.616.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	10 ruang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 unit			14 unit	2.017.735.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	14 unit	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Penlempaan Siswa	Jumlah Penlempaan Siswa yang Tersedia	3 Paket			3 Paket	250.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	3 Paket	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	"Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian"	13600 Peserta Didik			13600 Peserta Didik	200.000.905	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	13600 Peserta Didik	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 37	Penyipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi"	165 Satuan Pendidikan			165 Satuan Pendidikan	269.001.608	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	165 Satuan Pendidikan	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik			240 Peserta Didik	407.394.306	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	240 Peserta Didik	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5450 Orang			5450 Orang	16.720.437.065	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	5450 Orang	19.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 orang/bulan			100 orang/bulan	530.022.232	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	100 orang/bulan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Mengingat Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	55.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	SMP/MTs dan Swasta	190 Orang	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	350 Lembaga	2.276.996.001	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	350 Lembaga	24.570.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	13 Paket	35.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	13 Paket	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktis dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	1	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	3 Paket	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16.544 Peserta didik	397.403.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	16.544 Peserta didik	950.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 14	Penyajian dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	594 Satuan Pendidikan	271.593.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	594 Satuan Pendidikan	540.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	2.260 Orang	1.388.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	2.260 Orang	1.430.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	145.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	150 Satuan Pendidikan	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Mengingat Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	700 Orang	45.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jenjang PAUD	700 Orang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	18 Lembaga	955.000.000						18 Lembaga	4.050.000.000			
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2700 Peserta didik	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Siswa Putus Sekolah	2700 Peserta didik	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.04 13	Penyajian dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	17 Satuan Pendidikan	150.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Siswa Putus Sekolah	17 Satuan Pendidikan	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalanan Pengkaj/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2500 Orang	360.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Siswa Putus Sekolah	2500 Orang	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 Satuan Pendidikan	95.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Siswa Putus Sekolah	17 Satuan Pendidikan	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.04 22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	17 Satuan pendidikan	150.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Siswa Putus Sekolah	17 Satuan pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Nilai UN SD dan SMP	55.13 Persen	0 Persen						55.13 Persen	900.000.000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
1 01 03 2.01	Pemetaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	645 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	645 Lembaga	350.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Pendidik SD/SMP	645 Lembaga	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4 Dokumen		4 Dokumen	175.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tenaga Pendidik SD/SMP	4 Dokumen	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi	100 Orang		100 Orang	175.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tenaga Pendidik SD/SMP	100 Orang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	375 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	145.000.000						360 Lembaga	200.000.000			
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4 Dokumen		4 Dokumen	145.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Guru PAUD/Non Formal	4 Dokumen	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal	31,67 Persen	0 Persen	0 Persen	125.000.000						28.67 Persen	950.000.000			
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terwujudnya Pemerataan Penempatan Pendidik disetiap Lembaga	834 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	125.000.000						834 Lembaga	950.000.000			
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen		4 Dokumen	75.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Guru PAUD/Non Formal, SD dan SMP	4 Dokumen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 04 2.01 02	Penataan Distribusi Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21 Laporan		21 Laporan	50.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Guru PAUD/Non Formal, SD dan SMP	21 Laporan	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	115.000.000						100 Persen	200.000.000			
1 01 05 2.01	Pemberian Izin Pendidikan Dasar yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	115.000.000						12 Bulan	200.000.000			
1 01 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen		25 Dokumen	115.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jejaring PAUD/Non Formal, SD dan MTs	25 Dokumen	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.516.260.008							15.000.000.000			
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAWA SAING	Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	80 Persen	0 Persen	0 Persen	150.000.000						60 Persen	2.450.000.000			
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terdentuknya Kelompok pemuda yang bijwa wirausahaan baik dari sektor perdagangan, perikanan, peternakan, perikanan dan lain-lain	21 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	150.000.000						21 Kecamatan	2.450.000.000			
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Dawa Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Dawa Saingnya	150 Orang		150 Orang	150.000.000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemuda/ai	150 Orang	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAFTAR SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	80 Persen		0 Persen	70 Persen	3.331.260,008				70 Persen	12.150.000,000			
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pembinaan Pelatihan Daerah Bidang Olahraga	8 Cabor		0 Cabor	8 Cabor	1.804.960,008				8 Cabor	2.750.000,000			
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pelatnan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkulmpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	125.000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar dan Pemuda	250.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	8 Unit		8 Unit	1.679.960,008		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar dan Pemuda	2.500.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Cabor		0 Cabor	4 Cabor	450.000,000				4 Cabor	650.000,000			
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	450.000,000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar dan Pemuda	650.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pelatihan Daerah Bidang Olahraga	8 Cabor		0 Cabor	8 Cabor	40.000,000				8 Cabor	150.000,000			
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan dimanfaatkan	6 Dokumen		6 Dokumen	40.000,000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar/Pemuda	150.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Pemasaran Olahraga bagi Siswa dan Masyarakat	4 Event		0 Event	4 Event	1.036.300,000				4 Event	8.600.000,000			
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Dokumen		6 Dokumen	596.300,000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar/Masyarakat	8.000.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Mernsadi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Mernsadi	7 Unit		7 Unit	440.000,000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar/Masyarakat	600.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peningkatan Kegiatan Kepramukaan bagi pemuda dan siswa/i	21 Kecamatan		0 Kecamatan	21 Kecamatan	135.000,000				21 Kecamatan	400.000,000			
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terbentuknya Pusat Kegiatan Kepramukaan disetiap Kecamatan	21 Kecamatan		0 Kecamatan	21 Kecamatan	135.000,000				21 Kecamatan	400.000,000			
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	135.000,000		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pelajar/Pemuda	400.000,000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
TOTAL						502.261.569,785					879.599.800,000				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	151,453,781,835							172,850,371,306	
1 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	491,000,000							551,000,000	
1 02 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	3 Dokumen		275,000,000	
1 02 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	61,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	1 Dokumen		70,000,000	
1 02 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	1 Dokumen		55,000,000	
1 02 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	2 Dokumen		11,000,000	
1 02 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	4 Laporan		140,000,000	
1 02 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	113,976,282,096							131,648,871,306	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	3530 orang/bulan		3530 orang/bulan	113,868,282,096	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	3530 orang/bulan		131,498,871,306	
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	108,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	1 Laporan		150,000,000	
1 02 01 2.02 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 Persen	0 Persen	100 Persen	518,250,000							768,500,000	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Peralatan dan Pengalangan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	85 paket		85 paket	65,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	85 paket		95,000,000	
1 02 01 2.02 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	2 Paket		2 Paket	50,550,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	2 Paket		75,000,000	
1 02 01 2.02 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	20 Paket		20 Paket	5,700,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	20 Paket		8,500,000	
1 02 01 2.02 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	12 Laporan		12 Laporan	397,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	12 Laporan		590,000,000	
1 02 01 2.02 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen	6,616,666,667							10,000,000,000	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	337,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	12 Laporan		500,000,000	
1 02 01 2.02 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	62,79,166,667	Kab. Kampar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	12 Laporan		9,500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertintahan Daerah	yang Disediakan"	100 Persen		0 Persen	100 Persen	2.649.250.000	Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saling	dan Kesejahteraan Sosial		100 Persen	2.972.000.000	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	2 Unit			2 Unit	38.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	2 Unit	57.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	5 Unit			5 Unit	110.650.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	5 Unit	165.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi"	2 Unit			2 Unit	2.500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	2 Unit	2.750.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	27.202.333.072						100 Persen	26.910.000.000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	22.625.000.002						100 Persen	22.210.000.000	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	10 Unit			10 Unit	6.300.000.002	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	10 Unit	6.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	31 Unit			31 Unit	2.715.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	31 Unit	2.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit			31 Unit	1.000.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	31 Unit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit			31 Unit	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	31 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit			31 Unit	5.000.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	31 Unit	5.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	93 Unit			93 Unit	250.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	93 Unit	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket			1 paket	3.500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	1 paket	3.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.660.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	1 Paket	3.660.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persen		Persen	100 Persen	4.400.000.000						100 Persen	4.400.000.000	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	31 Dokumen			31 Dokumen	4.400.000.000	Kab. Kampar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan	Dinas Kesehatan	31 Dokumen	4.400.000.000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan			Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
1 02 02 2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0 Persen	100 Persen	177,333,070	Kecamatan, Semua Kelurahan		dan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		100 Persen	300,000,000			
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	177,333,070	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,642,792,800						1,807,072,080			
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,642,792,800						1,807,072,080			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	1,642,792,800					100 Persen	1,807,072,080			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	1,642,792,800	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kaplasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,807,072,080	DINAS KESEHATAN		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,642,792,800	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan				1 Unit Kerja	1,807,072,080	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					992,200,000						1,010,000,000			
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					992,200,000						1,010,000,000			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	992,200,000					100 Persen	1,010,000,000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	992,200,000					100 Persen	1,010,000,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	992,200,000	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kaplasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 unit kerja	1,010,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,530,264,978						1,683,291,475			
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,530,264,978						1,683,291,475			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 Persen Persen	0 Persen Persen	100 Persen Persen	1,530,264,978					100 Persen 100 Persen	1,683,291,475			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen	0 Persen	100 Persen	1,530,264,978	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kaplasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,683,291,475	DINAS KESEHATAN		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,530,264,978					1 Unit Kerja	1,683,291,475	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					997,883,854						1,097,672,239			
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					997,883,854						1,097,672,239			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 Persen Persen	0 Persen Persen	100 Persen Persen	997,883,854					100 Persen 100 Persen	1,097,672,239			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen	0 Persen	100 Persen	997,883,854					100 Persen	1,097,672,239			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	997,883,854	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kaplasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,097,672,239	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					997,883,854						1,097,672,239			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Praktikan Miju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,105,400,000					2,315,940,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	2,105,400,000				100 Persen	2,315,940,000			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	2,105,400,000				100 Persen	2,315,940,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 UNIT KERJA	2,105,400,000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 UNIT KERJA	2,315,940,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						873,620,000					960,982,000			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						873,620,000					960,982,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	873,620,000				100 Persen	960,982,000			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	873,620,000				100 Persen	960,982,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	873,620,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 Unit Kerja	960,982,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						995,096,256					1,094,605,882			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						995,096,256					1,094,605,882			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	995,096,256				100 Persen	1,094,605,882			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	995,096,256				100 Persen	1,094,605,882			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	995,096,256	Kab. Kampar, Kampar, Ubara, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 Unit Kerja	1,094,605,882	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						728,028,444					800,831,288			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						728,028,444					800,831,288			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	728,028,444				100 Persen	800,831,288			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	728,028,444				100 Persen	800,831,288			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	728,028,444	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 Unit Kerja	800,831,288	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						919,600,000					1,011,560,000			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						919,600,000					1,011,560,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	919,600,000				100 Persen	1,011,560,000			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	919,600,000				100 Persen	1,011,560,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 unit kerja	919,600,000	Kab. Kampar, Tapung, Gading Sari, Kab. Kampar, Tapung, Tanjung Sawit, Kab. Kampar, Tapung, Sibuk, Kab. Kampar, Tapung, Kenantan, Kab. Kampar, Tapung, Indrapuri, Kab. Kampar, Tapung, Sungai Lambu, Makmur	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 unit kerja	1,011,560,000	DINAS KESEHATAN		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususan/Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
													Nasional	Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Ususan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	907,051,332					1,065,278,065		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLD	Persen		Persen	100 Persen	907,051,332					997,756,465		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLD	Jumlah Bld yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			1 unit kerja	1 unit kerja	907,051,332					997,756,465	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Ususan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1,539,120,000					1,693,032,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLD	Persen		Persen	100 Persen	1,539,120,000					1,693,032,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLD	Jumlah bld yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (B7)			1 unit kerja	1 unit kerja	1,539,120,000					1,693,032,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	726,000,000					798,600,000		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLD	Jumlah bld yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			100 Persen	100 Persen	726,000,000					798,600,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Praktikum Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi				Prioritas	
												Sumber Dana	Nasional
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	726.000.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Sekijang, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Tebing Lestari, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Tanah Tinggi, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Tapung Lestari	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		100 Persen	798.600.000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 Unt Kerja		1 Unt Kerja	726.000.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Tapung Makmur, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Tandan Sari, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Gerbang Sari, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Kijang Jaya, Kab. Kampar, Tapung Hilir, Kijang Makmur	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	798.600.000	DINAS KESEHATAN	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					856.438.000					942.081.800		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	856.438.000				100 Persen	942.081.800		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	856.438.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Kasikan, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Bukit Kemuning, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Rimba Beringin, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Sulakramai, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Sumber Sari, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Kibau Makmur, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Talang Danto	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	100 Persen	942.081.800		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unt Kerja		1 Unt Kerja	856.438.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Sulakramai, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Sumber Sari, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Kibau Makmur, Kab. Kampar, Tapung Hulu, Talang Danto	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	942.081.800	DINAS KESEHATAN	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					421.080.000					463.188.000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	421.080.000				100 Persen	463.188.000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	erlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	421.080.000				100 Persen	463.188.000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (No. 97)	1 UNIT KERJA		1 UNIT KERJA	421.080.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Senama Nenek	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	463.188.000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
													Nasional	Daerah
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						645.639.060				710.202.966			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	645.639.060				710.202.966			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	645.639.060				710.202.966			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (No.97)			1 Unit Kerja		645.639.060	Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Batu Besurat Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Balung Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Koto Kampar, Tanjung Alai Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Binuang	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		710.202.966	DINAS KESEHATAN		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						267.410.000				294.151.000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	267.410.000				294.151.000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	267.410.000				294.151.000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			1 unit kerja		267.410.000	Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Gunung Bungsu Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Koto Tuo Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Muara Takus Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Pongki Kab. Kampar, XII Koto Kampar, Koto Tuo Barat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		294.151.000	DINAS KESEHATAN		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						468.068.780				514.875.658			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	468.068.780				514.875.658			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	468.068.780				514.875.658			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Praktikan Miju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedia Pelayan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	488,068,780	Kab. Kampar, Xlil Koto Kampar, Pulau Gadang Kab. Kampar, Xlil Koto Kampar, Ranah Singkil Kab. Kampar, Xlil Koto Kampar, Lubuk Agung Kab. Kampar, Xlil Koto Kampar, Koto Mesjid	Pendapatan dari BLUD	Pukesmas	1 Unit Kerja	514,875,658	DINAS KESEHATAN		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,504,891,641					1,555,380,805			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1,504,891,641				100 Persen	1,555,380,805			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,504,891,641				100 Persen	1,555,380,805			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit kerja			1 Unit kerja	1,504,891,641	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Pukesmas	1 Unit kerja	1,655,380,805	DINAS KESEHATAN		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						441,650,000					485,815,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	441,650,000				100 Persen	485,815,000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	441,650,000				100 Persen	485,815,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	441,650,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Pukesmas	1 Unit Kerja	485,815,000	DINAS KESEHATAN		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						435,164,400					478,680,840			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	435,164,400				100 Persen	478,680,840			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	435,164,400				100 Persen	478,680,840			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	435,164,400	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Gema Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Tanjung Belit Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Tanjung Belit Selatan Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Koto Lama Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Batu Sanggan Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Aur Kuning Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Ludai Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Tanjung Beringin Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Gajah Beralut	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pukesmas	1 Unit Kerja	478,680,840	DINAS KESEHATAN		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	368,852,958					405,738,254	405,738,254			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	368,852,958					405,738,254	405,738,254			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	368,852,958	Pendapatan Dana Kaptasi JKN pada FKTP				405,738,254	405,738,254	DINAS KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1,001,880,000					1,102,068,000	1,102,068,000			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,001,880,000					1,102,068,000	1,102,068,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,001,880,000	Pendapatan Dana Kaptasi JKN pada FKTP				1,102,068,000	1,102,068,000	DINAS KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	421,080,000					463,188,000	463,188,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Usrus/ Bidang Usrus/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	421,080,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Kebun Durian, Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Gunung Sahilan, Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Subarak				100 Persen	463,188,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penujangan Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	421,080,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Subarak	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit Kerja	463,188,000	DINAS KESEHATAN
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	423,500,000						100 Persen	465,850,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	423,500,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Gunung Sari, Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Suka Makmur, Kab. Kampar, Gunung Mulya, Gunung Sahilan, Makmur, Gunung Sahilan, Sejahtera					100 Persen	465,850,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujangan pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	423,500,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Gunung Sari, Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Suka Makmur, Kab. Kampar, Gunung Mulya, Gunung Sahilan, Makmur, Gunung Sahilan, Sejahtera	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit Kerja	465,850,000	DINAS KESEHATAN	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,016,400,000						100 Persen	1,118,040,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,016,400,000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Tanah Merah, Kab. Kampar, Siak Hulu, Pandau Jaya					100 Persen	1,118,040,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujangan pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,016,400,000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Tanah Merah, Kab. Kampar, Siak Hulu, Pandau Jaya	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,118,040,000	DINAS KESEHATAN	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1,002,944,316						100 Persen	1,103,238,748	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,002,944,316	Kab. Kampar, Siak Hulu, Teratak Buluh, Kab. Kampar, Siak Hulu, Lubuk Siam, Kab. Kampar, Siak Hulu, Buluh Nipis					100 Persen	1,103,238,748	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penujangan Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,002,944,316	Kab. Kampar, Siak Hulu, Teratak Buluh, Kab. Kampar, Siak Hulu, Lubuk Siam, Kab. Kampar, Siak Hulu, Buluh Nipis	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,103,238,748	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						611,292,000					672,421,200				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	611,292,000				100 Persen	672,421,200				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	611,292,000				100 Persen	672,421,200				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	611,292,000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Pangkajene, Serik, Kab. Kampar, Siak Hulu, Kubang Jaya	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Puskesmas	1 Unit Kerja	672,421,200	DINAS KESEHATAN			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,597,200,000					1,756,920,000				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	1,597,200,000				100 Persen	1,756,920,000				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1,597,200,000				100 Persen	1,756,920,000				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja 0 Unit Kerja	1,597,200,000	Kab. Kampar, Tumbang, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Puskesmas	1 Unit Kerja 0 Unit Kerja	1,756,920,000	DINAS KESEHATAN			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						842,160,000					926,376,000				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	842,160,000				100 Persen	926,376,000				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	842,160,000				100 Persen	926,376,000				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	842,160,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Puskesmas	1 Unit Kerja	926,376,000	DINAS KESEHATAN			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						925,651,452					1,018,216,597				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	925,651,452				100 Persen	1,018,216,597				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	925,651,452				100 Persen	1,018,216,597				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	925,651,452	Kab. Kampar, Kota Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,018,216,597	DINAS KESEHATAN			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						821,497,314					903,647,045				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Praktikran Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
													Nasional	Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	Persen	100 Persen	821,497,314				100 Persen	903,647,045		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tindaklanjutnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	821,497,314				100 Persen	903,647,045		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	821,497,314	Pendapatan Dana Kapitulasi JKN pada FKTP		Puskemas	1 Unit Kerja	903,647,045	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Dengan Standar	Persen	Persen	Persen	100 Persen	260,000,000				100 Persen	260,000,000		
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tindaklanjutnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	260,000,000				100 Persen	260,000,000		
1 02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan	12 Dokumen	260,000,000	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Dengan Standar	Persen	Persen	Persen	100 Persen	687,000,000				100 Persen	687,000,000		
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tindaklanjutnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	687,000,000				100 Persen	687,000,000		
1 02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	687,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan	12 Dokumen	687,000,000	DINAS KESEHATAN	
TOTAL														
							180,430,639,420					204,616,616,248		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02					123,670,784,928						193,395,301,764		
1	02	01	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	101,169,437,164					100 Persen	110,693,954,000	
1	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	52,000,000					100 %	68,000,000	
1	02	01	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	13,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	17,000,000	
1	02	01	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	13,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	17,000,000	
1	02	01	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	13,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	17,000,000	
1	02	01	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	13,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	17,000,000	
1	02	01	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	34,976,770,497					100 %	37,375,954,000	
1	02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			269 Orang/bulan	34,963,770,497	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		269 Orang/bulan	37,358,954,000	
1	02	01	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	13,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Laporan	17,000,000	
1	02	01	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	400,000,000					100 %	1,350,000,000	
1	02	01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		4 Dokumen	350,000,000	
1	02	01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang		43 Orang	300,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		43 Orang	1,000,000,000	
1	02	01	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	2,594,000,000					100 %	9,500,000,000	
1	02	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		10 Paket	500,000,000	
1	02	01	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	300,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		6 Paket	1,000,000,000	
1	02	01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	594,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		12 Paket	5,000,000,000	
1	02	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	600,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kuantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		12 Paket	1,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usruh/Bidang Usruh/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Prangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	12 Paket	1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	40 Laporan	1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usruh Pemerintah Daerah	Teraksananya Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Usruh Pemerintah Daerah	16 Unit		0 Unit	4 Unit						4 Unit	1,000,000,000	
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	1 Unit	1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usruh Pemerintahan Daerah	Teraksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usruh Pemerintahan Daerah	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	12,850,000,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	12 Laporan	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	12 Laporan	7,850,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Teraksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun						1 Tahun	48,550,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	1 Unit Kerja	48,550,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100 Persen		0 Persen	100 Persen						100 Persen	69,550,000,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %						100 %	67,550,000,000	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	1 Unit	48,550,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	10 Unit		10 Unit	10 Unit	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	10 Unit	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	25 Unit	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Penyelharan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	3 Unit		3 Unit	3 Unit	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0	3 Unit	500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi					Prioritas	
													Sumber Dana	Nasional
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Maintenance Center Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				3 Paket	500,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	5,000,000,000 DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan/penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %		100 %	700,000,000				100 %	2,000,000,000		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	500,000,000 DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1,000,000,000 DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	500,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	500,000,000 DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	100 Persen	0 Persen		100 Persen	13,051,347,764				100 Persen	13,151,347,764		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	48 %	0 %		12 %	13,051,347,764				12 %	13,151,347,764		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				292 Orang	13,051,347,764	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Kumantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	292 Orang	13,151,347,764 DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
TOTAL							123,670,784,928					193,395,301,764		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
									Nasional	Daerah				
1														
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	03					100 Persen	144.220.370.841						134.875.000.000	
1	03	01	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	0 Persen	100 Persen	17.173.897.772					100 Persen	20.075.000.000	
1	03	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	490.000.000					4 Dokumen	560.000.000	
1	03	01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	70.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		3 Laporan	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	70.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Laporan	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	10.332.231.105					1 Tahun	11.080.000.000	
1	03	01	01	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		163 Orang/bulan	10.262.231.105	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		163 Orang/bulan	11.000.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	02	Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 Laporan	70.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Laporan	80.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	05	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Tahun	60.000.000					1 Tahun	60.000.000	
1	03	01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang	30.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		12 Orang	30.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang	30.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		12 Orang	30.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	895.000.000					1 Tahun	895.000.000	
1	03	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1 Paket	15.000.000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Paket	15.000.000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usury/Bidang Usury/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	80.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Paket	80.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan			20 Laporan	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Laporan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	2.200.000.000						1 Tahun	4.200.000.000	
1 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1.196.666.667						1 Tahun	1.280.000.000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	36 Laporan	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	916.666.667	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Fasilitas penunjang Kinerja	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	2.000.000.000						1 Tahun	2.000.000.000	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit			6 Unit	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	6 Unit	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Pajak dan Perizinan lainnya	30 Unit			30 Unit	350.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	30 Unit	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinasnya				23 Unit	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	23 Unit	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	30 Unit	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Irigasi Dalam Kondisi	70 Persen	0 Persen		70 Persen	3,800,000,000						70 Persen	10,800,000,000	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	61 Persen	0 Persen		55 Persen	3,800,000,000						55 Persen	10,800,000,000	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Dibangun				0.5 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.5 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Bendung	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0.5 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.5 KM	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				5 Titik	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	5 Titik	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				0.5 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.5 KM	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Ditingkatkan				0.3 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.3 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				1 Bendung	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Bendung	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0.3 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.3 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan				5 Titik	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	5 Titik	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan				0.3 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.3 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Direhabilitasi				1 Km	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Km	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Bendung	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang				0.5 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	0.5 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02 19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Direhabilitasi				0.3 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0.3 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Diperbaiki				1 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 KM	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Diperbaiki dan Dipelihara				1 Bendung	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Bendung	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 02 2.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Diperbaiki dan Dipelihara				0.5 KM	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0.5 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				5 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	5 Unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	85 Persen		0 Persen	85 Persen	3,400,000,000					85 Persen	600,000,000		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	86 Persen		0 Persen	80 Persen	3,400,000,000					80 Persen	600,000,000		
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKY/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				50 Liter/Detik	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	50 Liter/Detik	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	100 Persen			20 SR	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	20 SR	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permasalahan Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar				100 Persen	600,000,000					100 Persen	600,000,000		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah	8 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	600,000,000					2 Kegiatan	600,000,000		
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat Skala Kota				100 Rumah Tangga	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 Rumah Tangga	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100 Persen		0 Persen	100 Persen	15,400,000,002	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 Persen	10,400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurusnya kawasan rawan genangan/banjir				80 Persen	15,400,000,002					80 Persen	10,400,000,000		
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Sistem jaringan drainase perkotaan berfungsi baik				80 Persen	15,400,000,002					80 Persen	10,400,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Unsur/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 M		500 M	15,000,000,002	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		500 M	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Diperbaiki dan Dipelihara	200 M		200 M	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		200 M	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	90 Persen	0 Persen	90 Persen	22,600,000,001					90 Persen	30,400,000,000				
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100 Persen	0 Persen	100 Persen	22,600,000,001					100 Persen	30,400,000,000				
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Perencanaan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Perencanaan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		3 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	5,500,000,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		20 Dokumen	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08 2.01 09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	10 Unit		10 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		10 Unit	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi, dan Urahan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Urahan	2 Unit		2 Unit	16,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Unit	18,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Persen	0 Persen	80 Persen	78,846,473,066					80 Persen	99,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	66 Persen	0 Persen	60 Persen	78,846,473,066					60 Persen	99,600,000,000				
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/embatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/embatan	2 Dokumen		2 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususny/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM		10 KM	10 KM	63,188,973,054	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	10 KM	30,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5 KM		5 KM	5 KM	3,437,500,005	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	5 KM	10,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.5 Km		1.5 Km	1.5 Km	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1.5 Km	1,500,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1 KM		1 KM	1 KM	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 KM	1,500,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 KM		100 KM	100 KM	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	100 KM	1,500,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	30 M		30 M	30 M	7,400,000,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	30 M	10,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Secara Rutin	20 M		20 M	20 M	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	20 M	1,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 M		30 M	30 M	720,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	30 M	1,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	2 KM		2 KM	2 KM	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 KM	1,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	2 KM		2 KM	2 KM	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 KM	1,000,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Jasa Konstruksi	100 Persen		0 Persen	25 Persen	1,000,000,000						25 Persen	1,000,000,000	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Terselenggaranya SIPIAKI	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	600,000,000						1 Tahun	600,000,000	
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPIAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapabilitas Administrator SIPIAKI	5 Orang		5 Orang	5 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	5 Orang	200,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.04 02	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Teraksananya Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	400.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Tahun	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 11 2.04 03	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10 Orang			10 Orang	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Orang	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Laporan			2 Laporan	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Laporan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Teraksananya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	1.400.000.000					100 Persen	1.400.000.000		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten/Kota	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	800.000.000					1 Tahun	800.000.000		
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Masterplan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000					2 Dokumen	200.000.000		
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya Kegiatan Pemanfaatan dan wilayah Kabupaten Kampar	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000					1 Dokumen	200.000.000		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Monitoring Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000					1 Dokumen	200.000.000		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						600.000.000						600.000.000		
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Teraksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian	100 Persen	0 Persen	0 Persen	25 Persen	200.000.000					25 Persen	200.000.000		
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan oleh	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	200.000.000					1 Tahun	200.000.000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana				
Kabupaten Kampar												
Prioritas												
Nasional												
Daerah												
2 10 05 2.01 02	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kegiatan dan Sertunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	100 Persen	0 Persen	25 Persen	200,000,000		25 Persen	200,000,000			
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tanah Milik pemerintah Kabupaten teridentifikasi dan terdata dengan baik	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	200,000,000			
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Dinventarisasi.	2 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	2 Laporan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN ZIN MEMBUKA TANAH	Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara	25 Persen	0 Persen	25 Persen	200,000,000		25 Persen	200,000,000			
2 10 09 2.01	Penerbitan izin Membuka Tanah	Terkordinasinya penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	200,000,000			
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
TOTAL											144,820,370,841	135,475,000,000

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah					
1																
1																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen		100 Persen	8,503,174,079				39,524,097,069			100 Persen	36,236,509,699	
1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen		6 Dokumen	930,117,500							6 Dokumen	1,148,000,000	
1	04	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	700,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				5 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	85,434,989	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas				1 Dokumen	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	29,773,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas				1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	50,002,722	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas				1 Dokumen	33,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	24,747,513		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas				1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	40,158,886	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas				5 Laporan	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50 Orang/Bulan	4,793,529,325							50 Orang/Bulan	5,078,109,699	
1	04	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	4,743,005,383	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas			50 Orang/bulan	5,023,109,699	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	17,773,852	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas			1 Laporan	20,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	32,750,090	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas			12 Laporan	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	11,000,000							2 Dokumen	12,000,000	
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	11,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas			4 Laporan	12,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15 Orang	272,314,008							15 Orang	365,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
1 04 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	25,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Unit	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	60,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	80,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	85,520,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	110,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	71,794,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	90,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket	1,064,673,384						4 Paket	1,277,500,000			
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,716,868	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	376,252,336	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	450,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	73,840,800	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	85,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,675,502	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	5,400,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	6,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 Laporan	578,787,878	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas		Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255 Laporan	700,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKUMIHAN		
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	250,000,000						0 Unit	420,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	120,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Laporan	0 Laporan		14 Laporan	806,386,867					14 Laporan	991,000,000		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	49,980,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	64,415,200	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	75,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	691,991,667	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	856,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	11 Unit	0 Unit		11 Unit	375,152,995					11 Unit	520,000,000		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	2 Unit			2 Unit	79,362,326	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Unit	90,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	119,825,915	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	5 Unit	130,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	75,964,754	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Unit			2 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Tingkat Pemenuhan	2 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Prioritas					
										Nasional	Daerah				
1 04 02	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen			100 Persen	1,500,200,000	Langgini				penyediaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 Persen	1,500,200,000	PELUKIMAN
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	1,929,928,752						100 Persen	1,500,200,000	
1 04 02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000						5 Dokumen	500,000,000	
1 04 02	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Identifikasi Lahan-Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Tingkat Kerusakan Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerosakan Rumah	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pendataan dan Verifikasi Pencerna Rumah bagi Korban Bencana Alam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah data Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Program Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbahalitasi	6 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit	1,209,828,752						4 Unit	400,100,000	
1 04 02	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit			4 Unit	105,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah Rumah atau Program Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbahalitasi dan terbahalitasi	4 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	2 Unit			2 Unit	104,828,752	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah Rumah atau Program Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun dan terbahalitasi	2 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN
1 04 02	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbahalitasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbahalitasi	14 Unit			14 Unit	1,000,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah Rumah atau Program Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun dan terbahalitasi	14 Unit	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usus/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	15 Unit	100,000	100,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	15 Unit	100,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN				
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Dokumen	470,000,000	0 Dokumen				1 Dokumen	600,000,000					
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara Elektronik	0 Dokumen 1 Dokumen	170,000,000	0 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN				
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	300,000,000	50 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	50 Laporan	350,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN				
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh di bawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	2500 Unit	843,374,000	0 Unit				500 Unit	1,490,100,000					
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	53 Dokumen	130,000,000	0 Dokumen				53 Dokumen	250,000,000					
1 04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan terintegrasi secara elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	50 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan	50 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN			
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh yang disusun dan/atau direview serta terlegalisasi	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN			
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh	50 Laporan	30,000,000	50 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik yang	50 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usury/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional						Daerah
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000					diberikan	3 Dokumen	440.000.000		
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	1 Dokumen	140.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50 Laporan			50 Laporan	30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	50 Laporan	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Agalisasi Kebijakan Bidang RKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang RKP yang Tersusun/Review /Teragalisasi	1 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	1 Dokumen	140.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	20 Unit		0 Unit	15 Unit	493.374.000						15 Unit	800.100.000		
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	1 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	1 Dokumen	140.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15 Unit Rumah			15 Unit Rumah	343.274.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	15 Unit Rumah	500.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50 Laporan			50 Laporan	30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	50 Laporan	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.03 07	Pondataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	50 Dokumen			50 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	50 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	14 Unit			14 Unit	100.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang teratai	14 Unit	100.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	11.800.000.000						100 Persen	12.150.000.000		
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	500 Unit		0 Unit	230 Unit	11.800.000.000						230 Unit	12.150.000.000		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang diperbaiki	230 Unit			230 Unit	11.700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	230 Unit	12.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	
1 04 04 2.01 02	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUMUKIMAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Teraksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	765 Paket		0 Paket	153 Paket	16,045,543,964				153 Paket	10,785,000,000	
1 04 05 2.01	Usuan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	50 Lokasi		0 Lokasi	50 Lokasi	16,045,543,964				50 Lokasi	10,785,000,000	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan				2 Dokumen	175,000,000				2 Dokumen	185,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				50 Lokasi	15,380,543,964				50 Lokasi	10,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				50 Laporan	90,000,000				50 Laporan	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan Perumahan				20 Dokumen 0 Laporan	400,000,000				20 Dokumen 0 Laporan	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN	Teraksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	402,076,274				100 Persen	500,000,000	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemungkinan Kecil	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	402,076,274				4 Laporan	500,000,000	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				4 Laporan 0 Laporan	402,076,274				4 Laporan 0 Laporan	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
TOTAL							39,524,097,069					36,236,509,699	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usung/ Bidang Usung/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD RKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Nasional	Target		Pagu Indikatif
1																
1	05					15,131,193,315								16,920,837,396		
1	05	01	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	13,340,431,286							100 Persen	14,879,386,338	
1	05	01	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	3,499,523							25 %	18,000,000	
1	05	01	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	8,000,000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Persentase Cakupan Layanan Penyusunan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persen	Persen	100 Persen	3,592,794,227							100 Persen	3,806,105,404	
1	05	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	3,796,105,404	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Laporan	8,000,000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	30,000,000							100 %	130,000,000	
1	05	01	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan			3 Stel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	PNS Satpol. PP Kabupaten Kampar			3 Stel	30,000,000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	986,830,407							25 %	1,027,475,213	
1	05	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Paket	13,603,200	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Paket	237,901,813	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Paket	301,805,200	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Paket	15,520,194	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
1	05	01	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Dokumen	18,480,000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Kelompok Saaran	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	399.520.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	440.164.806	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	25 %	7.955.831.312						25 %	8.676.329.904				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	30.346.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	30.346.800	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Relyayan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Relyayan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.925.484.512	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	8.645.983.104	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	100 %	771.475.817						25 %	971.475.817				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	99.243.213	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	99.243.213	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	11 Unit	468.580.604	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	11 Unit	468.580.604	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	106.144.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	33 Unit	306.144.000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	97.508.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	97.508.000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERIBAHAN DAN KETERIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Keteribahan dan Keteriban Umum yang dilaksanakan	100 Persen	1.790.762.029						100 Persen	2.041.451.058				
1 05 02 2.01	Panangan Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panangan Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.790.762.029						100 Persen	2.041.451.058				
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum Melalui Dereksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum yang Dicegah Melalui Dereksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	15 Kasus	827.780.532	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	15 Kasus	827.780.532	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Keteribahan dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	17 Kasus	685.278.566	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	17 Kasus	830.000.000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Masa yang Dilakukan Pendidikan Jumlah Dokumen yang Menuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum				21 Dokumen	99.032.405	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	21 Dokumen	200.000.000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Tersuok dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				87 Orang	163.670.526	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	87 Orang	163.670.526	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	15.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	1 Laporan	20.000.000	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	
						TOTAL	15.131.193.315						16.920.837.396		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						Prioritas	
1																	
1							17,028,703,724						17,811,236,885				
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Person	Person	Person	100 Persen	8,428,296,594						100 Persen				
1	05	01	Dokumen	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	275,573,904						12 Dokumen				
1	05	01	01			7 Dokumen	223,117,904						7 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	02			1 Dokumen	7,197,750						1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	03			1 Dokumen	6,885,900						1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	04			1 Dokumen	6,885,900						1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	05			1 Dokumen	6,885,900						1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	06			1 Laporan	24,600,550						1 Laporan		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.02			Laporan	3,584,842,366						1 Laporan		3,541,339,608		
1	05	01	2.02			31 Orang/bulan	3,583,474,476						31 Orang/bulan		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.02			1 Dokumen	1,367,886						1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.05			Paket	104,000,000						126 Paket		126,000,000		
1	05	01	2.05			125 Paket	104,000,000						125 Paket		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usus/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	815,259,913	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	5 Paket	927,557,147	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11,504,250	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Paket	12,654,675	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				129,996,738	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Paket	139,996,738	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				52,185,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Paket	58,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				22,368,490	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Paket	24,330,834	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				14,256,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Dokumen	15,681,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				584,949,435	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	100 Laporan	676,893,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	973,021,092	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	1,052,646,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				550,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	1 Unit	610,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				423,021,092	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	20 Unit	440,646,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1,922,701,294	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	2,485,318,657	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				156,258,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	2 Laporan	171,883,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,766,443,294	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	12 Laporan	2,312,434,857	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	752,898,025	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	1,289,160,557	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				547,723,400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	BPRD Kabupaten Kampar	10 Unit	632,931,970	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
1 05 01 2.09 06	Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	195.174.625	Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	30 Unit	253.293.087	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Unit	282.996.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar	Persen			100 Persen	8.600.407.130					100 Persen	8.085.984.742		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			1 Dokumen	697.821.515					1 Dokumen	966.016.062		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Diligalisasi				1 Dokumen	599.292.738	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	659.516.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tarap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	98.528.777	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100 Orang	306.500.062	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tercapainya Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen			3 Dokumen	6.294.797.390					3 Dokumen	5.340.064.397		
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				80 Orang	421.867.210	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	80 Orang	299.053.931	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				15 Unit	93.779.425	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	15 Unit	103.157.967	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				5 Kawasan	62.551.220	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Kawasan	68.806.353	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 07	Pengamanan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana				20 Paket	5.648.167.005	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	20 Paket	4.053.986.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				200 Orang	68.432.520	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	200 Orang	75.275.772	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tercapainya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan		Laporan	2 Laporan	1.475.000.000				2 Laporan	1.629.437.236			
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				250 Orang	496.860.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	553.552.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				300 Orang	338.450.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	375.165.605	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	639.688.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	697.716.831	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tercapainya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	132.788.225				4 Dokumen	150.067.047			
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Bihwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				2 Laporan	132.788.225	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPRD dan Masyarakat Kabupaten Kampar	146.067.047	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
TOTAL						17.028.703.724						17.811.236.885			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
									Nasional	Sumber Dana						
1																
1							16,143,152,668								22,360,000,000	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	13,494,252,668							100 Persen	19,690,000,000	
1	05	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	20 persen	20 persen	680,200,000							20 persen	1,220,000,000	
1	05	01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					140,200,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	210,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	220,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	170,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	170,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 05 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD					100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Laporan	170,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					140,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	1 Laporan	160,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,991,149,668							1 dokumen	3,770,000,000	
1	05	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2,941,149,668							25 Orang/bulan	3,500,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	120,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD					10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	60,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Daerah	
															Nasional	Daerah
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan milik daerah skpd	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen	160,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	70,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.04	Administrasi Pendapat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	tersedianya objek dan subjek dan wajib retribusi daerah	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	10,000,000					2 dokumen	40,000,000			
1 05 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.05	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	16 orang		0 orang	16 orang	370,000,000					16 orang	410,000,000			
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket		260 Paket	260 Paket	270,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260 Paket	290,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Orang	60,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Orang	60,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 paket		0 paket	1 paket	1,190,000,000					1 paket	1,370,000,000			
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	60,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	500,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	170,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	190,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	60,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	400,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususn/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pengu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Prioritas						
										Nasional	Daerah					
1 05 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tersedia	52 unit	0 unit	0 unit	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	52 unit	0 unit	0 unit	52 unit	402,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	52 unit	1,700,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Unit	500,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	4 Unit	400,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	2 Unit	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	70,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	10 Unit	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	2 Unit	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Unit	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Unit	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya jasa penyediaan surat menyurat	3 laporan	0 laporan	3 laporan	3 laporan	5,590,000,000				3 laporan	8,110,000,000				
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Laporan	30,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Laporan	80,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,500,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Laporan	8,000,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas untuk dinas	2 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2,230,903,000				2 unit	2,910,000,000				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	2 Unit	90,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	2,080,903,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	7 Unit	2,300,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Unit	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkas Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana							Prioritas	
																Nasional	Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Persen	0 Persen	70 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	Nasional	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	7 Unit	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	0 Persen	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	Nasional	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1 Unit	40.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	0 Persen	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	Nasional	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	2 Unit	40.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70 Persen	0 Persen	70 Persen			2.670.900.000	2.670.900.000			70 Persen	2.670.000.000				
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen repm yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran	54 laporan	0 laporan	54 laporan			1.400.000.000	1.400.000.000			54 laporan	1.560.000.000				
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1 Dokumen	90.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1 Laporan	80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1 Dokumen	70.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1 Dokumen	80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri secara berkala (setiap tahun), sah, dan legal	0 Dokumen 1 Dokumen		0 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas	0 Dokumen 1 Dokumen	500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri yang telah legal	10 Unit		10 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000	550.000.000		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	10 Unit	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan	200 Orang		200 Orang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350.000.000	350.000.000		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur	200 Orang	30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
		Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					Semua Kelurahan				Yang Berkualitas	kabupaten kampar				
1 05 04 2.01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun). Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				21 Desa/Kelurahan	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	21 Desa/Kelurahan	80.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berdasarkan antar Lembaga, dan Kerjasama dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	1 Dokumen	80.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.01 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	150.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Public Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	1 Keluarga	150.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.02	Inspeksi Pelatihan Proteksi Kebakaran	tersedianya dokumen yang memuat data bangunan lingkungan yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	250.000.000						2 dokumen	170.000.000		
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelemb. Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	1 Dokumen	80.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelemb. Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	0 Dokumen 1 Dokumen	90.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	50.000.000						1 dokumen	80.000.000		
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	1 Dokumen	80.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	10 kelurahan		0 kelurahan	10 kelurahan	735.900.000						10 kelurahan	490.000.000		
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				21 Desa/Kelurahan	688.900.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	21 Desa/Kelurahan	400.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kampar	1 Dokumen	90.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Spras Damkar												
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	tersedianya laporan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	1 laporan		0 laporan	210,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 laporan	370,000,000		
1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan			50,000,000			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas		1 Laporan	90,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 04 2.05 02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen			50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas		1 Dokumen	90,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 04 2.05 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	7 Unit			60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas		7 Unit	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 04 2.05 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan			50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas		1 Laporan	90,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
TOTAL						16,143,152,666						22,360,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penngkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						Prioritas	
1																	
1							15,481,922,628						20,766,292,357				
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	7,795,627,559						100 Persen	9,552,284,293			
1	06	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	481,600,000						100 %	547,000,000			
1	06	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	395,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Dokumen	400,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,600,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen	40,500,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen	16,500,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen	13,500,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen	19,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	18,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Laporan	50,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	3,378,258,593						100 %	3,560,404,293			
1	06	01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3,361,758,593	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	33 Orang/bulan	3,545,404,293	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	15,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	94,500,000						100 %	285,000,000			
1	06	01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	45,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN Dinas Sosial	4 Orang	135,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	49,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	ASN Dinas Sosial	4 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	551,650,000						100 %	1,024,380,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Unsur/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Daerah	
															Nasional	Daerah
1 06 01 2.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	12.500.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	27.550.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	400.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	65.200.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	52.500.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	42.500.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	38.500.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen			5 Dokumen	25.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.280.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	365.200.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	495.600.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintahan	100 %	0 %		100 %	1.035.000.000						2.223.500.000			
1 06 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	35.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	550.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			7 Unit	350.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Unit	550.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	125.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Unit	180.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	85.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	80.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit			2 Unit	440.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Unit	695.000.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	1.177.547.500						1.166.000.000			
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon dan Tenaga Harian Lepas (THL))	1 Laporan	23.500.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	256.500.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon dan Tenaga Harian Lepas (THL))	1 Laporan	142.500.000	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	35.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon dan Tenaga Harian Lepas (THL))	1 Laporan	50.000.000	DINAS SOSIAL		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %			1 Laporan	860,447,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jasa Penunjang Usuan Pemerintah (Unit: Menyurat, Usink, Air, Telepon dan tenaga Harian Lepas (THL))	1 Laporan	950,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %		100 %	1,077,071,466					100 %	746,000,000			
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	145,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Unit	75,500,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	285,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Unit	175,500,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	25 Unit	45,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	582,071,466		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Unit	450,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PPSK yang Menangani PMKS	262 Orang PPSK	0 Orang PPSK	0 Orang PPSK	262 Orang PPSK	2,740,750,457					262 Orang PPSK	4,666,341,244			
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM PPSK di Kabupaten Kampar	235 Orang PPSK	0 Orang PPSK	0 Orang PPSK	262 Orang PPSK	2,740,750,457					262 Orang PPSK	4,666,341,244			
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	570,415,190	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	60 Orang	645,083,550	DINAS SOSIAL	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	281,103,433	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	21 Orang	286,803,433	DINAS SOSIAL	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				35000 Keluarga	924,475,088	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	35000 Keluarga	915,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelangkaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	914,756,746	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	5 Lembaga	2,664,756,746	DINAS SOSIAL	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	20 Sertifikat	154,097,515	DINAS SOSIAL	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	160 Orang PMKS	0 Orang PMKS	0 Orang PMKS	160 Orang PMKS	1,518,315,924					160 Orang PMKS	2,110,000,000			
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPSK yang terlayani	170 Orang PPSK	0 Orang PPSK	0 Orang PPSK	150 Orang PPSK	1,133,315,924					150 Orang PPSK	1,710,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	35,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	100 Orang	45,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mengalami Kekurangan Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	45,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	100 Orang	55,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	395,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	30 Orang	650,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	320,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	200 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	338,315,924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	100 Orang	275,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial														
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	385,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	21 Orang	400,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	65,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	1000 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantaran Fakir Miskin Kabupaten/Kota	35000 Keluarga	183,813,782	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	35000 Keluarga	100,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 05 2.02 03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35000 Keluarga	349,787,366	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	35000 Keluarga	200,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 05 2.02 04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	646,347,924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	50 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota														
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	100 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL					
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang	100 Orang	75,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kampar	100 Orang	300,000,000	DINAS SOSIAL					

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional							
										Saling							
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedia pada Masa Tanggap Darat (pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	228,160,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	840,000,000	DINAS SOSIAL		
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	179,424,420	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Kampar	50 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL		
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat penyelenggara terhadap kesiapsiagaan bencana	85 Orang Tagana	0 Orang Tagana	75 Orang Tagana	600,230,376	600,230,376						75 Orang Tagana	735,000,000			
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	85,200,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	KSB dan Relawan Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	175,000,000	DINAS SOSIAL		
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	515,030,376	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	KSB dan Relawan Taruna Siaga Bencana	72 Orang	560,000,000	DINAS SOSIAL		
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	15 Makam	0 Makam	15 Makam	1,047,464,820	1,047,464,820						15 Makam	1,097,666,820			
1 06 07 2.01	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	2 Makam Pahlawan	0 Makam Pahlawan	2 Makam Pahlawan	1,047,464,820	1,047,464,820						2 Makam Pahlawan	1,097,666,820			
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Peneliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	450,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	1 Dokumen	385,202,000	DINAS SOSIAL		
1 06 07 2.01 02	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Tergenubi Penelitiannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	527,144,540	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	2 Makam	627,144,540	DINAS SOSIAL		
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	70,320,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	1 Laporan	85,320,280	DINAS SOSIAL		
						TOTAL	15,481,922,628							20,766,292,357			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional							Pagu Indikatif	
																2023	2024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2 07						2.130.000.000							2.795.000.000				
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terlaksananya program-program perencanaan tenaga kerja	100 Persen	0 Persen		160.000.000							50.000.000	100 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 persen	0 persen		180.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0 Persen		150.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	10 Orang	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	10 Orang	0 Persen		30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	10 Orang	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100 Persen	0 Persen		470.000.000					25 Persen	675.000.000					
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100 persen	0 persen		335.000.000					100 persen	500.000.000					
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Terlaksananya pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja	40 Orang 2 kali			300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	40 Orang 2 kali	450.000.000	450.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga			35.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	3 Lembaga	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tersedianya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen	0 persen		30.000.000					100 persen	50.000.000					
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	3 Lembaga			30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3 Lembaga	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100 persen	0 persen		30.000.000					100 persen	50.000.000					
2 07 03 2.03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Terintegrasi	3 Lembaga			30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Lembaga Pelatihan Kerja	3 Lembaga	50.000.000	50.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan kecil	100 persen	0 persen		30.000.000					100 persen	30.000.000					
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan Kecil			30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Perusahaan Kecil	10 Perusahaan Kecil	30.000.000	30.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen		45.000.000					100 persen	45.000.000					
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	1 Dokumen 3 Perusahaan 3 Orang			45.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pencari Kerja Kabupaten Kampar	1 Dokumen 3 Perusahaan 3 Orang	45.000.000	45.000.000	100 persen	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.	100 persen	0 persen	0 persen	25 Persen	520,000,000				25 Persen	920,000,000			
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tewujudnya Pelayanan Antar tenaga Kerja	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	295,000,000				100 persen	420,000,000			
2 07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				5000 Orang	110,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	5000 Orang	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				15 Orang	35,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	15 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				2 Orang	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	2 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.01 04	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yg dilaksanakan				7 Unit	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	7 Unit	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				15 Orang	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pencari Kerja di Kabupaten Kampar	15 Orang	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	30,000,000				100 persen	30,000,000			
2 07 04 2.02 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				1 Lembaga	25,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari Kerja Kabupaten Kampar	1 Lembaga	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari Kerja Kabupaten Kampar	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Tenaga Kerja	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	130,000,000				100 persen	320,000,000			
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari Kerja Kabupaten Kampar	1 Dokumen	220,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Online (Karir Hub)				50 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari Kerja Kabupaten Kampar	50 Orang	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2 07 04 2.04	Peindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	65,000,000				100 persen	150,000,000			
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				5 Orang	25,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	5 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 07 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LISA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	0 Persen	5 Orang	25,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	5 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Dibercayakan	5 Orang	0 Persen	5 Orang	15,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	5 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100 Persen	0 Persen	25 Persen	960,000,000				25 Persen	1,150,000,000				
2 07 05 2.01	Penggesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perusahaan yang Hanya Beroperasi di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perijinan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	100 persen	480,000,000				100 persen	550,000,000				
2 07 05 2.01 01	Penggesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teregistrasi di WLPK Online	100 Perusahaan	0 Perusahaan	100 Perusahaan	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	100 Perusahaan	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perijinan Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perijinan kerja yang terdapat	15 perijinan	0 perijinan	15 perijinan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	15 perijinan	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PRK, Struktur Skala Ujian, dan LIS/Bipartit) dan Pekerja yang terdapat sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Tersedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga Kerja	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	100 persen	480,000,000				100 persen	600,000,000				
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kehidupan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	0 Perkara	10 Perkara	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Perkara	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kehidupan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan	50 kasus	0 kasus	50 kasus	140,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	50 kasus	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Reputasi Kemitraan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Pekerja/Serikat Pekerja yang Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	5 Lembaga	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14000 Orang	0 Orang	14000 Orang	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	14000 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Peringkat Industri	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Page Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
										Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	9.335.463.703						100 Persen	12.014.945.566		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	7.125.463.703						100 Persen	7.914.945.566		
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	291.803.188						100 persen	294.000.000		
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedianya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					149.803.188					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	3 Dokumen 3 dokumen	150.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.500.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Dokumen 1 Dokumen	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.500.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Dokumen 1 Dokumen	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					7.500.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Dokumen 1 Dokumen	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					7.500.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Dokumen 1 Dokumen	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					23.000.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	12 Laporan 1 dokumen	25.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan					89.000.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Laporan 1 Dokumen	89.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	3.879.227.854						100 persen	4.058.011.754		
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN					3.865.964.854					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	33 Orang 12 Bulan	4.043.011.754		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD					7.500.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Laporan 1 Dokumen	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.763.000					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	18 Laporan	7.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
										Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3 31 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	114,200,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	100 persen	100,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	788,420,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	12 Orang 12 orang	100,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	788,420,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	100 persen	1,130,920,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				1 Paket 12 bulan	7,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	1 Paket 12 bulan	10,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				2 Paket 12 bulan	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	2 Paket 12 bulan	110,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia				3 Paket 12 bulan	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	3 Paket 12 bulan	150,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				1 Paket 12 bulan	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	1 Paket 12 bulan	50,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				2 Dokumen 12 bulan	10,920,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	2 Dokumen 12 bulan	10,920,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia				250 Laporan 12 bulan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	250 Laporan 12 bulan	800,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	370,300,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	100 persen	350,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	2 Unit	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan 1 Unit	160,300,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	1 Laporan 1 Unit	200,000,000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 31 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	1 Unit	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	0 persen	100 persen	1,255,512,661					100 persen	1,356,013,812			
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	12 Laporan	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan 12 bulan		36 Laporan 12 bulan	1,105,512,661	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	36 Laporan 12 bulan	1,206,013,812	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	0 persen	100 persen	425,000,000					100 persen	626,000,000			
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas	5 Unit 12 bulan		5 Unit 12 bulan	196,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	5 Unit 12 bulan	196,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kampar	1 Unit	30,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit 12 Bulan		1 Unit 12 Bulan	200,000,000					1 Unit 12 Bulan	400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terkelaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 Persen	0 Persen	100 Persen	1,850,000,000					100 Persen	3,550,000,000			
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terselenggaranya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	100 persen	1,850,000,000					100 persen	3,550,000,000			
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri terkelaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen 1 tahun		1 Dokumen 1 tahun	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Industri di wilayah Kabupaten Kampar	1 Dokumen 1 tahun	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Unit		2 Unit	400,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Industri di wilayah Kabupaten Kampar	2 Unit	800,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat terkelaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen 12 bulan		1 Dokumen 12 bulan	1,200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Industri di wilayah Kabupaten Kampar	1 Dokumen 12 bulan	2,500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terkelaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri kabupaten	100 Persen	0 Persen	100 Persen	200,000,000					100 Persen	250,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	100 persen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri, Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri	100 persen	250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 03 2.01 01	Facilitasi Penumbuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Berusaha Sektor Industri Perumahan, dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah dan Tinggi Melalui SINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi teknis Penumbuhan Kesadaran Berusaha Sektor Industri Perumahan, dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah dan Tinggi Melalui SINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100 persen	0 persen	100 persen	100.000.000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri, Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Perizinan dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	160.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri	1 Dokumen 12 bulan	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Teraksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar	100 Persen	0 Persen	100 Persen	160.000.000					100 Persen	300.000.000			
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk informasi untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	0 persen	100 persen	160.000.000					100 persen	300.000.000			
3 31 04 2.01 01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	100 persen	0 persen	100 persen	60.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINAS	100 persen	0 persen	100 persen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Perencanaan Daerah, Peningkatan Perencanaan Industri	1 Dokumen 80 orang	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Keabsahan Perizinan Industri Kabupaten/Kota dalam Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keabsahan Perizinan Industri Kabupaten/Kota dalam Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINAS	100 persen	0 persen	100 persen	50.000.000					1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
TOTAL						11.465.463.703						14.809.345.566			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2	09					7.196.291,619							11.254.891,400	
2	09	01	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	4.116.291,619						6.823.197,400	
2	09	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	184.452,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	100 Persen	355.365,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	179.790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	20 Dokumen	350.000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	02 Koordinasi dan Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.662,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	20 Dokumen	5.365,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	03 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	2.605.367,486	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	3.905.417,100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	04 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.601.481,886	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	3.900.948,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	3.885,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	20 Dokumen	4.468,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	577.747,250					1 Tahun	760.969,600	
2	09	01	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6.682,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	9.984,900	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	207.338,850	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	350.000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan Pengadaan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	30.279,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	34.821,400	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	22.585,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	25.973,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Media	4 Media	4 Media	22.728,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	4 Media	26.137,800	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	06 Frekuensi rakor dan konsultasi yang diikuti	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	286.132,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kabupaten Kampar	1 Tahun	314.051,900	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jasa Komunikasi dan Pelayanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	406,929,233	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Tahun	509,280,700	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik	1 Tahun 1 Tahun	22,770,000	1 Tahun 1 Tahun	384,159,233	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	1 Tahun 1 Tahun	26,185,500	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas	1 Tahun 1 Tahun	394,159,233	1 Tahun 1 Tahun	341,794,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	1 Tahun 1 Tahun	483,095,200	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dan Peralatan lainnya	Tahun		Tahun	43,328,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	1 Tahun 1 Tahun	49,827,800	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 Tahun 1 Tahun	34,434,400	1 Tahun 1 Tahun	19,771,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	1 Tahun 1 Tahun	39,599,500	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun 1 Tahun	755,000,000	1 Tahun 1 Tahun	244,260,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	1 Unit 1 Unit	780,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya peralatan kerja	100 Persen		100 Persen	755,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	20 Persen	780,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya kantor Dinas Ketahanan Pangan	Persen		Persen	755,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	100 Persen	780,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terikannya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga	100 Persen		0 Persen	755,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Persen	780,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemungkinan Pangan sesuai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen		Persen	755,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Persen	780,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Tersedianya rumah bibit dan fasilitas pendukung lainnya	5 Kelompok 5 Kelompok Wanita Tani	755,000,000	5 Kelompok 5 Kelompok Wanita Tani	755,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	5 Kelompok 5 Kelompok Wanita Tani	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASTARAKAT	Angka Pola Pangan Harapan	100 Persen		0 Persen	1,925,000,000					20 Persen	3,155,012,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Harga dan Stok Pangan	Kecamatan		Kecamatan	621,088,243					12 Kecamatan	750,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Tersedianya informasi harga pangan pokok	21 Kecamatan 21 Kecamatan	336,445,001	21 Kecamatan 21 Kecamatan	336,445,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	21 Kecamatan 21 Kecamatan	284,643,242	21 Kecamatan 21 Kecamatan	284,643,242	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
		Tersedianya dokumen stok pangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	148.239.000	Semua Kelurahan					1 Tahun	420.000.000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	148.239.000	Semua Kelurahan					1 Tahun	420.000.000	
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tahun		Tahun	21 Kecamatan 21 Kecamatan	60.525.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	120.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	21 Kecamatan 21 Kecamatan	87.714.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pola Pangan Harapan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1.155.672.757						1 Tahun	1.985.012.000	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tahun		Tahun	21 Kecamatan 21 Kecamatan	274.197.757	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tahun		Tahun	39 Kelompok 39 Kelompok Wanita Tani	881.475.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	39 Kelompok 39 Kelompok Wanita Tani	1.635.012.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	100 Persen		0 Persen	20 Persen	175.000.000						20 Persen	196.682.000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan	Peta Kerawanan Pangan dan Gizi	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	175.000.000						12 Kecamatan	196.682.000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kecamatan		Kecamatan	21 Kecamatan 21 Kecamatan	175.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	196.682.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terpantainya mutu dan keamanan pangan	100 Persen		0 Persen	20 Persen	225.000.000						20 Persen	300.000.000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Pangan Segar	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	225.000.000						12 Kecamatan	300.000.000	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan		Kecamatan	21 Kecamatan 21 Kecamatan	225.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Kabupaten Kampar	21 Kecamatan 21 Kecamatan	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Terdikasinya uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan				TOTAL	7.196.291.619							11.254.891.400	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	14.333.283,878						27.252.449,113		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	0 %	0 %	100 %	25.000.000						290.525.662		
2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		201.622.766	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		6.786.316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		6.786.316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		8.338.816	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		8.338.816	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		24.266.316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		34.386.316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	4.509.283,878						4.971.161,316		
2	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan 12 Bulan	4.508.283,878	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Laporan	1.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	4.145.915						1.005.696,702		
2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Tahun	4.145.915	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	9.728.134,085						12.261.205,200		
2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	103.134,085	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	01	2.08	04	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan 12 Bulan	9.625.000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
		Terperuhnya Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Lapangan					Semua Kelurahan								
2 11 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 %	0 %	100 %	66,720,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	100 %	100 %	191,728,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhnya pemeliharaan dan dan kendaraan Operasional atau lapangan				66,720,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Tahun	1 Tahun	191,728,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 Persen	0 Persen	100 Persen	400,000,000				100 Persen	100 Persen	1,179,614,041			
2 11 03	Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terlaksana	100 %	0 %	100 %	400,000,000				100 %	100 %	460,000,000			
2 11 03	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya pengendalian kerusakan hutan dan lahan				400,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	5 Kecamatan	5 Kecamatan	460,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	100 Persen	0 Persen	100 Persen	415,387,326				100 Persen	100 Persen	596,575,945			
2 11 04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota terlaksana	100 %	0 %	100 %	415,387,326				100 %	100 %	596,575,945			
2 11 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terdelainya ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar				415,387,326	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 Tahun	1 Tahun	596,575,945	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh Terlaksana	100 Persen	0 Persen	100 Persen	600,000,000				100 Persen	100 Persen	738,738,150			
2 11 07	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terlaksana	100 %	0 %	100 %	600,000,000				100 %	100 %	738,738,150			
2 11 07	Pembudayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kemampuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA, Terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti sosialisasi				600,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	100 Orang	100 Orang	738,738,150	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	100 Persen	0 Persen	100 Persen	3,646,734,192				100 Persen	100 Persen	3,321,304,193			
2 11 11	Pengelolaan Sampah	Persentase kegiatan Pengelolaan Sampah terlaksana	100 %	0 %	100 %	3,646,734,192				100 %	100 %	3,321,304,193			
2 11 11	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemantauan Kembali	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah				150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1 Tahun	1 Tahun	6,993,809	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 11	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir, Sampah di TPA/TPST/SPA	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan				1,296,734,192	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1 Tahun	1 Tahun	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Nasional	Daerah								
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPA/PTSP/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				1 Tahun	2.200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	0	1 Tahun	3.304.930.190	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL							19.395.405.396						27.252.449.113		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas				Daerah	Kelompok Sasaran	Target
2							7.325,046,178					7.598,600,198					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL																
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	7.185,046,178					7.548,600,198	100 Persen				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	28.374,900					21.390,720	100 Persen				
2	12 01 2.01 01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10,486,120	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	10,486,120	3 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.01 02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,492,090	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3,492,090	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.01 03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,492,090	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.01 04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,492,090	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.01 05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,492,090	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3,492,090	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.01 06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,920,420	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3,920,420	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	3,047,024,224					3,512,748,668	100 Persen				
2	12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang	3,042,103,804	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3,507,828,248	26 Orang	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1,000,000	1 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Bulan	3,920,420	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3,920,420	12 Bulan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2	12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	73,567,670					73,567,670	100 Persen				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana							Daerah	
																Nasional	Daerah
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya"				105 orang	63,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	105 orang	63,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5,567,670	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	1 Orang	5,567,670	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 orang	5,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	1 orang	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	1,834,043,546					100 Persen	1,834,043,546				
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	8,271,244	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	8,271,244	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				12 Bulan	1,100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	1,100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Legistik kantor	"Jumlah Paket Bahan Legistik Kantor yang Disediakan"				12 Bulan	12,702,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	12,702,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"				12 Bulan	100,495,305	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	100,495,305	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Bulan	3,675,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	3,675,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				30 orang	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	30 orang	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				12 Bulan	568,900,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12 Bulan	568,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD"				1 paket	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	1 paket	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	361,648,744					100 Persen	145,600,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Daerah	
															Nasional	Daerah
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit			1 unit	76.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 unit	76.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	1 unit			1 unit	226.048.744	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 unit	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit			10 unit	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	10 unit	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket			1 paket	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 paket	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	1 paket			1 paket	39.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 paket	39.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	1.634.968.525					100 Persen	1.755.831.025			
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Laporan	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	295.481.025	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	2 Laporan	295.481.025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 Laporan			1 Laporan	1.329.487.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Laporan	1.450.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	205.418.569					100 Persen	205.418.569			
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			3 Unit	153.418.569	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	3 Unit	153.418.569	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	1 Unit			1 Unit	2.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Unit	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	12 Bulan			12 Bulan	20.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	12 Bulan	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saian	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 Unit			1 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun			1 tahun	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 tahun	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 Unit			1 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	20,000,000					20 Persen	20,000,000		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan			1 Laporan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03	Penyediaan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyediaan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.02.2.03.03	Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	1 Laporan			1 Laporan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan			1 Layanan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Layanan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	100,000,000					20 Persen	10,000,000		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen			5 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		5 Dokumen	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	10,000,000					20 Persen	10,000,000		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10,000,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen			1 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
TOTAL							7.325.046.178						7.598.600.198		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Proritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						
2																
2							8,682,291,084								11,023,315,778	
2	13	01	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	6,282,291,084							100 Persen	7,745,315,778	
2	13	01	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	283,006,691							100 Persen	356,850,000	
2	13	01	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	160,000,000						Kantor PMD	4 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23,006,691						Kantor PMD	2 Laporan	26,850,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100,000,000						Kantor PMD	5 Laporan	130,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	3,580,673,331							100 Persen	4,223,465,774	
2	13	01	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3,575,044,241						Kantor PMD	44 Orang/bulan	4,217,273,775	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,629,090						Kantor PMD	1 Laporan	6,191,999	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	87,280,000							100 Persen	111,000,000	
2	13	01	47 Paket		47 Paket	47 Paket	42,280,000						Kantor PMD	47 Paket	45,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000						Kantor PMD	1 Dokumen	16,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	3 Orang		3 Orang	3 Orang	30,000,000						Kantor PMD	3 Orang	50,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1,097,286,637							100 Persen	1,343,500,000	
2	13	01	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25,000,000						Kantor PMD	1 Paket	27,500,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	3 Paket		3 Paket	3 Paket	251,200,000						Kantor PMD	3 Paket	277,000,000	DINAS PEMERDAAYAN MASYARAKAT DAN DESA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	27,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	66,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	33,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	611,086,637		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	786,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Asisp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asisp Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	460,000,000				100 Persen	749,000,000	
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	440,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	133,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penujangan yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	594,044,425				100 Persen	767,000,004	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	4,000,004	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana					
													Prioritas	
													Nasional	Daerah
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	96.000.000	Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	1 Laporan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlingkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlingkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	1 Laporan	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	477.044.425		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	1 Laporan	638.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	180.000.000				100 Persen	194.500.000		
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				4 Unit	115.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	4 Unit	127.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Pajak dan Perizinan lainnya				1 Unit	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	1 Unit	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor PMD	17 Unit	27.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terbit administrasi	100 Persen			100 Persen	275.000.000				100 Persen	285.000.000		
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penataan desa yang terbit administrasi	100 Persen			60 Persen	275.000.000				60 Persen	285.000.000		
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				12 Desa	275.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa	12 Desa	285.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan	5 Pembangunan Kawasan Perdesaan			1 Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000				1 Pembangunan Kawasan Perdesaan	220.000.000		
2 13 03 2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase peningkatan kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan	100 Persen			70 Persen	200.000.000				70 Persen	220.000.000		
2 13 03 2.01 01	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa di Kab.Kampar	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 03 2.01 03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa di Kab.Kampar	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100 Persen			100 Persen	1.445.000.000				100 Persen	1.235.000.000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususn/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi	100 Persen		0 Persen	80 Persen	1,445,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Persen	1,235,000,000			
2 13 04 2.01 01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				242 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		242 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				3 Dokumen	295,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				30 Orang	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	66,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	187,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 09	Penyenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa				1 Laporan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 10	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	40,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	44,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		1 Dokumen	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	88,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	155,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Orang	270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 04 2.01 18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT yang dilbna	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilbna	100 Persen		0 Persen	100 Persen	480,000,000				100 Persen	1,538,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah					
											Pagu Indikatif				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina	100 Persen		0 Persen	80 Persen	480.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	80 Persen	1.538.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	60.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	1 Dokumen	66.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	3 Dokumen	110.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	5 Lembaga	110.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	160.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	1 Dokumen	176.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	60.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Daerah	Desa-desa Kab.Kampar	1 Laporan	66.000.000	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TOTAL							8.662.291.084						11.023.315.778		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional					Daerah
2															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,901,702,919					6,715,254,617			
2	PROGRAM PENGARUSUTANAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	522,373,384					20 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi perencana SKPD dan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	0 Orang	0 Orang	36 Orang	50,000,000					36 Orang		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Peringkat Daerah	50,000,000					36 Peringkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Sosialisasi Perempuan Berpolitik	50 Orang	0 Orang	0 Orang	50 Orang	55,714,285					50 Orang		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Persen	55,714,285					20 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terperulinnya Pendekatan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam mengoptimalkan kemampuan untuk menunjang ekonomi keluarga	21 Orang	0 Orang	0 Orang	21 Orang	416,659,099					21 Orang		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				32 Orang	100,000,000					32 Orang		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang terselesaikan				1 Kegiatan	316,659,099					1 Kegiatan		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	500 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	109,820,286					100 Persen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak berbagai perikaranyang salah	11 Desa	0 Desa	0 Desa	11 Desa	109,820,286					11 Desa		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan layanan pengaduan				10 Desa	109,820,286					10 Desa		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan	5 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	2,846,715,334					1 Lembaga		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	Penetapan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga	5 Kel	0 Kel	0 Kel	5 Kel	162,014,610					5 Kel		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Daerah	Prioritas	Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						
						Nasional									
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1 Keg		1 Dokumen	162,014,610	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin	1 Dokumen	162,014,610	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam kesejahteraan keluarga	1 Keg	0 Keg	1 Keg	2,664,700,724						1 Keg	2,664,700,724		
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg		1 Dokumen	84,700,724	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin	1 Dokumen	84,700,724	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg		1 Dokumen	2,600,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin	1 Dokumen	2,600,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	tercapainya APE	5 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	44,151,845						1 Kegiatan	44,151,845		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Rencanakan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak	1 Keg	0 Keg	1 Keg	44,151,845						1 Keg	44,151,845		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Keg		1 Dokumen	44,151,845	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Tercapainya APE	1 Dokumen	44,151,845	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100 Persen	0 Persen	0 Persen	965,266,824						100 Persen	2,332,732,947		
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak	21 FAN	0 FAN	21 FAN	50,000,000						21 FAN	50,000,000		
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 FAN		21 Fan	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan	21 Fan	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak yang mampu menampung aspirasi anak-anak	21 FAN	0 FAN	21 FAN	915,266,824						21 FAN	2,282,732,947		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 FAN		21 FAN	700,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan	21 FAN	700,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	215,266,824	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan	1 Dokumen	215,266,824	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	100 Persen	0 Persen	100 Persen	413,375,246						100 Persen	788,369,246		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya Angka Kerasan terhadap anak kekerasan terhadap anak	10 Desa	0 Desa	10 Desa	113.375.246	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Desa	10 Desa	375.419.246	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	113.375.246	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Desa	1 Dokumen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.03	Pengakuan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang	1 Keg	0 Keg	1 Keg	300.000.000				1 Keg	300.000.000		
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	300.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Desa	1 Dokumen		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.866.218.021							
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	5.976.425.685				100 Persen	6.836.264.697		
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan dokumen perangkat daerah	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	170.000.000				1 Tahun	170.000.000		
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	50.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Perangkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	30.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Perangkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	30.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Perangkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	30.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Perangkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	3.828.298.167				1 Tahun	4.000.000.000		
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		12 Bulan	3.828.298.167	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	4.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14 01 2.05	Administrasi Kesegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	13.500.000				1 Tahun	13.500.000		
2 14 01 2.05 11	Biayaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis pencahayaan larang milik daerah/umil Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	13.500.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Perangkat Daerah		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Sumber Dana	Nasional					
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Undangan	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	435.390,601						1 Tahun	435.390,601	
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		1 Paket/Perangkat Daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	2.458,021	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	2.458,021	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		1 Paket/Perangkat Daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun		1 Paket/Perangkat Daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun		1 Paket/Perangkat Daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	23.799,080	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Paket/Perangkat Daerah	23.799,080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	9.133,500	Semua Kab/Kota, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	9.133,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	250,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	85.000,000						1 Tahun	685.000,000	
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	35,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa tenaga harian lepas	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1.074.488,292						1 Tahun	1.162.625,471	
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	104.979,325	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	104.979,325	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun		0 Laporan	0 Laporan	969.508,967	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	0 Laporan	1.057.646,146	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 01 2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mobil Operasional	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	369.748,625						1 Tahun	369.748,625	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pajak dan biaya servis kendaraan dinas jabatan/jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Tahun		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	37.566,358	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial daerah		Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	37.566,358	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	152,039,239	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	30,143,028	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase cupuan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Perangkat Daerah	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility rate (TFR)	100 Persen	0 Persen	20 Persen		150,000,000				20 Persen	150,000,000			
2 14 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program bangsa Kencana	5 Buku	0 Buku	5 Buku		150,000,000				5 Buku	150,000,000			
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	20 Persen		20 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Data Kependudukan	20 Persen	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERKENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	100 Persen	0 Persen	100 Persen		841,792,336				100 Persen	6,124,543,934			
2 14 03 2.01	Poliklasik Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sosial Keanifan Budaya Lokal	Terlaksananya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB manajemen dan KIE	21 Kec	0 Kec	21 Kec		300,000,000				21 Kec	1,311,300,001			
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana) dan Keluarga Berencana/Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100 Persen		100 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	100 Persen	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak, dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	1 Laporan	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Wawasan Kompeten Terlaksananya tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Keg	0 Keg	1 Keg		454,819,156				1 Keg	1,509,422,056			
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepi Jangka Panjang (MKJP)	100 Persen		100 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	100 Persen	200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana Penunjang Pelayanan KB	100 Persen		100 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	100 Persen	82,524,274	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi	100 Persen		100 Persen	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	TFR, UNMETNEETD, mCPR	100 Persen	80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2 14 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100 Persen		100 Persen	92.294.882	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	92.294.882	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Pelaksanaan Advokasi Keumuklisan Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesal Keragaman Budaya lokal	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	86.973.180					1 Kegiatan	742.473.180			
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerjanya Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	100 Persen		100 Persen	86.973.180	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	86.973.180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 Persen	0 Persen	20 Persen	900.000.000					20 Persen	2.010.616.496			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR) menurunnya angka pernikahan usia muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja	10 Kel	0 Kel	10 Kel	300.000.000					10 Kel	1.410.616.496			
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS; PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS; PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Persen		100 Persen	150.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100 Persen		100 Persen	150.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan	10 Kel	0 Kel	10 Kel	600.000.000					10 Kel	600.000.000			
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPPKS; PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Persen		100 Persen	600.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TOTAL						12.769.920.940						21.836.679.744			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
2																
2	15						29,916,792,027							25,460,475,981		
2	15	01					10,923,227,023							11,129,475,981		
2	15	01	2.01				166,106,750							166,106,750		
2	15	01	2.01	01		6 Dokumen	97,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Dokumen		97,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	02		6 Dokumen	33,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Dokumen		33,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	06		12 Laporan	35,606,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan		35,606,750	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02				4,707,854,783							4,707,854,783		
2	15	01	2.02	01		48 Orang/Bulan	4,685,384,763	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48 Orang/Bulan		4,685,384,763	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	05		4 Laporan	22,470,020		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan		22,470,020	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05				240,000,000							240,000,000		
2	15	01	2.05	02		50 Paket	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Paket		200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	11		2 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Orang		40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06				977,885,471							977,885,471		
2	15	01	2.06	01		1 Paket	8,915,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket		8,915,960	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	02		2 Paket	115,993,756		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket		115,993,756	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	04		2000 Paket	81,392,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2000 Paket		81,392,250	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	05		2 Paket	111,000,505		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket		111,000,505	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
						Nasional							
		Disediakan											
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	756 Dokumen			756 Dokumen	17.027.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		756 Dokumen	17.027.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan			250 Laporan	643.556.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Laporan	643.556.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.600.000.000					1.600.000.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	1.600.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	1.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.763.248.002					2.969.496.960	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	494.509.460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	494.509.460	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan			12 Bulan	2.268.738.542		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	2.474.987.500	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						468.132.017					468.132.017	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit			2 Unit	91.645.293		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	91.645.293	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			15 Unit	121.352.074		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	121.352.074	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	212.937.450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	212.937.450	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Senjata dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit			48 Unit	42.197.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Unit	42.197.200	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYENGEKARAN JALAN LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)						18.771.000.004					14.306.000.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						17.395.000.004					12.930.000.000	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota yang terbangun	1 unit 0 Unit			1 unit 0 Unit	100.000.000	Kab. Kampar, Semudang Kecamatan, Semud Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit 0 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 unit		500 unit	4.665.000,004					500 unit	200.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Tersejahtera dan Jumlah Prasarana Jalan yang Tersejahtera dan Terpelihara	0 Unit 500 unit		0 Unit 500 unit	12.630.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit 500 unit	12.630.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.04	Pemberian Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					85.000,000						85.000,000				
2.15.02.2.04.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	85.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	85.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					163.000,000						163.000,000				
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit		1 unit	17.380.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 unit	17.380.000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 dokumen		3000 dokumen	105.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3000 dokumen	105.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit		9 unit	40.620.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 unit	40.620.000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					587.000,000						587.000,000				
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	557.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	557.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	20.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	20.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	10.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	10.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					6.000,000						6.000,000				
2.15.02.2.07.03	Kordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan		12 Laporan	3.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	3.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan		12 Laporan	3.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	3.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA di Jalan					10.000,000						10.000,000				
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan		12 Laporan	10.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	10.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					525.000,000						525.000,000				
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	5 unit		5 unit	525.000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 unit	525.000,000	DINAS PERHUBUNGAN			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususn/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target
									Nasional	Daerah			
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tersedia					222,565,000					25,000,000	
2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penebitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						222,565,000					25,000,000	
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 unit	222,565,000				2 unit	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL							29,916,792,027					25,460,475,981	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Daerah	
2							10,481,753,756					23,243,200,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	7,639,753,756					16,855,200,000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengabdian Masyarakat, Pengabdian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	540,581,907					975,000,000	
2	2.16 01 2.01 01	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190,581,907	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2.16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,892,295,807					9,260,200,000	
2	2.16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3,892,295,807	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usruh/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	35.200.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen					100 Persen	655.000.000				
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pejabat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Orang	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13 Orang		13 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	13 Orang	205.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	100 Persen					100 Persen	1.905.000.000				
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	230.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	125.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usulan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2.16.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	950,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	103,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100 Persen	1,955,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	105,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	125,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Tahun	210,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Tahun	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,129,166,667	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 Persen	1,350,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	240,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	889,166,667	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	406,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 Persen	755,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	12 Bulan	55,000,000	Kab. Kampar, Bangliahng kota, Bangliahng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pangung Jawab Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen			12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Publik yang disediakan	100 Persen	0 Persen		100 Persen	2,472,000,000					100 Persen	5,543,000,000			
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen		100 Persen	2,472,000,000					100 Persen	5,543,000,000			
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Bulan	265,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Bulan	1,000,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	3,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Bulan	300,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	460,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media				12 Bulan	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				12 Bulan	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	238,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber daya komunikasi publik yang meningkatkan kapasitasnya				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Bulan			12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Promosi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan			12 Bulan	600,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	800,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah OPD yang terintegrasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	370,000,000						100 Persen	845,000,000	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	320,000,000	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan			12 Bulan	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	12 Bulan			12 Bulan	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	270,000,000						100 Persen	525,000,000	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	12 Bulan			12 Bulan	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	360,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	32 Perangkat Daerah			32 Perangkat Daerah	35,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	32 Perangkat Daerah	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 Bulan			12 Bulan	35,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Ketersediaan data dan Informasi	47 Data		0 Data	47 Data	96,000,000						47 Data	230,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Ketersediaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintahan Daerah	47 Data		0 Data	25 Data	96,000,000						25 Data	230,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Bulan			12 Bulan	1,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Nasional
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi				12 Bulan	20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	85,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 20 02 2.01 03	Membangun Meadata Statistik Sektoral	Jumlah Meadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				12 Bulan	75,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						178,900,000					220,000,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Index Kesamanan Informasi	83 Persen		0 Persen	75 Persen	178,900,000					75 Persen	220,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	70 Persen		0 Persen	60 Persen	178,900,000					60 Persen	220,000,000	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	146,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	160,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	32,900,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TOTAL							10,756,653,756					23,693,200,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						
2							11,011,124,756							14,880,987,778		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	9,513,382,240							100 Persen	12,155,987,778	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	133,000,000							100 Persen	220,000,000	
2	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	4 Dokumen		125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	33,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	2 Laporan		35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah				100 Persen	5,319,874,756							100 Persen	6,140,987,778	
2	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	5,299,874,756	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	32 Orang/bulan		6,115,987,778	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	1 Laporan		25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah				100 Persen	239,257,484							100 Persen	500,000,000	
2	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keleنگapannya				1 Paket	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	1 Paket		100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	64,257,484	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	15 Orang		200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	125,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	10 Orang		150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	860,000,000							100 Persen	1,045,000,000	
2	2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	1 Paket		15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	175,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	1 Paket		200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar	1 Paket		200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Usuan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	110,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aparatur DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aparatur DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	400,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aparatur DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persen			100 Persen	375,000,000						1,050,000,000		
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	75,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persen			100 Persen	1,761,250,000						2,050,000,000		
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	180,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				69 Laporan	1,581,250,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Persen			100 Persen	825,000,000						1,150,000,000		
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	175,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aset Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aset Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				3 Unit	400,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Informasi	Aset Kantor DPMP/TSP Kabupaten Kampar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi				Langgini	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kampar			TERPADU SATU PINTU	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	120.000.000				100 Persen	800.000.000		
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persen	Persen	100 Persen	120.000.000				100 Persen	425.000.000		
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Perumahan/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persen		100 Persen	120.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase capaian program promosi penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	300.000.000				100 Persen	575.000.000		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	300.000.000				100 Persen	575.000.000		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persen		100 Persen	300.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dunia Usaha dan Masyarakat	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian program pelayanan penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	747.742.516				100 Persen	800.000.000		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persen	Persen	100 Persen	747.742.516				100 Persen	800.000.000		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persen		100 Pelaku Usaha	100.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	100 Pelaku Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen		50 Kegiatan Usaha	250.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	50 Kegiatan Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memeroleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persen		100 Orang	175.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	100 Orang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persen		1 Kegiatan Usaha	222.742.516				Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Kegiatan Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	130.000.000				100 Persen	350.000.000		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen	Persen	100 Persen	130.000.000				100 Persen	350.000.000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Nasional	Daerah					
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	penanaman modal di daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	30.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dunia usaha	1 Kegiatan Usaha	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				100 Pelaku Usaha	60.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dunia usaha	100 Pelaku Usaha	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				1 Kegiatan Usaha	40.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Dunia usaha	1 Kegiatan Usaha	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000					100 Persen	200.000.000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Penerimaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000					100 Persen	200.000.000	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Sang	Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL							11.011.124.756						14.860.987.778	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN yang dikembangkan	1 Objek	0 Objek	1 Objek	2.870.000.000						2.134.000.000	
2	22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150 Kelompok	0 Kelompok	86 Kelompok	1.980.000.000						1.155.000.000	
2	22	02 Polestarian Keseman Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		86 Kelompok	1.330.000.000						660.000.000	
2	22	02 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan lhtksar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat Waktu		86 Kelompok	1.330.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					660.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan dan difasilitasi	0 Lembaga	2 Lembaga	650.000.000						495.000.000	
2	22	02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	650.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					495.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESEMAN TRADISIONAL	Jumlah Lembaga Keseman Tradisional yang dibina	0 lembaga	45 lembaga	890.000.000						979.000.000	
2	22	03 Pembinaan Keseman yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok sanggar/ Kelompok Semi Budaya	0 Lembaga	86 Lembaga	890.000.000						979.000.000	
2	22	03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseman Tradisional	Jumlah Lembaga Keseman Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	86 Lembaga	890.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					979.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.347.451.277						10.949.278.990	
3	26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	100 Persen	6.743.451.276						7.608.578.990	
3	26	01 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan lhtksar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat Waktu	0 Dokumen	7 Dokumen	206.400.467						227.040.514	
3	26	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	156.400.467						172.040.514	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtksar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lhtksar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtksar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 persen	100 persen	2.878.346.573						3.334.135.500	
3	26	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	2.866.627.943	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.321.245.007	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	11.718.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.890.493	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bimtek/Pelatihan sumber Daya Aparatur	Bulan	12 Bulan	150.000.000						165.000.000	
3	26	01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 Orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					165.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perencanaan yang mendukung kelancaran tugas dan lhtksi SKPD	0 Bulan	12 Bulan	1.164.436.769						1.289.414.428	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
3 26 01 2.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	8,532,965		12 bulan	8,532,965		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 bulan	9,452,261	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	214,660,274		2 Paket	214,660,274		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Paket	244,660,284	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	188,000,000		12 Paket	188,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Paket	206,800,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	200,000,000		12 Bulan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	220,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12 Bulan	50,965,200		12 Bulan	50,965,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	56,061,720	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	502,218,330		12 Bulan	502,218,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	552,440,163	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	25 Unit	766,358,830	0 Unit	6 Unit	766,358,830					6 Unit	828,494,713	
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500,000,000		1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Unit	550,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	116,358,830		4 Unit	116,358,830		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	4 Unit	127,994,713	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150,000,000		2 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Unit	150,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penujangan urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	962,451,233	0 Bulan	12 Bulan	962,451,233					12 Bulan	1,100,779,690	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	91,617,900		12 Bulan	91,617,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	100,779,690	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Bulan	870,833,333		0 Laporan 12 Bulan	870,833,333		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Laporan 12 Bulan	1,000,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25 Unit	615,457,404	0 Unit	25 Unit	615,457,404					25 Unit	664,014,145	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	117,957,567		2 Unit	117,957,567		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Unit	129,753,324	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	124,244,837		7 Unit	124,244,837		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	7 Unit	136,669,321	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	23,265,000		12 bulan	23,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 bulan	25,591,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	350,000,000		2 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Unit	372,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata	400 DTW	0 DTW	0 DTW	1,702,000,000					400 DTW	1,872,200,000			
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	130 DTW	0 DTW	0 DTW	1,402,000,000					100 DTW	1,542,200,000			
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 DTW		100 DTW	1,402,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 DTW	1,542,200,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	130 DTW	0 DTW	0 DTW	300,000,000					100 DTW	330,000,000			
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)				300,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 DTW	330,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase publikasi dan event wisata	100 Persen	0 Persen	0 Persen	662,000,000					100 Persen	709,200,000			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi dan Promosi Pariwisata	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	662,000,000					1 Dokumen	709,200,000			
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	590,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	630,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	72,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	79,200,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Kelompok	Kelompok	6 Kelompok	1,240,000,001					6 Kelompok	759,000,000			
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kelompok Pelaku ekonomi Kreatif	10 Kelompok	0 Kelompok	6 Kelompok	1,240,000,001					6 Kelompok	759,000,000			
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	2 Orang		2 Orang	200,000,000					2 Orang	220,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			6 Kelompok	740,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Kelompok	539,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3 26 05 2.01 06	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			6 Kelompok	300,000,001			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Kelompok	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
TOTAL						13,217,451,277					13,083,278,990				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						
2																
2							10,308,773,557								9,658,020,744	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2	23	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100 Persen	8,748,773,557								7,828,020,744	
2	23	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Persen	100 Persen	32,000,000								32,700,000	
2	23	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	5,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	2 Dokumen	5,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	6,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	1 Dokumen	6,700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD		1 Dokumen	5,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	1 Dokumen	5,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	4,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	1 Dokumen	4,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD		1 Dokumen	4,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	1 Dokumen	4,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		1 Dokumen	6,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan SKPD	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya gaji dan tunjangan PNS	Tahun	1 Tahun	3,361,812,875								3,604,700,000	
2	23	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	3,357,312,875	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Gaji, tunjangan dan laporan keuangan	50 Orang	3,600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Gaji, tunjangan dan laporan keuangan	1 Dokumen	4,700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Adanya penyusunan laporan rekonsiliasi Aset Daerah	Tahun	1 Tahun	6,500,000								7,000,000	
2	23	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	6,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Laporan rekonsiliasi barang milik daerah	3 Laporan	7,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.05 Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1 Tahun	117,000,000								117,000,000	
2	23	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alat/ut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara	50 Orang	45,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pakaian dinas dan bintek	50 Orang	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis bagi ASN	12 Orang	72,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pakaian dinas dan bintek	12 Orang	72,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1 Tahun	974,500,000								1,174,800,000	
2	23	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	1 Paket	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	217,645,825	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	3 Paket	270,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usrus/Bidang Usrus/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	3 Paket	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	35,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	2 Paket	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	1 Dokumen	9,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	612,854,175	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Administrasi Umum SKPD	2 Laporan	750,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usrus Pemerintah Daerah	Adanya pengadaan barang milik daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	2,925,000,000						1 Tahun	1,360,000,000	
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Aset daerah	2 Unit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Aset daerah	1 Paket	170,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,350,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Aset daerah	1 Unit	690,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usrus Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang usrus pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	975,460,682						1 Tahun	1,160,320,744	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	152,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pelayanan Umum	3 Laporan	162,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	823,460,682	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pelayanan Umum	1 Laporan	998,320,744	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usrus Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	356,500,000						1 Tahun	371,500,000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	135,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Unit	145,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	32,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35 Unit	37,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	189,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	189,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Persen		Persen	100 Persen	1,330,000,000						100 Persen	1,580,000,000	
2.23.02.2.01	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten	Tahun		Tahun	1 Tahun	630,000,000						1 Tahun	690,000,000	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 Layanan		3 Layanan	3 Layanan	80,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Koleksi perpustakaan dan digital	3 Layanan	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tersekat yang Dicetak dan Diadakan	5000 Eksemplar		5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	150,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Koleksi perpustakaan dan digital	5000 Eksemplar	180,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar		6000 Eksemplar	6000 Eksemplar	400.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Koleksi perpustakaan dan digital	6000 Eksemplar	400.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	700.000.000					1 Tahun	890.000.000		
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 Lokus		100 Lokus	100 Lokus	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pembudayaan gemar membaca	100 Lokus	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pembudayaan gemar membaca	3 Orang	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilembangkan	21 Perpustakaan		21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pembudayaan gemar membaca	21 Perpustakaan	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Dilukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pembudayaan gemar membaca	1 Orang	140.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Persen		Persen	100 Persen	230.000.000						100 Persen	250.000.000	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Adanya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	Tahun		Tahun	1 Tahun	230.000.000						1 Tahun	250.000.000	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Pelestarian, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	115 Orang		115 Orang	115 Orang	230.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Naskah kuno milik daerah kabupaten	115 Orang	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.050.000.000							1.300.000.000	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	Persen		Persen	100 Persen	430.000.000						100 Persen	500.000.000	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan arsip dinamis	Tahun		Tahun	1 Tahun	210.000.000						1 Tahun	250.000.000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	180 Berkas		180 Berkas	180 Berkas	210.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Arsip dinamis	180 Berkas	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Adanya pengelolaan arsip statis	Tahun		Tahun	1 Tahun	220.000.000						1 Tahun	250.000.000	
2 24 02 2.02 02	Akuisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200 Arsip		200 Arsip	200 Arsip	220.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Arsip statis	200 Arsip	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELEMAHAN ARSIP	Tersedianya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tahun		Tahun	1 Tahun	620.000.000						1 Tahun	800.000.000	
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Adanya pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah sesuai JRA	Tahun		Tahun	1 Tahun	100.000.000						1 Tahun	150.000.000	
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas		50 Berkas	50 Berkas	100.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Pemusnahan arsip	50 Berkas	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tersedianya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	200.000.000						1 Tahun	250.000.000	
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	70 Arsip		70 Arsip	70 Arsip	200.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Perlindungan dan penyelamatan arsip	70 Arsip	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang	Tersedianya penyelamatan arsip perangkat daerah yang	Tahun		Tahun	1 Tahun	200.000.000						1 Tahun	250.000.000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususn/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 24 03 2.03 02	Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	digabung atau dibubarkan													
2 24 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Arsip	200,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Meningkatkan Perekonomian Daerah, Pemukata dan Pengelolaan Industri	Penyelamatan Arsip	1000 Arsip	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tersedianya pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang	1 Tahun	120,000,000						1 Tahun	150,000,000				
2 24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	300 Arsip	120,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang	300 Arsip	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
TOTAL				11,358,773,557							10,958,020,744				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
3						20,891,701,214						22,251,858,915
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	10,560,750,301						10,133,000,000
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pencapaian Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	370,000,000						325,000,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				350,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	3,923,525,387						4,605,000,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,919,525,387	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Keuangan	0 Orang/bulan	4,600,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Laporan Keuangan	0 Laporan 1 Dokumen	5,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	43,659,000						200,000,000
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket 0 Paket			43,659,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1 paket 0 Paket	100,000,000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	1,086,500,000						1,063,000,000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi dan Operasional Kantor	1 Paket 0 Paket	15,000,000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				299,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi dan Operasional Kantor	4 Paket 0 Paket	250,000,000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				43,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi dan Operasional Kantor	1 Paket	13,000,000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Administrasi dan Operasional Kantor	1 Paket	5,000,000

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	13,000,000	Semua Kelurahan Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	15,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen			5 Dokumen	15,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	15,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	700,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	750,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	198,000,000				100 %	1,300,000,000			
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	198,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0		100	1,697,065,914				100	1,875,000,000			
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 0 Laporan			1 Laporan 0 Laporan	170,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan 0 Laporan	175,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 0 Laporan			1 Laporan 0 Laporan	1,527,065,914	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan 0 Laporan	1,700,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	3,242,000,000				100 %	765,000,000			
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	12 Unit			12 Unit	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	150,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 12 Unit			0 Unit 12 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit 12 Unit	15,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit			13 Unit	3,032,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	600,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2600 Ton	0 Ton		2600 Ton	2,050,700,000				2600 Ton	3,350,000,000			
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	0 %		100 %	1,950,700,000				100 %	2,500,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
										Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen 1 Dokumen		0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		Nelayan Tangkap	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	200 Unit		200 Unit	1,890,700,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		Nelayan Tangkap	200 Unit	1,600,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 03 2.02	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Pembudayaan Nelayan kecil	100 %	0 %	100 %	100,000,000						100 %	650,000,000			
3 25 03 2.02 02	Polaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	25 Kelompok		25 Kelompok	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		Nelayan/KUB	25 Kelompok	200,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	66900 Ton	0 Ton	66900 Ton	6,283,012,333						66900 Ton	4,583,301,296			
3 25 04 2.02	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase Terlaksananya Pembudayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	100 %	0 %	100 %	4,325,301,686						100 %	883,301,296			
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	50 Kelompok		50 Kelompok	3,703,310,876	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		kelompok perikanan	50 Kelompok	433,301,296	DINAS PERIKANAN		
3 25 04 2.02 02	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok		30 Kelompok	471,990,810	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		kelompok perikanan	30 Kelompok	200,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 kelompok		30 kelompok	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		kelompok perikanan	30 Kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi, Penunahan Sarana Prasarana, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	100 %	0 %	100 %	1,957,710,647						100 %	3,300,000,000			
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	157,034,315	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		kelompok Perikanan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit 50 Unit		0 Unit 50 Unit	1,100,676,332	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		kelompok Perikanan	0 Unit 50 Unit	1,000,000,000	DINAS PERIKANAN		
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit 100 Unit		0 Unit 100 Unit	500,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		kelompok Perikanan	0 Unit 100 Unit	1,300,000,000	DINAS PERIKANAN		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjuri Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjuri Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				21 Dokumen	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	21 Dokumen	300.000.000	DINAS PERIKANAN		
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA NELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	733.614.984				100 Persen	2.600.000.000			
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan	100 %	0 %	0 %	100 %	733.614.984				100 %	2.600.000.000			
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	733.614.984	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	10 Dokumen	2.500.000.000	DINAS PERIKANAN		
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	64295 Ton	0 Ton	0 Ton	8000 Ton	1.263.623.596				8000 Ton	1.585.557.619			
3 25 06 2.01	Pemberian Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Skala Mikro dan Kecil	100 %	0 %	0 %	100 %	100.000.000				100 %	100.000.000			
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERIKANAN		
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Bersertifikasi Mutu	100 %	0 %	0 %	100 %	108.413.924				100 %	300.000.000			
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Bersertifikasi Mutu				15 Unit Usaha	108.413.924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	15 Unit Usaha	300.000.000	DINAS PERIKANAN		
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	100 %	0 %	0 %	100 %	1.055.209.672				100 %	1.185.557.619			
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				59 Ton 0 Ton	359.652.053	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	59 Ton 0 Ton	600.000.000	DINAS PERIKANAN		
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	695.557.619	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	20 Pelaku Usaha	585.557.619	DINAS PERIKANAN		
TOTAL							20.891.701.214					22.251.858.915			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						
3																
3							31,164,592,676								32,878,071,415	
3																
3	01	Persentase Pelaksanaan Peninjauan Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	20,507,697,048							100 Porsen	23,771,938,009	
3	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	6,235,285							100 Porsen	6,858,813	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan 1 Tahun	6,235,285	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Laporan Kinerja Kegiatan, Keunggulan dan laporan akhir tahun	5 Laporan 1 Tahun	6,858,813	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	0 porsen	0 porsen	100 porsen	16,170,634,928							100 porsen	18,124,086,658	
3	01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang/bulan 12 Bulan	16,164,399,643	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Tns Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Laporan Akhir Keuangan dan pembayaran tunjangan gaji, tunjangan PNS dan P3K	151 Orang/bulan 12 Bulan	18,117,227,845	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan 1 Tahun	6,235,285		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Laporan Akhir Keuangan dan pembayaran tunjangan gaji, tunjangan PNS dan P3K	5 Laporan 1 Tahun	6,858,813	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	01	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	1,463,187,858							100 Porsen	1,285,746,538	
3	01	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun 1 Tahun	59,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun 1 Tahun	7,243,632	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	02 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor				1 Tahun 1 Tahun	266,737,858		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun 1 Tahun	266,737,858	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan 12 Bulan	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 12 Bulan	225,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan 12 Bulan	150,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 12 Bulan	25,365,048	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20 Dokumen 1 Tahun	78,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Dokumen 1 Tahun	78,600,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	01	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 bulan 1 Tahun	682,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan rapat-koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 12 bulan 1 Tahun	682,800,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Usruh/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
		Terikannya konsultasi dan koordinasi keluar daerah														
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usruh Pemerintah Daerah	terikannya Pengadaan Kenderaan Dinas Jabatan dan Kenderaan Roda Dua Operasional	100 Porsen		0 Porsen	570.000.000					100 Porsen	1.400.000.000				
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Terikannya operasional kantor				570.000.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Unit 3 Unit 1 Tahun		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usruh Pemerintahan Daerah	Terpenuhi kebutuhan perkantoran dan terikannya pembayaran Honorarium THL dan Petugas lainnya	100 Porsen		0 Porsen	1.529.189.583						2.431.674.200				
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa internet, listrik, dan air				77.323.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	0 Laporan 1 Tahun	850.054.200	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				24.570.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	12 Laporan 1 Tahun	24.570.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa THL, CS, Penjaga malam Kantor, Petugas pajaga kebun dan Kantor BPP				1.427.295.833			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Laporan 1 Tahun	1.557.050.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usruh Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset Dinas	100 Porsen		0 Porsen	768.449.394						363.571.800				
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya mobil dinas jabatan				32.330.800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Unit 1 Tahun	32.330.800	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Terpeliharanya mobil dinas Operasional				31.241.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	0 Unit 1 Tahun	31.241.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi Terbangunnya dan rehabilitasi sedang dan perkantoran				704.877.594			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	4 Unit 1 Tahun	300.000.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Porsen		0 Porsen	1.699.221.625						1.549.274.425				
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terikannya pengawasan dan Perawatan Mesin Alisnitan dan Pembinaan UPIA	100 Porsen		0 Porsen	1.699.221.625						1.549.274.425				
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Sediaan dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				646.519.754			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	0 Laporan 1 Tahun	646.519.754	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Prioritas						
										Nasional	Daerah					
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya pembinaan UPA dan Pengolahan Aliran				18 Kecamatan 12 bulan	1,052,701,871	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		18 Kecamatan 12 bulan	902,754,671	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	6.348.754.943					100 Porsen	4.947.939.921			
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan sarana produksi lainnya	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	2.897.195.329					100 Porsen	2.976.380.307			
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan/LCP2B				100 Ha 1 Tahun	2.597.245.329		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		100 Ha 1 Tahun	2.597.245.329	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0 Laporan 1 Tahun	299.950.000			Memperkuat Kerahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0 Laporan 1 Tahun	379.134.978	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi, jalan Usaha Tani Lainnya	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	3.451.559.614					100 Porsen	1.971.559.614			
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				10 Unit 1 Tahun	375.156.386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		10 Unit 1 Tahun	375.156.386	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit 1 Tahun	1.511.208.842		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Unit 1 Tahun	631.208.842	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Tahun 1 tahun	1.565.194.386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Tahun 1 tahun	965.194.386	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	528.440.386					100 Porsen	528.440.386			
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terpenyehnya pengendalian penyakit tanaman pertanian	100 Porsen	0 Porsen	0 Porsen	100 Porsen	528.440.386					100 Porsen	528.440.386			
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha 1 Tahun	528.440.386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah		1000 Ha 1 Tahun	528.440.386	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan, Usaha Pertanian	100 Porsen		0 Porsen	100 Porsen	453.478.674				100 Porsen	453.478.674			
3 27 06	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usmanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaa dan pengawasan izin usaha pertanian	100 Porsen		0 Porsen	100 Porsen	453.478.674				100 Porsen	453.478.674			
3 27 06	2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Terlaksananya petani agribisnis tanaman pangan dan hortikultura											DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 Porsen		0 Porsen	100 Porsen	1.627.000.000				100 Porsen	1.627.000.000			
3 27 07	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya peningkatan SDM Petugas Penyuluh Pertanian	100 Porsen		0 Porsen	100 Porsen	1.627.000.000				100 Porsen	1.627.000.000			
3 27 07	2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan kelembagaan penyuluh pertanian											DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3 27 07	2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani											DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
TOTAL							31.164.592.676					32.878.071.415			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Daerah		Daerah									
3																			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						21,240,260,584										36,925,441,135		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	10,257,760,577										100 %	14,932,293,135	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	310,314,346										6 Dokumen	298,155,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	290,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	4 Dokumen	276,496,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20,314,346	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	2 Laporan	21,659,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	6,670,533,623										2 Laporan	9,724,606,135	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/Bulan	6,667,483,098	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	75 Orang/Bulan	9,720,915,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3,050,525	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	2 Laporan	3,691,135	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	5 Orang	100,000,000										5 Orang	94,600,000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	5 Orang	94,600,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100%	1,458,031,288										100 %	1,573,473,000	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	15,031,288	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	1 Paket	19,192,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Paket	650,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	1 Paket	625,441,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	1 Paket	102,753,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	85,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	1 Paket	69,865,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				10 Dokumen	40,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	10 Dokumen	44,053,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	550,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar	1 Laporan	712,171,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Usuan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	4 Unit	120.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	4 Unit	937.868.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	120.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	3 Unit	520.200.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1.098.881.320			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	100 %	1.321.909.000		
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Laporan	214.718.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	898.881.320	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Laporan	1.107.191.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	500.000.000			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	100 %	981.682.000		
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	250.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	7 Unit	254.681.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	30 Unit	36.772.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	2 Unit	690.229.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewananan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	4.023.000.000					100 %	10.017.029.000		
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewananan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewananan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.298.000.000					2 Dokumen	2.607.816.000		
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Dokumen	586.780.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.873.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Dokumen	2.021.036.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000					1 Laporan	120.995.000		
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	1 Laporan	120.995.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Laporan		Laporan	1 Laporan	70.000.000					1 Laporan	158.451.000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usaha/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang Beredar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 Laporan 1 Laporan	70,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	0 Laporan 1 Laporan	158,451,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	785,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	959,767,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	770,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	8000 Ekor	959,767,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	770,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	10000 Ekor	6,170,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	%	2,652,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	10000 Ekor	6,170,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	290,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	2 Dokumen	334,412,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Teraksananya Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	290,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	2 Dokumen	334,412,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Unit	2,362,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	12 Unit	7,092,858,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Bangunan Prasarana Pertanian	Unit	2,362,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	10 Unit	6,300,858,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	%	1,983,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	100 %	1,093,086,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1,305,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	2 Laporan	644,336,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	186,693,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Peninggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Unas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,245,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	457,643,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3 27 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Unas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,245,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	457,643,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Daerah	
															Nasional	Daerah
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Laporan	Laporan	173,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	278,254,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesjahteraan Hewan	Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesjahteraan Hewan	Laporan	Laporan	Laporan	505,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	170,496,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesjahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesjahteraan Hewan				505,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	170,496,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	%	%	729,500,000						100 %	562,637,000			
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	Ha	Ha	729,500,000						625 Ha	562,637,000			
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				549,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	125 Ha	199,641,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				180,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	375 Ha	362,996,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	%	%	%	410,000,000						100 %	1,089,000,000			
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Laporan	410,000,000						1 Laporan	1,089,000,000			
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibia dan Diawasi				410,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Laporan	1,089,000,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	%	%	1,185,000,007						100 %	1,804,126,000			
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Unit	Unit	Unit	1,185,000,007						15 Unit	1,804,126,000			
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diingkarkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diingkarkan Kapasitasnya				550,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	3 Unit	375,098,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	4 Unit	256,598,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Peralatan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Peralatan Penyuluhan Pertanian				555,000,007	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Masyarakat Petani Kebun dan Peternak Kabupaten Kampar	1 Unit	1,101,648,000	DINAS PERKEBUNJAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
TOTAL						21,240,260,584							36,925,441,135			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional							Kategori	
2																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.185.881.541							13.760.606.873				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	7.180.380.901							8.875.606.873		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdikasinya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	325.266.985							620.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan					250.266.985	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Dokumen 12 Bulan	300.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen RKA					55.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Dokumen 12 Bulan	300.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP SKPD	10 Buku			10 Buku	20.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	10 Buku	20.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	3.725.853.478							4.130.606.873		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN					3.717.642.988	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kelengkapan Penggajian Pegawai Penerimaan dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Orang/bulan 12 Bulan	4.115.606.873		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun					8.210.490	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Laporan 5 Dokumen	15.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Administrasi Pendanaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Pendanaan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	30.000.000							300.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Pengelolaan Retribusi					30.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Dokumen 12 Bulan	300.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	85.000.000							150.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersediannya Pakaian Dinas					85.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Paket 1 OPD	150.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1.406.415.666							1.715.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					73.713.650	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Paket 12 Bulan	100.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					328.541.861	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Paket 12 Bulan	550.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					85.055.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Paket 12 Bulan	155.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkt Daerah Penanggung Jawab
								Sumber Dana	Nasional							
		Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor					Langgini		Saing		Pengelolaan Industri					
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 12 Bulan			0 Paket 12 Bulan	Kab. Kampar Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Paket 12 Bulan	100,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen 12 Bulan			0 Dokumen 12 Bulan	Kab. Kampar Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Dokumen 12 Bulan	105,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 12 Bulan			0 Laporan 12 Bulan	Kab. Kampar Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Laporan 12 Bulan	705,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Paket			5 Paket						5 Paket	350,000,000			
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit 12 Bulan			0 Unit 12 Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit 12 Bulan	150,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 1 Paket			0 Unit 1 Paket	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit 1 Paket	200,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	12 Bulan			12 Bulan						12 Bulan	1,080,000,000			
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 12 Bulan			0 Laporan 12 Bulan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Laporan 12 Bulan	100,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			12 Bulan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	12 Bulan	980,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan			12 Bulan						12 Bulan	530,000,000			
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 12 Bulan			0 Unit 12 Bulan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit 12 Bulan	250,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Paket			0 Unit 1 Paket	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit 1 Paket	200,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 12 Bulan			0 Unit 12 Bulan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit 12 Bulan	80,000,000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	257 Koperasi			257 Koperasi						257 Koperasi	850,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
2 17 03 2.01	Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi serta Penilaian Koperasi	60 Koperasi 125 Koperasi	0 Koperasi 0 Koperasi	60 Koperasi 125 Koperasi	212,517,470	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	60 Koperasi 125 Koperasi	850,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kerangguhan, Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kerangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	0 Unit Usaha 3 Koperasi		0 Unit Usaha 3 Koperasi	76,306,714	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Unit Usaha 3 Koperasi	550,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 03 2.01 02	Pemeliharaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Kapatuhan Terhadap Perundang - Undangan Koperasi	0 Unit Usaha 190 Koperasi		0 Unit Usaha 190 Koperasi	136,210,756	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Unit Usaha 190 Koperasi	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	Peningkatan Kesehatan Koperasi	50 Koperasi	0 Koperasi	50 Koperasi	57,482,530					50 Koperasi	350,000,000			
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Permenkop No.17/per/M.KUM/IX/2015	60 Koperasi	0 Koperasi	60 Koperasi	57,482,530					60 Koperasi	350,000,000			
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Terlaksananya Permenkop 17/per/M.KUM/IX/2015	0 Unit Usaha 30 Koperasi		0 Unit Usaha 30 Koperasi	57,482,530	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Unit Usaha 30 Koperasi	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pelatihan Bagi Pengurus Dan Anggota Koperasi	100 Orang	0 Orang	100 Orang	30,000,000					15 Orang	550,000,000			
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	0 Orang	120 Orang	30,000,000					120 Orang	150,000,000			
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0 Orang 42 Orang		0 Orang 42 Orang	30,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Umik Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajarin Pemerataan	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Orang 42 Orang	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAN USAHA-MERENANGI, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terbinarnya UMKM	15 UMK	0 UMK	15 UMK	1,655,500,640					15 UMK	2,385,000,000			
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitratan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung Plut	0 Gedung Plut	1 Gedung Plut	1,655,500,640					1 Gedung Plut	2,385,000,000			
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	0 Dokumen 3 Event		0 Dokumen 3 Event	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Dokumen 3 event	550,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kemitratan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitratan Usaha Mikro Terlaksananya Mitra Usaha (PEN)	0 Unit Usaha 12 Kematan		0 Unit Usaha 12 Kematan	1,505,500,640	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Unit Usaha 12 Kematan	160,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	0 Unit Usaha 1 Gedung PLUT		0 Unit Usaha 1 Gedung PLUT	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri	0 Unit Usaha 1 Gedung PLUT	820,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Nasional					Daerah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMKM	40 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	15 UMKM	50,000,000	Kab. Kampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perolehan Daerah, Peningkatan dan Pengelolaan Industri	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil	15 UMKM	750,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	3 Event	0 Event	0 Event	3 Event	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil	3 Event 0 Unit Usaha	750,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2 17 08 2.01 01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Event 0 Unit Usaha	0 Event 0 Unit Usaha	3 Event 0 Unit Usaha	3 Event 0 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perolehan Daerah, Peningkatan dan Pengelolaan Industri	3 Event 0 Unit Usaha	750,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						960,000,000						2,304,000,000	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						202,862,230						290,000,000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan bagi Pelaku Usaha	25 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	202,862,230					100 Persen	290,000,000	
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Program Perizinan dan pendirian Perusahaam	164 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	100,000,000					164 Pelaku Usaha	100,000,000	
3 30 02 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbina dan Terawasnya Pelaku Usaha Perdagangan	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perolehan Daerah, Peningkatan dan Pengelolaan Industri	164 Pelaku Usaha	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	21 Kecamatan	22,862,230					21 Kecamatan	105,000,000	
3 30 02 2.02 01	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Terlaksananya Penerbitan tanda Daftar Gudang	0 Dokumen 21 Kecamatan	0 Dokumen 21 Kecamatan	0 Dokumen 21 Kecamatan	0 Dokumen 21 Kecamatan	22,862,230	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perolehan Daerah, Peningkatan dan Pengelolaan Industri	0 Dokumen 21 Kecamatan	105,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	5 Pasar	80,000,000					5 Pasar	85,000,000	
3 30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Berbahaya	4 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	4 Pasar	85,791,070	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perolehan Daerah, Peningkatan dan Pengelolaan Industri	0 Laporan 21 Kecamatan	85,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Sarana pasar	4 Pasar	0 PKL	0 Pasar	4 Pasar	85,791,070					4 Pasar	450,000,000	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	0 PKL	0 PKL	35 PKL	85,791,070					35 PKL	100,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbina dan Pedangang Kaki Lima	5 Pasar	0 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Terbinanya Pasar Rakyat	5 Pasar	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3 30 03 2.02 02	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	0 Dokumen 4 Pasar	0 Dokumen 4 Pasar	0 Dokumen 4 Pasar	0 Dokumen 4 Pasar	35,791,070	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Terbinanya Pasar Rakyat	0 Dokumen 4 Pasar	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	207,952,628					100 Persen	794,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	0 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	50,000,000					21 Kecamatan	439,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0 Laporan 21 Kecamatan	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	0 Laporan 21 Kecamatan	89,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok barang	19 Kecamatan	107,952,628						19 Kecamatan	300,000,000				
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Masyarakat	19 Kecamatan	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	19 Kecamatan	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan 16 Kecamatan	57,952,628	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	0 Laporan 16 Kecamatan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7 Distributor	50,000,000						7 Distributor	55,000,000				
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Pestisida dan Pupuk Bersubsidi	7 Distribusi	50,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	7 Distribusi	55,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolgian	100 Pesen	350,000,000						100 Pesen	620,000,000				
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	0 UTP	350,000,000						654 UTP	620,000,000				
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	0 Unit 654 UTP	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	0 Unit 654 UTP	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Terawasi dan Terlatanya UTPP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTPP	40 Remeilik Usaha	150,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	40 Remeilik Usaha	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	2 Event	113,394,072						2 Event	150,000,000				
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	3 Event	113,394,072						3 Event	150,000,000				
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Pemerintah Kab. Kampar pada Acara Ulang Tahun Kabupaten Kampar, MTQ Kabupaten dan MTQ Provinsi	Jumlah UMKK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0 UMKK 3 Event	113,394,072	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan, Daerah, Paliwisata dan Pengelolaan Industri	Terbanyanya Pasar Rakyat	0 UMKK 3 Event	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			
				TOTAL	10,145,881,541					16,064,606,873					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				46,817,675,612							59,958,172,522	
4	01	01	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	46,817,675,612						100 Persen	59,958,172,522
4	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	1,594,541,750						100 %	1,724,995,925
4	01	01	01	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	98,665,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Unit	108,532,050
4	01	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		3 Paket	947,980,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			3 Paket	1,042,778,000
4	01	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		191 Dokumen	57,896,250	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			191 Dokumen	63,685,875
4	01	01	04	Penyediaan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		191 Dokumen	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			191 Dokumen	110,000,000
4	01	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang	390,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			40 Orang	400,000,000
4	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	15,546,203,793						100 %	16,855,767,411
4	01	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	372,255,413	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			3 Paket	409,480,954
4	01	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1,534,390,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			5 Paket	1,687,829,000
4	01	01	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	468,169,795	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			6 Paket	514,986,714
4	01	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	6,000,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			2 Paket	6,000,000,000
4	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	430,056,825	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Paket	473,062,507
4	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		16380 Dokumen	87,611,440	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			16380 Dokumen	96,372,564

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	183.152.720	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	201.467.992	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.472.567.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	7.472.567.600	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %		0 %	100 %	8.311.523.920						100 %	17.644.160.582	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	702.735.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	1.323.008.720	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				18 Unit	500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Unit	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1847 Unit	500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1847 Unit	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				680 Unit	500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	680 Unit	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				86 Unit	608.788.720	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	86 Unit	669.667.592	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				98 Unit	5.500.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	98 Unit	13.551.484.270	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah Tersedia	100 %		0 %	100 %	12.796.560.233						100 %	13.688.968.740	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	227.748.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	250.523.460	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	3.173.940.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	36 Laporan	3.173.940.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.710.984.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan	1.882.083.280	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.683.886.833	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	8.382.422.000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	0 %	0 %	100 %	5.101.031.532	Semua Kelurahan			100 %	5.338.601.274				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	1.465.939.464	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	21 Unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	779.739.820	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	37 Unit	957.713.802	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1847 Unit	255.352.248	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1847 Unit	280.887.472	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				680 Unit	600.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	680 Unit	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.000.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Unit	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.000.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	6 Unit	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	0 %	0 %	100 %	603.353.720				100 %	663.689.092				
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	503.353.720	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Paket	553.689.092	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	8 Orang	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumah tanggungan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumah tanggungan Sekretariat Daerah terfasilitasi	100 %	0 %	0 %	100 %	2.862.450.664				100 %	4.041.989.498				
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.512.460.664	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Paket	1.663.706.730	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	650.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Paket	22.011.594	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				3 Paket	700.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Paket	2.356.271.174	SEKRETARIAT DAERAH			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						4.800.000.000						5.100.000.000			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	4.800.000.000				100 Persen		5.100.000.000			
4 01 01 2.14	Palaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	0 %	100 %	100 %	4.800.000.000				100 %		5.100.000.000			
4 01 01 2.14 01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan			1 laporan	1 laporan	4.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 laporan		4.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan			1 laporan	1 laporan	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 laporan		300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1 laporan	1 laporan	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 laporan		500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.355.849.584						1.355.849.584			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH															
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1.355.849.584				100 Persen		1.355.849.584			
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Penataan Organisasi	100 %	0 %	100 %	100 %	1.355.849.584				100 %		1.355.849.584			
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	1 Dokumen	530.887.725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen		530.887.725	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	255.210.073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan		255.210.073	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	157.995.386	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen		157.995.386	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	265.923.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen		265.923.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	145.833.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen		145.833.400	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						24.002.555.591						24.002.555.591			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH															
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	24.002.555.591				100 Persen		24.002.555.591			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Penangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
4 01 2.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota											
4 01 2.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	1.509.548,132	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	1.539.548,132	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.01 02	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	799.548,132	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		4 Dokumen	799.548,132	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	110.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	110.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	100.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	100.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	100.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	100.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	300.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Laporan	330.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen/ Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	19.381.438,667					100 %	24.596.000,000	
4 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 Orang/Bulan		177 Orang/Bulan	19.021.438,667	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		177 Orang/Bulan	24.200.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	100.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		12 Dokumen	110.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	120.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Dokumen	132.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	80.000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		1 Laporan	88.000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	60,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Laporan	66,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	0 %	2,337,116,924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100 %	2,359,116,924	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Reputasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	132,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,117,116,924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	2,117,116,924	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	0 %	774,451,868	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100 %	774,451,868	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	174,451,868	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Orang/Bulan	174,451,868	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penujangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penujangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Orang/Bulan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				15,987,510,480					23,000,000,000			
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	0 Persen	15,987,510,480					23,000,000,000			
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan Rakyat melalui Evaluasi dan capaian kinerja terkait dengan Bina Mental spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	0 %	15,987,510,480					23,000,000,000			
4 01 02 2.02 01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	9,907,179,659	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	7 Dokumen	10,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3,892,820,341	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Dokumen	9,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Nasional					Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Unsur Kepemudaran dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum, Limnas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Unsur Kepemudaran dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum, Limnas	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 02 2.02 04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45 Keluarga		45 Keluarga	45 Keluarga	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 02 2.02 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Komunitas Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Nuhah	45 Keluarga 0 Keluarga		45 Keluarga 0 Keluarga	45 Keluarga 0 Keluarga	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299.284.030	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	7 Kasus		7 Kasus	7 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			409.080.323	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			281.604.625	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01	989.968.978													
4 01 02	989.968.978													
4 01 02 2.03	989.968.978													
4 01 02 2.03 01	989.968.978													
4 01 02 2.03 02	989.968.978													
4 01 02 2.03 03	989.968.978													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usrus/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Prioritas						
										Nasional	Daerah					
UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
4 01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	847,281,399						100 Persen	1,687,500,000	1,687,500,000	
4 01 02	Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah Terfasilitasi	100 %	0 %	100 %	100 %	847,281,399	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	1,687,500,000	1,687,500,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	771,183,168					0	25 Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri			2 Dokumen	2 Dokumen	22,911,507	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	437,500,000	437,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	53,186,724	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
4 01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1,665,488,635						100 Persen	1,990,000,000	1,990,000,000	
4 01 02	Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar	100 %	0 %	100 %	100 %	1,665,488,635						100 %	1,990,000,000	1,990,000,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121,015,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,254,547,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	1,360,000,000	1,360,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	289,925,479	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	380,000,000	380,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
PENGELOLAAN PERBATASAN																
5 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Perbatasan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	500,000,000						100 Persen	250,000,000	250,000,000	
5 06 02	Palaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terbunya Wilayah Administrasi Perbatasan Kabupaten Kampar	100 %	0 %	100 %	100 %	500,000,000						100 %	250,000,000	250,000,000	
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					750,000,000					750,000,000					
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	750,000,000					100 Persen	750,000,000				
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	16 Dokumen	0 Dokumen	16 Dokumen	750,000,000					16 Dokumen	750,000,000				
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	16 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan		13 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	13 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					887,887,687						887,887,687				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					887,887,687						887,887,687				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	887,887,687					100 Persen	887,887,687				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pemenuhan jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	0 %	100 %	887,887,687					100 %	887,887,687				
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	260,852,754	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	260,852,754	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	421,448,055	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Laporan	421,448,055	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	205,586,878	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	205,586,878	SEKRETARIAT DAERAH			
4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					2,016,630,267						2,016,630,267				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					2,016,630,267						2,016,630,267				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	2,016,630,267					100 Persen	2,016,630,267				
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang jasa terkelola	100 %	0 %	100 %	2,016,630,267					100 %	2,016,630,267				
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen		150 Dokumen	1,177,583,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	150 Dokumen	1,177,583,460	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150 Dokumen		150 Dokumen	689,227,798	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	150 Dokumen	689,227,798	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang		20 Orang	149,819,009	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	20 Orang	149,819,009	SEKRETARIAT DAERAH			
4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					791,536,810						791,536,810				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					791,536,810						791,536,810				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	791,536,810					100 Persen	791,536,810				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pagu Indikatif	Lokasi		Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %		0 %	100 %	791,536,810						100 %	791,536,810	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KOKRI, Pemananan Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	499,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0		1 Dokumen	499,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	136,197,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0		1 Dokumen	136,197,250	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Petaaan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Perbukitan, Pertanahan				1 Dokumen	155,839,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0		1 Dokumen	155,839,560	SEKRETARIAT DAERAH	
TOTAL							101,412,385,043						128,046,662,772		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						Prioritas	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	SEKRETARIAT DPRD					88,214,928,671							88,055,204,484				
4	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100 Persen	49,425,188,264						100 Persen				
4	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen	8 Dokumen	122,280,000						8 Dokumen				
4	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,200,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Dokumen	16,122,060	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,270,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18,790,275	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,270,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18,790,275	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,270,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18,790,275	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,270,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18,790,275	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Laporan	54,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Laporan	61,075,700	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Bulan	4,495,649,702						14 Bulan	5,226,457,329			
4	02	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4,484,372,853	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	46 Orang/bulan	5,207,667,054	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,276,850	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Laporan	18,790,275	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1,352,204,500						25 Persen	1,547,226,000			
4	02	01	2.05	02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	147,262,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Paket	138,600,000	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		
4	02	01	2.05	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	1,204,942,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD	25 Orang	1,408,626,000	SEKRETARIAT DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Usuan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana				
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1,845,116,520				12 Bulan	1,743,325,215	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,052,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Paket	33,257,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,088,095,025	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Paket	607,451,215	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	12,288,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Paket	250,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan				1 Paket	59,400,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	59,400,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	542,281,495	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Paket	683,217,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	110,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	10 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemenuhan terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	65 Unit		0 Unit	10 Unit	587,435,500				10 Unit	450,000,000	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	387,435,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemenuhan terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	58 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	2,484,673,827				12 Bulan	2,182,320,747	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	6,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	10 Laporan	3,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	600,990,780	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	594,598,320	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana				
								Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disiapkan				1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	1 Laporan	189.999,677	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan				12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.394.722,750	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemenuhan terhadap Pemeliharaan Barano Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3.133.925.078				12 Bulan	3.051.078.163	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	2 Unit	224.030.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	8 Unit	825.886.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	3 Unit	1.538.376.300	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	2 Unit	237.146.488	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	100 Unit	225.635.375	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	56 Bulan		0 Bulan	14 Bulan	34.454.036.357				14 Bulan	33.772.285.213	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang/Bulan	33.017.421,463	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disiapkan				1 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	673.008,750	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	81.855.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	949.866.780				12 Bulan	1.024.621.800	
4 02 01 2.16 03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	574.360.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disiapkan	2 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Paket	450,257,780	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prinsipian dan Anggota DPRD	450,261,800	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tenuhnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen		0 Persen			100 Persen	38,785,740,407			100 Persen	38,905,531,157		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Referensi dan Bahan Perbandingan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	28 Perda		0 Perda			6 Perda	4,512,111,347			6 Perda	5,036,943,647		
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Dokumen	1,021,358,800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	1,005,019,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	6 Dokumen	3,293,827,900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	3,835,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Dokumen	196,924,647	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	196,924,647	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran oleh DPRD	6 Dokumen		0 Dokumen			6 Dokumen	1,061,744,600			6 Dokumen	410,000,000		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	307,413,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	181,310,200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	109,443,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	109,443,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	354,133,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	10,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	48 Bulan		0 Bulan			12 Bulan	11,847,322,120			12 Bulan	11,847,260,120		
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	3,289,465,200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	3,485,403,200	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	3,038,642,600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	3,038,642,600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan						Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Laporan	2,295,857,000	DAERAH	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Laporan	2,843,185,600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	184,171,720	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	5,934,167,200		
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	3 Dokumen	1,551,206,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.04 03	Publisasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	1,963,058,800	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	20 Orang	733,200,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	8 Orang	384,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	1,302,702,400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	20 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen						5 Dokumen	1,114,917,500		
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Laporan	366,697,500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	648,220,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab	
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target		Pagu Indikatif
									Nasional	Daerah				
4 02 02 2.06	Polaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan					78.898,640	78.898,640		
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				6 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	6 Laporan	78.898,640	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan					14.483.344.050	14.483.344.050		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	9.880.993.700	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	803.997.250	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Alat Kelengkapan (AKD) DPRD	12 Dokumen	3.798.353.100	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TOTAL							88.214.928.671				88.055.204.484			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
5															
5							19,688,224,657							19,965,143,719	
5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen		100 Persen	13,512,007,528						100 Persen	13,794,856,858	
5	01	Pencapaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen			100 persen	199,114,090						100 persen	203,075,361	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	104,338,632					Kabupaten/kota	4 dokumen	106,425,405	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	7,441,000					Kabupaten/kota	1 dokumen	7,895,449	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	7,210,000					Kabupaten/kota	1 dokumen	7,354,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 dokumen	8,241,000					Kabupaten/kota	1 dokumen	8,241,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	8,141,000					Kabupaten/kota	1 dokumen	8,141,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 laporan	48,441,998					Kabupaten/kota	3 laporan	49,410,838	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan	15,300,460					Kabupaten/kota	1 laporan	15,606,469	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	6,275,316,635						100 %	6,576,152,279	
5	01	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 52 org/bulan	6,212,056,918					Kabupaten/kota	0 Orang/bulan 52 org/bulan	6,511,627,368	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				1 laporan	23,280,317					Kabupaten/kota	1 laporan	23,745,923	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 laporan	39,979,400					Kabupaten/kota	1 laporan	40,776,968	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	511,671,891						100 %	541,030,329	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakelan dinas beserta atribut kelengkapannya				0 paket	200,000,000			kabupaten kampar	0 paket	223,125,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				2 orang	44,125,000			kabupaten kampar	2 orang	45,007,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				12 orang	267,546,891			kabupaten kampar	12 orang	272,897,829	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100%	2,573,480,264				100 %	2,260,943,104				
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan				1 paket	147,233,606			kabupaten kampar	1 paket	150,178,278	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan				1 paket	750,000,000			kabupaten kampar	1 paket	366,060,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan				1 paket	378,420,000			kabupaten kampar	1 paket	381,988,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	336,353,820			kabupaten kampar	1 Paket	339,080,896	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan				1 dokumen	64,800,000			kabupaten kampar	1 dokumen	64,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	896,672,838			kabupaten kampar	1 Laporan	958,834,680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah operasional dan lapangan	persen		persen	100 persen	32,000,000				100 persen	50,000,000				
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di sediakan				3 unit	32,000,000			kabupaten kampar	3 unit	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan	2 laporan	1,022,874,027				2 laporan	1,104,517,120				
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan				1 laporan	124,800,000			Kabupaten Kampar	1 laporan	124,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan				1 laporan	898.074.027		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kampar	1 laporan	979.717.120	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	2.897.550.621						100 %	3.059.138.665	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya				8 unit	284.215.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kabupaten Kota	8 unit	289.899.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	121.782.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kota	20 Unit	124.218.405	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 unit	2.491.552.871		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kabupaten Kota	0 Unit 1 unit	2.645.020.960	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	3.823.051.557						100 Persen	4.065.960.621	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pಂದanaan	Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	100 %		0 %	100 %	2.392.555.285						100 %	2.606.257.948	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD				1 dokumen	200.723.220		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kabupaten Kota	1 dokumen	204.737.670	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah				5 dokumen	185.738.894		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kota	5 dokumen	189.453.672	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				21 Berita Acara	382.853.390		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kota	21 Berita Acara	390.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah	Jumlah berita Acara forum peringkat daerah/lintas peringkat daerah				4 berita acara	405.810.615		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kabupaten Kota	4 berita acara	405.810.615	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				21 Berita Acara	403.334.036					Kabupaten Kota	21 Berita Acara	414.410.917	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 06	Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota verifikasi oleh kecamatan				21 berita acara	164.095.130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Kota	21 berita acara	167.377.033	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang di tetapkan RKPD				1 dokumen	650.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kabupaten Kota	1 dokumen	834.468.041	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya data dan informasi pembangunan daerah	100 %	0 %	100 %	749,287,961				Kabupaten Kampar	100 %	760,650,120	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua perencanaan Pembangunan Daerah)			3 masalah	304,927,961			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Kampar	3 masalah	311,026,520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang di bina dalam pemanfaatan data dan informasi Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			1 org 0 Orang	322,180,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Kampar	1 org 0 Orang	325,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil Pembangunan Daerah yang di terbitkan			4 buku	122,180,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Kampar	4 buku	124,623,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pendeckase Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	0 %	100 %	475,604,154					100 %	489,336,316			
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di dokumen perencanaan pembangunan daerah			5 laporan	205,231,682			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Kampar	5 laporan	209,336,316	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			1 Laporan	270,372,472			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten Kampar	1 Laporan	280,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	0 %	100 %	205,604,157					100 %	209,716,237			
5 01 02 2.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			0 Dokumen 1 dokumen	105,231,682			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kabupaten/kota	0 Dokumen 1 dokumen	107,336,316	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah bidang Pembangunan Daerah			1 dokumen	100,372,475			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kabupaten/kota	1 dokumen	102,379,921	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persen	persen	100 persen	2,353,165,572					100 persen	2,104,326,240			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Realisasi koordinasi rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	persen	100 persen	895,021,000					100 persen	931,500,000			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan			1 dokumen	70,192,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kabupaten /kota	1 dokumen	71,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	10 PD	53,500,000		10 PD	53,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	10 PD	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 laporan	44,500,000		1 laporan	44,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	1 laporan	46,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada bidang Pemerintahan	1 laporan	155,354,000		1 laporan	155,354,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	1 laporan	156,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	67,475,000		1 dokumen	67,475,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	1 dokumen	68,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	65,000,000		6 PD	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	6 PD	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	79,000,000		6 PD	79,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	6 PD	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	360,000,000		1 laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Kota	1 laporan	380,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Realisasi Koordinasi rencana pembangunan bidang Perencanaan dan SDA	100 %	866,828,172	0 %	100 %	866,828,172						100 %	590,083,512	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan daerah bidang perkeonomian yang di koordinasi penyusunannya laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	63,080,832		1 dokumen	63,080,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		kabupaten Kota	1 dokumen	64,342,449	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perkeonomian laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	43,180,800		6 PD	43,180,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		kabupaten Kota	6 PD	44,044,416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perkeonomian	6 PD	89,992,800		6 PD	89,992,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		kabupaten Kota	6 PD	91,792,656	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Rejia dengan RKPD/RPJM/MD pada bidang Perekonomian				1 laporan	92.836.591		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan	94.693.323	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang di koordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen 1 dokumen	371.204.832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen 1 dokumen	64.342.449	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Rejia Bidang SDALayanan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0 Laporan 6 PD	43.180.832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 6 PD	44.044.416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Rejia bidang SDA				6 PD	140.514.894		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	6 PD	143.130.480	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Rejia dengan RKPD/RPJM/MD pada bidang SDA				1 laporan	42.836.591		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan	43.693.323	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Realisasi koordinasi rencana pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%			100%	571.316.400					100 %	582.742.728			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD) asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang di koordinir penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 dokumen	107.963.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen	110.123.178	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Rejia Bidang Infrastruktur				21 PD	15.990.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	21 PD	16.309.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Rejia Bidang Infrastruktur				4 PD	24.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	4 PD	25.296.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Rejia dengan RKPD/RPJM/MD pada bidang Infrastruktur				1 laporan	222.276.455		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan	226.721.984	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan				1 dokumen	27.219.590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen	27.763.982	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Lokasi	Sumber Dana							
													Praktikum Maju Rencana Tahun 2024			
													Nasional	Daerah		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyujuannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				21 PD	15,990,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan/Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				21 PD	34,800,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan				1 laporan	122,276,455			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						854,107,757					809,000,000				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		%			100 %	854,107,757					809,000,000				
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan	Realisasi Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan	4 laporan	0 laporan		1 laporan	189,800,000					1 laporan				
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	3 dokumen			1 laporan	189,800,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Realisasi dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		0 dokumen		1 dokumen	195,753,757					1 dokumen				
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata				1 dokumen	195,753,757			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terselainya Dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan				1 dokumen	198,554,000					1 dokumen				
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah				1 dokumen	198,554,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terselainya Dokumen informasi kelibangan	4 laporan	0 laporan		1 laporan	270,000,000					1 laporan				
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan Jumlah laporan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelibangan				0 Laporan 1 laporan	270,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan 1 laporan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
							TOTAL	20,542,332,414				20,774,143,719				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
																Prioritas	
5	UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN					386,043,705,897							386,333,167,932			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		14,380,247,079							100	100	13,669,709,114	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100,000,000							100	100	100,000,000	
5	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				1 Laporan	100	100,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen		9,404,209,114						100	100	9,404,709,114	
5	02	01	02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0.Orang/bulan	9,394,709,114	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				0 Orang/bulan	100	9,394,709,114	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	9,500,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			10 Laporan	100	10,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi dan kebutuhan pegawai	Persen		788,939,950					100	100	790,000,000	
5	02	01	2	05	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52 OPD	448,939,950	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			52 OPD	100	450,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 OPD	340,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			52 OPD	100	340,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		2,176,264,662					100	100	1,665,000,000	
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	1,014,264,662	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini				100	100	500,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	198,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 Paket	100	198,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Paket 100	199,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Paket 100	199,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Dokumen 100	15,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Dokumen 100	18,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Laporan 100	750,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Laporan 100	750,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1,330,833,333						100 Persen	1,410,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Laporan 100	270,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Laporan 100	270,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Laporan 100	190,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Laporan 100	190,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Laporan 100	870,833,333	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Laporan 100	950,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	530,000,000						100 Persen	250,000,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Pajak dibayarkan Pakajnya	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Pajak dibayarkan Pakajnya Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Unit 100	280,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Unit 100	250,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi Persetase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				0 Unit 100	250,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Unit 100	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.13	Pemataan Organisasi	Terdakapnya monitoring dan evaluasi	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	50,000,000	
5 02 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0 Dokumen 100	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Dokumen 100	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Saaran	Target	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional						Daerah
		Tata Laksana Persetase Cakupan Layanan Penunjang Usrah Pemerintah Daerah Kabupaten						Saing								
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	370.963.458,818				100 Persen	371.963.458,818				
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	1.152.000.000				100 Persen	1.152.000.000				
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	80.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	80.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	110.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	110.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	370.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	370.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	370.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	370.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	32.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	32.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	595.000.000				100 Persen	595.000.000				
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen	250.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Anggaran Kas, Daerah, Laporan dan Penyetoran Penomoran dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penomoran Hibak Ketiga (PHK)	Jumlah Laporan Realisasi dan Anggaran Kas, Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/Penomoran dan Penyetoran Penomoran dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penomoran Hibak Ketiga (PHK)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	170.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan	170.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Orang 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Orang 100	175.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan	100 Persen	0 Persen			485.000.000			100 Persen	485.000.000				
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Laporan 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 100	120.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100	365.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						368.731.458.818				368.731.458.818				
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Laporan 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 100	346.040.725.640	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100	7.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Laporan 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 100	16.690.733.178	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD	100 Persen	0 Persen			700.000.000			100 Persen	700.000.000				
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD	100 Persen	0 Persen			700.000.000			100 Persen	700.000.000				
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Persentase pengelolaan BMD	0 Laporan 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 100	250.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD	100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100	200.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Persentase pengelolaan BMD	0 Laporan 100			Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 100	250.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
TOTAL							386.043.705.897				386.333.167.932				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						
UNSR PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 02	KEUANGAN						21,031,506,421							100 persen	16,856,442,314	
5 02 01	PROGRAM PENERIMAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persen			100 persen	16,778,689,443							100 %	102,127,359	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100 %	0 %		100 %	102,127,359							100 %	102,127,359	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	37,565,420	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	2 Dokumen	37,565,420	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,743,245	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Dokumen	3,743,245	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,223,594	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Dokumen	4,223,594	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,178,050	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Dokumen	4,178,050	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,214,500	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Dokumen	5,214,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	42,202,550	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Laporan	42,202,550	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan RKA, DPA, DPPA, LKJP	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	10,357,297,629						100 %	10,357,297,629		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	10,333,727,889	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Gaji dan Tunjangan ASN dan laporan keuangan akhir tahun SKPD	85 Orang/bulan	10,333,727,889	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,569,740	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Gaji dan Tunjangan ASN dan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	13,569,740	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16 Laporan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Gaji dan Tunjangan ASN dan laporan keuangan akhir tahun SKPD	16 Laporan	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	172,000,000						100 %	172,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				90 Paket	120,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pakaian dinas dan BinteK Peraturan perundang-undangan	90 Paket	120,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	52,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pakaian dinas dan BinteK Peraturan perundang-undangan	10 Orang	52,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Person		Person	100 Person	2,601,693,296						100 Person	2,601,693,296	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	800,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	800,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	199,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	577,129,796	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	577,129,796	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Penyelenggaraan Rapat Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	26,563,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Dokumen	26,563,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	999,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	999,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Person		Person	100 Person	1,350,000,000						100 Person	1,350,000,000	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	600,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan dinas operasional, kendaraan jabatan dan pengadaan gedung kantor	1 Unit	600,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkt Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	550,000,000	550,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	200,000,000	200,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen					100 Persen	1,487,676,597	1,565,449,468				
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	435,275,010	435,275,010	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	196,900,000	196,900,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	855,501,587	933,274,458	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %					100 %	707,874,562	707,874,562				
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	9 Unit	207,874,562	207,874,562	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Unit	500,000,000	500,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen		100 persen					100 persen	4,252,836,978	4,252,836,978				
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %		0 %					100 %	4,252,836,978	4,252,836,978				
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	124,420,740	124,420,740	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	124,420,740	124,420,740	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	508,920,975	508,920,975	BADAN PENDAPATAN DAERAH			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	301.003.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5 Unit	301.003.000 DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	153.236.230	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Laporan	153.236.230 DAERAH
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	265.900.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Laporan	265.900.000 DAERAH
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NUPP nya				400000 Objek Pajak	575.304.720	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	400000 Objek Pajak	575.304.720 DAERAH
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	531.246.270	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen	531.246.270 DAERAH
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5 Layanan	111.530.815	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5 Layanan	111.530.815 DAERAH
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	107.187.360	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen	107.187.360 DAERAH
5 02 04 2.01 11	Pengaghan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengaghan Pajak Daerah				1 Dokumen	156.230.285	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen	156.230.285 DAERAH
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	86.023.560	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen	86.023.560 DAERAH
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeciksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	413.002.235	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen	413.002.235 DAERAH
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1 Laporan	35.205.410	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Laporan	35.205.410 DAERAH
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	759.204.638	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Laporan	759.204.638 DAERAH
TOTAL							21.031.506.421						21.109.279.292

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional					Prioritas	
															Daerah	
5	UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	KEPEGAWAIAN															
5	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	6,630,379,964					100 Persen	10,951,695,771			
5	03	01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	288,573,055					100 Persen	310,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	197,521,469	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Dokumen	27,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Dokumen	13,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Dokumen	13,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Dokumen	13,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	28,551,586	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	42,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	4,071,684,240				100 Persen	5,112,030,645			
5	03	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	4,068,317,707	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	45 Orang/bulan	5,108,327,459	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3,366,533	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	3,703,186	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 Persen	0 Persen	244,238,425				100 Persen	225,328,293			
5	03	01	2.05	07	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Menggagal dalam Melaksanakan Tugas		1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	121,666,025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	03	01	2.05	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		133 Orang	94,238,425	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	133 Orang	103,662,268	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pangung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah					
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	1.107.032.883						100 Persen	2.330.861.285		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Paket	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket			100 Paket	281.889.132	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100 Paket	1.264.452.569	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	42.537.666	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Paket	46.791.426	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	42.568.809	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Paket	46.825.690	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	4.356.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Dokumen	4.791.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	720.681.282	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	950.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Persen		0 Persen	100 Persen	200.000.000						100 Persen	1.635.000.000		
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit			60 Unit	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	60 Unit	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Persen		0 Persen	100 Persen	410.058.462						100 Persen	478.053.358		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	140.167.964	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12 Laporan	154.184.758	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	269.890.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12 Laporan	323.866.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Persen		0 Persen	100 Persen	308.792.899						100 Persen	859.672.190		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			3 Unit	57.450.637	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Unit	63.195.701	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1 Unit			1 Unit	18.561.866	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	20.418.053	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional					
										Daerah					
5 03 01 2.09 06	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	32.780.396	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintahan	50 Unit	36.058.436	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	200.000.000	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Unit	300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah	100 Persen	0 Persen		100 Persen	4.843.957.158						100 Persen	6.476.540.441	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen	0 Persen		100 Persen	1.732.355.715						100 Persen	1.968.836.696	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK				1 Dokumen	1.000.000.000	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	1.200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	175.000.000	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	155.745.410	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	33.195.753	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Lembaga	36.515.328	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	90.753.178	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Dokumen	99.828.496	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	158.406.784	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	174.247.462	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	275.000.000	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	302.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	2800 Persen	0 Persen		100 Persen	1.430.355.894						100 Persen	1.460.405.234	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	159.547.440	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	500 Dokumen	99.229.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2000 Dokumen	579.920.477	Semua Kabupaten, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	2000 Dokumen	650.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	760 Persen	0 Persen	760 Persen	760 Dokumen	690.887,977	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	760 Dokumen	711.175,674		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1.073.575,824						100 Persen	2.354.473,215		
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	0 Persen	5 Orang	5 Orang	1.073.575,824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	5 Orang	850.000,000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	607.669,725						100 Persen	692.825,296		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	174.932,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	200.000,000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0 Persen	1 Laporan	1 Laporan	257.442,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	300.000,000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 Orang	0 Persen	275 Orang	275 Orang	71.731,201	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	275 Orang	78.904,321		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	0 Persen	1 Laporan	1 Laporan	48.509,659	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	53.360,625		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dinyai	1 Dokumen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.054,865	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	60.560,350		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.033.903,727							2.134.789,007		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAVA MANUSIA	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1.033.903,727						100 Persen	2.134.789,007		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kapasitas dibidang Kompetensi teknis	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	160.000,000						100 Persen	531.866,424		
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konturen, Peranglat Daerah, Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	20 Orang	0 Persen	20 Orang	20 Orang	160.000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan berdaya Saing	20 Orang	531.866,424		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	873.903,727						100 Persen	1.602.922,583		
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepermpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepermpinan, dan Prajabatan	80 Laporan	0 Persen	80 Laporan	80 Laporan	873.903,727	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	80 Laporan	1.602.922,583		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
							TOTAL	12.508.240,849						19.563.025,219		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional					Prioritas	
															Daerah	
6																
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						20,315,633,478						22,727,588,162			
6	INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		persen	100 persen	15,384,223,478						100 persen	16,835,402,162		
6	01	01	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100 Persen	113,200,000						100 Persen	118,860,000		
6	01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	17,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		6 Dokumen	0	18,375,000	INSPEKTORAT	
6	01	01	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 laporan	3 laporan	95,700,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		3 laporan	0	100,485,000	INSPEKTORAT	
6	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100 Persen	12,331,752,322						100 Persen	13,237,562,942		
6	01	02	01	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang/Bulan	12,328,852,322	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		65 Orang/Bulan	0	13,234,517,942	INSPEKTORAT	
6	01	02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD		3 laporan	2,900,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		3 laporan	0	3,045,000	INSPEKTORAT	
6	01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100 Persen	759,133,164						100 Persen	883,924,860		
6	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelatihan		18 orang	697,883,164	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		18 orang	0	819,612,360	INSPEKTORAT	
6	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang	61,250,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		45 Orang	0	64,312,500	INSPEKTORAT	
6	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100 Persen	1,095,670,150						100 Persen	1,222,152,008		
6	01	06	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	44,195,900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		2 Paket	0	46,405,695	INSPEKTORAT	
6	01	06	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	237,562,055	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		4 Paket	0	249,440,158	INSPEKTORAT	
6	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	128,300,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		2 Paket	0	134,715,000	INSPEKTORAT	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional					Daerah
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	88.379,194			2 Paket	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Paket	92.798,154	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	31.200,000			2 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Dokumen	32.760,000	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.033,001			35 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	35 Laporan	666.035,001	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000		Persen	100 Persen						100 Persen	200,000,000		
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,000,000			7 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	7 Unit	200,000,000	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedia	561,714,342		Persen	100 Persen						100 Persen	729,011,177		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150,931,200			2 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Laporan	156,477,760	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	410,788,142			0 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	0 Laporan 1 Laporan	570,533,417	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	422,753,500		Persen	100 Persen						100 Persen	443,891,175		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	68,690,000			2 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Unit	72,124,500	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinan	123,411,000			7 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	7 Unit	129,581,550	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46,092,500			50 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	50 Unit	48,397,125	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	184,560,000			2 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Unit	199,786,000	INSPEKTORAT	
6 01 02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pegawai	4,443,610,000		Persen	100 Persen						100 Persen	5,361,638,500		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pegawai Internal	Persentase Penyelenggaraan Pegawai Internal	4,022,360,000		Persen	100 Persen						100 Persen	4,919,326,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	196,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	6 laporan	305,540,000	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 laporan	1,177,800,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	15 laporan	1,766,820,000	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 laporan	59,835,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	4 laporan	72,735,500	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	24 laporan	1,121,425,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	24 laporan	1,233,567,500	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	144 laporan	1,026,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	144 laporan	1,077,300,000	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Tertentu	1 Kesepakatan	10,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Kesepakatan	10,500,000	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penindakan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Penindakan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penindakan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Penindakan APJP	4 Dokumen	431,300,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	4 Dokumen	452,865,000	INSPEKTORAT				
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	421,250,000						100 Persen	442,312,500					
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 laporan	421,250,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	15 laporan	442,312,500	INSPEKTORAT				
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	487,800,000						100 Persen	530,547,500					
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100 Persen	23,800,000						100 Persen	23,800,000					
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	23,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Rekomendasi	23,800,000	INSPEKTORAT				
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	464,000,000						100 Persen	506,747,500					
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peringkat Daerah yang di Lakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 PD	88,050,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	32 PD	92,452,500	INSPEKTORAT				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kampar

Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 PD	75,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	32 PD	85,000,000	INSPEKTORAT	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	265,950,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Kegiatan	292,545,000	INSPEKTORAT	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penengkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penengkatan Integritas				53 PD	35,000,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	53 PD	36,750,000	INSPEKTORAT	
TOTAL						20,315,633,478	20,315,633,478					22,727,588,162			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,868,841,286						3,453,998,428		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen		100 Persen	2,383,041,286						100 Persen	2,968,198,428	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0 Persen		100 Persen	1,851,847,357						100 Persen	2,340,516,968	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1,850,247,357	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Orang/bulan	2,338,596,968	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,600,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1,920,000	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan	100 Persen	0 Persen		100 Persen	9,000,000						100 Persen	10,800,000	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	9,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	10,800,000	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik kantor	100 Persen	0 Persen		100 Persen	238,711,188						100 Persen	281,136,560	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	2,400,000	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	60,472,388	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	67,250,000	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	68,731,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	82,477,200	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,271,800	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	12,326,160	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				516 Laporan	97,236,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				516 Laporan	116,683,200	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Kecamatan	100 Persen	0 Persen		100 Persen	17,264,000						100 Persen	20,716,800	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7,264,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	8,716,800	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	12,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KIRI)

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen		0 Persen	100 Persen	215,606,946					253,693,946				
7 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	25,171,946	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	25,171,946	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	190,435,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	228,522,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	50,611,795					61,334,154				
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,611,795	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	46,334,154	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	3,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	12,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100,000,000					100,000,000				
7 01 02 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	8 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	100,000,000					2 Laporan	100,000,000			
7 01 02 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			0 Laporan 2 Laporan	100,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Masyarakat Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina	100 Persen		0 Persen	20 Persen	366,000,000					20 Persen	366,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	366,000,000					100 Persen	366,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	183,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Lipat Kain	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	183,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	183,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Pokmas / Ormas	183,000,000	KECAMATAN KAMPAR (KRI)		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Nasional					Daerah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	19,800,000				20 Persen	19,800,000				
7 01 06 2.01	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang teridentifikasi dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	8 Dokumen		0 Dokumen	19,800,000				4 Dokumen	19,800,000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa				19,800,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	19,800,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI			
TOTAL						2,868,841,286					3,453,998,428				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
									Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Daerah	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.212,812,808						2.312,812,808	
7	KECAMATAN						2.212,812,808						2.212,812,808	
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.101,262,808						2.201,262,808	
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.458,082,808						1.558,082,808	
7	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.458,082,808	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19 Orang/bulan	1.558,082,808	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	01	Administrasi Kespawahan Perangkat Daerah			14,580,000						14,580,000	
7	01	01	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	14,580,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Orang	14,580,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah			392,850,000						392,850,000	
7	01	01	02	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,650,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	4,650,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65,500,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	65,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	171,200,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	171,200,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,500,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	19,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,500,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 Laporan	128,500,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Laporan	128,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			203,500,000						203,500,000	
7	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,500,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	13,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	190,000,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32,250,000						32,250,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			Kab. Kampar, Tanjung Hillir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	26,750,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			Kab. Kampar, Tanjung Hillir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi		15 Unit	5,500,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										100,000,000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										100,000,000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan			Kab. Kampar, Tanjung Hillir, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi		3 Laporan	100,000,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										11,550,000				
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										11,550,000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen			Kab. Kampar, Tanjung Hillir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi		4 Dokumen	11,550,000	KECAMATAN TAPUNG HILIR			
TOTAL						2,212,812,808					2,212,812,808				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,581,531,304						2,277,000,000		
7	KECAMATAN														
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	1,469,981,304						100 Persen	2,162,000,000	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	989,311,671						25 %	1,300,000,000	
7	01	01	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang/Bulan	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	989,311,671	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat	13 Orang/Bulan	1,300,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	32,528,000						25 %	40,000,000	
7	01	01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Orang	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	32,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat	4 Orang	40,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	280,901,633						25 %	357,000,000	
7	01	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat, Masyarakat	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			5 Paket	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat, Masyarakat	5 Paket	60,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			4 Paket	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	126,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat, Masyarakat	4 Paket	140,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2 Paket	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	20,901,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat, Masyarakat	2 Paket	25,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			220 Laporan	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat, Masyarakat	220 Laporan	120,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	35,000,000						25 %	130,000,000	
7	01	01	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			5 Unit	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat	5 Unit	30,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			2 Unit	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat	2 Unit	100,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	73,240,000						25 %	85,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan		2 Laporan	15,600,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	2 Laporan	20,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan		2 Laporan	57,640,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	2 Laporan	65,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	0 %	25 %	59,000,000					25 %	250,000,000				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	24,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit		11 Unit	15,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	11 Unit	20,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	2 Unit	100,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	2 Unit	100,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 02	PROGRAM PENCELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	100,000,000					20 Persen	100,000,000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	0 %	25 %	100,000,000					25 %	100,000,000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan		2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	2 Laporan	100,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	11,550,000					20 Persen	15,000,000				
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Facilitasi,Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	100 %	0 %	25 %	11,550,000					25 %	15,000,000				
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Tipung Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN TAPUNG HULU			
TOTAL						1,581,531,304						2,277,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
											Daerah	Daerah				
7	UNSR KEWILAYAHAN															
7	KECAMATAN															
7	01	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	2,099,042,467							100 Persen	2,695,861,266	
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2,099,042,467								2,584,311,266	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	0 Bulan	14 Bulan	1,452,329,570	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					14 Bulan	1,937,598,369	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	1,452,329,570	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Berkualitas Dan Berdaya Saing				14 bulan	1,937,598,369	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	0 Orang	3 Orang	24,396,000							3 Orang	24,396,000	
7	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			3 Orang	24,396,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Orang	24,396,000	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	340,936,334							12 Bulan	340,936,334	
7	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,093,500	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	4,093,500	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	57,210,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	57,210,000	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	152,593,420	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	152,593,420	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	18,129,414	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	18,129,414	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			792 Dokumen	3,564,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					792 Dokumen	3,564,000	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183 Laporan	105,346,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					183 Laporan	105,346,000	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 Bulan	12 Bulan	247,338,000							12 Bulan	247,338,000	
7	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	17,738,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	17,738,000	RECAMATAN TAPUNG
7	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			9 Laporan	229,600,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Laporan	229,600,000	RECAMATAN TAPUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuran Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Pemungut Usuran Pemerintahan Daerah	5 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	34,042,563				1 Tahun	34,042,563			
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 Unit	1 Unit	25,502,563	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	25,502,563	RECAMATAN TAPUNG		
7 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit	8,540,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	14 Unit	8,540,000	RECAMATAN TAPUNG		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100,000,000				20 Persen	100,000,000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100,000,000				1 Laporan	100,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	100,000,000	RECAMATAN TAPUNG		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	11,550,000				20 Persen	11,550,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Disediakan	5 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	11,550,000				1 Tahun	11,550,000			
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3 Dokumen	3 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Dokumen	11,550,000	RECAMATAN TAPUNG		
TOTAL							2,210,592,467					2,695,861,266			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususny/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Nasional	Daerah				
7 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				276 Laporan	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	276 Laporan	200,000,000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE CAPAIAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	0 %		25 %			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	25 %	228,156,000		
7 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	37,876,000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	190,280,000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE CAPAIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	0 %		25 %			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	25 %	23,500,000		
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN TAMBANG	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Kelompok Saanan		Target	Pagu Indikatif
7	UNSR KEWILAYAHAN													
7	KECAMATAN					3.617,052,466						3.809,764,081		
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	3.139,631,070					100 Persen	3.263,471,415	
7	01	01	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 orang	0 orang	27 orang	2.274,837,445					27 orang	2.327,487,780	
7	01	01	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	2.327,487,780	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis, Impegnansi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	0 orang	4 orang	32,000,000					4 orang	35,000,000	
7	01	01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Orang	32,000,000					4 Orang	35,000,000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	431,212,854					1 Tahun	471,983,825	
7	01	01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket 6 Paket	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket 6 Paket	175,467,490	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	120,412,135	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah Paket Barang Cetaklan dan Pengandaian yang Disediakan			2 Paket	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	36,452,000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen		1500 Dokumen	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Dokumen	9,400,000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	130,232,200	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Ususan Pemerintah Daerah	24 Paket	0 Paket	6 Paket	28,200,000					6 Paket	30,600,000	
7	01	01	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6 Unit	28,200,000					6 Unit	30,600,000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	20 orang	0 orang	5 orang	285,066,660					5 orang	306,269,993	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Unsur/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unsur Pemerintahan Daerah				3 Laporan	22,816,660	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	22,807,493	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	262,250,000	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	283,362,500	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	88,314,111				1 Tahun	92,129,817	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	44,134,111	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	45,340,817	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	44,180,000	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	46,789,000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100,000,000					150,000,000	
7 01 02 2.04	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100,000,000					150,000,000	
7 01 02 2.04 03	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	100,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			2 Laporan	150,000,000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						365,721,396					384,007,666	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 Kegiatan		0 Kegiatan	12 Kegiatan	365,721,396	Kab. Kampar, Semua Kelurahan			12 Kegiatan	384,007,666	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				5 Unit	206,721,396	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	217,057,666	KECAMATAN KAMPAR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	159,000,000	Kab. Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Pokmas / Ormas	166,950,000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						11,700,000					12,285,000	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	11,700,000				20 Persen	12,285,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Disediakan	4 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	11,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	12,285,000	KECAMATAN KAMPAR
						TOTAL	3,617,052,466					3,809,764,081	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	KECAMATAN					2.023.659.513						2.245.464.139		
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen		0 Persen	1.912.109.513						2.133.336.639		
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		0 persen	1.355.009.146						1.528.159.603		
7	01	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN											
7	01	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											
7	01	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan 0 Orang/bulan		1.353.009.146	Kab. Kampar Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	18 Orang/Bulan 0 Orang/bulan	1.525.659.603	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	05	Administrasi Kewarganegaraan			14.000.000						15.500.000		
7	01	05	Tingkat pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah											
7	01	05	Jumlah Paket Pakai dan beserta Atribut Kelengkapan	18 Stel 0 Paket		7.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	18 Stel 0 Paket	8.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	02	Pengadaan Pakai dan beserta Atribut Kelengkapan											
7	01	02	Jumlah Paket Pakai dan beserta Atribut Kelengkapan	1 Orang		7.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	1 Orang	7.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
7	01	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
7	01	205	Administrasi Umum Perangkat Daerah			357.244.931						375.107.178		
7	01	205	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah											
7	01	205	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		7.990.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	1 Tahun	8.389.500	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
7	01	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		119.705.931	Kab. Kampar Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	8 Paket	125.691.228	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
7	01	04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket 0 Paket		70.489.800	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	0	3 Paket 0 Paket	74.014.250	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang											
7	01	05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 Paket		23.751.200	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan	0	2 Paket	24.958.760	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Usuan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disediakan				657 Laporan	135.308.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		657 Laporan	142.073.400	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	6.825.000				1 Unit	7.166.250				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	6.825.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	7.166.250	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	131.647.001				100 persen	156.051.001				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	13.312.001	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	13.977.601	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	118.335.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	142.073.400	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	47.383.435				100 persen	51.352.607				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	2 Unit	36.353.235	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 Unit	38.170.897	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	8 Unit	3.030.200	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	8 Unit	3.181.710	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	8.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	10.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen	20 Persen	20 Persen	100.000.000				20 Persen	100.000.000				
7 01 02 2.04	Polaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	100.000.000				100 persen	100.000.000				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Ususan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan 0 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas. Informasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas. Berkas Teknologi Informasi	0	2 Laporan 0 Laporan	100,000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	11,550,000					20 Persen	12,127,500		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya pelayanan administrasi pemerintahan desa se- Kecamatan	Paket		Paket	1 Paket	11,550,000					1 Paket	12,127,500		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4 Dokumen	4 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas. Berkas Teknologi Informasi	Terlaksananya Program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Dokumen	12,127,500	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
TOTAL						2,023,659,513	2,023,659,513					2,245,464,139			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Saasman	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Daerah	Target	Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.787.096,155						2.792.596,155		
7	KECAMATAN														
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	2.676.946,155						100 Persen	2.681.946,155	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	25 %	2.032.392,429						25 %	2.032.892,429	
7	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.032.392,429	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU			26 Orang/bulan	2.032.892,429	
7	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	25 %	422.173,726						25 %	424.673,726	
7	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	1 Paket	9.000,000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU DAN MASWABAKAT		1 Paket	9.500,000	9.500,000	
7	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 Paket	5 Paket	250,000,000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU DAN MASWABAKAT		5 Paket	250,500,000	250,500,000	
7	01	Penyediaan Bahan Logistik kantor			4 Paket	4 Paket	106,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	106,760,000	
7	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3 Paket	3 Paket	19,413,726	Semua Kelurahan Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	19,913,726	
7	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			84 Laporan	84 Laporan	37,500,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84 Laporan	38,000,000	
7	01	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	25 %	176,380,000						25 %	177,380,000	
7	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	29,600,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		2 Laporan	30,100,000	30,100,000	
7	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3 Laporan	3 Laporan	146,780,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		3 Laporan	147,280,000	147,280,000	
7	01	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	25 %	46,000,000						25 %	47,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.000.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU	1 Unit	36.500.000	KECAMATAN SIAK HULU		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	10.000.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU	18 Unit	10.500.000	KECAMATAN SIAK HULU		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100.000.000				20 Persen	100.000.000			
7 01 02 2.04	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	25 %	100.000.000				25 %	100.000.000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU DAN MASWAKAT	0 Laporan	100.000.000	KECAMATAN SIAK HULU		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	10.150.000				20 Persen	10.650.000			
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	25 %	10.150.000				25 %	10.650.000			
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	10.150.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN KANTOR CAMAT SIAK HULU DAN MASWAKAT	4 Dokumen	10.650.000	KECAMATAN SIAK HULU		
TOTAL							2.787.096.155				2.787.096.155	2.792.596.155			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional				
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
7 01							2.560.791,725						3.064.265,990	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	2.084.643,395						2.550.502,827	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	1.276.651,950						1.673.245,339	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan			19 Orang/bulan	1.276.651,950	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	19 Orang/bulan	1.673.245,339	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	8.132,000						8.945,200	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2 Orang	8.132,000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	2 Orang	8.945,200	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	306.476,021						337.236,122	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	8.038,860	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	1 Paket	8.842,746	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	169.524,903	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	4 Paket	189.477,393	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	71.604,750	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	5 Paket	75.877,725	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	17.817,508	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	2 Paket	19.599,258	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	2.520,000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	1 Dokumen	2.772,000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan			45 Laporan	36.970,000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	45 Laporan	40.667,000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	255.346,600						280.881,260	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	18.201,600	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	2 Laporan	20.021,760	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	237.145,000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor Camat XIII Koto Kampar	4 Laporan	260.859,500	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	238.036.824	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	250.194.906	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	30.582.924	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	31.995.616	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7.453.900	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Unit	8.199.290	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	210.000.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	100.000.000					20 Persen	100.000.000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	0 %	0 %	25 %	100.000.000					25 %	100.000.000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			2 Laporan	100.000.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	365.998.330					20 Persen	402.598.163		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan, serta terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100 %	0 %	0 %	25 %	365.998.330					25 %	402.598.163		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				4 unit	208.375.990	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 unit	229.213.523	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	157.622.400	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Pokmas / Ormas	173.384.640	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7 01 06	PROGRAM PEMBIAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program - program pembiayaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	10.150.000					20 Persen	11.165.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0 %	0 %	25 %	10.150.000					25 %	11.165.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disiliasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	10.150.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	11.165.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Page Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Prioritas Daerah		Target
TOTAL								2.560.791.725				3.064.265.990		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Daerah		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif
7															
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7	KECAMATAN						1,543,544,313					1,543,544,313			
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1,423,744,313					1,423,744,313			
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan kegiatan Administrasi umum Pemerintahan Daerah	0 %	100 %	1,030,184,431					1,030,184,431			
7	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1,030,184,431	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	11 Orang/bulan	1,030,184,431		
7	01	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan kegiatan Administrasi umum Pemerintahan Daerah	100 %	223,309,882					100 %	223,309,882		
7	01	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,466,486	Kab. Kampar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	54,466,486		
7	01	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	43,600,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Paket	43,600,000		
7	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11,168,402	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket	11,168,402		
7	01	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	114,075,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112 Laporan	114,075,000		
7	01	01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	137,270,000					100 %	137,270,000		
7	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13,680,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Laporan	13,680,000		
7	01	01	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8,000,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	8,000,000		
7	01	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	115,590,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	115,590,000		
7	01	01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,980,000					100 %	32,980,000		
7	01	01	01	Pemeliharaan dan Pengkondisian Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28,380,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	28,380,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 8 Unit	4,600,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Unit 8 Unit	4,600,000	KECAMATAN RUMBIO JAYA		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100,000,000				20 Persen	100,000,000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %		0 %	100 %	100,000,000				100 %	100,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 2 Laporan	100,000,000	KECAMATAN RUMBIO JAYA		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	19,800,000				20 Persen	19,800,000			
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	19,800,000				100 %	19,800,000			
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	19,800,000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	7 Dokumen	19,800,000	KECAMATAN RUMBIO JAYA		
TOTAL							1,543,544,313					1,543,544,313			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usruh/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
7 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		0 Tahun	2 Laporan	18,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	20,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pelelangan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Pelelangan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	28,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Paket	30,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	175,100,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	3 Laporan	175,100,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	5 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	47,000,000				1 Tahun	57,000,000				
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas/Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun			1 Tahun	30,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Tahun	35,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit			18 Unit	7,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	18 Unit	7,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sрана dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit			1 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100,000,000				20 Persen	100,000,000				
7 01 02 2.04	Polaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Pemenuhan atas Tercapainya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	5 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100,000,000				1 Laporan	100,000,000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			1 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	11,550,000				20 Persen	15,000,000				
7 01 06 2.01	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35 Bulan		0 Bulan	7 Bulan	11,550,000				7 Bulan	15,000,000				
7 01 06 2.01 03	fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disubstansi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Bulan			7 Bulan	11,550,000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	7 Bulan	15,000,000	KECAMATAN KAMPAR UTARA			
TOTAL							1,294,914,558				1,650,100,000					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penngkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Kelompok Sasaran	
UNSR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1,448,415,458					1,849,000,000	
7 01	Administrasi Keangasan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi	100 %	0 %	100 %	25 %	1,061,409,919	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,300,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	100 %	0 %	100 %	13 Orang/bulan	9,000,000					14,000,000	
7 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	25 %	9,000,000					14,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	2 Orang	25 %	185,755,539					206,500,000	
7 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	1 Paket	11,250,000	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	4 Paket	25 %	44,927,039					46,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	25 %	65,682,500					65,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	25 %	6,250,000					7,500,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	112 Laporan	0 Laporan	112 Laporan	25 %	158,536,500					179,000,000	
7 01	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintah daerah	100 %	0 %	100 %	25 %	17,891,500					19,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	25 %	140,645,000					160,000,000	KECAMATAN KAMPA
7 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	25 %	35,713,500					35,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	24,963,500	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0	25,500,000	KECAMATAN KAMPA		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	8,750,000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0	10,000,000	KECAMATAN KAMPA		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen	20 Persen	100,000,000						100,000,000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpakan kepada Camat	Terlaksananya pelayanan publik di kecamatan	100 %	0 %	25 %	100,000,000						100,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	2 Laporan		2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		0	0	100,000,000	KECAMATAN KAMPA		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen	20 Persen	11,550,000						14,000,000			
7 01 06 2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	0 %	25 %	11,550,000						14,000,000			
7 01 06 2.01 03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disalitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0	14,000,000	KECAMATAN KAMPA		
TOTAL						1,559,965,458						1,849,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional					Prioritas	
															Daerah	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,314,877,008					1,419,006,929				
7	KECAMATAN						1,203,327,008					1,307,456,929				
7	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen		100 Persen						100 Persen				
7	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	0 Persen		25 Persen	843,000,289					25 Persen				
7	01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/Bulan			8 Orang/Bulan	843,000,289	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Orang/Bulan	947,130,210	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Umum Kependidikan Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen		25 Persen	189,278,536					25 Persen	189,278,536			
7	01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	3,224,800	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		3 Paket	3,224,800	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	65,789,103	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		6 Paket	65,789,103	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	71,568,000	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		4 Paket	71,568,000	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	6,986,633	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		2 Paket	6,986,633	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111 Laporan			111 Laporan	41,710,000	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		111 Laporan	41,710,000	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0 Persen		25 Persen	136,691,620					25 Persen	136,691,620			
7	01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	16,966,620	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		2 Laporan	16,966,620	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan			6 Laporan	119,725,000	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		6 Laporan	119,725,000	KECAMATAN SIALO		
7	01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0 Persen		25 Persen	34,356,563					25 Persen	34,356,563			
7	01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diayarkan pajaknya	1 Unit			1 Unit	22,166,563	Kab. Kampar, Sialo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	22,166,563	KECAMATAN SIALO		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Daerah	Kelompok Saaran		Target	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	12,190,000	12,190,000	KECAMATAN SALO		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PELAYANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen					100,000,000	100,000,000			
7 01 02 2.04	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan					100,000,000	100,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan				2 Laporan	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	100,000,000	100,000,000	KECAMATAN SALO		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen					11,550,000	11,550,000			
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen					11,550,000	11,550,000			
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	11,550,000	11,550,000	KECAMATAN SALO		
TOTAL						1,314,877,008					1,419,006,929				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
7	UNSR KEWILAYAHAN													
7	KECAMATAN													
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	2.500.893.389						100 Persen	2.500.893.389
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 %	0 %	25 %	1.836.885.490	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 %	1.836.885.490
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan				0			14 bulan	
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	308.475.966						25 %	308.475.966
7	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	79.096.862	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	79.096.862
7	01	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	119.306.490	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	119.306.490
7	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	30.626.614	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	30.626.614
7	01	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	79.446.000	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	79.446.000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	24.687.590						25 %	24.687.590
7	01	01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Bulan	24.687.590	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Bulan	24.687.590
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	310.559.880						25 %	310.559.880
7	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	21.559.880	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	21.559.880
7	01	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	289.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Tahun	289.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik	100 %	20.284.463						25 %	20.284.463

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
										Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
7 01 01 2.09 01	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelemba dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelemba dan dibayarkan Pajaknya				1 Tahun	20.284.463	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	20.284.463	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilmba	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	757.356.558						20 Persen	757.356.558	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	0 %	0 %	25 %	757.356.558						25 %	757.356.558	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Tahun	544.356.558	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	544.356.558	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	213.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	213.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	15.000.000						20 Persen	15.000.000	
7 01 06 2.01	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0 %	0 %	25 %	15.000.000						25 %	15.000.000	
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan terhadap honor tim verifikasi dana Desa				10 Bulan	15.000.000	Kab. Kampar, Bangkinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Bulan	15.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
						TOTAL	3.273.249.947				3.273.249.947				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
7	UNSR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						1,561,994,616							2,218,000,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah						1,450,444,616							2,055,000,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						971,439,616							1,500,000,000		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	971,439,616	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Orang/bulan	1,500,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.05	Administrasi Kespawahan Perangkat Daerah						15,000,000							30,000,000		
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2 Orang	15,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	30,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						208,000,000							227,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	70,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	60,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	80,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	85,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	7,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			150 Laporan	50,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Laporan	70,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25,000,000							50,000,000		
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	25,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						204,000,000							211,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	19,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	21,000,000	KECAMATAN KUOK	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			7 Laporan	185,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Laporan	190,000,000	KECAMATAN KUOK	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Unsur/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,005,000					37,000,000			
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit				22,505,000	Kab. Kampar Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	30,000,000	RECAMATAN KUOK		
7 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit				4,500,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	7,000,000	RECAMATAN KUOK		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100,000,000					150,000,000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100,000,000					150,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan				100,000,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		3 Laporan	150,000,000	RECAMATAN KUOK		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						11,550,000					13,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						11,550,000					13,000,000			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disalitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen				11,550,000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	13,000,000	RECAMATAN KUOK		
TOTAL							1,561,994,616					2,218,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional						Prioritas	
7																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7	KECAMATAN						3,594,807,403							4,371,700,000			
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	2,751,257,403							100 Porsen	3,467,700,000		
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 orang/bln	32 orang/bln	32 orang/bln	2,004,257,403							32 orang/bln	2,504,500,000		
7	01	01	01				2,000,257,403	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN se Kecamatan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,500,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				4,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN se Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				9,000,000							2 orang	18,000,000		
7	01	01	01				9,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	ASN yang Mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	18,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				339,000,000							25 persen	374,200,000		
7	01	01	01				2,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	1 Paket	1 Paket	2,200,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				130,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	5 Paket	5 Paket	143,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				125,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	3 Paket	3 Paket	140,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				14,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	2 Paket	2 Paket	15,500,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				3,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7	01	01	01				65,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	SKPD Kantor Camat Bangkinang Kota	1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usus/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana							Nasional	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Milik daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		0 persen	25 persen	60,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	25 persen	80,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	2 Unit	25,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	50,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	7 Unit	55,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	16 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	259,000,000						4 Laporan	266,000,000			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	70,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan dan Tenaga Honorer	4 Laporan	77,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	189,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan dan Tenaga Honorer	1 Laporan	189,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penujangan Urusan Pemerintahan daerah	100 persen		0 persen	25 persen	80,000,000						25 persen	225,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mobil Dinas Camat, Bangunan Gedung Kecamatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	35,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	35,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mobil Dinas Camat, Bangunan Gedung Kecamatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	40,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung yang Terakut dengan Kewenangan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mobil Dinas Camat, Bangunan Gedung Kecamatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	150,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen		0 Persen	20 Persen	100,000,000						20 Persen	100,000,000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	100,000,000						2 Laporan	100,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terakut dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			Tooth Masyarakat Pemuda dan Pokmas Kecamatan	2 Laporan	100,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilmba	100 Persen		0 Persen	20 Persen	732,000,000						20 Persen	790,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	
										Nasional					Daerah
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	732,000,000				4 Laporan	790,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Paket	376,600,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	400,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	355,400,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Pokmas / Ormas	390,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen		0 Persen	20 Persen	11,550,000				20 Persen	14,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	11,550,000				8 dokumen	14,000,000			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	14,000,000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA		
TOTAL						3,594,807,403	4,371,700,000					4,371,700,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Target		Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,997,264,700						2,171,508,000		
7	KECAMATAN														
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	1,885,714,700						100 Persen	2,048,803,000	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	25 %	1,531,156,700						25 %	1,659,000,000	
7	01	01	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,531,156,700	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Saling	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		20 Orang/bulan	1,659,000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	10,000,000						25 %	11,000,000	
7	01	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	2 Orang	10,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		2 Orang	11,000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	215,458,000						25 %	236,903,000	
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	9,900,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		1 Paket	9,900,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	46,800,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		4 Paket	51,400,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	68,100,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		5 Paket	74,900,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	12,750,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		2 Paket	14,025,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	3,708,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		1 Dokumen	4,076,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		446 Laporan	446 Laporan	75,100,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		446 Laporan	82,600,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	4,000,000						25 %	4,400,000	
7	01	01	Pengadaan Mebel		1 Unit	1 Unit	4,000,000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0		1 Unit	4,400,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	95.000.000				25 %	104.400.000			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	14.700.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	16.100.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	80.300.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	88.300.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	30.100.000				25 %	33.100.000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	22.100.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Unit	24.300.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	8.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	4 Unit	8.800.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	100.000.000				20 Persen	110.000.000			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	0 %	0 %	25 %	100.000.000				25 %	110.000.000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2 Laporan	110.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	11.550.000				20 Persen	12.705.000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0 %	0 %	25 %	11.550.000				25 %	12.705.000			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disiliasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	11.550.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	12.705.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH		
TOTAL						1.997.264.700	2.171.598.000					2.171.598.000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Nasional					Daerah
7																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.435.008,090								2.766.700,000		
	KECAMATAN																
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		0 Persen	100 Persen	1.957.458,090								2.136.900,000		
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 %	100 %	1.425.117,190								1.550.000,000		
7	01	01	01	Jumlah Orang yang Menemuka gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/bulan	1.425.117,190	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					15 Orang/bulan	1.550.000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	100 %												
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %												
7	01	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			241.336,000								258.850,000		
7	01	01	01	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.652,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				1 Paket	10.850,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	02	01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.550,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 Paket	40.000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	04	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	76.799,100	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 Paket	80.000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	05	01	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	2 Paket	16.828,900	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				2 Paket	17.500,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	09	01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	99.506,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				1 Laporan	110.500,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %									42.550,000		
7	01	01	06	01	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	41.598,900	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi				6 Unit	42.550,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %									210,000,000		
7	01	01	02	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	29.226,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi				3 Laporan	35.000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7	01	01	04	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	162.720,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi				2 Laporan	175.000,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkt Daerah Penanggung Jawab
										Prioritas						
										Nasional	Daerah					
		yang Disediakan						Semua Kelurahan								
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 % 100 %	0 % 0 %		100 % 100 %	57.460.000						100 % 100 %	75.500.000		
7 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajanya			1 Unit	1 Unit	25.750.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Kantor	1 Unit	1 Unit	30.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	31.710.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Kantor	1 Unit	1 Unit	45.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100.000.000							150.000.000		
7 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditempatkan kepada Camat						100.000.000							150.000.000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditempatkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditempatkan				2 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Masyarakat Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dihaba	100 Persen			20 Persen	366.000.000						20 Persen	460.000.000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Insentif RT/RW) dan Operasional Lembaga Kelurahan SungaiPagar	100 % 100 %	0 % 0 %		100 % 100 %	366.000.000						100 % 100 %	460.000.000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terimakasihnya pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0 Unit 8 Paket	0 Unit 8 Paket	295.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Sungai Pagar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tersedianya Infrastruktur Yang Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tersedianya Infrastruktur Yang Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tersedianya Infrastruktur Yang Berkualitas	0 Unit 8 Paket	0 Unit 8 Paket	375.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Lembaga	70.900.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Sungai Pagar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas	5 Lembaga	5 Lembaga	85.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen			20 Persen	11.550.000						20 Persen	19.800.000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	100 Dokumen		0 Dokumen	25 Dokumen	11,550,000					19,800,000		
7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	7 Dokumen	19,800,000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
TOTAL							2,435,008,090					2,766,700,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
7															
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,412,104,765							1,624,438,455	
7	KECAMATAN														
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	0 Persen		100 Persen	1,300,554,765						100 Persen	1,512,888,455	
7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %		25 %	788,283,505						25 %	888,283,505	
7	01	01	Jumlah Orang yang Menemuka Gaji dan Tunjangan ASN			11 Orang/bulan	788,283,505	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat	11 Orang/bulan	888,283,505	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	16,776,000						25 %	16,776,000	
7	01	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	16,776,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat	2 Orang	16,776,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	261,320,911						25 %	326,733,500	
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2,473,200	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	1 Paket	3,500,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	89,939,571	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	4 Paket	115,483,500	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	93,097,320	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	3 Paket	113,407,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	8,402,820	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	2 Paket	9,243,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350 Laporan	67,408,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	350 Laporan	85,150,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	40,719,153						25 %	57,791,000	
7	01	01	Pengadaan Mebel			5 Unit	20,719,153	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara	5 Unit	22,791,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	20,000,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara	1 Unit	35,000,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	155,366,950						25 %	155,366,950	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usulan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Penangkt Daerah Penanggung Jawab		
								Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,607,950	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Masyarakat	12 Laporan	15,607,950	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	139,759,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Masyarakat	6 Laporan	139,759,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	0 %		25 %	38,088,246				25 %	67,937,500				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21,761,574	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1 Unit	23,937,500	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1,326,675	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	8 Unit	4,000,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1 Unit	40,000,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Keuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen		20 Persen	100,000,000				20 Persen	100,000,000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	0 %		25 %	100,000,000				25 %	100,000,000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindakannya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen		20 Persen	11,550,000				20 Persen	11,550,000				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0 %		25 %	11,550,000				25 %	11,550,000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				36 Dokumen	11,550,000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	36 Dokumen	11,550,000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN			
TOTAL							1,412,104,765	1,412,104,765				1,624,438,455				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Proritas					
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7	KECAMATAN						1,915,047,899								2,106,803,979	
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	100 Persen	1,798,547,899							100 Persen	1,990,303,979	
7	01	01	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	0 %	25 %	1,358,147,899	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			25 %	1,487,303,979	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Orang yang Menemuka gaji dan Tunjangan ASN	100 %	0 %	16 Orang/bulan	9,900,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			16 Orang/bulan	1,487,303,979	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	9,900,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			25 %	12,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Orang yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	1 Orang	1 Orang	232,500,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			1 Orang	9,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	25 %	7,500,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			25 %	257,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	35,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			1 Paket	40,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Paket Pelatihan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan			4 Paket	120,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			4 Paket	136,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	10,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			3 Paket	12,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	60,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			2 Paket	60,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	30,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			1 Laporan	30,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %	135,000,000	Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			25 %	165,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit		Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			5 Unit		KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	25 %		Kab. Kampar Perhentian Raja Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			25 %		KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usulan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	15,000,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Pantai Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya jasa kebersihan/keaman an administrasi dan pelaksanaan tugas kegiatan kantor	2 Laporan	15,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	120,000,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya jasa kebersihan/keaman an administrasi dan pelaksanaan tugas kegiatan kantor	2 Laporan	150,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Perumahan Urusan Pemerintahan daerah	100 %	0 %		25 %	33,000,000						25 %	39,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21,000,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpeliharanya Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Unit	24,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	12,000,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpeliharanya Peralatan dan Perengkapan Kantor	8 Unit	15,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 02	PROGRAM PENTELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen	0 Persen		20 Persen	100,000,000						20 Persen	100,000,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0 %		25 %	100,000,000						25 %	100,000,000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	100,000,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			Terselenggaranya Kegiatan yang Dilimpahkan kepada Camat melalui BKK Provinsi Riau	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	0 Persen		20 Persen	16,500,000						20 Persen	16,500,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0 %		25 %	16,500,000						25 %	16,500,000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	16,500,000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa	20 Dokumen	16,500,000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
TOTAL															2,106,803,979	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Target		Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,441,227,850						1,595,129,181		
7	KECAMATAN						1,329,677,850						1,472,424,181		
7	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	901,565,358						1,017,218,940		
7	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	901,565,358						1,017,218,940	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.02	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	100 %	0 %	0 %	11 Orang/bulan	901,565,358	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	0	11 Orang/bulan	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	8,300,000						9,130,000		
7	01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	0 %	0 %	2 Orang	8,300,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	2 Orang	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	193,313,930						196,926,823		
7	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	5 Paket	13,574,839	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	5 Paket	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	4 Paket	30,181,714	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	4 Paket	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	5 Paket	47,936,679	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	5 Paket	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	2 Paket	19,285,698	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	2 Paket	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	0 %	0 %	80 Laporan	82,335,000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	80 Laporan	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	172,440,000						189,684,000		
7	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	2 Laporan	25,200,000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	2 Laporan	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	0 %	0 %	6 Laporan	147,240,000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	6 Laporan	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	0 %	25 %	54,058,562						59,464,418		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional						Daerah
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diayarkan Pakajanya	Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diayarkan Pakajanya				1 Unit	44.310.362	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	48.741.398	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	97.48.200	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	10.723.020	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	100 Persen			20 Persen	100.000.000				20 Persen	110.000.000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %			25 %	100.000.000				25 %	110.000.000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	100.000.000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		2 Laporan	110.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen			20 Persen	11.550.000				20 Persen	12.705.000				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %			25 %	11.550.000				25 %	12.705.000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	11.550.000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	12.705.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			
TOTAL							1.441.227.850	1.595.129.181								

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Nasional				
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	22.881.162.448						25.818.986.687	
8 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	262.092.122						369.025.770	
8 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	150.007.622	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Dokumen	175.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	15.916.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Dokumen	22.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	15.916.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Dokumen	22.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	15.916.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Dokumen	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	15.916.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	15.916.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Laporan	32.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	32.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Laporan	43.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	2.359.206.390						2.790.583.499	
8 01 01 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.346.289.490	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		25 Orang/bulan	2.776.574.909	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	10.916.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Laporan	12.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 02 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	50.000.000						55.000.000	
8 01 01 02 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Orang	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Orang	55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Usuan/Bidang Usuan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
															Nasional	Daerah
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	973.328.568					100 persen	1.046.158.000			
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.998.745	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	159.801.689	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	180.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.135.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	124.613.134	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	140.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.780.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	6.158.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	616.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	640.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	400.000.000					100 persen	1.235.000.000			
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	285.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	732.342.224					100 persen	868.156.668			
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93.270.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	32.275.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	606.797.224	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	728.156.668	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Saaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
														Nasional	Daerah
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	394,801,900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	455,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	187,417,400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	5 Unit	190,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	57,104,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Unit	65,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150,280,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Unit	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	2,496,507,764				20 Persen	2,750,000,000			
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penanaman Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	2,496,507,764				100 persen	2,750,000,000			
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	954,235,972	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	100 Orang	990,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1,542,251,792	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	1,700,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBARA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	6,733,060,377				20 Persen	7,170,005,000			
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	6,733,060,377				100 persen	7,170,005,000			
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	3,414,496,342	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	100 Orang	3,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	337,522,000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	100 Orang	390,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkit Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Nasional	Daerah					
8 01 03 2.01 05	Parai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	3.250.005,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KEMASYARAKATAN	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	965.516,275				20 Persen	1.100.057,750			
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	965.516,275				100 persen	1.100.057,750			
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	350.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	100 Orang	380.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	350.057,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	2.625.546,414				20 Persen	3.020.000,000			
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	2.625.546,414				100 persen	3.020.000,000			
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penguat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penguat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	2.300.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penguat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Umat Beragama dan Penguat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	100 Orang	350.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Saaran	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah					
8 01 05 2.01 04	Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat, Beragama dan Penghayat, Kepercayaan di Daerah	100 Orang	0 Persen	0 Persen	100 Orang	328.196,776	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	100 Orang	350.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KAWASPADAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100 Persen	0 Persen	0 Persen	20 Persen	4.684.760,414					20 Persen	4.960.000,000			
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teroris dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	0 persen	0 persen	100 persen	4.684.760,414					100 persen	4.960.000,000			
8 01 06 2.01 03	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang			250 Orang	946.157,240	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	250 Orang	1.100.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06 2.01 04	Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang			100 Orang	420.806,500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	100 Orang	450.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06 2.01 05	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan			1 Laporan	454.749,676	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	480.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06 2.01 06	Peleaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	2.863.047,004	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	2.900.000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
													TOTAL	22.681.162,448	25.818.986,687	